KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Alamat : Jl. Imam Bonjol No.37 RT.08, Kel.Melayu, Tenggarong Kutai Kartanegara
Telp. 0541-6720100 Email : lpp.smd@gmail.com

25 Maret 2024

Yth,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Kalimantan Timur
di -
Samarinda

SURAT PENGANTAR

Nomor : W18.PAS.7. PR.04.01- 0751

NO	Naskah Dinas yang Dikirimkan	Banyaknya	Keterangan
1.	Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Triwulan I Tahun 2024 pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong	1 Berkas	Demikian untuk menjadi periksa

KEPALA

Triana Agustin
NIP 198208282000122001

Tembusan:
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI.

LAPORAN

SPIP

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TRIWULAN I TAHUN 2024

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR

LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jalan: Imam Bonjol NO.37 RT.08 Kelurahan Melayu. Tenggarong - Kutai Kartanegara
Laman : http://lppsamarinda.kemenkumham.go.id/
E-mail : lpp.smd@gmail

Nomor : W18.PAS.7.PW.01.01- 0751 25 Maret 2024
Lampiran : 1(satu) berkas
Hal : Laporan Penyelenggaraan SPIP
Triwulan I Tahun 2024

Yth : Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kalimantan Timur
di
Samarinda

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.HH-02.PW.02.03 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.HH-02.PW.02.03 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, dengan ini kami sampaikan laporan Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong Triwulan I Tahun 2024, dengan pokok-pokok sebagai berikut :

1. Kemajuan Penyelenggaraan SPIP

   Realisasi kemajuan penyelenggaraan SPIP sampai dengan Triwulan I mencapai 40 **%** dari target pada tahun 2024 Capaian ini disebabkan :

   a. Pencapaian Realisasi kemajuan penyelenggaraan SPIP didukung dengan :

      1. Telah dibentuknya Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melalui Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong Nomor: W.18.PAS.PAS.7-0339-PW.01.01 Tahun 2024 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong pada tanggal 15 Januari 2024;

2. Telah dibentuknya SK Pembentukan Satuan Tugas dan Sekretariat Penyelenggaraan Manajemen Risiko melalui Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong Nomor: W.18.PAS.PAS.7-0747-PW.01.01 Tahun 2024 tentang Pembentukan Satuan Tugas dan Sekretariat Penyelenggaraan Manajemen Risiko Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong pada tanggal 25 Maret 2024;
3. Telah dibentuknya SK Tim Assesor Penilaian Mandiri Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melalui Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong Nomor: W18.PAS.PAS.7-0442-PW.01.01 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Assesor Penilaian Mandiri Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong pada tanggal 21 Februari 2024;
4. Telah dibentuknya SK Unit Pemilik Risiko (UPR) melalui Keputusan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong Nomor: W.18.PAS.PAS.7-0454-PW.01.01 Tahun 2024 tentang Pembentukan Unit Pemilik Risiko (UPR) Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong pada tanggal 21 Februari 2024;
5. Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong, pada tanggal 22 Januari 2024;
6. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong, pada tanggal 18 Maret 2024;

b. Adapun hambatan-hambatan yang ditemukan dalam proses penyelenggaraan SPIP di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong yaitu :

   1. Masih adanya beberapa pegawai yang belum memahami pelaksanaan SPIP dan Pembuatan Manajemen Risiko di Sub Bagian/Seksi di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

Rincian kemajuan penyelenggaraan SPIP dapat dilihat pada lampiran.

2. Rencana Tindaklanjut pada Triwulan selanjutnya

   Atas capaian tersebut, rencana tindaklanjut Triwulan II adalah :

   a. Untuk mengatasi hambatan/kondisi yang tidak mendukung dalam pencapaian target dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :

      Memaksimalkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada dengan merangkap beberapa tugas dalam pelaksanaan penerapan SPIP di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong;

   b. Rencana tindaklanjut untuk Triwulan selanjutnya dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :

      1. Mengirim pegawai/pejabat untuk mengikuti BIMTEK baik yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur baik secara langsung maupun melalui zoom, untuk meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) Pegawai di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong;
      2. Melakukan monitoring secara berjenjang dan memberikan motivasi serta arahan kepada seluruh pegawai tentang penting dan perlunya koordinasi antara JFU, JFT serta pejabat Struktural agar dapat terlaksananya SPIP secara maksimal dan dapat terealisasikannya Rencana Aksi Penanganan Risiko berdasarkan Manajemen Risiko yang telah dibuat di masing-masing Seksi di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

Demikian kami sampaikan, untuk menjadi periksa.

KEPALA

Ditandatangani secara elektronik oleh

Triana Agustin

NIP 198208282000122001

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM;
2. Inspektur Jenderal Kemeneterian Hukum dan HAM.

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jalan: Imam Bonjol NO.37 RT.08 Kelurahan Melayu. Tenggarong - Kutai Kartanegara
Laman : http://lppsamarinda.kemenkumham.go.id/
E-mail : lpp.smd@gmail

LAPORAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) TRIWULAN I TAHUN 2024 LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2013 tentang Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH-02.PW.02.03 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia RI Nomor 05 Tahun 2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor:M.HH-02.PR.03.01 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pelaporan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI;
5. Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP;
6. Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-690/K/DH/2012 tentang Pedoman Pemantauan Perkembangan Penyelenggaraan SPIP.

B. Tujuan SPIP

Sebagai media akuntabilitas pelaporan dan bahan pemantauan dan evaluasi atas penyelenggaraan SPIP di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

C. Ruang lingkup

Laporan ini meliputi penyelenggaraan SPIP di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

BAB II KEMAJUAN PENYELENGGARAAN SPIP

A. Persiapan

Realisasi persiapan penyelenggaraan SPIP Tahun 2024 dengan rincian kegiatan dalam tahap persiapan sebagai berikut :

a. Pembentukan Satgas
    1. Telah dilaksanakan pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melalui Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong Nomor: W.18.PAS.PAS.7-0339-PW.01.01 Tahun 2024 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong pada tanggal 15 Januari 2024;
    2. Telah dilaksanakan pembentukan Satuan Tugas dan Sekretariat Penyelenggaraan Manajemen Risiko melalui Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong Nomor: W.18.PAS.PAS.7-0747-PW.01.01 Tahun 2024 tentang Pembentukan Satuan Tugas dan Sekretariat Penyelenggaraan Manajemen Risiko Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong pada tanggal 25 Maret 2024;
    3. Telah dilaksanakan Pembentukan Tim Assesor Penilaian Mandiri Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melalui Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong Nomor: W18.PAS.PAS.7-0442-PW.01.01 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Assesor Penilaian Mandiri Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong pada tanggal 21 Februari 2024;
    4. Telah dilaksanakan Pembentukan Unit Pemilik Risiko (UPR) melalui Keputusan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong Nomor: W.18.PAS.PAS.7-0454-PW.01.01 Tahun 2024 tentang Pembentukan Unit Pemilik Risiko (UPR) Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong pada tanggal 21 Februari 2024;

b. Pemahaman (*Knowledge*)
   Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong, pada tanggal 22 Januari 2024 (**dokumen kegiatan terlampir)**.

c. Pemetaan (*Maping*)
   Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong, pada tanggal 18 Maret 2024 (**dokumen kegiatan terlampir**).

B. Pelaksanaan
   a. Penilaian Resiko
      Penilaian risiko merupakan salah satu unsur penting dalam penerapan SPIP, karena dengan penilaian risiko akan diidentifikasi kendala/hambatan baik internal maupun eksternal yang akan mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran organisasi. Dengan penilaian risiko juga akan menentukan langkah antisipasi untuk diambil

[illegible]

cara terbaik agar apa yang menjadi rencana kegiatan dapat dilaksanakan dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam unsur penilaian risiko terdapat 2 (dua) sub unsur dan kegiatannya telah dibahas dalam forum rapat mitigasi risiko dengan hasil sebagai berikut:

I. Identifikasi Risiko (matrik terlampir dari masing-masing Seksi) terdiri dari :
   - Penetapan tujuan program/kegiatan;
   - Indentifikasi risiko.

II. Identifikasi Risiko (matrik terlampir dari masing-masing Seksi) terdiri dari :
   - Analisis Risiko;
   - Evaluasi Risiko;
   - Rencana Aksi Penanganan Risiko;
   - Pemantauan Risiko;
   - Pengendalian Kegiatan Risiko.

b. Pembangunan infrastruktur (*norming*)

Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong telah dilakukan terkait dengan perbaikan *area of improvement* dan pengelolaan risiko melalui pembentukan Tim Satgas SPIP Tahun 2024 yang mengawal dan mengoordinasikan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

c. Internalisasi / implementasi (*forming*)

Kegiatan yang telah dilakukan terkait Internalisasi/Implementasi SPIP di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong adalah: peningkatan pemahaman atas penyelenggaraan SPIP khususnya terkait dengan penguatan Maturitas SPIP (**dokumen terlampir**).

C. Pengembangan berkelanjutan (*Performing*)

Realisasi pengembangan berkelanjutan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong sampai dengan 25 Maret 2024 sudah sangat baik, tapi ada beberapa kegiatan yang akan di rencanakan di Triwulan Selanjutnya agar penyelenggaraan SPIP di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong terlaksana dengan maksimal, diantaranya yaitu :

Melakukan monitoring secara berjenjang dan memberikan motivasi serta arahan kepada seluruh pegawai tentang penting dan perlunya koordinasi antara JFU, JFT serta pejabat Struktural agar dapat terlaksananya SPIP secara maksimal dan dapat terealisasikannya Rencana Aksi Penanganan Risiko berdasarkan Manajemen Risiko yang telah dibuat di masing-masing Seksi di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

[illegible]

BAB III PENUTUP

A. Pelaksanaan rencana tindak lanjut

Atas capaian kerangka Penyelenggaraan SPIP Triwulan I Tahun 2024 di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong, Rencana Tindak Lanjut di Triwulan II adalah sebagai berikut :

a. Melakukan sosiaisasi rutin kepada seluruh Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong agar dapat terlaksananya SPIP secara maksimal dan dapat terealisasikannya Rencana Aksi Penanganan Risiko berdasarkan Manajemen Risiko yang telah dibuat di masing-masing Seksi di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

b. Melakukan monitoring secara berjenjang dan memberikan motivasi serta arahan kepada seluruh pegawai tentang penting dan perlunya koordinasi antara JFU, JFT serta pejabat Struktural.

B. Hambatan, penyebab dan alternatif pemecahan

Adapun hambatan-hambatan yang ditemukan dalam proses penyelenggaraan SPIP di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong yaitu :

Masih adanya beberapa pegawai yang belum memahami pelaksanaan SPIP dan Pembuatan Manajemen Risiko di Sub Bidang/Bagian di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

Alternatif pemecahan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah :

a. Memaksimalkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada dengan merangkap beberapa tugas dalam pelaksanaan penerapan SPIP dan pembuatan Manajemen Risiko di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong;

b. Mengirim pegawai/pejabat untuk mengikuti BIMTEK yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur baik secara langsung maupun melalui zoom, untuk meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) Pegawai di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong;

c. Melakukan monitoring secara berjenjang dan memberikan motivasi serta arahan kepada seluruh pegawai tentang penting dan perlunya koordinasi antara JFU, JFT serta pejabat Struktural agar dapat terlaksananya SPIP secara maksimal dan dapat terealisasikannya Rencana Aksi Penanganan Risiko berdasarkan Manajemen Risiko yang telah dibuat di masing-masing Seksi di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

C. Rencana aksi Triwulan berikutnya yaitu melaksanakan sosialisasi serta melaksanakan pendampingan penerapan Manajemen Risiko pada masing-masing seksi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Verifikasi dokumen dapat dicek melalui tautan: [illegible]

D. Tindak lanjut penyelenggaraan SPIP di Triwulan II yaitu :
   a. Melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan implementasi SPIP di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong;
   b. Menyusun Laporan SPIP Triwulan II sesuai dengan format Laporan SPIP berdasarkan arahan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur;
   c. Melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan SPIP di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tanggarong.

Tenggarong, 25 Maret 2024
KEPALA
Ditandatangani secara elektronik oleh:
Triana Agustin
NIP 198208282000122001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui laman: [illegible]

LAPORAN KEMAJUAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) TAHUN 2024
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

NO	TAHAPAN	INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	BUKTI DOKUMEN	VOLUME					% CAPAIAN
					RENCANA SATU TAHUN	REALISASI				
						TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	
A.	**PERSIAPAN**									
1.	Pemahaman	Jumlah laporan kegiatan sosialisasi/ FGD/ Diseminasi tentang SPIP	Jumlah Pegawai	Laporan kegiatan, daftar hadir, dan foto Sosialisasi tentang SPIP.	4	1	-	-	-	25 %
		Jumlah laporan kegiatan terkait SPIP	Laporan	Laporan kegiatan Sosialisasi SPIP, SK UPR, SK Tim Assesor, SK Satgas Sekretariat Penyelenggaraan Manajemen Risiko, dan SK Satgas SPIP	4	1	-	-	-	25 %
2.	Pemetaan	Jumlah Laporan Kegiatan SPIP di masing-masing Seksi pada LPP Tenggarong	Dokumen	Laporan Rencana Kegiatan pada tahun 2024 (RKT)	8	2	-	-		25 %
3.	Penyusunan Rencana Monitoring Kegiatan Penyelenggaraan	Jumlah dokumen rencana Monitoring	Dokumen	Laporan Monitoring dan Evaluasi SPIP	4	1	-	-	-	25 %
B.	**PELAKSANAAN**									
1.	Tingkat entitas (Eselon I, Kanwil/ Unit Pelaksana Teknis)	Jumlah dokumen penilaian risiko Level Entitas dan Aktifitas	Dokumen	Pernyataan Fakta Integritas	1	1	-	-	-	100 %
		Jumlah kebijakan/ prosedur/ pedoman dalam	Dokumen	Kebijakan/ SOP/ SK/ Nota dinas/ dokumen lainnya	4	4	-	-	-	100 %

		pembangunan / rehab infrastruktur								
2.	Tingkat Kegiatan (Kegiatan-kegiatan pada Eselon IV)	Jumlah dokumen penilaian risiko Level Entitas dan Aktifitas	Dokumen	Dokumen Profil Risiko Dan Peta Risiko	4	1	-	-	-	25 %
		Jumlah kebijakan/ prosedur/ pedoman dalam pembangunan / rehab infrastruktur	Dokumen	Kebijakan/ SOP/ SK/ Nota dinas/ dokumen lainnya	4	4	-	-	-	100 %
		Jumlah kegiatan internalisasi/ Implementasi	Kegiatan	Laporan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan SPIP	4	1	-	-	-	25 %
3.	Pengembangan Berkelanjutan	Jumlah rapat berkala	Kegiatan	Laporan dan daftar hadir	4	1	-	-	-	25 %
		Jumlah Laporan kemajuan penyelenggaraan SPIP	Dokumen	Dokumen SPIP triwulanan	4	1	-	-	-	25 %
		Presentase penyelesaian tindak lanjut	Dokumen	Laporan Tindak Lanjut Temuan BPK dan ITJEN tergabung dalam Kantor Wilayah	-	-	-	-	-	-
				JUMLAH	**45**	**18**	**-**	**-**	**-**	**40%**

[illegible]

PENETAPAN TUJUAN

Unit Pemilik Risiko : Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong
Periode Penerapan : Tahun 2024

No	Strategi/ Program/ Kegiatan	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Permasalahan
1	2	3	4	5
1	Pengelolaan Administratratif dan Fasilitatif Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	Belum dilakukan penghapusan BMN sebagai tindaklanjut pembangunan lanjutan Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong
2			Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	Kurangnya SDM baik Pejabat Struktural maupun JFU
3			Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	Pejabat Administrasi Eselon IV belum memiliki Tanda Tangan Elektronik
4			Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	Kesalahan penempatan dalam perekaman akun belanja
5			Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	Realisasi anggaran belum sesuai dengan rencana panarikan dana
6	Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong	Terwujudnya pelayanan pemasyarakatan yang sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik, melalui peningkatan pengawasan dan pengelolaan layanan di bidang pemasyarakatan	Menurunnya tahanan yang overstaying	Masih terdapat Tahanan yang berstatus overstaying
7			Menurunnya persentase overkapasitas	Over kapasitas Warga Binaan Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong sebesar 150%
8			Menurunnya jumlah residivis	Masih terdapat Warga Binaan yang mengulangi tindak pidana

9			Meningkatnya jumlah Narapidana yang memperoleh pendidikan	Kurangnya minat program kejar paket bagi Warga Binaan
10	Pelaksanaan penegakan keamanan dan ketertiban	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban sesuai standar	Kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak Didik pelaku gangguan kamtib	Masih ada pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh Narapidana

Tenggarong, 04 Maret 2024

KEPALA

Triana Agustin

NIP 198208282000122001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan: https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

IDENTIFIKASI RISIKO (DAFTAR RISIKO)

Unit Pemilik Risiko : Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong
Periode Penerapan : Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Permasalahan	Risiko		Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern yang Ada	Sisa Risiko
			Pernyataan	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang terkena		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	Belum dilakukan penghapusan BMN sebagai tindaklanjut pembangunan lanjutan Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong	Keterlambatan pembangunan lajutan Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong	Subbagian Tata Usaha	Belum ada tindaklanjut dari KPKNL	Eksternal	UC	Pengerjaan pembangunan lanjutan Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong tidak sesuai target	UPT	Melakukan usulan penghapusan BMN	Keterlambatan pembangunan lajutan Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong
2	Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	Kurangnya SDM baik Pejabat Struktural maupun JFU	Terjadi tumpang tindih beban tugas	Subbagian Tata Usaha	Purna Tugas Kepala Subbagian Tata Usaha dan kurangnya anggota regu pengamanan	Internal	C	Target kinerja tidak terpenuhi	UPT	Usul Promosi Jabatan Administrasi Pegawai Negeri Sipil Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong dan permohonan SDM	Terjadi tumpang tindih beban tugas
3	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	Pejabat Administrasi Eselon IV belum memiliki Tanda Tangan Elektronik	Terkendala dalam penggunaan aplikasi SRIKANDI	Subbagian Tata Usaha	Tidak ada tindaklanjut dari kendala pendaftaran tanda tangan elektronik	Internal	C	Pemenuhan target penggunaan aplikasi SRIKANDI tidak tercapai	UPT	Melakukan pendaftaran permohonan tanda tangan elektronik Pejabat Administrasi Eselon IV	Terkendala dalam penggunaan aplikasi SRIKANDI
4	Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	Kesalahan penempatan dalam perekaman akun belanja	Penatausahaan keuangan kurang optimal	Subbagian Tata Usaha	Keliru dalam memilih akun belanja	Internal	C	Penurunan nilai IKPA	UPT	Melakukan cross check setiap penginputan	Penatausahaan keuangan kurang optimal
5	Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	Realisasi anggaran belum sesuai dengan rencana panarikan dana	Penggunaan anggaran kurang optimal	Subbagian Tata Usaha	Kurangnya pengawasan berjenjang	Internal	C	Penurunan nilai IKPA	UPT	Rapat internal dengan pengguna anggaran	Penggunaan anggaran kurang optimal
6	Menurunnya tahanan yang overstaying	Masih terdapat Tahanan yang berstatus overstaying	Penyampaian vonis tidak tepat waktu	Seksi Binadik	Keterlambatan menerima putusan	Internal	C	Terlambat dalam perubahan status Tahanan	UPT	Melakukan permintaan vonis	Penyampaian vonis tidak tepat waktu
7	Menurunnya persentase overkapasitas	Over kapasitas Warga Binaan Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong sebesar 150%	Over kapasitas	Seksi Binadik	Masih banyak Warga Binaan yang tidak bisa integrasi	Internal	C	Mempersulit pengawasan, perawatan Lapas, dan pembinaan kurang maksimal	UPT	Optimalisasi dalam pelaksanaan program integrasi bagi Warga Binaan	Over kapasitas

8	Menurunnya jumlah residivis	Masih terdapat Warga Binaan yang mengulangi tindak pidana	Kurangnya kesadaran dan bakat Narapidana residivis	Seksi Binadik	Tidak ada efek jera dalam proses pidana	Internal	C	Overstaying	UPT	Optimalisasi dalam pembinaan kepribadian berupa kerohanian serta optimalisasi dalam pembinaan kemandirian sebagai bekal Narapidana	Kurangnya kesadaran dan bakat Narapidana residivis
9	Meningkatnya jumlah Narapidana yang memperoleh pendidikan	Kurangnya minat program kejar paket bagi Warga Binaan	Menurunnya persentase Narapidana yang memperoleh hak pendidikan	Seksi Binadik	Kurangnya kesadaran warga binaan perihal pentingnya pendidikan	Internal	C	Menurunnya kualitas pendidikan	UPT	Memberikan reward serta pengarahan rutin kepada warga binaan terkait pentingnya pendidikan	Menurunnya persentase Narapidana yang memperoleh hak pendidikan
10	Kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak Didik pelaku gangguan kamtib	Masih ada pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh Narapidana	Ketidakpatuhan warga binaan dalam menaati tata tertib	Seksi Adm Kamtib	Kurangnya kesadaran warga binaan	Internal	C	Kerusuhan	UPT	Memberikan punishment berupa isolasi dan Register F serta pengarahan kepada warga binaan	Ketidakpatuhan warga binaan dalam menaati tata tertib

Tenggarong, 04 Maret 2024
KEPALA

Triana Agustin
NIP 198208282000122001

ANALISIS RISIKO (PETA RISIKO)

Unit Pemilik Risiko : Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong
Periode Penerapan : Tahun 2024

No	Sisa Risiko	Kemungkinan		Dampak		Tingkat Risiko	Profil Risiko
		Uraian	Nilai	Uraian	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7 = 4 x 6	8
1	Keterlambatan pembangunan lajutan Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong	Moderat	3	Kementerian	5	15	Kuning
2	Terjadi tumpang tindih beban tugas	Pasti	5	Kantor Wilayah	3	15	Kuning
3	Terkendala dalam penggunaan aplikasi SRIKANDI	Hampir Pasti	4	Kantor Wilayah	3	12	Kuning
4	Penatausahaan keuangan kurang optimal	Kecil	2	UPT	2	4	Hijau
5	Penggunaan anggaran kurang optimal	Kecil	2	Kantor Wilayah	3	6	Biru
6	Penyampaian vonis tidak tepat waktu	Sangat Kecil	1	UPT	2	2	Hijau
7	Over kapasitas	Pasti	5	UPT	2	10	Biru
8	Kurangnya kesadaran dan bakat Narapidana residivis	Kecil	2	UPT	2	4	Hijau
9	Menurunnya persentase Narapidana yang memperoleh hak pendidikan	Moderat	3	UPT	2	6	Biru
10	Ketidakpatuhan warga binaan dalam menaati tata tertib	Moderat	3	UPT	2	6	Biru

Tenggarong, 04 Maret 2024
KEPALA

Triana Agustin
NIP 198208282000122001

[illegible]

INDIKATOR RISIKO

Unit Pemilik Risiko : Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong
Periode Penerapan : Tahun 2024

No	Sisa Risiko	Tingkat Risiko	Prioritas Risiko	Toleransi Risiko	Indikator Risiko	
					Indikasi	Batas Aman
1	2	3	4	5	6	7
1	Keterlambatan pembangunan lajutan Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong	15	1	4	Belum ada tindaklanjut dari KPKNL	5
2	Terjadi tumpang tindih beban tugas	15	2	4	Purna Tugas Kepala Subbagian Tata Usaha dan kurangnya anggota regu pengamanan	5
3	Terkendala dalam penggunaan aplikasi SRIKANDI	12	3	3	Tidak ada tindaklanjut dari kendala pendaftaran tanda tangan elektronik	4
4	Penatausahaan keuangan kurang optimal	4	8	1	Keliru dalam memilih akun belanja	2
5	Penggunaan anggaran kurang optimal	6	5	1	Kurangnya pengawasan berjenjang	2
6	Penyampaian vonis tidak tepat waktu	2	10	1	Keterlambatan menerima putusan	2
7	Over kapasitas	10	4	3	Masih banyak Warga Binaan yang tidak bisa integrasi	4
8	Kurangnya kesadaran dan bakat Narapidana residivis	4	9	1	Tidak ada efek jera dalam proses pidana	2
9	Menurunnya persentase Narapidana yang memperoleh hak pendidikan	6	7	1	Kurangnya kesadaran warga binaan perihal pentingnya pendidikan	2
10	Ketidakpatuhan warga binaan dalam menaati tata tertib	6	6	1	Kurangnya kesadaran warga binaan	2

Tenggarong, 04 Maret 2024
KEPALA

Triana Agustin
NIP 198208282000122001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

RENCANA AKSI PENANGANAN RISIKO

Unit Pemilik Risiko : Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong
Periode Penerapan : Tahun 2024

No	Indikator Risiko		Opsi Penanganan	Kegiatan Pengendalian	Indikator Pengendalian		Jadwal	Penanggung Jawab	Cadangan Risiko (Rp)
	Indikasi	Batas Aman			Output	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Belum ada tindaklanjut dari KPKNL	5	Mengurangi Risiko	Melakukan usulan penghapusan BMN	Usulan penghapusan BMN	100%	Januari - Desember	Kasubbag TU	-
2	Purna Tugas Kepala Subbagian Tata Usaha dan kurangnya anggota regu pengamanan	5	Mengurangi Risiko	Usul Promosi Jabatan Administrasi Pegawai Negeri Sipil Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong dan permohonan SDM	Usulan Promosi Jabatan dan Permohonan SDM ke Kantor Wilayah	100%	Januari - Desember	Kasubbag TU	
3	Tidak ada tindaklanjut dari kendala pendaftaran tanda tangan elektronik	4	Mengurangi Risiko	Melakukan pendaftaran permohonan tanda tangan elektronik Pejabat Administrasi Eselon IV	User sudah terdaftar dan memiliki sertifikat dengan status ISSUE	100%	Januari - Desember	Kasubbag TU	
4	Keliru dalam memilih akun belanja	2	Mengurangi Risiko	Melakukan cross check setiap penginputan	Laporan keuangan pada aplikasi SAKTI	100%	Januari - Desember	Kasubbag TU	
5	Kurangnya pengawasan berjenjang	2	Mengurangi Risiko	Rapat internal dengan pengguna anggaran	Laporan keuangan berupa IKPA bagian penarikan halaman III DIPA	100%	Januari - Desember	Kasubbag TU	-
6	Keterlambatan menerima putusan	2	Mengurangi Risiko	Melakukan permintaan vonis	Pemberitahuan habis masa penahanan 10, 3, 1	100%	Januari - Desember	Kasi Binadik	-

7	Masih banyak Warga Binaan yang tidak bisa integrasi	4	Mengurangi Risiko	Optimalisasi dalam pelaksanaan program integrasi bagi Warga Binaan	Data pelaksanaan integrasi	100%	Januari - Desember	Kasi Binadik	-
8	Tidak ada efek jera dalam proses pidana	2	Mengurangi Risiko	Optimalisasi dalam pembinaan kepribadian berupa kerohanian serta optimalisasi dalam pembinaan kemandirian sebagai bekal Narapidana	Laporan Pembinaan Kepribadian dan Pembinaan Kemandirian	100%	Januari - Desember	Kasi Binadik	-
9	Kurangnya kesadaran warga binaan perihal pentingnya pendidikan	2	Mengurangi Risiko	Memberikan reward serta pengarahan rutin kepada warga binaan terkait pentingnya pendidikan	Dokumentasi pengarahan kepada Warga Binaan	100%	Januari - Desember	Kasi Binadik	-
10	Kurangnya kesadaran warga binaan	2	Mengurangi Risiko	Memberikan punishment berupa isolasi dan Register F serta pengarahan kepada warga binaan	Laporan pelanggaran disiplin	100%	Januari - Desember	Kasi Kamtib	-

Tenggarong, 04 Maret 2024
KEPALA

Triana Agustin
NIP 198208282000122001

[illegible]

PEMANTAUAN RISIKO

Unit Pemilik Risiko : Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong
Periode Penerapan : Tahun 2024+A15

No	Kegiatan pengendalian	Indikator Pengendalian				Indikator Risiko				Risiko Residu	Keterangan
		Output	Target	Realisasi	%	Risiko	Batas Aman	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6=(5/4)x100	7	8	9	10=(9/8)x100	11	12
1	Melakukan usulan penghapusan BMN	Usulan penghapusan BMN	100%	25%	25,0	Belum ada tindaklanjut dari KPKNL	5,0	0,0	0,0	0,0	Menurunkan risiko
2	Usul Promosi Jabatan Administrasi Pegawai Negeri Sipil Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong dan	Usulan Promosi Jabatan dan Permohonan SDM ke Kantor Wilayah	100%	25%	25,0	Purna Tugas Kepala Subbagian Tata Usaha dan kurangnya anggota regu pengamanan	5,0	0,0	0,0	0,0	Menurunkan risiko
3	Melakukan pendaftaran permohonan tanda tangan elektronik Pejabat Administrasi Eselon IV	User sudah terdaftar dan memiliki sertifikat dengan status ISSUE	100%	25%	25,0	Tidak ada tindaklanjut dari kendala pendaftaran tanda tangan elektronik	4,0	0,0	0,0	0,0	Menurunkan risiko
4	Melakukan cross check setiap penginputan	Laporan keuangan pada aplikasi SAKTI	100%	25%	25,0	Keliru dalam memilih akun belanja	2,0	0,0	0,0	0,0	Menurunkan risiko
5	Rapat internal dengan pengguna anggaran	Laporan keuangan berupa IKPA bagian penarikan halaman III DIPA	100%	25%	25,0	Kurangnya pengawasan berjenjang	2,0	0,0	0,0	0,0	Menurunkan risiko
6	Melakukan permintaan vonis	Pemberitahuan habis masa penahanan 10, 3, 1	100%	25%	25,0	Keterlambatan menerima putusan	2,0	0,0	0,0	0,0	Menurunkan risiko
7	Optimalisasi dalam pelaksanaan program integrasi bagi Warga Binaan	Data pelaksanaan integrasi	100%	25%	25,0	Masih banyak Warga Binaan yang tidak bisa integrasi	4,0	0,0	0,0	0,0	Menurunkan risiko

8	Optimalisasi dalam pembinaan kepribadian berupa kerohanian serta optimalisasi dalam pembinaan kemandirian	Laporan Pembinaan Kepribadian dan Pembinaan Kemandirian	100%	25%	25,0	Tidak ada efek jera dalam proses pidana	2,0	0,0	0,0	0,0	Menurunkan risiko
9	Memberikan reward serta pengarahan rutin kepada warga binaan terkait pentingnya pendidikan	Dokumentasi pengarahan kepada Warga Binaan	100%	25%	25,0	Kurangnya kesadaran warga binaan perihal pentingnya pendidikan	2,0	0,0	0,0	0,0	Menurunkan risiko
10	Memberikan punishment berupa isolasi dan Register F serta pengarahan kepada warga binaan	Laporan pelanggaran disiplin	100%	25%	25,0	Kurangnya kesadaran warga binaan	2,0	0,0	0,0	0,0	Menurunkan risiko

Tenggarong, 04 Maret 2024
KEPALA

Triana Agustin
NIP 198208282000122001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan: https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

LAMPIRAN

LAPORAN
MONEV SPIP

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Alamat : Jl. Imam Bonjol No.37 RT.08 Kel. Melayu Tenggarong- Kutai Kartanegara
Telp. (0541) 6720100 Email : lpp.smd@gmail.com

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TRIWULAN I TAHUN 2024

A. PENDAHULUAN

1. Umum

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.PW.02.03 Tahun 2011 Tentang Penyelanggaran Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bahwa untuk mewujudkan tata kelola Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang baik, diperlukan penerapan pelaporan sistem pengendalian intern pemerintah untuk meningkatkan pemantauan dan evaluasi atas tercapainya tujuan organisasi melalui sistem pengendalian intern pemerintah.

Sistem Pengendalian Intern dalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien.

2. Maksud dan Tujuan

Meningkatkan pemantauan dan evaluasi atas tercapainya tujuan organisasi.

3. Ruang Lingkup

Seluruh kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilaksanakan di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

4. Dasar

a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

b. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2013 tentang Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH-02.PW.02.03 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;

c. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia RI Nomor 05 Tahun 2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
d. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor:M.HH-02.PR.03.01 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pelaporan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI;
e. Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP;
f. Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-690/K/DH/2012 tentang Pedoman Pemantauan Perkembangan Penyelenggaraan SPIP.

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Senin / 18 Maret 2024
Pukul : 10.00 WITA – selesai
Tempat : Aula Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong

Adapun beberapa poin yang disampaikan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong, sebagai berikut:

- Memaksimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing masing seksi;
- Kendala dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
- Optimalisasi dalam pengelolaan administrasi;
- Memaksimalkan pelayanan pemasyarakatan yang sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik melalui peningkatan pengawasan dan pengelolaan layanan di bidang pemasyarakatan.
- Meningkatkan produktivitas Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Penguatan Maturitas SPIP

C. HASIL YANG DICAPAI

Telah terlaksananya monitoring dan evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong telah melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

b. Saran

Dilakukan monitoring dan evaluasi secara rutin.

E. PENUTUP

Demikian kami sampaikan, atas perkenannya disampaikan terima kasih.

Tenggarong, 18 Maret 2024
KEPALA

Triana Agustin
NIP 198208282000122001

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Alamat : Jl. Imam Bonjol No.37 RT.08 Kel. Melayu Tenggarong- Kutai Kartanegara
Telp. (0541) 6720100 Email : lpp.smd@gmail.com

DOKUMENTASI
MONITORING DAN EVALUASI SPIP TW I TAHUN 2024

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Alamat : Jl. Imam Bonjol No.37 Kelurahan Kampung Melayu,Tenggarong Kalimantan Timur
Telp. 0541-6720100 Email : *lpp.smd@gmail.com*

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan SPIP
Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong
Senin, 18 Maret 2024

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Triana Agustin	Kepala	
2	Pratiwi Widyahningsih	Kasubbag TU	
3	Andi Hasnaeni	Kasi Binadik	
4	Hatmawati	Kasi Giatja	
5	Yhuni Rindawati	Ka.KPLP	
6	Nanang Budiyono	Kaur Kepagawai Keuangan	
7	Mirani Eka Destiana	Kepala Subseksi Registrasi	
8	Adhiyani Maulina	Kepala Subseksi Pelaporan	
9	Dewi Ratna Sari	Kepala Subseksi Keamanan	
10	Dini Fazriani	Kepala Subseksi Bimbingan Kerja dan Pengelola Hasil Kerja	

KEPALA

TRIANA AGUSTIN
NIP 198208282000122001

SOSIALISASI
SPIP

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Alamat : Jl. Imam Bonjol No.37 RT.08 Kel. Melayu Tenggarong- Kutai Kartanegara
Telp. (0541) 6720100 Email : lpp.smd@gmail.com

LAPORAN

SOSIALISASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

A. PENDAHULUAN

1. Umum

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.PW.02.03 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaran Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bahwa untuk mewujudkan tata kelola Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang baik, diperlukan penerapan pelaporan sistem pengendalian intern pemerintah untuk meningkatkan pemantauan dan evaluasi atas tercapainya tujuan organisasi melalui sistem pengendalian intern pemerintah.

Sistem Pengendalian Intern dalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien.

2. Maksud dan Tujuan

Meningkatkan pengetahuan tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sehingga mudah dalam pelaksanaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

3. Ruang Lingkup

Kegiatan Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilaksanakan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

4. Dasar

a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
b. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2013 tentang Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan

HAM Nomor: M.HH-02.PW.02.03 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;

c. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia RI Nomor 05 Tahun 2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

d. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor:M.HH-02.PR.03.01 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pelaporan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI;

e. Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP;

f. Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-690/K/DH/2012 tentang Pedoman Pemantauan Perkembangan Penyelenggaraan SPIP.

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Kegiatan Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Senin / 22 Januari 2024
Pukul : 09.00 WITA – selesai
Tempat : Aula Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong

Sosialisasi diberikan kepada seluruh Pejabat Administrasi Eselon IV dan V serta JFU Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong. Adapun beberapa poin yang disampaikan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong, sebagai berikut:

- Pengertian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- Maksud dan Tujuan dilakukannya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

C. HASIL YANG DICAPAI

Telah terlaksananya sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong telah melaksanakan sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

b. Saran

Pelaksanaan Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong secara rutin.

E. PENUTUP

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Tenggarong, 22 Januari 2024
KEPALA

Triana Agustin
NIP 198208282000122001

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Alamat : Jl. Imam Bonjol No.37 RT.08 Kel. Melayu Tenggarong- Kutai Kartanegara
Telp. (0541) 6720100 Email : lpp.smd@gmail.com

DOKUMENTASI
SOSIALISASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

DOKUMEN
PENGHAPUSAN BMN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jl. Imam Bonjol, No.37 Kel. Melayu Tenggarong Kutai Kartanegara
Telp : (0541) 6720100 Email : lpp.smd@gmail.com

Nomor	: W.18.PAS.PAS.7.UM.01.01-0396	07 Februari 2024
Lampiran	: 1(satu) berkas	
Sifat	: Segera	
Hal	: Permohonan Rekomendasi Penghapusan Gedung dan Bangunan Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong	

Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Kutai Kartanegara
Di –
Tenggarong

Berkenaan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan BMN Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong, dengan hormat kami sampaikan Permohonan Rekomendasi Penghapusan Gedung dan Bangunan pada Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong sejumlah 23 Unit/ NUP dengan total nilai Rp 8.493.766.260,- (daftar BMN terlampir) yang kemudian nantinya dokumen tersebut akan dipergunakan sebagai salah satu syarat usulan penghapusan Gedung dan Bangunan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong ke Unit Eselon 1.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perkenaannya kami ucapkan terimakasih.

Kepala,

[illegible]

Triana Agustin
NIP. 198208282000122001

[illegible]

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jl. Imam Bonjol No.37 Rt.08 Kel. Melayu, Kec. Tenggarong, Kutai Kartanegara
Telp.0541-6720100, Email : lpp.smd@gmail.com

DAFTAR GEDUNG DAN BANGUNAN YANG DIUSULKAN PENGHAPUSAN

No	Kode Barang	Nama Barang	NUP	Merk/Type	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*8*
1	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	4	Taman Lingkungan Instalasi Air	2022	19,616,000
2	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	5	Pengembangan dan Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit	2022	570,192,800
3	4010101999	Bangunan Gedung Kantor Lainnya	1	Bangunan Gedung Kantor Lain	2022	37,300,000
4	4010101999	Bangunan Gedung Kantor Lainnya	2	Pembuatan Taman & Pagar Depan IPS/Kesling	2022	22,522,000
5	4010101999	Bangunan Gedung Kantor Lainnya	3	Pembuatan Pagar Pembatas Poli	2022	83,354,000
6	4010101999	Bangunan Gedung Kantor Lainnya	4	Pembuatan Pagar Instalasi Limbah Cair Medis	2022	65,987,000
7	4010101999	Bangunan Gedung Kantor Lainnya	5	Pembuatan Pagar Ulin RSUD	2022	44,110,000
8	4010106001	Bangunan Rumah Sakit Umum	1	Ruang Rawat Jalan	2022	1,965,765,980
9	4010106001	Bangunan Rumah Sakit Umum	2	Gedung Ruang Mawar	2022	500,000,000
10	4010106001	Bangunan Rumah Sakit Umum	3	Gedung Ruang Asoka	2022	513,667,000
11	4010106001	Bangunan Rumah Sakit Umum	4	Gedung Ruang Cempaka	2022	500,000,000
12	4010106001	Bangunan Rumah Sakit Umum	5	Gedung Ruang Melati	2022	500,000,000
13	4010106001	Bangunan Rumah Sakit Umum	6	Gedung Ruang ICU	2022	350,000,000
14	4010106001	Bangunan Rumah Sakit Umum	7	Ruang Operasi Termasuk Rehab	2022	656,750,000
15	4010106001	Bangunan Rumah Sakit Umum	8	Pemeliharaan IGD	2022	199,958,000
16	4010106001	Bangunan Rumah Sakit Umum	9	Pembangunan Rumah Sakit	2022	49,390,000
17	4010106001	Bangunan Rumah Sakit Umum	10	Ruang Tulip	2022	1,509,291,980
18	4010106015	Bangunan Posyandu	1	Ruang Tunggu ICU	2022	76,424,000

19	4010106015	Bangunan Posyandu	2	Tempat Pembuangan Sampah	2022	172,566,100
20	4010108001	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1	Mushola	2022	40,000,000
21	4010130005	Bangunan Rumah Genset	1	Tempat Parkir Karyawan	2022	470,681,400
22	4010134999	Taman Lainnya	1	Pembuatan Taman	2022	48,990,000
23	4040199999	Tugu/Tanda Batas Lainnya	1	Tugu Tanda Batas Lain	2022	97,200,000
TOTAL						8.493.766.260

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Alamat : Jl. Imam Bonjol No.37 Kel.Kampung Melayu,Tenggarong Kutai Kartanegara
Telp. 0541-6720100, Email : lpp.smd@gmail.com

ABSENSI SOSIALISASI PENGENADLIAN INTERN PEMERINTAH
LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
SENIN, 22 JANUARI 2024

NO	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1	Triana Agustin	Kepala	
2	Pratiwi Widyahningsih	Ketua Zi	
3	Hatmawati	Kasi giatja	
4	Juari	Kasi binadik	
5	Andi Hasnaeni	Kasi Adkamtib	
6	Yhuni Rindawati	Ka KPLP	
7	Adhiyani Maulina	Kasubsi Poltatib	
8	Mirani Eka Destiana	Kasubsi Registrasi	
9	Suhartono	Kaur umum	
10	Nanang Budiono	Kaur kepegkeu	
11	Dewi Ratna Sari	Kasubsi keamanan	
12	Siti Rahmah	Kasubsi Bimkemaswat	
13	Desi Ari Santi	Kasubsi sarana kerja	
14	Dini Fazriani	Kasubsi bimker dan PHK	
15	Ray Hafidz Kurniawan	JFU	
16	Nani Andriani	JFU	
17	Syavira Reginita	JFU	
18	Cyntia Ferginingrum	JFU	
19	Prita Meyrika Haryati	JFU	
20	Tia Kumala Dewi	JFU	
21	Helma Melly Yanti	JFU	
22	Yenisa Hanifa	JFU	
23	Evi Puspita Sari	JFU	
24	Bunga Noviyanti	JFU	
25	Veronika Morong	JFU	
26	Randy Mamola	JFU	
27	M. Tubagus Sukma	JFU	

28	Febry Carolina	JFU	
29	Yulinda Nur Rahmah	JFU	
30	Nurul Huda F	JFU	
31	Galuh CK	JFU	
32	Widya Nur AR	JFU	
33	Safta Rina Tiara Monica	JFU	
34	Ni Made Peggi	JFU	

KEPALA

Triana Agustin
NIP.19820828 200012 2 001

SURAT PERMOHONAN SDM

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jalan : Imam Bonjol No.37 Kelurahan Kampung Melayu, Tenggarong
Telp: 0541-6720100 Email: lpp.smd@gmail.com

Nomor : W.18.PAS.PAS.7-KP.04.01-0655 15 Maret 2024
Lampiran : 2 (dua) berkas
Hal : Permohonan Penambahan JFU pada
Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong

Yth.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Kalimantan Timur
Di –
Samarinda

Menyusuli Surat Kami Nomor : W.18.PAS.PAS.7-KP.04.01-3086 tanggal 29 Desember 2023 perihal Permohonan Penambahan JFU pada Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong, dengan hormat Kami mengajukan permohonan untuk penambahan petugas sebanyak 5 (Lima) orang yang terdiri dari 2 (Dua) orang Petugas Laki-Laki dan 3 (Tiga) orang Petugas Wanita. Dengan adanya penambahan petugas ini diharapkan dapat membantu pelaksanaan tugas dan fungsi di Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

Berkenaan dengan hal tersebut kami lampirkan:

1. Hasil Rekapitulasi Penyusunan Kebutuhan Formasi Jabatan berdasarkan Aplikasi E-ABK
2. Peta Jabatan Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong

Demikian untuk menjadikan periksa, atas perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.

KEPALA

Triana Agustin
NIP. 198208282000122001

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jalan : Imam Bonjol No.37 Kelurahan Kampung Melayu, Tenggarong
Telp: 0541-6720100 Email: lpp.smd@gmail.com

Nomor : W.18.PAS.PAS.7-KP.04.01-3086 29 Desember 2023
Lampiran : 2 (dua) berkas
Hal : Permohonan Penambahan JFU pada
Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong

Yth.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Kalimantan Timur
Di –
Samarinda

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong, setelah dilakukan pemetaan dan inventarisir Jabatan Fungsional Umum, dengan hormat Kami mengajukan permohonan untuk penambahan petugas sebanyak 5 (Lima) orang yang terdiri dari 2 (Dua) orang Petugas Laki-Laki dan 3 (Tiga) orang Petugas Wanita. Dengan adanya penambahan petugas ini diharapkan dapat membantu pelaksanaan tugas dan fungsi di Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

Berkenaan dengan hal tersebut kami lampirkan:
1. Hasil Rekapitulasi Penyusunan Kebutuhan Formasi Jabatan berdasarkan Aplikasi E-ABK
2. Peta Jabatan Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong

Demikian untuk menjadikan periksa, atas perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.

K E P A L A

Triana Agustin
NIP. 198208282000122001

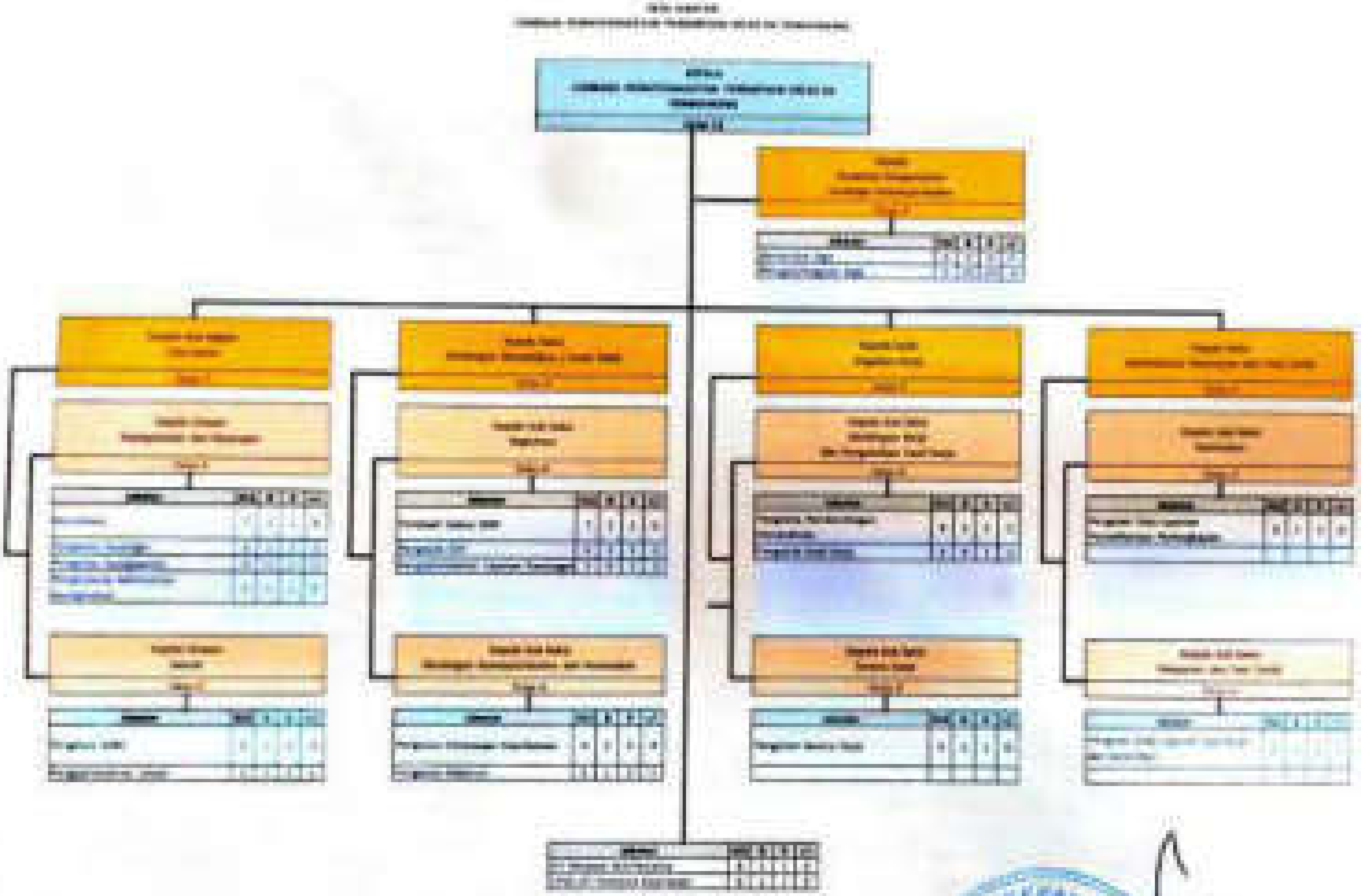

REKAPITULASI PENYUSUNAN KEBUTUHAN FORMASI JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG TAHUN 2023

No	NAMA JABATAN	HASIL ABK	BEZETTING	KEBUTUHAN FORMASI
1	BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA	1	1	0
2	PENELAAH STATUS WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN	1	1	-0
3	KOMANDAN JAGA PEMASYARAKATAN/KEDISIPLINAN	4	1	-3
4	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	3	1	-2
5	PENGELOLA DATA KEPEGAWAIAN	2	1	-1
6	PENGELOLA KEUANGAN	3	1	-2
7	PENGELOLA PEMBIMBINGAN KEMANDIRIAN	3	1	-2
8	PENGELOLA PEMBINAAN KEPRIBADIAN	3	1	-2
9	PENGELOLA SARANA KERJA	1	1	-4
10	PENGELOLA SISTEM DATABASE PEMASYARAKATAN	3	1	-2
11	PENGOLAH DATA LAPORAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN	1	1	-4
12	PENGADMINISTRASI UMUM	2	2	0
13	PENGELOLA DAN PENYAJI MAKANAN	2	1	-1
14	PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	1	1	0
15	PENGOLAH DATA LAPORAN PEMELIHARAAN PERLENGKAPAN	1	1	0
16	PETUGAS ANGGOTA JAGA	34	1	-33
	TOTAL	88	20	-68

FORM 3

PENGUMPULAN DATA BEBAN KERJA

Nama Jabatan : PETUGAS/ANGGOTA JAGA
Satuan Kerja : KESATUAN PENGAMANAN LAPAS - LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA - LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

No	Uraian Tugas	Satuan Hasil	Waktu Penyelesaian	Waktu Kerja Efektif	Beban Kerja	Σ Beban Kerja	Kebutuhan Pegawai	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	menjaga pintu gerbang, memeriksa isi kendaraan keluar masuk, orang / barang keluar masuk, mencatatkan kendaraan tahanan, mobil bahan makanan, aktivitas parkir [illegible] yang tidak diizinkan	Kegiatan	20	1250	250	5000	4.00	
2	melakukan pengawasan dan pemeriksaan awal terhadap pengunjung yang datang, termasuk barang bawaannya	Kegiatan	16	1250	260	4160	3.33	
3	menjaga pintu, memeriksa, menggeledah orang / barang masuk (pegawai, tahanan atau WBP baru atau keluarga tahanan yang berkunjung) dan memeriksa barang-barang bawaan serta mencatatkan pada buku [illegible]	Kegiatan	16	1250	260	4160	3.33	
4	Melakukan pencatatan, pencocokan ID, [illegible] mengawasi aktivitas dalam area kunjungan	Kegiatan	4	1250	144	576	0.46	
5	menjaga pos di menara	Kegiatan	0	1250	0	0	0.00	
6	menjaga pintu dalam dan melakukan pengawasan aktivitas pada area tersebut	Kegiatan	16	1250	260	4160	3.33	
7	Kontrol keliling Area Blok hunian	Kegiatan	16	1250	260	4160	3.33	
8	mengawasi kegiatan yang berlangsung di dapur	Kegiatan	8	1250	260	2080	1.67	
9	mengawasi kegiatan yang berlangsung di area tempat ibadah	Kegiatan	3	1250	260	780	0.62	

10	Mengawasi pembagian makanan/WBP di [illegible]	Kegiatan	3	1250	260	780	0.62	
11	Mengawasi kegiatan di dalam [illegible]	Kegiatan	6	1250	260	1560	1.25	
12	Mengawasi gerak-gerik kegiatan kerja karyawan/ lembagan kerja pada area yang telah ditentukan, memastikan para WBP tidak membawa alat alat yang digunakan saat melakukan kegiatan kerja ke dalam area steril dan [illegible]	Kegiatan	8	1250	260	2080	1.66	
13	Melakukan pengawasan secara keliling atau melakukan pengawasan kegiatan di luar / [illegible]	Kegiatan	6	1250	260	1560	1.25	
14	Menghitung Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan	Kegiatan	3	1250	260	780	0.62	
15	Memeriksa Badan dan Barang Bawaan yang keluar masuk blok hunian WBP	Kegiatan	12	1250	260	3120	2.50	
16	Melakukan cek fisik [illegible]	Kegiatan	[illegible]	1250	0	0	0.00	
17	Melakukan kontrol keliling lingkungan sekitar kantor	Kegiatan	1	1250	260	260	0.21	
18	Melakukan kontrol keliling lingkungan gudang	Kegiatan	[illegible]	1250	0	0	0.00	
19	Melakukan kontrol pelaksanaan keluar masuk Barang Baru	Kegiatan	[illegible]	1250	0	0	0.00	
20	Membuat daftar inventaris kantor dan sarana pengamanan	Kegiatan	1	1250	260	260	0.21	
21	Membuat laporan kegiatan pada buku laporan petugas pintu utama (P2U)	Laporan	1	1250	12	12	0.01	
22	Memeriksa lingkungan dan cek fisik bangunan kantor	Kegiatan	2	1250	260	520	0.42	
23	Melakukan pengawalan terhadap Warga Binaan yang keluar	Kegiatan	[illegible]	1250	0	0	0.00	
24	Melakukan pengawasan terhadap [illegible] Warga Binaan	Kegiatan	[illegible]	1250	0	0	0.00	
25	Memeriksa pengunjung beserta barang bawaannya	Kegiatan	4	1250	144	576	0.46	
26	Memeriksa dan mencatat identitas tamu yang berkunjung	Kegiatan	4	1250	144	576	0.46	
27	Mengawasi lalu lintas orang dan kendaraan pada pintu gerbang	Kegiatan	[illegible]	1250	0	0	0.00	
28	Menjaga dan mengawasi lalu lintas orang pada pintu utama	Kegiatan	[illegible]	1250	0	0	0.00	

SCREENSHOOT STATUS DSE PEJABAT ADMINISTRASI ESELON IV

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Alamat : Jl. Imam Bonjol No.37 Rt.08 Kelurahan Melayu, Tenggarong – Kutai Kartanegara
Telp. 0541-6720100   Email : lpp.smd@gmail.com

SCREENSHOOT STATUS DSE PEJABAT ADMINISTRASI ESELON IV LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

KEPALA SEKSI ADMINISTRASI KEAMANAN DAN KETERTIBAN

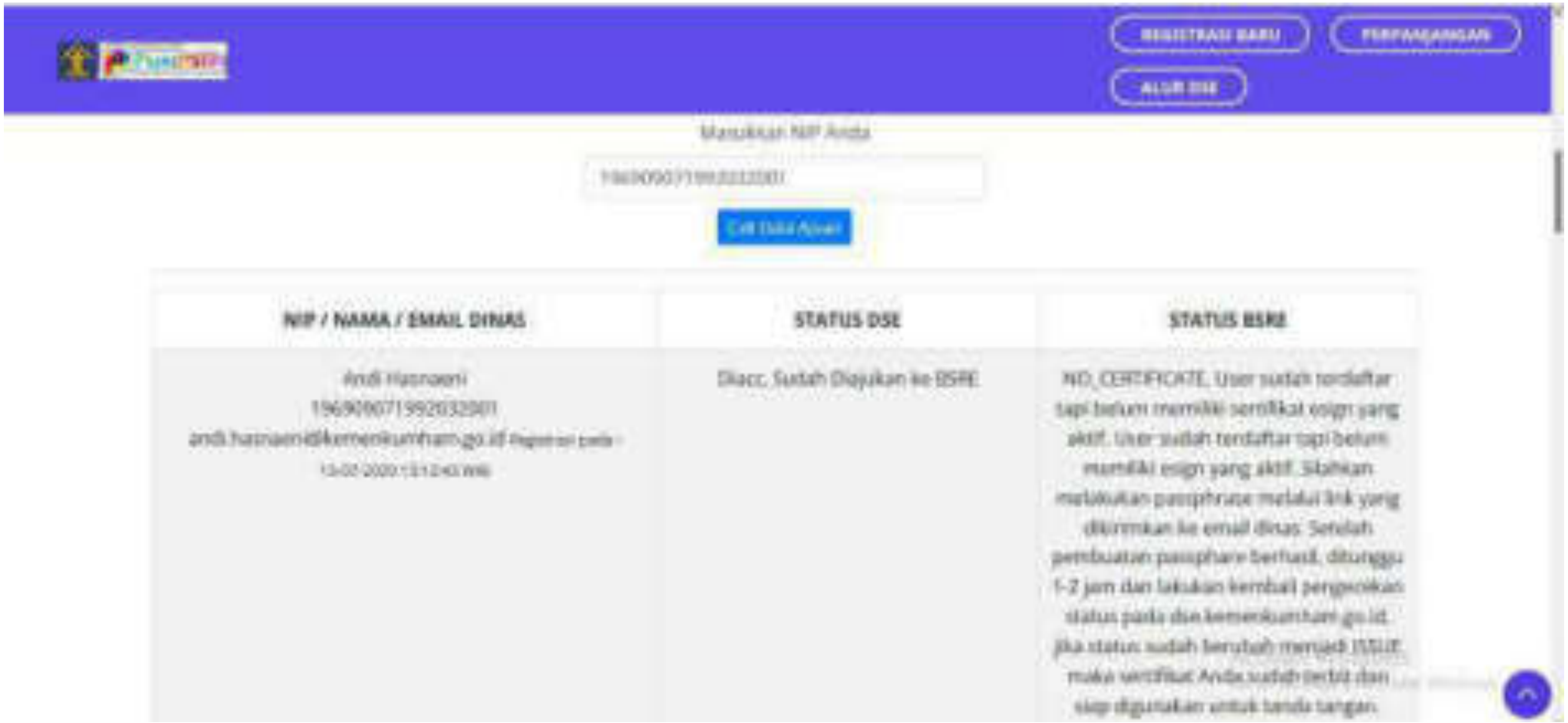

Masukkan NIP Anda

196909071992032001

NIP / NAMA / EMAIL DINAS	STATUS DSE	STATUS BSRE
Andi Hasnaeni 196909071992032001 andi.hasnaeni@kemenkumham.go.id Registrasi pada : 13-02-2020 13:12:43 WIB	Diacc, Sudah Diajukan ke BSRE	NO_CERTIFICATE, User sudah terdaftar tapi belum memiliki sertifikat esign yang aktif. User sudah terdaftar tapi belum memiliki esign yang aktif. Silahkan melakukan passphrase melalui link yang dikirimkan ke email dinas. Setelah pembuatan passphare berhasil, ditunggu 1-2 jam dan lakukan kembali pengecekan status pada dse.kemenkumham.go.id. Jika status sudah berubah menjadi ISSUE, maka sertifikat Anda sudah terbit dan siap digunakan untuk tanda tangan.

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Alamat : Jl. Imam Bonjol No.37 Rt.08 Kelurahan Melayu, Tenggarong – Kutai Kartanegara
Telp. 0541-6720100 Email : lpp.smd@gmail.com

SCREENSHOOT STATUS DSE PEJABAT ADMINISTRASI ESELON IV LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

KEPALA SEKSI KEGIATAN KERJA

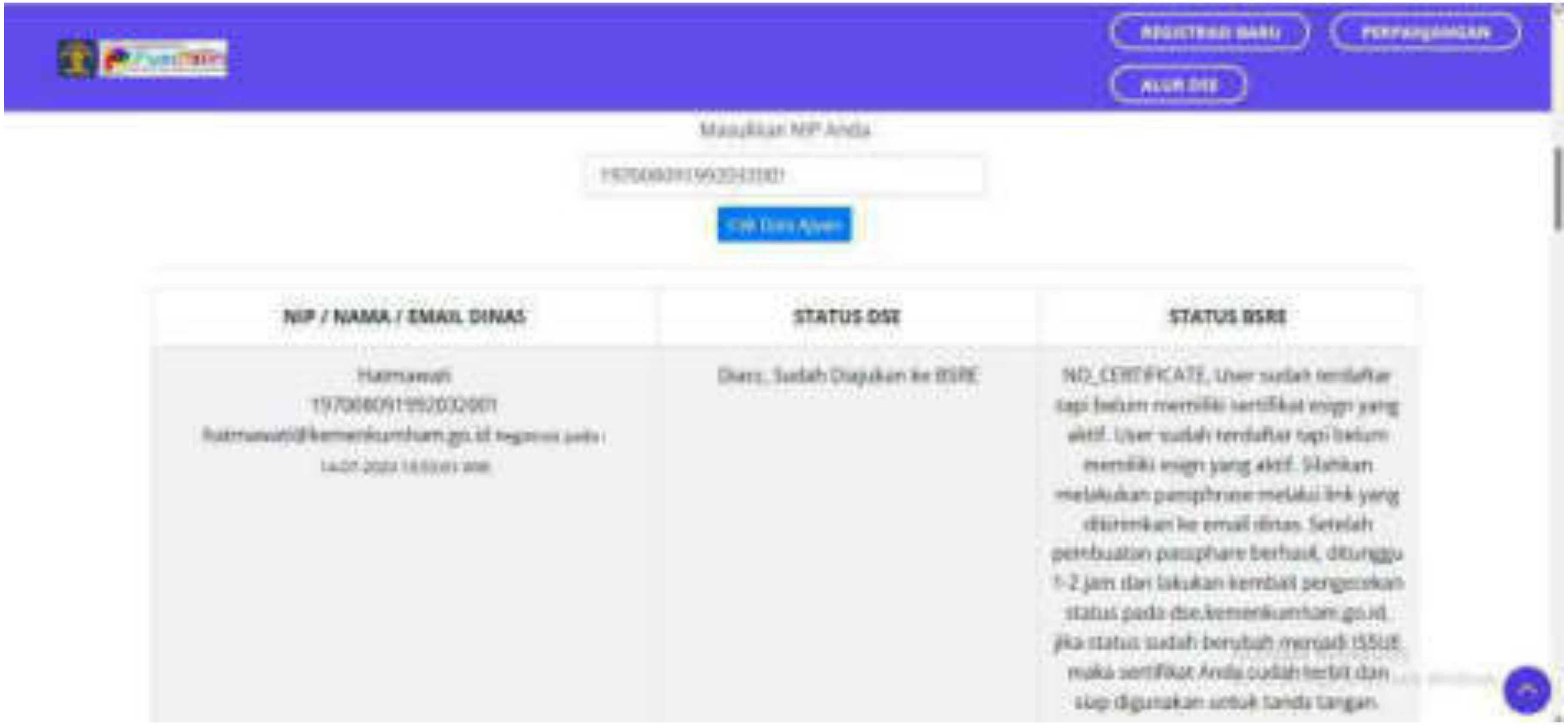

NIP / NAMA / EMAIL DINAS	STATUS DSE	STATUS BSRE
Hatmawati 197008091992032001 hatmawati@kemenkumham.go.id Registrasi pada : 14-07-2023 [illegible] WIB	Diacc. Sudah Diajukan ke BSRE	NO_CERTIFICATE, User sudah terdaftar tapi belum memiliki sertifikat esign yang aktif. User sudah terdaftar tapi belum memiliki esign yang aktif. Silahkan melakukan passphrase melalui link yang dikirimkan ke email dinas. Setelah pembuatan passphare berhasil, ditunggu 1-2 jam dan lakukan kembali pengecekan status pada dse.kemenkumham.go.id jika status sudah berubah menjadi ISSUE maka sertifikat Anda sudah terbit dan siap digunakan untuk tanda tangan.

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Alamat : Jl. Imam Bonjol No.37 Rt.08 Kelurahan Melayu, Tenggarong – Kutai Kartanegara
Telp. 0541-6720100 Email : lpp.smd@gmail.com

SCREENSHOOT STATUS DSE PEJABAT ADMINISTRASI ESELON IV
LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

KEPALA SEKSI BIMBINGAN NARAPIDANA/ANAK DIDIK

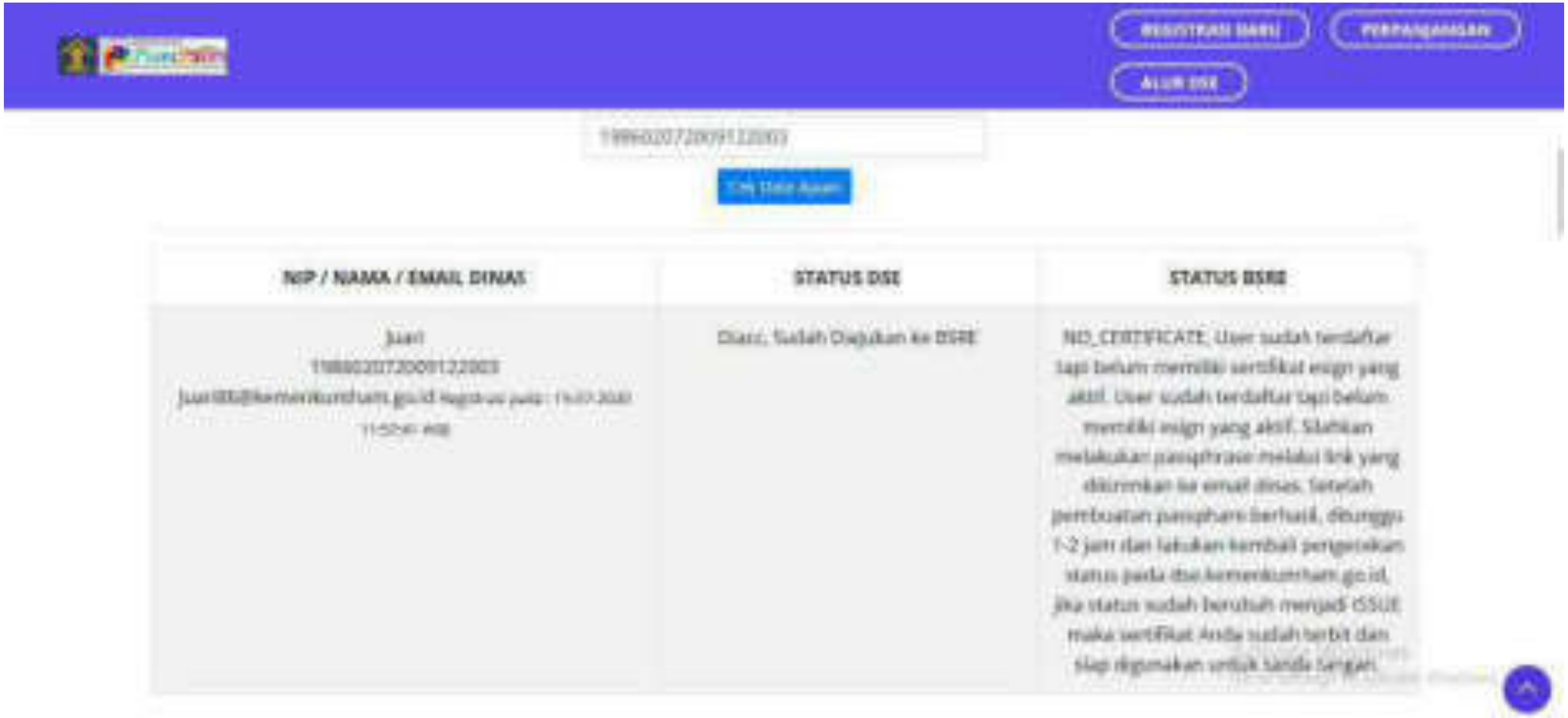

[illegible]

NIP / NAMA / EMAIL DINAS	STATUS DSE	STATUS BSRE
Juari [illegible] [illegible]@kemenkumham.go.id Registrasi pada : [illegible]	Diacc, Sudah Diajukan ke BSRE	NO_CERTIFICATE, User sudah terdaftar tapi belum memiliki sertifikat esign yang aktif. User sudah terdaftar tapi belum memiliki esign yang aktif. Silahkan melakukan passphrase melalui link yang dikirimkan ke email dinas. Setelah pembuatan passphare berhasil, ditunggu 1-2 jam dan lakukan kembali pengecekan status pada dse.kemenkumham.go.id, jika status sudah berubah menjadi ISSUE maka sertifikat Anda sudah terbit dan siap digunakan untuk tanda tangan.

SCREENSHOOT
LAPORAN KEUANGAN
PADA APLIKASI SAKTI

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Alamat : Jl. Imam Bonjol No.37 Rt.08 Kelurahan Melayu, Tenggarong – Kutai Kartanegara
Telp. 0541-6720100 Email : lpp.smd@gmail.com

SCREENSHOOT LAPORAN KEUANGAN PADA APLIKASI SAKTI
TRIWULAN I TAHUN 2024

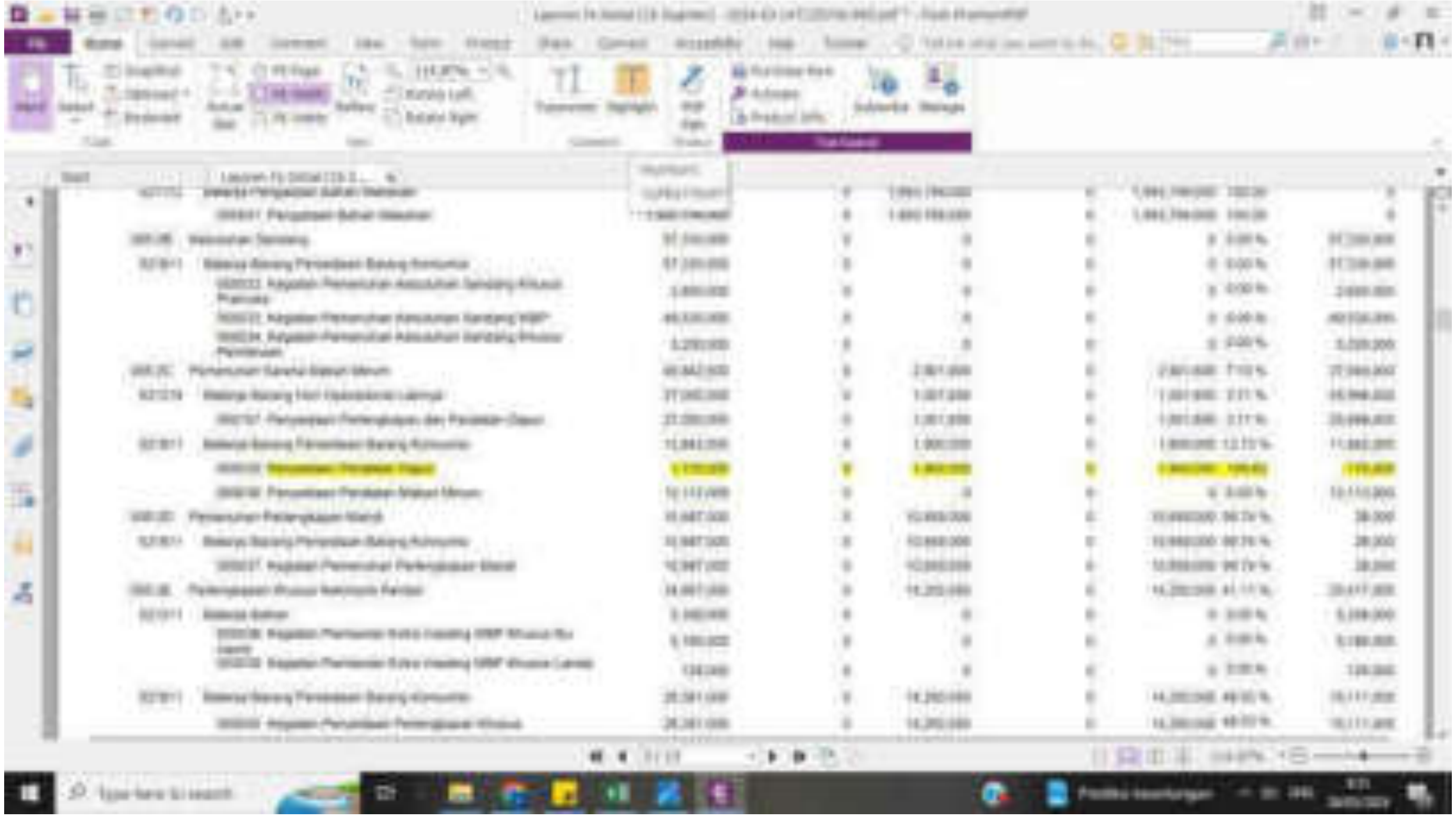

IKPA PENARIKAN HALAMAN III DIPA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Lapas Perempuan Kelas IIA Samarinda

DETAIL INDIKATOR HALAMAN 3 DIPA

No.	Kode Satker	Nama Satker	Kode KPPN	Periode	Rencana				Penyerapan				Deviasi				% Deviasi				% Deviasi Seluruh J.Bel	AVG % Deviasi Seluruh J.Bel	% Rata-Rata Deviasi Kumulatif	Nilai IKPA
					51	52	53	57	51	52	53	57	51	52	53	57	51	52	53	57				
1	418333	LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG	046	01	194,062,716	55,759,630	0	0	192,524,402	57,049,630	0	0	1,538,314	1,290,000	0	0	0.79	2.31	0.00	0.00	3.10	1.55	1.55	100.00
2	418333	LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG	046	02	237,766,480	379,402,373	0	0	240,393,351	448,530,711	0	0	2,626,871	69,128,338	0	0	1.10	18.22	0.00	0.00	19.32	9.66	5.61	94.39
3	418333	LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG	046	03	241,725,790	557,893,099	0	0	238,388,683	490,904,115	0	0	3,337,107	66,988,984	0	0	1.38	12.01	0.00	0.00	13.39	6.70	5.97	94.03
4	418333	LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG	046	04	250,580,991	468,300,756	0	0	438,486,785	283,771,983	0	0	187,905,794	184,528,773	0	0	74.99	39.40	0.00	0.00	114.39	57.20	18.78	81.22
5	418333	LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG	046	05	259,353,887	384,162,641	0	0	233,253,571	319,882,120	0	0	26,100,316	64,280,521	0	0	10.06	16.73	0.00	0.00	26.79	13.40	17.70	82.30
6	418333	LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG	046	06	263,966,126	403,202,555	0	0	431,875,680	343,595,226	0	0	167,909,554	59,607,329	0	0	63.61	14.78	0.00	0.00	78.39	39.20	21.29	78.71
7	418333	LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG	046	07	233,689,970	337,246,746	0	0	233,757,578	329,529,376	0	0	67,608	7,717,370	0	0	0.03	2.29	0.00	0.00	2.32	1.16	18.41	81.59
8	418333	LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG	046	08	236,032,948	337,061,065	0	0	237,821,579	328,699,071	0	0	1,788,631	8,361,994	0	0	0.76	2.48	0.00	0.00	3.24	1.62	16.31	83.69
9	418333	LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG	046	09	238,032,948	336,754,675	0	0	242,530,928	269,918,665	0	0	4,497,980	66,836,010	0	0	1.89	19.85	0.00	0.00	21.74	10.87	15.71	84.29

10	418333	LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG	046	10	236,582,954	323,794,019	0	0	233,008,567	322,201,552	0	0	3,574,387	1,592,467	0	0	1.51	0.49	0.00	0.00	2.00	1.00	14.24	85.76
11	418333	LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG	046	11	236,354,161	326,334,878	0	0	234,210,567	324,108,194	0	0	2,143,594	2,226,684	0	0	0.91	0.68	0.00	0.00	1.59	0.80	13.01	86.99
12	418333	LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG	046	12	236,354,161	326,334,878	0	0	234,210,567	324,108,194	0	0	2,143,594	2,226,684	0	0	0.91	0.68	0.00	0.00	1.59	0.80	13.01	86.99

SURAT PEMBERITAHUAN HABIS MASA PENAHANAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Alamat : Jl. Imam Bonjol No.37 RT.08 Kel. Melayu Tenggarong- Kutai Kartanegara
Telp. (0541) 6720100 Email : lpp.smd@gmail.com

Nomor : W.18.PAS.PAS.7-PK.01.01-0713 22 Maret 2024
Lampiran : -
Perihal : Surat Pemberitahuan Akan Habis Masa Penahanan an. **Nur Wulan Sari Binti Nanang.**

Yth.
Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
di-
Jakarta

Memperhatikan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indoesia yang akan berakhir, maka dengan ini kami informasikan nama Tahanan yang akan habis masa penahanannya :

No.	No.Registrasi	Nama Tahanan	Tgl.Nomor Surat Penahanan	Perkara	Tgl. 1 Hari Akan Habis Masa Penahanan	Tgl. Habis Masa Penahanan
1	AV.002.2023	Nur Wulan Sari Binti Nanang	23/10/2023 20847/2023/S.5422/Tah.Sus/PP/2023/MA	Pasal 197 UU RI NO. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan	22/03/2024	23/03/2024

Selanjutnya mohon untuk diterbitkan surat perpanjangan penahanan bagi nama tahanan tersebut diatas.

Demikian atas perhatian dan kerjasama diucapkan terima kasih.

KEPALA

Ditandatangani secara elektronik oleh
Triana Agustin
NIP. 198208282000122001

Tembusan :
1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur;
2. Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat.

[illegible]

DOKUMEN
PELAKSANAAN
INTEGRASI

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jl. Imam Bonjol No. 37, Kelurahan Melayu, Tenggarong, Kutai Kartanegara
Telp 0541-6720100

Nomor : W.18.PAS.PAS.7-PK.04.01-0694 Tenggarong, 20 Maret 2024
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Permintaan Litmas Usulan Pembebasan Bersyarat (PB)
Beatrice Oma a/d Arjun Candra **, dkk.**

Yth.
Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Samarinda
Di -
Samarinda

Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan pasal 10 (1) huruf f dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, dengan hormat kami mohon kiranya dapat dibuatkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) untuk Permintaan Litmas Usulan Pembebasan Bersyarat (PB) sebanyak 5 (lima) orang beserta hasil ISPN dan Laporan Hasil Assesment RRI Kriminogenik terhadap Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong (Data warga binaan terlampir).

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

KEPALA,

Ditandatangani secara elektronik oleh

Triana Agustin
NIP. 198208282000122001

Tembusan :
1. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI di Jakarta
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur di Samarinda

[illegible]

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jl. Imam Bonjol No. 37 Kampung Melayu Tenggarong, Kutai Kartanegara
Telepon 0541- 6720100, email : lpp.smd@gmail.com

DATA-DATA ADMINISTRATIF WARGA BINAAN DAN MASA PENTAHAPAN PEMBINAAN

No.	Nama WBP	No. Reg	Ekspirasi	Nama dan Alamat Penjamin	Tindak Pidana/Pasal/Lama Pidana	Tgl.SPP/Tgl.Vonis/Nomor Vonis	Tahapan Pembinaan			Ket.
							1/3	1/2	2/3	
1	BEATRICE OMA a/d ARJUN CANDRA	BI.029.2023	05/12/2027	LIDRIANA OMA (Ibu Kandung). Jalan Zebra No. 60 Rt. 04 Kec. Palu Selatan Kota Palu, Sulawesi Tengah. No. Telp. 082191817004	NARKOTIKA/Pasal 114 UU RI No. 35 Tahun 2009/10 Tahun, Denda Rp 1.000.000.000, Sub. 3 Bulan	Tgl 29/11/2018 / Tgl 27/03/2019 No. 19/Pid.Sus/2019/PN.Tnr	29/03/2021	29/11/2022	26/07/2024	Pembebasan Bersyarat (PB)
2	RIA ARDIANY NYEMEN BINTI ANDI TAHARUDDIN	BI.031.2022	06/08/2026	SISKA SUNARTI (Ibu Kandung). Jalan Jend. Sudirman Marconi No. 32 RT. 01 Kel. Damai Kec. Balikpapan Kota. No. Telp.081256405030	NARKOTIKA/Pasal 112 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009/5 Tahun 6 Bulan, Denda Rp 800.000.000, Sub. 3 Bulan	Tgl 21/08/2021 / Tgl 17/01/2022 No. 514/Pid.Sus/2021/ PN Bpp	04/12/2022	04/11/2023	05/10/2024	Pembebasan Bersyarat (PB)
3	ROBIATUL ADAWIYAH ALS AMEL BINTI ERWIN	BI.005.2022	03/10/2026	RAHMATIAH (Nenek) Jalan Panjaitan Gg. Ikhlas RT. 67 Kel. Loa Ipuh Kec. Tenggarong. No. 082352411277	NARKOTIKA/Pasal 114 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009/5 Tahun 6 Bulan, Denda Rp 1.000.000.000, Sub. 2 Bulan	Tgl 18/09/2021 / Tgl 09/02/2022 No. 609/PID.SUS/2021/PN TRG	31/01/2023	01/01/2024	02/12/2024	Pembebasan Bersyarat (PB)
4	WELLA ADRIANI GESTRI OETOMO BINTI BOEDI OETOMO	BI.096.2021	29/03/2027	SITI ROWIYATUN (Tante) Jalan Cipto Mangunkusumo RT. 10 No. 26 Kel. Sengkotek Kec. Loa Janan Ilir. No. Telp. 082254359388	NARKOTIKA/ Pasal 114 UU RI No. 35 Tahun 2009/ 7 Tahun, Denda Rp 1.000.000.000, Sub. 3 Bulan	Tgl 22/01/2021 / Tgl 10/08/2021 No. 382/PID.SUS/2021/PN SMR	21/07/2022	19/09/2023	17/11/2024	Pembebasan Bersyarat (PB)

Tenggarong, 06 Februari 2024
KEPALA

Triana Agustin
NIP. 198208282000122001

[illegible]

LAPORAN PEMBINAAN KEPRIBADUAN DAN PEMBINAAN KEMANDIRIAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Alamat : Jl. Imam Bonjol No.37 Kampung Melayu Tenggarong, Kutai Kartanegara
Telp. 0541 – 6720100 Email : lpp.smd@gmail.com

LAPORAN
KEGIATAN PEMBINAAN KEPRAMUKAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG OLEH KWARTIR CABANG KUTAI KARTANEGARA

A. Pendahuluan

1. Umum

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan menegaskan bahwa sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas, serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Terlaksananya kegiatan Pembinaan Kepramukaan bagi warga binaan Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong bekerja sama dengan Kwartir Cabang Kutai Kartanegara.

b. Tujuan

Kegiatan Kepramukaan merupakan salah satu upaya dari Lapas Perempuan Kelas II A Tenggarong untuk menanamkan kedisiplinan, wawasan kebangsaan dan cinta tanah air dan bangsa Indonesia kepada para warga binaan Menyadarkan mereka agar dapat menjadi warga negara yang baik yang dapat berbakti bagi bangsa dan negaranya. Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan) merupakan usaha yang diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berfikir warga binaan pemasyarakatan semakin meningkat sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan.

3. Ruang Lingkup

Warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong

4. Dasar

1. Undang – undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan: [illegible]

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 31 Tahun 1999 (31/1999) Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1999 Tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
5. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
6. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;

B. Kegiatan yang di Laksanakan

Kegiatan Pembinaan Kepramukaan bagi warga binaan Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong Bulan Maret 2024 dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Sabtu, 16 Maret 2024
Pukul : 09.00 WITA s/d 11.00 WITA
Tempat : Halaman Kantor Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong
Narasumber : 2 orang Instruktur Kwartir Cabang Kutai Kartanegara
Peserta : 38 orang WBP

Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah:

- Kegiatan diawali dengan berdoa bersama dan dilanjutkan dengan upacara dan pembacaan Dasa Dharma Pramuka dipimpin oleh Instruktur.
- Ice Breaking dengan permainan Konsentrasi Hitung dan Gerak dilanjutkan dengan Penjelasan tentang SESOSIF (Spiritual,Emosional, Sosial, Intelektual, Fisik) yg merupakan Prinsip Dasar Kepramukaan bertujuan untuk membentu peserta didik (Gerakan Pramuka) yang memiliki 3K, yakni Kebangsaan (nasionalisme), Keterampilan (skillful) dan juga Karakter (characters). Selain itu, para anggota Gerakan Pramuka juga diharapkan memiliki 5 kecerdasan yang biasa disebut dengan kecerdasan SESOSIF (Spiritual,Emosional, Sosial, Intelektual, Fisik).

C. Hasil yang Dicapai

- Warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong mendapatkan penjelasan tentang SESOSIF (Spiritual,Emosional, Sosial, Intelektual, Fisik) yg merupakan Prinsip Dasar Kepramukaan bertujuan untuk membentu peserta didik (Gerakan Pramuka) yang memiliki 3K, yakni Kebangsaan (nasionalisme), Keterampilan (skillful) dan juga Karakter (characters).
- Pembinaan Kepramukaan bagi warga binaan pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong terlaksana secara tertib dan aman.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan: https://tte.bssn.go.id/verifikasi

D. Kesimpulan Saran

1. Kesimpulan

   Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Tenggarong telah melaksanakan kegiatan pembinaan berbangsa dan bernegara berupa kepramukaan, yang dilaksanakan secara rutin bekerjasama dengan Kwartir Cabang Kutai Kartanegara

2. Saran

   Melaksanakan kegiatan kepramukaan secara rutin untuk menanamkan rasa kesadaran berbangsa dan bernegara kepada warga binaan.

E. Penutup

Demikian laporan ini disampaikan untuk menjadi periksa, terimakasih.

Tenggarong, 16 Maret 2024
Kepala

Triana Agustin
NIP. 198208282000122001

DOKUMENTASI PEMBINAAN KEPRAMUKAAN BAGI WARGA BINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG OLEH KWARTIR CABANG KUTAI KARTANEGARA

SABTU, 16 MARET 2024

Kegiatan Pramuka oleh Kwartir Cabang Kutai Kartanegara
Penjelasan tentang SENSOSIF dan
Permainan Konsentrasi Hitung dan Gerak
16 Maret 2024

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan: https://tte.bssn.go.id/verifikasi

LAPORAN KEGIATAN
PELAKSANAAN PEMBINAAN KEMANDIRIAN
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

BULAN : JANUARI 2024

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Alamat : Jl. Imam Bonjol No.37 Kampung Melayu, Tenggarong,
Kutai Kartanegara Telp. (0541) 6720100

LAPORAN KEGIATAN
PELAKSANAAN PEMBINAAN KEMANDIRIAN
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

A. PENDAHULUAN

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan yang dibentuk sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-10.OT.01.01 Tahun 2016, tentang Pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru, Jakarta, Pontianak, Palangkaraya, Samarinda, Martapura, Denpasar, dst.

Lembaga Pemasyarakatan secara umum mempunyai fungsi yaitu Menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong yang saat ini dihuni oleh 311 (Tiga Ratus Sebelas) orang memberikan Pembinaan narapidana salah satunya berupa kegiatan kerja untuk mengasah bakat dan keterampilan narapidana agar dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

B. MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN

1. MAKSUD

   Pembinaan Kemandirian dilaksanakan dengan maksud untuk membentuk Sumber Daya Manusia yang berdaya guna dan Mandiri.

2. TUJUAN
   a. Umum

      Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Kemandirian dalam pada Lembaga Pemasyarakat Perempuan Kelas IIA Tenggarong pada Bidang Manufaktur, Bidang Agribisnis dan Bidang Jasa.

   b. Khusus
      1. Memberikan bekal bagi warga binaan supaya berdaya guna dan mandiri.
      2. Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan yang bermanfaat, berilmu, berakhlak dan berguna untuk diri sendiri, keluarga, bangsa dan negara.
      3. Mampu bekerja dimasyarakat sebagai manusia yang terampil dan mandiri sehingga diterima di lingkungan masyarakat.

C. KEGIATAN

1. Bidang Manufaktur

a. Waktu

Kegiatan Kemandirian Bidang Manufaktur yang dilaksananakan secara rutin dalam Bulan Januari Sebanyak 24 (Dua Puluh Empat) Kali Kegiatan, pada tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 dan 31 Januari 2024 Waktu Pelaksanaan kegiatan dimulai Pukul 09.00 Wita s.d Pukul 15.00 Wita. Untuk kegiatan handycraft dan menjahit dilaksanakan pada Ruang Kegiatan Kerja Kantor Lapas Perempuan.

b. Pelaksanaan Kegiatan

1) Peserta

Kegiatan Manufaktur diikuti oleh 40 (Empat Puluh) orang Warga Binaan Pemasyarakatan, yang terdiri dari 34 (Tiga Puluh Empat) orang WBP Kegiatan Handycraft dan 6 (Enam) orang WBP kegiatan Menjahit.

2) Instruktur

Instruktur Kegiatan Manufaktur adalah 4 (Empat) Orang WBP yang dinilai mempunyai kemampuan lebih dari peserta kegiatan yang lain sehingga dapat membantu mengajarkan keterampilan dalam bidang Manufaktur.

c. Kegiatan pembinaan kemandirian bidang manufaktur pada bulan Januari 2024 meliputi:

1) Kegiatan rutin menjahit dan Handycraft;
2) Penyerahan sertifikat pelatihan kepada WBP yang menjalankan reintegrasi PB

d. Hasil kegiatan pembinaan kemandirian bidang manufaktur

1) Menjahit dan Handycraft
    a. Jahitan (121), Tas (48), Bantal (14), Seprai (4), Sarung Bantal (11), Kulit Bantal (1), Pouch (6), Tempat Tisu (5), Sarung Bantal Sofa (1 set), Gantungan Nama Tumpar (58), Aplikasi Tumpar (16), Peci (5) dan Gantungan Besi (5)
    b. Hasil Penjualan Rp 10.393.000,-
    c. PNBP Rp 1.299.125,-

2. Bidang Agribisnis

a. Waktu dan Tempat

Kegiatan Kemandirian Bidang Agribisnis Pertanian Selama Bulan Januari dilaksanakan Sebanyak 24 (Dua Puluh Empat) kali kegiatan pada pada tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 dan 31 Januari 2024

Waktu pelaksanaan kegiatan dimulai dari Pukul 09.00 Wita s.d Pukul 11.00 Wita.

Untuk Kegiatan Kemandirian Bidang Agribisnis Pertanian dilaksanakan pada Area Beranggang Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

b. Pelaksanaan Kegiatan

1) Peserta

Kegiatan Pertanian diikuti oleh 5 (Lima) orang Warga Binaan Pemasyarakatan

2) Instruktur

Instruktur Kegiatan Pertanian adalah 2 (Dua) Orang WBP yang dinilai mempunyai kemampuan lebih dari peserta kegiatan yang lain sehingga dapat membantu mengajarkan keterampilan dalam bidang Agribisnis Pertanian.

c. Kegiatan Kemandirian Bidang Agribisnis Pertanian pada Bulan Januari 2024 meliputi:

1) Kegiatan pembinaan kemandirian rutin bidang agribisnis (pertanian), meliputi perawatan dan kebersihan area lahan pertanian;
2) Kegiatan pemanenan dan pemasaran tanaman hasil pertanian;
3) Kegiatan Koordinasi terkait pembinaan kemandirian dengan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara.

d. Hasil kegiatan pembinaan kemandirian bidang agribisnis

1) Pertanian

a. Buah Pepaya (365 pack), Jamur (2,5 kg), Kemangi (4 ikat), Tomat (25 bks), selada (1 ikat) dan Sawi (30 ikat)
b. Hasil Penjualan Rp 3.075.000,-
c. PNBP Rp 384.375,-

3. Bidang Jasa

a. Waktu dan Tempat

Kegiatan Pembinaan Kemandirian Bidang Jasa yang dilaksananakan secara rutin dalam Bulan Januari dilaksanakan Sebanyak 24 (Dua Puluh Empat) kali kegiatan pada pada tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 dan 31 Januari 2024

Waktu Pelaksanaan kegiatan dimulai Pukul 09.00 Wita s.d Pukul 15.00 Wita.

Untuk kegiatan pembinaan kemandirian bidang jasa kecantikan secara rutin di laksanakan di Area Ruang Kerja Salon.

b. Pelaksanaan Kegiatan

1) Peserta

Kegiatan Salon Kecantikan diikuti oleh 5 (Lima) orang WBP untuk kegiatan Salon.

2) Instruktur

Instruktur Jasa Salon adalah 2 (dua) orang WBP yang dinilai mempunyai kemampuan lebih dari peserta kegiatan yang lain sehingga dapat membantu mengajarkan keterampilan dalam bidang jasa.

c. Kegiatan pembinaan kemandirian bidang jasa, bulan Januari 2024 meliputi:

1) Kegiatan rutin pembinaan kemandirian jasa (salon)
2) Kegiatan jasa salon dengan costumer sebanyak 46 (Empat Puluh Enam) orang.
3) Kegiatan pelatihan jasa salon hairdo dan creambath bekerjasama dengan Yayasan bunga pertiwi dan mercy ministry

d. Hasil kegiatan pembinaan kemandirian bidang jasa ;

1) Salon
    a. Smoothing (11), Warna (1), Potong Rambut (12), Cuci Rambut (3), Masker (8), Toning (5),Medicure (2), Catok (1), dan Jasa (3)
    b. Hasil Jasa Rp 4.100.000,-
    c. PNBP Rp 512.500,-

4. **Pelaksanaan**
   a. WBP dilakukan Bon oleh Seksi Bimbingan Kerja
   b. Pemeriksaan dan Penggeledahan dilakukan oleh Anggota Regu Pengamanan pada saat WBP Keluar Blok Hunian
   c. Pemeriksaan Lalu Lintas WBP Oleh Petugas P2U didampingi Seksi Kegiatan Kerja
   d. Pengawasan dan pencatatan penggunaan Sarana Kerja kegiatan oleh petugas Subsi Sarana Kerja
   e. Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan oleh Petugas seksi kegiatan kerja
   f. Pemeriksaan dan penggeledahan WBP setelah selesai melakukan kegiatan kerja oleh petugas seksi kegiatan kerja.

D. PENUTUP

Demikian Laporan Kegiatan Pembinaan Kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Bidang Manufaktur, Bidang Jasa dan Bidang Agribisnis di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong ini disampaikan, untuk menjadi periksa.

Tenggarong, 01 Februari 2024

Mengetahui
Plh. Kepala
Andi Hasnaeni
NIP 196309071992032001

Plh Kasi Giatja
Dini Fazriani
NIP 198005272005122001

DOKUMENTASI KEGIATAN PEMBINAAN KEMANDIRIAN
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

1. WBP dilakukan Bon oleh Seksi Bimbingan Kerja

2. Pemeriksaan dan Penggeledahan dilakukan oleh Anggota Regu Pengamanan pada saat WBP Keluar Blok Hunian

3. Pemeriksaan Lalu Lintas WBP Oleh Petugas P2U didampingi Seksi Kegiatan Kerja

4. Pengawasan dan pencatatan penggunaan Sarana Kerja kegiatan oleh petugas Subsi Sarana Kerja

5. Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan oleh Petugas seksi kegiatan kerja

6. Pemeriksaan dan penggeledahan WBP setelah selesai melakukan kegiatan kerja oleh petugas seksi kegiatan kerja.

DOKUMENTASI KEGIATAN PEMBINAAN KEMANDIRIAN
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN BIDANG MANUFAKTUR
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

1. Kegiatan Pembinaan Rutin Bidang Manufaktur (Menjahit dan Handycraft)

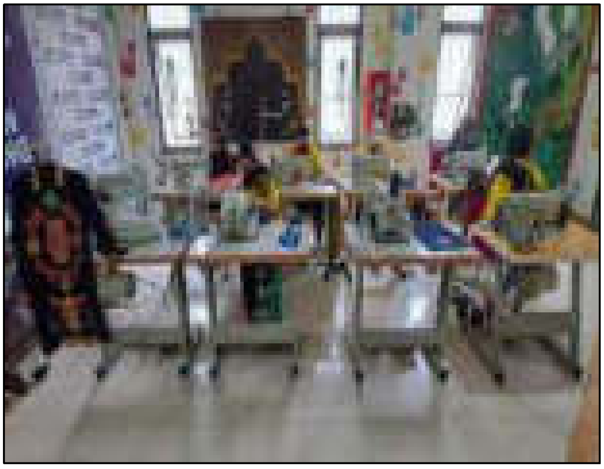

2. Penyerahan sertifikat pelatihan kepada WBP yang bebas dan menjalani reintegrasi (PB)

DOKUMENTASI KEGIATAN PEMBINAAN KEMANDIRIAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN BIDANG AGRIBISNIS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

1) Kegiatan pembinaan kemandirian rutin bidang agribisnis (pertanian), meliputi perawatan dan kebersihan area lahan pertanian;

2) Kegiatan pemanenan dan pemasaran tanaman hasil pertanian

3) Kegiatan Koordinasi terkait pembinaan kemandirian dengan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara.

DOKUMENTASI KEGIATAN PEMBINAAN KEMANDIRIAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN BIDANG JASA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

1. Kegiatan rutin pembinaan kemandirian jasa (salon)

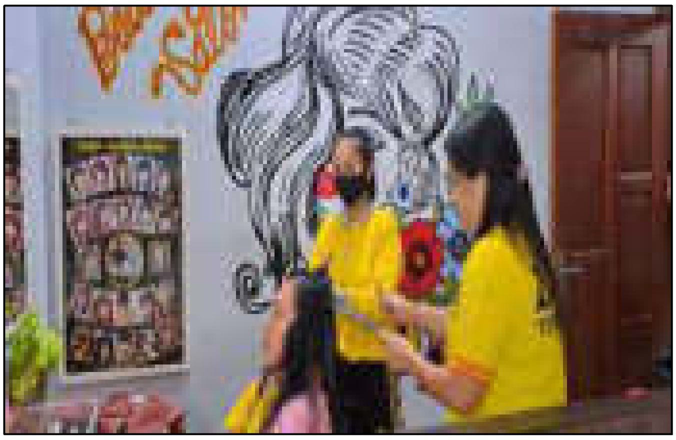

2. Kegiatan pelatihan jasa salon hairdo dan creambath bekerjasama dengan Yayasan bunga pertiwi dan mercy ministry

DOKUMENTASI PENGARAHAN KEPADA WARGA BINAAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Alamat : Jl. Imam Bonjol No.37 Rt.08 Kelurahan Melayu, Tenggarong – Kutai Kartanegara
Telp. 0541-6720100 Email : lpp.smd@gmail.com

Dokumentasi pelaksanaan pengarahan kepada Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong tentang pentingnya pendidikan sebagai upaya dalam **meningkatkan jumlah Narapidana yang memperoleh pendidikan.**

Hari/Tanggal : Senin, 05 Februari 2024
Tempat : Blok Hunian
Pengarahan kepada WBP terkait kejar paket

Hari/Tanggal : Sabtu, 09 Maret 2024
Tempat : Blok Hunian
Pengarahan kepada WBP terkait pentingnya pendidikan

SK HUKDIS NARAPIDANA

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Alamat : Jl. Imam Bonjol No.37 kampung Melayu Tenggarong,Kutai Kartanegara
Telp. 0541-6720100 Email : [illegible]

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II A TENGGARONG

Nomor : W18.PAS.PAS.7-UM.05.03-[illegible]

TENTANG

PENETAPAN NARAPIDANA YANG DIKENAKAN SANKSI HUKUMAN DISIPLIN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II A TENGGARONG

KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II A TENGGARONG

Menimbang :
- a. Bahwa pemberian hukuman disiplin dilakukan untuk menegakkan tata tertib lapas dan menimbulkan efek jera bagi narapidana yang melanggar.
- b. Bahwa nama yang ditetapkan dalam lampiran keputusan ini telah memenuhi syarat substantif dan administratif untuk dikenakan sanksi hukuman disiplin di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Tenggarong.

Mengingat :
- a. Undang-Undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
- b. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
- c. Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
- d. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.HH.01.PK.05.06 Tahun 2008 Tentang Perubahan Permen Kum dan HAM RI No. M.01.PK.04.10 Tahun 2007 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat;
- e. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. : M.HH-02.PK.06 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua atas Permen Kum HAM RI No. : M.01.PK.04.10 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.
- f. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lapas.

Memperhatikan : Hasil Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Tenggarong Nomor 09/02/2024 Tanggal 27 Februari 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Tenggarong Tentang Penetapan Narapidana yang Dikenakan Hukuman Disiplin di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Tenggarong

Pertama : Narapidana yang namanya tersebut pada lajur 2 (dua) ditetapkan sanksi hukuman disiplin tersebut pada lajur 5 (lima) pada lampiran keputusan ini.

Kedua : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Tenggarong
PADA TANGGAL : 27 Februari 2024
KEPALA,

TRIANA AGUSTIN
NIP. [illegible]

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Alamat : Jl. Imam Bonjol No 37 Kampung Melayu, Tenggarong, Kutai Kartanegara
Telp. [illegible] Email : [illegible]

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Tenggarong
Nomor : W18.PAS.PAS.7-[illegible]
Tanggal : 27 Februari 2024

NO	a. Nama b. Umur c. Perkara d. Pidana e. Ekspirasi	Bentuk Pelanggaran Tata Tertib	Jenis Hukuman Tata Tertib yang Dijatuhkan	Hukuman Tata Tertib	Hukuman Tata Tertib Dilaksanakan dari Tgl ... s/d ...	Keterangan
1	a. RUT NOVIA NINGTYAS PUTRI BINTI SORATNO b. 29 Tahun c. UU RI No. 35 Tahun 2009 d. 8 tahun subsider 3 bulan e. 02/04/2027	a. Melakukan Tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang tim pengamat pemasyarakatan termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan Hukuman Disiplin tingkat berat. (Permenkumham RI Nomor 06 tahun 2013 pasal 10 Ayat 3 huruf q Tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan)	Hukuman Disiplin Tingkat Berat	a. Memasukkan dalam sel pengasingan selama 1 x 6 hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari dan dicatat dalam register F. b. Tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register F.	27 Februari 2024 s/d 09 Maret 2024	

Tenggarong, 27 Februari 2024
KEPALA,

TRIANA AGUSTIN
NIP. [illegible]

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Alamat : Jl. Imam Bonjol No.37 kampung Melayu Tenggarong,Kutai Kartanegara
Telp. 0541-6720100 Email : [illegible]

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II A TENGGARONG

Nomor : W18.PAS.PAS.7-UM.05.03-0705

TENTANG

PENETAPAN NARAPIDANA YANG DIKENAKAN SANKSI HUKUMAN DISIPLIN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II A TENGGARONG

KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II A TENGGARONG

Menimbang :
- a. Bahwa pemberian hukuman disiplin dilakukan untuk menegakkan tata tertib lapas dan menimbulkan efek jera bagi narapidana yang melanggar;
- b. Bahwa nama yang ditetapkan dalam lampiran keputusan ini telah memenuhi syarat substantif dan administratif untuk dikenakan sanksi hukuman disiplin di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Tenggarong.

Mengingat :
- a. Undang-Undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
- b. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
- c. Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- d. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.HH.01.PK.05.06 Tahun 2008 Tentang Perubahan Permen Kum dan HAM RI No. M.01.PK.04.10 Tahun 2007 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.
- e. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.HH-02.PK.06 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua atas Permen Kum HAM RI No. M.01.PK.04.10 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.
- f. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lapas.

Memperhatikan : Hasil Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Tenggarong Nomor 08/02/2024 Tanggal 21 Februari 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Tenggarong Tentang Penetapan Narapidana yang Dikenakan Hukuman Disiplin di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Tenggarong.

Pertama : Narapidana yang namanya tersebut pada lajur 2 (dua) ditetapkan sanksi hukuman disiplin tersebut pada lajur 5 (lima) pada lampiran keputusan ini.

Kedua : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Tenggarong
PADA TANGGAL : 21 Februari 2024
KEPALA,

ERLANY AGUSTIN
NIP. 198308112000122001

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Alamat : [illegible] Kampung Melayu Tenggarong, Kutai Kartanegara
Telp. [illegible] Email : [illegible]

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong
Nomor : W18.PAS.PAS.7.UM.01.01-[illegible]
Tanggal : 21 Februari 2024

NO	a. Nama b. Umur c. Perkara d. Pidana e. Ekspirasi	Bentuk Pelanggaran Tata Tertib	Jenis Hukuman Tata Tertib yang Dijatuhkan	Hukuman Tata Tertib	Hukuman Tata Tertib Dilaksanakan dari Tgl ... s/d ...	Keterangan
1.	a. SUHARNI ALS ADEL BINTI H. UDIN SAGENA b. 34 Tahun c. PENIPUAN (378 KUHP) d. 2 tahun subsider 6 bulan e. 15/01/2025	a. Melakukan Tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang tim pengamat pemasyarakatan termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan Hukuman Disiplin tingkat berat (Permenkumham RI Nomor 06 tahun 2013 pasal 10 Ayat 3 huruf q Tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan)	Hukuman Disiplin Tingkat Berat	a. Memasukkan dalam sel pengasingan selama 1 x 6 hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari dan dicatat dalam register H. b. Tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register F.	21 Februari 2024 s/d 04 Maret 2024	

Tenggarong, 21 Februari 2024
KEPALA

[illegible]
NIP. [illegible]

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR

LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Alamat : Jl. Imam Bonjol No.37 RT.08, Kel.Melayu, Tenggarong Kutai Kartanegara
Telp. 0541-6720100 Email : lpp.smd@gmail.com

17 Juni 2024

Yth,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Kalimantan Timur
di -
Samarinda

SURAT PENGANTAR

Nomor : W18.PAS.7. PR.04.01- 1408

NO	Naskah Dinas yang Dikirimkan	Banyaknya	Keterangan
1.	Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Triwulan II Tahun 2024 pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong	1 Berkas	Demikian untuk menjadi periksa

Plh.K E P A L A

Endang Utmiati
NIP 197505142000032001

Tembusan:
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI.

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jalan: Imam Bonjol NO.37 RT.08 Kelurahan Melayu. Tenggarong - Kutai Kartanegara
Laman : http://lppsamarinda.kemenkumham.go.id/
E-mail : lpp.smd@gmail

Nomor : W18.PAS.7.PW.01.01- 1407 17 Juni 2024
Lampiran : 1(satu) berkas
Hal : Laporan Penyelenggaraan SPIP
Triwulan II Tahun 2024

Yth : Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kalimantan Timur
di
Samarinda

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.HH-02.PW.02.03 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.HH-02.PW.02.03 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, dengan ini kami sampaikan laporan Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong Triwulan II Tahun 2024, dengan pokok-pokok sebagai berikut :

1. Kemajuan Penyelenggaraan SPIP

   Realisasi kemajuan penyelenggaraan SPIP sampai dengan Triwulan II mencapai 62 **%** dari target pada tahun 2024 Capaian ini disebabkan :

   a. Pencapaian Realisasi kemajuan penyelenggaraan SPIP didukung dengan :

      1. Telah dibentuknya Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melalui Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong Nomor: W.18.PAS.PAS.7-0339-PW.01.01 Tahun 2024 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong pada tanggal 15 Januari 2024;

2. Telah dibentuknya SK Pembentukan Satuan Tugas dan Sekretariat Penyelenggaraan Manajemen Risiko melalui Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong Nomor: W.18.PAS.PAS.7-0747-PW.01.01 Tahun 2024 tentang Pembentukan Satuan Tugas dan Sekretariat Penyelenggaraan Manajemen Risiko Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong pada tanggal 25 Maret 2024;
3. Telah dibentuknya SK Tim Assesor Penilaian Mandiri Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melalui Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong Nomor: W18.PAS.PAS.7-0442-PW.01.01 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Assesor Penilaian Mandiri Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong pada tanggal 21 Februari 2024;
4. Telah dibentuknya SK Unit Pemilik Risiko (UPR) melalui Keputusan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong Nomor: W.18.PAS.PAS.7-0454-PW.01.01 Tahun 2024 tentang Pembentukan Unit Pemilik Risiko (UPR) Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong pada tanggal 21 Februari 2024;
5. Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong, pada tanggal 24 Mei 2024;
6. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong, pada tanggal 05 Juni 2024;

b. Adapun hambatan-hambatan yang ditemukan dalam proses penyelenggaraan SPIP di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong yaitu :
    1. Masih adanya beberapa pegawai yang belum memahami pelaksanaan SPIP dan Pembuatan Manajemen Risiko di Sub Bagian/Seksi di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

Rincian kemajuan penyelanggaraan SPIP dapat dilihat pada lampiran.

2. Rencana Tindaklanjut pada Triwulan selanjutnya

   Atas capaian tersebut, rencana tindaklanjut Triwulan III adalah :

   a. Untuk mengatasi hambatan/kondisi yang tidak mendukung dalam pencapaian target dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :

      Memaksimalkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada dengan merangkap beberapa tugas dalam pelaksanaan penerapan SPIP di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong;

   b. Rencana tindaklanjut untuk Triwulan selanjutnya dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :

      1. Mengirim pegawai/pejabat untuk mengikuti BIMTEK baik yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur baik secara langsung maupun melalui zoom, untuk meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) Pegawai di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong;
      2. Melakukan monitoring secara berjenjang dan memberikan motivasi serta arahan kepada seluruh pegawai tentang penting dan perlunya koordinasi antara JFU, JFT serta pejabat Struktural agar dapat terlaksananya SPIP secara maksimal dan dapat terealisasikannya Rencana Aksi Penanganan Risiko berdasarkan Manajemen Risiko yang telah dibuat di masing-masing Seksi di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

Demikian kami sampaikan, untuk menjadi periksa.

Plh.KEPALA

Endang Utmiati
NIP 197505142000032001

Tembusan:
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM;
2. Inspektur Jenderal Kemeneterian Hukum dan HAM.

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jalan: Imam Bonjol NO.37 RT.08 Kelurahan Melayu. Tenggarong - Kutai Kartanegara
Laman : http://lpptenggarong.kemenkumham.go.id/
E-mail : lpptenggarong@gmail.com

LAPORAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) TRIWULAN II TAHUN 2024 LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2013 tentang Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH-02.PW.02.03 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia RI Nomor 05 Tahun 2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor:M.HH-02.PR.03.01 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pelaporan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI;
5. Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP;
6. Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-690/K/DH/2012 tentang Pedoman Pemantauan Perkembangan Penyelenggaraan SPIP.

B. Tujuan SPIP

Sebagai media akuntabilitas pelaporan dan bahan pemantauan dan evaluasi atas penyelenggaraan SPIP di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

C. Ruang lingkup

Laporan ini meliputi penyelenggaraan SPIP di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

BAB II KEMAJUAN PENYELENGGARAAN SPIP

A. Persiapan

Realisasi persiapan penyelenggaraan SPIP Tahun 2024 dengan rincian kegiatan dalam tahap persiapan sebagai berikut :

a. Pembentukan Satgas
   1. Telah dilaksanakan pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melalui Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong Nomor: W.18.PAS.PAS.7-0339-PW.01.01 Tahun 2024 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong pada tanggal 15 Januari 2024;
   2. Telah dilaksanakan pembentukan Satuan Tugas dan Sekretariat Penyelenggaraan Manajemen Risiko melalui Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong Nomor: W.18.PAS.PAS.7-0747-PW.01.01 Tahun 2024 tentang Pembentukan Satuan Tugas dan Sekretariat Penyelenggaraan Manajemen Risiko Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong pada tanggal 25 Maret 2024;
   3. Telah dilaksanakan Pembentukan Tim Assesor Penilaian Mandiri Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melalui Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong Nomor: W18.PAS.PAS.7-0442-PW.01.01 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Assesor Penilaian Mandiri Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong pada tanggal 21 Februari 2024;
   4. Telah dilaksanakan Pembentukan Unit Pemilik Risiko (UPR) melalui Keputusan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong Nomor: W.18.PAS.PAS.7-0454-PW.01.01 Tahun 2024 tentang Pembentukan Unit Pemilik Risiko (UPR) Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong pada tanggal 21 Februari 2024;

b. Pemahaman (*Knowledge*)

   Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong, pada tanggal 24 Mei 2024 (**dokumen kegiatan terlampir)**.

c. Pemetaan (*Maping*)

   Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong, pada tanggal 05 Juni 2024 (**dokumen kegiatan terlampir**).

B. Pelaksanaan

a. Penilaian Resiko

   Penilaian risiko merupakan salah satu unsur penting dalam penerapan SPIP, karena dengan penilaian risiko akan diidentifikasi kendala/hambatan baik internal maupun eksternal yang akan mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran organisasi. Dengan penilaian risiko juga akan menentukan langkah antisipasi untuk diambil cara terbaik agar apa yang menjadi rencana kegiatan dapat dilaksanakan dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam unsur penilaian risiko terdapat 2 (dua) sub unsur dan kegiatannya telah dibahas dalam forum rapat mitigasi risiko dengan hasil sebagai berikut:

I. Identifikasi Risiko (matrik terlampir dari masing-masing Seksi) terdiri dari :
   - Penetapan tujuan program/kegiatan;
   - Indentifikasi risiko.

II. Identifikasi Risiko (matrik terlampir dari masing-masing Seksi) terdiri dari :
   - Analisis Risiko;
   - Evaluasi Risiko;
   - Rencana Aksi Penanganan Risiko;
   - Pemantauan Risiko;
   - Pengendalian Kegiatan Risiko.

b. Pembangunan infrastruktur (*norming*)

Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong telah dilakukan terkait dengan perbaikan *area of improvement* dan pengelolaan risiko melalui pembentukan Tim Satgas SPIP Tahun 2024 yang mengawal dan mengoordinasikan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

c. Internalisasi / implementasi (*forming*)

Kegiatan yang telah dilakukan terkait Internalisasi/Implementasi SPIP di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong adalah: peningkatan pemahaman atas penyelenggaraan SPIP khususnya terkait dengan penguatan Maturitas SPIP (**dokumen terlampir**).

C. Pengembangan berkelanjutan (*Performing*)

Realisasi pengembangan berkelanjutan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong sampai dengan 17 Juni 2024 sudah sangat baik, tapi ada beberapa kegiatan yang akan di rencanakan di Triwulan Selanjutnya agar penyelenggaraan SPIP di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong terlaksana dengan maksimal, diantaranya yaitu :

Melakukan monitoring secara berjenjang dan memberikan motivasi serta arahan kepada seluruh pegawai tentang penting dan perlunya koordinasi antara JFU, JFT serta pejabat Struktural agar dapat terlaksananya SPIP secara maksimal dan dapat terealisasikannya Rencana Aksi Penanganan Risiko berdasarkan Manajemen Risiko yang telah dibuat di masing-masing Seksi di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

BAB III PENUTUP

A. Pelaksanaan rencana tindak lanjut

Atas capaian kerangka Penyelenggaraan SPIP Triwulan II Tahun 2024 di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong, Rencana Tindak Lanjut di Triwulan III adalah sebagai berikut :

a. Melakukan sosiaisasi rutin kepada seluruh Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong agar dapat terlaksananya SPIP secara maksimal dan dapat terealisasikannya Rencana Aksi Penanganan Risiko berdasarkan Manajemen Risiko yang telah dibuat di masing-masing Seksi di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.
b. Melakukan monitoring secara berjenjang dan memberikan motivasi serta arahan kepada seluruh pegawai tentang penting dan perlunya koordinasi antara JFU, JFT serta pejabat Struktural.

B. Hambatan, penyebab dan alternatif pemecahan

Adapun hambatan-hambatan yang ditemukan dalam proses penyelenggaraan SPIP di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong yaitu :

Masih adanya beberapa pegawai yang belum memahami pelaksanaan SPIP dan Pembuatan Manajemen Risiko di Sub Bidang/Bagian di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

Alternatif pemecahan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah :

a. Memaksimalkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada dengan merangkap beberapa tugas dalam pelaksanaan penerapan SPIP dan pembuatan Manajemen Risiko di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong;
b. Mengirim pegawai/pejabat untuk mengikuti BIMTEK yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur baik secara langsung maupun melalui zoom, untuk meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) Pegawai di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong;
c. Melakukan monitoring secara berjenjang dan memberikan motivasi serta arahan kepada seluruh pegawai tentang penting dan perlunya koordinasi antara JFU, JFT serta pejabat Struktural agar dapat terlaksananya SPIP secara maksimal dan dapat terealisasikannya Rencana Aksi Penanganan Risiko berdasarkan Manajemen Risiko yang telah dibuat di masing-masing Seksi di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

C. Rencana aksi Triwulan berikutnya yaitu melaksanakan sosialisasi serta melaksanakan pendampingan penerapan Manajemen Risiko pada masing-masing seksi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

D. Tindak lanjut penyelenggaraan SPIP di Triwulan III yaitu :

a. Melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan implementasi SPIP di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong;
b. Menyusun Laporan SPIP Triwulan III sesuai dengan format Laporan SPIP berdasarkan arahan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur;

c. Melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan SPIP di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tanggarong.

Tenggarong, 25 Maret 2024

Plh.KEPALA

Endang Utmiati

NIP 197505142000032001

LAPORAN KEMAJUAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) TAHUN 2024
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

NO	TAHAPAN	INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	BUKTI DOKUMEN	VOLUME					% CAPAIAN
					RENCANA SATU TAHUN	REALISASI				
						TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	
A.	**PERSIAPAN**									
1.	Pemahaman	Jumlah laporan kegiatan sosialisasi/ FGD/ Diseminasi tentang SPIP	Jumlah Pegawai	Laporan kegiatan, daftar hadir, dan foto Sosialisasi tentang SPIP.	4	1	1	-	-	50 %
		Jumlah laporan kegiatan terkait SPIP	Laporan	Laporan kegiatan Sosialisasi SPIP, SK UPR, SK Tim Assesor, SK Satgas Sekretariat Penyelenggaraan Manajemen Risiko, dan SK Satgas SPIP	4	1	1	-	-	50 %
2.	Pemetaan	Jumlah Laporan Kegiatan SPIP di masing-masing Seksi pada LPP Tenggarong	Dokumen	Laporan Rencana Kegiatan pada tahun 2024 (RKT)	8	2	2	-		50 %
3.	Penyusunan Rencana Monitoring Kegiatan Penyelenggaraan	Jumlah dokumen rencana Monitoring	Dokumen	Laporan Monitoring dan Evaluasi SPIP	4	1	1	-	-	50 %
B.	**PELAKSANAAN**									
1.	Tingkat entitas (Eselon I, Kanwil/ Unit Pelaksana Teknis)	Jumlah dokumen penilaian risiko Level Entitas dan Aktifitas	Dokumen	Pernyataan Fakta Integritas	1	1	-	-	-	100 %
		Jumlah kebijakan/ prosedur/ pedoman dalam	Dokumen	Kebijakan/ SOP/ SK/ Nota dinas/ dokumen lainnya	4	4	-	-	-	100 %

		pembangunan / rehab infrastruktur								
2.	Tingkat Kegiatan (Kegiatan-kegiatan pada Eselon IV)	Jumlah dokumen penilaian risiko Level Entitas dan Aktifitas	Dokumen	Dokumen Profil Risiko Dan Peta Risiko	4	1	1	-	-	50 %
		Jumlah kebijakan/ prosedur/ pedoman dalam pembangunan / rehab infrastruktur	Dokumen	Kebijakan/ SOP/ SK/ Nota dinas/ dokumen lainnya	4	4	-	-	-	100 %
		Jumlah kegiatan internalisasi/ Implementasi	Kegiatan	Laporan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan SPIP	4	1	1	-	-	50 %
3.	Pengembangan Berkelanjutan	Jumlah rapat berkala	Kegiatan	Laporan dan daftar hadir	4	1	1	-	-	50 %
		Jumlah Laporan kemajuan penyelenggaraan SPIP	Dokumen	Dokumen SPIP triwulanan	4	1	1	-	-	50 %
		Presentase penyelesaian tindak lanjut	Dokumen	Laporan Tindak Lanjut Temuan BPK dan ITJEN tergabung dalam Kantor Wilayah	-	-	-	-	-	-
				JUMLAH	**45**	**18**	**10**	**-**	**-**	**62%**

PENETAPAN TUJUAN

Unit Pemilik Risiko : Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong
Periode Penerapan : Tahun 2024

No	Strategi/ Program/ Kegiatan	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Permasalahan
1	2	3	4	5
1	Pengelolaan Administratratif dan Fasilitatif Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	Belum dilakukan penghapusan BMN sebagai tindaklanjut pembangunan lanjutan Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong
2			Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	Kurangnya SDM baik Pejabat Struktural maupun JFU
3			Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	Pejabat Administrasi Eselon IV belum memiliki Tanda Tangan Elektronik
4			Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	Kesalahan penempatan dalam perekaman akun belanja
5			Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	Realisasi anggaran belum sesuai dengan rencana panarikan dana
6	Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong	Terwujudnya pelayanan pemasyarakatan yang sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik, melalui peningkatan pengawasan dan pengelolaan layanan di bidang pemasyarakatan	Menurunnya tahanan yang overstaying	Masih terdapat Tahanan yang berstatus overstaying
7			Menurunnya persentase overkapasitas	Over kapasitas Warga Binaan Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong sebesar 150%
8			Menurunnya jumlah residivis	Masih terdapat Warga Binaan yang mengulangi tindak pidana

9			Meningkatnya jumlah Narapidana yang memperoleh pendidikan	Kurangnya minat program kejar paket bagi Warga Binaan
10	Pelaksanaan penegakan keamanan dan ketertiban	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban sesuai standar	Kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak Didik pelaku gangguan kamtib	Masih ada pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh Narapidana

Tenggarong, 04 Maret 2024

KEPALA

Ditandatangani secara elektronik oleh:

Triana Agustin

NIP 198208282000122001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui laman https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

IDENTIFIKASI RISIKO (DAFTAR RISIKO)

Unit Pemilik Risiko : Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong
Periode Penerapan : Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Permasalahan	Risiko		Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern yang Ada	Sisa Risiko
			Pernyataan	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang terkena		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	Belum dilakukan penghapusan BMN sebagai tindaklanjut pembangunan lanjutan Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong	Keterlambatan pembangunan lajutan Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong	Subbagian Tata Usaha	Belum ada tindaklanjut dari KPKNL	Eksternal	UC	Pengerjaan pembangunan lanjutan Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong tidak sesuai target	UPT	Melakukan usulan penghapusan BMN	Keterlambatan pembangunan lajutan Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong
2	Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	Kurangnya SDM baik Pejabat Struktural maupun JFU	Terjadi tumpang tindih beban tugas	Subbagian Tata Usaha	Purna Tugas Kepala Subbagian Tata Usaha dan kurangnya anggota regu pengamanan	Internal	C	Target kinerja tidak terpenuhi	UPT	Usul Promosi Jabatan Administrasi Pegawai Negeri Sipil Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong dan permohonan SDM	Terjadi tumpang tindih beban tugas
3	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	Pejabat Administrasi Eselon IV belum memiliki Tanda Tangan Elektronik	Terkendala dalam penggunaan aplikasi SRIKANDI	Subbagian Tata Usaha	Tidak ada tindaklanjut dari kendala pendaftaran tanda tangan elektronik	Internal	C	Pemenuhan target penggunaan aplikasi SRIKANDI tidak tercapai	UPT	Melakukan pendaftaran permohonan tanda tangan elektronik Pejabat Administrasi Eselon IV	Terkendala dalam penggunaan aplikasi SRIKANDI
4	Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	Kesalahan penempatan dalam perekaman akun belanja	Penatausahaan keuangan kurang optimal	Subbagian Tata Usaha	Keliru dalam memilih akun belanja	Internal	C	Penurunan nilai IKPA	UPT	Melakukan cross check setiap penginputan	Penatausahaan keuangan kurang optimal
5	Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	Realisasi anggaran belum sesuai dengan rencana panarikan dana	Penggunaan anggaran kurang optimal	Subbagian Tata Usaha	Kurangnya pengawasan berjenjang	Internal	C	Penurunan nilai IKPA	UPT	Rapat internal dengan pengguna anggaran	Penggunaan anggaran kurang optimal
6	Menurunnya tahanan yang overstaying	Masih terdapat Tahanan yang berstatus overstaying	Penyampaian vonis tidak tepat waktu	Seksi Binadik	Keterlambatan menerima putusan	Internal	C	Terlambat dalam perubahan status Tahanan	UPT	Melakukan permintaan vonis	Penyampaian vonis tidak tepat waktu
7	Menurunnya persentase overkapasitas	Over kapasitas Warga Binaan Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong sebesar 150%	Over kapasitas	Seksi Binadik	Masih banyak Warga Binaan yang tidak bisa integrasi	Internal	C	Mempersulit pengawasan, perawatan Lapas, dan pembinaan kurang maksimal	UPT	Optimalisasi dalam pelaksanaan program integrasi bagi Warga Binaan	Over kapasitas

8	Menurunnya jumlah residivis	Masih terdapat Warga Binaan yang mengulangi tindak pidana	Kurangnya kesadaran dan bakat Narapidana residivis	Seksi Binadik	Tidak ada efek jera dalam proses pidana	Internal	C	Overstaying	UPT	Optimalisasi dalam pembinaan kepribadian berupa kerohanian serta optimalisasi dalam pembinaan kemandirian sebagai bekal Narapidana	Kurangnya kesadaran dan bakat Narapidana residivis
9	Meningkatnya jumlah Narapidana yang memperoleh pendidikan	Kurangnya minat program kejar paket bagi Warga Binaan	Menurunnya persentase Narapidana yang memperoleh hak pendidikan	Seksi Binadik	Kurangnya kesadaran warga binaan perihal pentingnya pendidikan	Internal	C	Menurunnya kualitas pendidikan	UPT	Memberikan reward serta pengarahan rutin kepada warga binaan terkait pentingnya pendidikan	Menurunnya persentase Narapidana yang memperoleh hak pendidikan
10	Kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak Didik pelaku gangguan kamtib	Masih ada pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh Narapidana	Ketidakpatuhan warga binaan dalam menaati tata tertib	Seksi Adm Kamtib	Kurangnya kesadaran warga binaan	Internal	C	Kerusuhan	UPT	Memberikan punishment berupa isolasi dan Register F serta pengarahan kepada warga binaan	Ketidakpatuhan warga binaan dalam menaati tata tertib

Tenggarong, 04 Maret 2024
KEPALA

Triana Agustin
NIP 198208282000122001

[illegible]

ANALISIS RISIKO (PETA RISIKO)

Unit Pemilik Risiko : Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong
Periode Penerapan : Tahun 2024

No	Sisa Risiko	Kemungkinan		Dampak		Tingkat Risiko	Profil Risiko
		Uraian	Nilai	Uraian	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7 = 4 x 6	8
1	Keterlambatan pembangunan lajutan Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong	Moderat	3	Kementerian	5	15	Kuning
2	Terjadi tumpang tindih beban tugas	Pasti	5	Kantor Wilayah	3	15	Kuning
3	Terkendala dalam penggunaan aplikasi SRIKANDI	Hampir Pasti	4	Kantor Wilayah	3	12	Kuning
4	Penatausahaan keuangan kurang optimal	Kecil	2	UPT	2	4	Hijau
5	Penggunaan anggaran kurang optimal	Kecil	2	Kantor Wilayah	3	6	Biru
6	Penyampaian vonis tidak tepat waktu	Sangat Kecil	1	UPT	2	2	Hijau
7	Over kapasitas	Pasti	5	UPT	2	10	Biru
8	Kurangnya kesadaran dan bakat Narapidana residivis	Kecil	2	UPT	2	4	Hijau
9	Menurunnya persentase Narapidana yang memperoleh hak pendidikan	Moderat	3	UPT	2	6	Biru
10	Ketidakpatuhan warga binaan dalam menaati tata tertib	Moderat	3	UPT	2	6	Biru

Tenggarong, 04 Maret 2024
KEPALA

Triana Agustin
NIP 198208282000122001

[illegible]

INDIKATOR RISIKO

Unit Pemilik Risiko : Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong
Periode Penerapan : Tahun 2024

No	Sisa Risiko	Tingkat Risiko	Prioritas Risiko	Toleransi Risiko	Indikator Risiko	
					Indikasi	Batas Aman
1	2	3	4	5	6	7
1	Keterlambatan pembangunan lajutan Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong	15	1	4	Belum ada tindaklanjut dari KPKNL	5
2	Terjadi tumpang tindih beban tugas	15	2	4	Purna Tugas Kepala Subbagian Tata Usaha dan kurangnya anggota regu pengamanan	5
3	Terkendala dalam penggunaan aplikasi SRIKANDI	12	3	3	Tidak ada tindaklanjut dari kendala pendaftaran tanda tangan elektronik	4
4	Penatausahaan keuangan kurang optimal	4	8	1	Keliru dalam memilih akun belanja	2
5	Penggunaan anggaran kurang optimal	6	5	1	Kurangnya pengawasan berjenjang	2
6	Penyampaian vonis tidak tepat waktu	2	10	1	Keterlambatan menerima putusan	2
7	Over kapasitas	10	4	3	Masih banyak Warga Binaan yang tidak bisa integrasi	4
8	Kurangnya kesadaran dan bakat Narapidana residivis	4	9	1	Tidak ada efek jera dalam proses pidana	2
9	Menurunnya persentase Narapidana yang memperoleh hak pendidikan	6	7	1	Kurangnya kesadaran warga binaan perihal pentingnya pendidikan	2
10	Ketidakpatuhan warga binaan dalam menaati tata tertib	6	6	1	Kurangnya kesadaran warga binaan	2

Tenggarong, 04 Maret 2024
KEPALA

Triana Agustin
NIP 198208282000122001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan [illegible]

RENCANA AKSI PENANGANAN RISIKO

Unit Pemilik Risiko : Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong
Periode Penerapan : Tahun 2024

No	Indikator Risiko		Opsi Penanganan	Kegiatan Pengendalian	Indikator Pengendalian		Jadwal	Penanggung Jawab	Cadangan Risiko (Rp)
	Indikasi	Batas Aman			Output	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Belum ada tindaklanjut dari KPKNL	5	Mengurangi Risiko	Melakukan usulan penghapusan BMN	Usulan penghapusan BMN	100%	Januari - Desember	Kasubbag TU	-
2	Purna Tugas Kepala Subbagian Tata Usaha dan kurangnya anggota regu pengamanan	5	Mengurangi Risiko	Usul Promosi Jabatan Administrasi Pegawai Negeri Sipil Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong dan permohonan SDM	Usulan Promosi Jabatan dan Permohonan SDM ke Kantor Wilayah	100%	Januari - Desember	Kasubbag TU	
3	Tidak ada tindaklanjut dari kendala pendaftaran tanda tangan elektronik	4	Mengurangi Risiko	Melakukan pendaftaran permohonan tanda tangan elektronik Pejabat Administrasi Eselon IV	User sudah terdaftar dan memiliki sertifikat dengan status ISSUE	100%	Januari - Desember	Kasubbag TU	
4	Keliru dalam memilih akun belanja	2	Mengurangi Risiko	Melakukan cross check setiap penginputan	Laporan keuangan pada aplikasi SAKTI	100%	Januari - Desember	Kasubbag TU	
5	Kurangnya pengawasan berjenjang	2	Mengurangi Risiko	Rapat internal dengan pengguna anggaran	Laporan keuangan berupa IKPA bagian penarikan halaman III DIPA	100%	Januari - Desember	Kasubbag TU	-
6	Keterlambatan menerima putusan	2	Mengurangi Risiko	Melakukan permintaan vonis	Pemberitahuan habis masa penahanan 10, 3, 1	100%	Januari - Desember	Kasi Binadik	-

7	Masih banyak Warga Binaan yang tidak bisa integrasi	4	Mengurangi Risiko	Optimalisasi dalam pelaksanaan program integrasi bagi Warga Binaan	Data pelaksanaan integrasi	100%	Januari - Desember	Kasi Binadik	-
8	Tidak ada efek jera dalam proses pidana	2	Mengurangi Risiko	Optimalisasi dalam pembinaan kepribadian berupa kerohanian serta optimalisasi dalam pembinaan kemandirian sebagai bekal Narapidana	Laporan Pembinaan Kepribadian dan Pembinaan Kemandirian	100%	Januari - Desember	Kasi Binadik	-
9	Kurangnya kesadaran warga binaan perihal pentingnya pendidikan	2	Mengurangi Risiko	Memberikan reward serta pengarahan rutin kepada warga binaan terkait pentingnya pendidikan	Dokumentasi pengarahan kepada Warga Binaan	100%	Januari - Desember	Kasi Binadik	-
10	Kurangnya kesadaran warga binaan	2	Mengurangi Risiko	Memberikan punishment berupa isolasi dan Register F serta pengarahan kepada warga binaan	Laporan pelanggaran disiplin	100%	Januari - Desember	Kasi Kamtib	-

Tenggarong, 17 Juni 2024
Plh.KEPALA

Endang Utmiati
NIP 197505142000032001

[illegible]

PEMANTAUAN RISIKO

Unit Pemilik Risiko : Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong
Periode Penerapan : Tahun 2024

No	Kegiatan pengendalian	Indikator Pengendalian				Indikator Risiko				Risiko Residu	Keterangan
		Output	Target	Realisasi	%	Risiko	Batas Aman	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6=(5/4)x100	7	8	9	10=(9/8)x100	11	12
1	Melakukan usulan penghapusan BMN	Usulan penghapusan BMN	100%	50%	50,0	Belum ada tindaklanjut dari KPKNL	5,0	2,0	40,0	160,0	Menurunkan risiko
2	Usul Promosi Jabatan Administrasi Pegawai Negeri Sipil Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong dan	Usulan Promosi Jabatan dan Permohonan SDM ke Kantor Wilayah	100%	25%	25,0	Purna Tugas Kepala Subbagian Tata Usaha dan kurangnya anggota regu pengamanan	5,0	1,0	20,0	80,0	Menurunkan risiko
3	Melakukan pendaftaran permohonan tanda tangan elektronik Pejabat Administrasi Eselon IV	User sudah terdaftar dan memiliki sertifikat dengan status ISSUE	100%	100%	100,0	Tidak ada tindaklanjut dari kendala pendaftaran tanda tangan elektronik	4,0	4,0	100,0	300,0	Menurunkan risiko
4	Melakukan cross check setiap penginputan	Laporan keuangan pada aplikasi SAKTI	100%	25%	25,0	Keliru dalam memilih akun belanja	2,0	1,0	50,0	50,0	Menurunkan risiko
5	Rapat internal dengan pengguna anggaran	Laporan keuangan berupa IKPA bagian penarikan halaman III DIPA	100%	50%	50,0	Kurangnya pengawasan berjenjang	2,0	1,0	50,0	50,0	Menurunkan risiko
6	Melakukan permintaan vonis	Pemberitahuan habis masa penahanan 10, 3, 1	100%	50%	50,0	Keterlambatan menerima putusan	2,0	1,0	50,0	50,0	Menurunkan risiko
7	Optimalisasi dalam pelaksanaan program integrasi bagi Warga Binaan	Data pelaksanaan integrasi	100%	50%	50,0	Masih banyak Warga Binaan yang tidak bisa integrasi	4,0	1,0	25,0	75,0	Menurunkan risiko

8	Optimalisasi dalam pembinaan kepribadian berupa kerohanian serta optimalisasi dalam pembinaan kemandirian	Laporan Pembinaan Kepribadian dan Pembinaan Kemandirian	100%	50%	50,0	Tidak ada efek jera dalam proses pidana	2,0	1,0	50,0	50,0	Menurunkan risiko
9	Memberikan reward serta pengarahan rutin kepada warga binaan terkait pentingnya pendidikan	Dokumentasi pengarahan kepada Warga Binaan	100%	50%	50,0	Kurangnya kesadaran warga binaan perihal pentingnya pendidikan	2,0	1,0	50,0	50,0	Menurunkan risiko
10	Memberikan punishment berupa isolasi dan Register F serta pengarahan kepada warga binaan	Laporan pelanggaran disiplin	100%	50%	50,0	Kurangnya kesadaran warga binaan	2,0	1,0	50,0	50,0	Menurunkan risiko

Tenggarong, 17 Juni 2024
Plh.KEPALA

Endang Utmiati
NIP 197505142000032001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan: https://tte.bssn.go.id/verifikasi

LAMPIRAN

LAPORAN
MONEV SPIP

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Alamat : Jl. Imam Bonjol No.37 RT.08 Kel. Melayu Tenggarong- Kutai Kartanegara
Telp. (0541) 6720100 Email : lpp.smd@gmail.com

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TRIWULAN II TAHUN 2024

A. PENDAHULUAN

1. Umum

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.PW.02.03 Tahun 2011 Tentang Penyelanggaran Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bahwa untuk mewujudkan tata kelola Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang baik, diperlukan penerapan pelaporan sistem pengendalian intern pemerintah untuk meningkatkan pemantauan dan evaluasi atas tercapainya tujuan organisasi melalui sistem pengendalian intern pemerintah.

Sistem Pengendalian Intern dalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien.

2. Maksud dan Tujuan

Meningkatkan pemantauan dan evaluasi atas tercapainya tujuan organisasi.

3. Ruang Lingkup

Seluruh kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilaksanakan di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

4. Dasar

a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
b. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2013 tentang Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH-02.PW.02.03 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;

c. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia RI Nomor 05 Tahun 2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
d. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor:M.HH-02.PR.03.01 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pelaporan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI;
e. Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP;
f. Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-690/K/DH/2012 tentang Pedoman Pemantauan Perkembangan Penyelenggaraan SPIP.

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu / 05 Juni 2024
Pukul : 13.00 WITA – selesai
Tempat : Ruang Kalapas LPP Tenggarong

Adapun beberapa poin yang disampaikan oleh Plh.Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong, sebagai berikut:

- Tertib administrasi;
- Koordinasikan kembali terkait penghapusan BMN;
- Kendala dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
- Memaksimalkan pelayanan pemasyarakatan yang sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik melalui peningkatan pengawasan dan pengelolaan layanan di bidang pemasyarakatan;
- Inventarisir tanda tangan elektronik Pejabat Administrasi Eselon IV.

C. HASIL YANG DICAPAI

Telah terlaksananya monitoring dan evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong telah melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

b. Saran

Dilakukan monitoring dan evaluasi secara rutin.

E. PENUTUP

Demikian kami sampaikan, atas perkenannya disampaikan terima kasih.

Tenggarong, 05 Juni 2024
Plh.KEPALA

Endang Utmiati
NIP 197505142000032001

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Alamat : Jl. Imam Bonjol No.37 RT.08 Kel. Melayu Tenggarong- Kutai Kartanegara
Telp. (0541) 6720100 Email : lpp.smd@gmail.com

DOKUMENTASI
MONITORING DAN EVALUASI SPIP TW II TAHUN 2024

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Alamat : Jl. Imam Bonjol No.37 Kelurahan Kampung Melayu,Tenggarong Kalimantan Timur
Telp. 0541-6720100 Email : *lpp.smd@gmail.com*

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan SPIP
Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong
Rabu, 05 Juni 2024

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Endang Utmiati	Kepala	
2	Andi Hasnaeni	Kasi Binadik	
3	Hatmawati	Kasi Giatja	
4	Juari	Kasi Binadik	
5	Desi Ari Santi	Kasubsi Sarana Kerja	
6	Dini Fazriani	Kepala Subseksi Bimbingan Kerja dan Pengelola Hasil Kerja	
7	Nanang Budiyono	Kaur Kepagawai Keuangan	
8	Dewi Ratna Sari	Kepala Subseksi Keamanan	
9	Mirani Eka Destiana	Kepala Subseksi Registrasi	
10	Adhiyani Maulina	Kepala Subseksi Pelaporan	
11	Siti Rahmah	Kepala Subseksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan	

Plh.KEPALA

ENDANG UTMIATI
NIP 197505142000032001

SOSIALISASI
SPIP

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Alamat : Jl. Imam Bonjol No.37 RT.08 Kel. Melayu Tenggarong- Kutai Kartanegara
Telp. (0541) 6720100 Email : lpp.smd@gmail.com

LAPORAN
SOSIALISASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

A. PENDAHULUAN

1. Umum

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.PW.02.03 Tahun 2011 Tentang Penyelanggaran Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bahwa untuk mewujudkan tata kelola Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang baik, diperlukan penerapan pelaporan sistem pengendalian intern pemerintah untuk meningkatkan pemantauan dan evaluasi atas tercapainya tujuan organisasi melalui sistem pengendalian intern pemerintah.

Sistem Pengendalian Intern dalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien.

2. Maksud dan Tujuan

Meningkatkan pengetahuan tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sehingga mudah dalam pelaksanaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

3. Ruang Lingkup

Kegiatan Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilaksanakan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

4. Dasar

a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

b. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2013 tentang Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan

HAM Nomor: M.HH-02.PW.02.03 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;

c. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia RI Nomor 05 Tahun 2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
d. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor:M.HH-02.PR.03.01 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pelaporan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI;
e. Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP;
f. Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-690/K/DH/2012 tentang Pedoman Pemantauan Perkembangan Penyelenggaraan SPIP.

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Kegiatan Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa / 16 April 2024
Pukul : 09.00 WITA – selesai
Tempat : Aula Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong

Sosialisasi diberikan kepada seluruh Pejabat Administrasi Eselon IV dan V Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong. Adapun beberapa poin yang disampaikan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong, sebagai berikut:

- Pengendalian Intern atas sisa risiko;
- Kendala dan hambatan atas pengurangan dampak dari risiko.

C. HASIL YANG DICAPAI

Telah terlaksananya sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong telah melaksanakan sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

b. Saran

Pelaksanaan Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong secara rutin.

E. PENUTUP

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Tenggarong, 24 Mei 2024
KEPALA

Triana Agustin
NIP 198208282000122001

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Alamat : Jl. Imam Bonjol No.37 RT.08 Kel. Melayu Tenggarong- Kutai Kartanegara
Telp. (0541) 6720100 Email : lpp.smd@gmail.com

DOKUMENTASI
SOSIALISASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Alamat : Jl. Imam Bonjol No.37 Kelurahan Kampung Melayu,Tenggarong Kalimantan Timur
Telp. 0541-6720100   Email : *lpp.smd@gmail.com*

Sosialisasi SPIP
Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong
Selasa, 16 April 2024

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Triana Agustin	Kepala	
2	Andi Hasnaeni	Kasi Binadik	
3	Hatmawati	Kasi Giatja	
4	Yhuni Rindawati	Ka.KPLP	
5	Dini Fazriani	Kepala Subseksi Bimbingan Kerja dan Pengelola Hasil Kerja	
6	Nanang Budiyono	Kaur Kepagawai Keuangan	
7	Dewi Ratna Sari	Kepala Subseksi Keamanan	
8	Mirani Eka Destiana	Kepala Subseksi Registrasi	
9	Adhiyani Maulina	Kepala Subseksi Pelaporan	

KEPALA

TRIANA AGUSTIN
NIP 198208282000122001

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Alamat : Jl. Imam Bonjol No.37 Kelurahan Kampung Melayu,Tenggarong Kalimantan Timur
Telp. 0541-6720100 Email : *lpp.smd@gmail.com*

Sosialisasi SPIP
Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong
Selasa, 16 April 2024

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Triana Agustin	Kepala	
2	Andi Hasnaeni	Kasi Binadik	
3	Hatmawati	Kasi Giatja	
4	Yhuni Rindawati	Ka.KPLP	
5	Dini Fazriani	Kepala Subseksi Bimbingan Kerja dan Pengelola Hasil Kerja	
6	Nanang Budiyono	Kaur Kepagawai Keuangan	
7	Dewi Ratna Sari	Kepala Subseksi Keamanan	
8	Mirani Eka Destiana	Kepala Subseksi Registrasi	
9	Adhiyani Maulina	Kepala Subseksi Pelaporan	

KEPALA

TRIANA AGUSTIN
NIP 198208282000122001

DOKUMEN
PENGHAPUSAN BMN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jl. Imam Bonjol, No.37 Kel. Melayu Tenggarong Kutai Kartanegara
Telp : (0541) 6720100 Email : lpp.smd@gmail.com

Nomor : W.18.PAS.PAS.7.PB.05.05-1133 08 Mei 2024
Lampiran : 1 (satu) berkas.
Sifat : Segera
Hal : Permohonan Persetujuan Penghapusan Gedung dan Bangunan Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong

Yth. Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur
Di –
Samarinda

Berkenaan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan BMN Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) / Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024, bersama ini kami sampaikan bahwa dalam RKA/ DIPA tersebut terdapat alokasi anggaran Belanja SKPD No. 1.02.0.00.0.00.01.0000 tercantum Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur di JL. RS Lama Kecamatan Tenggarong dengan Pagu Fisik Anggaran Sebesar Rp. 7.427.149.000,-

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, bersama ini dengan hormat kami mengajukan **Permohonan Persetujuan Penghapusan Gedung dan Bangunan** Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong yang nantinya akan terdampak kegiatan pembangunan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah tersedia dalam RKA/ DIPA Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024.

Sebagai bahan pertimbangan dan kelengkapan, bersama ini kami lampirkan :

1. Fotocopy Anggaran (Petikan RKA/ Dipa TA. 2024);
2. SK Panitia Penghapusan BMN LPP Kelas IIA Tenggarong;
3. Berita Acara Pemeriksaan;
4. SPTJ Kebenaran Formil dan Materiil;
5. SPTJ Tidak mengganggu Pelaksanaan Tusi;
6. SPTJ Nilai Limit;
7. SPTJ Nilai Perolehan
8. Foto bangunan;
9. Telaahan Staf;
10. KIB;
11. Foto Copy PSP;
12. Laporan Kondisi BMN;
13. Daftar BMN yang Dihentikan Penggunaanya;
14. Hasil Penilaian Nilai Wajar/ Limit dari KPKNL.

Demikian untuk menjadikan maklum, atas perkenannya diucapkan terimakasih.

Kepala,

Triana Agustin
NIP. 198208282000122001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta;
3. Kepala Kantor KPKNL Samarinda di Samarinda;
4. Arsip.

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PEKERJAAN UMUM
Alamat : Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Bupati Kutai Kartanegara Tenggarong
Website : https://dpu.kukarkab.go.id E-mail : dpu@kukarkab.go.id
Kode Pos 75511

Tenggarong, 26 Januari 2024

Nomor : P.12/DPU/CK/600.1/1/2024
Lampiran : 1 (satu) lembar

Kepada Yth.
Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Tenggarong
Di –
Tempat

Perihal : **Pemberitahuan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur di Jl. RS Lama Kecamatan Tenggarong**

Berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) – Belanja SKPD No. 1.03.0.00.0.00.01.0000 tercantum Kegiatan **Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur di Jl. RS Lama Kecamatan Tenggarong** dengan pagu fisik anggaran **Rp. 7.427.149.000,00**, untuk saat ini proses Dokumen Perencanaan DED masih dalam tahap revisi dari Konsultan Perencana. Maka kami memberitahukan kepada Bapak/Ibu bahwa kegiatan tersebut diatas akan segera dilaksanakan pada tahun anggaran 2024, untuk itu kami mohon bantuan serta dukungan agar kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kearah ini diucapkan terima kasih.

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
Kepala Bidang Cipta Karya

MUHAMMAD JAMIL, ST., M.Si
Pembina (IV.a)

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
BerAKHLAK bangga melayani bangsa

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PEKERJAAN UMUM
Alamat : Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Bupati Kutai Kartanegara Tenggarong
Website : https://dpu.kukarkab.go.id E-mail : dpu@kukarkab.go.id
Kode Pos 75511

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK (SPTJM)

Nomor : P.11/DPU/CK/600.1/1/2024

Tanggal 26 Januari 2024

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **WIYONO, S.IP, M.Si**
Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) – Belanja SKPD No. 1.03.0.00.0.00.01.0000 tercantum Kegiatan **Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur di Jl. RS Lama Kecamatan Tenggarong** dengan pagu fisik anggaran **Rp. 7.427.149.000,00**.

2. Pada saat surat ini dibuat Dokumen Perencanaan DED masih dalam tahap revisi dari Konsultan Perencana.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
Kepala Dinas Pekerjaan Umum

WIYONO, S.IP., M.Si
Pembina Utama Muda (IV.c)

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BerAKHLAK bangga melayani bangsa

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	**Formulir RKA-BELANJA SKPD**
Pemerintahan Kab. Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024	

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan	: 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Unit Organisasi	: 1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum
Sub Unit Organisasi	: -
Program	: 1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
Kegiatan	: 1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 1.03.09.2.01.0006 Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya
SPM	: -
Jenis Layanan	: -
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Kelompok Sasaran	: Kab. Kutai Kartanegara
Alokasi 2023	: Rp. 0,00
Alokasi 2024	: Rp. 716.344.617.235,00
Alokasi 2025	: Rp. 1.880.000.000,00

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program	-	-
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 716.344.617.235,00
Keluaran	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	1 Kawasan
Hasil	-	-

[illegible]	-	-

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan	: 1.03.09.2.01.0008 Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya
Sumber Pendanaan	: Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
Lokasi	: Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember
Keterangan	: -

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	**BELANJA DAERAH**					**Rp. 716.344.617.230,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**					**Rp. 87.291.801.425,00**
5.1.01	**Belanja Pegawai**					**Rp. 1.799.296.000,00**
5.1.01.03	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**					**Rp. 1.799.296.000,00**
5.1.01.03.07	**Belanja Honorarium**					**Rp. 1.799.296.000,00**
5.1.01.03.07.0001	**Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan**					**Rp. 1.799.296.000,00**
	[#] Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur di jalan RS Lama Kec. Tenggarong **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil**					**Rp. 25.200.000,00**
	[-] Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur di jalan RS Lama Kec. Tenggarong					**Rp. 25.200.000,00**
	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar...	1 x 10	Orang Bulan	2.520.000,00	0 %	Rp. 25.200.000,00

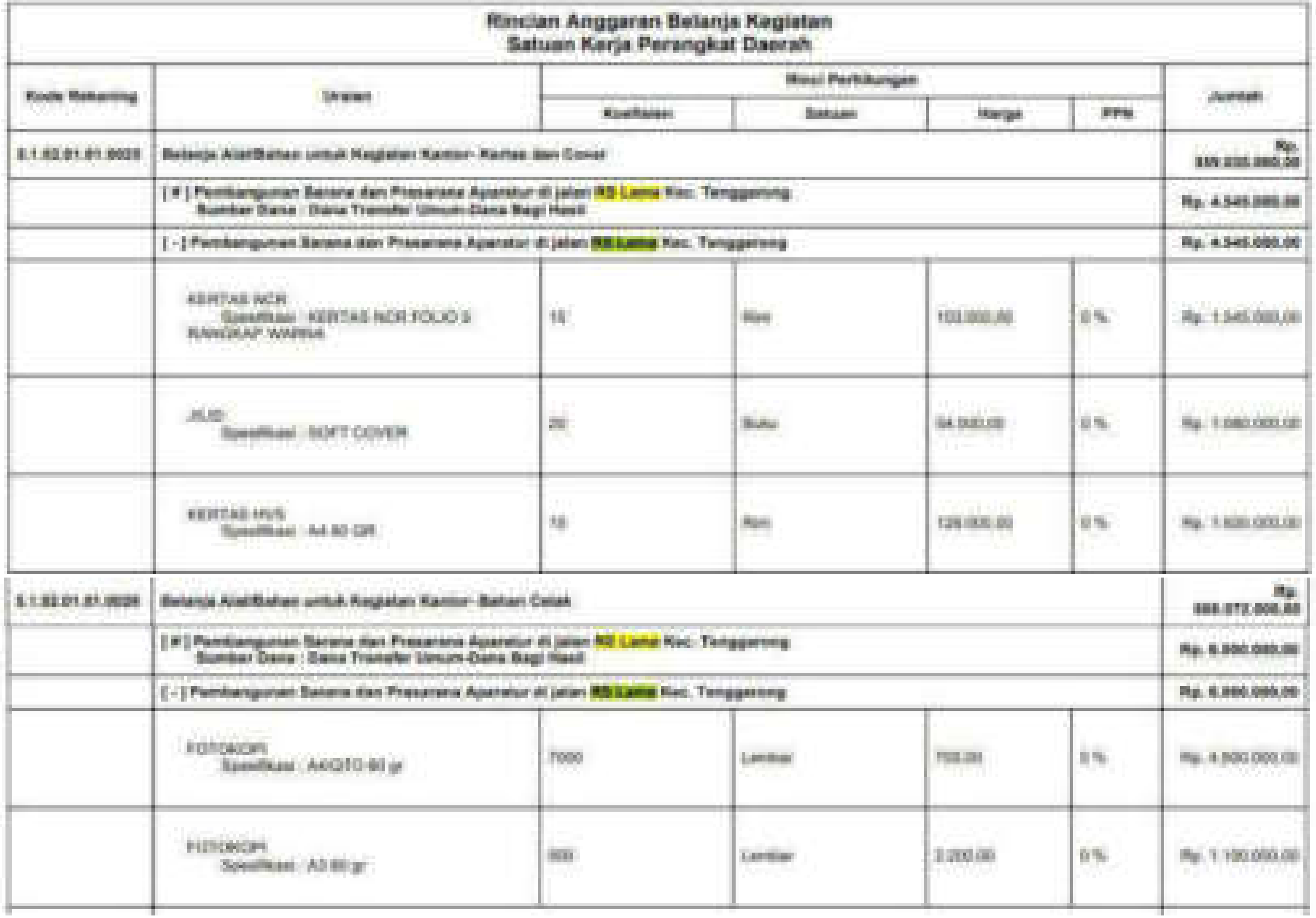

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover					Rp. [illegible]
	[#] Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur di jalan RS Lama Kec. Tenggarong Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 4.545.000,00
	[-] Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur di jalan RS Lama Kec. Tenggarong					Rp. 4.545.000,00
	KERTAS NCR Spesifikasi : KERTAS NCR FOLIO 3 RANGKAP WARNA	15	Rim	103.000,00	0 %	Rp. 1.545.000,00
	JILID Spesifikasi : SOFT COVER	20	Buku	54.000,00	0 %	Rp. 1.080.000,00
	KERTAS HVS Spesifikasi : A4 80 GR	15	Rim	128.000,00	0 %	Rp. 1.920.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. [illegible]
	[#] Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur di jalan RS Lama Kec. Tenggarong Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 6.000.000,00
	[-] Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur di jalan RS Lama Kec. Tenggarong					Rp. 6.000.000,00
	FOTOKOPI Spesifikasi : A4/QTO 80 gr	7000	Lembar	700,00	0 %	Rp. 4.900.000,00
	FOTOKOPI Spesifikasi : A3 80 gr	500	Lembar	2.200,00	0 %	Rp. 1.100.000,00

5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 27.000.000,00
	[#] Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur di jalan RS Lama Kec. Tenggarong Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 340.000,00
	[-] Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur di jalan RS Lama Kec. Tenggarong					Rp. 340.000,00
	MATERAI @ 10000 Spesifikasi : MATERAI @ 10000	20	Lembar	17.000,00	0 %	Rp. 340.000,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat					Rp. 48.022.071.000,00
	[#] Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur di jalan RS Lama Kec. Tenggarong Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					Rp. 7.039.029.000,00
	[-] Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur di jalan RS Lama Kec. Tenggarong					Rp. 7.039.029.000,00
	Pejabat Pembuat Komitmen (Pokom) Spesifikasi : Nilai Pagu Dana Diatas Rp. 5 Miliar s.d. Rp. 10 M...	1 x 10	Orang Bulan	2.500.000,00	0 %	Rp. 25.000.000,00
	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi : Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	1	Orang / Paket	980.000,00	0 %	Rp. 980.000,00

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi) Spesifikasi : Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 ...	5	Orang / Paket / Pekerjaan	1.780.000,00	0 %	Rp. 8.900.000,00
	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan					

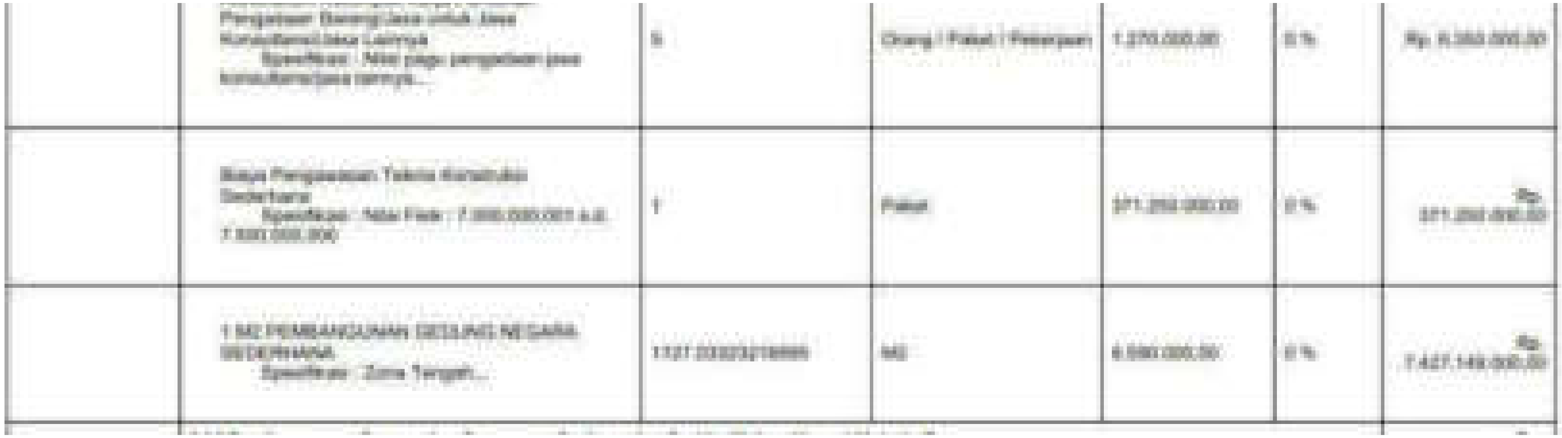

	Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya Spesifikasi : Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya...	5	Orang / Paket / Pekerjaan	1.270.000,00	0 %	Rp. 6.350.000,00
	Biaya Pengawasan Teknis Konstruksi Sederhana Spesifikasi : Nilai Fisik : 7.000.000.001 s.d. 7.500.000.000	1	Paket	371.250.000,00	0 %	Rp. 371.250.000,00
	1 M2 PEMBANGUNAN GEDUNG NEGARA SEDERHANA Spesifikasi : Zona Tengah...	1127,20323218895	M2	6.590.000,00	0 %	Rp. 7.427.149.000,00

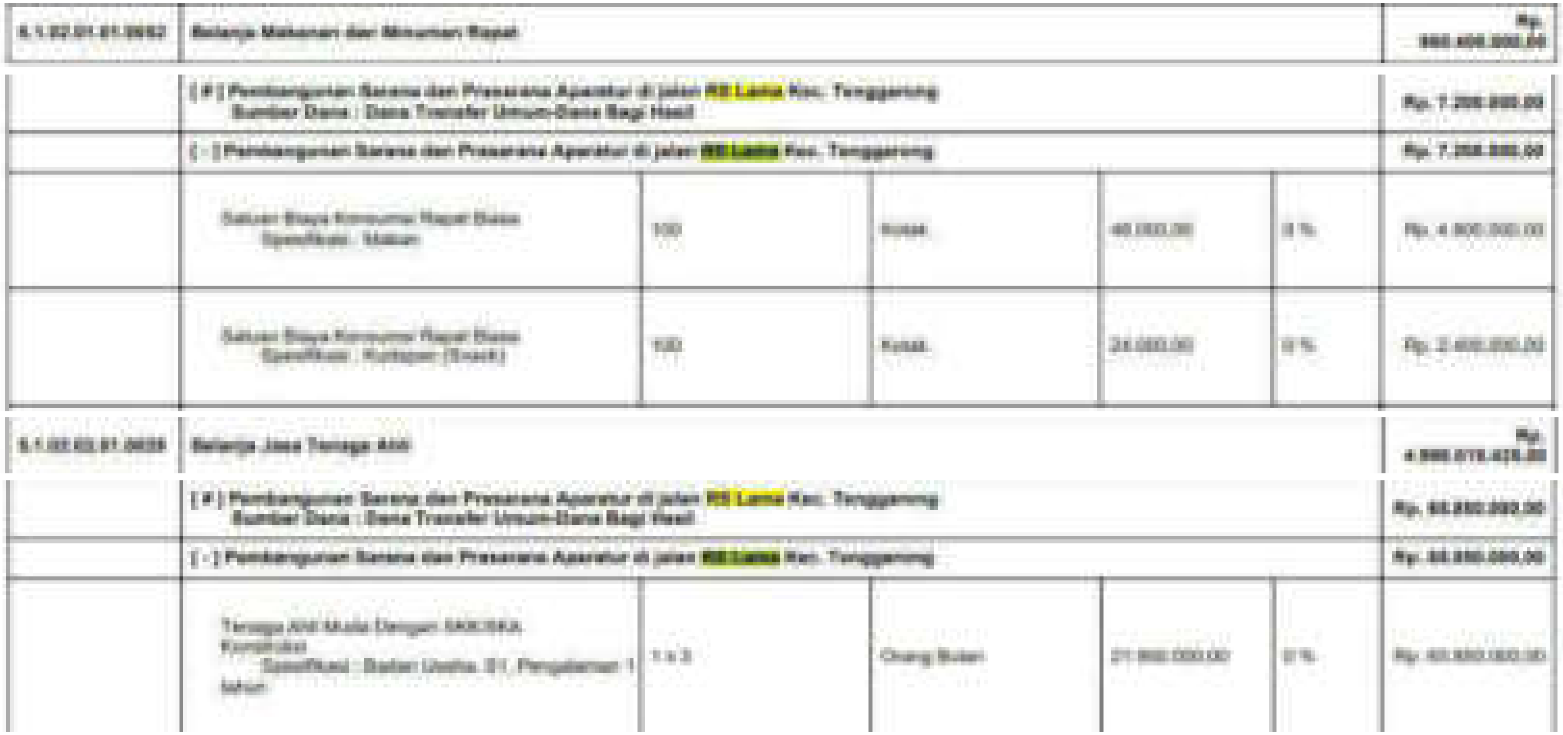

5.1.02.01.01.0052	**Belanja Makanan dan Minuman Rapat**					**Rp. 960.400.000,00**
	[#] Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur di jalan RB Lama Kec. Tenggarong Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 7.200.000,00**
	[-] Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur di jalan RB Lama Kec. Tenggarong					**Rp. 7.200.000,00**
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Makan	100	Kotak	48.000,00	0 %	Rp. 4.800.000,00
	Satuan Biaya Konsumsi Rapat Biasa Spesifikasi : Kudapan (Snack)	100	Kotak	24.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00
5.1.02.02.01.0029	**Belanja Jasa Tenaga Ahli**					**Rp. 4.990.019.425,00**
	[#] Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur di jalan RB Lama Kec. Tenggarong Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil					**Rp. 65.850.000,00**
	[-] Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur di jalan RB Lama Kec. Tenggarong					**Rp. 65.850.000,00**
	Tenaga Ahli Muda Dengan SKK/SKA Konstruksi Spesifikasi : Badan Usaha, S1, Pengalaman 1 tahun	1 x 3	Orang Bulan	21.950.000,00	0 %	Rp. 65.850.000,00

5.1.02.04	**Belanja Perjalanan Dinas**					**Rp. 2.219.794.000,00**
5.1.02.04.01	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**					**Rp. 2.219.794.000,00**
5.1.02.04.01.0001	**Belanja Perjalanan Dinas Biasa**					**Rp. 1.712.804.000,00**
	[#] Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur di jalan RS Lama Kec. Tenggarong **Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil**					**Rp. 51.336.000,00**
	[-] Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur di jalan RS Lama Kec. Tenggarong					**Rp. 51.336.000,00**
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Untuk Luar Kota Spesifikasi : DKI JAKARTA	4 x 3 x 2	Orang Hari Kali	530.000,00	0 %	Rp. 12.720.000,00
	Satuan Biaya Tiket Pesawat Udara Pergi Pulang (PP) Spesifikasi : BALIKPAPAN - JAKARTA - KELAS EKONOMI	4 x 2	Orang Kali	3.797.000,00	0 %	Rp. 30.376.000,00
	Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Kota (Dki Jakarta) Spesifikasi : JABATAN PENGAWAS, JABATAN PELAKSANA GOL IV DAN JAB...	2 x 2 x 2	Orang / Kamar Hari Kali	730.000,00	0 %	Rp. 5.840.000,00
	Biaya Transportasi Petuk Dalam Kalimantan Timur Spesifikasi : Tenggarong - Petuk Sepinggan Balikpapan (PP)	2	Kali	1.200.000,00	0 %	Rp. 2.400.000,00

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
NOMOR : W.18.PAS.PAS.7-261.PB.04.02 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA GEDUNG DAN BANGUNAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong dipandang perlu untuk membentuk panitia penghapusan Barang Milik Negara melalui Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong selaku penanggungjawab unit akuntansi kuasa pengguna barang;

b. bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini, dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas panitia penghapusan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada huruf a;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 32);

6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);

7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018);

8. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara yang Berfungsi Khusus di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100);

9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA GEDUNG DAN BANGUNAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG.

KESATU : Membentuk Panitia Penghapusan Barang Milik Negara berupa Gedung dan Bangunan Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud memiliki tugas sebagai berikut:

a. Melakukan Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) berupa Gedung dan Bangunan yang akan diusulkan penghapusannya, serta mempersiapkan kelengkapan dokumen persyaratan penghapusan barang Milik Negara;
b. Melakukan koordinasi dengan instansi teknis terkait guna penelitian dan penilaian BMN dalam hal administrasi serta fisik BMN yang akan dihapuskan;
c. Hasil Penelitian dan Penilaian BMN sebagaimana dimaksud pada angka 2, dituangkan dalam Berita Acara Penelitian dan Penilaian BMN.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 24 Januari 2024

Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Perempuan Kelas IIA Tenggarong,

Triana Agustin
NIP.198208282000122001

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN
PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Nomor : W.18.PAS.PAS.7-261.PB.04.02
Tanggal : 24 Januari 2024

SUSUNAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA GEDUNG DAN BANGUNAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

NO	NAMA	JABATAN
1	Pratiwi Widyahningsih NIP.196602031994032001	KETUA
2	Suhartono NIP.198909052009121002	SEKRETARIS
3	Ray Hafidz Kurniawan NIP.199404292017121003	ANGGOTA

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 24 Januari 2024

Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Perempuan Kelas IIA Tenggarong,

Triana Agustin
NIP.198208282000122001

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Alamat: JL.Imam Bonjol No.37 Rt.08 Kel.Melayu, Kec.Tenggarong Kutai Kartanegara
Telp : 0541-6720100, Email lpp.smd@gmail.com

BERITA ACARA HASIL PENELITIAN DAN PENILAIAN BMN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

Nomor: W.18.PAS.PAS.7.PB.04.02-262

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Empat bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Tenggarong, kami panitia Penghapusan Barang Milik Negara berupa Gedung dan Bangunan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong berdasarkan Surat Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong Nomor W.18.PAS.PAS.7-261.PB.04.02 Tahun 2024 Tanggal 24 Januari 2024 :

1. Pratiwi Widyahningsih
   NIP. 196602031994032001

2. Suhartono
   NIP. 198909052009121002

3. Ray Hafidz Kurniawan
   NIP. 199404292017121003

1. Bahwa BMN yang telah diusulkan penghapusan berupa Bangunan Gedung Permanen berjumlah 23 unit (daftar terlampir)

2. Telah melakukan Penelitian dan Penilaian Barang Milik Negara berupa Gedung dan Bangunan pada Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong dan memperoleh data-data sebagaimana terlampir

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Perempuan Kelas IIA Tenggarong

Triana Agustin
NIP.198208282000122001

Tenggarong, 24 Januari 2024
Panitia Penghapusan BMN

1. Pratiwi Widyahningsih ……..
   (Ketua)
2. Suhartono ……..
   (Sekretaris)
3. Ray Hafidz Kurniawan ……..
   (Anggota)

LAMPIRAN
Berita Acara Penelitian dan Penilaian BMN
Nomor : W.18.PAS.PAS.7.PB.04.02-262
Tanggal : 24 Januari 2024

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA BERUPA GEDUNG/ BANGUNAN YANG DIAJUKAN IJIN PRINSIP UNTUK DIHAPUSKAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

No	Kode Barang	NUP	Nama Barang	Merek	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Limit	SK PSP		Kondisi
								Nomor	Tanggal	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
1	4010101001	4	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Taman Lingkungan Instalasi Air	2022	19,616,000	258,000	063/KM.6/KNL.1302 /2023	18 September 2023	Rusak Berat
2	4010101001	5	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Pengembangan dan Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit	2022	570,192,800	667,000	063/KM.6/KNL.1302 /2023	18 September 2023	Rusak Berat
3	4010101999	1	Bangunan Gedung Kantor Lainnya	Bangunan Gedung Kantor Lain	2022	37,300,000	404,000	063/KM.6/KNL.1302 /2023	18 September 2023	Rusak Berat
4	4010101999	2	Bangunan Gedung Kantor Lainnya	Pembuatan Taman & Pagar Depan IPS/Kesling	2022	22,522,000	1,360,000	063/KM.6/KNL.1302 /2023	18 September 2023	Rusak Berat
5	4010101999	3	Bangunan Gedung Kantor Lainnya	Pembuatan Pagar Pembatas Poli	2022	83,354,000	217,000	063/KM.6/KNL.1302 /2023	18 September 2023	Rusak Berat

6	4010101999	4	Bangunan Gedung Kantor Lainnya	Pembuatan Pagar Instalasi Limbah Cair Medis	2022	65,987,000	107,000	063/KM.6/KNL.1302 /2023	18 September 2023	Rusak Berat
7	4010101999	5	Bangunan Gedung Kantor Lainnya	Pembuatan Pagar Ulin RSUD	2022	44,110,000	497,000	063/KM.6/KNL.1302 /2023	18 September 2023	Rusak Berat
8	4010106001	1	Bangunan Rumah Sakit Umum	Ruang Rawat Jalan	2022	1,965,765,980	1,688,000	063/KM.6/KNL.1302 /2023	18 September 2023	Rusak Berat
9	4010106001	2	Bangunan Rumah Sakit Umum	Gedung Ruang Mawar	2022	500,000,000	998,000	063/KM.6/KNL.1302 /2023	18 September 2023	Rusak Berat
10	4010106001	3	Bangunan Rumah Sakit Umum	Gedung Ruang Asoka	2022	513,667,000	903,000	063/KM.6/KNL.1302 /2023	18 September 2023	Rusak Berat
11	4010106001	4	Bangunan Rumah Sakit Umum	Gedung Ruang Cempaka	2022	500,000,000	535,000	063/KM.6/KNL.1302 /2023	18 September 2023	Rusak Berat
12	4010106001	5	Bangunan Rumah Sakit Umum	Gedung Ruang Melati	2022	500,000,000	1,509,000	063/KM.6/KNL.1302 /2023	18 September 2023	Rusak Berat
13	4010106001	6	Bangunan Rumah Sakit Umum	Gedung Ruang ICU	2022	350,000,000	1,189,000	063/KM.6/KNL.1302 /2023	18 September 2023	Rusak Berat
14	4010106001	7	Bangunan Rumah Sakit Umum	Ruang Operasi Termasuk Rehab	2022	656,750,000	1,153,000	063/KM.6/KNL.1302 /2023	18 September 2023	Rusak Berat
15	4010106001	8	Bangunan Rumah Sakit Umum	Pemeliharaan IGD	2022	199,958,000	748,000	063/KM.6/KNL.1302 /2023	18 September 2023	Rusak Berat
16	4010106001	9	Bangunan Rumah Sakit Umum	Pembangunan Rumah Sakit	2022	49,390,000	295,000	063/KM.6/KNL.1302 /2023	18 September 2023	Rusak Berat
17	4010106001	10	Bangunan Rumah Sakit Umum	Ruang Tulip	2022	1,509,291,980	953,000	063/KM.6/KNL.1302 /2023	18 September 2023	Rusak Berat

18	4010106015	1	Bangunan Posyandu	Ruang Tunggu ICU	2022	76,424,000	274,000	063/KM.6/KNL.1302 /2023	18 September 2023	Rusak Berat
19	4010106015	2	Bangunan Posyandu	Tempat Pembuangan Sampah	2022	172,566,100	266,000	063/KM.6/KNL.1302 /2023	18 September 2023	Rusak Berat
20	4010108001	1	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	Mushola	2022	40,000,000	472,000	063/KM.6/KNL.1302 /2023	18 September 2023	Rusak Berat
21	4010130005	1	Bangunan Rumah Genset	Tempat Parkir Karyawan	2022	470,681,400	0	063/KM.6/KNL.1302 /2023	18 September 2023	Rusak Berat
22	4010134999	1	Taman Lainnya	Pembuatan Taman	2022	48,990,000	0	063/KM.6/KNL.1302 /2023	18 September 2023	Rusak Berat
23	4040199999	1	Tugu/Tanda Batas Lainnya	Tugu Tanda Batas Lain	2022	97,200,000	52,000	063/KM.6/KNL.1302 /2023	18 September 2023	Rusak Berat
TOTAL						8,493,766,260	14,545,000			

Mengetahui,
Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Perempuan Kelas IIA Tenggarong

Triana Agustin
NIP . 198208282000122001

Tenggarong, 24 Januari 2024
Panitia Penelitian dan Penilaian BMN

1. Pratiwi Widyahningsih (Ketua) ……..
   NIP. 196602031994032001
2. Suhartono (Sekretaris) ……..
   NIP. 198909052009121003
3. Ray Hafidz Kurniawan (Anggota) ……..
   NIP. 199404292017121003

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Alamat: JL.Imam Bonjol No.37 Rt.08 Kel.Melayu, Kec.Tenggarong Kutai Kartanegara
Telp : 05416720100, Email lpp.smd@gmail.com

SURAT PERNYATAAN DAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nomor : W.18.PAS.PAS.7-PB.05.05-263

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Triana Agustin**
NIP : 198208282000122001
Jabatan : Kuasa Pengguna Barang Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong

Dengan ini menyatakan dan bertanggung jawab secara penuh atas hal-hal sebagai berikut:

1. Bertanggung jawab penuh atas kebenaran data yang disajikan pada Usulan Persetujuan Penghapusan Gedung dan Bangunan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong

2. Apabila dikemudian hari terdapat ketidaklengkapan data yang dikirimkan, kami bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia melengkapi sesuai dengan ketentuan yang ada.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar dan tidak dibawah tekanan.

.

Tenggarong, 24 Januari 2024
Kepala,

Triana Agustin
NIP. 198208282000122001

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Alamat: JL.Imam Bonjol No.37 Rt.08 Kel Melayu, Kec.Tenggarong Kutai Kartanegara
Telp : 05416720100, Email lpp.smd@gmail.com

SURAT PERNYATAAN

Nomor : W.18.PAS.PAS.7-PB.05.05-264

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: **Triana Agustin**
NIP	: 198208282000122001
Jabatan	: Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong
Alamat	: JL.Imam Bonjol No.37 Kel. Melayu Tenggarong Kutai Kartanegara

Dengan ini menyatakan bahwa dengan adanya Penghapusan Barang Milik Negara berupa Gedung dan Bangunan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong tidak akan mengganggu Tupoksi pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya agar dapat dipergunakan seperlunya.

Tenggarong, 24 Januari 2024
Kepala,

Triana Agustin
NIP. 198208282000122001

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Alamat: JL Imam Bonjol No.37 Rt.08 Kel.Melayu, Kec.Tenggarong Kutai Kartanegara
Telp : 05416720100, Email lpp.trnd@gmail.com

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nomor : W.18.PAS.PAS.7-PB.06.01-266

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Triana Agustin**
NIP : 198208282000122001
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong
Alamat : JL.Imam Bonjol No.37 Kel.Melayu Tenggarong Kutai Kartanegara

Dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. Bertanggung jawab mutlak atas kebenaran permohonan penjualan, baik materil maupun formil dengan Total Nilai Limit/ Wajar sebesar Rp. 14.545.000,- (Empat Belas Juta Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) berdasarkan Berita Acara Penelitian dan Penilaian BMN Nomor W.18.PAS.PAS.7.PB.04.02- tanggal 15 November 2023.

2. Penelitian dan Penilaian BMN sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) telah memperhatikan aspek teknis, ekonomis, dan yuridis.

3. Penjualan BMN dilaksanakan dengan pertimbangan tidak mengganggu kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong dan secara ekonomis lebih menguntungkan bagi Negara.

Demikian pernyataan ini kami buat, dengan keadaan sesungguhnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tenggarong, 24 Januari 2024
Kepala,

METERAI TEMPEL

Triana Agustin
NIP. 198208282000122001

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Alamat: JL.Imam Bonjol No.37 Rt.08 Kel.Melayu, Kec.Tenggarong Kutai Kartanegara
Telp : 05416720100, Email lpp.smd@gmail.com

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nomor : W.18.PAS.PAS.7-PB.05.01-265

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Triana Agustin**
NIP : 198208282000122001
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong
Alamat : JL.Imam Bonjol No.37 Kel.Melayu Tenggarong Kutai Kartanegara

Dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. Bertanggung jawab mutlak atas kebenaran permohonan penghapusan, baik materil maupun formil dengan nilai total perolehan sebesar Rp. 8.493.766.260,- (Delapan Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Dua Ratus Enam Puluh Rupiah) berdasarkan Berita Acara Penelitian dan Penilaian BMN Nomor W.18.PAS.PAS.7.PB.04.02- tanggal 15 November 2023.

2. Penelitian dan Penilaian BMN sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) telah memperhatikan aspek teknis, ekonomis, dan yuridis.

3. Penghapusan BMN dilaksanakan dengan pertimbangan tidak mengganggu kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong dan secara ekonomis lebih menguntungkan bagi Negara.

Demikian pernyataan ini kami buat, dengan keadaan sesungguhnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tenggarong, 24 Januari 2024
Kepala

Triana Agustin
NIP. 198208282000122001

Dokumentasi Bangunan Yang Diusulkan Penghapusan Dengan Tindak Lanjut Penjualan

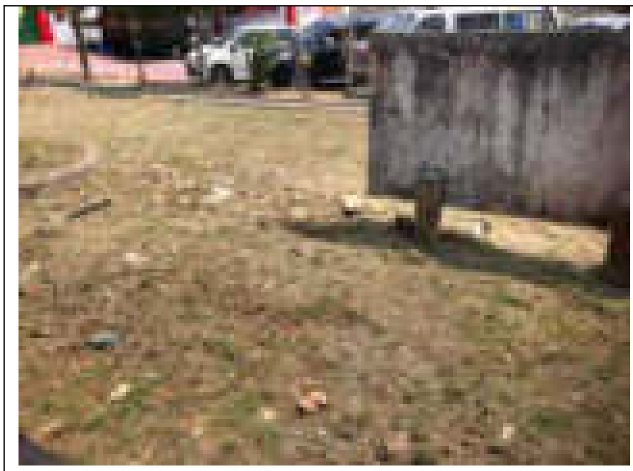

1. Bangunan Gedung Kantor Permanen NUP 4

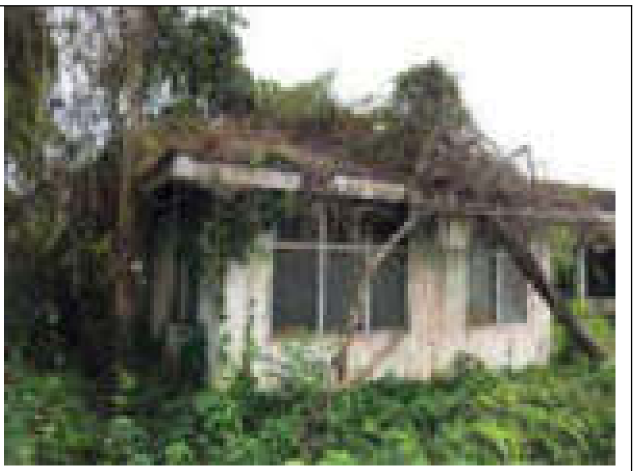

2. Bangunan Gedung Kantor Permanen NUP 5

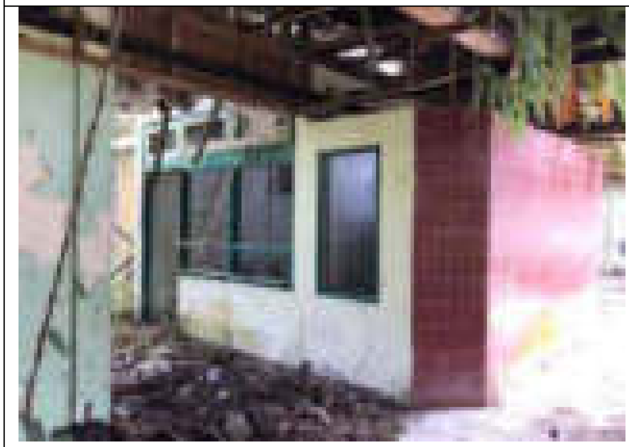

3. Bangunan Gedung Kantor Lainnya NUP 1

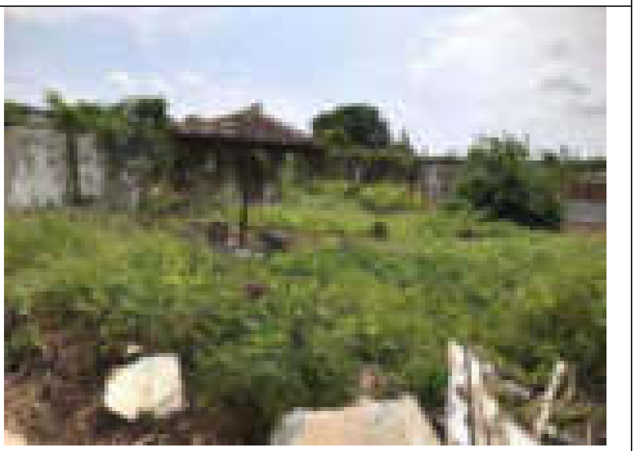

4. Bangunan Gedung Kantor Lainnya NUP 2

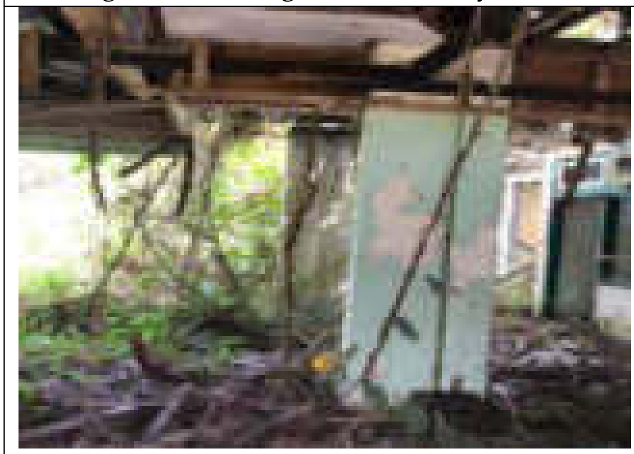

5. Bangunan Gedung Kantor Lainnya NUP 3

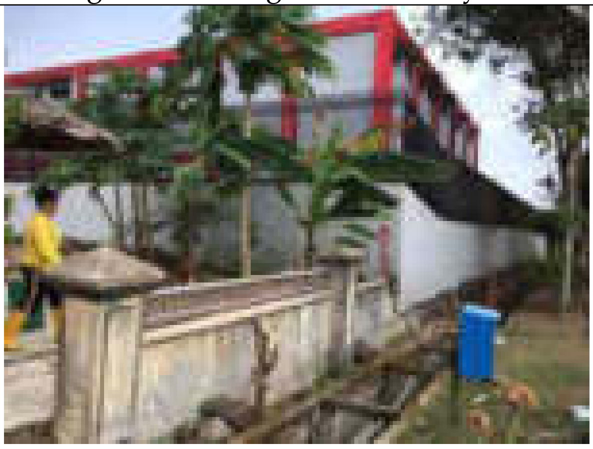

6. Bangunan Gedung Kantor Lainnya NUP 4

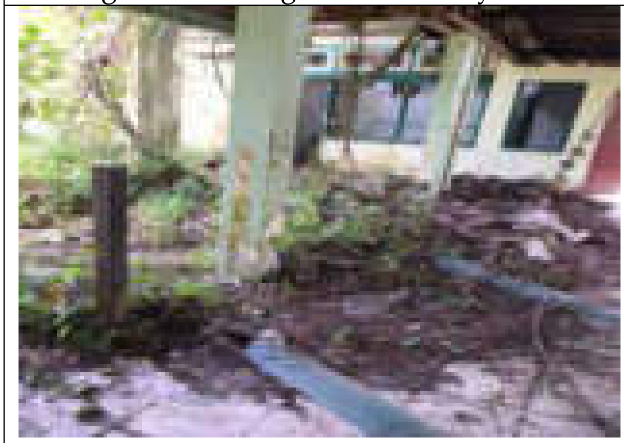

7. Bangunan Gedung Kantor Lainnya NUP 5

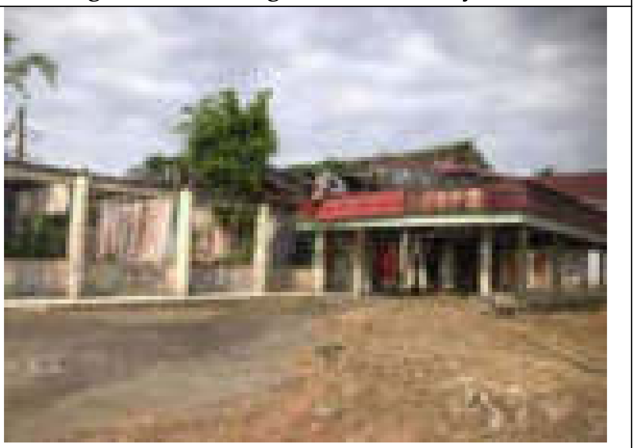

8. Bangunan Rumah Sakit Umum NUP 1

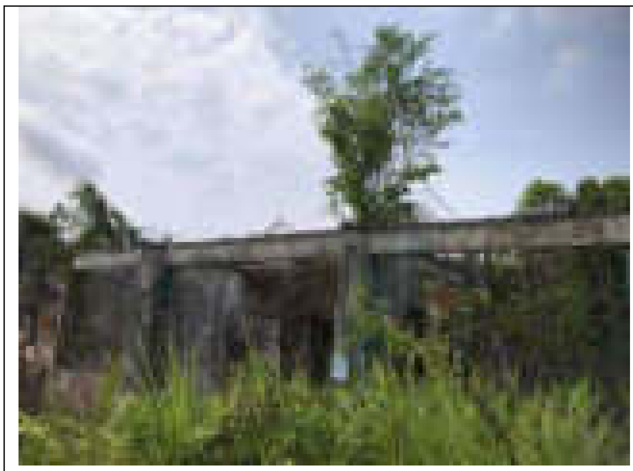
9. Bangunan Rumah Sakit Umum NUP 2

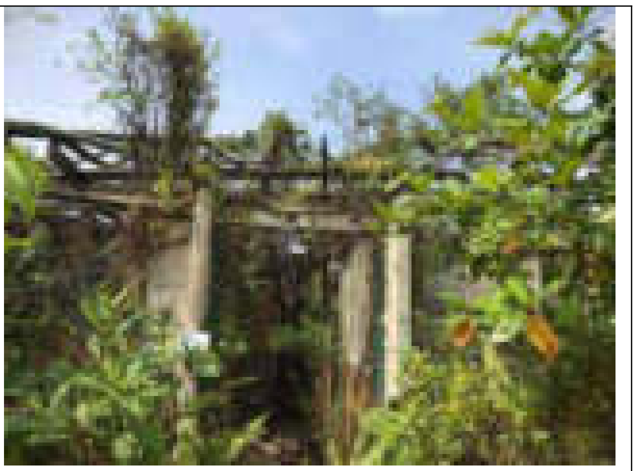
10. Bangunan Rumah Sakit Umum NUP 3

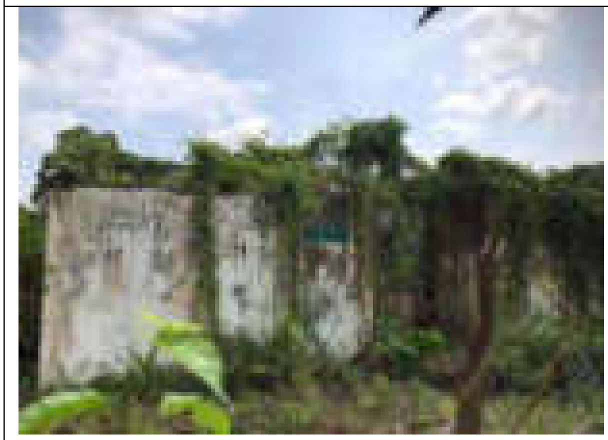
11. Bangunan Rumah Sakit Umum NUP 4

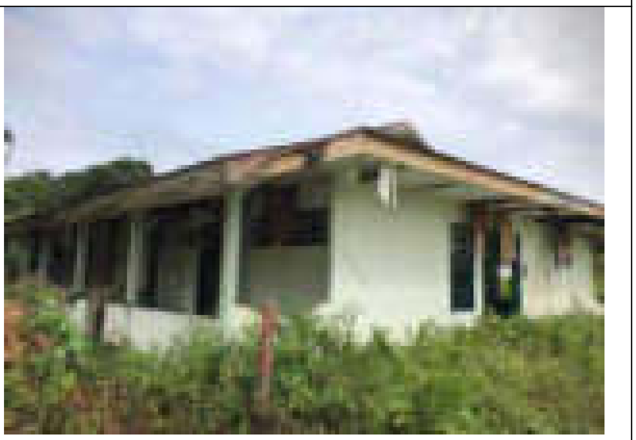
12. Bangunan Rumah Sakit Umum NUP 5

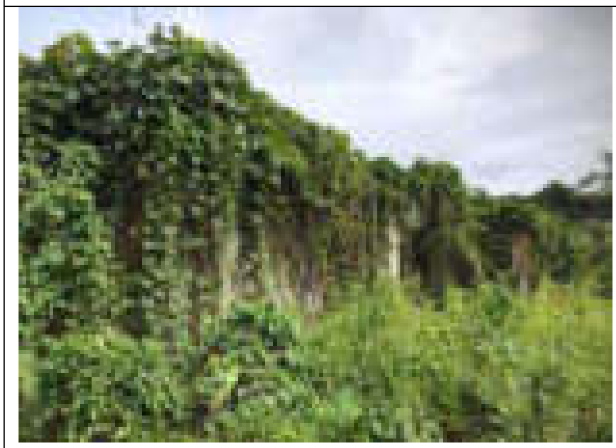
13. Bangunan Rumah Sakit Umum NUP 6

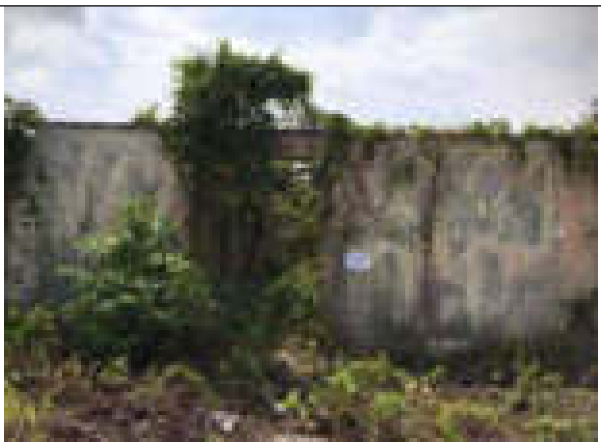
14. Bangunan Rumah Sakit Umum NUP 7

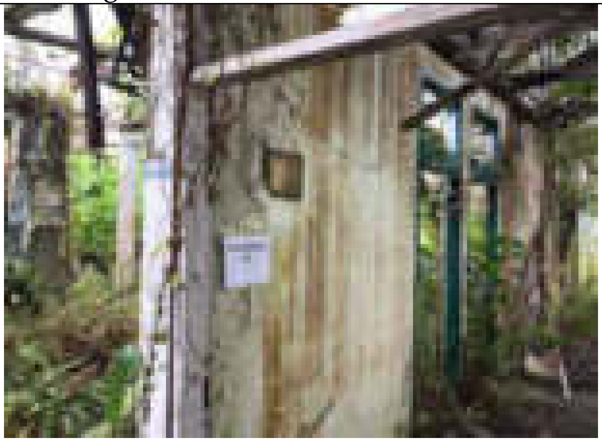
15. Bangunan Rumah Sakit Umum NUP 8

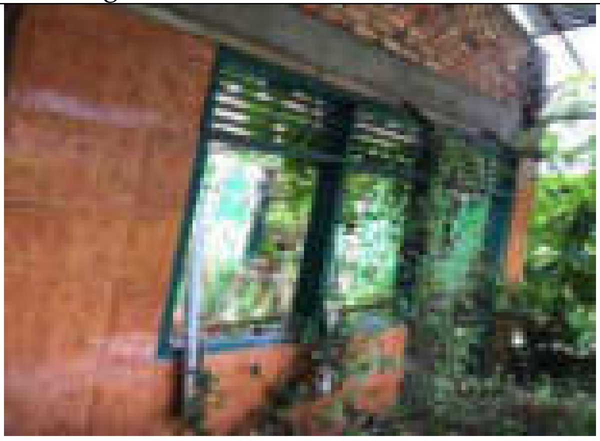
16. Bangunan Rumah Sakit Umum NUP 9

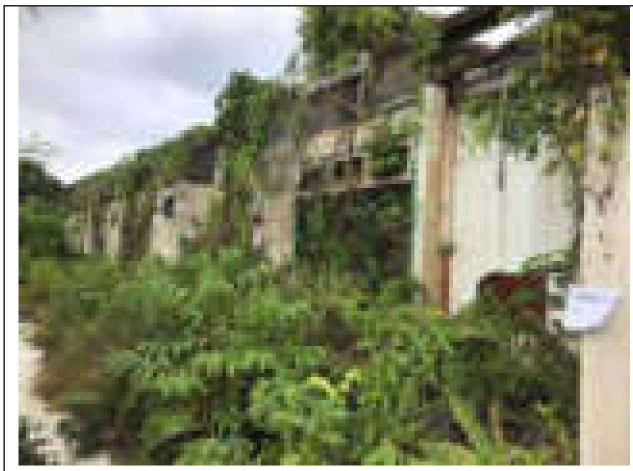 17. Bangunan Rumah Sakit Umum NUP 10	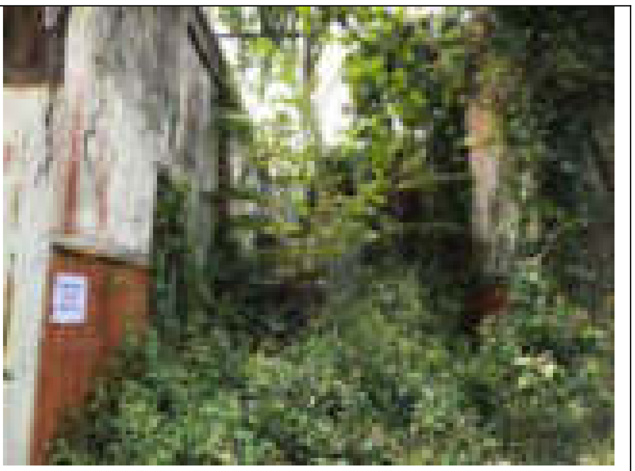 18. Bangunan Posyandu NUP 1
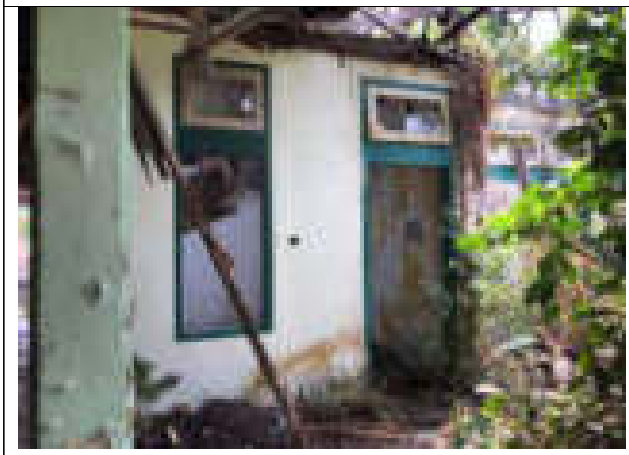 19. Bangunan Posyandu NUP 2	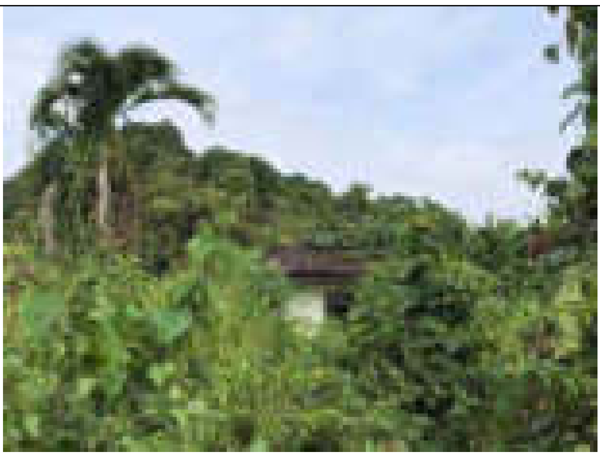 20. Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen NUP 1
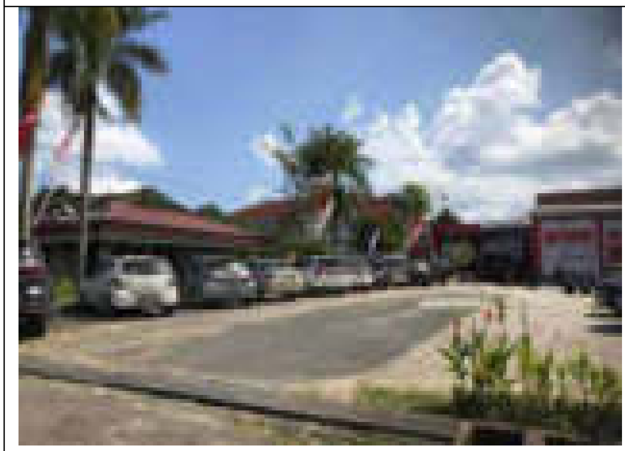 21. Bangunan Rumah Genset NUP 1	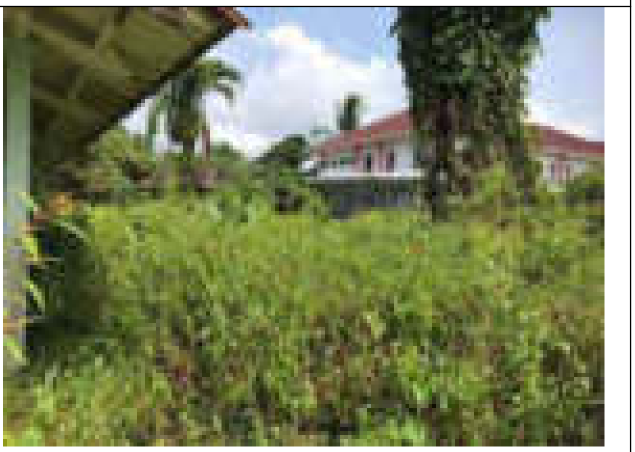 22. Taman Lainnya NUP 1
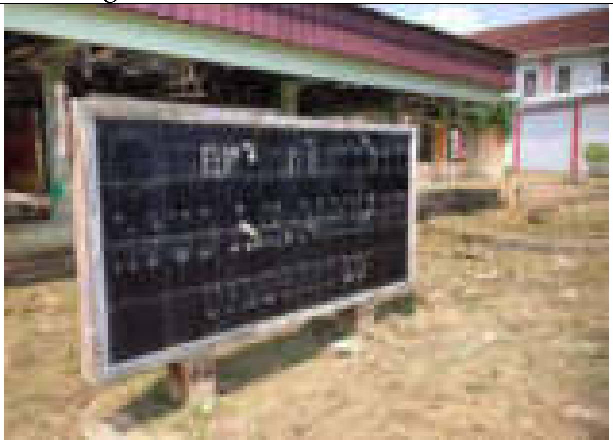 23. Tugu/Tanda Batas Lainnya NUP 1	

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.IKANTOR
WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jl. Imam Bonjol No.37 Rt.08 Kel.Melayu Kec.Tenggarong Kutai Kartanegara
Telp.0541-6720100, Email : lpp.smd@gmail.com

TELAAHAN STAF
TENTANG
PENGHAPUSAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II A TENGGARONG

A. Persoalan

1. Bahwa untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan system pemasyarakatan, diperlukan sarana dan prasarana yang dapat mendukung kegiatan perawatan tahanan, pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

2. Bahwa sarana dan prasarana diwujudkan dalam bentuk bangunan yang memiliki fungsi khusus, yang terintegrasi antara aspek ruang gerak yang sehat dengan aspek perawatan, pembinaan, pembimbingan dan pengamanan, dimana sekelompok manusia menjalani kehidupan.

3. Kondisi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong saat ini terkait dengan isi penghuni sebagai berikut :

a.	Kapasitas Hunian	:	192	Orang
b.	Narapidana	:	295	Orang
c.	Tahanan	:	16	Orang
	Jumlah Total	:	311	Orang
e.	Over Kapasitas Hunian Per 24 Januari 2024	:	48,96%	Persen
f.	Jumlah Total Narapidana & Tahanan Berdasarkan data SDP per 24 Januari 2024	:	793	Orang
g.	Over Kapasitas Hunian Berdasarkan data SDP per 24 Januari 2024	:	313,02%	Persen

4. Kondisi Fisik Bangunan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong terdiri dari 1 Blok Hunian, 1 Bangunan Gedung Perkantoran Tusi Teknis dan Tusi Fasilitatif, dimana kondisi tersebut mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan dalam program pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan. Dan juga kurang representative lagi karna kondisi bangunan dan lingkungan yang rentan terjadi gangguan keamanan dan ketertiban.

5. Terdapat Hibah Gedung dan Bangunan dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berupa 23 unit Gedung dan Bangunan dengan nilai perolehan sebesar Rp 8.493.766.260,- (Delapan Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Dua Ratus Enam Puluh Rupiah) dengan kondisi

seluruh bangunan Rusak Berat. Barang Milik Negara tersebut telah ditetapkan status penggunaannya sesuai Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 063/KM.6/KNL.1302/2023 tanggal 18 Agustus 2011 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

B. Praanggapan

1. Sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.01.PL.01.01 Tahun 2003 tentang Pola Bangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan disebutkan bahwa UPT Pemasyarakatan merupakan dasar perencanaan bangunan yang berlaku khusus di lingkungan UPT Pemasyarakatan untuk memenuhi kebutuhan prasarana dan sarana secara tepat guna dan berhasil guna dalam rangka mencapai tujuan Sistem Pemasyarakatan sehingga bentuk bangunan disesuaikan dengan tanah/lahan yang tersedia agar dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin dengan mempertimbangkan aspek manfaat.
2. Untuk Mewujudkan bentuk Bangunan yang memiliki fungsi khusus, yang terintegrasi antara aspek ruang gerak yang sehat dengan aspek perawatan, pembinaan, pembimbingan, dan pengamanan, maka Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong perlu dilakukan Penataan Ulang Gedung dan Bangunannya sehingga akan berdampak pada beberapa gedung bangunan yang akan dihapuskan.

C. Fakta Yang Mempengaruhi

1. Melihat sejarah berdirinya Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong yang dibangun pada tahun 2018, saat ini sudah kurang representatif lagi karena kondisi bangunan dan lingkungan yang rentan terjadi gangguan keamanan dan ketertiban.
2. Daya tampung hunian Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong yang seharusnya 192 orang, saat ini sudah diisi 311 orang dengan 1 blok yang terdiri dari 9 kamar.
3. Penataan ulang bangunan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong secara berlanjut dan dialokasikan anggarannya secara bertahap, dan pada tahun anggaran 2024 ini sudah dialokasikan pada RKA Belanja SKPD No.1.03.0.00.0.00.01.000 tercantum Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur di JL.RS Lama Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Pagu Fisik Anggaran Rp. 7.427.149.000,- (Tujuh Milyar Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Seratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

D. Analisis

Dalam pengusulan Penghapusan Bangunan Gedung Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong ini mempertimbangkan berbagai hal, diantaranya sebagai berikut :

1. Untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana secara tepat guna dan berhasil guna dalam rangka mencapai tujuan Sistem Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong perlu dilakukan penataan ulang bangunan. Hal ini pastinya akan berdampak adanya bangunan yang ada saat ini akan mengalami pembongkaran dan penghapusan. Setelah dilakukan penataan ulang bangunan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong akan mewujudkan bentuk bangunan yang terintegrasi antara aspek ruang gerak yang sehat dengan aspek perawatan, pembinaan, pembimbingan, dan pengamanan.

2. Berdasarkan RKA Belanja SKPD No.1.03.0.00.0.00.01.000 tercantum Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur di JL.RS Lama Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Pagu Fisik Anggaran Rp. 7.427.149.000,- (Tujuh Milyar Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Seratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

3. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong yang dibangun pada tahun 2018 dan memiliki daya tampung 192 orang, saat ini sudah diisi 311 orang dengan 1 blok hunian yang terdiri dari 9 kamar, maka pengembangan bangunan untuk menambah kapasitas hunian perlu segera dilaksanakan sehingga menjamin terselenggaranya pelaksanaan system pemasyarakatan dan mendukung kegiatan perawatan tahanan, pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan.

E. Kesimpulan

Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong sudah saatnya untuk dilakukan penataan ulang terhadap bangunan gedung yang saat ini berdiri sejak tahun 2018 sehingga perlu dilakukan persetujuan Penghapusan dan Pembongkaran. Hal ini didukung oleh anggaran yang telah dialokasikan untuk pembangunan pada tahun 2024 sesuai dengan RKA Belanja SKPD No.1.03.0.00.0.00.01.000 tercantum Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur di JL.RS Lama Kecamatan Tenggarong dengan Pagu Fisik Anggaran Rp. 7.427.149.000,- (Tujuh Milyar Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Seratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

F. Saran

Sehubungan dengan akan dilakukan kegiatan Pembangunan Penataan Ulang Gedung Bangunan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong pada tahun 2024 yang berdampak dengan adanya penghapusan dan pembongkaran gedung yang lama, bersama ini dengan hormat mohon kiranya usulan Persetujuan Penghapusan Bangunan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong dapat disetujui dan terlaksana dalam waktu dekat, sehingga kegiatan pembangunan penataan yang telah dijadwalkan dapat terlaksana sesuai dengan target dan tepat waktu.

Dibuat di : Tenggarong
Pada tanggal : 24 Januari 2024

Kepala,

TRIANA AGUSTIN
NIP 19820828 200012 2 001

UAPB : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
UAPPB-E1 : DITJEN PEMASYARAKATAN
UAPPB-W : KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALTIM (Wil-KALTIM)

Form : [illegible]
4010101999.1

KARTU IDENTITAS BARANG
GEDUNG DAN BANGUNAN

BIDANG : Gedung dan Bangunan
KELOMPOK : BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA
SUB KELOMPOK : BANGUNAN GEDUNG KANTOR
SUB-SUB KELOMPOK : Bangunan Gedung Kantor Lainnya

Kode UAKPB : [illegible]
Nama UAKPB : LAPAS PEREMPUAN KELAS II A TENGGARONG

I. UNIT BARANG

1. Luas Bangunan : 31 m^2
2. Luas Dasar Bangunan : 31 m^2
3. Jumlah Lantai : 0 Lt
4. Type : Gedung Kantor Lainnya
5. Tahun Selesai Dibangun / Digunakan : -
6. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) :
   No. : -
   Tanggal :
7. Letak Bangunan :
   - Provinsi : KALIMANTAN TIMUR
   - Kabupaten / Kota *) : KAB. KUTAI KERTANEGARA
   - Kecamatan : Tenggarong
   - Kelurahan / Desa *) : Tenggarong
   - Jalan : Jl. Imam Bonjol No.37
   - RT / RW / RK : [illegible]
8. Nomor KIB Tanah : -

II. UNIT PEMAKAI

1. Nama Unit : -
2. Alamat : -

III. PENGADAAN

1. Cara Perolehan : 103 (Hibah Masuk)
2. Dari : -
3. Tgl. Perolehan : 31/12/2022
4. Kondisi Perolehan : Baik
5. Harga Perolehan : RP. 37,200,000
6. Dasar Harga : -
7. Sumber Dana :
   No. : -
   Tgl. :

IV. NILAI/HARGA LAINNYA

1. Nilai Bruto : Rp. 37,200,000
2. N. Akum. Penyusutan : Rp. 1,119,000
3. Nilai Buku : Rp. 36,181,000
   Periode Laporan :
4. Nilai Wajar : Rp. 0
   Tanggal Penilaian :
5. Nilai NJOP : Rp. 0
   Tahun :

V. CATATAN PENGISI

1. Status Penggunaan : Digunakan sendiri untuk operasional
2. Digunakan untuk / oleh : -
3. Status Hukum : Tidak Ada Sengketa
4. Catatan Lainnya : -

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	FOTO 4

Disetujui Tgl. :
Nama Pejabat : [illegible]
Jabatan Pejabat : KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Tanda tangan dan Stempel :

Diisi Tgl. :
Nama : Ray Hafidz Kurniawan
Jabatan : Pelaksana
Tanda tangan dan Stempel :

*) Coret yang tidak perlu

UAPB : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
UAPPB-E1 : DITJEN PEMASYARAKATAN
UAPPB-W : KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALTIM (PAS-KALTIM)

Form : [illegible]
[illegible]

KARTU IDENTITAS BARANG
GEDUNG DAN BANGUNAN

BIDANG : Gedung dan Bangunan
KELOMPOK : BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA
SUB KELOMPOK : BANGUNAN KESEHATAN
SUB-SUB KELOMPOK : Bangunan Rumah Sakit Umum

Kode UAKPB : [illegible]
Nama UAKPB : LAPAS PEREMPUAN KELAS II A TENGGARONG

I. UNIT BARANG

1. Luas Bangunan : 138 m²
2. Luas Dasar Bangunan : 138 m²
3. Jumlah Lantai : 0 Lt.
4. Tipe : Gedung Ruang Aneka
5. Tahun Selesai Dibangun / Digunakan : -
6. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
   No. : - Tanggal :
7. Letak Bangunan :
   - Provinsi : KALIMANTAN TIMUR
   - Kabupaten / Kota *) : KAB. KUTAI KERTANEGARA
   - Kecamatan : Tenggarong
   - Kelurahan / Desa *) : Tenggarong
   - Jalan : Jl.Imam Bonjol No.27
   - RT / RW / KK : RI/18
8. Nomor KIB Tanah : -

II. UNIT PEMAKAI

1. Nama Unit : -
2. Alamat : -

III. PENGADAAN

1. Cara Perolehan : 103 (Hibah Masuk)
2. Dari : -
3. Tgl. Perolehan : 31/12/2022
4. Kondisi Perolehan : Baik
5. Biaya Perolehan : RP. 513,667,000
6. Dasar Harga : -
7. Sumber Dana :
   No. : -
   Tgl :

IV. NILAI/HARGA LAINNYA

1. Nilai Bruto : Rp. 513,667,000
2. N. Akum. Penyusutan : Rp. 15,410,010
3. Nilai Buku : Rp. 498,256,990
   Periode Laporan :
4. Nilai Wajar : Rp. 0
   Tanggal Penilaian :
5. Nilai NJOP : Rp. 0
   Tahun :

V. CATATAN PENGISI

1. Status Penggunaan : Digunakan sendiri untuk operasional
2. Digunakan untuk / oleh : -
3. Status Hukum : Tidak Ada Sengketa
4. Catatan Lainnya : -

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	FOTO 4
			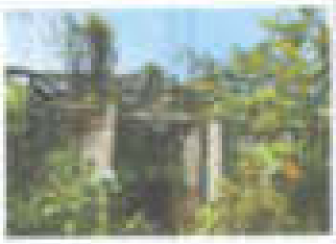

[illegible] Tgl. :
Nama Pejabat : [illegible]
Jabatan Pejabat : KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Tanda tangan dan Stempel

Oleh Tgl. :
Nama : Ray Hafida Kurniawan
Jabatan : Pelaksana
Tanda tangan dan Stempel :

*) Coret yang tidak perlu

UAPB : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
UAPPB-E1 : DITJEN PEMASYARAKATAN
UAPPB-W : KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALTIM (PB-KALTIM)

Form : UPG 1.2.06
[illegible]

KARTU IDENTITAS BARANG
GEDUNG DAN BANGUNAN

BIDANG : Gedung dan Bangunan
KELOMPOK : BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA
SUB KELOMPOK : BANGUNAN KESEHATAN
SUB-SUB KELOMPOK : Bangunan Rumah Sakit Umum

Kode UAKPB : [illegible]
Nama UAKPB : LAPAS PEREMPUAN KELAS II A TENGGARONG

I. UNIT BARANG

1. Luas Bangunan : 138 m²
2. Luas Dasar Bangunan : 138 m²
3. Jumlah Lantai : 0 Lt.
4. Tipe : Gedung Ruang Mesin
5. Tahun Selesai Dibangun / Digunakan : -
6. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) :
   No. : - Tanggal :
7. Letak Bangunan :
   - Provinsi : KALIMANTAN TIMUR
   - Kabupaten / Kota *) : KAB. KUTAI KERTANEGARA
   - Kecamatan : Tenggarong
   - Kelurahan / Desa *) : Tenggarong
   - Jalan : Jl. Imam Bonjol No.23
   - RT / RW / KK : 06.08
8. Nomor KIB Tanah : -

II. UNIT PEMAKAI

1. Nama Unit : -
2. Alamat : -

III. PENGADAAN

1. Cara Perolehan : 103 (Hibah Masuk)
2. Dari : -
3. Tgl. Perolehan : 31/12/2022
4. Kondisi Perolehan : Baik
5. Biaya Perolehan : RP. 500.000.000
6. Dasar Harga : -
7. Sumber Dana :

No. : -
Tgl. :

IV. NILAI/HARGA LAINNYA

1. Nilai Bruto : Rp. 500.000.000
2. Jl. Akum. Penyusutan : Rp. 15.000.000
3. Nilai Buku : Rp. 485.000.000
   Periode Laporan :
4. Nilai Wajar : Rp. 0
   Tanggal Penilaian :
5. Nilai NJOP : Rp. 0
   Tahun :

V. CATATAN PENGISI

1. Status Penggunaan : Digunakan sendiri untuk operasional
2. Digunakan untuk / oleh : -
3. Status Hukum : Tidak Ada Sengketa
4. Catatan Lainnya : -

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	FOTO 4

Disahkan Tgl. :
Nama Pejabat : [illegible]
Jabatan Pejabat : KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Tanda tangan dan Stempel :

Diisi Tgl. :
Nama : Ray Hafida Kusumawati
Jabatan : Pelaksana
Tanda tangan dan Stempel :

*) Coret yang tidak perlu

UAPB : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
UAPPB-E1 : DITJEN PEMASYARAKATAN
UAPPB-W : KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALTIM (PAS-KALTIM)

Form - 1.DQ.1.2.06
[illegible]

KARTU IDENTITAS BARANG
GEDUNG DAN BANGUNAN

BIDANG : Gedung dan Bangunan
KELOMPOK : BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA
SUB KELOMPOK : BANGUNAN KESEHATAN
SUB-SUB KELOMPOK : Bangunan Rumah Sakit Umum

Kode UAKPB : 013071600410335000KD
Nama UAKPB : LAPAS PEREMPUAN KELAS II A TENGGARONG

I. UNIT BARANG

1. Luas Bangunan : 254 m²
2. Luas Dasar Bangunan : 254 m²
3. Jumlah Lantai : 0 Lt
4. Tipe : Gedung Ruang ICU
5. Tahun Selesai Dibangun / Digunakan : -
6. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
   No. : - Tanggal :
7. Letak Bangunan :
   - Provinsi : KALIMANTAN TIMUR
   - Kabupaten / Kota *) : KAB. KUTAI KERTANEGARA
   - Kecamatan : Tenggarong
   - Kelurahan / Desa *) : Tenggarong
   - Jalan : Jl. Imam Bonjol No.17
   - RT / RW / RK : 01/08
8. Nomor KIB Tanah : -

II. UNIT PEMAKAI

1. Nama Unit : -
2. Alamat : -

III. PENGADAAN

1. Cara Perolehan : 103 (Hibah Masuk)
2. Dari : -
3. Tgl. Perolehan : 31/12/2022
4. Kondisi Perolehan : Baik
5. Biaya Perolehan : RP. 350,000,000
6. Dasar Harga : -
7. Sumber Dana :

No. : -
Tgl :

IV. NILAI/HARGA LAINNYA

1. Nilai Bruto : Rp. 350,000,000
2. N. Akum. Penyusutan : Rp. 10,500,000
3. Nilai Buku : Rp. 339,500,000
   Periode Laporan :
4. Nilai Wajar : Rp. 0
   Tanggal Penilaian :
5. Nilai NJOP : Rp. 0
   Tahun :

V. CATATAN PENGISI

1. Status Penggunaan : Digunakan sendiri untuk operasional
2. Digunakan untuk / oleh : -
3. Status Hukum : Tidak Ada Sengketa
4. Catatan Lainnya : -

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	FOTO 4

Disetujui Tgl :
Nama Pejabat : [illegible]
Jabatan Pejabat : KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Tanda tangan dan Stempel

KEPALA

Diisi Tgl :
Nama : Ray Hafidz Kurniawan
Jabatan : Pelaksana
Tanda tangan dan Stempel :

*) Coret yang tidak perlu

UAPB : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
UAPPB-E1 : DITJEN PEMASYARAKATAN
UAPPB-W : KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALTIM (PAS-KALTIM)

Form : UPG.1.2.06
[illegible]

KARTU IDENTITAS BARANG
GEDUNG DAN BANGUNAN

BIDANG : Gedung dan Bangunan
KELOMPOK : TUGU/TANDA BATAS
SUB KELOMPOK : TUGU/TANDA BATAS LAINNYA
SUB-SUB KELOMPOK : Tugu/Tanda Batas Lainnya

Kode UAKPB : [illegible]
Nama UAKPB : LAPAS PEREMPUAN KELAS II A TENGGARONG

I. UNIT BARANG

1. Luas Bangunan : 4 m²
2. Luas Dasar Bangunan : 4 m²
3. Jumlah Lantai : 0 Lt
4. Tipe : Tugu/Tanda Batas Lain
5. Tahun Selesai Dibangun / Digunakan : -
6. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
   No. : - Tanggal :
7. Letak Bangunan :
   - Provinsi : KALIMANTAN TIMUR
   - Kabupaten / Kota *) : KAB. KUTAI KERTANEGARA
   - Kecamatan : Tenggarong
   - Kelurahan / Desa *) : Tenggarong
   - Jalan : Jl. Imam Bonjol No.37
   - RT / RW / RK : 01/08
8. Nomor KIB Tanah : -

II. UNIT PEMAKAI

1. Nama Unit : -
2. Alamat : -

III. PENGADAAN

1. Cara Perolehan : 103 (Hibah Masuk)
2. Dari : -
3. Tgl. Perolehan : 31/12/2022
4. Kondisi Perolehan : Baik
5. Biaya Perolehan : RP 97.200.000
6. Dasar Harga : -
7. Sumber Data :

No. : -
Tgl. :

IV. NILAI/HARGA LAINNYA

1. Nilai Buatan : Rp 97.200.000
2. N. Akum. Penyusutan : Rp 2.916.000
3. Nilai Buku : Rp 94.284.000
   Periode Laporan :
4. Nilai Wajar : Rp 0
   Tanggal Perolehan :
5. Nilai NJOP : Rp 0
   Tahun :

V. CATATAN PENGISI

1. Status Penggunaan : Digunakan sendiri untuk operasional
2. Digunakan untuk / oleh : -
3. Status Hukum : Tidak Ada Sengketa
4. Catatan Lainnya : -

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	FOTO 4

Dibuat Tgl :
Nama Pejabat : [illegible]
Jabatan Pejabat : KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Tanda tangan dan Stempel :

Diisi Tgl :
Nama : Ray Hafidz Kurniawan
Jabatan : Pelaksana
Tanda tangan dan Stempel :

*) Coret yang tidak perlu

UAPB : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
UAPPB-E1 : DITJEN PEMASYARAKATAN
UAPPB-W : KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALTIM (PAS-KALTIM)

Form - UPL 1.2.06
[illegible]

KARTU IDENTITAS BARANG
GEDUNG DAN BANGUNAN

BIDANG : Gedung dan Bangunan
KELOMPOK : BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA
SUB KELOMPOK : TAMAN
SUB-SUB KELOMPOK : Taman Lainnya

Kode UAKPB : [illegible]
Nama UAKPB : LAPAS PEREMPUAN KELAS II A TENGGARONG

I. UNIT BARANG

1. Luas Bangunan : 75 m²
2. Luas Dasar Bangunan : 75 m²
3. Jumlah Lantai : 0 Lt.
4. Tipe : Pembuatan Taman
5. Tahun Selesai Dibangun / Digunakan : -
6. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
   No. : - Tanggal :
7. Letak Bangunan :
   - Provinsi : KALIMANTAN TIMUR
   - Kabupaten / Kota *) : KAB. KUTAI KERTANEGARA
   - Kecamatan : Tenggarong
   - Kelurahan / Desa *) : Tenggarong
   - Jalan : Jl. Imam Bonjol No.37
   - RT / RW / RK : RL09
8. Nomor KIB Tanah : -

II. UNIT PEMAKAI

1. Nama Unit : -
2. Alamat : -

III. PENGADAAN

1. Cara Perolehan : 103 (Hibah Masuk)
2. Dari : -
3. Tgl. Perolehan : 31/12/2022
4. Kondisi Perolehan : Baik
5. Biaya Perolehan : RP. 48,990,000
6. Dasar Harga : -
7. Sumber Dana :

No. : -
Tgl. :

IV. NILAI/HARGA LAINNYA

1. Nilai Bruto : Rp. 48,990,000
2. N. Akum. Penyusutan : Rp. 1,469,700
3. Nilai Buku : Rp. 47,520,300
   Periode Laporan :
4. Nilai Wajar : Rp. 0
   Tanggal Penilaian :
5. Nilai NJOP : Rp. 0
   Tahun :

V. CATATAN PENGISI

1. Status Penggunaan : Digunakan sendiri untuk operasional
2. Digunakan untuk / oleh : -
3. Status Hukum : Tidak Ada Sengketa
4. Catatan Lainnya : -

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	FOTO 4

Dibetulkan Tgl. :
Nama Pejabat : [illegible]
Jabatan Pejabat : KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Tanda tangan dan Stempel :

Diisi Tgl. :
Nama : Ray Habibi Kurniawan
Jabatan : Pelaksana
Tanda tangan dan Stempel :

*) Coret yang tidak perlu

UAPB	: KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM	Form - [illegible]
UAPPB-E1	: DITJEN PEMASYARAKATAN	[illegible]
UAPPB-W	: KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALTIM (PAS-KALTIM)	

KARTU IDENTITAS BARANG
GEDUNG DAN BANGUNAN

BIDANG : Gedung dan Bangunan
KELOMPOK : BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA
SUB KELOMPOK : BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA
SUB-SUB KELOMPOK : Bangunan Fasilitas Gedung

Kode UAKPB : [illegible]
Nama UAKPB : LAPAS PEREMPUAN KELAS II A TENGGARONG

I. UNIT BARANG

1. Luas Bangunan : 1820 m²
2. Luas Dasar Bangunan : 1820 m²
3. Jumlah Lantai : 1 Lt.
4. Tipe : Tempat Parkir Karyawan
5. Tahun Selesai Dibangun / Digunakan : -
6. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) :
   No. : - Tanggal :
7. Letak Bangunan :
   - Provinsi : KALIMANTAN TIMUR
   - Kabupaten / Kota *) : KAB. KUTAI KERTANEGARA
   - Kecamatan : Tenggarong
   - Kelurahan / Desa *) : Tenggarong
   - Jalan : Jl. Imam Bonjol No.17
   - RT / RW / RK : RT.08
8. Nomor KIB Tanah : -

II. UNIT PEMAKAI

1. Nama Unit : -
2. Alamat : -

III. PENGADAAN

1. Cara Perolehan : 103 ([illegible] Masuk)
2. Dari : -
3. Tgl. Perolehan : 31/12/2021
4. Kondisi Perolehan : Baik
5. Harga Perolehan : RP 470,681,400
6. Dasar Harga : -
7. Sumber Data :

No. : -
Tgl. :

IV. NILAI/HARGA LAINNYA

1. Nilai Bruto : Rp. 470,681,400
2. N. Akum. Penyusutan : Rp. 14,120,442
3. Nilai Buku : Rp. 456,560,958
   Periode Laporan :
4. Nilai Wajar : Rp. 0
   Tanggal Penilaian :
5. Nilai NJOP : Rp. 0
   Tahun :

V. CATATAN PENGISI

1. Status Penggunaan : Digunakan sendiri untuk operasional
2. Digunakan untuk / oleh : -
3. Status Hukum : Tidak Ada Sengketa
4. Catatan Lainnya : -

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	FOTO 4

Dibuat Tgl. :
Nama Pejabat : [illegible]
Jabatan Struktural : KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Tanda tangan dan Stempel

Diisi Tgl. :
Nama : Rey Hafidz Kurniawan
Jabatan : Pelaksana
Tanda tangan dan Stempel

*) Coret yang tidak perlu

UAPB KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
UAPPB-E1 DITJEN PEMASYARAKATAN
UAPPB-W KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALTIM (PAS-KALTIM)

Form - UPG 1.2.06
[illegible]

KARTU IDENTITAS BARANG
GEDUNG DAN BANGUNAN

BIDANG : Gedung dan Bangunan
KELOMPOK : BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA
SUB KELOMPOK : BANGUNAN GEDUNG TEMPAT IBADAH
SUB-SUB KELOMPOK : Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen

Kode UAKPB : [illegible]
Nama UAKPB : LAPAS PEREMPUAN KELAS II A TENGGARONG

I. UNIT BARANG

1. Luas Bangunan : 36 m²
2. Luas Dasar Bangunan : 36 m²
3. Jumlah Lantai : 0 Lt
4. Tipe : [illegible]
5. Tahun Selesai Dibangun / Digunakan : -
6. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
   No. : - Tanggal :
7. Letak Bangunan :
   - Provinsi : KALIMANTAN TIMUR
   - Kabupaten / Kota *) : KAB. KUTAI KERTANEGARA
   - Kecamatan : Tenggarong
   - Kelurahan / Desa *) : Tenggarong
   - Jalan : Jl. Imam Bonjol No.17
   - RT / RW / RK : [illegible]
8. Nomor KIB Tanah : -

II. UNIT PEMAKAI

1. Nama Unit : -
2. Alamat : -

III. PENGADAAN

1. Cara Perolehan : 103 (Hibah Masuk)
2. Dari : -
3. Tgl. Perolehan : 31/12/2022
4. Kondisi Perolehan : Baik
5. Biaya Perolehan : RP. 40,000,000
6. Dasar Harga : -
7. Sumber Dana :
   No. : -
   Tgl :

IV. NILAI/HARGA LAINNYA

1. Nilai Bruto : Rp. 40,000,000
2. N. Akum. Penyusutan : Rp. 1,200,000
3. Nilai Buku : Rp. 38,800,000
   Periode Laporan :
4. Nilai Wajar : Rp. 0
   Tanggal Penilaian :
5. Nilai NJOP : Rp. 0
   Tahun :

V. CATATAN PENGISI

1. Status Penggunaan : Digunakan sendiri untuk operasional
2. Digunakan untuk / oleh : -
3. Status Hukum : Tidak Ada Sengketa
4. Catatan Lainnya : -

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	FOTO 4

Disetujui Tgl :
Nama Pejabat : [illegible]
Jabatan Struktural : KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Tanda tangan dan Stempel

Diisi Tgl :
Nama : Ray Hafida Kurniawan
Jabatan : Pelaksana
Tanda tangan dan Stempel :

*) Coret yang tidak perlu

UAPB : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
UAPPB-E1 : DITJEN PEMASYARAKATAN
UAPPB-W : KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALTIM (PAS-KALTIM)

Form - [illegible]
[illegible]

KARTU IDENTITAS BARANG
GEDUNG DAN BANGUNAN

BIDANG : Gedung dan Bangunan
KELOMPOK : BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA
SUB KELOMPOK : BANGUNAN KESEHATAN
SUB-SUB KELOMPOK : Bangunan Posyandu

Kode UAKPB : [illegible]
Nama UAKPB : LAPAS PEREMPUAN KELAS II A TENGGARONG

I. UNIT BARANG

1. Luas Bangunan : 20 m²
2. Luas Dasar Bangunan : 20 m²
3. Jumlah Lantai : 0 Lt
4. Tipe : Tempat Pembuangan Sampah
5. Tahun Selesai Dibangun / Digunakan : -
6. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
   No. : - Tanggal :
7. Letak Bangunan :
   - Provinsi : KALIMANTAN TIMUR
   - Kabupaten / Kota *) : KAB. KUTAI KERTANEGARA
   - Kecamatan : Tenggarong
   - Kelurahan / Desa *) : Tenggarong
   - Jalan : Jl. Imam Bonjol No.37
   - RT / RW / RK : 01/09
8. Nomor KIB Tanah : -

II. UNIT PEMAKAI

1. Nama Unit : -
2. Alamat : -

III. PENGADAAN

1. Cara Perolehan : 103 (Hibah Masuk)
2. Dari : -
3. Tgl. Perolehan : 31/12/2022
4. Kondisi Perolehan : Baik
5. Biaya Perolehan : RP. 172,566,100
6. Dasar Harga : -
7. Sumber Dana :

No. : -
Tgl. :

IV. NILAI/HARGA LAINNYA

1. Nilai Bruto : Rp. 172,566,100
2. N. Akum. Penyusutan : Rp. 5,176,983
3. Nilai Buku : Rp. 167,389,117
   Periode Laporan :
4. Nilai Wajar : Rp. 0
   Tanggal Penilaian :
5. Nilai NJOP : Rp. 0
   Tahun :

V. CATATAN PENGISI

1. Status Penggunaan : Digunakan sendiri untuk operasional
2. Digunakan untuk / oleh : -
3. Status Hukum : Tidak Ada Sengketa
4. Catatan Lainnya : -

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	FOTO 4

Diketahui Tgl :
Nama Pejabat : [illegible]
Jabatan Pejabat : KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Tanda tangan dan Stempel

Diisi Tgl : -
Nama : Ray Hafidz Kurniawan
Jabatan : Pelaksana
Tanda tangan dan Stempel :

*) Coret yang tidak perlu

UAPB	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM	Form - UPG 1.2.06
UAPPB-E1	DITJEN PEMASYARAKATAN	4035106015.1
UAPPB-W	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALTIM (PSS-KALTIM)	

KARTU IDENTITAS BARANG
GEDUNG DAN BANGUNAN

BIDANG : Gedung dan Bangunan
KELOMPOK : BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA
SUB KELOMPOK : BANGUNAN KESEHATAN
SUB-SUB KELOMPOK : Bangunan Poliklinik

Kode UAKPB : 013051800041833000KD
Nama UAKPB : LAPAS PEREMPUAN KELAS II A TENGGARONG

I. UNIT BARANG

1. Luas Bangunan : 21 m²
2. Luas Dasar Bangunan : 21 m²
3. Jumlah Lantai : 0 Lt
4. Tipe : Ruang Tunggu ICCU
5. Tahun Selesai Dibangun / Digunakan : -
6. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
   No. : - Tanggal :
7. Letak Bangunan :
   - Provinsi : KALIMANTAN TIMUR
   - Kabupaten / Kota *) : KAB. KUTAI KERTANEGARA
   - Kecamatan : Tenggarong
   - Kelurahan / Desa *) : Tenggarong
   - Jalan : Jl. Imam Bonjol No.37
   - RT / RW / RK : Rt.08
8. Nomor KIB Tanah : -

II. UNIT PEMAKAI

1. Nama Unit : -
2. Alamat : -

III. PENGADAAN

1. Cara Perolehan : 103 (Hibah Masuk)
2. Dari : -
3. Tgl. Perolehan : 31/12/2022
4. Kondisi Perolehan : Baik
5. Biaya Perolehan : RP. 56,424,000
6. Dasar Harga : -
7. Sumber Dana :

No. : -
Tgl :

IV. NILAI/HARGA LAINNYA

1. Nilai Buku : Rp. 56,424,000
2. N. Akum. Penyusutan : Rp. 2,292,720
3. Nilai Buku : Rp. 54,131,280
   Periode Laporan :
4. Nilai Wajar : Rp. 0
   Tanggal Penilaian :
5. Nilai NJOP : Rp. 0
   Tahun :

V. CATATAN PENGISI

1. Status Penggunaan : Digunakan sendiri untuk operasional
2. Digunakan untuk / oleh : -
3. Status Hukum : Tidak Ada Sengketa
4. Catatan Lainnya : -

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	FOTO 4

Diketahui Tgl :
Nama Pejabat :
Jabatan : KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Tanda tangan dan Stempel

Diisi Tgl. :
Nama : Ray Hafidz Kurniawan
Jabatan : Pelaksana
Tanda tangan dan Stempel :

*) Coret yang tidak perlu

UAPB : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
UAPPB-E1 : DITJEN PEMASYARAKATAN
UAPPB-W : KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALTIM (PAS-KALTIM)

Form : [illegible]
[illegible]

KARTU IDENTITAS BARANG
GEDUNG DAN BANGUNAN

BIDANG : Gedung dan Bangunan
KELOMPOK : BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA
SUB KELOMPOK : BANGUNAN KESEHATAN
SUB-SUB KELOMPOK : Bangunan Rumah Sakit Umum

Kode UAKPB : [illegible]
Nama UAKPB : LAPAS PEREMPUAN KELAS II A TENGGARONG

I. UNIT BARANG

1. Luas Bangunan : 378 m²
2. Luas Dasar Bangunan : 378 m²
3. Jumlah Lantai : 1 Lt.
4. Tipe : Gedung Ruang Tahap
5. Tahun Selesai Dibangun / Digunakan : -
6. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
   No. : - Tanggal :
7. Letak Bangunan :
   - Provinsi : KALIMANTAN TIMUR
   - Kabupaten / Kota *) : KAB. KUTAI KERTANEGARA
   - Kecamatan : Tenggarong
   - Kelurahan / Desa *) : Tenggarong
   - Jalan : Jl. Imam Bonjol No.17
   - RT / RW / RK : 01.08
8. Nomor KIB Tanah : -
   :

II. UNIT PEMAKAI

1. Nama Unit : -
2. Alamat : -

III. PENGADAAN

1. Cara Perolehan : 103 (Hibah Masuk)
2. Dari : -
3. Tgl. Perolehan : 31/12/2022
4. Kondisi Perolehan : Baik
5. Biaya Perolehan : RP. 1.011.192.000
6. Dasar Harga : -
7. Sumber Dana :
   No. : -
   Tgl. :

IV. NILAI/HARGA LAINNYA

1. Nilai Bruto : Rp. 1,509,291,080
2. N. Akum. Penyusutan : Rp. 40,398,386
3. Nilai Buku : Rp. 1,468,893,504
   Periode Laporan :
4. Nilai Wajar : Rp. 0
   Tanggal Penilaian :
5. Nilai NJOP : Rp. 0
   Tahun :

V. CATATAN PENGISI

1. Status Penggunaan : Digunakan sendiri untuk operasional
2. Digunakan untuk / oleh : -
3. Status Hukum : Tidak Ada Sengketa
4. Catatan Lainnya : -

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	FOTO 4

Disetujui Tgl. :
Nama Pejabat : [illegible]
Jabatan Pejabat : KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Tanda tangan dan Stempel :

Diisi Tgl. :
Nama : Ray Hafidz Kurniawan
Jabatan : Pelaksana
Tanda tangan dan Stempel :

*) Coret yang tidak perlu

UAPB : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
UAPPB-E1 : DITJEN PEMASYARAKATAN
UAPPB-W : KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALTIM (PAS-KALTIM)

Form : [illegible]
4010106001.9

KARTU IDENTITAS BARANG
GEDUNG DAN BANGUNAN

BIDANG : Gedung dan Bangunan
KELOMPOK : BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA
SUB KELOMPOK : BANGUNAN KESEHATAN
SUB-SUB KELOMPOK : Bangunan Rumah Sakit Umum

Kode UAKPB : 013051800418133000KD
Nama UAKPB : LAPAS PEREMPUAN KELAS II A TENGGARONG

I. UNIT BARANG

1. Luas Bangunan : 21 m²
2. Luas Dasar Bangunan : 21 m²
3. Jumlah Lantai : 0 Lt
4. Tipe : Pembangunan Rumah Sakit
5. Tahun Selesai Dibangun / Digunakan : -
6. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
   No. : - Tanggal :
7. Letak Bangunan :
   - Provinsi : KALIMANTAN TIMUR
   - Kabupaten / Kota *) : KAB. KUTAI KERTANEGARA
   - Kecamatan : Tenggarong
   - Kelurahan / Desa *) : Tenggarong
   - Jalan : Jl. Imam Bonjol No.37
   - RT / RW / RK : [illegible]
8. Nomor KIB Tanah : -

II. UNIT PEMAKAI

1. Nama Unit : -
2. Alamat : -

III. PENGADAAN

1. Cara Perolehan : 103 (Hibah Masuk)
2. Dari : -
3. Tgl. Perolehan : 31/12/2022
4. Kondisi Perolehan : Baik
5. Biaya Perolehan : RP. 49,390,000
6. Dasar Harga : -
7. Sumber Dana :

No. : -
Tgl. :

IV. NILAI/HARGA LAINNYA

1. Nilai Buku : Rp. 49,390,000
2. N. Akum. Penyusutan : Rp. 1,481,700
3. Nilai Buku : Rp. 47,908,300
   Periode Laporan :
4. Nilai Wajar : Rp. 0
   Tanggal Penilaian :
5. Nilai NJOP : Rp. 0
   Tahun :

V. CATATAN PENGISI

1. Status Penggunaan : Digunakan sendiri untuk operasional
2. Digunakan untuk / oleh : -
3. Status Hukum : Tidak Ada Sengketa
4. Catatan Lainnya : -

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	FOTO 4

Disetujui Tgl :
Nama Pejabat : [illegible]
Jabatan Pejabat : KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Tanda tangan dan Stempel :

Diisi Tgl :
Nama : Ray Hafidz Kurniawan
Jabatan : Pelaksana
Tanda tangan dan Stempel :

*) Coret yang tidak perlu

UAPB : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
UAPPB-E1 : DITJEN PEMASYARAKATAN
UAPPB-W : KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALTIM (PAS-KALTIM)

Form - [illegible]
[illegible]

KARTU IDENTITAS BARANG
GEDUNG DAN BANGUNAN

BIDANG : Gedung dan Bangunan
KELOMPOK : BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA
SUB KELOMPOK : BANGUNAN KESEHATAN
SUB-SUB KELOMPOK : Bangunan Rumah Sakit Umum

Kode UAKPB : [illegible]
Nama UAKPB : LAPAS PEREMPUAN KELAS II A TENGGARONG

I. UNIT BARANG

1. Luas Bangunan : 56 m²
2. Luas Dasar Bangunan : 56 m²
3. Jumlah Lantai : 1 Lt.
4. Tipe : [illegible]
5. Tahun Selesai Dibangun / Digunakan : -
6. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
   No. : - Tanggal :
7. Letak Bangunan :
   - Provinsi : KALIMANTAN TIMUR
   - Kabupaten / Kota *) : KAB. KUTAI KERTANEGARA
   - Kecamatan : Tenggarong
   - Kelurahan / Desa *) : Tenggarong
   - Jalan : Jl. Imam Bonjol No.37
   - RT / RW / RK : [illegible]
8. Nomor KIB Tanah : -

II. UNIT PEMAKAI

1. Nama Unit : -
2. Alamat : -

III. PENGADAAN

1. Cara Perolehan : 103 (Hibah Masuk)
2. Dari : -
3. Tgl. Perolehan : 31/12/2022
4. Kondisi Perolehan : Baik
5. Biaya Perolehan : RP. 199,958,000
6. Dasar Harga : 1
7. Sumber Dana :

No. : -
Tgl :

IV. NILAI/HARGA LAINNYA

1. Nilai Buku : Rp. 199,958,000
2. N. Akum. Penyusutan : Rp. 5,998,740
3. Nilai Buku : Rp. 193,959,260
   Periode Laporan :
4. Nilai Wajar : Rp. 0
   Tanggal Penilaian :
5. Nilai NJOP : Rp. 0
   Tahun :

V. CATATAN PENGISI

1. Status Penggunaan : Digunakan sendiri untuk operasional
2. Digunakan untuk / oleh : -
3. Status Hukum : Tidak Ada Sengketa
4. Catatan Lainnya : -

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	FOTO 4

Disetujui Tgl. :
Nama Pejabat : [illegible]
Jabatan Struktural : KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Tanda tangan dan Stempel :

Diisi Tgl. :
Nama : [illegible]
Jabatan : Pelaksana
Tanda tangan dan Stempel :

*) Coret yang tidak perlu

UAPB : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
UAPPB-E1 : DITJEN PEMASYARAKATAN
UAPPB-W : KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALTIM (P03-KALTIM)

Form : [illegible]
[illegible]

KARTU IDENTITAS BARANG
GEDUNG DAN BANGUNAN

BIDANG : Gedung dan Bangunan
KELOMPOK : BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA
SUB KELOMPOK : BANGUNAN KESEHATAN
SUB-SUB KELOMPOK : Bangunan Rumah Sakit Umum

Kode UAKPB : [illegible]
Nama UAKPB : LAPAS PEREMPUAN KELAS II A TENGGARONG

I. UNIT BARANG

1. Luas Bangunan : 333 m²
2. Luas Dasar Bangunan : 333 m²
3. Jumlah Lantai : [illegible]
4. Tipe : Ruang Operasi [illegible]
5. Tahun Selesai Dibangun / Digunakan : -
6. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
   No. : - Tanggal :
7. Letak Bangunan :
   - Provinsi : KALIMANTAN TIMUR
   - Kabupaten / Kota *) : KAB. KUTAI KERTANEGARA
   - Kecamatan : Tenggarong
   - Kelurahan / Desa *) : Tenggarong
   - Jalan : Jl. Imam Bonjol No.27
   - RT / RW / RK : [illegible]
8. Nomor KIB Tanah : -

II. UNIT PEMAKAI

1. Nama Unit : -
2. Alamat : -

III. PENGADAAN

1. Cara Perolehan : 103 (Hibah Masuk)
2. Dari : -
3. Tgl. Perolehan : 31/12/2022
4. Kondisi Perolehan : Baik
5. Harga Perolehan : RP. 656,750,000
6. Dasar Harga : -
7. Sumber Dana :

No. : -
Tgl :

IV. NILAI/HARGA LAINNYA

1. Nilai Bruto : Rp. 656,750,000
2. N. Akum. Penyusutan : Rp. 19,702,500
3. Nilai Buku : Rp. 637,047,500
   Periode Laporan :
4. Nilai Wajar : Rp. 0
   Tanggal Penilaian :
5. Nilai NJOP : Rp. 0
   Tahun :

V. CATATAN PENGISI

1. Status Penggunaan : Digunakan sendiri untuk operasional
2. Digunakan untuk / oleh : -
3. Status Hukum : Tidak Ada Sengketa
4. Catatan Lainnya : -

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	FOTO 4

Disetujui Tgl :
Nama Pejabat : [illegible]
Jabatan Pejabat : KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Tanda tangan dan Stempel :

Diisi Tgl :
Nama : [illegible]
Jabatan : Pelaksana
Tanda tangan dan Stempel :

*) Coret yang tidak perlu

UAPB : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
UAPPB-E1 : DITJEN PEMASYARAKATAN
UAPPB-W : KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALTIM (PAS-KALTIM)

Form - [illegible]
[illegible]

KARTU IDENTITAS BARANG
GEDUNG DAN BANGUNAN

BIDANG : Gedung dan Bangunan
KELOMPOK : BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA
SUB KELOMPOK : BANGUNAN KESEHATAN
SUB-SUB KELOMPOK : Bangunan Rumah Sakit Umum

Kode UAKPB : [illegible]
Nama UAKPB : LAPAS PEREMPUAN KELAS II A TENGGARONG

I. UNIT BARANG

1. Luas Bangunan : 343 m²
2. Luas Dasar Bangunan : 343 m²
3. Jumlah Lantai : 1
4. Tipe : Gedung Ruang Medis
5. Tahun Selesai Dibangun / Digunakan : -
6. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) :
   No. : -   Tanggal :
7. Letak Bangunan :
   - Provinsi : KALIMANTAN TIMUR
   - Kabupaten / Kota *) : KAB. KUTAI KERTANEGARA
   - Kecamatan : Tenggarong
   - Kelurahan / Desa *) : Tenggarong
   - Jalan : Jl. Imam Bonjol No.37
   - RT / RW / RK : [illegible]
8. Status KIB Tanah : -

II. UNIT PEMAKAI

1. Nama Unit : -
2. Alamat : -

III. PENGADAAN

1. Cara Perolehan : [illegible] (Hibah Masuk)
2. Dari : -
3. Tgl. Perolehan : 31/12/2022
4. Kondisi Perolehan : Baik
5. Biaya Perolehan : RP 500.000.000
6. Dasar Harga : -
7. Sumber Dana :

No. : -
Tgl. :

IV. NILAI/HARGA LAINNYA

1. Nilai Buku : Rp 500.000.000
2. N. Akum. Penyusutan : Rp 15.000.000
3. Nilai Buku : Rp 485.000.000
   Periode Laporan :
4. Nilai Wajar : Rp 0
   Tanggal Penilaian :
5. Nilai NJOP : Rp 0
   Tahun :

V. CATATAN PENGISI

1. Status Penggunaan : Digunakan sendiri untuk operasional
2. Digunakan untuk / oleh : -
3. Status Hukum : Tidak Ada Sengketa
4. Catatan Lainnya : -

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	FOTO 4

Diketahui Tgl :
Nama Lengkap : Yohana [illegible]
Jabatan Struktural : KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Tanda tangan dan Stempel :

Dibuat Tgl :
Nama : Ray Hafidz Kurniawan
Jabatan : Pelaksana
Tanda tangan dan Stempel :

*) Coret yang tidak perlu

UAPB : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
UAPPB-E1 : DITJEN PEMASYARAKATAN
UAPPB-W : KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALTIM (PAS-KALTIM)

Form - [illegible]
[illegible]

KARTU IDENTITAS BARANG
GEDUNG DAN BANGUNAN

BIDANG : Gedung dan Bangunan
KELOMPOK : BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA
SUB KELOMPOK : BANGUNAN KESEHATAN
SUB-SUB KELOMPOK : Bangunan Rumah Sakit Umum

Kode UAKPB : [illegible]
Nama UAKPB : LAPAS PEREMPUAN KELAS II A TENGGARONG

I. UNIT BARANG

1. Luas Bangunan : 133 m²
2. Luas Dasar Bangunan : 133 m²
3. Jumlah Lantai : [illegible] Lt.
4. Tipe : Gedung Ruang Cempaka
5. Tahun Selesai Dibangun / Digunakan : -
6. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
   No. : - Tanggal :
7. Letak Bangunan :
   - Provinsi : KALIMANTAN TIMUR
   - Kabupaten / Kota *) : KAB. KUTAI KERTANEGARA
   - Kecamatan : Tenggarong
   - Kelurahan / Desa *) : Tenggarong
   - Jalan : Jl. Imam Bonjol No.27
   - RT / RW / RK : [illegible]
8. Nomor KIB Tanah : -

II. UNIT PEMAKAI

1. Nama Unit : -
2. Alamat : -

III. PENGADAAN

1. Cara Perolehan : [illegible] (Sudah Masuk)
2. Dari : -
3. Tgl. Perolehan : 31/12/2022
4. Kondisi Perolehan : Baik
5. Harga Perolehan : RP. 500.000.000
6. Dasar Harga : -
7. Sumber Dana :

   No. : -
   Tgl. :

IV. NILAI/HARGA LAINNYA

1. Nilai Buku : Rp. 500.000.000
2. N. Akum. Penyusutan : Rp. 15.000.000
3. Nilai Buku : Rp. 485.000.000
   Periode Laporan :
4. Nilai Wajar : Rp. 0
   Tanggal Penilaian :
5. Nilai NJOP : Rp. 0
   Tahun :

V. CATATAN PENGISI

1. Status Penggunaan : Digunakan sendiri untuk operasional
2. Digunakan untuk / oleh : -
3. Status Hukum : Tidak Ada Sengketa
4. Catatan Lainnya : -

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	FOTO 4

Disetujui Tgl :
Nama Pejabat : [illegible]
Jabatan Struktural : KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Tanda tangan dan Stempel :

Diisi Tgl :
Nama : [illegible]
Jabatan : Pelaksana
Tanda tangan dan Stempel :

*) Coret yang tidak perlu

UAPB	: KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM	[illegible]
UAPPB-E1	: DITJEN PEMASYARAKATAN	[illegible]
UAPPB-W	: KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALTIM (PAS-KALTIM)	

KARTU IDENTITAS BARANG
GEDUNG DAN BANGUNAN

BIDANG : Gedung dan Bangunan
KELOMPOK : BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA
SUB KELOMPOK : BANGUNAN KESEHATAN
SUB-SUB KELOMPOK : Bangunan Rumah Sakit Umum

Kode UAKPB : [illegible]
Nama UAKPB : LAPAS PEREMPUAN KELAS II A TENGGARONG

I. UNIT BARANG

1. Luas Bangunan : 752 m²
2. Luas Dasar Bangunan : 752 m²
3. Jumlah Lantai : [illegible]
4. Tipe : Ruang Rawat Jalan
5. Tahun Selesai Dibangun / Digunakan : -
6. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
   No. : - Tanggal :
7. Letak Bangunan :
   - Provinsi : KALIMANTAN TIMUR
   - Kabupaten / Kota *) : KAB. KUTAI KERTANEGARA
   - Kecamatan : Tenggarong
   - Kelurahan / Desa *) : Tenggarong
   - Jalan : Jl. Imam Bonjol No.27
   - RT / RW / RK : Rt.08
8. Nomor KIB Tanah : -

II. UNIT PEMAKAI

1. Nama Unit : -
2. Alamat : -

III. PENGADAAN

1. Cara Perolehan : [illegible] (Hibah Masuk)
2. Dari : -
3. Tgl. Perolehan : 31/12/2022
4. Kondisi Perolehan : Baik
5. Biaya Perolehan : RP 1.467.444.300
6. Dasar Harga : -
7. Sumber Dana :

No. : -
Tgl. :

IV. NILAI/HARGA LAINNYA

1. Nilai Bruto : Rp. 1.965.763.300
2. Ti. Akum. Penyusutan : Rp. 54.092.686
3. Nilai Buku : Rp. 1.911.670.274
   Periode Laporan :
4. Nilai Wajar : Rp. 0
   Tanggal Penilaian :
5. Nilai NJOP : Rp. 0
   Tahun :

V. CATATAN PENGISI

1. Status Penggunaan : Digunakan sendiri untuk operasional
2. Digunakan untuk / oleh : -
3. Status Hukum : Tidak Ada Sengketa
4. Catatan Lainnya : -

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	FOTO 4

Disetujui Tgl :
Nama Pejabat : [illegible]
Jabatan Pejabat : KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Tanda tangan dan Stempel :

Diisi Tgl :
Nama : Ray Hafidz Kurniawan
Jabatan : Pelaksana
Tanda tangan dan Stempel :

*) Coret yang tidak perlu

UAPB : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
UAPPB-E1 : DITJEN PEMASYARAKATAN
UAPPB-W : KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALTIM (PA-KALTIM)

Form : [illegible]
[illegible]

KARTU IDENTITAS BARANG
GEDUNG DAN BANGUNAN

BIDANG : Gedung dan Bangunan
KELOMPOK : BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA
SUB KELOMPOK : BANGUNAN GEDUNG KANTOR
SUB-SUB KELOMPOK : Bangunan Gedung Kantor Lainnya

Kode UAKPB : [illegible]
Nama UAKPB : LAPAS PEREMPUAN KELAS II A TENGGARONG

I. UNIT BARANG

1. Luas Bangunan : 36 m²
2. Luas Dasar Bangunan : 36 m²
3. Jumlah Lantai : 0 Lt.
4. Type : Pagar Ulin [illegible]
5. Tahun Selesai Dibangun / Digunakan : -
6. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
   No. : - Tanggal :
7. Letak Bangunan :
   - Provinsi : KALIMANTAN TIMUR
   - Kabupaten / Kota *) : KAB. KUTAI KERTANEGARA
   - Kecamatan : Tenggarong
   - Kelurahan / Desa *) : Tenggarong
   - Jalan : Jl. Imam Bonjol No.27
   - RT / RW / RK : Rt.08
8. Nomor KIB Tanah : -

II. UNIT PEMAKAI

1. Nama Unit : -
2. Alamat : -

III. PENGADAAN

1. Cara Perolehan : 103 (Hibah Masuk)
2. Dari : -
3. Tgl. Perolehan : 31/12/2022
4. Kondisi Perolehan : Baik
5. Biaya Perolehan : RP. 44,110,000
6. Dasar Harga : -
7. Sumber Dana :

No. : -
Tgl. :

IV. NILAI/HARGA LAINNYA

1. Nilai Bruto : Rp. 44,110,000
2. N. Akum. Penyusutan : Rp. 1,323,300
3. Nilai Buku : Rp. 42,786,700
   Periode Laporan :
4. Nilai Wajar : Rp. 0
   Tanggal Penilaian :
5. Nilai NJOP : Rp. 0
   Tahun :

V. CATATAN PENGISI

1. Status Penggunaan : Digunakan sendiri untuk operasional
2. Digunakan untuk / oleh : -
3. Status Hukum : Tidak Ada Sengketa
4. Catatan Lainnya : -

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	FOTO 4

Disetujui Tgl. :
Nama Pejabat : [illegible]
Jabatan Pejabat : KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Tanda tangan dan Stempel

Diisi Tgl. :
Nama : Ray Habibi Kusnanto
Jabatan : Pelaksana
Tanda tangan dan Stempel

*) Coret yang tidak perlu

UAPB KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
UAPPB-E1 DITJEN PEMASYARAKATAN
UAPPB-W KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALTIM (PAS-KALTIM)

Form - [illegible]
[illegible]

KARTU IDENTITAS BARANG GEDUNG DAN BANGUNAN

BIDANG : Gedung dan Bangunan
KELOMPOK : BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA
SUB KELOMPOK : BANGUNAN GEDUNG KANTOR
SUB-SUB KELOMPOK : Bangunan Gedung Kantor Lainnya

Kode UAKPB : [illegible]
Nama UAKPB : LAPAS PEREMPUAN KELAS II A TENGGARONG

I. UNIT BARANG

1. Luas Bangunan : 7 m²
2. Luas Dasar Bangunan : 7 m²
3. Jumlah Lantai : 0 Lt
4. Tipe : Pagar Instalasi Limbah Cair Medis
5. Tahun Selesai Dibangun / Digunakan : -
6. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
   No. : - Tanggal :
7. Letak Bangunan :
   - Provinsi : KALIMANTAN TIMUR
   - Kabupaten / Kota *) : KAB. KUTAI KERTANEGARA
   - Kecamatan : Tenggarong
   - Kelurahan / Desa *) : Tenggarong
   - Jalan : Jl. Imam Bonjol No.27
   - RT / RW / NK : 04.08
8. Nomor KIB Tanah : -

II. UNIT PEMAKAI

1. Nama Unit : -
2. Alamat : -

III. PENGADAAN

1. Cara Perolehan : 103 (Hibah Masuk)
2. Dari : -
3. Tgl. Perolehan : 31/12/2022
4. Kondisi Perolehan : Baik
5. Harga Perolehan : RP. 65,987,000
6. Dasar Harga : -
7. Sumber Data :
   No. : -
   Tgl. :

IV. NILAI/HARGA LAINNYA

1. Nilai Buku : Rp. 65,987,000
2. N. Akum. Penyusutan : Rp. 1,979,610
3. Nilai Buku : Rp. 64,007,390
   Periode Laporan :
4. Nilai Wajar : Rp. 0
   Tanggal Penilaian :
5. Nilai NJOP : Rp. 0
   Tahun :

V. CATATAN PENGISI

1. Status Penggunaan : Digunakan sendiri untuk operasional
2. Digunakan untuk / oleh : -
3. Status Hukum : Tidak Ada Sengketa
4. Catatan Lainnya : -

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	FOTO 4

Diketahui Tgl :
Nama Pejabat : [illegible]
Jabatan Struktural : KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Tanda tangan dan Stempel :

Diisi Tgl :
Nama : Ray Hafidz Kurniawan
Jabatan : Pelaksana
Tanda tangan dan Stempel :

*) Coret yang tidak perlu

UAPB : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
UAPPB-E1 : DITJEN PEMASYARAKATAN
UAPPB-W : KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALTIM (PNS-KALTIM)

Form : [illegible]
[illegible]

KARTU IDENTITAS BARANG
GEDUNG DAN BANGUNAN

BIDANG : Gedung dan Bangunan
KELOMPOK : BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA
SUB KELOMPOK : BANGUNAN GEDUNG KANTOR
SUB-SUB KELOMPOK : Bangunan Gedung Kantor Lainnya

Kode UAKPB : [illegible]
Nama UAKPB : LAPAS PEREMPUAN KELAS II A TENGGARONG

I. UNIT BARANG

1. Luas Bangunan : 13 m²
2. Luas Dasar Bangunan : 13 m²
3. Jumlah Lantai : [illegible]
4. Tipe : Pagar Pembatas Poli
5. Tahun Selesai Dibangun / Digunakan : -
6. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) :
   No. : - Tanggal :
7. Letak Bangunan :
   - Provinsi : KALIMANTAN TIMUR
   - Kabupaten / Kota *) : KAB. KUTAI KERTANEGARA
   - Kecamatan : Tenggarong
   - Kelurahan / Desa *) : Tenggarong
   - Jalan : Jl. Imam Bonjol No.17
   - RT / RW / RK : 01/08
8. Nomor KIB Tanah : -

III. PENGADAAN

1. Cara Perolehan : 103 (Hibah Masuk)
2. Dari : -
3. Tgl. Perolehan : 31/12/2022
4. Kondisi Perolehan : Baik
5. Harga Perolehan : RP 83,154,000
6. Dasar Harga : -
7. Sumber Dana :

No. : -
Tgl. :

II. UNIT PEMAKAI

1. Nama Unit : -
2. Alamat : -

IV. NILAI/HARGA LAINNYA

1. Nilai Bruto : Rp 83,154,000
2. N. Akum. Penyusutan : Rp 2,300,620
3. Nilai Buku : Rp 80,853,380
   Periode Laporan :
4. Nilai Wajar : Rp 0
   Tanggal Penilaian :
5. Nilai NJOP : Rp 0
   Tahun :

V. CATATAN PENGISI

1. Status Penggunaan : Digunakan sendiri untuk operasional
2. Digunakan untuk / oleh : -
3. Status Hukum : Tidak Ada Sengketa
4. Catatan Lainnya : -

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	FOTO 4

Disetujui Tgl :
Nama Pejabat : [illegible]
Jabatan Struktural : KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Tanda tangan dan Stempel :

Diisi Tgl :
Nama : Ray Hafidz Kurniawan
Jabatan : Pelaksana
Tanda tangan dan Stempel :

*) Coret yang tidak perlu

UAPB	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM	Form - [illegible]
UAPPB-E1	DITJEN PEMASYARAKATAN	[illegible]
UAPPB-W	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALTIM (PAS-KALTIM)	

KARTU IDENTITAS BARANG
GEDUNG DAN BANGUNAN

BIDANG : Gedung dan Bangunan
KELOMPOK : BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA
SUB KELOMPOK : BANGUNAN GEDUNG KANTOR
SUB-SUB KELOMPOK : Bangunan Gedung Kantor Lainnya

Kode UAKPB : [illegible]
Nama UAKPB : LAPAS PEREMPUAN KELAS II A TENGGARONG

I. UNIT BARANG

1. Luas Bangunan : 280 m²
2. Luas Dasar Bangunan : 280 m²
3. Jumlah Lantai : 0 Lt
4. Tipe : Taman dan Pagar Depan (PN/Kering)
5. Tahun Selesai Dibangun / Digunakan : -
6. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
   No. : - Tanggal :
7. Letak Bangunan :
   - Provinsi : KALIMANTAN TIMUR
   - Kabupaten / Kota *) : KAB. KUTAI KERTANEGARA
   - Kecamatan : Tenggarong
   - Kelurahan / Desa *) : Tenggarong
   - Jalan : Jalan Imam Bonjol No.27
   - RT / RW / RK : 01/09
8. Nomor KIB Tanah : -

II. UNIT PEMAKAI

1. Nama Unit : -
2. Alamat : -

III. PENGADAAN

1. Cara Perolehan : 103 (Hibah Masuk)
2. Dari : -
3. Tgl. Perolehan : 31/12/2022
4. Kondisi Perolehan : Baik
5. Biaya Perolehan : RP 22,522,000
6. Dasar Harga : -
7. Sumber Dana :

No. : -
Tgl. :

IV. NILAI/HARGA LAINNYA

1. Nilai Buku : Rp. 22.522.000
2. N. Akum. Penyusutan : Rp. 675.660
3. Nilai Buku : Rp. 21.846.340
   Periode Laporan :
4. Nilai Wajar : Rp. 0
   Tanggal Penilaian :
5. Nilai NJOP : Rp. 0
   Tahun :

V. CATATAN PENGISI

1. Status Penggunaan : Digunakan sendiri untuk operasional
2. Digunakan untuk / oleh : -
3. Status Hukum : Tidak Ada Sengketa
4. Catatan Lainnya : -

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	FOTO 4

Disetujui Tgl :
Nama Pejabat : [illegible]
Jabatan Struktural : KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Tanda tangan dan Stempel :

Diisi Tgl :
Nama : Ray Hafidz Kurniawan
Jabatan : Pelaksana
Tanda tangan dan Stempel :

*) Coret yang tidak perlu

UAPB : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
UAPPB-E1 : DITJEN PEMASYARAKATAN
UAPPB-W : KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALTIM (PO-KALTIM)

Form - [illegible]
[illegible]

KARTU IDENTITAS BARANG
GEDUNG DAN BANGUNAN

BIDANG : Gedung dan Bangunan
KELOMPOK : BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA
SUB KELOMPOK : BANGUNAN GEDUNG KANTOR
SUB-SUB KELOMPOK : Bangunan Gedung Kantor Permanen

Kode UAKPB : [illegible]
Nama UAKPB : LAPAS PEREMPUAN KELAS II A TENGGARONG

I. UNIT BARANG

1. Luas Bangunan : 55 m²
2. Luas Dasar Bangunan : 55 m²
3. Jumlah Lantai : 1 Lt.
4. Tipe : Pengembangan dan Rehab Bangunan [illegible]
5. Tahun Selesai Dibangun / Digunakan : -
6. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
   No. : - Tanggal :
7. Letak Bangunan :
   - Provinsi : KALIMANTAN TIMUR
   - Kabupaten / Kota *) : KAB. KUTAI KERTANEGARA
   - Kecamatan : Tenggarong
   - Kelurahan / Desa *) : Tenggarong
   - Jalan : Jl. Imam Bonjol No.17
   - RT / RW / RK : [illegible]
8. Nomor KIB Tanah : -

II. UNIT PEMAKAI

1. Nama Unit : -
2. Alamat : -

III. PENGADAAN

1. Cara Perolehan : 101 (Hibah Masuk)
2. Dari : -
3. Tgl. Perolehan : 31/12/2022
4. Kondisi Perolehan : Baik
5. Biaya Perolehan : RP 570,192,800
6. Dasar Harga : -
7. Sumber Dana :
   No. : -
   Tgl. :

IV. NILAI/HARGA LAINNYA

1. Nilai Bruto : Rp. 570,192,800
2. N. Akum. Penyusutan : Rp. 17,105,784
3. Nilai Buku : Rp. 553,087,016
   Periode Laporan :
4. Nilai Wajar : Rp. 0
   Tanggal Penilaian :
5. Nilai NJOP : Rp. 0
   Tahun :

V. CATATAN PENGISI

1. Status Penggunaan : Digunakan sendiri untuk operasional
2. Digunakan untuk / oleh : -
3. Status Hukum : Tidak Ada Sengketa
4. Catatan Lainnya : -

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	FOTO 4

Disetujui Tgl :
Nama Pejabat : [illegible]
Jabatan Struktural : KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Tanda tangan dan Stempel :

Diisi Tgl :
Nama : Ray Hafidz Kurniawan
Jabatan : Pelaksana
Tanda tangan dan Stempel :

*) Coret yang tidak perlu

UAPB KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
UAPPB-E1 DITJEN PEMASYARAKATAN
UAPPB-W KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALTIM ([illegible]-KALTIM)

Form – [illegible]
[illegible]

KARTU IDENTITAS BARANG
GEDUNG DAN BANGUNAN

BIDANG : Gedung dan Bangunan
KELOMPOK : BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA
SUB KELOMPOK : BANGUNAN GEDUNG KANTOR
SUB-SUB KELOMPOK : Bangunan Gedung Kantor Permanen

Kode UAKPB : [illegible]
Nama UAKPB : LAPAS PEREMPUAN KELAS II A TENGGARONG

I. UNIT BARANG

1. Luas Bangunan : 20 m²
2. Luas Dasar Bangunan : 20 m²
3. Jumlah Lantai : 0 Lt
4. Tipe : Taman Lingkungan Instalasi Air
5. Tahun Selesai Dibangun / Digunakan : -
6. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
   No. : - Tanggal :
7. Letak Bangunan :
   - Provinsi : KALIMANTAN TIMUR
   - Kabupaten / Kota *) : KAB. KUTAI KERTANEGARA
   - Kecamatan : Tenggarong
   - Kelurahan / Desa *) : Tenggarong
   - Jalan : Jalan Imam Bonjol No.27
   - RT / RW / RK : 01/08
8. Nomor KIB Tanah : -

II. UNIT PEMAKAI

1. Nama Unit : -
2. Alamat : -

III. PENGADAAN

1. Cara Perolehan : [illegible] (Hibah Masuk)
2. Dari : -
3. Tgl. Perolehan : 31/12/2022
4. Kondisi Perolehan : Baik
5. Harga Perolehan : RP. 19.616.000
6. Dasar Harga : -
7. Sumber Dana :

No. : -
Tgl. :

IV. NILAI/HARGA LAINNYA

1. Nilai Bruto : Rp. 19.616.000
2. N. Akum. Penyusutan : Rp. 588.480
3. Nilai Buku : Rp. 19.027.520
   Periode Laporan :
4. Nilai Wajar : Rp 0
   Tanggal Penilaian :
5. Nilai NJOP : Rp 0
   Tahun :

V. CATATAN PENGISI

1. Status Penggunaan : Digunakan sendiri untuk operasional
2. Digunakan untuk / oleh : -
3. Status Hukum : Tidak Ada Sengketa
4. Catatan Lainnya : -

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	FOTO 4

Disahkan Tgl :
Nama Pejabat : [illegible]
Jabatan Pejabat : KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Tanda tangan dan Stempel :

KEPALA

Diisi Tgl :
Nama : Ray Hafidz Kurniawan
Jabatan : Pelaksana
Tanda tangan dan Stempel :

*) Coret yang tidak perlu

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SAMARINDA
JALAN JUANDA NOMOR 6 LT 1-2, SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR 75123 TELEPON (0541) [illegible] FAKSIMILE (0541) [illegible] LAMAN www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-samarinda

Nomor : S-1395/KNL.1302/2023 18 September 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Penyampaian Surat Keputusan Penetapan Status Penggunaan BMN pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Yth. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
u.p.
✓Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur
Jl. Imam Bonjol No. 37 RT.08 Kel. Melayu Tenggarong Kutai Kartanegara
Kutai Kartanegara

Sehubungan dengan surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur nomor W.18.PB.04.01-6332 tanggal 05 September 2023 hal Permohonan Penetapan Status Penggunaan BMN yang mempunyai Dokumen Kepemilikan pada LAPAS Perempuan Kelas IIA Tenggarong dan surat nomor W.18.PB.04.01-6349 tanggal 06 September 2023 hal Permohonan Penetapan Status Penggunaan BMN Berupa Gedung Bangunan yang mempunyai Dokumen Kepemilikan pada LAPAS Perempuan Kelas IIA Tenggarong, bersama ini kami sampaikan Surat Keputusan Penetapan Status Penggunaan BMN Nomor: 063/KM.6/KNL.1302/2023 tanggal 18 September 2023.

Dalam rangka tertib penatausahaan BMN, perlu dilaksanakan update data BMN berupa perekaman keputusan ini pada aplikasi SIMAN menu Wasdal.

Kami senantiasa berkomitmen untuk KPKNL Samarinda sebagai Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) yang berkelanjutan. Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.

Plh. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara Dan Lelang Samarinda

Tonny Ardhianto

Tembusan:
1. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
2. Sekertaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
4. Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara DJKN;
5. Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara;
6. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan pindai QR Code pada laman https://office.kemenkeu.go.id atau unggah dokumen pada laman https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR **063**/KM.6/KNL.1302/2023

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang :
a. bahwa penetapan status penggunaan Barang Milik Negara dilakukan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang;

b. bahwa Pengelola Barang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan status penggunaan Barang Milik Negara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

4. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.06/2016 dan perubahan kedua dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2019;

6. Keputusan ....

6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 781/KMK.01/2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan Dalam Bentuk Mandat Kepada Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Memperhatikan : Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur nomor W.18.PB.04.01-6332 tanggal 05 September 2023 hal Permohonan Penetapan Status Penggunaan BMN yang mempunyai Dokumen Kepemilikan pada LAPAS Perempuan Kelas IIA Tenggarong dan surat nomor W.18.PB.04.01-6349 tanggal 06 September 2023 hal Permohonan Penetapan Status Penggunaan BMN Berupa Gedung Bangunan yang mempunyai Dokumen Kepemilikan pada LAPAS Perempuan Kelas IIA Tenggarong

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA.

PERTAMA : Menetapkan status penggunaan Barang Milik Negara berupa 24 (dua puluh empat) BMN tanah dan/atau bangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini sebagai Barang Milik Negara pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

KEDUA : Nilai Perolehan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA seluruhnya sebesar Rp9.628.131.920. 00 (Sembilan milyar enam ratus dua puluh delapan juta seratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).

KETIGA : Barang Milik Negara dimaksud agar dicatat dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna pada Kuasa Pengguna Barang, Daftar Barang Pengguna pada Pengguna Barang dan Daftar Barang Milik Negara pada Pengelola Barang.

KEEMPAT : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dapat melakukan pemanfaatan atau pemindahtanganan kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang.

KELIMA : Pengguna Barang wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas optimalisasi penggunaan Barang Milik Negara.

KEENAM...

KEENAM : Segala biaya pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Negara yang digunakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

KETUJUH : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
3. Sekertaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
5. Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara DJKN;
6. Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara;
7. Kepala Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur;
8. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong;
9. Kepala KPKNL Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 18 September 2023

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Plh. KEPALA KPKNL SAMARINDA,

Ttd.

Tonny Ardhianto

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Subbagian Umum

Ili Muam[illegible]

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR [illegible]
TENTANG
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG DITETAPKAN STATUS PENGGUNAANNYA PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

No.	Kode Barang	NUP	Jenis BMN	Lokasi	Tahun Perolehan	Luas (m²)	Nilai Perolehan	Dokumen Kepemilikan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	[illegible]	[illegible]	Tanah Bangunan Rumah Sakit	Jl. Imam Bonjol, RT 08 Kel. Melayu Kec. Tenggarong Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) Nomor [illegible]
2	[illegible]	[illegible]	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jl. Imam Bonjol, RT 08 Kel. Melayu Kec. Tenggarong Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur	[illegible]	[illegible]	[illegible]	SPTJM Nomor : [illegible]
3	[illegible]	[illegible]	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jl. Imam Bonjol, RT 08 Kel. Melayu Kec. Tenggarong Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur	[illegible]	[illegible]	[illegible]	SPTJM Nomor : [illegible]
4	[illegible]	[illegible]	Bangunan Gedung Kantor Lainnya	Jl. Imam Bonjol, RT 08 Kel. Melayu Kec. Tenggarong Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur	[illegible]	[illegible]	[illegible]	SPTJM Nomor : [illegible]
5	[illegible]	[illegible]	Bangunan Gedung Kantor Lainnya	Jl. Imam Bonjol, RT 08 Kel. Melayu Kec. Tenggarong Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur	[illegible]	[illegible]	[illegible]	SPTJM Nomor : [illegible]
6	[illegible]	[illegible]	Bangunan Gedung Kantor Lainnya	Jl. Imam Bonjol, RT 08 Kel. Melayu Kec. Tenggarong Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur	[illegible]	[illegible]	[illegible]	SPTJM Nomor : [illegible]
7	[illegible]	[illegible]	Bangunan Gedung Kantor Lainnya	Jl. Imam Bonjol, RT 08 Kel. Melayu Kec. Tenggarong Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur	[illegible]	[illegible]	[illegible]	SPTJM Nomor : [illegible]
8	[illegible]	[illegible]	Bangunan Gedung Kantor Lainnya	Jl. Imam Bonjol, RT 08 Kel. Melayu Kec. Tenggarong Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur	[illegible]	[illegible]	[illegible]	SPTJM Nomor : [illegible]
9	[illegible]	[illegible]	Bangunan Rumah Sakit Umum	Jl. Imam Bonjol, RT 08 Kel. Melayu Kec. Tenggarong Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur	[illegible]	[illegible]	[illegible]	SPTJM Nomor : [illegible]
10	[illegible]	[illegible]	Bangunan Rumah Sakit Umum	Jl. Imam Bonjol, RT 08 Kel. Melayu Kec. Tenggarong Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur	[illegible]	[illegible]	[illegible]	SPTJM Nomor : [illegible]
11	[illegible]	[illegible]	Bangunan Rumah Sakit Umum	Jl. Imam Bonjol, RT 08 Kel. Melayu Kec. Tenggarong Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur	[illegible]	[illegible]	[illegible]	SPTJM Nomor : [illegible]
12	[illegible]	[illegible]	Bangunan Rumah Sakit Umum	Jl. Imam Bonjol, RT 08 Kel. Melayu Kec. Tenggarong Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur	[illegible]	[illegible]	[illegible]	SPTJM Nomor : [illegible]
13	[illegible]	[illegible]	Bangunan Rumah Sakit Umum	Jl. Imam Bonjol, RT 08 Kel. Melayu Kec. Tenggarong Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur	[illegible]	[illegible]	[illegible]	SPTJM Nomor : [illegible]

No.	Kode Barang	NUP	Jenis BMN	Lokasi	Tahun Perolehan	Luas (m²)	Nilai Perolehan	Dokumen Kepemilikan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	[illegible]	6	Bangunan Rumah Sakit Umum	Jl. Imam Bonjol, RT 09 Kel. Melayu Kec. Tenggarong Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
15	[illegible]	7	Bangunan Rumah Sakit Umum	Jl. Imam Bonjol, RT 09 Kel. Melayu Kec. Tenggarong Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
16	[illegible]	8	Bangunan Rumah Sakit Umum	Jl. Imam Bonjol, RT 09 Kel. Melayu Kec. Tenggarong Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur	[illegible]	96	[illegible]	[illegible]
17	[illegible]	9	Bangunan Rumah Sakit Umum	Jl. Imam Bonjol, RT 09 Kel. Melayu Kec. Tenggarong Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
18	[illegible]	10	Bangunan Rumah Sakit Umum	Jl. Imam Bonjol, RT 09 Kel. Melayu Kec. Tenggarong Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
19	[illegible]	1	[illegible]	Jl. Imam Bonjol, RT 09 Kel. Melayu Kec. Tenggarong Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur	[illegible]	27	[illegible]	[illegible]
20	[illegible]	2	[illegible]	Jl. Imam Bonjol, RT 09 Kel. Melayu Kec. Tenggarong Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
21	[illegible]	1	[illegible]	Jl. Imam Bonjol, RT 09 Kel. Melayu Kec. Tenggarong Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur	[illegible]	38	[illegible]	[illegible]
22	[illegible]	1	[illegible]	Jl. Imam Bonjol, RT 09 Kel. Melayu Kec. Tenggarong Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
23	[illegible]	1	[illegible]	Jl. Imam Bonjol, RT 09 Kel. Melayu Kec. Tenggarong Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur	[illegible]	70	[illegible]	[illegible]
24	[illegible]	1	[illegible]	Jl. Imam Bonjol, RT 09 Kel. Melayu Kec. Tenggarong Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur	[illegible]	4	[illegible]	[illegible]
JUMLAH							[illegible]	

Salinan sesuai dengan aslinya
[illegible]

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Plh. KEPALA KPKNL SAMARINDA,

Ttd.

[illegible]

LAPORAN KONDISI BARANG
UNTUK KONDISI RUSAK BERAT
PER MEI 2024

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

DITJEN PEMASYARAKATAN
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN TIMUR

NAMA UAKPB : Lapas Perempuan Kelas IIA Samarinda
KODE UAKPB : 013.05.1600.418333

Tanggal : 07/05/2024 08.01.58
Halaman : 1 dari 2
Kode Lap : LKBT-PKPB1

No.	Sub-Sub Kelompok Barang		N U P	Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	4.01.01.01.001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	4	Unit	19,616,000	0	0	1
2			5	Unit	570,192,800	0	0	1
Jumlah Bangunan Gedung Kantor Permanen					589,808,800	0	0	2
1	4.01.01.01.999	Bangunan Gedung Kantor Lainnya	1	dummy	37,300,000	0	0	1
2			2	dummy	22,522,000	0	0	1
3			3	dummy	83,354,000	0	0	1
4			4	dummy	65,987,000	0	0	1
5			5	dummy	44,110,000	0	0	1
Jumlah Bangunan Gedung Kantor Lainnya					253,273,000	0	0	5
1	4.01.01.06.001	Bangunan Rumah Sakit Umum	1	Unit	1,965,765,980	0	0	1
2			2	Unit	500,000,000	0	0	1
3			3	Unit	513,667,000	0	0	1
4			4	Unit	500,000,000	0	0	1
5			5	Unit	500,000,000	0	0	1
6			6	Unit	350,000,000	0	0	1
7			7	Unit	656,750,000	0	0	1
8			8	Unit	199,958,000	0	0	1
9			9	Unit	49,390,000	0	0	1
10			10	Unit	1,509,291,980	0	0	1
Jumlah Bangunan Rumah Sakit Umum					6,744,822,960	0	0	10
1	4.01.01.06.015	Bangunan Posyandu	1	Unit	76,424,000	0	0	1
2			2	Unit	172,566,100	0	0	1
Jumlah Bangunan Posyandu					248,990,100	0	0	2
1	4.01.01.08.001	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1	Unit	40,000,000	0	0	1
Jumlah Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen					40,000,000	0	0	1
1	4.01.01.30.005	Bangunan Rumah Genset	1	Unit	470,681,400	0	0	1

LAPORAN KONDISI BARANG
UNTUK KONDISI RUSAK BERAT
PER MEI 2024

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

DITJEN PEMASYARAKATAN
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN TIMUR

NAMA UAKPB : Lapas Perempuan Kelas IIA Samarinda
KODE UAKPB : 013.05.1600.418333

Tanggal : 07/05/2024 08.01.59
Halaman : 2 dari 2
Kode Lap : LKBT-PKPB1

No.	Sub-Sub Kelompok Barang		N U P	Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jumlah Bangunan Rumah Genset					470,681,400	0	0	1
1	4.01.01.34.999	Taman Lainnya	1	dummy	48,990,000	0	0	1
Jumlah Taman Lainnya					48,990,000	0	0	1
1	4.04.01.99.999	Tugu/Tanda Batas Lainnya	1	dummy	97,200,000	0	0	1
Jumlah Tugu/Tanda Batas Lainnya					97,200,000	0	0	1

Tenggarong, 31 Oktober 2023
Penanggung Jawab UAKPB
Kepala

Triana Agustin
NIP.198208282000122001

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

DITJEN PEMASYARAKATAN

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN TIMUR

LAPORAN DAFTAR BARANG MILIK NEGARA MENURUT JENIS TRANSAKSI
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABLE
RINCIAN PERS SUBSUB KELOMPOK
TAHUN ANGGARAN 2024
SEMESTER 1

Tanggal : 08/05/2024 10.50.22
Halaman : 1 dari 1
Kode Lap : DTBSGSSKT

NAMA UAKPB : 013.05.1600.418333.000 Lapas Perempuan Kelas IIA Samarinda
JENIS TRANSAKSI : 401 Penghentiaan Aset Dari Penggunaan

AKUN NERACA / SUBSUB KELOMPOK BARANG		SAT	GABUNGAN INTRA DAN EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
133111	Gedung dan Bangunan		23	(8,493,766,260)	21	(8,451,628,260)	2	(42,138,000)
4.01.01.01.001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Unit	2	(589,808,800)	1	(570,192,800)	1	(19,616,000)
4.01.01.01.999	Bangunan Gedung Kantor Lainnya	dummy	5	(253,273,000)	4	(230,751,000)	1	(22,522,000)
4.01.01.06.001	Bangunan Rumah Sakit Umum	Unit	10	(6,744,822,960)	10	(6,744,822,960)	0	0
4.01.01.06.015	Bangunan Posyandu	Unit	2	(248,990,100)	2	(248,990,100)	0	0
4.01.01.08.001	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	Unit	1	(40,000,000)	1	(40,000,000)	0	0
4.01.01.30.005	Bangunan Rumah Genset	Unit	1	(470,681,400)	1	(470,681,400)	0	0
4.01.01.34.999	Taman Lainnya	dummy	1	(48,990,000)	1	(48,990,000)	0	0
4.04.01.99.999	Tugu/Tanda Batas Lainnya	dummy	1	(97,200,000)	1	(97,200,000)	0	0
TOTAL				(8,493,766,260)		(8,451,628,260)		(42,138,000)

Tenggarong, 31 Oktober 2023
Penanggung Jawab UAKPB
Kepala

Triana Agustin
NIP.198208282000122001

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SAMARINDA
JALAN JUANDA NOMOR 6 LT.1-2, SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR 75123 TELEPON (0541) 6524008; FAKSIMILE (0541) 6522320 LAMAN: www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-samarinda

---

Nomor : S-1778/KNL.1302/2023 8 November 2023
Sifat : Segera dan Rahasia
Lampiran : 1 (Satu) Set
Hal : Penyampaian Hasil Penilaian Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong

Yth. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong
Jalan Imam Bonjol No. 37 RT 08, Kel. Melayu, Kec. Tenggarong,
Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur

Sehubungan dengan Surat Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong Nomor W.18.PAS.PAS.7-PB.05.05-2266 tanggal 26 September 2023 hal Permohonan Nilai Wajar untuk Persetujuan Penghapusan dengan Tindak Lanjut Penjualan, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai dengan Surat dimaksud, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong mengajukan permohonan penilaian Barang Milik Negara berupa 23 (Dua Puluh Tiga) Unit Bangunan Yang Akan Dibongkar dalam rangka Pemindahtanganan BMN (Penjualan).
2. Menindaklanjuti hal tersebut, Penilai Pemerintah KPKNL Samarinda telah melaksanakan penilaian dimaksud. Berikut terlampir kami sampaikan laporan penilaian dengan nomor laporan sebagai berikut:

No.	Nomor Laporan	Objek Penilaian
1	LAP-0168/1/PRO-01/KNL.1302/01.03.01/2023 tanggal 8 November 2023	23 (Dua Puluh Tiga) Unit Bangunan Yang Akan Dibongkar

3. Mengingat bahwa laporan penilaian berlaku 6 (enam) bulan sejak tanggal penilaian maka agar segera dapat dilakukan proses pengelolaan lebih lanjut terhadap laporan penilaian dimaksud.

Kami senantiasa berkomitmen untuk Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Samarinda sebagai Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) yang berkelanjutan.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, diucapkan terima kasih.

Plh. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang Samarinda

Ditandatangani secara elektronik
Wirta

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertfikat Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan pindai QR Code pada laman https://office.kemenkeu.go.id atau unggah dokumen pada laman https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF

LAPORAN PENILAIAN

Nomor : LAP-0168/1/PRO-01/KNL.1302/01.03.01/2023
Tanggal : 6 November 2023

Barang Milik Negara

23 (Dua Puluh Tiga) Unit Bangunan Yang Akan Dibongkar

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong

Jalan Imam Bonjol No. 37 RT 08, Kel. Melayu, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur

TANGGAL PENILAIAN
3 November 2023

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANWIL DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SAMARINDA

PENGANTAR

Yth. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong

Hal : Laporan Penilaian Ringkas Barang Milik Negara
Berupa 23 (Dua Puluh Tiga) Unit Bangunan Yang Akan Dibongkar

Sehubungan dengan Surat Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong Nomor W.16.PAS.PAS.7-PB.05.05-2286 tanggal 26 September 2023 hal Permohonan Nilai Wajar untuk Persetujuan Penghapusan dengan Tindak Lanjut Penjualan dan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Samarinda Nomor KEP-173/KNL.1302/2023 tanggal 30 Oktober 2023 tentang Penunjukan Penilai Pemerintah pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Samarinda, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan, serta Surat Tugas Kepala KPKNL Samarinda Nomor ST-1103/KNL.1302/2023 tanggal 30 Oktober 2023 untuk melaksanakan penilaian BMN pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong, dengan ini kami sampaikan laporan penilaian ringkas atas objek penilaian dimaksud dengan tujuan menentukan Nilai Wajar dalam rangka Pemindahtanganan BMN (Penjualan). Laporan penilaian dengan keseluruhan isi beserta lampirannya menjelaskan rincian pendekatan dan metode penilaian serta data pendukung yang digunakan dalam analisis penilaian dimaksud sesuai dengan survei lapangan yang telah kami lakukan.

Setelah melakukan survei lapangan ke lokasi objek Penilaian, mengumpulkan data yang berkaitan dengan objek penilaian, menganalisis, membandingkan dan melakukan penyesuaian atas semua faktor yang relevan yang turut mempengaruhi nilai, kami mengambil simpulan bahwa Nilai Wajar Barang Milik Negara pada satuan kerja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong yang terdiri atas 23 (Dua Puluh Tiga) Unit Bangunan Yang Akan Dibongkar yang berlokasi di Jalan Imam Bonjol No. 37 RT 08, Kel. Melayu, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur untuk tujuan Pemindahtanganan BMN (Penjualan) pada tanggal 3 November 2023 adalah sebagai berikut:

Nilai Wajar

Rp14.545.000,00

(empat belas juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Kami menyatakan bahwa di dalam penilaian ini, kami tidak mempunyai kepentingan apapun terhadap objek penilaian tersebut, baik saat ini maupun masa yang akan datang dan setiap yang berkaitan dinyatakan dalam laporan penilaian ini.

Hormat kami,
Ketua Tim Penilai

Agung Widodo

PERNYATAAN TIM PENILAI

Tim Penilai menyatakan bahwa :

1. Pernyataan, analisis dan simpulan dalam laporan penilaian ini, sebatas pengetahuan Tim Penilai adalah benar dan akurat.
2. Analisis dan simpulan yang dinyatakan dalam laporan penilaian ini dibatasi oleh asumsi dan batasan-batasan yang diungkapkan di dalam laporan penilaian, yang mana merupakan hasil analisis dan simpulan Tim Penilai yang tidak berpihak dan tidak memiliki benturan kepentingan.
3. Tim Penilai tidak mempunyai kepentingan baik sekarang atau di masa yang akan datang terhadap objek yang dinilai, maupun memiliki kepentingan pribadi atau keberpihakan kepada pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap properti yang dinilai
4. Analisis dan simpulan yang dibuat oleh Tim Penilai, serta laporan Penilaian dilakukan dengan memenuhi peraturan yang berlaku.
5. Tim Penilai memiliki kompetensi yang memadai untuk melakukan Penilaian.
6. Tim Penilai memiliki pemahaman yang memadai atas objek Penilaian yang dinilai.
7. Tim Penilai telah melakukan survei terhadap objek Penilaian yang dinilai.
8. Tidak seorang pun, kecuali yang disebutkan dalam laporan Penilaian ini, telah terlibat dalam pelaksanaan survei, analisis, dan pembuatan simpulan sebagaimana yang dinyatakan dalam laporan Penilaian ini.
9. Atas setiap publikasi untuk kepentingan diluar tujuan penilaian terhadap keseluruhan atau sebagian dari laporan, atau referensi yang dipublikasikan perlu mendapatkan persetujuan Tim Penilai Pemerintah
10. Laporan penilaian disusun dengan berpedoman pada peraturan terkait

ASUMSI DAN SYARAT PEMBATAS

Tim Penilai membuat asumsi sebagai berikut:

1. Penilaian dilakukan berdasarkan data dan/atau informasi yang disampaikan oleh sumber yang dapat dipercaya.
2. Apabila di kemudian hari diketahui adanya ketidakbenaran atas data dan/atau informasi tersebut maka tidak menjadi tanggung jawab Tim Penilai
3. Objek penilaian dinilai sebagai objek yang bebas dan segala beban atasnya, kecuali dinyatakan lain.
4. Keterangan yang diberikan oleh pihak lain dianggap relevan dan layak selama berdasarkan analisis objektif yang dilakukan Tim Penilai.
5. Penilaian dilaksanakan dengan mempertimbangkan batasan dan peraturan Pemerintah yang terkait dengan objek penilaian, kecuali dinyatakan lain.
6. Penilaian dilaksanakan terhadap objek penilaian sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Survei Lapangan.

Laporan Penilaian ini dibuat dengan syarat batasan umum sebagai berikut :

1. Nilai yang digunakan adalah dalam mata uang Rupiah
2. Laporan ini bersifat rahasia dan tidak dapat disebarluaskan baik secara keseluruhan maupun sebagian tanpa izin dari Tim Penilai dan pemberi tugas.
3. Penilaian ini hanya digunakan untuk tujuan sebagaimana disebutkan dalam laporan ini dan Tim Penilai tidak bertanggung jawab terhadap penggunaan untuk tujuan lainnya.
4. Tim Penilai yang menandatangani laporan penilaian ini, bertanggung jawab sepenuhnya atas hasil laporan Penilaian ini.
5. Terhadap keabsahan legalitas objek penilaian menjadi tanggung jawab pemohon.
6. Masa Berlaku laporan penilaian paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal penilaian.

RINGKASAN NILAI

Objek Penilaian	:	Barang Milik Negara berupa Bangunan Yang Akan Dibongkar
Alamat Objek Penilaian	:	Jalan Imam Bonjol No. 37 RT 08, Kel. Melayu, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur
Pemilik Barang/Penguasa	:	Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong
Jumlah Objek Penilaian	:	23 (Dua Puluh Tiga) Unit
Pendekatan dan Metode Penilaian	:	Pendekatan Pasar dengan Metode Perbandingan Data Pasar

No.	Objek Penilaian	Kode Barang	NUP	Nilai Wajar (Rp)
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	4.01.01.01.001	4	258.000,00
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	4.01.01.01.001	5	657.000,00
3	Bangunan Gedung Kantor Lainnya	4.01.01.01.999	1	404.000,00
4	Bangunan Gedung Kantor Lainnya	4.01.01.01.999	2	1.360.000,00
5	Bangunan Gedung Kantor Lainnya	4.01.01.01.999	3	217.000,00
6	Bangunan Gedung Kantor Lainnya	4.01.01.01.999	4	167.000,00
7	Bangunan Gedung Kantor Lainnya	4.01.01.01.999	5	497.000,00
8	Bangunan Rumah Sakit Umum	4.01.01.06.001	1	1.868.000,00
9	Bangunan Rumah Sakit Umum	4.01.01.06.001	2	998.000,00
10	Bangunan Rumah Sakit Umum	4.01.01.06.001	3	903.000,00
11	Bangunan Rumah Sakit Umum	4.01.01.06.001	4	535.000,00
12	Bangunan Rumah Sakit Umum	4.01.01.06.001	5	1.509.000,00
13	Bangunan Rumah Sakit Umum	4.01.01.06.001	6	1.189.000,00
14	Bangunan Rumah Sakit Umum	4.01.01.06.001	7	1.163.000,00
15	Bangunan Rumah Sakit Umum	4.01.01.06.001	8	748.000,00
16	Bangunan Rumah Sakit Umum	4.01.01.06.001	9	295.000,00
17	Bangunan Rumah Sakit Umum	4.01.01.06.001	10	853.000,00
18	Bangunan Posyandu	4.01.01.06.015	1	274.000,00
19	Bangunan Posyandu	4.01.01.06.015	2	268.000,00
20	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	4.01.01.08.001	1	472.000,00
21	Bangunan Rumah Genset	4.01.01.30.005	1	-
22	Taman Lainnya	4.01.01.24.369	1	-
23	Tugu/Tanda Batas Lainnya	4.04.01.99.999	1	52.000,00
	TOTAL			14.646.000,00

I. LINGKUP PELAKSANAAN PENILAIAN

A. Pemohon Penilaian	:	Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong sesuai Surat Nomor W.18.PAS.PAS.7-PB.05.06-2286 tanggal 26 September 2023
B. Dasar Penugasan	:	- Surat Keputusan Kepala KPKNL Samarinda Nomor KEP-173/KNL.1302/2023 tanggal 30 Oktober 2023 - Surat Tugas Kepala KPKNL Samarinda Nomor ST-1103/KNL.1302/2023 tanggal 30 Oktober 2023
C. Tujuan Penilaian	:	Menentukan Nilai Wajar dalam rangka Pemindahtanganan BMN (Penjualan)
D. Jenis dan Definisi Nilai	:	- Jenis Nilai adalah Nilai Wajar - Nilai Wajar adalah estimasi harga yang akan diterima dari penjualan aset atau dibayarkan untuk penyelesaian kewajiban antara pelaku pasar yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar pada tanggal penilaian (Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.06/2020)

E. Deskripsi Objek Penilaian

1. Bangunan Yang Akan Dibongkar

Nama Objek	:	Bangunan Gedung Kantor Permanen (Taman Lingkungan Instalasi Air)
Kode Barang dan NUP	:	4.01.01.01.001 NUP 4
Luas	:	20 m²
Lokasi	:	Jalan Imam Bonjol No. 37 RT 08, Kel. Melayu, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara. Prov. Kalimantan Timur
Koordinat	:	-0.421440, 116.989305 (0°25'17.2"S 116°59'21.5"E)
Tahun Selesai Dibangun/Renovasi	:	-
Tahun Perolehan	:	2022 (Hibah Masuk)
Jenis Bangunan	:	4.1
Kondisi	:	Rusak Berat

2. Bangunan Yang Akan Dibongkar

Nama Objek	:	Bangunan Gedung Kantor Permanen (Pengembangan Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit)
Kode Barang dan NUP	:	4.01.01.01.001 NUP 5
Luas	:	50 m²

Lokasi	Jalan Imam Bonjol No. 37 RT 08. Kel. Melayu, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur
Koordinat	-0.422101, 116.988093 (0°25'19.6"S 116°58'20.4"E)
Tahun Selesai Dibangun/Renovasi	-
Tahun Perolehan	2022 (Hibah Masuk)
Jenis Bangunan	7.1
Kondisi	Rusak Berat

3. Bangunan Yang Akan Dibongkar

Nama Objek	Bangunan Gedung Kantor Lainnya (Bangunan Gedung Kantor Lainnya)
Kode Barang dan NUP	4.01.01.01.999 NUP 1
Luas	31 m²
Lokasi	Jalan Imam Bonjol No. 37 RT 08. Kel. Melayu, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur
Koordinat	-0.421573, 116.989261 (0°25'17.7"S 116°59'21.3"E)
Tahun Selesai Dibangun/Renovasi	-
Tahun Perolehan	2022 (Hibah Masuk)
Jenis Bangunan	7.1
Kondisi	Rusak Berat

4. Bangunan Yang Akan Dibongkar

Nama Objek	Bangunan Gedung Kantor Lainnya (Pembuatan Taman & Pagar Depan IPS/Keeling)
Kode Barang dan NUP	4.01.01.01.999 NUP 2
Luas	280 m²
Lokasi	Jalan Imam Bonjol No. 37 RT 08. Kel. Melayu, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur
Koordinat	-0.421933, 116.989508 (0°25'19.0"S 116°59'22.2"E)
Tahun Selesai Dibangun/Renovasi	-
Tahun Perolehan	2022 (Hibah Masuk)
Jenis Bangunan	4.1
Kondisi	Rusak Berat

5. Bangunan Yang Akan Dibongkar

Nama Objek	:	Bangunan Gedung Kantor Lainnya (Pembuatan Pagar Pembatas Poli)
Kode Barang dan NUP	:	4.01.01.01.999 NUP 3
Luas	:	17 m²
Lokasi	:	Jalan Imam Bonjol No. 37 RT 08, Kel. Melayu, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur
Koordinat	:	-0.421642, 116.989405 (0°25'17.9"S 116°59'21.9"E)
Tahun Selesai Dibangun/Renovasi	:	
Tahun Perolehan	:	2022 (Hibah Masuk)
Jenis Bangunan	:	4.1
Kondisi	:	Rusak Berat

6. Bangunan Yang Akan Dibongkar

Nama Objek	:	Bangunan Gedung Kantor Lainnya (Pembuatan Pagar Instalasi Limbah Cair Medis)
Kode Barang dan NUP	:	4.01.01.01.999 NUP 4
Luas	:	7 m²
Lokasi	:	Jalan Imam Bonjol No. 37 RT 08, Kel. Melayu, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur
Koordinat	:	0.421222, 116.989456 (0°25'16.4"S 116°59'22.0"E)
Tahun Selesai Dibangun/Renovasi	:	-
Tahun Perolehan	:	2022 (Hibah Masuk)
Jenis Bangunan	:	4.1
Kondisi	:	Rusak Berat

7. Bangunan Yang Akan Dibongkar

Nama Objek	:	Bangunan Gedung Kantor Lainnya (Pembuatan Pagar Ulin RSUD)
Kode Barang dan NUP	:	4.01.01.01.999 NUP 5
Luas	:	36 m²
Lokasi	:	Jalan Imam Bonjol No. 37 RT 08, Kel. Melayu, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur
Koordinat	:	-0.421642, 116.989405 (0°25'17.9"S 116°59'21.9"E)
Tahun Selesai Dibangun/Renovasi	:	

Tahun Perolehan : 2022 (Hibah Masuk)

Jenis Bangunan : 4.1

Kondisi : Rusak Berat

8. Bangunan Yang Akan Dibongkar

Nama Objek : Bangunan Rumah Sakit Umum (Ruang Rawat Jalan)

Kode Barang dan NUP : 4.01.01.08.001 NUP 1

Luas : 752 m²

Lokasi : Jalan Imam Bonjol No. 37 RT 08, Kel. Melayu, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur

Koordinat : -0.421505, 116.989328 (0°25'17.4"S 116°59'21.6"E)

Tahun Selesai Dibangun/Renovasi : -

Tahun Perolehan : 2022 (Hibah Masuk)

Jenis Bangunan : 4.2

Kondisi : Rusak Berat

9. Bangunan Yang Akan Dibongkar

Nama Objek : Bangunan Rumah Sakit Umum (Gedung Ruang Mawar)

Kode Barang dan NUP : 4.01.01.08.001 NUP 2

Luas : 158 m²

Lokasi : Jalan Imam Bonjol No. 37 RT 08, Kel. Melayu, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur

Koordinat : -0.421818, 116.989575 (0°25'18.5"S 116°59'22.5"E)

Tahun Selesai Dibangun/Renovasi : -

Tahun Perolehan : 2022 (Hibah Masuk)

Jenis Bangunan : 4.2

Kondisi : Rusak Berat

10. Bangunan Yang Akan Dibongkar

Nama Objek : Bangunan Rumah Sakit Umum (Gedung Ruang Asoka)

Kode Barang dan NUP : 4.01.01.08.001 NUP 3

Luas : 130 m²

Lokasi : Jalan Imam Bonjol No. 37 RT 08, Kel. Melayu, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur

Koordinat : -0.422084, 116.989803 (0°25'19.5"S 116°59'22.8"E)

Tahun Selesai Dibangun/Renovasi : -

Tahun Perolehan : 2022 (Hibah Masuk)

Jenis Bangunan : 4.2

Kondisi : Rusak Berat

11. Bangunan Yang Akan Dibongkar

Nama Objek : Bangunan Rumah Sakit Umum (Gedung Ruang Cempaka)

Kode Barang dan NUP : 4.01.01.06.001 NUP 4

Luas : 110 m²

Lokasi : Jalan Imam Bonjol No. 37 RT 06, Kel. Melayu, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur

Koordinat : -0.422236, 116.989402 (0°25'20.1"S 116°59'21.8"E)

Tahun Selesai Dibangun/Renovasi : -

Tahun Perolehan : 2022 (Hibah Masuk)

Jenis Bangunan : 4.2

Kondisi : Rusak Berat

12. Bangunan Yang Akan Dibongkar

Nama Objek : Bangunan Rumah Sakit Umum (Gedung Ruang Melati)

Kode Barang dan NUP : 4.01.01.06.001 NUP 5

Luas : 343 m²

Lokasi : Jalan Imam Bonjol No. 37 RT 06, Kel. Melayu, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara Prov. Kalimantan Timur

Koordinat : -0.422052, 116.989175 (0°25'19.4"S 116°59'21.0"E)

Tahun Selesai Dibangun/Renovasi : -

Tahun Perolehan : 2022 (Hibah Masuk)

Jenis Bangunan : 4.2

Kondisi : Rusak Berat

13. Bangunan Yang Akan Dibongkar

Nama Objek : Bangunan Rumah Sakit Umum (Gedung Ruang ICU)

Kode Barang dan NUP : 4.01.01.06.001 NUP 6

Luas : 254 m²

Lokasi	: Jalan Imam Bonjol No. 37 RT 08, Kel. Melayu, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur
Koordinat	: -0.421780, 116.988195 (0°25'18.4"S 116°59'21.1"E)
Tahun Selesai Dibangun/Renovasi	: -
Tahun Perolehan	: 2022 (Hibah Masuk)
Jenis Bangunan	: 4.2
Kondisi	: Rusak Berat

14. Bangunan Yang Akan Dibongkar

Nama Objek	: Bangunan Rumah Sakit Umum (Ruang Operasi Termasuk Rehab)
Kode Barang dan NUP	: 4.01.01.06.001 NUP 7
Luas	: 383 m²
Lokasi	: Jalan Imam Bonjol No. 37 RT 08, Kel. Melayu, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur
Koordinat	: -0.422252, 116.989248 (0°25'20.1"S 116°59'21.3"E)
Tahun Selesai Dibangun/Renovasi	: -
Tahun Perolehan	: 2022 (Hibah Masuk)
Jenis Bangunan	: 4.2
Kondisi	: Rusak Berat

15. Bangunan Yang Akan Dibongkar

Nama Objek	: Bangunan Rumah Sakit Umum (Pemeliharaan IGD)
Kode Barang dan NUP	: 4.01.01.06.001 NUP 8
Luas	: 68 m²
Lokasi	: Jalan Imam Bonjol No. 37 RT 08, Kel. Melayu, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur
Koordinat	: -0.421615, 116.989592 (0°25'17.8"S 116°59'22.5"E)
Tahun Selesai Dibangun/Renovasi	: -
Tahun Perolehan	: 2022 (Hibah Masuk)
Jenis Bangunan	: 4.2
Kondisi	: Rusak Berat

16. Bangunan Yang Akan Dibongkar

Nama Objek	:	Bangunan Rumah Sakit Umum (Pembangunan Rumah Sakit)
Kode Barang dan NUP	:	4.01.01.06.001 NUP 9
Luas	:	21 m²
Lokasi	:	Jalan Imam Bonjol No. 37 RT 08. Kel. Melayu, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara. Prov. Kalimantan Timur
Koordinat	:	-0.421701, 116.989284 (0°25'18.1"S 116°59'21.4"E)
Tahun Selesai Dibangun/Renovasi		-
Tahun Perolehan		2022 (Hibah Masuk)
Jenis Bangunan	:	2.1
Kondisi	:	Rusak Berat

17. Bangunan Yang Akan Dibongkar

Nama Objek	:	Bangunan Rumah Sakit Umum (Ruang Tulip)
Kode Barang dan NUP	:	4.01.01.06.001 NUP 10
Luas	:	378 m²
Lokasi	:	Jalan Imam Bonjol No. 37 RT 08. Kel. Melayu, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur
Koordinat	:	-0.421932, 116.989380 (-0.421932, 116.989380)
Tahun Selesai Dibangun/Renovasi	:	-
Tahun Perolehan	:	2022 (Hibah Masuk)
Jenis Bangunan	:	4.2
Kondisi	:	Rusak Berat

18. Bangunan Yang Akan Dibongkar

Nama Objek	:	Bangunan Posyandu (Ruang Tunggu ICU)
Kode Barang dan NUP	:	4.01.01.06.015 NUP 1
Luas	:	21 m²
Lokasi	:	Jalan Imam Bonjol No. 37 RT 08, Kel. Melayu, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara. Prov. Kalimantan Timur
Koordinat	:	-0.421780, 116.989135 (0°25'18.4"S 116°59'21.1"E)
Tahun Selesai Dibangun/Renovasi	:	-
Tahun Perolehan	:	2022 (Hibah Masuk)

Jenis Bangunan	:	2.1
Kondisi	:	Rusak Berat

19. Bangunan Yang Akan Dibongkar

Nama Objek	:	Bangunan Posyandu (Tempat Pembuangan Sampah)
Kode Barang dan NUP	:	4.01.01.06.316 NUP 2
Luas	:	20 m²
Lokasi	:	Jalan Imam Bonjol No. 37 RT 08, Kel. Melayu, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur
Koordinat	:	-0.421570, 116.989399 (0°25'17.7"S 116°59'21.8"E)
Tahun Selesai Dibangun/Renovasi	:	
Tahun Perolehan	:	2022 (Hibah Masuk)
Jenis Bangunan	:	2.1
Kondisi	:	Rusak Berat

20. Bangunan Yang Akan Dibongkar

Nama Objek	:	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen (Mushola)
Kode Barang dan NUP	:	4.01.01.08.001 NUP 1
Luas	:	36 m²
Lokasi	:	Jalan Imam Bonjol No. 37 RT 08, Kel. Melayu, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur
Koordinat	:	-0.421908, 116.989036 (0°25'18.9"S 116°59'20.5"E)
Tahun Selesai Dibangun/Renovasi	:	-
Tahun Perolehan	:	2022 (Hibah Masuk)
Jenis Bangunan	:	2.1
Kondisi	:	Rusak Berat

21. Bangunan Yang Akan Dibongkar

Nama Objek	:	Bangunan Rumah Genset (Tempat Parkir Karyawan)
Kode Barang dan NUP	:	4.01.01.30.005 NUP 1
Luas	:	1820 m²
Lokasi	:	Jalan Imam Bonjol No. 37 RT 08, Kel. Melayu, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur
Koordinat	:	-0.421356, 116.989298 (0°25'16.9"S 116°59'21.5"E)

Tahun Selesai Dibangun/Renovasi : -

Tahun Perolehan : 2022 (Hibah Masuk)

Jenis Bangunan : 4.1

Kondisi : Rusak Berat

22. Bangunan Yang Akan Dibongkar

Nama Objek : Taman Lainnya (Pembatas Taman)

Kode Barang dan NUP : 4.01.01.24.999 NUP 1

Luas : 73 m²

Lokasi : Jalan Imam Bonjol No. 27 RT 08, Kel. Melayu, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur

Koordinat : -0.421910, 116.989151 (0°25'18.9"S 116°59'20.9"E)

Tahun Selesai Dibangun/Renovasi : -

Tahun Perolehan : 2022 (Hibah Masuk)

Jenis Bangunan : 4.1

Kondisi : Rusak Berat

23. Bangunan Yang Akan Dibongkar

Nama Objek : Tugu/Tanda Batas Lainnya (Tugu Tanda Batas Lain)

Kode Barang dan NUP : 4.01.01.99.999 NUP 1

Luas : 4 m²

Lokasi : Jalan Imam Bonjol No. 27 RT 08, Kel. Melayu, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur

Koordinat : -0.421440, 116.989305 (0°25'17.2"S 116°59'21.5"E)

Tahun Selesai Dibangun/Renovasi : -

Tahun Perolehan : 2022 (Hibah Masuk)

Jenis Bangunan : 4.1

Kondisi : Rusak Berat

F. Metode Pengumpulan Data dan Informasi : Survei Lapangan dengan Peninjauan Langsung

G. Tanggal Pelaksanaan Survei Lapangan : 2 s.d. 3 November 2023

H. Tanggal Penilaian : 3 November 2023

I.	Pendekatan dan Metode Penilaian	:	Pendekatan Pasar dengan Metode Perbandingan Data Pasar
J.	Standar Penilaian	:	Pelaksanaan penilaian dilakukan dengan berpedoman pada peraturan mengenai penilaian yang terkait dengan objek penilaian dan prinsip penilaian yang berlaku umum yaitu : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.06/2020 tentang Penilaian oleh Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara; 2. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 2/KN/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian, Kendali Mutu, dan Kaji Ulang Atas Laporan Penilaian Oleh Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 6/KN/2022; 3. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 3/KN/2021 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Properti; 4. Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-436/KN/2020 tanggal 13 November 2020 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Bongkaran Bangunan; dan 5. Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-453/KN/2020 tanggal 17 Desember 2020 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Penilaian oleh Tim Penilai Pemerintah Direktur Jenderal Kekayaan Negara. Tidak terdapat inkonsistensi antara laporan penilaian ini dengan standar-standar tersebut di atas.
K.	Syarat Pengungkapan/ *Disclosure*	:	1. Pelaksanaan survei lapangan dan pemeriksaan terhadap fisik objek penilaian dilakukan oleh Penilai dan didampingi oleh pemohon pada tanggal 2 s.d. 2 November 2023. Informasi mengenai spesifikasi kuantitas/jumlah objek penilaian didapatkan dari pengamatan fisik dan informasi yang disampaikan oleh pemohon. Apabila di kemudian hari ditemukan kondisi yang berbeda, maka bukan menjadi tanggung jawab Penilai; dan 2. Penilaian ini dilakukan dalam rangka pemindahtanganan BMN melalui penjualan secara lelang sehingga untuk mendapatkan nilai wajar indikasi nilai dilakukan pembobotan dan dikurangkan dengan bea lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. ANALISIS DATA DAN INFORMASI

Pendekatan penilaian yang digunakan dalam pelaksanaan penilaian adalah pendekatan pasar (market data approach). Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.06/2020 tentang Penilaian Oleh Tim Penilai di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, pendekatan pasar merupakan teknik penilaian yang dilakukan untuk mengestimasi nilai objek penilaian dengan cara mempertimbangkan data penjualan dan/atau data penawaran dari objek pembanding sejenis atau pengganti dan data pasar yang terkait melalui proses perbandingan.

Metode penilaian yang digunakan dalam pelaksanaan penilaian adalah metode perbandingan data pasar, yaitu menggunakan informasi dari transaksi yang melibatkan aset yang sama atau sejenis dengan aset yang dinilai untuk mendapatkan indikasi nilai. Sesuai ketentuan yang diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-436/KN/2020 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Bongkaran Bangunan, tahapan yang digunakan dalam penilaian bongkaran bangunan adalah:

1. Mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan terkait objek penilaian dan objek pembanding;
2. Membandingkan per material objek penilaian bongkaran bangunan dengan objek pembanding berdasarkan faktor pembanding yang dianggap mempengaruhi nilai;
3. Data dan informasi terkait objek pembanding dievaluasi dan dianalisis untuk proses penyesuaian. Proses penyesuaian tersebut merupakan kegiatan untuk menyesuaikan perbedaan objek penilaian dengan objek pembanding, dengan cara menambahkan atau mengurangkan dalam persentase atau jumlah dalam satuan mata uang;
4. melakukan pembobotan terhadap indikasi nilai dari hasil penyesuaian untuk menghasilkan nilai per material objek penilaian bongkaran bangunan;
5. Menjumlahkan nilai dari seluruh material objek penilaian bongkaran bangunan; dan
6. Mendapatkan nilai wajar bongkaran bangunan dengan cara mengurangi nilai dari seluruh material objek penilaian bongkaran bangunan dengan biaya yang timbul dalam pembongkaran..

Berdasarkan hasil analisis pasar dari sisi permintaan, harga material hasil bongkaran bangunan di sekitar objek penilaian sangat dipengaruhi oleh harga barang baru. Ketika barang baru mengalami kenaikan harga, maka konsumen cenderung untuk mencari alternatif substitusi/pengganti antara lain dari barang bekas sehingga permintaan material hasil bongkaran bangunan naik. Apabila permintaan tinggi maka harga barang bekas juga akan cenderung naik. Dengan demikian apabila harga barang baru tinggi maka harga barang bekas juga akan cenderung tinggi.

Berdasarkan penelitian/pengamatan dilihat dari sisi penawaran, tersedianya material/bahan bangunan bekas biasanya didapatkan dari hasil renovasi dan pembangunan gedung baru yang menggantikan gedung lama pada kantor pemerintahan/swasta, bangunan pabrik, bangunan komersial lainnya maupun renovasi bangunan residensial. Bahan bangunan bekas seringkali didapatkan dari pemulung, yang kemudian disalurkan pada pengepul lokal kemudian pengepul wilayah yang selanjutnya dikumpulkan pada pengepul industri untuk disalurkan ke pabrik guna didaur ulang (misalnya untuk material berupa besi bekas dan kayu), atau dari pengepul untuk langsung disalurkan pada konsumen akhir (misalnya untuk material berupa kayu yang masih layak pakai). Selain itu juga terdapat pelaku pasar berupa perusahaan atau perorangan yang khusus bergerak di bidang bongkaran bangunan. Perusahaan ini biasanya mengikuti lelang bongkaran baik yang diselenggarakan pemerintah maupun non pemerintah

Para pelaku bisnis bongkaran bangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara selain dari lokal juga dapat melibatkan pelaku dari luar misalnya perusahaan khusus bongkaran dari Samarinda dan Balikpapan, sehingga harga bongkaran terpengaruh oleh harga regional yang ada di Kalimantan Timur atau bahkan untuk bahan-bahan lain seperti besi juga dipengaruhi harga besi bekas yang berlaku nasional. Sebagian besar material bangunan bekas akan memiliki nilai ekonomis atau dapat dijual kembali setelah mengalami proses perbaikan. Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan analisis pasar terutama aspek penawaran dan permintaan, jenis barang ini sangat layak diperjualbelikan di pasar.

III. SIMPULAN NILAI

Berdasarkan data dan informasi, analisis data, asumsi, dan kondisi pembatas, menurut kami opini Nilai Wajar atas Barang Milik Negara berupa 23 (Dua Puluh Tiga) Unit Bangunan Yang Akan Dibongkar pada Satuan Kerja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong untuk tujuan Pemindahtanganan BMN (Penjualan) yang berlokasi di Jalan Imam Bonjol No. 37 RT 08, Kel. Melayu, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur pada tanggal 3 November 2023 adalah sebesar :

Rp14.545.000,00

(empat belas juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

TIM PENILAI

NO	NAMA/NIP	TANDA TANGAN
1.	Agung Widodo KMK Nomor 1438/KM.1/UP.11/2021	
2.	Hendra Sugestiawan KMK Nomor 249/KM.1/UP.11/2021	
3	Wisnu Purna Adhitya KMK Nomor 63/KM.6/2023	

LAMPIRAN

A

SURAT PERMOHONAN DAN DOKUMEN PENATAUSAHAAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SAMARINDA
Jl. Ir. H. Juanda No. 6 [illegible], Samarinda Kalimantan Timur 75123
TELEPON (0541) [illegible] FAKSIMILE (0541) [illegible] LAMAN www.djkn.kemenkeu.go.id

VERIFIKASI PERMOHONAN PENILAIAN OLEH PEJABAT FUNGSIONAL PENILAI PEMERINTAH

1. Nomor IPP : IPP-128/KNL.1302/2023 tanggal 30 Oktober 2023
2. Tanggal Diterima : 30 Oktober 2023
3. Verifikasi Ke- : 1
4. Batas Waktu Verifikasi : 6 November 2023
5. Satuan Kerja : Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong

No.	Uraian	Kelengkapan Sesuai/Tidak	Keterangan
1.	Latar Belakang Permohonan	Sesuai/Tidak	Surat Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong Nomor W.18.PAS.PAS.7-PB.05.05-2208 tanggal 26 September 2023
2.	Tujuan Penilaian	Sesuai/~~Tidak~~	Pemindahtanganan BMN (Penjualan)
3.	Dokumen Legalitas	Sesuai/Tidak	Surat Keterangan Nomor W.19.PAS.PAS.7-PB.05.05-2208 tanggal 26 September 2023
4.	Deskripsi Objek Penilaian	Sesuai/~~Tidak~~	Bangunan Yang Akan Dibongkar
5.	Dokumen Penatausahaan Barang	Sesuai/~~Tidak~~	Kartu Identitas Barang

Tindak lanjut : Lengkap, dilaksanakan survei

Penilai Pemerintah Ahli Pertama

Wisnu Purna Adhitya

Disampaikan kepada :

....
NIP ....

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jl. Imam Bonjol No.37 Rt.06 Kel. Melayu, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara
Telp 0541-6720100, Email: [illegible]

Nomor : W.16.PAS.PAS.7-PL.03.05-2266 26 September 2023
Sifat : Segera
Perihal : Permohonan Nilai Wajar untuk Persetujuan Penghapusan dengan Tindak Lanjut Penjualan

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
Kota Samarinda
di – Tempat

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Kegiatan Rehabilitasi dan Pembangunan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong, bersama ini dengan hormat kami mohon bantuan untuk dapat diberikan penilaian untuk menentukan nilai wajar Gedung dan Bangunan Kantor Permanen dll yang akan dilakukan penghapusan dengan rincian barang sebagai berikut:

No	Kode Barang	Nama Barang	NUP	Merk/Type	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan
1	2	3	4	5	6	7
1	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	4	Taman Lingkungan Instalasi Air	2005	19,015,000
2	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	6	Pengembangan dan Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit	2022	373,992,800
3	4010102999	Bangunan Gedung Kantor Lainnya	1	Bangunan Gedung Kantor Lain	2022	37,300,000
4	4010102999	Bangunan Gedung Kantor Lainnya	2	Pembuatan Taman & Pagar Depan IPS/Kesling	2022	23,222,000
5	4010102999	Bangunan Gedung Kantor Lainnya	3	Pembuatan Pagar Pembatas Poli	2022	53,354,300
6	4010102999	Bangunan Gedung Kantor Lainnya	4	Pembuatan Pagar Instalasi Limbah Gas Medis	2022	45,087,000
7	4010102999	Bangunan Gedung Kantor Lainnya	5	Pembuatan Pagar Ulin KSO	2021	44,310,000
8	4010109001	Bangunan Rumah Sakit Umum	1	Ruang Rawat Jalan	2022	1,065,265,900
9	4010109001	Bangunan Rumah Sakit Umum	2	Gedung Ruang Mawar	2022	300,000,000
10	4010109001	Bangunan Rumah Sakit Umum	3	Gedung Ruang Asoka	2022	313,507,000
11	4010109001	Bangunan Rumah Sakit Umum	4	Gedung Ruang Cempaka	2022	400,000,000
12	4010109001	Bangunan Rumah Sakit Umum	5	Gedung Ruang Melati	2022	400,000,000
13	4010109001	Bangunan Rumah Sakit Umum	6	Gedung Ruang ICU	2022	257,000,000

14	40[illegible]06003	Bangunan Rumah Sakit Umum	7	Ruang Operasi Termasuk [illegible]	2022	634,720,000
15	4010106003	Bangunan Rumah Sakit Umum	8	Pemeliharaan IGD	2022	194,956,000
16	4010106003	Bangunan Rumah Sakit Umum	9	Pembangunan Rumah Sakit	2022	40,390,000
17	4010106003	Bangunan Rumah Sakit Umum	10	Ruang Toilet	2022	1,305,291,980
18	4010106005	Bangunan Puskesmas	1	Ruang Tunggu ICU	2022	76,122,000
19	4010106005	Bangunan Posyandu	2	Tempat Pembuangan Sampah	2022	172,856,000
20	4010108001	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1	Musholla	2022	40,000,000
21	4010130005	Bangunan Rumah Genset	1	Tempat Parkir Kendaraan	2022	470,081,000
22	40[illegible]99999	Taman Lainnya	1	Pembuatan Taman	2022	45,990,000
23	40[illegible]99999	Tugu/Tanda Batas Lainnya	1	Tugu Tanda Batas Lain	2022	57,200,000

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, bersama ini dengan hormat kami sampaikan Lampiran kelengkapan berkas sebagai data pendukung untuk menentukan nilai wajar.

Demikian, atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Kepala,

Dr. [illegible]
NIP. 19690702[illegible]

Tembusan:
1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur;
2. Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur;
3. Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur.

Dokumentasi Bangunan Yang Diusulkan Penghapusan Dengan Tindak Lanjut Penjualan

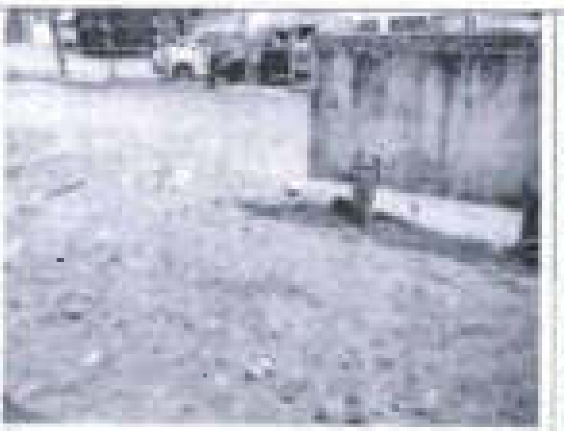

1. Bangunan Gedung Kantor Permanen NUP 4

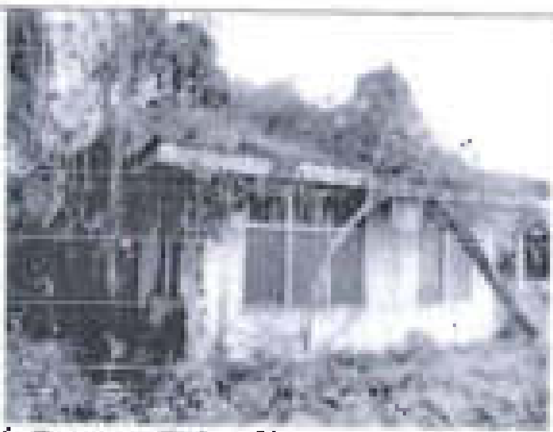

2. Bangunan Gedung Kantor Permanen NUP 5

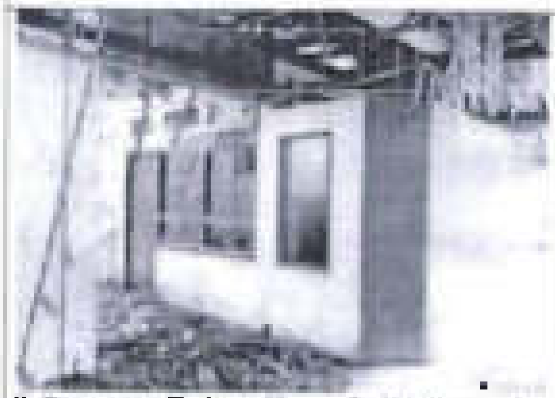

3. Bangunan Gedung Kantor Lainnya NUP 1

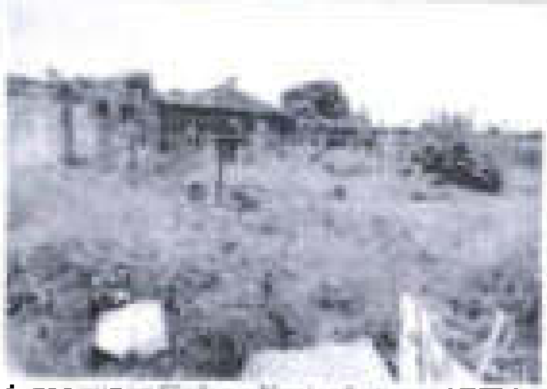

4. Bangunan Gedung Kantor Lainnya NUP 2

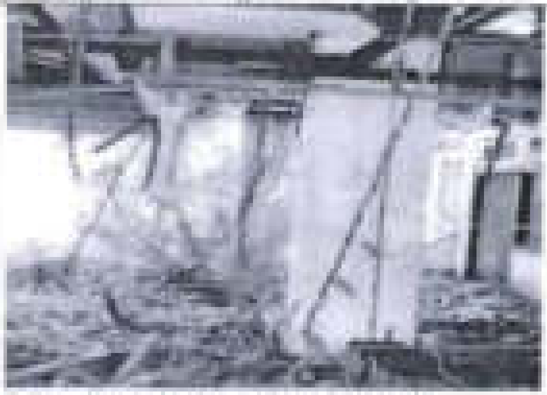

5. Bangunan Gedung Kantor Lainnya NUP 3

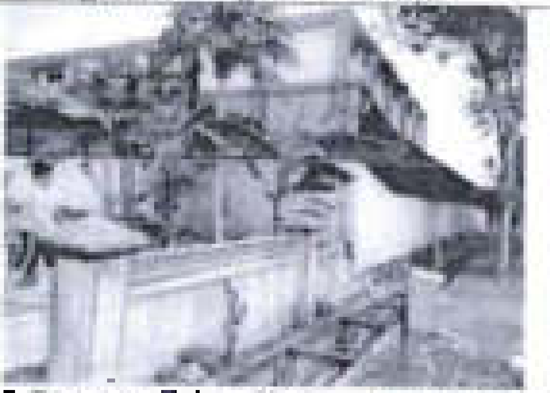

6. Bangunan Gedung Kantor Lainnya NUP 4

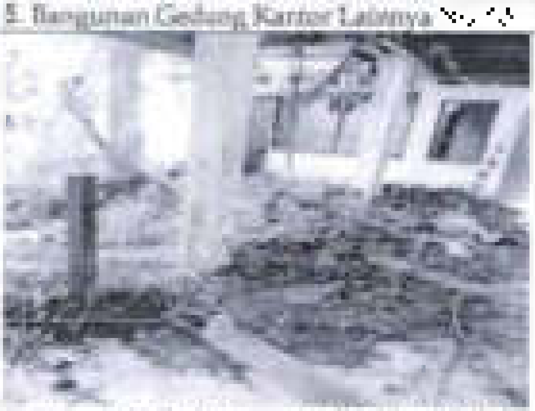

7. Bangunan Gedung Kantor Lainnya NUP 5

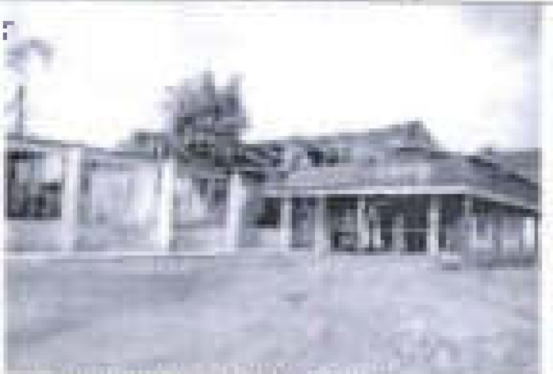

8. Bangunan Rumah Sakit Umum NUP 1

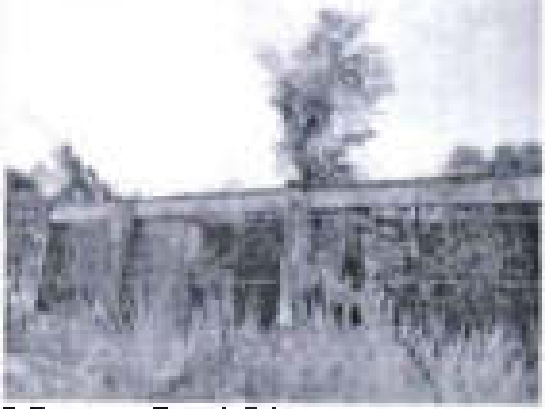
9. Bangunan Rumah Sakit Umum NUP 2

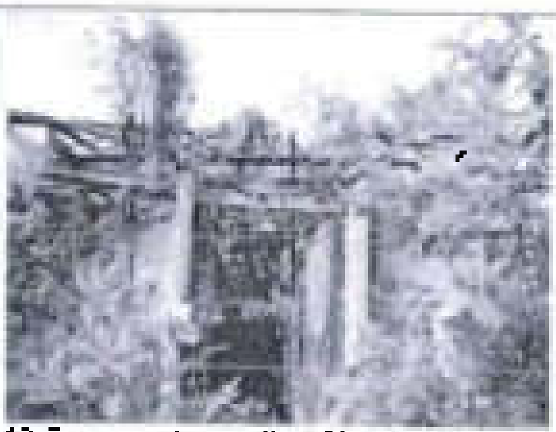
10. Bangunan Rumah Sakit Umum NUP 3

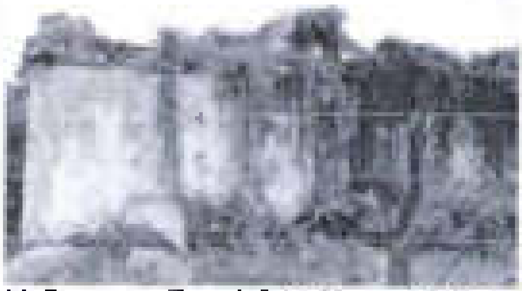
11. Bangunan Rumah Sakit Umum NUP 4

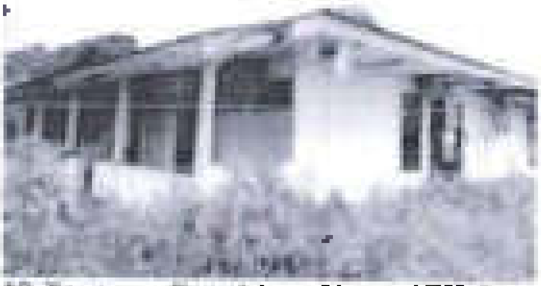
12. Bangunan Rumah Sakit Umum NUP 5

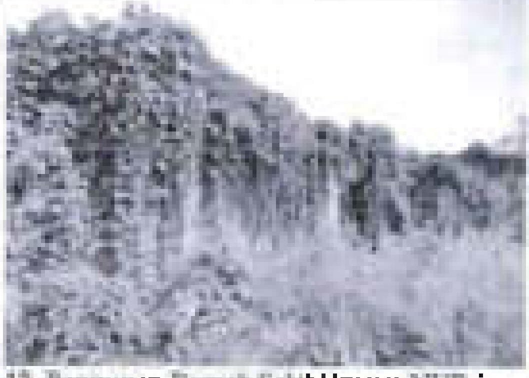
13. Bangunan Rumah Sakit Umum NUP 6

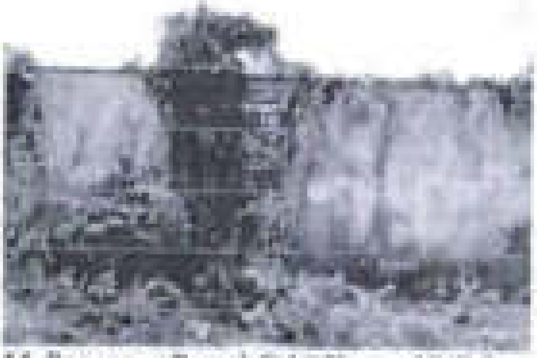
14. Bangunan Rumah Sakit Umum NUP 7

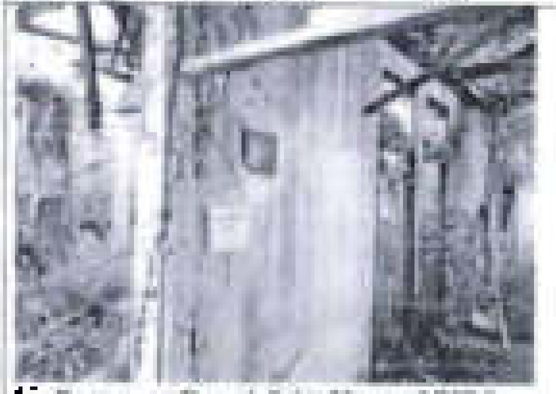
15. Bangunan Rumah Sakit Umum NUP 8

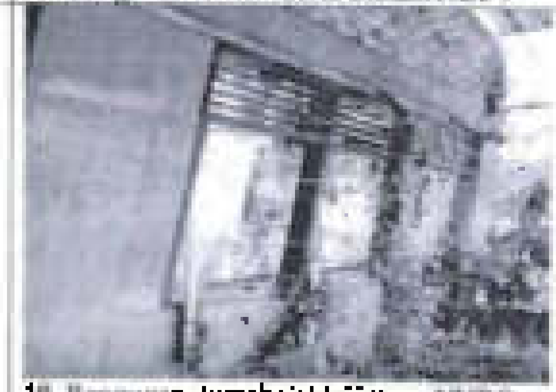
16. Bangunan Rumah Sakit Umum NUP 9

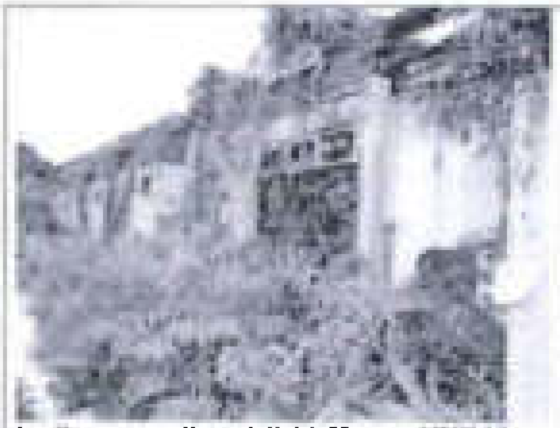

17. Bangunan Rumah Sakit Umum NUP 10

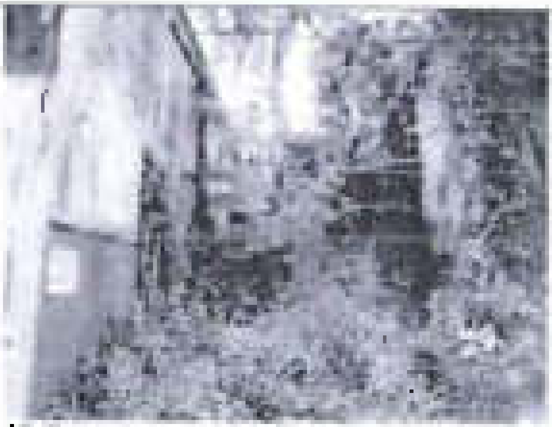

18. Bangunan Posyandu NUP 1

19. Bangunan Posyandu NUP 2

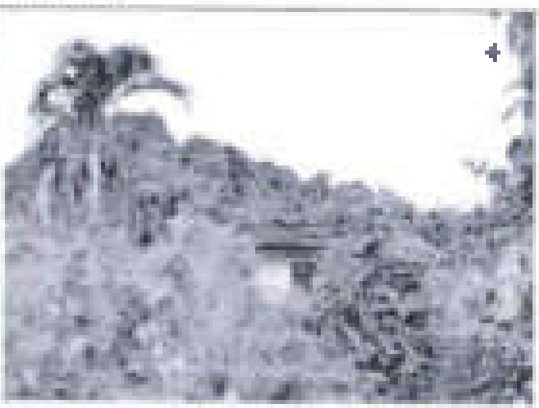

20. Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen NUP 1

21. Bangunan Rumah Genset NUP 1

22. Taman Lainnya NUP 1

23. Tugu/Tanda Batas Lainnya NUP 1

UAPB : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
UAPPB-E1 : DITJEN PEMASYARAKATAN
UAKPB : KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALTIM DAN KALTARA

[illegible]

KARTU IDENTITAS BARANG
GEDUNG DAN BANGUNAN

[illegible] : Gedung dan Bangunan
[illegible] : [illegible]
[illegible] : [illegible]
[illegible] : [illegible]

Kode UAKPB : [illegible]
Nama UAKPB : LAPAS PEREMPUAN KELAS II A TENGGARONG

I. UNIT BARANG

1. Luas Bangunan : [illegible]
2. Luas Dasar Bangunan : [illegible]
3. Jumlah Lantai : [illegible]
4. Type : [illegible]
5. Tahun Selesai Dibangun / Digunakan : -
6. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
   No : Tanggal :
7. Letak/Alamat :
   - Propinsi : KALIMANTAN TIMUR
   - Kabupaten / Kota : KAB. KUTAI KARTANEGARA
   - Kecamatan : Tenggarong
   - Kelurahan / Desa : Tenggarong
   - Jalan : [illegible]
   - Kode Pos : [illegible]
8. [illegible] :

II. UNIT PEMAKAI

1. Nama Unit : -
2. Alamat : -

III. [illegible]

1. Cara Perolehan : [illegible]
2. Dari : -
3. Tgl Perolehan : [illegible]
4. Kondisi Perolehan : Baik
5. [illegible] : [illegible]
6. [illegible] : -
7. [illegible]
   No :
   Tgl :

IV. [illegible]

1. Nilai Buku : [illegible]
2. [illegible] : [illegible]
3. [illegible] : [illegible]
   [illegible] :
4. [illegible] : [illegible]
   [illegible] :
5. [illegible] : [illegible]
   Tahun :

V. CATATAN [illegible]

1. [illegible] : [illegible]
2. [illegible] : -
3. Status Tanah : [illegible]
4. [illegible] : -

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	FOTO 4

Dibuat Tgl :
Nama Pejabat : [illegible]
Jabatan : KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Tanda tangan dan Stempel :

[illegible] Tgl :
Nama : [illegible]
Jabatan : [illegible]
Tanda tangan dan Stempel :

*) Coret yang tidak perlu

UAPB : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
UAPPB-E1 : DITJEN PEMASYARAKATAN
UAPPB-W : KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALTIM (PPB KALTIM)

Kode [illegible]
[illegible]

KARTU IDENTITAS BARANG
GEDUNG DAN BANGUNAN

BIDANG : Gedung dan Bangunan
KELOMPOK : BANGUNAN GEDUNG (TEMPAT KERJA)
SUB KELOMPOK : BANGUNAN KESEHATAN
SUB SUB KELOMPOK : [illegible]

Kode Lokasi : [illegible]
Nama Lokasi : LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

I. UNIT BARANG

1. Luas Bangunan : 72 m²
2. Luas Dasar Bangunan : 72 m²
3. Jumlah Lantai : 1
4. Tipe : [illegible]
5. Tahun Selesai Dibangun / Digunakan :
6. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) :
   No. : Tanggal :
7. Letak Bangunan :
   - Provinsi : KALIMANTAN TIMUR
   - Kabupaten / Kota *) : KAB. KUTAI KARTANEGARA
   - Kecamatan : Tenggarong
   - Kelurahan / Desa *) : [illegible]
   - Jalan : Jl. [illegible] No. 27
   - RT / RW / KODE POS : [illegible]
8. Nomor Kode Tanah :
   :

II. UNIT PEMAKAI

1. Nama UPB : -
2. Alamat : -

III. PENGADAAN

1. Cara Perolehan : [illegible] (Masuk)
2. Dari : -
3. Tgl Perolehan : [illegible]
4. Kondisi Perolehan : Baik
5. Harga Perolehan : Rp. 1.457.[illegible]
6. Dasar Harga : -
7. Bukti Perolehan :
   No. : -
   Tgl :

IV. NILAI HARGA LAINNYA

1. Nilai Buku : Rp. [illegible]
2. Akumulasi Penyusutan : Rp. [illegible]
3. NJOP Tanah : Rp. [illegible]
   Periode Laporan :
4. Nilai Wajar : Rp. -
   Tanggal Penilaian :
5. NJOP [illegible] : Rp. -
   Tahun

V. CATATAN PENGISI

1. Status Penggunaan : Digunakan sendiri untuk operasional
2. Digunakan untuk : -
3. Status [illegible] : [illegible]
4. Catatan Lainnya :

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3

FOTO 4

Dibuat di/Tgl. :
Nama Pejabat : [illegible]
Jabatan/Pangkat : KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Tanda tangan dan Stempel

Dicek Tgl. :
Nama : [illegible]
Jabatan :
Tanda tangan dan Stempel

*) Coret yang tidak perlu

UAPB : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
UAPPB-E1 : DITJEN PEMASYARAKATAN
UAPPB-W : KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN [illegible]
KALTIM

Form : [illegible]
4510[illegible]

KARTU IDENTITAS BARANG
(GEDUNG DAN BANGUNAN)

JENIS : Gedung dan Bangunan
KELOMPOK : BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA
SUB KELOMPOK : BANGUNAN GEDUNG KANTOR
SUB SUB KELOMPOK : Bangunan Gedung Kantor Lainnya

Kode BARANG : [illegible]
Nama UAKPB : LAPAS PEREMPUAN KELAS II A TENGGARONG

I. UNIT BARANG

1. Luas Bangunan : [illegible] m²
2. Luas Dasar Bangunan : [illegible] m²
3. Jumlah Lantai : 1 Lt.
4. Tipe : [illegible]
5. Dokumen Gambar / Digambar
6. [illegible] (IMB)
   No. : - Tanggal :
7. Letak Bangunan
   - Propinsi : KALIMANTAN TIMUR
   - Kabupaten / Kota : KAB. KUTAI KARTANEGARA
   - Kecamatan : Tenggarong
   - Kelurahan / Desa : Tenggarong
   - Jalan : [illegible]
   - RT/RW/RK : [illegible]
8. Nomor KIB Tanah :

II. UNIT PEMAKAI

1. Nama Unit : -
2. Alamat : -

III. PENGADAAN

1. Cara Perolehan : [illegible]
2. Dari
3. Tgl. Perolehan : [illegible]
4. Kondisi Bangunan : Baik
5. Biaya Perolehan : [illegible]
6. Dasar Harga :
7. Sumber Dana :
   No.
   Tgl.

IV. NILAI/HARGA LAINNYA

1. Nilai Buku : Rp [illegible]
2. Nilai Akum. Penyusutan : Rp [illegible]
3. Nilai Buku Tahun Sebelumnya : Rp [illegible]
4. Nilai Wajar Tahun Anggaran : Rp 0
5. Nilai NJOP Tahun : Rp 0

V. CATATAN/FUNGSI

1. Status Penggunaan : Digunakan sendiri untuk operasional
2. Digunakan untuk Pihak : -
3. [illegible] : [illegible]
4. Catatan Lainnya : -

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	FOTO 4

Dibuat di / Tgl :
Nama Pejabat : [illegible]
Jabatan / Pangkat : KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Tanda tangan dan Stempel

Diterima tgl :
Nama : [illegible]
Jabatan : [illegible]
Tanda tangan dan Stempel

*) Coret yang tidak perlu

UAPB : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
UAPPB-E1 : DITJEN PEMASYARAKATAN
UAPPB-W : KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALTIM [illegible]
KALTIM)

Form : [illegible]
[illegible]

KARTU IDENTITAS BARANG
GEDUNG DAN BANGUNAN

BIDANG : Gedung dan Bangunan
KELOMPOK : BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA
SUB KELOMPOK : BANGUNAN GEDUNG KANTOR
SUB SUB KELOMPOK : Bangunan Gedung Kantor Lainnya

Kode UAKPB : [illegible]
Nama UAKPB : LAPAS PEREMPUAN KELAS [illegible] TENGGARONG

I. UNIT BARANG

1. Luas Bangunan : [illegible]
   Luas Dasar Bangunan : [illegible]
2. Jumlah Lantai : [illegible]
3. Tipe : [illegible]
4. Tahun Selesai Dibangun/Digunakan : -
5. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) :
   No. : Tanggal :
6. Letak/Lokasi :
   - Provinsi : KALIMANTAN TIMUR
   - Kabupaten/Kota : KAB. KUTAI KARTANEGARA
   - Kecamatan : Tenggarong
   - Kelurahan/Desa : Tenggarong
   - Jalan : Jl. [illegible] No.37
   - Kode Pos : [illegible]
7. Nomor KIB Tanah :

II. UNIT PEMAKAI

1. Nama Unit : -
2. Alamat : -

III. PENGADAAN

1. Cara Perolehan : [illegible]
2. Dari : -
3. Tgl. Perolehan : [illegible]
4. Kondisi Perolehan : Baik
5. Harga Perolehan : Rp [illegible]
6. Dasar Harga :
7. Sumber Dana :
   No. : -
   Tgl. :

IV. NILAI/HARGA LAINNYA

1. Nilai Buku : Rp [illegible]
2. Nilai Akum. Penyusutan : Rp [illegible]
3. Nilai Buku [illegible] : Rp [illegible]
4. Nilai Wajar / Tanggal Penilaian : Rp. 0
5. Nilai [illegible] / Tahun : Rp. 0

V. CATATAN KONDISI

1. Status Penggunaan : Digunakan sendiri untuk operasional
2. [illegible] : -
3. Status Hukum : Tidak Ada Sengketa
4. Catatan Lainnya : -

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	FOTO 4

Dibuat Oleh : Tanggal :
Nama Pejabat : Tri Wuranda
Jabatan/Satuan Kerja : [illegible] LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS [illegible] TENGGARONG
Tanda tangan dan Stempel :

Diketahui :
Nama : [illegible]
Jabatan : [illegible]
Tanda tangan dan Stempel :

*) Coret yang tidak perlu

UAPB : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
UAPPB-E1 : DITJEN PEMASYARAKATAN
UAPPB-W : KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALTIM (KAL-KALTIM)

[illegible]
[illegible]

KARTU IDENTITAS BARANG
GEDUNG DAN BANGUNAN

BIDANG : Gedung dan Bangunan
KELOMPOK : BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA
SUB KELOMPOK : BANGUNAN GEDUNG KANTOR
SUB-SUB KELOMPOK : Bangunan Gedung Kantor Lainnya

Kode UAKPB : [illegible]
Nama UAKPB : LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

I. UNIT BARANG

1. Luas Bangunan : [illegible]
2. Luas Dasar Bangunan : [illegible]
3. Jumlah Lantai : 1 Lt.
4. Tipe : [illegible]
5. Tahun Selesai Dibangun/Digunakan : -
6. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
   No : Tanggal :
7. Letak/Lokasi
   - Provinsi : KALIMANTAN TIMUR
   - Kabupaten/Kota *) : KAB. KUTAI KARTANEGARA
   - Kecamatan : Tenggarong
   - Kelurahan/Desa *) : Tenggarong
   - Alamat : [illegible]
   - RT/RW/KODE POS : [illegible]
8. Nomor SIP Tanah : -

II. UNIT PEMAKAI

1. Nama Unit :
2. Alamat :

III. PENGADAAN

1. Cara Perolehan : [illegible]
2. Dari : -
3. Tgl. Perolehan : [illegible]
4. Kondisi Perolehan : Baik
5. Biaya Perolehan : [illegible]
6. Dasar Harga : -
7. Sumber Dana :
   No : -
   Tgl :

IV. NILAI HARGA LAINNYA

1. Nilai Buku : [illegible]
2. Nilai Akum. Penyusutan : [illegible]
3. NJOP Tanah : [illegible]
   Tanggal Penilaian
4. Nilai Wajar : Rp.0
   Tanggal Penilaian
5. NJOP/NJKP : Rp.0
   Tahun

V. DATA DAN PENGGUNAAN

1. Status Penggunaan : Digunakan sendiri untuk operasional
2. Digunakan pihak lain :
3. Status Hukum : [illegible]
4. Catatan Lainnya : -

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	FOTO 4

Dibuat di Tgl :
Nama Pejabat : [illegible]
Jabatan/Kedudukan : KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Tanda tangan dan Stempel :

Dicek Tgl
Nama : [illegible]
Jabatan : [illegible]
Tanda tangan dan Stempel :

*) Coret yang tidak perlu

UAPB : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
UAPPB-E1 : DITJEN PEMASYARAKATAN
UAPPB-W : KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN [illegible]

[illegible]
[illegible]

KARTU IDENTITAS BARANG
GEDUNG DAN BANGUNAN

BIDANG : Gedung dan Bangunan
KELOMPOK : BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA
SUB KELOMPOK : BANGUNAN GEDUNG KANTOR
SUB-SUB KELOMPOK : Bangunan Gedung Kantor Lainnya

[illegible] : [illegible]
Nama UAKPB : LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

I. IDENTITAS BARANG

1. Luas Bangunan : [illegible]
2. Luas Dasar Bangunan : 250 m²
3. Jumlah Lantai : [illegible]
4. Tipe : [illegible]
5. Tahun Selesai Dibangun / Digunakan :
6. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
   Nomor : Tanggal :
7. Letak/Lokasi :
   - Provinsi : KALIMANTAN TIMUR
   - Kabupaten/Kota : KAB. KUTAI KARTANEGARA
   - Kecamatan : Tenggarong
   - Kelurahan/Desa : Tenggarong
   - Jalan : [illegible]
   - RT/RW/KODE POS : [illegible]
8. Status Hak Tanah :

II. UNIT PEMAKAI

1. Nama Unit :
2. Alamat :

III. PENGADAAN

1. Dari/Perolehan : [illegible]
2. [illegible] : -
3. Tgl. Perolehan : [illegible]
4. Kondisi Perolehan : Baik
5. Nilai Perolehan : [illegible]
6. Dasar Harga : -
7. Sumber Dana :
   No :
   Tgl :

IV. NILAI/HARGA LAINNYA

1. Nilai [illegible] : Rp [illegible]
2. Nilai Akum. Penyusutan : Rp [illegible]
3. Nilai Buku : Rp [illegible]
   Tanggal Buku :
4. Nilai Wajar : Rp 0
   Tanggal Penilaian :
5. Nilai NJOP : Rp 0
   Tahun :

V. CATATAN PENTING

1. Status Penggunaan : Digunakan sendiri untuk operasional
2. Digunakan untuk/oleh : -
3. Status Hukum : [illegible]
4. Catatan Lainnya : -

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	FOTO 4

Dicetak UPB :
Nama Pejabat : Tri Wiranti
Jabatan Struktural : KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Tanda tangan dan Cap :

Tgl :
Nama : [illegible]
Jabatan : [illegible]
Tanda tangan :

*) Coret yang tidak perlu

UAPB : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
UAPPB-E1 : DITJEN PEMASYARAKATAN
UAKPB-W : KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN TIMUR

Tanggal : [illegible]
[illegible]

KARTU IDENTITAS BARANG
GEDUNG DAN BANGUNAN

BIDANG : Gedung dan Bangunan
KELOMPOK : BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA
SUB KELOMPOK : BANGUNAN GEDUNG KANTOR
SUB-SUB KELOMPOK : Bangunan Gedung Kantor Lainnya

Kode UAKPB : [illegible]
Nama UAKPB : LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A TENGGARONG

I. UNIT BARANG

1. Luas Bangunan : [illegible] m²
2. Luas Dasar Bangunan : [illegible] m²
3. Jumlah Lantai : 1 Lt
4. Type : Gedung Kantor Lainnya
5. Tahun Selesai Dibangun / Digunakan : [illegible]
6. Tgl Mulai Kons Digunakan / Pakai : [illegible]
   Konstruksi : Tunggal
7. Letak / Alamat :
   - Provinsi : KALIMANTAN TIMUR
   - Kabupaten / Kota *) : KAB. KUTAI KARTANEGARA
   - Kecamatan : Tenggarong
   - Kelurahan / Desa *) : Tenggarong
   - Jalan : Jl. [illegible] No 31
   - RT / RW / Kode Pos : [illegible]
8. Nomor KIB Tanah :
   :

II. UNIT PEMAKAI

1. Nama Unit : -
2. Alamat : -

III. PEROLEHAN

1. Cara Perolehan : [illegible]
2. Dari :
3. Tgl Perolehan : [illegible]
4. Kondisi Perolehan : Baik
5. Harga Perolehan : Rp [illegible]
6. Dasar Harga : -
7. Bukti/Dasar : -
   Nomor :
   Tgl :

IV. NILAI DAN LAINNYA

1. Nilai Buku : Rp [illegible]
2. Akum. Penyusutan : Rp [illegible]
3. Nilai Jual : Rp [illegible]
   Metode Lainnya :
4. Nilai Agunan : Rp 0
   Tanggal Penilaian :
5. Nilai Sewa : Rp 0
   Tahun :

V. CATATAN PENGISI

1. Status Penggunaan : Digunakan sendiri untuk operasional
2. Digunakan untuk Fungsi : -
3. Status Hukum : [illegible]
4. Catatan Lainnya : -

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	FOTO 4

Dibuat di / Tgl :
Nama Pembuat : Tri Wiranti
Jabatan Pembuat : KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Tanda Tangan dan Stempel :

Dicetak tgl :
Nama : Aplikasi [illegible]
Informasi : Persediaan
Tanda tangan dan Stempel

*) Coret yang tidak perlu

UAPB : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
UAPPB-E1 : DITJEN PEMASYARAKATAN
UAPPB-W : KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN TIMUR (KALTIM)

Kode : [illegible]
[illegible] 2014

KARTU IDENTITAS BARANG
GEDUNG DAN BANGUNAN

BIDANG : Gedung dan Bangunan
KELOMPOK : BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA
SUB KELOMPOK : BANGUNAN GEDUNG KANTOR
SUB-SUB KELOMPOK : Bangunan Gedung Kantor Permanen

Kode UAKPB : [illegible]
Nama UAKPB : [illegible] TENGGARONG

I. UNIT BARANG
1. Luas Bangunan : [illegible] m2
2. Luas Dasar Bangunan : [illegible] m2
3. Jumlah Lantai : [illegible]
4. Tipe : [illegible]
5. Tahun Selesai Dibangun / Digunakan :
6. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) :
   No : Tanggal :
7. Lokasi Bangunan :
   - Provinsi : KALIMANTAN TIMUR
   - Kabupaten/Kota *) : KAB. KUTAI KARTANEGARA
   - Kecamatan : Tenggarong
   - Kelurahan / Desa *) : Tenggarong
   - Jalan : Jalan [illegible] No. 17
   - [illegible] : [illegible]
8. [illegible] : -

II. UNIT PEMAKAI
1. Nama [illegible]
2. Alamat -

III. PENGADAAN
1. Cara Perolehan : [illegible]
2. Dari : -
3. Tgl Perolehan : [illegible]
4. Kondisi Perolehan : Baik
5. [illegible] : [illegible]
6. [illegible] : -
7. Sumber Dana
   No :
   Tgl :

IV. NILAI/HARGA LAINNYA
1. Nilai [illegible] : Rp [illegible]
2. Akumulasi Penyusutan : Rp [illegible]
3. Nilai Buku : Rp [illegible]
   [illegible]
4. Nilai Wajar : Rp 0
   Tanggal Penilaian :
   Nilai NJOP : Rp 0
   Tahun :

V. CATATAN [illegible]
1. Status Penggunaan : [illegible]
2. [illegible] : -
3. Status Hukum : Tidak Ada Sengketa
4. Catatan Lainnya : -

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	FOTO 4

Dibuat di / Tgl
Nama Pejabat : [illegible]
Jabatan : KEPALA [illegible] KELAS [illegible] TENGGARONG
Tanda tangan
& Stempel

Diisi Tgl
Nama : [illegible]
Jabatan : [illegible]
Tanda tangan :
& Stempel

*) Coret yang tidak perlu

UAKPB : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
UAPPB-E1 : DITJEN PEMASYARAKATAN
UAPPB-W : KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN TIMUR [illegible]

Form : [illegible]
[illegible]

KARTU IDENTITAS BARANG
GEDUNG DAN BANGUNAN

BIDANG : Gedung dan Bangunan
KELOMPOK : BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA
SUB KELOMPOK : BANGUNAN GEDUNG KANTOR
SUB-SUB KELOMPOK : Bangunan Gedung Kantor Permanen

Kode UAKPB : [illegible]
Nama UAKPB : LAPAS PEREMPUAN KELAS II A TENGGARONG

I. UNIT BARANG

1. Luas Bangunan : 30 M²
2. Luas Dasar Bangunan : 30 M²
3. Jumlah Lantai : 1 Lt.
4. Tipe : [illegible]
5. Status Tanah/Bangunan/Digunakan : [illegible]
6. [illegible]
   No : - Tanggal : -
7. Letak/Alamat
   Provinsi : KALIMANTAN TIMUR
   - Kabupaten/Kota*) : KAB. KUTAI KERTANEGARA
   - Kecamatan : Tenggarong
   - Kelurahan/Desa*) : Tenggarong
   Jalan : [illegible]
   RT/RW : [illegible]
8. [illegible] :

II. UNIT PEMAKAI

1. Kode Unit : -
2. [illegible] : -

III. PENGADAAN

1. Cara Perolehan : [illegible]
2. [illegible] : -
3. Tgl Perolehan : [illegible]
4. Kondisi Perolehan : Baik
5. [illegible] : [illegible]
6. [illegible] : -
7. Sumber Dana :
   No : -
   Tgl :

IV. NILAI/HARGA LAINNYA

1. Nilai Buku : Rp [illegible]
2. [illegible] : Rp [illegible]
3. Nilai Dasar : Rp [illegible]
   [illegible] :
4. Nilai Wajar : Rp 0
   Tanggal Penilaian :
5. [illegible] : Rp 0
   [illegible] :

V. CATATAN PENGISI

1. Status Penggunaan : Digunakan [illegible]
2. [illegible] :
3. Status Tanah : [illegible]
4. Catatan Lainnya :

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	FOTO 4

Diketahui Tgl :
Nama Pejabat : [illegible]
Jabatan : KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Tanda Tangan dan Stempel

Dibuat Tgl :
Nama : [illegible]
Jabatan : [illegible]
Tanda Tangan dan Stempel

*) Coret yang tidak perlu

UAPB : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
UAPPB-E1 : DITJEN PEMASYARAKATAN
UAPPB-W : KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN TIMUR - KALTIM

Form : [illegible]
[illegible]

KARTU IDENTITAS BARANG
GEDUNG DAN BANGUNAN

BIDANG : Gedung dan Bangunan
KELOMPOK : BANGUNAN GEDUNG [illegible] KERJA
SUB KELOMPOK : BANGUNAN KESEHATAN
SUB-SUB KELOMPOK : [illegible] Umum

Kode LOKASI : [illegible]
Nama UAKPB : LAPAS PEREMPUAN KELAS II A TENGGARONG

I. UNIT BARANG

1. Luas Bangunan : [illegible] m²
2. Luas Dasar Bangunan : [illegible] m²
3. Jumlah Lantai : [illegible] Lt
4. Tipe : [illegible]
5. Tahun Selesai Dibangun / Dibongkar : -
6. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
   No : -   Tanggal : -
7. Letak Bangunan :
   - Provinsi : KALIMANTAN TIMUR
   - Kabupaten / Kota *) : KAB. KUTAI KARTANEGARA
   - Kecamatan : Tenggarong
   - Kelurahan / Desa *) : Tenggarong
   - Jalan : [illegible]
   - RT / RW / KODE : [illegible]
8. Nomor KIB Tanah :
   :

II. UNIT PEMAKAI

1. Nama UPB : -
2. Alamat : -

III. PENGADAAN

1. Cara Perolehan : [illegible]
2. Dari :
3. Tgl. Perolehan : [illegible]
4. Kondisi Perolehan : Baik
5. Biaya Perolehan : RP [illegible]
6. Dasar Harga :
7. [illegible] :

No : -
Tgl

IV. NILAI HARGA LAINNYA

1. Nilai Buku : Rp [illegible]
2. Akumulasi Penyusutan : Rp [illegible]
3. Nilai Taksir : Rp [illegible]
   Periode Laporan
4. Nilai Wajar : Rp 0
   Tanggal Penilaian :
5. Nilai NJOP : Rp 0
   Tahun

V. CATATAN PENGISI

1. Status Penggunaan : [illegible]
2. [illegible] : -
3. [illegible] : [illegible]
4. Catatan Lainnya : -

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	FOTO 4
			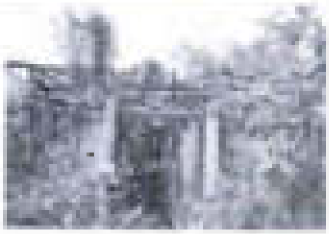

Dibuat di Tgl :
Nama [illegible] : [illegible]
[illegible] : LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Tanda tangan dan Stempel :

Diisi Tgl
Nama : [illegible]
Jabatan : [illegible]
Tanda tangan dan Stempel :

*) Coret yang tidak perlu

UAPB : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
UAPPB-E1 : DITJEN PEMASYARAKATAN
UAPPB-W : KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM [illegible] KALTIM

[illegible]

KARTU IDENTITAS BARANG
GEDUNG DAN BANGUNAN

BIDANG : Gedung dan Bangunan
KELOMPOK : BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA
SUB KELOMPOK : BANGUNAN KESEHATAN
SUB-SUB KELOMPOK : Bangunan [illegible]

KODE UAKPB : 01[illegible]
NAMA UAKPB : LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

I. UNIT BARANG

1. Luas Bangunan : [illegible] m²
2. Luas Dasar Bangunan : [illegible] m²
3. Jumlah Lantai : [illegible]
4. Tipe : Pembangunan [illegible]
5. Tahun Selesai Dibangun / Digunakan :
6. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
   Nomor :
   Tanggal :
7. Letak Bangunan
   Provinsi : KALIMANTAN TIMUR
   Kabupaten / Kota *) : KAB. KUTAI KARTANEGARA
   Kecamatan : Tenggarong
   Kelurahan / Desa *) : Tenggarong
   Jalan : Jl. [illegible]
   RT / RW / Kode Pos : [illegible]
8. Status Tanah : -

II. UNIT PEMAKAI

1. Nama Unit :
2. Alamat :

III. PENGADAAN

1. Cara Perolehan : [illegible]
2. Dari :
3. Tgl Perolehan : [illegible]
4. Kondisi Bangunan : Baik
5. Harga Perolehan : [illegible]
6. Dasar Harga :
7. Bukti Dana :
   No. : -
   Tgl : -

IV. NILAI HARGA LAINNYA

1. Nilai Buku : Rp [illegible]
2. Nilai Akum. Penyusutan : Rp [illegible]
3. Nilai [illegible] : Rp [illegible]
   Tanggal [illegible] :
4. Nilai Wajar : Rp 0
   Tanggal Penilaian :
5. Nilai NJOP : Rp 0
   Tahun

V. CATATAN PENGURUS

1. Status Penggunaan : Digunakan sendiri [illegible]
   Digunakan oleh pihak lain : -
2. [illegible] : [illegible]
3. Catatan Lainnya :

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	FOTO 4
			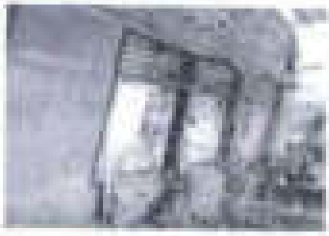

Tempat, Tgl :
Kuasa Pengguna : [illegible]
Jabatan : KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Tanda tangan dan Stempel :

Tempat, Tgl :
Nama : [illegible]
Jabatan : [illegible]
Tanda tangan dan Stempel :

*) Coret yang tidak perlu

UAPB	:	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
UAPPB-E1	:	[illegible] PEMASYARAKATAN
UAPPB-W	:	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI [illegible] KALTIM

[illegible]
[illegible]

KARTU IDENTITAS BARANG
GEDUNG DAN BANGUNAN

BIDANG	: Gedung dan Bangunan
KELOMPOK	: BANGUNAN GEDUNG [illegible]
SUB KELOMPOK	: BANGUNAN [illegible]
SUB SUB KELOMPOK	: [illegible]

Kode UAKPB : [illegible]
Nama UAKPB : LAPAS [illegible] KELAS II A TENGGARONG

I. UNIT BARANG

1. Luas Bangunan	:	[illegible] M2
2. Luas Dasar Bangunan	:	[illegible] M2
3. Jumlah Lantai	:	[illegible]
4. Tipe	:	[illegible]
5. Tahun Selesai Dibangun / Digunakan	:	-
6. [illegible] Bangunan (IMB)		
No : -		Tanggal :
7. Lokasi Bangunan :		
- Provinsi	:	KALIMANTAN TIMUR
- Kabupaten / Kota *)	:	KAB. KUTAI KARTANEGARA
- Kecamatan	:	Tenggarong
- Kelurahan / Desa *)	:	Tenggarong
- Jalan	:	Jl. [illegible]
- RT / RW / RK	:	[illegible]
8. Nomor [illegible]	:	-

II. PENGADAAN

1. Cara Perolehan	:	[illegible]
2. Dari		
3. Tgl. Perolehan	:	[illegible]
4. Kondisi Perolehan	:	Baik
5. Harga Perolehan	:	RP [illegible]
6. Data Lainnya	:	-
7. Sumber Dana		
No : -		
Tgl :		

III. UNIT PEMAKAI

1. Nama Unit	:	
2. Alamat	:	-

IV. NILAI HARGA [illegible]

1. Nilai Buku	:	Rp [illegible]
2. Nilai [illegible]	:	Rp [illegible]
3. Total [illegible]	:	Rp [illegible]
Periode Laporan	:	
4. Nilai [illegible]	:	Rp 0
Tanggal [illegible]		
5. Nilai NJOP	:	Rp 0
Tahun		

V. CATATAN PENGGUNAAN

1. [illegible]	:	[illegible]
2. [illegible]	:	-
3. Status Hukum	:	[illegible]
4. [illegible]	:	-

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	FOTO 4

[illegible] Tgl	:	
Nama Pejabat	:	[illegible]
[illegible] Jabatan	:	KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS [illegible]
Tanda Tangan dan Stempel	:	

[illegible] Tgl	:	
Nama	:	[illegible]
Jabatan		[illegible]
Tanda Tangan dan Stempel		

*) Coret yang tidak perlu

UAPB : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
UAPPB-E1 : DITJEN PEMASYARAKATAN
UAPPB-W : KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN KALTIM

Form : [illegible]
[illegible]

KARTU IDENTITAS BARANG GEDUNG DAN BANGUNAN

BIDANG : Gedung dan Bangunan
KELOMPOK : BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA
SUB KELOMPOK : BANGUNAN KESEHATAN
SUB-SUB KELOMPOK : Bangunan [illegible]

Kode UAKPB : [illegible]
Nama UAKPB : LAPAS PEREMPUAN KELAS II A TENGGARONG

I. INFO BARANG

1. Luas Bangunan : [illegible]
2. Luas Dasar Bangunan : [illegible] m²
3. Jumlah Lantai : [illegible]
4. [illegible] : [illegible]
5. Tahun Selesai Dibangun / Digunakan :
6. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
   No. Tanggal :
7. Lokasi Bangunan :
   - Provinsi : KALIMANTAN TIMUR
   - Kabupaten/Kota : KAB. KUTAI KERTANEGARA
   - Kecamatan : Tenggarong
   - Kelurahan/Desa : Tenggarong
   - Jalan : [illegible]
   - RT/RW/Kode Pos : [illegible]
8. [illegible] :

II. UNIT PEMAKAI

1. Nama Unit : -
2. Alamat

III. PENGADAAN

Cara Perolehan : [illegible]
2. Dari : -
3. Tgl Perolehan : [illegible]
4. Kondisi Perolehan : Baik
5. Harga Perolehan : [illegible]
6. Keterangan : -
7. Status Hukum
   No. :
   Tgl :

IV. NILAI DAN HARGA LAINNYA

1. Nilai Buku : Rp. [illegible]
2. Akumulasi Penyusutan : Rp. [illegible]
3. Nilai [illegible] : Rp. [illegible]
   [illegible] :
4. [illegible] : [illegible]
   [illegible]
5. Nilai [illegible] : Rp. 0
   Tahun :

V. CATATAN PENGISI

1. Status Penggunaan : Digunakan sendiri untuk operasional
2. Digunakan untuk [illegible] : -
3. Status [illegible] : Tidak Ada [illegible]
4. Keterangan

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	FOTO 4
			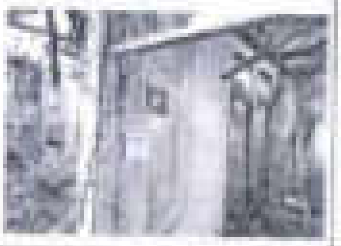

Dibuat di / Tgl :
Nama Pejabat : Tri Wiarsih
Jabatan Struktural : KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Tanda tangan dan Stempel

Dan Tgl
Nama : [illegible]
Jabatan : Pelaksana
Tanda tangan dan Stempel

*) Coret yang tidak perlu

UAPB : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
UAPPB-E1 : DITJEN PEMASYARAKATAN
UAPPB-W : KANWIL DIREKTORAT HUKUM DAN HAM KALIMANTAN TIMUR

Form : [illegible]
[illegible]

KARTU IDENTITAS BARANG
GEDUNG DAN BANGUNAN

BIDANG : Gedung dan Bangunan
KELOMPOK : BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA
SUB KELOMPOK : [illegible]
SUB-SUB KELOMPOK : [illegible]

Kode Satker : [illegible]
Nama Satker : LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

I. UNIT BARANG

1. Luas Tanah : [illegible] m²
2. Luas Lantai Bangunan : [illegible] m²
3. Jumlah Lantai : [illegible]
4. Tipe : [illegible]
5. Tahun selesai Dibangun / Digunakan : [illegible]
6. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) :
   No. : -
   Tanggal :
7. Letak Bangunan :
   - Provinsi : KALIMANTAN TIMUR
   - Kabupaten / Kota : KAB. KUTAI KARTANEGARA
   - Kecamatan : Tenggarong
   - Kelurahan / Desa : Tenggarong
   - Jalan : [illegible]
   - RT / RW / RK : [illegible]
8. Nomor SKI Tanah : -

II. UNIT PEMAKAI

1. Nama Unit : -
2. Alamat :

III. PENGADAAN

1. Cara Perolehan : [illegible]
2. Dari : -
3. Tgl Perolehan : [illegible]
4. Kondisi Perolehan : [illegible]
5. Biaya Perolehan : Rp [illegible]
6. Dasar Harga : -
7. Bukti Perolehan
   No. : -
   Tgl :

IV. NILAI DAN HARGA LAINNYA

1. Nilai Buku : Rp [illegible]
2. Nilai Akum. Penyusutan : Rp [illegible]
3. Nilai Sisa : Rp [illegible]
   Periode Laporan :
4. Nilai Wajar : Rp [illegible]
   Tahun Penilaian :
5. Nilai NJOP : Rp [illegible]
   Tahun :

V. CATATAN PENTING

1. Status Penggunaan : [illegible]
2. Digunakan untuk Kantor : -
3. Status Hukum : [illegible]
4. Catatan Lainnya :

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3

FOTO 4

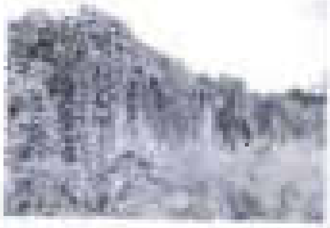

Diisi Tgl. :
Nama Pejabat : [illegible]
Jabatan Struktural : KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Tanda tangan dan Stempel :

Diisi Tgl. :
Nama : [illegible]
Jabatan : [illegible]
Tanda tangan dan Stempel :

*) Coret yang tidak perlu

UAPB : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
UAPPB-E1 : [illegible]
UAPPB-W : KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN
KALTIM

[illegible]
[illegible]

KARTU IDENTITAS BARANG
GEDUNG DAN BANGUNAN

BIDANG : Gedung dan Bangunan
KELOMPOK : BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA
SUB KELOMPOK : BANGUNAN GEDUNG KANTOR
SUB-SUB KELOMPOK : Bangunan Gedung [illegible]

Kode UAKPB : [illegible]
Nama UAKPB : [illegible]

I. UNIT BARANG

1. Luas Bangunan : [illegible]
2. Luas Tapak Bangunan : [illegible]
3. Jumlah Lantai : [illegible]
4. Tipe : [illegible]
5. Tahun Selesai Dibangun/Direnovasi : -
6. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
   No. : -   Tanggal :
7. Lokasi Bangunan
   - Propinsi : KALIMANTAN TIMUR
   - Kabupaten/Kota : [illegible]
   - Kecamatan : Tenggarong
   - Kelurahan/Desa : Tenggarong
   - Jalan : [illegible]
   - RT/RW : [illegible]
8. Nomor KIB Tanah : -
   :

II. UNIT PEMAKAI

1. Nama Unit : -
2. Alamat :

IV. PENGADAAN

1. Cara Perolehan : [illegible]
2. Dari :
3. Tanggal Perolehan : [illegible]
4. Tahun Anggaran : [illegible]
5. Biaya Perolehan : Rp [illegible]
6. Dasar Harga
7. Nomor Bukti :
   [illegible]
   Tgl.

V. NILAI/HARGA LAINNYA

1. Nilai Buku : Rp [illegible]
2. Nilai Akum. Penyusutan : Rp [illegible]
3. Nilai Wajar : Rp [illegible]
   Periode Laporan :
4. Nilai Wajar : Rp 0
   Tanggal Penilaian :
5. Nilai NJOP : Rp 0
   Tahun

VI. CATATAN KONDISI

1. Kondisi Bangunan : [illegible]
2. Digunakan untuk : -
3. Status Penggunaan : [illegible]
4. Catatan Lainnya :

FOTO 1

FOTO 2

FOTO 3

FOTO 4

[illegible], Tgl.
Kuasa Pengguna
Barang/Penanggung Jawab : [illegible]
KEPALA [illegible]

[illegible]
NIP

Dibuat Tgl. :
Oleh : [illegible]
Jabatan : [illegible]
Tanda Tangan :
dan Stempel

*) Coret yang tidak perlu

UAPB : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
UAPPB-E1 : DITJEN PEMASYARAKATAN
SATKER : KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN TIMUR KALTIM

[illegible]
[illegible]

KARTU IDENTITAS BARANG
GEDUNG DAN BANGUNAN

BIDANG : Gedung dan Bangunan
KELOMPOK : BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA
SUB KELOMPOK : BANGUNAN [illegible]
SUB SUB KELOMPOK : Bangunan [illegible]

KODE BARANG : [illegible]
KODE LOKASI : LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

I. UNIT BARANG

1. Luas Bangunan : [illegible]
2. Luas Dasar Bangunan : [illegible]
3. Jumlah Lantai : [illegible]
4. Tipe : Gedung [illegible]
5. Tahun Selesai Dibangun / Digunakan :
6. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
   Nomor : Tanggal :
7. Lokasi Bangunan
   - Provinsi : KALIMANTAN TIMUR
   - Kabupaten / Kota : KAB. KUTAI KARTANEGARA
   - Kecamatan : Tenggarong
   - Kelurahan / Desa : Tenggarong
   - Jalan : [illegible]
   - RT / RW / Kode Pos : [illegible]
8. Nomor KIB Tanah :

II. UNIT PEMAKAI

1. Nama Unit : -
2. Alamat : -

III. PENGADAAN

1. Cara Perolehan : [illegible]
2. Dari : -
3. Tgl Perolehan : [illegible]
4. Kondisi Perolehan : Baik
5. Nilai Perolehan : Rp [illegible]
6. Dana [illegible]
7. Sumber Dana
   No. : -
   Tgl. :

IV. NILAI / HARGA LAINNYA

1. Nilai Wajar : Rp [illegible]
2. Nilai Akum. Penyusutan : Rp [illegible]
3. Nilai Buku : Rp [illegible]
   Untuk Laporan :
4. Nilai Asuransi : Rp [illegible]
   Tanggal Berakhir
5. Nilai Sewa : Rp [illegible]
   Dasar

V. CATATAN PENGURUS

1. Status Penggunaan : Digunakan sendiri untuk operasional
2. Digunakan [illegible] : -
3. Status Hukum : Tidak Ada Sengketa
4. Catatan Lainnya : -

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	FOTO 4
			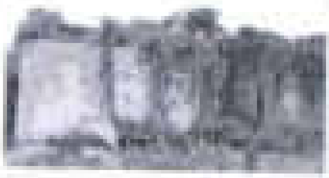

Dibuat di Tgl. :
Nama Pejabat : Tri [illegible]
Nama Jabatan : KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Tanda tangan dan Stempel :

Dibuat Tgl.
Nama : [illegible]
Jabatan : [illegible]
Tanda tangan dan Stempel :

Dicetak yang [illegible]

UAPB : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
UAPPB-E1 : DITJEN PEMASYARAKATAN
UAPPB-W : KANWIL [illegible] DAN HAM [illegible]
KALTIM

Form : KIB [illegible]
[illegible]

KARTU IDENTITAS BARANG
GEDUNG DAN BANGUNAN

BIDANG : Gedung dan Bangunan
KELOMPOK : BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA
SUB KELOMPOK : BANGUNAN KESEHATAN
SUB-SUB KELOMPOK : Bangunan Rumah Sakit [illegible]

KODE BARANG : [illegible]
NAMA SATKER : LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

I. UNIT BARANG

1. Luas Bangunan : [illegible] m²
2. Luas Dasar Bangunan : [illegible] m²
3. Jumlah Lantai : [illegible]
4. Tipe : [illegible]
5. [illegible] : -
6. [illegible] Bangunan (IMB)
   No. Tanggal :
7. Lokasi Bangunan
   - Provinsi : KALIMANTAN TIMUR
   - Kabupaten/Kota : KAB. KUTAI KARTANEGARA
   - Kecamatan : Tenggarong
   - Kelurahan/Desa : Tenggarong
   - Jalan : [illegible]
   - [illegible] : [illegible]
8. [illegible] : -

II. UNIT PEMAKAI

1. Nama Unit : -
2. Alamat : -

III. PENGADAAN

1. Cara Perolehan : [illegible]
2. Dari : -
3. Tgl. Perolehan : [illegible]
4. [illegible] : Baik
5. Biaya Perolehan : Rp [illegible]
6. Dasar Harga : -
7. Sumber Dana :
   No.
   Tgl.

IV. NILAI/HARGA [illegible]

1. [illegible] : Rp. [illegible]
2. Akumulasi Penyusutan : Rp. [illegible]
3. Nilai Buku : Rp [illegible]
   Amortisasi :
4. Nilai Wajar : [illegible]
   Tanggal Penilaian :
5. Nilai NJOP : Rp. 0
   Tahun :

V. CATATAN PENTING:

1. Status Penggunaan : Digunakan sendiri untuk operasional
2. [illegible] : -
3. Status Hukum : Tidak Ada Sengketa
4. [illegible] :

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	FOTO 4

[illegible] :
Nama Pejabat : [illegible]
Nama Satker : KEMENTERIAN [illegible] PEMASYARAKATAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN [illegible] TENGGARONG
Tanda tangan
Pejabat :

[illegible]
Status : [illegible]
[illegible] : [illegible]
Tanda Tangan
[illegible] :

*) Coret yang tidak perlu

UAPB : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
UAPPB-E1 : DITJEN PEMASYARAKATAN
UAPPB-W : KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM [illegible]
KALTIM

Tgl. : [illegible]
[illegible]

KARTU IDENTITAS BARANG
GEDUNG DAN BANGUNAN

BIDANG : Gedung dan Bangunan
KELOMPOK : BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA
SUB KELOMPOK : [illegible]
SUB-SUB KELOMPOK : [illegible]

Kode UAKPB : [illegible]
Nama UAKPB : LAPAS PEREMPUAN KELAS II A TENGGARONG

I. UNIT BARANG

1. Luas Bangunan : [illegible]
2. Luas Dasar Bangunan : [illegible]
3. Jumlah Lantai : [illegible]
4. Tipe : [illegible]
5. Tahun Mulai Digunakan / Dibangun : [illegible]
6. IMB (Izin Mendirikan Bangunan) : [illegible]
   Nomor : [illegible]
7. Alamat Lengkap :
   - Provinsi : KALIMANTAN TIMUR
   - Kabupaten / Kota : KAB. KUTAI KERTANEGARA
   - Kecamatan : Tenggarong
   - Kelurahan / Desa : Tenggarong
   - Jalan : Jl. [illegible]
   - Kode Pos : [illegible]
8. Nomor [illegible] : -
   :

II. UNIT PEMAKAI

1. Nama Unit : [illegible]
2. Alamat : -

III. PENGADAAN

1. Cara Perolehan : [illegible]
2. Dari : -
3. Tgl Perolehan : [illegible]
4. Kondisi Awal : Baik
5. Harga Perolehan : Rp [illegible]
6. Bukti [illegible] :
7. [illegible] :

Nomor : -
Tgl :

IV. NILAI/HARGA LAINNYA

1. Nilai Buku : Rp [illegible]
2. Akumulasi Penyusutan : Rp [illegible]
3. Nilai [illegible] : Rp [illegible]
   Periode [illegible] :
4. Nilai Wajar : Rp 0
   Tanggal Penilaian :
5. Nilai NJOP : Rp 0
   Tahun :

V. CATATAN [illegible]

1. Status Penggunaan : [illegible]
2. Digunakan untuk : -
3. Asal Usul : [illegible]
4. Catatan Lainnya : -

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	FOTO 4

Dicetak Tgl :
Nama Pejabat : [illegible]
Jabatan Pejabat : KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Tandatangan dan Stempel

Dibuat Tgl :
Nama : [illegible]
Jabatan : [illegible]
Tandatangan dan Stempel :

*) Coret yang tidak perlu

UAPB : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
UAPPB-E1 : DITJEN PEMASYARAKATAN
UAPPB-W : KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN TIMUR
[illegible]

[illegible]
[illegible]

KARTU IDENTITAS BARANG
GEDUNG DAN BANGUNAN

BIDANG : Gedung dan Bangunan
KELOMPOK : BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA
SUB KELOMPOK : BANGUNAN GEDUNG TEMPAT [illegible]
SUB SUB KELOMPOK : Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya

KODE BARANG : [illegible]
UAKPB : LAPAS PEREMPUAN KELAS II A TENGGARONG

I. UNIT BARANG

1. Luas Bangunan : [illegible] m²
2. Luas Dasar Bangunan : [illegible] m²
3. Jumlah Lantai : [illegible] Lt.
4. Tipe : [illegible]
5. Tahun Pembuatan/Dibangun/Direnovasi
6. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
   No. Tanggal : -
7. Letak Bangunan
   - Provinsi : KALIMANTAN TIMUR
   - Kabupaten/Kota : KAB. KUTAI KARTANEGARA
   - Kecamatan : Tenggarong
   - Kelurahan/Desa : Tenggarong
   - Jalan : [illegible] No.37
   - RT/RW/Kode Pos : [illegible]
8. Nomor Kode Tanah : -

II. UNIT PEMAKAI

1. Nama Unit :
2. Alamat :

III. PENGADAAN

1. Cara Perolehan : [illegible]
2. Dari :
3. Tgl Perolehan : [illegible]
4. Kondisi Perolehan : Baik
5. Nilai Perolehan : [illegible]
6. Dasar Harga :
7. Sumber Dana :
   No. : -
   Tgl :

IV. NILAI HARGA LAINNYA

1. Nilai Buku : Rp [illegible]
2. Nilai Akum Penyusutan : Rp [illegible]
3. Nilai [illegible] : Rp [illegible]
   Jumlah [illegible] :
4. Nilai Asuransi : Rp 0
   Tanggal Asuransi :
5. Nilai [illegible] : Rp [illegible]
   [illegible]

V. CATATAN PENGGUNA

1. Status Penggunaan : Digunakan sendiri untuk operasional
2. [illegible] : -
3. [illegible] : [illegible]
4. Catatan Lainnya : -

FOTO 1 | FOTO 2 | FOTO 3 | FOTO 4

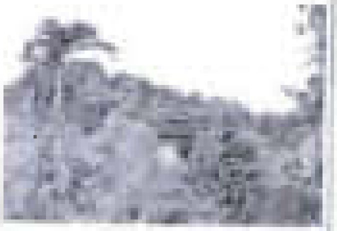

Dibuat oleh :
Nama Pejabat : [illegible]
Jabatan Struktural : KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Tanda tangan dan Stempel :

[illegible]
Nama : [illegible]
Jabatan : [illegible]
Tanda tangan dan Stempel

*) Coret yang tidak perlu

UAPB : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
UAPPB-E : DITJEN PEMASYARAKATAN
UAPPB-W : KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN TIMUR

[illegible]
[illegible]

KARTU IDENTITAS BARANG GEDUNG DAN BANGUNAN

BIDANG : Gedung dan Bangunan
KELOMPOK : BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA
SUBKELOMPOK : BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA
SUB-SUB KELOMPOK : [illegible]

Kode UAKPB : [illegible]
Nama UAKPB : LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA TENGGARONG

I. UNIT BARANG

1. Luas Bangunan : [illegible]
2. Luas Dasar Bangunan : [illegible]
3. Jumlah Lantai : [illegible]
4. Jenis : [illegible]
5. [illegible] : -
6. [illegible] IMB
   No. : -
   Tanggal : -
7. Lokasi Bangunan :
   - Provinsi : KALIMANTAN TIMUR
   - Kabupaten/Kota : KAB. KUTAI KARTANEGARA
   - Kecamatan : Tenggarong
   - Kelurahan/Desa : Tenggarong
   - Jalan : [illegible]
   - RT/RW/Kode Pos : [illegible]
8. [illegible] : -
   :

II. UNIT PEMAKAI

1. [illegible] :
2. [illegible] : -

III. PENGADAAN

1. Cara Perolehan : [illegible]
2. Dari :
3. Tgl. Perolehan : [illegible]
4. Kondisi Perolehan : Baik
5. Harga Perolehan : [illegible]
6. Dasar Harga : -
7. Sumber Dana :

No : -
Tgl

IV. NILAI HARGA LAINNYA

1. Nilai Buku : [illegible]
2. Akumulasi Penyusutan : [illegible]
3. [illegible] : [illegible]
   Periode Laporan :
4. Nilai Wajar : Rp 0
   Tanggal Penilaian :
5. [illegible] : Rp -
   Tahun :

V. CATATAN PENGISI

1. [illegible] : [illegible]
2. Digunakan untuk : -
3. [illegible] : [illegible]
4. Catatan Lainnya : -

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	FOTO 4

Dibuat Tgl :
Nama Petugas : [illegible]
Jabatan Petugas : KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA TENGGARONG
Tanda Tangan dan Stempel*)

Diteliti Tgl :
Nama : [illegible]
Jabatan : [illegible]
Tanda Tangan dan Stempel

*) Coret yang tidak perlu

UAPB : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
UAPPB-E1 : DITJEN PEMASYARAKATAN
UAPPB-W : KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN TIMUR

Form : [illegible]
[illegible]

KARTU IDENTITAS BARANG
GEDUNG DAN BANGUNAN

BIDANG : [illegible]
KELOMPOK : BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA
SUB KELOMPOK : BANGUNAN KESEHATAN
SUB-SUB KELOMPOK : [illegible]

KODE UAKPB : 01115[illegible]
NAMA UAKPB : LAPAS PEREMPUAN KELAS II A TENGGARONG

I. UNIT BARANG

1. [illegible] : [illegible]
2. [illegible] : [illegible]
3. [illegible] : 0 Lt
4. [illegible] : [illegible]
5. [illegible] : -
6. [illegible]
   [illegible] Tanggal :
7. [illegible]
   - [illegible] : KALIMANTAN TIMUR
   - Kabupaten/Kota*) : KAB. [illegible] KERTANEGARA
   - Kecamatan : Tenggarong
   - Kelurahan/Desa*) : Tenggarong
   - [illegible] : [illegible]
   - [illegible] : [illegible]
8. [illegible] : -

II. UNIT PEMAKAI

1. [illegible] : -
2. [illegible] : -

III. PENGADAAN

1. [illegible] : [illegible]
2. Dari : -
3. [illegible] : [illegible]
4. [illegible] : Baik
5. [illegible] : [illegible]
6. [illegible] : -
7. [illegible]

   [illegible] : -
   Tgl

IV. NILAI DAN HARGA LAINNYA

1. [illegible] : Rp. [illegible]
2. [illegible] : Rp. [illegible]
3. [illegible] : Rp. [illegible]
   [illegible] :
4. [illegible] : [illegible]
   [illegible]
5. [illegible] : Rp. 0
   Tahun :

V. CATATAN PENGISI

1. [illegible] : [illegible]
2. [illegible] : -
3. [illegible] : [illegible]
4. [illegible]

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	FOTO 4

[illegible] :
[illegible] : [illegible]
[illegible] : KEPALA [illegible] PEREMPUAN KELAS II A TENGGARONG
[illegible] :

[illegible] :
[illegible] : [illegible]
[illegible] : [illegible]
[illegible] :

*) Coret yang tidak perlu

UAPB : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
UAPPB-E1 : DIRJEN PEMASYARAKATAN
UAPPB-W : KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULTIM [illegible]
KALTIM

[illegible]
[illegible]

KARTU IDENTITAS BARANG
GEDUNG DAN BANGUNAN

BIDANG : Gedung dan Bangunan
KELOMPOK : TUGU/TANDA BATAS
SUB KELOMPOK : TUGU TANDA BATAS LAINNYA
SUB-SUB KELOMPOK : Tugu/Tanda Batas Lainnya

Kode UAKPB : [illegible]
Nama UAKPB : LAPAS PEREMPUAN KELAS II A TENGGARONG

I. DATA BANGUNAN

1. Luas Bangunan : [illegible] m²
2. Luas Dasar Bangunan : [illegible] m²
3. Jumlah Lantai : 1 Lt.
4. Tipe : Tugu/Tanda Batas Lainnya
5. [illegible] : -
6. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
   No : - Tanggal :
7. Letak Bangunan :
   - Provinsi : KALIMANTAN TIMUR
   - Kabupaten / Kota : KAB KUTAI KARTANEGARA
   - Kecamatan : Tenggarong
   - Kelurahan / Desa : Tenggarong
   Jalan : Jl. [illegible]
   RT/RW/KK : [illegible]
8. [illegible] : -

II. UNIT PEMAKAI

1. Kode Unit : -
2. Nama : -

III. PENGADAAN

1. Cara Perolehan : [illegible]
   No : -
2. Tgl Perolehan : [illegible]2022
4. Kondisi Perolehan : Baik
5. Nilai Perolehan : Rp [illegible]
6. Dasar Harga :
7. Sumber Dana :

No : -
Tgl : -

IV. NILAI HARGA LAINNYA

1. Nilai Buku : Rp [illegible]
2. Akumulasi Penyusutan : Rp [illegible]
3. Nilai [illegible] : Rp [illegible]
   Akumulasi Koreksi :
4. Nilai Sewa : Rp 0
   Tanggal Perolehan :
5. Nilai NJOP : Rp 0
   Tahun :

V. CATATAN PENTING

1. Status Penggunaan : Digunakan dalam operasional
2. Digunakan untuk [illegible] : -
3. Status Hukum : Tidak Ada Sengketa
4. Catatan Lainnya :

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	FOTO 4
			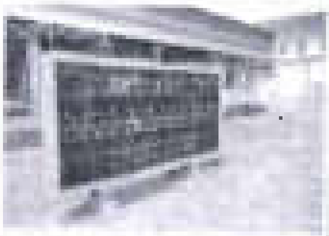

Dibuat di Tgl :
Atas Nama : [illegible]
Jabatan Struktural : KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Tanda tangan dan Stempel

Dibuat Oleh :
Nama : [illegible]
Jabatan : Pelaksana
Tanda tangan dan Stempel :

[illegible]

UAPB : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
UAPPB-E1 : DITJEN PEMASYARAKATAN
UAPPB-W : KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN [illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]

KARTU IDENTITAS BARANG
GEDUNG DAN BANGUNAN

BIDANG : Gedung dan Bangunan
KELOMPOK : BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA
SUB KELOMPOK : [illegible] KEGIATAN
SUB-SUB KELOMPOK : Bangunan [illegible]

KODE UAKPB : [illegible]
NAMA UAKPB : LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

I. DATA BARANG

1. Luas Bangunan : [illegible] M2
2. Luas Dasar Bangunan : [illegible] M
3. Jumlah Lantai : [illegible]
4. Tipe : [illegible]
5. Tahun Selesai Dibangun / Digunakan : -
6. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
   No. : - Tanggal :
7. Letak Bangunan
   - Provinsi : KALIMANTAN TIMUR
   - Kabupaten / Kota : KAB. KUTAI KARTANEGARA
   - Kecamatan : Tenggarong
   - Kelurahan / Desa : Tenggarong
   - Jalan : [illegible]
   - RT/RW/RK : Rt [illegible]
8. Nomor KIB Tanah : -

II. UNIT PEMAKAI

1. Nama Unit : -
2. Alamat : -

III. PENGADAAN

1. Cara Perolehan : [illegible]
2. Dari :
3. Tgl. Perolehan : [illegible]
4. Kondisi Perolehan : Baik
5. Harga Perolehan : Rp [illegible]
6. Dasar Harga : -
7. Sumber Dana :

No :
Tgl. :

IV. NILAI DAN HARGA LAINNYA

1. Nilai Buku : Rp [illegible]
2. Akumulasi Penyusutan : Rp [illegible]
3. Nilai [illegible] : Rp [illegible]
   Periode Laporan
4. Nilai Wajar : Rp -
   Tanggal Penilaian :
5. Nilai NJOP : Rp -
   Tahun

V. CATATAN PENGISI

Status Penggunaan : Digunakan sendiri untuk operasional
1. Digunakan untuk [illegible] : -
2. Status Hukum : Tidak Ada Sengketa
3. Catatan Lainnya : -

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	FOTO 4

Dibuat di / Tgl :
Nama Pejabat : [illegible]
Nama Satker : LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

Tanda tangan
dan Stempel

NIP / Tgl :
Nama : [illegible]
Jabatan : [illegible]
Tanda tangan
dan Stempel

*) Coret yang tidak perlu

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Alamat Jl. Imam Bonjol No.57 Rt 08 Kel.Melayu Kec.Tenggarong Kutai Kartanegara
Telp : 0541 6720108, Email [redacted]

SURAT KETERANGAN

Nomor : W.18.PAS.PAS.7-PD.05.06-2258

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tri Winarsih
NIP : 196701021991032014
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong

Dengan ini menyatakan bahwa Barang Milik Negara berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen yang tidak memiliki IMB dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kode Barang	Nama Barang	NUP	Merk/Type	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan
1	2	3	4	5	6	7
1	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	4	Taman Lingkungan Instalasi Air	2022	19,656,000
2	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	5	Pengembangan dan Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit	2022	570,192,800
3	4010101999	Bangunan Gedung Kantor Lainnya	1	Bangunan Gedung Kantor Lain	2022	37,500,000
4	4010101999	Bangunan Gedung Kantor Lainnya	2	Pembuatan Taman & Pagar Depan IPS/Kesling	2022	22,522,000
5	4010101999	Bangunan Gedung Kantor Lainnya	3	Pembuatan Pagar Pembatas Poli	2022	85,351,000
6	4010101999	Bangunan Gedung Kantor Lainnya	4	Pembuatan Pagar Instalasi Limbah B3 Medis	2022	65,987,000
7	4010101999	Bangunan Gedung Kantor Lainnya	5	Pembuatan Pagar Ulin RSUD	2022	44,150,000
8	4010106001	Bangunan Rumah Sakit Umum	1	Ruang Rawat Jalan	2022	1,955,765,990
9	4010106001	Bangunan Rumah Sakit Umum	2	Gedung Ruang Mawar	2022	500,000,000
10	4010106001	Bangunan Rumah Sakit Umum	3	Gedung Ruang Anisa	2022	513,667,000

11	4010106001	Bangunan Rumah Sakit Umum	4	Gedung Ruang Cempaka	2022	500,000,000
12	4010106001	Bangunan Rumah Sakit Umum	5	Gedung Ruang Melati	2022	500,000,000
13	4010106001	Bangunan Rumah Sakit Umum	6	Gedung Ruang ICU	2022	250,000,000
14	4010106001	Bangunan Rumah Sakit Umum	7	Ruang Operasi Termasuk Rehab	2022	656,750,000
15	4010106001	Bangunan Rumah Sakit Umum	8	Pemeliharaan IGD	2022	190,958,000
16	4010106001	Bangunan Rumah Sakit Umum	9	Pembangunan Rumah Sakit	2022	45,390,000
17	4010106001	Bangunan Rumah Sakit Umum	10	Ruang Tulip	2021	1,509,291,998
18	4010108015	Bangunan Posyandu	1	Ruang Tunggu ICU	2022	76,4[illegible],000
19	4010106015	Bangunan Posyandu	2	Tempat Penampungan Sampah	2022	172,565,100
20	4010108001	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1	Mushola	2022	40,000,000
21	4010130005	Bangunan Rumah Genset	1	Tempat Parkir Karyawan	2022	470,681,000
22	4010134999	Taman Lainnya	1	Pembuatan Taman	2022	48,990,000
23	4010199999	Tugu/Tanda Batas Lainnya	1	Tugu/Tanda Batas Lain.	2022	97,200,000

Adalah benar milik dan digunakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dalam rangka Permohonan Nilai Wajar untuk Persetujuan Penghapusan dengan Tindak Lanjut Penjualan

Tenggarong, 26 September 2023
Kepala,

Tri Warsih
NIP. 196701021991032014

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Alamat: Jl. Imam Bonjol No.57 RT.08 Kel. Melayu, Kec. Tenggarong, Kutai Kartanegara
Telp : 05416720100, Email : [illegible]@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : W.18.PAS.PAS.7-PB.05.05-2287

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tri Winarsih
NIP : 196701021991032014
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong

Dengan ini menerangkan bahwa, deskripsi atas objek penilaian yang disajikan dalam Formulir Pencatatan Objek Penilaian Bangunan Gedung Kantor Permanen sebagaimana terlampir dalam Surat Keterangan ini adalah sesuai dengan fakta/kondisi di lapangan.
Surat Keterangan ini diberikan untuk keperluan Penilaian, agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tenggarong, 29 September 2020
Kepala,

Tri Winarsih
NIP. 196701021991032014

	KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA **DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**	FORM **BONGKARAN BANGUNAN**

Formulir Objek Penilaian Bongkaran Bangunan

1. Material Hasil Pembongkaran Bangunan
   - Alamat : Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong, Jl. Imam Bonjol No. 57 RT. 33 Kel. Melayu, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara.

Keterangan		Material 1	Material 2	Material 3	Material 4
- Jenis Material	:				
- Dimensi/Ukuran	:				
- Jumlah					

2. Identifikasi Bongkaran Bangunan dalam kondisi layak pakai bangunan yang akan dibongkar
   - Nama Bangunan : Bangunan Gedung Kantor Permanen
   - Alamat : Jl. Imam Bonjol No.57 Kel. Melayu, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara
   - Peruntukan Bangunan : [illegible]
   - Luas [illegible] Bangunan : 35,4 m²
   - Jumlah Lantai : Lantai
   - Struktur Bangunan
     - Struktur Rangka Bangunan: ☑ Beton ☐ Baja ☐ Kayu
     - Struktur Atap Bangunan: ☐ Beton ☐ Baja ☐ Baja Ringan ☐ Kayu
     - Komponen Dinding: ☑ Bata Biasa/Batako/Hebel ☐ Non - Bata Biasa/Batako/Hebel

- a. Kusen Pintu (dalam kondisi layak)

Pintu A		
Jenis Material		
Dimensi/Ukuran		
Jumlah		

Pintu B		
Jenis Material		
Dimensi/Ukuran		
Jumlah		

Pintu C		
Jenis Material		
Dimensi/Ukuran		
Jumlah		

Pintu D		
Jenis Material		
Dimensi/Ukuran		
Jumlah		

- b. Kusen Jendela (dalam kondisi layak)

Jendela A		
Jenis Material		
Dimensi/Ukuran		
Jumlah		

Jendela B		
Jenis Material		
Dimensi/Ukuran		
Jumlah		

Jendela C		
Jenis Material		
Dimensi/Ukuran		
Jumlah		

Jendela D		
Jenis Material		
Dimensi/Ukuran		
Jumlah		

- c. Daun Pintu (dalam kondisi layak)

Daun Pintu A		
Jenis Material		-
Dimensi/Ukuran		-
Jumlah		-

Daun Pintu B		
Jenis Material		
Dimensi/Ukuran		
Jumlah		

Daun Pintu C		
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran		
Jumlah		

Daun Pintu D		
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran		
Jumlah		

- d. Daun Jendela (dalam kondisi layak)

Daun Jendela A		
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

Daun Jendela B		
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran		
Jumlah	:	

Daun Jendela C		
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	-

Daun Jendela D		
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah		

- e. Material Rangka Atap [illegible] (dalam kondisi layak)

Jenis Material	:	[illegible]
Dimensi/Ukuran		[illegible]
Jumlah	:	paket

Jenis Material	:	Kayu
Dimensi/Ukuran	:	[illegible] m³
Jumlah	:	

2. Kesesuaian Anggaran dan Biaya Pembangunan [illegible] : ☐ Ya ☑ Tidak

Jenis Bangunan yang akan dibangun :

☐ Tipe 1

1. [illegible] 1 (satu) lantai;
2. Memiliki banyak ruang yang dapat difungsikan sebagai tempat aktivitas hunian;
3. [illegible]
4. Tidak terdapat ruang/bangunan yang memerlukan konstruksi khusus;
5. Contoh bangunan tipe 1 adalah Rumah Dinas [illegible]

☐ Tipe 2

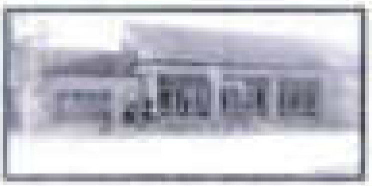

1. Memiliki banyak ruang yang dapat difungsikan sebagai tempat aktivitas hunian;
2. [illegible]
3. Terdapat ruang/bangunan yang memerlukan konstruksi khusus;
4. Contoh bangunan tipe 2 adalah Rumah Dinas [illegible] sebagaimana Gambar berikut.

☑ Tipe 3

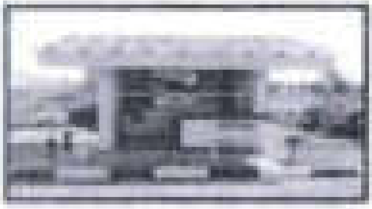

1. Merupakan bangunan yang [illegible]
2. Menggunakan [illegible] dengan bentuk [illegible]
3. Contoh bangunan tipe 3 [illegible] dengan tempat bangunan sebagaimana Gambar berikut:

☐ Tipe 4

1. Bangunan terdiri dari [illegible]
2. Memiliki banyak ruang yang dapat difungsikan sebagai tempat aktivitas hunian;
3. [illegible]
4. Tidak terdapat ruang/bangunan yang memerlukan konstruksi khusus;
5. Contoh bangunan tipe 4 adalah Rumah Dinas [illegible] sebagaimana Gambar berikut.

☐ Tipe Bangunan Lainnya

[illegible]

3. Foto Objek :

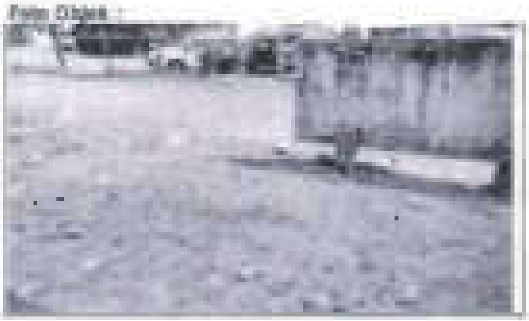

4. Keterangan Lainnya :

[illegible] Pandeglang, 28-06-2023

[illegible]

[illegible]

[illegible]

* [illegible]

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

FORM
BONGKARAN
BANGUNAN

Formulir Objek Penilaian Bongkaran Bangunan

1. Material hasil Pembongkaran Bangunan
   - Alamat : [illegible] Kec. Tangerang, Kota Tangerang

Keterangan	Material 1	Material 2	Material 3	Material 4
Jenis Material				
Dimensi/Ukuran				
Jumlah				

2. Rincian Bongkaran bangunan dalam kondisi tegak pada bangunan yang akan dibongkar
   - Nama Bangunan : [illegible]
   - Alamat : [illegible] Kec. Tangerang, Kota Tangerang
   - Peruntukan Bangunan : [illegible]
   - Luas Total Bangunan : 30 m²
   - Jumlah Lantai : 1 Lantai
   - a. Rangka Bangunan
     - Struktur Rangka Bangunan : ☒ Beton ☐ Baja ☐ Kayu
     - Struktur Atap Bangunan : ☐ Beton ☐ Baja ☐ Baja Ringan ☒ Kayu
     - Penutup Atap : ☒ [illegible] ☐ [illegible]
   - b. Daun Pintu (dalam kondisi tegak)

Pintu 1		
Jenis Material	:	Kayu
Dimensi/Ukuran	:	200x100
Jumlah	:	41

Pintu 2		
Jenis Material	:	Kayu
Dimensi/Ukuran	:	200x80
Jumlah	:	[illegible]

Pintu 3		
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

Pintu 4		
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

   - c. Daun Jendela (dalam kondisi tegak)

Jendela 1		
Jenis Material	:	Kayu
Dimensi/Ukuran	:	[illegible]
Jumlah	:	12

Jendela 2		
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

Jendela 3		
Jenis Material		
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

Jendela 4		
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran		
Jumlah	:	

   - d. Daun Pintu (dalam kondisi tegak)

Daun Pintu 1		
Jenis Material	:	-
Dimensi/Ukuran	:	-
Jumlah		-

Daun Pintu 2		
Jenis Material		
Dimensi/Ukuran		
Jumlah		

Daun Pintu 3		
Jenis Material		
Dimensi/Ukuran		
Jumlah	:	-

Daun Pintu 4		
Jenis Material		
Dimensi/Ukuran		
Jumlah		

   - e. Daun Jendela (dalam kondisi tegak)

Daun Jendela 1		
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran		
Jumlah	:	

Daun Jendela 2		
Jenis Material		-
Dimensi/Ukuran		
Jumlah		

Daun Jendela 3		
Jenis Material		
Dimensi/Ukuran		
Jumlah		

Daun Jendela 4		
Jenis Material		
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

   - f. Material Bangunan Lainnya pada bangunan yang memiliki nilai [illegible]

Jenis Material		[illegible]
Dimensi/Ukuran		[illegible]
Jumlah		[illegible]

Jenis Material	:	[illegible]
Dimensi/Ukuran	:	[illegible]
Jumlah	:	[illegible]

Jenis Material	:	Kayu
Dimensi/Ukuran	:	2.50 m3
Jumlah		1

g. [illegible] Bangunan : ☐ Ya ☑ Tidak

h. [illegible]

☐ Tipe 1

1. [illegible]
2. Memiliki [illegible]
3. Struktur bangunan [illegible]
4. Tidak [illegible]
5. Contoh [illegible]

Tipe 2

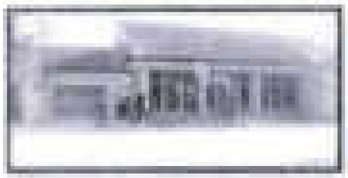

1. Memiliki [illegible]
2. Struktur bangunan [illegible]
3. [illegible]
4. Contoh [illegible]

☑ Tipe 3

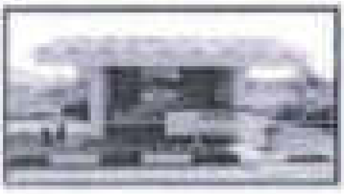

1. Memiliki struktur bangunan yang tinggi [illegible]
2. [illegible]
3. Contoh bangunan [illegible]

☐ Tipe 4

1. Bangunan [illegible]
2. Memiliki banyak ruang yang [illegible]
3. Struktur bangunan [illegible]
4. [illegible]
5. Contoh bangunan [illegible]

☐ Tipe [illegible]

[illegible]

3. Foto Objek :

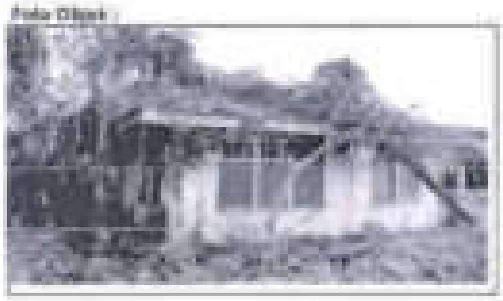

4. Keterangan Lainnya :

Tim [illegible] 22 [illegible]

Petugas Pendataan

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA	FORM BONGKARAN BANGUNAN

Formulir Objek Penilaian Bongkaran Bangunan

1. Material Hasil Pembongkaran Bangunan

- Lokasi : Lokasi Pembangunan Kelas IA Tenggarong Jl. [illegible] Banjar No. 27 Rt. 23 Kel. [illegible]
  Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara

Keterangan		Material 1	Material 2	Material 3	Material 4
Jenis Material	:				
Dimensi/Ukuran	:				
Jumlah	:				

2. Material Bongkaran Bangunan dalam kondisi utuh [illegible] yang akan dibongkar

- Nama Bangunan : [illegible]
- Alamat : [illegible] No. 27 [illegible] Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara
- Peruntukan Bangunan : Bangunan Gedung Kantor [illegible]
- Luas Total Bangunan : 40,4 m²
- Jumlah Lantai : 1 Lantai
- a. Struktur Bangunan
  - Struktur Rangka Bangunan : ☑ Beton ☐ Baja ☐ Kayu
  - Struktur Atap Bangunan : ☐ Beton ☐ Baja ☐ Baja Ringan ☑ Kayu
  - Bangunan Gedung : ☑ [illegible] ☐ [illegible]
- b. Kusen Pintu (dalam satuan unit)

Pintu 1		
Jenis Material	:	Kayu
Dimensi/Ukuran	:	[illegible]
Jumlah	:	12

Pintu 2		
Jenis Material	:	Kayu
Dimensi/Ukuran	:	[illegible]
Jumlah	:	12

Pintu 3		
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

Pintu 4		
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

- c. Kusen Jendela (dalam satuan unit) [illegible]

Jendela 1		
Jenis Material	:	Kayu
Dimensi/Ukuran	:	80x150
Jumlah	:	3

Jendela 2		
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

Jendela 3		
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

Jendela 4		
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

- d. Daun Pintu (dalam satuan unit)

Daun Pintu 1		
Jenis Material	:	-
Dimensi/Ukuran	:	-
Jumlah	:	-

Daun Pintu 2		
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

Daun Pintu 3		
Jenis Material	:	-
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	-

Daun Pintu 4		
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

- e. Daun Jendela (dalam satuan unit)

Daun Jendela 1		
Jenis Material	:	Kayu
Dimensi/Ukuran	:	[illegible]
Jumlah	:	3

Daun Jendela 2		
Jenis Material	:	-
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	-

Daun Jendela 3		
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

Daun Jendela 4		
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

- f. Material Bangunan Lainnya yang [illegible] (atap [illegible] kayu)

Jenis Material	:	Besi
Dimensi/Ukuran	:	[illegible]
Jumlah	:	1 paket

Jenis Material	:	Kayu
Dimensi/Ukuran	:	1,5 m3
Jumlah	:	-

Jenis Material	:	[illegible]
Dimensi/Ukuran	:	[illegible]
Jumlah	:	1

[illegible] ☐ Ya ☒ Tidak

[illegible]

☐ Tipe 1

1. [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible]
4. [illegible]
5. [illegible]

☐ Tipe 2

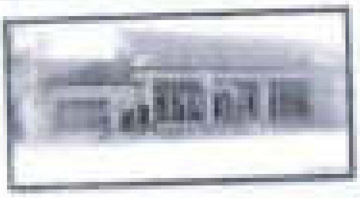

1. [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible]
4. [illegible]

☒ Tipe 3

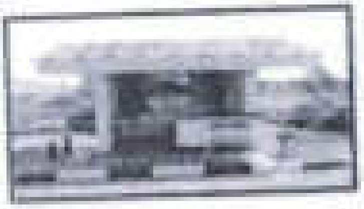

1. [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible]

☐ Tipe 4

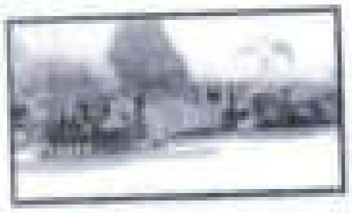

1. [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible]
4. [illegible]
5. [illegible]

☐ Tipe [illegible]

[illegible]

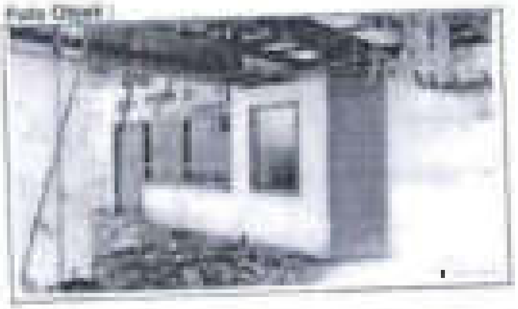
Foto Objek

Keterangan Lainnya :

____

____

____

____

____

[illegible] Pendataan, [illegible] 2022
Petugas Pendataan,

[illegible]
[illegible]

[illegible]

	KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA	FORM BONGKARAN BANGUNAN

Formulir Objek Penilaian Bongkaran Bangunan

1. Lokasi Hasil Pembongkaran Bangunan
   - Alamat : [illegible] Tanggung, Jl. [illegible] Kota [illegible]

Keterangan	Material 1	Material 2	Material 3	Material 4
Jenis Material				
Dimensi/Ukuran				
Jumlah				

2. [illegible] Bangunan dalam Kondisi Layak [illegible] yang akan dibongkar
   - Nama Bangunan : [illegible]
   - Alamat : Jl. [illegible] Kota [illegible]
   - Peruntukan Bangunan : [illegible]
   - Luas Total Bangunan : [illegible] m²
   - Jumlah Lantai : Lt 2
   - a. Struktur Bangunan
     - Struktur Rangka/Pondasi : ☑ Beton ☐ Besi ☐ Kayu
     - Struktur Atap Bangunan : ☐ [illegible] ☐ Baja ☐ Baja ringan ☐ Kayu
     - Komponen Sanitasi : ☑ [illegible] ☐ [illegible]
   - b. Kusen Pintu (dalam kondisi layak)

Pintu 1		
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

Pintu 2		
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

Pintu 3		
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

Pintu 4		
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

   - c. Kusen Jendela (dalam kondisi layak)

Jendela 1		
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

Jendela 2		
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

Jendela 3		
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

Jendela 4		
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

   - d. Daun Pintu (dalam kondisi layak)

Daun Pintu 1		
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

Daun Pintu 2		
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

Daun Pintu 3		
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

Daun Pintu 4		
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

   - e. Daun Jendela (dalam kondisi layak)

Daun Jendela 1		
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

Daun Jendela 2		
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

Daun Jendela 3		
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

Daun Jendela 4		
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

   - f. Material Bangunan Lainnya pada [illegible] yang [illegible] (dalam kondisi layak)

Jenis Material	:	Besi
Dimensi/Ukuran	:	[illegible]
Jumlah	:	1 paket

Jenis Material	:	Kayu
Dimensi/Ukuran	:	[illegible]
Jumlah	:	

5. [illegible] dengan [illegible] Pembangunan [illegible] ☐ Ya ☑ Tidak
[illegible]

[illegible] Bangunan yang [illegible] dibangun

☐ Tipe 1

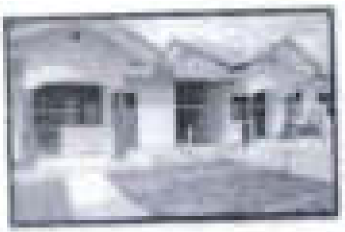

1. Bangunan [illegible]
2. [illegible] yang dapat [illegible] sebagai [illegible]
3. [illegible] bangunan [illegible]
4. Tidak [illegible] yang [illegible] berupa warung
5. Contoh [illegible] Rumah [illegible] gambar berikut

☐ Tipe 2

1. [illegible] yang dapat [illegible] sebagai [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible]
4. Contoh bangunan [illegible] gambar berikut

☑ Tipe 3

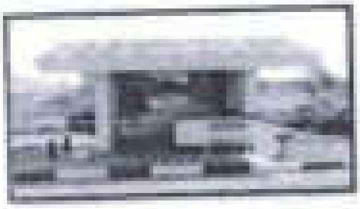

1. [illegible] bangunan [illegible]
2. [illegible] bangunan yang [illegible] dengan [illegible] yang [illegible]
3. Contoh bangunan [illegible] bangunan [illegible] dengan [illegible] gambar berikut

☐ Tipe 4

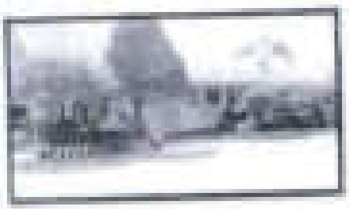

1. [illegible]
2. [illegible] yang dapat [illegible] sebagai [illegible]
3. [illegible]
4. [illegible]
5. Contoh bangunan [illegible] gambar berikut

☐ Tipe Bangunan Lainnya

[illegible]

3. Foto Objek :

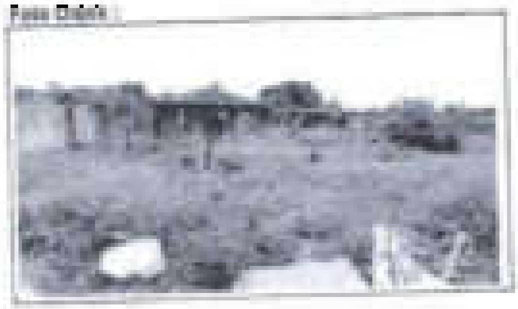

4. Keterangan Lainnya :

Tanjung [illegible], 20-05-2024
Petugas [illegible]

RAY [illegible]
NIP [illegible]

*) [illegible]

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

FORM:
BONGKARAN BANGUNAN

Formulir Objek Penilaian Bongkaran Bangunan

1. Material Hasil Pembongkaran Bangunan

Alamat : [illegible]
[illegible]

Keterangan	Material 1	Material 2	Material 3	Material 4
Jenis Material	:			
Dimensi/Ukuran	:			
Jumlah	:			

2. [illegible] pada Bangunan yang akan dibongkar

- Nama Bangunan : Bangunan Gedung [illegible]
- Alamat : [illegible]
- Peruntukan Bangunan : [illegible]
- Luas Total Bangunan : [illegible] m2
- Jumlah Lantai : [illegible] Lantai
- Struktur Bangunan
  - Struktur Rangka Bangunan : ☑ Beton ☐ Baja ☐ Kayu
  - Struktur Atap Bangunan : ☐ Beton ☐ Baja ☐ Baja Ringan ☐ Kayu
  - Komponen Gedung : ☑ [illegible] ☐ [illegible]

a. Kusen Pintu (dalam kondisi layak)

	Pintu 1		Pintu 2
Jenis Material :		Jenis Material :	
Dimensi/Ukuran :		Dimensi/Ukuran :	
Jumlah :		Jumlah :	

	Pintu 3		Pintu 4
Jenis Material :		Jenis Material :	
Dimensi/Ukuran :		Dimensi/Ukuran :	
Jumlah :		Jumlah :	

b. Kusen Jendela (dalam kondisi layak)

	Jendela 1		Jendela 2
Jenis Material :		Jenis Material :	
Dimensi/Ukuran :		Dimensi/Ukuran :	
Jumlah :		Jumlah :	

	Jendela 3		Jendela 4
Jenis Material :		Jenis Material :	
Dimensi/Ukuran :		Dimensi/Ukuran :	
Jumlah :		Jumlah :	

c. Daun Pintu (dalam kondisi layak)

	Daun Pintu 1		Daun Pintu 2
Jenis Material :		Jenis Material :	
Dimensi/Ukuran :		Dimensi/Ukuran :	
Jumlah :		Jumlah :	

	Daun Pintu 3		Daun Pintu 4
Jenis Material :		Jenis Material :	
Dimensi/Ukuran :		Dimensi/Ukuran :	
Jumlah :		Jumlah :	

d. Daun Jendela (dalam kondisi layak)

	Daun Jendela 1		Daun Jendela 2
Jenis Material :		Jenis Material :	
Dimensi/Ukuran :		Dimensi/Ukuran :	
Jumlah :		Jumlah :	

	Daun Jendela 3		Daun Jendela 4
Jenis Material :		Jenis Material :	
Dimensi/Ukuran :		Dimensi/Ukuran :	
Jumlah :		Jumlah :	

[illegible]

Jenis Material :	[illegible]	Jenis Material :	[illegible]
Dimensi/Ukuran :	50 [illegible]	Dimensi/Ukuran :	[illegible]
Jumlah :	1 paket	Jumlah :	1

g. [illegible] Bangunan [illegible] ☐ Ya ☑ Tidak

h. [illegible] Bangunan [illegible]

☐ Tipe 1

1. Bangunan [illegible]
2. [illegible] sebagai tempat [illegible]
3. Struktur bangunan [illegible]
4. [illegible]
5. [illegible] Rumah [illegible]

☐ Tipe 2

1. [illegible] sebagai tempat [illegible]
2. Struktur bangunan [illegible]
3. [illegible] konstruksi [illegible]
4. [illegible] Rumah [illegible]

☑ Tipe 3

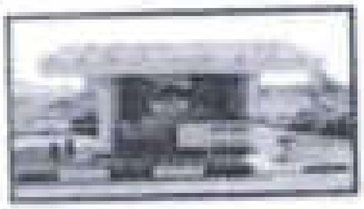

1. [illegible] bangunan [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible]

☐ Tipe 4

1. Bangunan [illegible]
2. [illegible] sebagai tempat [illegible]
3. Struktur bangunan [illegible]
4. [illegible]
5. Contoh [illegible]

☐ Tipe Bangunan Lainnya

[illegible]

i. Foto Objek :

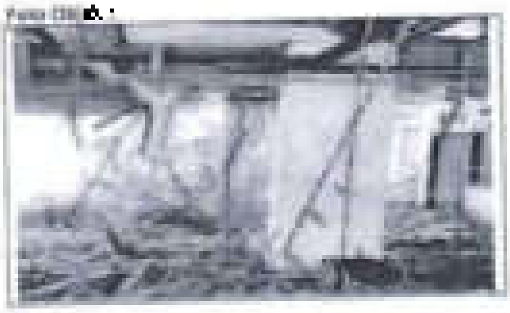

j. Keterangan Lainnya :

______ ______ ______ ______ ______ ______

______ ______ ______ ______ ______ ______ ______

______ ______ ______ ______ ______ ______ ______

______ ______ ______ ______ ______ ______ ______

______ ______ ______ ______ ______ ______ ______

[illegible], 03-09-2022

[illegible]

[illegible]

[illegible]

* [illegible]

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA	FORM BONGKARAN BANGUNAN

Formulir Objek Penilaian Bongkaran Bangunan

1. Informasi Hasil Pembongkaran Bangunan
   - Alamat : [illegible] Kab. Tanggamus, Kota Kotaagung [illegible]

Keterangan		Material 1	Material 2	Material 3	Material 4
Jenis Material	:				
Dimensi/Ukuran	:				
Jumlah	:				

2. Material Bongkaran Bangunan dalam kondisi utuh pada bangunan yang akan dibongkar
   - Nama Bangunan : [illegible]
   - Alamat : [illegible] Kab. Tanggamus, Kota Kotaagung
   - Peruntukan Bangunan : [illegible]
   - Luas Total Bangunan : 7,2 m²
   - Jumlah Lantai : 1 Lantai
   - Struktur Bangunan
     - Struktur Rangka Bangunan : ☒ Beton ☐ Baja ☐ Kayu
     - Konstruksi Atap Bangunan : ☐ Beton ☐ Baja ☐ Rangka Baja Ringan ☐ Kayu
     - Konstruksi Dinding : ☒ [illegible] ☐ [illegible]
   - a. Kusen Pintu (dalam kondisi utuh)

Pintu 1		
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

Pintu 2		
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

Pintu 3		
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

Pintu 4		
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

   - b. Kusen Jendela (dalam kondisi utuh)

Jendela 1		
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

Jendela 2		
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

Jendela 3		
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

Jendela 4		
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

   - c. Daun Pintu (dalam kondisi utuh)

Daun Pintu 1		
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

Daun Pintu 2		
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

Daun Pintu 3		
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

Daun Pintu 4		
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

   - d. Daun Jendela (dalam kondisi utuh)

Daun Jendela 1		
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

Daun Jendela 2		
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

Daun Jendela 3		
Jenis Material	:	-
Dimensi/Ukuran	:	-
Jumlah	:	-

Daun Jendela 4		
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

   - e. Material Bongkaran Lainnya yang masih dapat dimanfaatkan (dalam kondisi utuh)

Jenis Material	:	[illegible]
Dimensi/Ukuran	:	[illegible]
Jumlah	:	[illegible] potong

Jenis Material	:	Atap
Dimensi/Ukuran	:	[illegible] m2
Jumlah	:	

Jenis Material	:	[illegible] Pagar
Dimensi/Ukuran	:	[illegible]
Jumlah	:	2

3) [illegible] Anggaran [illegible] Pembangunan [illegible] : ☐ Ya ☑ Tidak

i. Kriteria Bangunan yang akan [illegible]

☐ Tipe 1

1. Bangunan [illegible]
2. Hanya di bangun ruang yang dapat [illegible] sebagai tempat [illegible]
3. [illegible] bangunan [illegible]
4. [illegible]
5. [illegible]

☐ Tipe 2

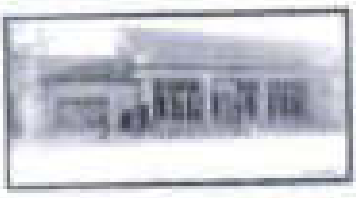

1. [illegible] ruang yang dapat digunakan [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible] yang [illegible]
4. [illegible] Tipe 1.2 [illegible]

☑ Tipe 3

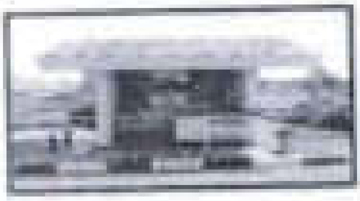

1. [illegible]
2. Menggunakan [illegible] bangunan [illegible]
3. [illegible] bangunan [illegible]

☐ Tipe 4

1. Bangunan [illegible]
2. [illegible] ruang [illegible]
3. [illegible]
4. Tidak [illegible]
5. [illegible] Rumah [illegible]

☐ [illegible]

[illegible]

k. Foto Objek :

l. Keterangan Lainnya :

[illegible], [illegible] 2023

[illegible]

NIP. [illegible]

[illegible]

	KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA	FORM BONGKARAN BANGUNAN

Formulir Objek Pendataan Pengukuran Bangunan

1. [illegible]
   - Alamat : Lapas/Cabang Rutan Kelas IIA Tenggarong, [illegible] No. 27 [illegible] Kel. Melayu, Kec. Tenggarong, Kab. [illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]				
[illegible]				
[illegible]				

2. [illegible] Bangunan [illegible]
   - Nama Bangunan : Bangunan [illegible]
   - Alamat : [illegible] No. 27 Kel. Melayu, Kec. Tenggarong, Kab. [illegible]
   - [illegible] Bangunan : [illegible]
   - [illegible] : [illegible] m²
   - Jumlah Lantai : [illegible] Lantai
   - a. Struktur Bangunan
     - Struktur Rangka Bangunan ☑ Beton ☐ Baja ☐ Kayu
     - Struktur Atap/Kuda-kuda ☐ [illegible] ☐ [illegible] ☐ Baja Ringan ☐ Kayu
     - Bangunan Dinding ☑ [illegible] ☐ [illegible]
   - b. [illegible]

	Pondasi 1	
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

	Pondasi 2	
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

	Pondasi 3	
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

	Pondasi 4	
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

   - c. Kusen Jendela (dalam bentuk unit)

	Jendela 1	
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran		
Jumlah	:	

	Jendela 2	
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran		
Jumlah	:	

	Jendela 3	
Jenis Material		
Dimensi/Ukuran		
Jumlah		

	Jendela 4	
Jenis Material		
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

   - d. Daun Pintu [illegible]

	Daun Pintu 1	
Jenis Material		-
Dimensi/Ukuran		
Jumlah		-

	Daun Pintu 2	
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

	Daun Pintu 3	
Jenis Material		-
Dimensi/Ukuran		-
Jumlah		-

	Daun Pintu 4	
Jenis Material		
Dimensi/Ukuran		
Jumlah		

   - e. Daun Jendela [illegible]

	Daun Jendela 1	
Jenis Material		
Dimensi/Ukuran		
Jumlah		

	Daun Jendela 2	
Jenis Material		
Dimensi/Ukuran		
Jumlah		

	Daun Jendela 3	
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran		-
Jumlah		

	Daun Jendela 4	
Jenis Material		
Dimensi/Ukuran		
Jumlah		

   - f. Material [illegible] bangunan yang [illegible] (dalam [illegible])

Jenis Material	:	Kayu [illegible]
Dimensi/Ukuran	:	[illegible]
Jumlah	:	[illegible] batang

Jenis Material	Besi
Dimensi/Ukuran	[illegible]
Jumlah	[illegible]

Jenis Material	:	Seng
Dimensi/Ukuran		[illegible]
Jumlah	:	

g. Kesesuaian Anggaran ... Biaya Pembangunan Anggaran : ☐ Ya ☑ [illegible]

h. [illegible] Bangunan yang akan dibangun :

☐ Tipe 1

1. [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible]
4. Tidak terdapat [illegible] yang [illegible]
5. Contoh bangunan tipe 1.1 adalah Rumah [illegible]

☐ Tipe 2

1. [illegible]
2. [illegible]
3. Terdapat [illegible] yang [illegible]
4. Contoh bangunan tipe 1.2 adalah Rumah [illegible]

☐ Tipe 3

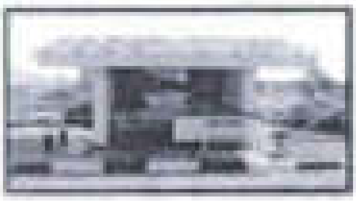

1. [illegible]
2. Menggunakan [illegible] bangunan yang [illegible]
3. Contoh bangunan tipe [illegible] bangunan [illegible] dengan [illegible] Contoh berikut

☐ Tipe 4

1. [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible]
4. Tidak terdapat [illegible] yang [illegible]
5. Contoh bangunan tipe 1.1 adalah Rumah [illegible]

☐ Tipe Bangunan Lainnya

[illegible]

3. Foto Objek :

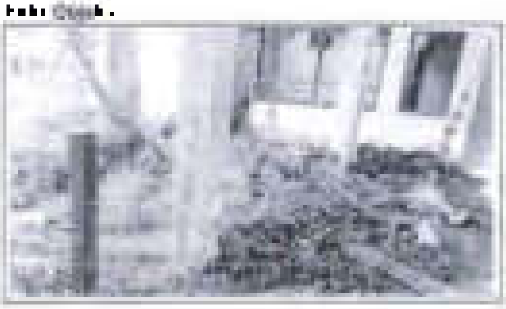

4. Keterangan Lainnya :

[illegible], Pondabun, 26-06-2023
[illegible] Pondabun

[illegible]
NIP. [illegible]

[illegible]

	KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA	FORM BONGKARAN BANGUNAN

Formulir Objek Penilaian Bongkaran Bangunan

1. Material Hasil Pembongkaran Bangunan
   - Alamat : [illegible] Jl. Imam Bonjol No. 27 [illegible] Kota Tangerang [illegible]

Material (KN)		Material 1	Material 2	Material 3	Material 4
Jenis Material	:				
Dimensi/Ukuran	:				
Jumlah					

2. Material Bongkaran Bangunan dalam kondisi layak pada Bangunan yang akan dibongkar
   - Nama Bangunan : Bangunan Rumah [illegible]
   - Alamat : [illegible] Kota Tangerang [illegible]
   - Peruntukan Bangunan : [illegible]
   - Luas Total Bangunan : [illegible] m²
   - Jumlah Lantai : 1 Lantai
   - a. Struktur Bangunan
     - Struktur Rangka Bangunan : ☑ Beton ☐ Baja ☐ Kayu
     - [illegible] : ☐ Beton ☐ Baja ☐ Baja Ringan ☑ Kayu
     - [illegible] : ☑ [illegible] ☐ [illegible]
   - b. Daun Pintu (dalam kondisi layak)

Pintu 1		
Jenis Material	:	[illegible]
Dimensi/Ukuran	:	[illegible] cm
Jumlah		[illegible]

Pintu 2		
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

Pintu 3		
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

Pintu 4		
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

   - c. Daun Jendela dalam kondisi layak

Jendela 1		
Jenis Material	:	Kayu
Dimensi/Ukuran	:	[illegible]
Jumlah	:	[illegible]

Jendela 2		
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

Jendela 3		
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

Jendela 4		
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

   - d. Daun [illegible] dalam kondisi layak

Daun Pintu		
Jenis Material	:	-
Dimensi/Ukuran	:	-
Jumlah		

Daun Pintu		
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	-
Jumlah	:	

Daun Pintu		
Jenis Material		
Dimensi/Ukuran		
Jumlah	:	

[illegible]		
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah		

   - e. [illegible]

[illegible] Jendela		
Jenis Material		
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah		

[illegible] Jendela		
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah		

Daun Jendela b		
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran		
Jumlah		

Daun Jendela c		
Jenis Material		
Dimensi/Ukuran		
Jumlah		

   - f. Material lainnya yang masih dapat dipakai [illegible] dalam kondisi layak

Jenis Material	:	[illegible]
Dimensi/Ukuran	:	[illegible]
Jumlah	:	[illegible]

Jenis Material	:	Kayu
Dimensi/Ukuran	:	[illegible]
Jumlah	:	

Jenis Material		[illegible]
Dimensi/Ukuran		[illegible]
Jumlah	:	[illegible]

5. Keberadaan Bangunan [illegible] Pembangunan [illegible] ☐ Ya ☑ Tidak

6. Kriteria Bangunan [illegible]

☐ Tipe 1

Bangunan [illegible] Contoh

1. Memiliki [illegible] ruang yang dapat difungsikan [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible] yang [illegible]
4. Contoh [illegible] Gambar berikut

☐ Tipe 2

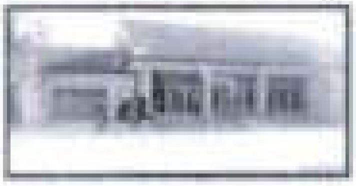

1. Memiliki [illegible] ruang yang dapat difungsikan [illegible]
2. [illegible]
3. Terdapat [illegible] yang [illegible]
4. Contoh [illegible] Rumah [illegible] Gambar berikut

☐ Tipe 3

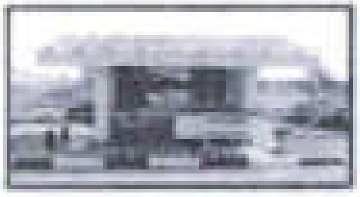

1. Memiliki [illegible]
2. Menggunakan material bangunan yang [illegible]
3. Contoh [illegible] dengan [illegible]

☑ Tipe 4

1. [illegible]
2. Memiliki [illegible] ruang yang dapat difungsikan sebagai [illegible]
3. [illegible]
4. Tidak terdapat [illegible] yang [illegible]
5. Contoh bangunan [illegible]

☐ Tipe Bangunan Lainnya

[illegible]

7. Foto Objek :

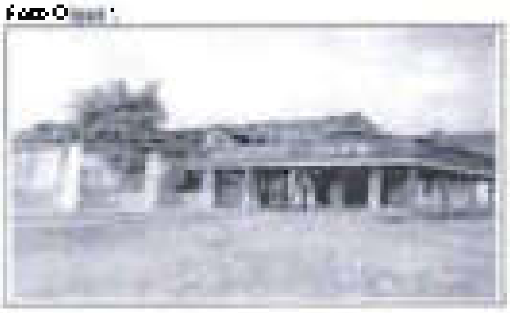

8. Keterangan Lainnya :

Tanggal [illegible] 22-09-2022
Petugas [illegible]

[illegible]
[illegible]

*) [illegible]

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

FORM

BONGKARAN BANGUNAN

Formulir Objek Penilaian Bongkaran Bangunan

1. **Material Hasil Pembongkaran Bangunan**

Alamat : [illegible] Tenggarong [illegible] No 37 RT 05 Kel Melayu
Kec Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara

Keterangan		Material 1	Material 2	Material 3	Material 4
Jenis Material	:				
Dimensi/Ukuran	:				
Jumlah					

2. **Material Bongkaran Bangunan dalam kondisi layak pada Bangunan yang akan dibongkar**

- Nama Bangunan : Bangunan Rumah Sakit Umum
- Alamat : Jl. [illegible] No 37 Kel. Melayu, Kec. Tenggarong, Kutai Kartanegara
- Peruntukan Bangunan : Gedung Ruang [illegible]
- Luas Total Bangunan : 150,00 m²
- Jumlah Lantai : 1 Lantai
- a. Struktur Bangunan

Struktur Rangka Bangunan ☒ Beton ☐ Baja ☐ Kayu

Struktur Atap Bangunan ☐ Beton ☐ Baja ☐ Baja Ringan ☐ Kayu

[illegible] : ☒ [illegible]
☐ [illegible]

b. Kusen Pintu (dalam kondisi layak)

Pintu 1	
Jenis Material	Kayu
Dimensi/Ukuran	[illegible]
Jumlah	3

Pintu 2	
Jenis Material	
Dimensi/Ukuran	
Jumlah	

Pintu 3	
Jenis Material	:
Dimensi/Ukuran	:
Jumlah	:

Pintu 4	
Jenis Material	
Dimensi/Ukuran	:
Jumlah	:

- c. Kusen Jendela (dalam kondisi layak)

Jendela 1	
Jenis Material :	Kayu
Dimensi/Ukuran	[illegible]
Jumlah :	3

Jendela 2	
Jenis Material	
Dimensi/Ukuran :	
Jumlah :	

Jendela 3	
Jenis Material :	
Dimensi/Ukuran :	
Jumlah :	

Jendela 4	
Jenis Material	
Dimensi/Ukuran	
Jumlah	

- d. Daun Pintu (dalam kondisi layak)

Daun Pintu 1	
Jenis Material :	-
Dimensi/Ukuran :	
Jumlah :	-

Daun Pintu 2	
Jenis Material	
Dimensi/Ukuran	
Jumlah	

Daun Pintu 3	
Jenis Material :	
Dimensi/Ukuran :	
Jumlah :	

Daun Pintu 4	
Jenis Material :	
Dimensi/Ukuran	
Jumlah :	

Daun Jendela (dalam kondisi layak)

Daun Jendela 1	
Jenis Material	
Dimensi/Ukuran	
Jumlah	

Daun Jendela 2	
Jenis Material	
Dimensi/Ukuran	
Jumlah	

Daun Jendela 3	
Jenis Material	
Dimensi/Ukuran	
Jumlah	

Daun Jendela 4	
Jenis Material	
Dimensi/Ukuran	
Jumlah	

- Material Bongkaran [illegible] layak pada [illegible]

Jenis Material	[illegible]
Dimensi/Ukuran :	506,02 kg
Jumlah	1 paket

Jenis Material	Kayu
Dimensi/Ukuran	[illegible]
Jumlah	1

- q. Kesesuaian Anggaran dan Biaya Pembangunan Bangunan ☐ Ya ☑ Tidak

- r. Kriteria Bangunan yang akan dibangun

☐ Tipe 1

1. [illegible]
2. Memiliki [illegible] yang dapat [illegible]
3. [illegible]
4. Tidak [illegible] yang memerlukan konstruksi khusus
5. Contoh [illegible] sebagaimana Gambar berikut

☐ Tipe 2

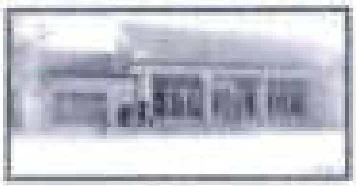

1. Memiliki [illegible] yang dapat digunakan sebagai tempat aktivitas usaha
2. Struktur bangunan bersifat permanen
3. Terdapat [illegible] yang memerlukan konstruksi khusus
4. Contoh bangunan tipe 2 [illegible] sebagaimana Gambar berikut

☑ Tipe 3

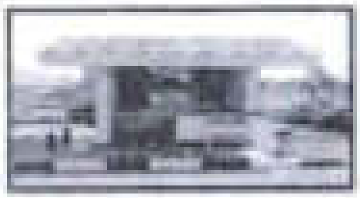

1. Memiliki struktur bangunan yang [illegible]
2. [illegible] dengan [illegible]
3. Contoh bangunan tipe 3 antara lain [illegible] juga bangunan tempat [illegible] dan bangunan tempat [illegible] dengan [illegible] sebagaimana Gambar berikut

☐ Tipe 4

1. [illegible]
2. Memiliki [illegible] yang dapat digunakan sebagai tempat aktivitas usaha
3. [illegible]
4. Tidak terdapat ruang [illegible] yang memerlukan konstruksi khusus
5. Contoh bangunan tipe 4 [illegible] sebagaimana Gambar berikut

☐ Tipe Bangunan Lainnya

[illegible]

8 - Foto Objek :

9 - Keterangan Lainnya :

Tanggal [illegible] 2022

Petugas Pendataan

[illegible]

NIP. [illegible]

*Coret yang tidak perlu [illegible]

	KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA	FORM BONGKARAN BANGUNAN

Formulir Objek Penilaian Bongkaran Bangunan

1. Material Hasil Pembongkaran Bangunan
   - Alamat : [illegible]
     [illegible]

Keterangan		Material 1	Material 2	Material 3	Material 4
Jenis Material	:				
Dimensi/Ukuran	:				
Jumlah	:				

2. Material Bongkaran Bangunan dalam kondisi layak pada Bangunan yang akan dibongkar
   - Nama Bangunan : [illegible]
   - Alamat : [illegible]
   - Peruntukan Bangunan : [illegible]
   - Luas Total Bangunan : [illegible] m²
   - Jumlah Lantai : 1 Lantai
   - a. Struktur Bangunan

Struktur Rangka Bangunan ☒ Beton ☐ Baja ☐ Kayu

Struktur Atap Bangunan ☐ [illegible] ☐ Baja ☐ Baja Ringan ☐ Kayu

Komponen Dinding ☑ [illegible] ☐ [illegible]

b. Daun Pintu (dalam kondisi layak)

Pintu a		
Jenis Material	:	Kayu
Dimensi/Ukuran	:	[illegible]
Jumlah	:	2

Pintu b		
Jenis Material	:	Kayu
Dimensi/Ukuran	:	[illegible]
Jumlah	:	10

Pintu c		
Jenis Material	:	Kayu
Dimensi/Ukuran	:	[illegible]
Jumlah	:	5

Pintu d		
Jenis Material		
Dimensi/Ukuran		
Jumlah		

c. Daun Jendela (dalam kondisi layak)

Jendela a		
Jenis Material	:	Kayu
Dimensi/Ukuran	:	[illegible]
Jumlah	:	[illegible]

Jendela b		
Jenis Material		
Dimensi/Ukuran		
Jumlah		

Jendela c	
Jenis Material	
Dimensi/Ukuran	
Jumlah	

Jendela d	
Jenis Material	
Dimensi/Ukuran	
Jumlah	

d. Daun Pintu (dalam kondisi layak)

Daun Pintu a	
Jenis Material	
Dimensi/Ukuran	
Jumlah	

Daun Pintu b	
Jenis Material	
Dimensi/Ukuran	
Jumlah	

Daun Pintu c	
Jenis Material	
Dimensi/Ukuran	
Jumlah	

Daun Pintu d	
Jenis Material	
Dimensi/Ukuran	
Jumlah	

e. Daun Jendela (dalam kondisi layak)

Daun Jendela a	
Jenis Material	
Dimensi/Ukuran	
Jumlah	

Daun Jendela b	
Jenis Material	
Dimensi/Ukuran	
Jumlah	

Daun Jendela c	
Jenis Material	
Dimensi/Ukuran	
Jumlah	

Daun Jendela d	
Jenis Material	
Dimensi/Ukuran	
Jumlah	

f. Material komponen lainnya pada bangunan yang masih dapat dimanfaatkan (dalam kondisi layak)

Jenis Material	[illegible]
Dimensi/Ukuran	[illegible]
Jumlah	[illegible]

Jenis Material	Kayu
Dimensi/Ukuran	[illegible]
Jumlah	1

g. Kesesuaian [illegible] Pembangunan Bangunan ☐ Ya ☐ Tidak

h. Skema Bangunan yang [illegible]

☐ Tipe 1

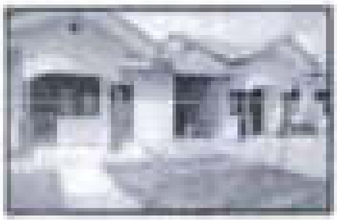

1. Bangunan terdiri dari 1 (satu) lantai;
2. Memiliki banyak ruang yang dapat difungsikan sebagai tempat aktivitas harian;
3. Struktur bangunan bersifat sederhana;
4. Tidak [illegible] ruang-ruang [illegible] yang [illegible] dibuat;
5. Contoh bangunan tipe 1 [illegible] Rumah [illegible] sederhana seperti [illegible] sebagaimana Gambar berikut:

☐ Tipe 2

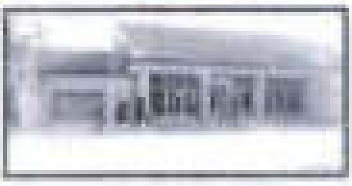

1. Memiliki banyak ruang yang dapat difungsikan sebagai tempat aktivitas harian;
2. Struktur bangunan bersifat menengah;
3. [illegible] ruang-ruang [illegible] dibuat;
4. Contoh bangunan tipe 2 adalah Rumah [illegible] sampai dengan 2 lantai sebagaimana Gambar berikut:

Tipe 3

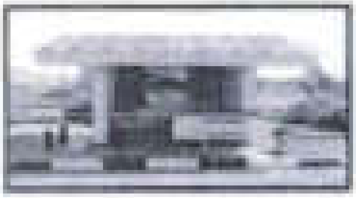

1. [illegible]
2. [illegible] yang [illegible] lengkap atau [illegible]
3. [illegible] bangunan [illegible] dengan [illegible] sebagaimana Gambar berikut:

☐ Tipe 4

1. Bangunan terdiri dari 1 (satu) lantai;
2. Memiliki banyak ruang yang [illegible] sebagai tempat aktivitas harian;
3. Struktur bangunan bersifat sederhana;
4. Tidak terdapat ruang-ruang [illegible] yang [illegible] dibuat;
5. Contoh bangunan tipe 4 adalah [illegible] seperti [illegible] sebagaimana Gambar berikut:

☐ Tidak Bangunan Lainnya

[illegible]

i. Foto Objek :

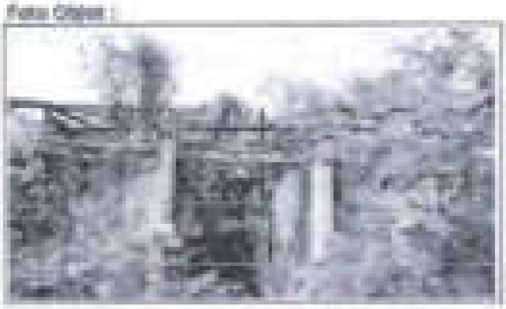

j. Keterangan Lainnya :

[illegible]

Tenaga [illegible] Pendataan, [illegible]

[illegible]

NIP. [illegible]

[illegible]

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

FORM
BONGKARAN BANGUNAN

Formulir Objek Penilaian Bongkaran Bangunan

1. **Material Hasil Pembongkaran Bangunan**
   - Alamat [illegible] Bugel No. [illegible] [illegible]
     Kec. Tanggeung [illegible]

	Keterangan	Material 1	Material 2	Material 3	Material 4
-	Jenis Material				
-	Dimensi/Ukuran				
-	Jumlah				

2. **Material Bongkaran Bangunan dalam kondisi layak pakai** [illegible]
   - Nama Bangunan : [illegible]
   - Alamat : Jl. [illegible] No. [illegible] Kec. Tanggeung [illegible]
   - Peruntukan Bangunan : [illegible]
   - Luas Total Bangunan : [illegible] m²
   - Jumlah Lantai : 1 lantai
   - a. Struktur Bangunan
     - Struktur Rangka Bangunan : ☑ Beton ☐ Baja ☐ Kayu
     - Struktur Atap Bangunan : ☐ Beton ☐ Baja ☐ [illegible] ☐ Kayu
     - Komponen Dinding : ☑ Batu Bata/Batako/[illegible] ☐ Non-Batu Bata/[illegible]
   - b. Kusen Pintu (dalam kondisi layak)

Pintu 1		
Jenis Material	:	Kayu
Dimensi/Ukuran	:	[illegible] cm
Jumlah	:	1

Pintu 2		
Jenis Material	:	Kayu
Dimensi/Ukuran	:	[illegible]
Jumlah	:	[illegible]

Pintu 3		
Jenis Material	:	Kayu
Dimensi/Ukuran	:	[illegible]
Jumlah	:	[illegible]

Pintu 4		
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

   - c. Kusen Jendela (dalam kondisi layak)

Jendela 1		
Jenis Material	:	Kayu
Dimensi/Ukuran	:	[illegible]
Jumlah	:	1

Jendela 2		
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

Jendela 3		
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

Jendela 4		
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

   - d. Daun Pintu (dalam kondisi layak)

Daun Pintu 1		
Jenis Material		
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	-

Daun Pintu 2		
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

Daun Pintu 3		
Jenis Material	:	-
Dimensi/Ukuran	:	-
Jumlah	:	-

Daun Pintu 4		
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

   - e. Daun Jendela (dalam kondisi layak)

Daun Jendela 1		
Jenis Material		
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah		

Daun Jendela 2		
Jenis Material		
Dimensi/Ukuran		
Jumlah		

Daun Jendela 3		
Jenis Material	:	-
Dimensi/Ukuran	:	-
Jumlah		-

Daun Jendela 4		
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah		

   - f. Material Bongkaran Lainnya [illegible] bangunan yang [illegible] (dalam kondisi layak)

Jenis Material	:	Besi
Dimensi/Ukuran	:	[illegible]
Jumlah		1 [illegible]

Jenis Material	Kayu
Dimensi/Ukuran	[illegible]
Jumlah	1

g. [illegible] Bangunan ☐ Ya ☑ Tidak

h. Kriteria Bangunan yang akan dibangun :

☐ Tipe 1

1. Bangunan terdiri dari 1 ruang/lantai;
2. Memiliki banyak ruang yang dapat difungsikan sebagai tempat aktivitas [illegible];
3. Struktur bangunan bersifat sederhana;
4. Tidak terdapat ruang [illegible] yang [illegible] konstruksi [illegible];
5. Contoh bangunan tipe 1 [illegible] Rumah [illegible] seperti [illegible].

☐ Tipe 2

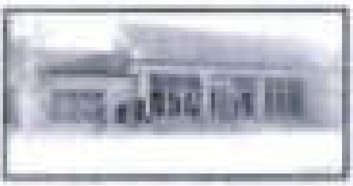

1. Memiliki banyak ruang yang dapat difungsikan sebagai tempat aktivitas manusia;
2. Struktur bangunan bersifat menengah;
3. Terdapat [illegible] yang memerlukan konstruksi khusus;
4. Contoh bangunan tipe 2 [illegible] Rumah Dinas [illegible] dengan 2 [illegible].

■ Tipe 3

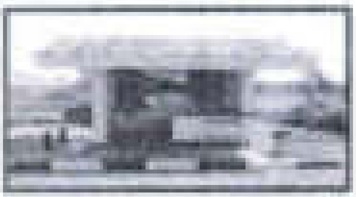

1. Memiliki struktur bangunan yang rumit dan [illegible];
2. [illegible] yang tidak lengkap atau sebagian [illegible];
3. Contoh bangunan tipe 3 [illegible] bangunan [illegible] sebagaimana [illegible].

☐ Tipe 4

1. Bangunan terdiri dari [illegible];
2. Memiliki banyak ruang yang dapat difungsikan sebagai tempat aktivitas manusia;
3. Struktur bangunan bersifat sederhana;
4. Tidak terdapat ruang [illegible] yang memerlukan konstruksi khusus;
5. Contoh bangunan tipe 4 [illegible] Rumah Dinas [illegible] sebagaimana Gambar berikut.

☐ Tipe yang lain [illegible]

[illegible]

3. Foto Situs [illegible]

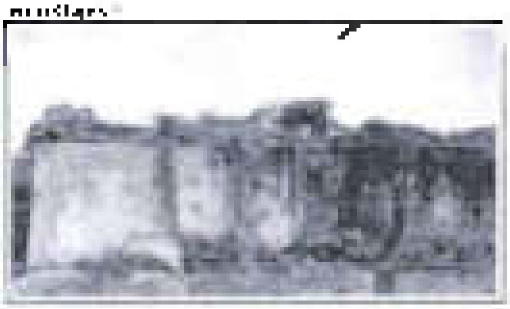

4. Keterangan Lainnya [illegible]

Tanggal [illegible]

Kepala [illegible]

[illegible]

NIP. [illegible]

[illegible]

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

FORM
BONGKARAN
BANGUNAN

Formulir Objek Penilaian Bongkaran Bangunan

1. **Material Hasil Pembongkaran s/d saat ini**

Alamat : [illegible] Tenggarong [illegible] No. [illegible] Kel. [illegible]
Kec. Tenggarong, Kutai Kartanegara

Keterangan	Material 1	Material 2	Material 3	Material 4
- Jenis Material				
- Dimensi/Ukuran				
- Jumlah				

2. Material Bongkaran Bangunan dalam kondisi layak pada Bangunan yang akan dibongkar

- Nama Bangunan : Bangunan Rumah Sakit Umum
- Alamat : [illegible] Kec. Tenggarong Kutai Kartanegara
- Peruntukan Bangunan : Gedung Ruang Medis
- Luas Total Bangunan : 2427[illegible] m²
- Jumlah Lantai : 1 lantai
- a. Struktur Bangunan
  - Struktur Rangka Bangunan ☑ Beton ☐ Baja ☐ Kayu
  - Struktur Atap Bangunan ☐ Beton ☐ Baja ☐ [illegible] ☐ [illegible]
  - Komponen Gedung ☑ Batu Bata/Batako/Hebel ☐ [illegible]
- b. Kusen Pintu (dalam kondisi layak)

Pintu 1		
Jenis Material	:	Kayu
Dimensi/Ukuran	:	200x80 cm
Jumlah		10

Pintu 2		
Jenis Material	:	Kayu
Dimensi/Ukuran	:	200x100
Jumlah		70

Pintu 3		
Jenis Material		Kayu
Dimensi/Ukuran	:	[illegible]
Jumlah	:	70

Pintu 4		
Jenis Material		
Dimensi/Ukuran		
Jumlah		

- c. Kusen Jendela (dalam kondisi layak)

Jendela 1		
Jenis Material	:	Kayu
Dimensi/Ukuran		[illegible]
Jumlah		[illegible]

Jendela 2		
Jenis Material		Kayu
Dimensi/Ukuran		50x40
Jumlah		10

Jendela 3		
Jenis Material		
Dimensi/Ukuran		
Jumlah		

Jendela 4		
Jenis Material		
Dimensi/Ukuran		
Jumlah		

- d. Daun Pintu (dalam kondisi layak)

Daun Pintu 1		
Jenis Material		
Dimensi/Ukuran		
Jumlah		

Daun Pintu 2		
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah		

Daun Pintu 3		
Jenis Material		
Dimensi/Ukuran		
Jumlah		

Daun Pintu 4		
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran		
Jumlah	:	

- e. Daun Jendela (dalam kondisi layak)

Daun Jendela 1		
Jenis Material		
Dimensi/Ukuran		
Jumlah	:	

Daun Jendela 2		
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran		
Jumlah	:	

Daun Jendela 3		
Jenis Material		
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

Daun Jendela 4		
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran		
Jumlah		

- f. Material Bongkaran Lainnya yang memiliki nilai ekonomis (dalam kondisi layak)

Jenis Material	:	Kayu papan
Dimensi/Ukuran		4m/20cm/2cm
Jumlah		[illegible]

Jenis Material		Besi
Dimensi/Ukuran		[illegible] kg
Jumlah		1 paket

Jenis Material	:	Kayu
Dimensi/Ukuran	:	[illegible] m3
Jumlah		

A
N

g. Apakah [illegible] Bangunan : ☐ Ya ☑ Tidak

h. Kriteria Bangunan yang [illegible] dibangun :

☐ Tipe 1

1. Bangunan [illegible]
2. Memiliki banyak ruang yang [illegible] sebagai tempat aktivitas [illegible]
3. Struktur bangunan [illegible]
4. Tidak [illegible] yang memerlukan konstruksi khusus
5. Contoh [illegible] sebagaimana Gambar berikut

☐ Tipe 2

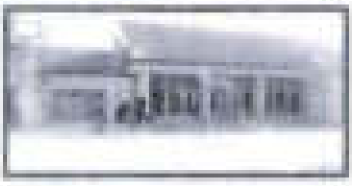

1. [illegible] ruang yang dapat digunakan sebagai tempat aktivitas [illegible]
2. Struktur bangunan [illegible]
3. Terdapat [illegible] yang memerlukan konstruksi khusus
4. Contoh bangunan tipe 2 [illegible] dengan 2 lantai sebagaimana [illegible]

☐ Tipe 3

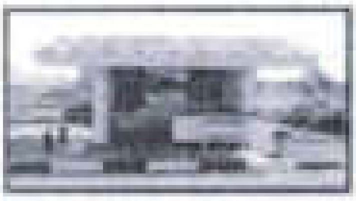

1. [illegible]
2. Menggunakan material bangunan [illegible] dengan [illegible]
3. [illegible] bangunan [illegible] dengan [illegible] sebagaimana Gambar berikut.

☐ Tipe 4

1. [illegible]
2. Memiliki banyak ruang yang dapat digunakan [illegible] sebagai aktivitas [illegible]
3. Struktur bangunan [illegible]
4. [illegible] yang memerlukan konstruksi khusus
5. Contoh bangunan tipe 4 [illegible] sebagaimana Gambar berikut.

☐ Tipe Bangunan Lainnya

[illegible]

3. Foto Objek :

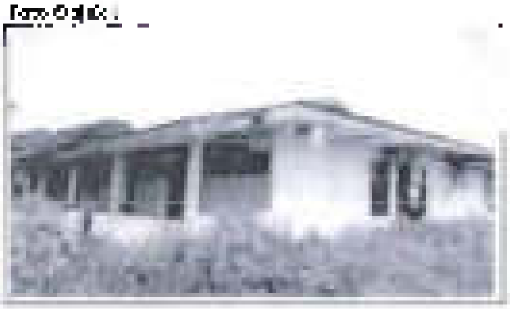

4. Keterangan Lainnya :

[illegible] 25-06-2022

Petugas [illegible]

[illegible]

NIP. [illegible]

[illegible]

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

FORM
BONGKARAN BANGUNAN

Formulir Objek Penilaian Bongkaran Bangunan

1. [illegible]
   - Alamat : [illegible] Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara

Koordinat		Derajat	Menit	Detik	[illegible]
Lintang Utara					
Lintang Selatan	:				
Bujur	:				

2. [illegible]
   - Nama Bangunan : [illegible]
   - Alamat : Jl. Imam Bonjol No. 37 Kel. Melayu Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara
   - Peruntukan Bangunan : Gedung Ruang ICU
   - Luas Total Bangunan : 2514 m²
   - Jumlah Lantai : [illegible] Lantai
   - a. Struktur Bangunan
     - Struktur Rangka Bangunan : ☑ Beton ☐ Baja ☐ Kayu
     - Struktur Atap Bangunan : ☐ Beton ☐ Baja ☐ Baja Ringan ☐ Kayu
     - Konstruksi Dinding : ☑ Batu Bata/Batako/Panel ☐ [illegible]
   - b. Kusen Pintu (dalam kondisi baik)

Pintu 1		
Jenis Material	:	Kayu
Dimensi/Ukuran	:	80x200 cm
Jumlah	:	2

Pintu 2		
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

Pintu 3		
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

Pintu 4		
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

   - c. Kusen Jendela/Ventilasi (dalam kondisi baik)

Jendela 1		
Jenis Material	:	Kayu
Dimensi/Ukuran	:	[illegible]
Jumlah	:	4

Jendela 2		
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

Jendela 3		
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

Jendela 4		
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

   - d. Daun Pintu (dalam kondisi baik)

Daun Pintu 1		
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

Daun Pintu 2		
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

Daun Pintu 3		
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

Daun Pintu 4		
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

   - e. Daun Jendela (dalam kondisi baik)

Daun Jendela 1		
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

Daun Jendela 2		
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

Daun Jendela 3		
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

Daun Jendela 4		
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

   - f. Material bongkaran lain yang ada di bangunan yang memiliki nilai ekonomis (dalam kondisi baik)

Jenis Material	:	[illegible]
Dimensi/Ukuran	:	[illegible]
Jumlah	:	1 paket

Jenis Material	:	Kayu
Dimensi/Ukuran	:	[illegible]
Jumlah	:	1

[illegible]

4. [illegible] dan Anggaran dan Biaya [illegible] [illegible] ☐ Ya ☒ Tidak

5. Kriteria Bangunan yang [illegible]

☐ Tipe 1

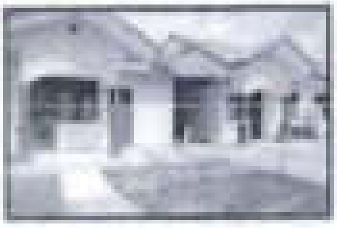

1. Bangunan terdiri dari [illegible]
2. Memiliki banyak ruang yang dapat difungsikan sebagai tempat [illegible]
3. [illegible]
4. Tidak terdapat ruang-ruang/pembatas yang [illegible] konstruksi [illegible]
5. [illegible] Gambar berikut

☐ Tipe 2

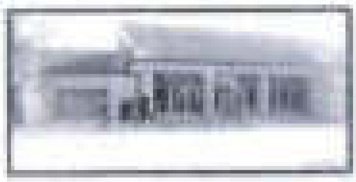

1. [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible]
4. [illegible] dengan 2 [illegible] Gambar berikut

☒ Tipe 3

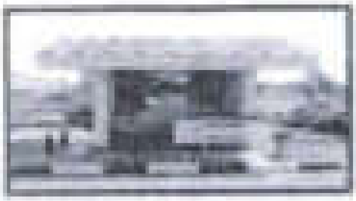

1. [illegible] bangunan yang [illegible]
2. [illegible] bangunan yang [illegible] diberikan [illegible]
3. [illegible]

☐ Tipe 4

1. Bangunan [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible]
4. Tidak terdapat [illegible]
5. [illegible] Gambar berikut

☐ [illegible] Lainnya

[illegible]

5. Foto Objek :

6. Keterangan Lainnya :

Tanggal Pelaksanaan Pendataan 22-09-2022
Petugas Pendataan

NIP. [illegible]

* [illegible]

	KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA	FORM BONGKARAN BANGUNAN

Formulir Objek Penilaian Bongkaran Bangunan

I. Material Hasil Pembongkaran Bangunan

Alamat : Lapas Perempuan Kelas IIA Tangerang, Jl. Imam Bonjol No. 37 [illegible]
Kec. Tangerang, Kota Tangerang

Keterangan		Material 1	Material 2	Material 3	Material 4
Jenis Material	:				
Dimensi/Ukuran	:				
Jumlah	:				

II. Metode Pendekatan Bangunan (Data Bangunan yang akan dibongkar)

a. Nama Bangunan : [illegible]

b. Alamat : Jl. Imam Bonjol No. 77 Kel. [illegible], Kec. Tangerang, Kota Tangerang

c. Peruntukan Bangunan : Ruang [illegible]

d. Luas Total Bangunan : 550 m2

e. Jumlah Lantai : 1 lantai

f. Struktur Bangunan

Struktur Rangka Bangunan : ☑ Beton ☐ Baja ☐ Kayu

Struktur Atap Bangunan : ☐ Beton ☐ Baja ☐ Baja Ringan ☐ Kayu

Konstruksi Dinding : ☑ Bata Merah/Batako/Hebel ☐ Kaca/Panel/[illegible]

g. Kusen Pintu (dalam kondisi layak)

Pintu 1		
Jenis Material	:	Kayu
Dimensi/Ukuran	:	80 x 200 cm
Jumlah	:	1

Pintu 2		
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

Pintu 3		
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

Pintu 4		
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

h. Kusen Jendela (dalam kondisi layak)

Jendela 1		
Jenis Material	:	Kayu
Dimensi/Ukuran	:	[illegible]
Jumlah	:	3

Jendela 2		
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

Jendela 3		
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

Jendela 4		
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

i. Daun Pintu (dalam kondisi layak)

Daun Pintu 1		
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

Daun Pintu 2		
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

Daun Pintu 3		
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

Daun Pintu 4		
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

j. Daun Jendela (dalam kondisi layak)

Daun Jendela 1		
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

Daun Jendela 2		
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

Daun Jendela 3		
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

Daun Jendela 4		
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

k. Material Bangunan Lainnya pada bangunan yang memiliki nilai ekonomis (dalam kondisi layak)

Jenis Material	:	Besi
Dimensi/Ukuran	:	1072,58 kg
Jumlah	:	[illegible]

Jenis Material	:	[illegible]
Dimensi/Ukuran	:	[illegible] m3
Jumlah	:	

[illegible] Anggaran Biaya Pembangunan Gedung : ☐ Ya ☑ Tidak

[illegible] Bangunan yang [illegible]

☐ Tipe 1

1. [illegible]
2. [illegible] banyak ruang yang dapat digunakan sebagai tempat [illegible]
3. [illegible]
4. Tidak terdapat ruang [illegible] yang memerlukan konstruksi khusus
5. Contoh bangunan tipe 1.1 adalah Rumah Dinas [illegible] seperti rumah prajurit sebagaimana Gambar berikut

☐ Tipe 2

1. [illegible]
2. Struktur bangunan bertingkat [illegible]
3. [illegible]
4. Contoh bangunan tipe 1.2 adalah Rumah Dinas [illegible] dengan 2 [illegible] sebagaimana Gambar berikut

☑ Tipe 3

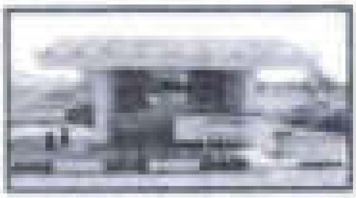

1. [illegible]
2. Bangunan [illegible] bangunan yang [illegible] dengan [illegible] lengkap [illegible]
3. Contoh bangunan tipe [illegible] tempat [illegible] dan bangunan tempat [illegible] sebagaimana Gambar berikut

☐ Tipe 4

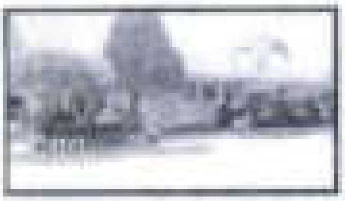

1. Bangunan [illegible]
2. [illegible] banyak ruang yang [illegible]
3. [illegible]
4. Tidak [illegible] yang [illegible] konstruksi khusus
5. Contoh bangunan tipe [illegible] adalah Rumah Dinas [illegible] seperti rumah prajurit sebagaimana Gambar berikut

☐ Tipe Bangunan Lainnya

[illegible]

3. Foto Objek

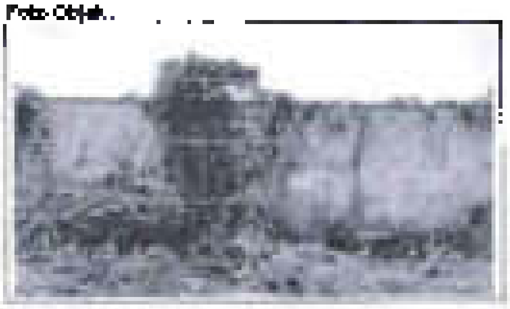

4. Keterangan Lainnya

[illegible]

	KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA **DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**	FORM BONGKARAN BANGUNAN

Formulir Objek Penilaian Bongkaran Bangunan

1. Material Hasil Pembongkaran Bangunan

Alamat : [illegible] Tenggarong, [illegible]
Kec. Tenggarong, Kutai Kartanegara

Keterangan		Material 1	Material 2	Material 3	Material 4
Jenis Material	:				
Dimensi/Ukuran	:				
Jumlah	:				

2. Material Bongkaran Bangunan dalam kondisi tegak [illegible]

Nama Bangunan : [illegible]

Alamat : [illegible] Kec. Tenggarong, Kutai Kartanegara

Tahun [illegible] : [illegible]

Luas Total Bangunan : [illegible] m²

Jumlah Lantai : [illegible] Lantai

a. Struktur Bangunan

Rangka Struktur Bangunan : ☑ Beton ☐ Baja ☐ Kayu

Rangka Atap Bangunan : ☐ Beton ☐ Baja ☐ [illegible] ☐ Kayu

[illegible] : ☑ [illegible] ☐ [illegible]

b. Kusen Pintu (dalam kondisi tegak)

Pintu 1		
Jenis Material		Kayu
Dimensi/Ukuran		[illegible]
Jumlah		2

Pintu 2		
Jenis Material		
Dimensi/Ukuran		
Jumlah		

Pintu 3		
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

Pintu 4		
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

c. Kusen Jendela (dalam kondisi tegak)

Jendela 1		
Jenis Material	:	Kayu
Dimensi/Ukuran	:	[illegible]
Jumlah	:	[illegible]

Jendela 2		
Jenis Material		Kayu
Dimensi/Ukuran		[illegible]
Jumlah		[illegible]

Jendela 3		
Jenis Material	:	Kayu
Dimensi/Ukuran	:	[illegible]
Jumlah		[illegible]

Jendela 4		
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah		

d. Daun Pintu (dalam kondisi tegak)

Daun Pintu 1		
Jenis Material		
Dimensi/Ukuran		
Jumlah		

Daun Pintu 2		
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

Daun Pintu 3		
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

Daun Pintu 4		
Jenis Material		
Dimensi/Ukuran		
Jumlah		

e. Daun Jendela (dalam kondisi tegak)

Daun Jendela 1		
Jenis Material		
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah		

Daun Jendela 2		
Jenis Material		
Dimensi/Ukuran		
Jumlah		

Daun Jendela 3		
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran		
Jumlah		

Daun Jendela 4		
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

Material [illegible] (dalam kondisi tegak)

Jenis Material		[illegible]
Dimensi/Ukuran		[illegible]
Jumlah		[illegible]

Jenis Material	:	Kayu
Dimensi/Ukuran	:	[illegible]
Jumlah	:	[illegible]

Jenis Material	:	Seng
Dimensi/Ukuran		[illegible]
Jumlah	:	[illegible] kg

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

FORM
BONGKARAN
BANGUNAN

Formulir Objek Penilaian Bongkaran Bangunan

1. [illegible]

Alamat : Jalan [illegible] No. [illegible] Kel. [illegible] Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara

Keterangan	Material 1	Material 2	Material 3	Material 4
Jenis Material				
Dimensi/Ukuran				
Jumlah				

2. Material Bongkaran Bangunan dalam kondisi layak pada bangunan yang akan dibongkar

Nama Bangunan : Bangunan Rumah Sakit Umum

- Alamat : Jl. [illegible] No. [illegible] Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara
- Peruntukan Bangunan : Pembangunan Rumah Sakit
- Luas Total Bangunan : 21,12 m²
- Jumlah Lantai : 1 lantai
- Struktur Bangunan

Struktur Rangka bangunan : ☑ Beton ☐ Baja ☐ Kayu

Struktur Atap Bangunan : ☐ Beton ☐ Baja ☐ Rangka Ringan ☐ Kayu

Komponen Dinding : ☑ Bata/Batako/[illegible] ☐ Non-[illegible]

a. Kusen Pintu (dalam kondisi layak)

Pintu 1		
Jenis Material	:	Kayu
Dimensi/Ukuran	:	200x80 cm
Jumlah	:	

Pintu 2		
Jenis Material	:	Kayu
Dimensi/Ukuran	:	200x100
Jumlah	:	

Pintu 3		
Jenis Material	:	Kayu
Dimensi/Ukuran	:	200x80
Jumlah	:	1

Pintu 4		
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

b. Kusen Jendela (dalam kondisi layak)

Jendela 1		
Jenis Material	:	Kayu
Dimensi/Ukuran	:	60x30
Jumlah	:	4

Jendela 2		
Jenis Material	:	Kayu
Dimensi/Ukuran	:	100x120
Jumlah	:	4

Jendela 3		
Jenis Material	:	Kayu
Dimensi/Ukuran	:	[illegible]
Jumlah	:	3

Jendela 4		
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

c. Daun Pintu (dalam kondisi layak)

Daun Pintu 1		
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	-
Jumlah	:	-

Daun Pintu 2		
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

Daun Pintu 3		
Jenis Material	:	-
Dimensi/Ukuran	:	-
Jumlah	:	

Daun Pintu 4		
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

d. Daun Jendela (dalam kondisi layak)

Daun Jendela 1		
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

Daun Jendela 2		
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

Daun Jendela 3		
Jenis Material	:	-
Dimensi/Ukuran	:	-
Jumlah	:	-

Daun Jendela 4		
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

e. Lain-lain material bongkaran bangunan yang masih dapat dimanfaatkan (sebutkan [illegible])

Jenis Material	:	Besi
Dimensi/Ukuran	:	23,04 kg
Jumlah	:	1 paket

Jenis Material	:	Kaca
Dimensi/Ukuran	:	0,2 m2
Jumlah	:	1

Jenis Material	:	Seng
Dimensi/Ukuran	:	100x[illegible]
Jumlah	:	1 kg

- [illegible] Anggaran atas Biaya Pembangunan Bangunan ☐ Ya ☒ Tidak

- 5. Kriteria Bangunan yang akan dibangun

☐ Tipe 1

1. Bangunan [illegible]
2. Memiliki banyak ruang yang dapat digunakan sebagai tempat aktivitas harian
3. Struktur [illegible]
4. [illegible] Bhakti
5. Contoh bangunan tipe 1 adalah Rumah [illegible]

☐ Tipe 2

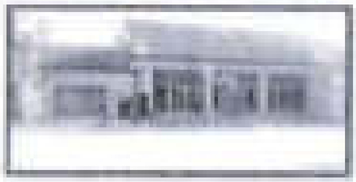

1. Memiliki [illegible] ruang yang dapat digunakan sebagai tempat aktivitas harian
2. [illegible]
3. Terdapat ruang-ruang [illegible]
4. Contoh bangunan tipe 2 adalah Rumah [illegible] dengan 2 lantai sebagaimana Gambar [illegible]

☑ Tipe 3

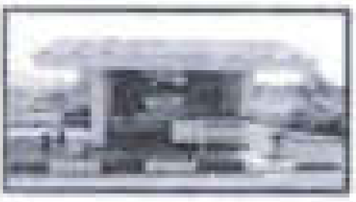

1. Memiliki struktur [illegible] dan sederhana
2. Menggunakan material [illegible] dengan [illegible]
3. Contoh bangunan tipe 3 [illegible]

☐ Tipe 4

1. Bangunan [illegible]
2. Memiliki banyak ruang yang dapat digunakan sebagai tempat aktivitas harian
3. [illegible]
4. Tidak terdapat ruang [illegible]
5. Contoh bangunan tipe 4 adalah Rumah [illegible] sebagaimana Gambar [illegible]

☐ [illegible]

[illegible]

3. Foto Objek :

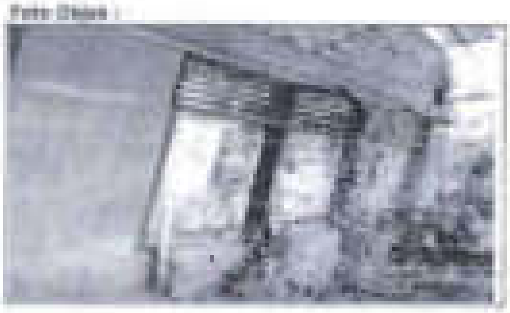

4. Keterangan Lainnya :

[illegible]

[illegible]

NIP. [illegible]

[illegible]

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

FORM
BONGKARAN BANGUNAN

Formulir Objek Penilaian Bongkaran Bangunan

1. Material Hasil Pembongkaran Bangunan
   Alamat : [illegible] Jl. [illegible] Kab. Tanggamus Kota [illegible]

Keterangan		Material 1	Material 2	Material 3	Material 4
Jenis Material	:				
Dimensi/Ukuran	:				
Jumlah					

2. Rincian Komponen Bangunan dalam kondisi layak pada Bangunan yang akan dibongkar:
   a. Nama Bangunan : Bangunan Rumah [illegible]
   Alamat : Jl. [illegible]
   Peruntukan Bangunan : Gedung [illegible]
   - Luas Total Bangunan : [illegible] m²
   - Jumlah Lantai : 1 lantai
   b. Struktur Bangunan
   Struktur Rangka Bangunan : ☑ Beton ☐ Baja ☐ Kayu
   Rangka Atap Bangunan : ☐ Beton ☐ Baja ☐ Baja Ringan ☐ Kayu
   Pasangan Dinding : ☑ Bata Merah/Batako [illegible] ☐ [illegible]
   - c. Kusen Pintu (dalam kondisi layak)

Pintu 1	
Jenis Material	Kayu
Dimensi/Ukuran	[illegible] cm
Jumlah	[illegible]

Pintu 2	
Jenis Material	Kayu Papan
Dimensi/Ukuran	[illegible]
Jumlah	[illegible]

Pintu 3	
Jenis Material	Kayu
Dimensi/Ukuran	[illegible]
Jumlah	[illegible]

Pintu 4	
Jenis Material	Kayu
Dimensi/Ukuran	[illegible]
Jumlah	21

   - Kusen Jendela (dalam kondisi layak)

Jendela 1	
Jenis Material	Kayu
Dimensi/Ukuran	[illegible]
Jumlah	[illegible]

Jendela 2	
Jenis Material	Kayu
Dimensi/Ukuran	[illegible]
Jumlah	47

Jendela 3	
Jenis Material	Kayu
Dimensi/Ukuran	[illegible]
Jumlah	41

Jendela 4	
Jenis Material	
Dimensi/Ukuran	
Jumlah	

   - d. Daun Pintu (dalam kondisi layak)

Daun Pintu 1	
Jenis Material	
Dimensi/Ukuran	
Jumlah	

Daun Pintu 2	
Jenis Material	
Dimensi/Ukuran	
Jumlah	

Daun Pintu 3	
Jenis Material	
Dimensi/Ukuran	
Jumlah	

Daun Pintu 4	
Jenis Material	
Dimensi/Ukuran	
Jumlah	

   e. Daun Jendela (dalam kondisi layak)

Daun Jendela 1	
Jenis Material	
Dimensi/Ukuran	
Jumlah	

Daun Jendela 2	
Jenis Material	
Dimensi/Ukuran	
Jumlah	

Daun Jendela 3	
Jenis Material	
Dimensi/Ukuran	
Jumlah	

Daun Jendela 4	
Jenis Material	
Dimensi/Ukuran	
Jumlah	

   - f. Material Bangunan Lainnya pada bangunan yang [illegible] pada saat [illegible]

Jenis Material	Seng
Dimensi/Ukuran	1.217,[illegible] kg
Jumlah	1 [illegible]

Jenis Material	Kayu
Dimensi/Ukuran	3,75 m3
Jumlah	1

Jenis Material	[illegible]
Dimensi/Ukuran	[illegible]
Jumlah	[illegible]

2. Ketersediaan Anggaran atau Biaya Pembangunan Bangunan ☐ Ada ☒ Tidak

3. Tipe Bangunan yang akan dibangun

☐ Tipe 1

1. Bangunan terdiri dari 1 (satu) lantai
2. Memiliki [illegible] ruang yang dapat difungsikan [illegible]
3. Struktur bangunan sederhana [illegible]
4. Tidak memiliki [illegible]
5. Contoh bangunan [illegible] seperti Rumah Dinas [illegible] sebagaimana Gambar berikut

☐ Tipe 2

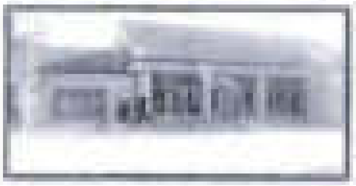

1. Memiliki [illegible] ruang yang dapat difungsikan [illegible]
2. Struktur bangunan [illegible]
3. Terdapat [illegible] yang [illegible]
4. Contoh [illegible] Rumah Dinas [illegible] sebagaimana Gambar berikut

☐ Tipe 3

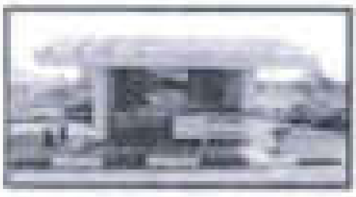

1. [illegible] bangunan yang [illegible]
2. [illegible]
3. Contoh bangunan [illegible] sebagaimana Gambar berikut

☐ Tipe 4

1. [illegible]
2. [illegible] dapat difungsikan sebagai [illegible]
3. Struktur bangunan sederhana [illegible]
4. Tidak [illegible]
5. [illegible] Rumah Dinas [illegible] sebagaimana Gambar berikut

☐ Tipe Bangunan Lainnya

[illegible]

3. Foto Objek :

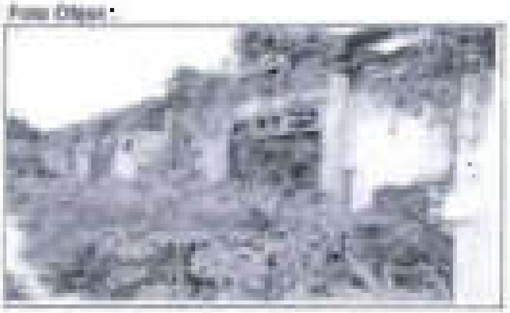

4. Keterangan Lainnya :

[illegible] Pendataan 20-03-2020
Petugas Pendataan

[illegible]
NIP. [illegible]

[illegible]

	KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA	FORM BONGKARAN BANGUNAN

Formulir Objek Penilaian Bongkaran Bangunan

1. Material Hasil Pembongkaran Bangunan
   - Alamat : [illegible] Jl. [illegible] No. 37 Rt. 20 [illegible]
     Kec. [illegible] Kota [illegible]

Keterangan	Material 1	Material 2	Material 3	Material 4
Jenis Material				
Dimensi/Ukuran				
Jumlah				

2. Material Bongkaran Bangunan dalam Kondisi Terpasang pada Bangunan yang Akan Dibongkar
   - Nama Bangunan : Bangunan [illegible]
   - Alamat : Jl. [illegible] No. 37 Rt. 20 [illegible] Kota [illegible]

     Peruntukan Bangunan : Rumah Tinggal [illegible]

     Luas [illegible] Bangunan : 31 m²

     Jumlah Lantai : 1 Lantai
   - a. Struktur Bangunan

     Struktur Rangka Bangunan : ☐ Beton ☐ Baja ☐ Kayu

     Struktur Atap Bangunan : ☐ [illegible] ☐ Baja ☐ Baja Ringan ☐ Kayu

     [illegible] : ☐ [illegible] ☐ [illegible]
   - b. Kusen Pintu (dalam kondisi layak)

Kusen Pintu 1		
Jenis Material	:	Kayu
Dimensi/Ukuran	:	82x180 cm
Jumlah	:	

Kusen Pintu 2		
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

Kusen Pintu 3		
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

Kusen Pintu 4		
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

   - c. Kusen Jendela (dalam kondisi layak)

Jendela 1		
Jenis Material	:	Kayu
Dimensi/Ukuran	:	50x50
Jumlah	:	1

Jendela 2		
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

Jendela 3		
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

Jendela 4		
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

   - d. Daun Pintu (dalam kondisi layak)

Daun Pintu 1		
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

Daun Pintu 2		
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

Daun Pintu 3		
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

Daun Pintu 4		
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

   - e. Daun Jendela (dalam kondisi layak)

Daun Jendela 1		
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

Daun Jendela 2		
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

Daun Jendela 3		
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

Daun Jendela 4		
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

   - f. Material Bongkaran Lain misalnya rangka atap yang memiliki nilai ekonomis (dalam kondisi layak)

Jenis Material	:	Kayu
Dimensi/Ukuran	:	[illegible]
Jumlah	:	1 [illegible]

Jenis Material	:	[illegible]
Dimensi/Ukuran	:	[illegible]
Jumlah	:	

c. [illegible] : ☐ Ya ☒ Tidak

d. Contoh Bangunan yang akan dibangun :

☐ Tipe 1

1. Bangunan [illegible] dan [illegible];
2. [illegible] dapat difungsikan [illegible];
3. [illegible];
4. Tidak [illegible] yang [illegible];
5. Contoh bangunan tipe [illegible] adalah Rumah Dinas [illegible] Gambar [illegible].

☐ Tipe 2

1. [illegible] dapat difungsikan [illegible];
2. Struktur bangunan [illegible];
3. [illegible] yang memiliki [illegible];
4. Contoh bangunan [illegible] Gambar [illegible].

☑ Tipe 3

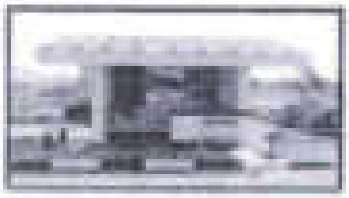

1. [illegible] yang tinggi dan [illegible];
2. Menggunakan [illegible] lengkap [illegible];
3. Contoh [illegible] bangunan [illegible] Gambar [illegible].

☐ Tipe 4

1. Bangunan [illegible];
2. [illegible] dapat difungsikan sebagai tempat [illegible];
3. [illegible] bangunan [illegible];
4. [illegible];
5. Contoh [illegible] Rumah Dinas [illegible] Gambar berikut.

☐ Tipe bangunan Lainnya

[illegible]

3. Foto Objek :

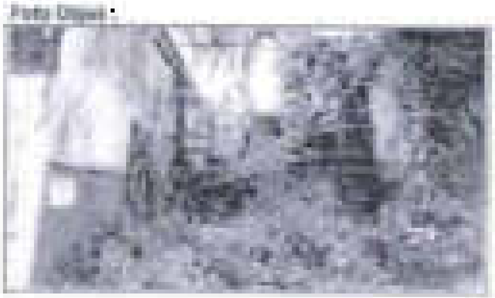

4. Keterangan Lainnya :

[illegible] Pengadilan [illegible]
[illegible] Pendaftar

[illegible]
NIP. [illegible]

[illegible]

	KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA	FORM BONGKARAN BANGUNAN

Formulir Objek Penilaian Bongkaran Bangunan

1. Lokasi Hasil Pembongkaran Bangunan
   - Alamat : Lapas Perempuan Kelas [illegible] Tangerang, Jl. [illegible] No. [illegible] Kota Tangerang, [illegible]

Keterangan		Material 1	Material 2	Material 3	Material 4
Jenis Material	:				
Dimensi/Ukuran	:				
Jumlah					

2. Material Bongkaran Bangunan yang kondisi layak pakai [illegible]
   - Nama Bangunan : [illegible]
   - Alamat : [illegible] Kota Tangerang, [illegible]
   - Peruntukan Bangunan : Tempat [illegible]
   - Luas Total Bangunan : [illegible] m²
   - Jumlah Lantai : 1 lantai
   - a. Struktur Bangunan
     - Struktur Rangka Bangunan : ☑ Beton ☐ Baja ☐ Kayu
     - Struktur Atap Bangunan : ☐ Beton ☐ Baja ☐ [illegible] ☐ Kayu
     - Komponen Bangunan : ☑ [illegible] ☐ [illegible]
   - b. Kusen Pintu (dalam kondisi layak)

Pintu 1		
Jenis Material	:	Kayu
Dimensi/Ukuran	:	[illegible]
Jumlah		1

Pintu 2		
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

Pintu 3		
Jenis Material		
Dimensi/Ukuran		
Jumlah		

Pintu 4		
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran		
Jumlah		

   - c. Kusen Jendela (dalam kondisi layak)

Jendela 1		
Jenis Material	:	Kayu
Dimensi/Ukuran	:	[illegible]
Jumlah	:	-

Jendela 2		
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

Jendela 3		
Jenis Material		
Dimensi/Ukuran		
Jumlah		

Jendela 4		
Jenis Material		
Dimensi/Ukuran		
Jumlah		

   - d. Daun Pintu (dalam kondisi layak)

Daun Pintu 1		
Jenis Material		
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah		-

Daun Pintu 2		
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran		
Jumlah		

Daun Pintu 3		
Jenis Material		-
Dimensi/Ukuran		-
Jumlah		

Daun Pintu 4		
Jenis Material		
Dimensi/Ukuran		
Jumlah		

   - e. Daun Jendela (dalam kondisi layak)

Daun Jendela 1		
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah		

Daun Jendela 2		
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

Daun Jendela 3		
Jenis Material		
Dimensi/Ukuran		
Jumlah		

Daun Jendela 4		
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah		

   - f. Material Bongkaran lainnya pada bangunan yang kondisi layak (lantai, keramik, genteng, dll)

Jenis Material	:	[illegible]
Dimensi/Ukuran	:	[illegible]
Jumlah	:	[illegible]

Jenis Material	:	[illegible]
Dimensi/Ukuran	:	[illegible]
Jumlah	:	-

[illegible] Tersedia [illegible] Anggaran [illegible] Pembangunan [illegible] Bangunan ☐ Ya ☑ Tidak

[illegible] Kriteria Bangunan yang akan dibangun :

☐ Tipe 1

1. [illegible]
2. Memiliki banyak ruang yang [illegible] digunakan sebagai tempat [illegible]
3. Struktur bangunan [illegible]
4. Tidak terdapat ruang-ruang [illegible]
5. Contoh bangunan tipe 1 [illegible] Gambar berikut

☐ Tipe 2

1. Memiliki [illegible] ruang yang dapat [illegible]
2. [illegible]
3. Terdapat [illegible] yang [illegible]
4. Contoh bangunan tipe 2 [illegible]

☑ Tipe 3

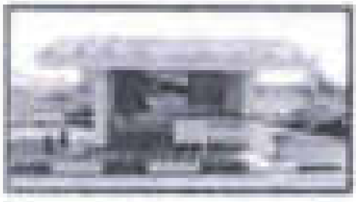

1. [illegible] bangunan yang ringan dan [illegible]
2. Menggunakan [illegible] bangunan [illegible] dengan [illegible] yang tidak lengkap [illegible]
3. Contoh bangunan tipe 3 [illegible] tempat [illegible] sebagaimana [illegible]

☐ Tipe 4

1. Bangunan terdiri dari [illegible]
2. [illegible] sebagai tempat [illegible]
3. [illegible]
4. [illegible]
5. Contoh bangunan tipe 4 [illegible] Gambar berikut:

☐ Tipe Bangunan Lainnya

[illegible]

3. Foto Objek :

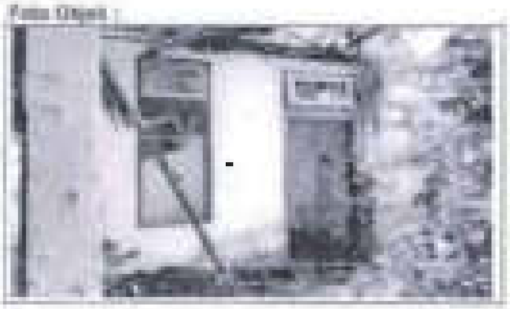

4. Keterangan Lainnya :

Tanggal Pendataan [illegible], 26-05-2023

Petugas Pendataan

[illegible]

[illegible]

* [illegible]

	KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA	FORM BONGKARAN BANGUNAN

Formulir Objek Penilaian Bongkaran Bangunan

1. Faktor Fisik Pembongkaran Bangunan
- Alamat : Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong, Jl. [illegible] No 37 Rt 03 Kel. Melayu Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara

Keterangan	Material 1	Material 2	Material 3	Material 4
Jenis Material				
Dimensi/Ukuran				
Jumlah				

2. Material Bongkaran Bangunan dalam kondisi layak pada Bangunan yang akan dibongkar
- Nama Bangunan : Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen
- Alamat : Jl. Imam Bonjol No 37 Kel. Melayu Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara
- Peruntukan Bangunan : Mushola
- Luas Total Bangunan : 72 m²
- Jumlah Lantai : 1 Lantai
- a. Struktur Bangunan
  - Struktur Rangka Bangunan : ☑ Beton ☐ Baja ☐ Kayu
  - Struktur Atap Bangunan : ☐ Beton ☐ Baja ☐ Baja Ringan ☐ Kayu
  - Penutup Dinding : ☑ Bata/Batako/Plester aci ☐ Non-Bata/Batako/Plester aci
- b. Kusen Pintu (dalam kondisi layak)

Pintu 1		
Jenis Material	:	Kayu
Dimensi/Ukuran	:	[illegible]
Jumlah	:	

Pintu 2		
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

Pintu 3		
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

Pintu 4		
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

- c. Kusen Jendela (dalam kondisi layak)

Jendela A		
Jenis Material	:	Kayu
Dimensi/Ukuran	:	[illegible]
Jumlah	:	4

Jendela B		
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

Jendela C		
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

Jendela D		
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

- d. Daun Pintu (dalam kondisi layak)

Daun Pintu 1		
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

Daun Pintu 2		
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

Daun Pintu 3		
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

Daun Pintu 4		
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

- Daun Jendela (dalam kondisi layak)

Daun Jendela A		
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

Daun Jendela B		
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

Daun Jendela C		
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

Daun Jendela D		
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

- Material Bongkaran lainnya yang ada pada bangunan yang akan dibongkar (dalam kondisi layak)

Jenis Material	:	[illegible]
Dimensi/Ukuran	:	110,60 kg
Jumlah	:	1 paket

Jenis Material	:	Kayu
Dimensi/Ukuran	:	0,75 m3
Jumlah	:	1

Jenis Material	:	Atap [illegible]
Dimensi/Ukuran	:	[illegible]
Jumlah	:	

2. [illegible] Pembangunan Bangunan : ☐ Ya ☑ Tidak

[illegible] bangunan yang akan dibangun :

☐ Tipe 1

1. Tinggi [illegible]
2. Memiliki [illegible] ruang yang dapat difungsikan sebagai tempat [illegible]
3. Struktur bangunan [illegible]
4. Tidak terdapat ruang-ruang [illegible] yang [illegible]
5. Contoh bangunan tipe [illegible] Lantai [illegible]

☐ Tipe 2

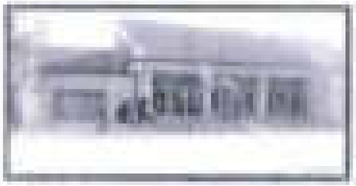

1. Memiliki [illegible] ruang yang dapat difungsikan sebagai tempat aktivitas hunian
2. Struktur bangunan [illegible]
3. Terdapat ruang-ruang penunjang yang [illegible]
4. Contoh bangunan tipe 2 adalah Rumah [illegible] 2 Lantai sebagaimana Gambar [illegible]

☐ Tipe 3

1. [illegible] struktur bangunan yang tinggi dan [illegible]
2. Menggunakan [illegible]
3. Contoh bangunan tipe 3 [illegible] bangunan [illegible] sebagaimana Gambar [illegible]

☐ Tipe 4

1. Bangunan terdiri dari [illegible]
2. Memiliki banyak ruang yang dapat difungsikan sebagai tempat aktivitas hunian;
3. [illegible]
4. [illegible] ruang-ruang penunjang [illegible]
5. Contoh bangunan tipe 4 [illegible] Lantai [illegible]

☐ Tipe [illegible]

[illegible]

3. Foto Objek :

4. Keterangan Lainnya :

[illegible] 2023
Petugas Pendata

[illegible]
NIP [illegible]

[illegible]

	KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA	FORM BONGKARAN BANGUNAN

Formulir Objek Penilaian Bongkaran Bangunan

1. **Rekap Hasil Pembongkaran Bangunan**

Lokasi : Lokasi Penyimpanan [illegible] Jalan [illegible] No. [illegible] Kel. [illegible], Kec. [illegible], Kota Karanganyar

Nama Bagian	Material 1	Material 2	Material 3	Material 4
Jenis Material				
Dimensi/Ukuran				
Jumlah				

2. **Material Bongkaran Bangunan dalam kondisi layak pada Bangunan yang akan dibongkar**

Nama Bangunan : Bangunan Rumah Genset

Alamat : Jalan [illegible] No. [illegible] Kel. [illegible], Kec. [illegible], Kota Karanganyar

- Tahun Pembangunan : [illegible]
- Luas Total Bangunan : [illegible] m²

Jumlah Lantai : 1 Lantai

- Struktur Bangunan

Struktur Rangka Bangunan : ☒ Beton ☐ Baja ☐ Kayu

Struktur Atap Bangunan : ☐ Beton ☐ Baja ☐ Rangka Baja Ringan ☐ Kayu

Kondisi Dinding : ☒ Bata Merah/Batako [illegible]

☐ Non Bata Merah/Batako/Tanpa [illegible]

a. Kusen Pintu (sebutkan kondisi layak)

Pintu 1

Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

Pintu 2

Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

Pintu 3

Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

Pintu 4

Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

b. Kusen Jendela (sebutkan kondisi layak)

Jendela 1

Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

Jendela 2

Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

Jendela 3

Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

Jendela 4

Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

c. Daun Pintu (sebutkan kondisi layak)

Daun Pintu 1

Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

Daun Pintu 2

Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

Daun Pintu 3

Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

Daun Pintu 4

Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

d. Daun Jendela (sebutkan kondisi layak)

Daun Jendela 1

Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

Daun Jendela 2

Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

Daun Jendela 3

Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

Daun Jendela 4

Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

Material bongkaran lainnya [illegible] [illegible] [illegible]

Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

5. [illegible] Pembangunan Bangunan : ☐ Ya ☒ Tidak

6. [illegible] yang akan dibangun :

☐ Tipe 1

1. [illegible]
2. [illegible] sebagai tempat aktivitas hunian
3. Struktur bangunan [illegible]
4. Tidak [illegible] yang [illegible]
5. Contoh [illegible] sebagaimana Gambar berikut

☐ Tipe 2

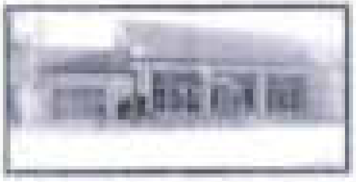

1. Memiliki [illegible] yang [illegible] sebagai tempat aktivitas hunian
2. Struktur bangunan [illegible]
3. [illegible]
4. Contoh [illegible] 2 Lantai sebagaimana Gambar berikut

☒ Tipe 3

1. [illegible]
2. Menggunakan material bangunan yang [illegible]
3. Contoh [illegible] sebagaimana Gambar berikut

☐ Tipe 4

1. Bangunan [illegible]
2. Memiliki [illegible] yang dapat [illegible] sebagai tempat [illegible]
3. [illegible]
4. Tidak [illegible]
5. Contoh bangunan tipe [illegible] sebagaimana Gambar berikut

☐ [illegible]

[illegible]

3. - Foto Objek :

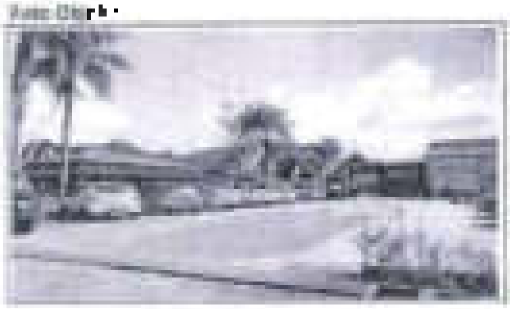

4. - Keterangan Lainnya :

Tanggal Pelaksanaan Peninjauan: 22-09-2022
Petugas Peninjau

[illegible]
[illegible]

[illegible]

	KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA **DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**	FORM **BONGKARAN BANGUNAN**

Formulir Objek Penilaian Bongkaran Bangunan

1. Material Hasil Pembongkaran Bangunan
   - Alamat : Lapas [illegible] Kelas IIA Tenggarong, Jl. Imam Bonjol No. 37 Rt. 29 Kel. Melayu, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara

Keterangan		Material 1	Material 2	Material 3	Material 4
Jenis Material					
Dimensi/Ukuran					
Jumlah					

2. [illegible]
   - Nama Bangunan : [illegible]
   - Alamat : Jl. Imam Bonjol No. 37 Rt. 29 Kel. Melayu, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara
   - Peruntukan Bangunan : [illegible]
   - Luas Total Bangunan : 72 m²
   - Jumlah Lantai : 1 Lantai
   - a. Struktur Bangunan
     - Struktur Rangka Bangunan : ☑ Beton ☐ Baja ☐ Kayu
     - Struktur Atap Bangunan : ☐ Beton ☐ Baja ☐ Baja Ringan ☐ Kayu
     - Komponen Dinding : ☑ Bata/ Bata Batako/Beton Precast (Non - Bata/ Batako/Beton Precast)
   - b. Kusen Pintu (jenis dan kondisi fisiknya)

Pintu		
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

Pintu		
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

Pintu		
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

Pintu		
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

   - c. Kusen Jendela (jenis dan kondisi fisiknya)

Jendela	
Jenis Material	
Dimensi/Ukuran	
Jumlah	

Jendela	
Jenis Material	
Dimensi/Ukuran	
Jumlah	

Jendela	
Jenis Material	
Dimensi/Ukuran	
Jumlah	

Jendela	
Jenis Material	
Dimensi/Ukuran	
Jumlah	

   - d. Daun Pintu (jenis dan kondisi fisiknya)

Daun Pintu		
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

Daun Pintu		
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

Daun Pintu		
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

Daun Pintu		
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

   - e. Daun Jendela (jenis dan kondisi fisiknya)

Daun Jendela		
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

Daun Jendela		
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

Daun Jendela		
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

Daun Jendela		
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

   - Material Bangunan Lainnya [illegible] (jenis dan kondisi fisiknya)

Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah		

Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran		
Jumlah		

2. [illegible] Perizinan dan Biaya Pemeliharaan Bangunan : ☐ [illegible] ☑ [illegible]

3. Kriteria Bangunan yang [illegible] :

☐ Tipe 1

1. Bangunan terdiri dari 1 (satu) lantai
2. Tidak terlalu banyak ruang yang dapat difungsikan sebagai tempat [illegible]
3. Struktur bangunan bersifat sederhana
4. Tidak terdapat [illegible] yang memerlukan [illegible]
5. Contoh bangunan tipe 1 adalah [illegible] sebagaimana gambar berikut

☐ Tipe 2

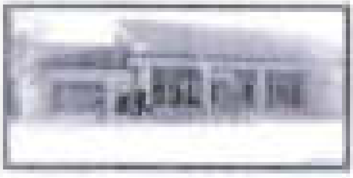

1. Memiliki banyak ruang yang dapat difungsikan sebagai tempat aktivitas [illegible]
2. Struktur bangunan bersifat menengah.
3. Terdapat ruang-ruang/fasilitas yang memerlukan [illegible]
4. Contoh bangunan tipe 2 [illegible] sebagaimana gambar berikut

☑ Tipe 3

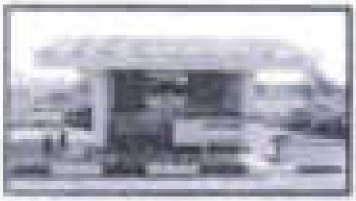

1. [illegible] bangunan yang megah dan [illegible]
2. Menggunakan material bangunan yang [illegible] dengan [illegible] lengkap atau [illegible]
3. [illegible] bangunan [illegible] sebagaimana gambar berikut

☐ Tipe 4

1. Bangunan terdiri dari 1 (satu) lantai
2. Tidak terlalu banyak ruang yang dapat difungsikan sebagai tempat aktivitas [illegible]
3. Struktur bangunan bersifat sederhana
4. Tidak terdapat ruang/fasilitas yang memerlukan perawatan khusus
5. Contoh bangunan tipe 4 adalah [illegible] sebagaimana gambar berikut

☐ Tipe Bangunan Lainnya

[illegible]

5. Foto Objek :

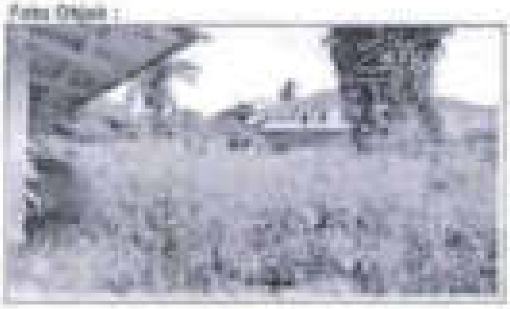

6. Keterangan Lainnya :

Tanggal [illegible], 25 [illegible] 2022

[illegible]

[illegible]

NIP. [illegible]

[illegible]

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

FORM
BONGKARAN
BANGUNAN

Formulir Objek Penilaian Bongkaran Bangunan

1. Material Hasil Pembongkaran Bangunan
   - Alamat : [illegible] Kec. Tanggeung, Kab. [illegible]

Kelompok		Material 1	Material 2	Material 3	Material 4
Jenis Material					
Dimensi/Ukuran					
Jumlah	:				

2. Material bongkaran bangunan yang masih layak pada Bangunan yang akan dibongkar
   - Nama Bangunan : [illegible]
   - Alamat : [illegible] Kec. Tanggeung, [illegible]
   - Peruntukan Bangunan : [illegible]
   - Luas Total Bangunan : [illegible] m2
   - Jumlah Lantai : 1 Lantai
   - a. Struktur Bangunan
     - Struktur Rangka Bangunan : ☑ Beton ☐ Baja ☐ Kayu
     - Struktur Atap Bangunan : ☐ Beton ☐ Kayu ☐ Baja Ringan ☐ Baja
     - Komponen Dinding : ☑ Batu Bata/Batako/Precast ☐ Non Batu Bata/Batako/Precast
   - b. Rangka Pintu (dalam kondisi layak)

	Pintu 1	
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

	Pintu 2	
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

	Pintu 3	
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

	Pintu 4	
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

   - c. Rangka Jendela (dalam kondisi layak)

	Jendela 1	
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

	Jendela 2	
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

	Jendela 3	
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

	Jendela 4	
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

   - d. Daun Pintu (dalam kondisi layak)

	Daun Pintu 1	
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

	Daun Pintu 2	
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

	Daun Pintu 3	
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

	Daun Pintu 4	
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

   - e. Daun Jendela (dalam kondisi layak)

	Daun Jendela 1	
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

	Daun Jendela 2	
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

	Daun Jendela 3	
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

	Daun Jendela 4	
Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

   - f. Material bongkaran lainnya pada bangunan yang memiliki nilai ekonomis (dalam kondisi layak)

Jenis Material	:	Seng
Dimensi/Ukuran	:	0,55 kg
Jumlah	:	1 paket

Jenis Material	:	
Dimensi/Ukuran	:	
Jumlah	:	

g. [illegible] Bangunan Cagar [illegible] : ☐ Ya ☐ Tidak

h. [illegible] bangunan yang akan dibangun :

☐ Tipe 1

1. Bangunan terdiri dari [illegible]
2. [illegible] banyak ruang [illegible]
3. [illegible] bangunan [illegible]
4. Tidak terdapat ruang-ruang/peralatan [illegible] konstruksi khusus;
5. Contoh bangunan tipe 1 [illegible] seperti [illegible] Gambar berikut

☐ Tipe 2

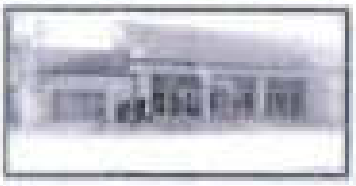

1. Memiliki banyak ruang [illegible]
2. [illegible]
3. Terdapat [illegible] konstruksi khusus;
4. Contoh bangunan tipe 2 adalah Rumah Dinas [illegible] Gambar berikut

☒ Tipe 3

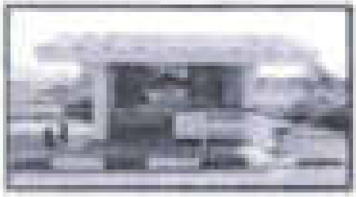

1. Memiliki struktur bangunan yang [illegible]
2. [illegible]
3. Contoh [illegible] tempat parkir, dan bangunan [illegible]

☐ Tipe 4

1. Bangunan terdiri dari [illegible]
2. [illegible] banyak ruang yang dapat [illegible]
3. Struktur bangunan [illegible] sederhana;
4. Tidak terdapat ruang-ruang/peralatan [illegible] konstruksi khusus;
5. Contoh bangunan tipe 4 adalah [illegible] seperti [illegible] Gambar berikut

☐ Tipe Bangunan Lainnya :

[illegible]

3. Foto [illegible] :

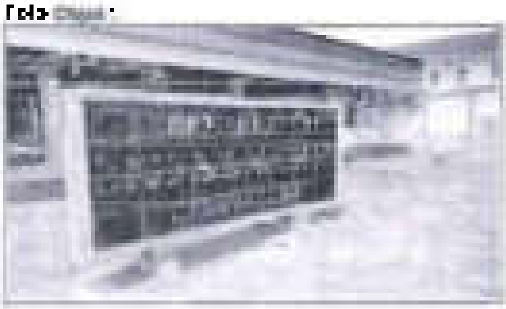

4. Keterangan Lainnya :

Tanggal [illegible]
Pejabat Penilai [illegible]

[illegible]
NIP. [illegible]

[illegible]

B

SK TIM DAN SURAT TUGAS

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SAMARINDA

NOMOR KEP-173/KNL.1502/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI PEMERINTAH PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SAMARINDA, DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, KEMENTERIAN KEUANGAN

KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SAMARINDA,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.06/2020 tentang Penilaian oleh Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Penilaian dilakukan oleh Penilai Pemerintah secara tim Penilai;

b. bahwa sesuai dengan Surat Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong Nomor W.18.PAS.PAS.7-PB.05.04-2256 tanggal 26 September 2023, terdapat permohonan penilaian pada Satuan Kerja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong;

c. bahwa dalam rangka melaksanakan Penilaian sesuai permohonan/penugasan tersebut, perlu membentuk Tim Penilai;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Samarinda tentang Pembentukan Tim Penilai pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Samarinda, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.06/2016 tentang Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 627);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.06/2020 tentang Penilaian Oleh Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1355);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954);

4. Peraturan...../Halaman 2

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.06/2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1294);
5. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 2/KN/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian, Kendali Mutu, dan Kaji Ulang atas Laporan Penilaian oleh Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 9/KN/2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SAMARINDA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI PEMERINTAH PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SAMARINDA, DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, KEMENTERIAN KEUANGAN.

KESATU : Membentuk Tim Penilai Pemerintah pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Samarinda, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan, yang selanjutnya disebut Tim Penilai, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Samarinda ini untuk melaksanakan penilaian secara tim Penilai atas Objek Penilaian pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong berupa Bangunan Yang Akan Dibongkar dalam rangka Pemindahtanganan BMN (Penjualan).

KEDUA : Keanggotaan dalam Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak dapat diwakilkan atau dikuasakan kepada pihak lain.

KETIGA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
1. meneliti kelengkapan dokumen penilaian;
2. melakukan pengecekan kesesuaian dokumen permohonan penilaian dengan objek penilaian;
3. mengumpulkan data dan informasi yang relevan dengan pelaksanaan penilaian;
4. melakukan analisis data dan informasi untuk pelaksanaan penilaian;
5. menyusun laporan penilaian;
6. menyampaikan laporan penilaian kepada pemohon/pemberi tugas penilaian;
7. melakukan ekspose laporan penilaian jika diminta oleh pemohon/pemberi tugas penilaian.

KEEMPAT .../Halaman 3

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Tim Penilai bertanggung jawab sepenuhnya kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Samarinda.

KELIMA : Tim Penilai melaksanakan pengumpulan data dan informasi berdasarkan surat tugas Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Samarinda.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Samarinda ini dibebankan pada anggaran Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong Tahun 2023.

KETUJUH : Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Samarinda ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Samarinda ini disampaikan kepada:

1. Kepala Subbagian Umum;
2. Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara;
3. Kepala Seksi Kepatuhan Internal.
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 30 Oktober 2023

KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN
NEGARA DAN LELANG SAMARINDA,

BAGUS KURNIAWAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SAMARINDA NOMOR KEP-173/KNL.1302/2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI PEMERINTAH PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SAMARINDA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, KEMENTERIAN KEUANGAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI DJKN

No.	**Nama/NIP/Jabatan**	**Kedudukan Dalam Tim**	**Lokasi Objek**
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Agung Widodo NIP 19810403 200312 1 001 Penilai Pemerintah Ahli Muda	Ketua Merangkap Anggota	Kab. Kutai Kartanegara
2	Hendra Sugeshiswara NIP 19841027 200701 1 001 Penilai Pemerintah Ahli Pertama	Anggota	
3	Wisnu Purna Adhitya NIP 19920824 201411 1 002 Penilai Pemerintah Ahli Pertama	Anggota	

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 30 Oktober 2023

KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SAMARINDA,

BAGUS KURNIAWAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SAMARINDA
[illegible]
[illegible]

SURAT TUGAS
NOMOR ST-1102/KNL.1302/2023

Dalam rangka melaksanakan tugas berdasarkan Nota Dinas Nomor ND-284/KNL.1302/PIPem.4/2023 tanggal 30 Oktober 2023, kami menugasi:

1.	Nama	: AGUNG WIDODO
	Pangkat / Gol	: Penata Tk. I (III/d)
	Jabatan	: Fungsional Penilai Pemerintah Ahli Muda
2.	Nama	: HENDRA SUGESTRIAWAN
	Pangkat / Gol	: Penata Muda Tk. I (III/b)
	Jabatan	: Fungsional Penilai Pemerintah Ahli Pertama
3.	Nama	: WISNU PURNA ADITYA
	Pangkat / Gol.	: Penata Muda (III/a)
	Jabatan	: Fungsional Penilai Pemerintah Ahli Pertama

untuk melaksanakan Penilaian BMN pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong berupa Bangunan yang akan Dibongkar dalam rangka Pemindahtanganan (Penjualan) mulai tanggal 02 s.d. 03 November 2023 di Kutai Kartanegara.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya surat ini dibebankan pada DIPA Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong Tahun Anggaran 2023.

Surat Tugas ini disusun untuk dilaksanakan dan setelah selesai dilaksanakan, pelaksana segera menyampaikan laporan. Kepada instansi terkait, kami mohon bantuan demi kelancaran pelaksanaan tugas tersebut.

Samarinda, 30 Oktober 2023
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara Dan Lelang Samarinda

Bagus Kurniawan

Tembusan:
1. Kepala Subbagian Umum
2. Kepala Seksi Kepatuhan Internal

C

BASL DAN
KERTAS
KERJA SURVEI

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SAMARINDA
[illegible]
[illegible]

BERITA ACARA SURVEI LAPANGAN
Nomor : BAS-192/KNL.1302/2023

Pada hari Kamis s.d. Jumat tanggal dua s.d. tiga bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga (2 s.d. 3 November 2023), Tim Penilai Pemerintah dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Samarinda sesuai Surat Tugas Kepala KPKNL Samarinda Nomor ST-1133/KNL.1302/2023 tanggal 30 Oktober 2023, telah melakukan survei lapangan secara peninjauan langsung atas objek Penilaian Properti berupa Bangunan Yang Akan Dibongkar pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong yang berlokasi di Jalan Imam Bonjol No. 37 RT 09, Kel. Melayu, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur, dengan hasil sebagai berikut:

1. Survei lapangan/pemeriksaan fisik dimaksud dilakukan dalam rangka penilaian untuk menentukan nilai wajar Barang Milik Negara untuk tujuan Pemindahtanganan BMN (Penjualan) sesuai Surat Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong Nomor W.18.PAS.PAS.7-PB.05.05-2286 tanggal 28 September 2023.
2. Objek penilaian berupa 23 (dua puluh tiga) unit Bangunan Yang Akan Dibongkar yang telah dalam kondisi rusak berat.
3. Adapun rincian sisa material bongkaran bangunan dalam kondisi layak yang dapat diperjualbelikan adalah sebagaimana form survei terlampir.

Setelah pelaksanaan survei lapangan, satuan kerja berkewajiban menjaga dan mengamankan objek penilaian dimaksud sampai dengan selesainya proses Pemindahtanganan BMN (Penjualan). Tim Penilai Pemerintah telah melakukan pengumpulan bahan, data dan informasi terkait objek penilaian. Terhadap segala perubahan yang terjadi setelah adanya survei lapangan bukan menjadi tanggung Tim Penilai Pemerintah.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya.

Kab. Kutai Kartanegara, 3 November 2023

Tim Penilai:

1.
Nama : Agung Windrio
NIP : 19910403 201312 1 001

2.
Nama : Hendra Sugeng Irawan
NIP : 19841027 200701 1 001

3.
Nama : Wisnu Putra Aditya
NIP : 19920824 201412 1 002

Mengetahui:

1.
Nama : [illegible]
NIP : [illegible]

2.
Nama : [illegible]
NIP : [illegible]

3.
Nama : ……………………
NIP : ……………………

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KPKNL SAMARINDA
KERTAS KERJA SURVEI LAPANGAN

FORM
MATERIAL BONGKARAN BANGUNAN

1. Identifikasi Bangunan Bongkaran
   a. Nama Bangunan : Bongkaran Gedung Kantor [illegible]
   b. Kode Barang : 4.01.01.01.001
   c. NUP : 4
   d. Lokasi : Jalan [illegible] No. 37 [illegible] Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur

2. Material Bongkaran

a. Bahan Kayu						
(i) Balok / Papan Kayu	☑ Ada	☐ Tidak Ada	: Jumlah	0,12 m^3	Keterangan	:
(ii) Kusen Kayu	☐ Ada	☑ Tidak Ada	: Jumlah		Keterangan	:
(iii) Daun Pintu / Jendela Kayu	☐ Ada	☑ Tidak Ada	: Jumlah		Keterangan	:
b. Bahan Baja						
(i) Baja Profil	☐ Ada	☑ Tidak Ada	: Jumlah	:	Keterangan	:
c. Bahan Baja Ringan						
(i) Atap / Genteng / Rangka Baja Ringan	☐ Ada	☑ Tidak Ada	: Jumlah	:	Keterangan	:
d. Bahan Besi						
(i) Tulangan Beton	☑ Ada	☐ Tidak Ada	: Jumlah	: 64,59 Kg	Keterangan	
(ii) Teralis	☐ Ada	☑ Tidak Ada	: Jumlah	:	Keterangan	
(iii) Pagar	☐ Ada	☑ Tidak Ada	: Jumlah	:	Keterangan	
(iv) Daun Pintu Besi	☐ Ada	☑ Tidak Ada	: Jumlah	:	Keterangan	
(v) Besi Lainnya	☐ Ada	☑ Tidak Ada	: Jumlah		Keterangan	:
e. Bahan Aluminium						
(i) Rangka Plafon / Rangka Partisi, dan lain-lain	☐ Ada	☑ Tidak Ada	: Jumlah		Keterangan	:
(ii) Kusen Aluminium	☐ Ada	☑ Tidak Ada	: Jumlah		Keterangan	:
(iii) Daun Pintu / Jendela Aluminium	☐ Ada	☑ Tidak Ada	: Jumlah		Keterangan	:
(iv) Aluminium Lainnya	☐ Ada	☑ Tidak Ada	: Jumlah		Keterangan	:
Bahan Lainnya						
(i) Genteng Tanah Liat / Beton / Metal / Keramik	☐ Ada	☑ Tidak Ada	: Jumlah	:	Keterangan	:
(ii) Seng Gelombang / Atap Gelombang / [illegible]	☐ Ada	☑ Tidak Ada	: Jumlah	:	Keterangan	:
(iii) Material Lainnya yang masih mempunyai nilai ekonomis	☐ Ada	☑ Tidak Ada	: Jumlah	:	Keterangan	:

3. Keterangan Tambahan
   a. Luas Bangunan : 72 m^2
   b. Tipe Bangunan : Permanen, Bangunan Instalasi Air
   c. Kondisi : [illegible]

Tanggal Pelaksanaan Survei : [illegible] 9 Desember 2024

Petugas Survei

[illegible] Wibowo
[illegible]
[illegible]

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEAGRA
KPKNL SAMARINDA
KERTAS KERJA SURVEI LAPANGAN

FORM
MATERIAL BONGKARAN BANGUNAN

1. Verifikasi Bongkaran Bangunan
   1. Nama Bangunan : Bangunan Gedung Kantor Permanen
   2. Kode Barang : [illegible]
   3. NUP : 5
   4. Lokasi : [illegible] Kab. Kutai Kartanegara Prov. Kalimantan Timur
2. Material Bongkaran
   - a. Bahan Kayu
     - (i) Tiang / Papan Kayu : ☑ Ada ☐ Tidak Ada / Jumlah : 0,50 m³ Keterangan :
     - (ii) Kusen Kayu : ☑ Ada ☐ Tidak Ada / Jumlah : 0,27 m³ Keterangan :
     - (iii) Daun Pintu / Jendela Kayu : ☐ Ada ☑ Tidak Ada / Jumlah : Keterangan :
   - b. Bahan Bata
     - (i) Bata Press : ☐ Ada ☑ Tidak Ada / Jumlah : Keterangan :
   - c. Bahan Kaca / Akrilik
     - (i) Kaca / Cermin Bingkai [illegible] : ☐ Ada ☑ Tidak Ada / Jumlah : Keterangan :
   - d. Bahan Besi
     - (i) Tulangan Beton : ☑ Ada ☐ Tidak Ada / Jumlah : 150 kg Keterangan :
     - (ii) [illegible] : ☐ Ada ☑ Tidak Ada / Jumlah : Keterangan :
     - (iii) Pagar : ☐ Ada ☑ Tidak Ada / Jumlah : Keterangan :
     - (iv) Daun Pintu Besi : ☐ Ada ☑ Tidak Ada / Jumlah : Keterangan :
     - (v) Besi Lainnya : ☐ Ada ☑ Tidak Ada / Jumlah : Keterangan :
   - e. Bahan Aluminium
     - (i) Bingkai Pintu / Bingkai Jendela Aluminium : ☐ Ada ☑ Tidak Ada / Jumlah : Keterangan :
     - (ii) Kusen Aluminium : ☐ Ada ☑ Tidak Ada / Jumlah : Keterangan :
     - (iii) Daun Pintu / Jendela Aluminium : ☐ Ada ☑ Tidak Ada / Jumlah : Keterangan :
     - (iv) Aluminium lainnya : ☐ Ada ☑ Tidak Ada / Jumlah : Keterangan :
   - f. Bahan Lainnya
     - (i) Genteng Tanah Liat / [illegible] : ☐ Ada ☑ Tidak Ada / Jumlah : Keterangan :
     - (ii) Seng Gelombang / Atap Gelombang / sejenisnya : ☐ Ada ☑ Tidak Ada / Jumlah : Keterangan :
     - (iii) [illegible] masih memiliki nilai ekonomis : ☐ Ada ☑ Tidak Ada / Jumlah : Keterangan :
3. Kesimpulan Tim Survei
   1. Luas Bangunan : 60 m2
   2. Tipe Bangunan : [illegible]
   3. Analisis : [illegible]

Tanggal Pelaksanaan Survei : [illegible] November 2023

Petugas Survei

Agung Wibowo   Hendra [illegible]   Wahyu [illegible] Aditya

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KPKNL SAMARINDA

KERTAS KERJA SURVEI LAPANGAN

FORM
MATERIAL BONGKARAN BANGUNAN

1. Data Objek Bangunan Disurvei
   - a. Nama Bangunan : Bangunan Gedung Kantor Lainnya
   - b. Kode Barang : 4 01 01 01 [illegible]
   - c. NUP : 5
   - d. Lokasi : [illegible] Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur

2. Material Bongkaran

a. Bahan Kayu							
(i)	Balok / Papan Kayu	☑ Ada	☐ Tidak Ada	Jumlah	9,3 m³	Keterangan	
(ii)	Kusen Kayu	☑ Ada	☐ Tidak Ada	Jumlah	0,67 m³	Keterangan	
(iii)	Daun Pintu / Jendela Kayu	☐ Ada	☑ Tidak Ada	Jumlah		Keterangan	
b. Bahan Kaca							
(i)	Kaca Polos	☐ Ada	☑ Tidak Ada	Jumlah		Keterangan	
c. Bahan Batu / Beton							
(i)	[illegible]	☐ Ada	☑ Tidak Ada	Jumlah		Keterangan	
d. Bahan Besi							
(i)	Tulangan Beton	☑ Ada	☐ Tidak Ada	Jumlah	59,16 kg	Keterangan	
(ii)	Teralis	☐ Ada	☑ Tidak Ada	Jumlah		Keterangan	
(iii)	Pagar	☐ Ada	☑ Tidak Ada	Jumlah		Keterangan	
(iv)	Daun Pintu Besi	☐ Ada	☑ Tidak Ada	Jumlah		Keterangan	
(v)	Besi Lainnya	☐ Ada	☑ Tidak Ada	Jumlah		Keterangan	
e. Bahan Aluminium							
(i)	Rangka Partisi / Rangka Plafond / dan lain-lain	☐ Ada	☑ Tidak Ada	Jumlah		Keterangan	
(ii)	Kusen Aluminium	☐ Ada	☑ Tidak Ada	Jumlah		Keterangan	
(iii)	Daun Pintu / Jendela Aluminium	☐ Ada	☑ Tidak Ada	Jumlah		Keterangan	
(iv)	Aluminium Lainnya	☐ Ada	☑ Tidak Ada	Jumlah		Keterangan	
f. Bahan Lainnya							
(i)	[illegible] / Keramik / Metal	☐ Ada	☑ Tidak Ada	Jumlah		Keterangan	
(ii)	Seng Gelombang / Atap Gelombang / Spandek	☑ Ada	☐ Tidak Ada	Jumlah	1 kg	Keterangan	
(iii)	Material Lainnya yang masih memiliki nilai ekonomis	☐ Ada	☑ Tidak Ada	Jumlah		Keterangan	

3. Kesimpulan [illegible]
   - a. Luas Bangunan : [illegible] m2
   - b. Tipe Bangunan : Bangunan Gedung Kantor Lainnya
   - c. Kondisi : Rusak Berat [illegible]

Tanggal Pelaksanaan Survei : [illegible] November 2023

Petugas Survei

Agung [illegible] [illegible] [illegible]

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEAGRA
KPKNL SAMARINDA
KERTAS KERJA SURVEI LAPANGAN

FORM
MATERIAL BONGKARAN BANGUNAN

1. Identifikasi Bongkaran Bangunan
   a. Nama Bangunan : Bangunan Gedung Kantor [illegible]
   b. Kode Barang : [illegible]
   c. NUP : 2
   d. Lokasi : Jalan [illegible] No. [illegible] [illegible] Kab. [illegible], Prov. Kalimantan [illegible]

2. Material Bongkaran
   a. Bahan Kayu
      (i) Balok / Papan Kayu : ☑ Ada ☐ Tidak Ada ; Jumlah : 2,8 m³ Keterangan : ____
      (ii) Kusen Kayu : ☐ Ada ☑ Tidak Ada ; Jumlah : ____ Keterangan : ____
      (iii) Daun Pintu / Jendela Kayu : ☐ Ada ☑ Tidak Ada ; Jumlah : ____ Keterangan : ____
   b. Bahan Atap
      (i) Seng [illegible] : ☐ Ada ☑ Tidak Ada ; Jumlah : ____ Keterangan : ____
   c. Bahan Baja Ringan
      (i) Atap / Canopy Rangka Baja Ringan : ☐ Ada ☑ Tidak Ada ; Jumlah : ____ Keterangan : ____
   d. Bahan Besi
      (i) Tulangan Beton : ☑ Ada ☐ Tidak Ada ; Jumlah : 364,6 kg Keterangan : ____
      (ii) Teralis : ☐ Ada ☑ Tidak Ada ; Jumlah : ____ Keterangan : ____
      (iii) Pagar : ☐ Ada ☑ Tidak Ada ; Jumlah : ____ Keterangan : ____
      (iv) Besi Profil [illegible] : ☐ Ada ☑ Tidak Ada ; Jumlah : ____ Keterangan : ____
      (v) Besi Lainnya : ☐ Ada ☑ Tidak Ada ; Jumlah : ____ Keterangan : ____
   e. Bahan Aluminium
      (i) Rangka Plafon / Rangka Partisi aluminium : ☐ Ada ☑ Tidak Ada ; Jumlah : ____ Keterangan : ____
      (ii) Kusen aluminium : ☐ Ada ☑ Tidak Ada ; Jumlah : ____ Keterangan : ____
      (iii) Daun Pintu / Jendela Aluminium : ☐ Ada ☑ Tidak Ada ; Jumlah : ____ Keterangan : ____
      (iv) Aluminium Lainnya : ☐ Ada ☑ Tidak Ada ; Jumlah : ____ Keterangan : ____
   f. Bahan Lainnya
      (i) Gedung [illegible] / Sarana / [illegible] : ☐ Ada ☑ Tidak Ada ; Jumlah : ____ Keterangan : ____
      (ii) [illegible] : ☐ Ada ☑ Tidak Ada ; Jumlah : Keterangan : ____
      (iii) Material Lainnya yang masih memiliki nilai ekonomis : ☐ Ada ☑ Tidak Ada ; Jumlah : Keterangan : ____

3. Keterangan Tambahan
   a. Luas Bangunan : 200 m2
   b. Tipe Bangunan : [illegible]
   c. Status : Rusak Berat ([illegible])

Tanggal Pelaksanaan Survei : [illegible] 2023

Petugas Survei

Agus [illegible] Hendra Saputra [illegible] [illegible]

	KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KPKNL SAMARINDA **KERTAS KERJA SURVEI LAPANGAN**	FORM MATERIAL BONGKARAN BANGUNAN

1. Identitas Bangunan Bongkaran
   - a. Nama Bangunan : Bongkaran Gedung Kantor [illegible]
   - b. Kode Barang : 4.01.01.01.999
   - c. NUP : 1
   - d. Lokasi : Jalan Imam Bonjol No. 27 RT. [illegible] Kel. Melayu, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur

2. Material Bongkaran
   - a. Bahan Kayu
     - 1) Balok / Papan Kayu : ☑ Ada ☐ Tidak Ada ; Jumlah : 0,17 M³ Keterangan :
     - 2) Kusen Kayu : ☐ Ada ☑ Tidak Ada ; Jumlah : Keterangan :
     - 3) Daun Pintu dan Jendela Kayu : ☐ Ada ☑ Tidak Ada ; Jumlah : Keterangan :
   - b. Bahan Baja
     - 1) Baja Profil : ☐ Ada ☑ Tidak Ada ; Jumlah : Keterangan :
   - c. Bahan Baja Ringan
     - 1) [illegible] Baja Ringan : ☐ Ada ☑ Tidak Ada ; Jumlah : Keterangan :
   - d. Bahan Besi
     - i) Tulangan Beton : ☑ Ada ☐ Tidak Ada ; Jumlah : [illegible] kg Keterangan :
     - ii) [illegible] : ☐ Ada ☑ Tidak Ada ; Jumlah : Keterangan :
     - iii) Pagar : ☐ Ada ☑ Tidak Ada ; Jumlah : Keterangan :
     - iv) [illegible] : ☐ Ada ☑ Tidak Ada ; Jumlah : Keterangan :
     - v) Besi Lainnya : ☐ Ada ☑ Tidak Ada ; Jumlah : Keterangan :
   - e. Bahan Aluminium
     - i) [illegible] Rangka Plafond, dan lain lain : ☐ Ada ☑ Tidak Ada ; Jumlah : Keterangan :
     - ii) Kusen Aluminium : ☐ Ada ☑ Tidak Ada ; Jumlah : Keterangan :
     - iii) Daun Pintu / Jendela Aluminium : ☐ Ada ☑ Tidak Ada ; Jumlah : Keterangan :
     - iv) Aluminium Lainnya : ☐ Ada ☑ Tidak Ada ; Jumlah : Keterangan :
   - f. Bahan Lainnya
     - 1) Genteng Tanah Liat / [illegible] : ☐ Ada ☑ Tidak Ada ; Jumlah : Keterangan :
     - 2) Seng Gelombang / Atap Gelombang / Spandek : ☐ Ada ☑ Tidak Ada ; Jumlah : Keterangan :
     - 3) Material Lainnya yang [illegible] : ☐ Ada ☑ Tidak Ada ; Jumlah : Keterangan :

3. Keterangan Lainnya
   - a. Luas Bangunan : [illegible]
   - b. Tipe Bangunan : [illegible]
   - c. Kondisi : Rusak Berat / Objek [illegible] material bongkaran [illegible] yang [illegible] dalam kondisi layak dan dapat digunakan lagi

Tenggarong, [illegible] 3 November 2023

Petugas Survei

Agung Wibowo Hendra Kurniawan Wisnu Putra Aditya

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEAGRA
KPKNL SAMARINDA

KERTAS KERJA SURVEI LAPANGAN

FORM

MATERIAL BONGKARAN BANGUNAN

1. Identitas Bangunan Bongkaran
   - a. Nama Bangunan : Bangunan Gedung Kantor Lainnya
   - b. Kode Barang : 4.01.01.01.999
   - c. NUP : 1
   - d. Lokasi : Jalan Imam Bonjol No. [illegible], Kel. Melayu, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur

2. Material Bongkaran

a. Bahan Kayu						
(1) Balok / Papan Kayu	☑ Ada	☐ Tidak Ada	: Jumlah	: 0,07 M³	Keterangan	:
(2) Kusen Kayu	☐ Ada	☑ Tidak Ada	: Jumlah	:	Keterangan	:
(3) Daun Pintu / Jendela Kayu	☐ Ada	☑ Tidak Ada	: Jumlah	:	Keterangan	:
b. Bahan Baja						
(1) Baja Profil	☐ Ada	☑ Tidak Ada	: Jumlah	:	Keterangan	:
c. Bahan Baja Ringan						
(1) Rangka / Gording / Rangka Baja Ringan	☐ Ada	☑ Tidak Ada	: Jumlah	:	Keterangan	:
d. Bahan Besi						
(1) Tulangan Beton	☑ Ada	☐ Tidak Ada	: Jumlah	: 23,13 kg	Keterangan	:
(2) Teralis	☐ Ada	☑ Tidak Ada	: Jumlah	:	Keterangan	:
(3) Pagar	☐ Ada	☑ Tidak Ada	: Jumlah	:	Keterangan	:
(4) [illegible]	☐ Ada	☑ Tidak Ada	: Jumlah	:	Keterangan	:
(5) Besi Lainnya	☐ Ada	☑ Tidak Ada	: Jumlah	:	Keterangan	:
e. Bahan Aluminium						
(1) Kusen Pintu / Kusen Pintu & dan Jendela	☐ Ada	☑ Tidak Ada	: Jumlah	:	Keterangan	:
(2) [illegible]	☐ Ada	☑ Tidak Ada	: Jumlah	:	Keterangan	:
(3) Daun Pintu / Jendela Aluminium	☐ Ada	☑ Tidak Ada	: Jumlah	:	Keterangan	:
(4) Aluminium Lainnya	☐ Ada	☑ Tidak Ada	: Jumlah	:	Keterangan	:
f. Bahan Lainnya						
(1) Genteng Tanah Liat / Beton / Keramik / Metal	☐ Ada	☑ Tidak Ada	: Jumlah	:	Keterangan	:
(2) [illegible] / Seng Gelombang / Spandek	☑ Ada	☐ Tidak Ada	: Jumlah	: 5,52 kg	Keterangan	:
(3) Material Lainnya yang masih memiliki Nilai Ekonomis	☐ Ada	☑ Tidak Ada	: Jumlah	:	Keterangan	:

3. Keterangan Lainnya
   - a. Umur Bangunan : 2002
   - b. Tipe Bangunan : [illegible]
   - c. Kondisi : Rusak Berat [illegible] material bongkaran [illegible]

Tanggal Pelaksanaan Survei : [illegible] 2023

Petugas Survei

[illegible] [illegible] [illegible]

	KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA **DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEAGRA** **KPKNL SAMARINDA** **KERTAS KERJA SURVEI LAPANGAN**	**FORM** **MATERIAL BONGKARAN BANGUNAN**

1. [illegible]
   a. Nama Bangunan : Bangunan Gedung Kantor [illegible]
   b. Kode Barang : [illegible]
   c. NUP : 5
   d. Lokasi : [illegible] Kalimantan Timur

2. [illegible]
   a. [illegible]
      (i) [illegible] Kayu ☑ Ada ☐ Tidak Ada / Jumlah : 0,36 m³ Keterangan :
      (ii) [illegible] Kayu ☑ Ada ☐ Tidak Ada / Jumlah : 0,5 m³ Keterangan :
      (iii) [illegible] Kayu ☐ Ada ☑ Tidak Ada / Jumlah : Keterangan :
   b. [illegible]
      (i) [illegible] ☐ Ada ☑ Tidak Ada / Jumlah : Keterangan :
   Bahan Baja Ringan
      (i) [illegible] Baja Ringan ☐ Ada ☑ Tidak Ada / Jumlah : Keterangan :
   d. Bahan Besi
      (i) Tulangan Beton ☑ Ada ☐ Tidak Ada / Jumlah : 115,93 kg Keterangan :
      (ii) [illegible] ☐ Ada ☑ Tidak Ada / Jumlah : Keterangan :
      (iii) Pagar ☐ Ada ☑ Tidak Ada / Jumlah : Keterangan :
      (iv) [illegible] Besi ☐ Ada ☑ Tidak Ada / Jumlah : Keterangan :
      (v) Dan Lainnya ☐ Ada ☑ Tidak Ada / Jumlah : Keterangan :
   e. [illegible]
      (i) Rangka Plafon / Rangka [illegible] ☐ Ada ☑ Tidak Ada / Jumlah : Keterangan :
      (ii) [illegible] ☐ Ada ☑ Tidak Ada / Jumlah : Keterangan :
      (iii) [illegible] Jendela Aluminium ☐ Ada ☑ Tidak Ada / Jumlah : Keterangan :
      (iv) [illegible] ☐ Ada ☑ Tidak Ada / Jumlah : Keterangan :
   f. Bahan Lainnya
      (i) [illegible] Metal ☐ Ada ☑ Tidak Ada / Jumlah : Keterangan :
      (ii) [illegible] ☐ Ada ☑ Tidak Ada / Jumlah : Keterangan :
      (iii) [illegible] ekonomis. ☐ Ada ☑ Tidak Ada / Jumlah : Keterangan :

3. Keterangan Tambahan
   a. Luas Bangunan : [illegible]
   b. [illegible] Bangunan : [illegible]
   c. Kondisi : [illegible]

Tanggal Pelaksanaan Survei : [illegible] 2 November 2023

Petugas Survei

[illegible] [illegible] [illegible]

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEAGRA
KPKNL SAMARINDA
KERTAS KERJA SURVEI LAPANGAN

FORM

MATERIAL BONGKARAN BANGUNAN

1. Identitas Bongkaran Bangunan
   a. Nama Bangunan : Bangunan Rumah Sakit Lama
   b. Kode Barang : 4.01.01.05.001
   c. NUP : 1
   d. Lokasi : Jalan Imam Bonjol No. 37 RT 02, Kel. Melayu, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur

2. Material Bongkaran

a. Bahan Kayu					
1) Balok / Papan Kayu	: ☑ Ada	☐ Tidak Ada	/ Jumlah	1,52 m³	Keterangan :
2) Kusen Kayu	: ☑ Ada	☐ Tidak Ada	/ Jumlah	0,75 m³	Keterangan :
3) Daun Pintu / Jendela Kayu	: ☑ Ada	☐ Tidak Ada	/ Jumlah	4,84 m³	Keterangan :
b. Bahan Baja					
1) Baja Profil	: ☐ Ada	☑ Tidak Ada	/ Jumlah	:	Keterangan :
c. Bahan Baja Ringan					
1) Atap / Canopy / Rangka Baja Ringan	: ☐ Ada	☑ Tidak Ada	/ Jumlah	:	Keterangan :
d. Bahan Besi					
(i) Tulangan Beton	: ☑ Ada	☐ Tidak Ada	/ Jumlah	: 292,49 kg	Keterangan :
(ii) Pipa	: ☐ Ada	☑ Tidak Ada	/ Jumlah	:	Keterangan :
(iii) Pagar	: ☐ Ada	☑ Tidak Ada	/ Jumlah	:	Keterangan :
(iv) Jeruji Pengaman	: ☐ Ada	☑ Tidak Ada	/ Jumlah	:	Keterangan :
(v) Besi Lainnya	: ☐ Ada	☑ Tidak Ada	/ Jumlah	:	Keterangan :
e. Bahan Aluminium					
(i) Rangka Partisi / Rangka Plafond, dan lainnya	: ☐ Ada	☑ Tidak Ada	/ Jumlah	:	Keterangan :
(ii) Kusen Aluminium	: ☐ Ada	☑ Tidak Ada	/ Jumlah	:	Keterangan :
(iii) Daun Pintu / Jendela Aluminium	: ☐ Ada	☑ Tidak Ada	/ Jumlah	:	Keterangan :
(iv) Aluminium Lainnya	: ☐ Ada	☑ Tidak Ada	/ Jumlah	:	Keterangan :
f. Bahan Lainnya					
1) Genteng Tanah Liat / Beton / Keramik / Metal	: ☐ Ada	☑ Tidak Ada	/ Jumlah		Keterangan :
2) Seng Gelombang / Atap Gelombang / Asbes	: ☐ Ada	☑ Tidak Ada	/ Jumlah		Keterangan :
3) Material Lainnya yang dapat dimanfaatkan / bernilai ekonomis	: ☐ Ada	☑ Tidak Ada	/ Jumlah		Keterangan :

3. Keterangan Tambahan
   a. Luas Bangunan : 262 m2
   b. Tipe Bangunan : [illegible]
   c. Catatan : [illegible]

Tanggal Pelaksanaan Survei : [illegible]

Petugas Survei

[illegible]	[illegible]	[illegible]

	KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KPKNL SAMARINDA **KERTAS KERJA SURVEI LAPANGAN**	FORM MATERIAL BONGKARAN BANGUNAN

1. Identitas Bangunan Bongkaran
   a. Nama Bangunan : [illegible]
   b. Kode barang : 4 01 01 [illegible]
   c. NUP : 2
   d. Lokasi : Jalan Imam Bonjol No. 77 RT 04, Kel. Melayu, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur

2. Material Bangunan
   a. Bahan Kayu
      (i) Balok / Papan Kayu : ☑ Ada ☐ Tidak Ada : Jumlah 1,58 m³ Keterangan : ____
      (ii) Kusen Kayu : ☑ Ada ☐ Tidak Ada : Jumlah 0,11 m³ Keterangan : ____
      (iii) Daun Pintu / Jendela Kayu ☐ Ada ☑ Tidak Ada : Jumlah ____ Keterangan :
   b. Bahan Baja
      (i) Baja Profil ☐ Ada ☑ Tidak Ada : Jumlah : ____ Keterangan : ____
   c. Bahan Baja Ringan
      (i) Atap / Penutup Atap dari Baja Ringan ☐ Ada ☑ Tidak Ada : Jumlah : ____ Keterangan : ____
   d. Bahan Besi
      (i) Tulangan Beton ☑ Ada ☐ Tidak Ada : Jumlah : 509,02 kg Keterangan : ____
      (ii) Teralis ☐ Ada ☑ Tidak Ada : Jumlah : ____ Keterangan : ____
      (iii) Pagar ☐ Ada ☑ Tidak Ada : Jumlah : ____ Keterangan : ____
      (iv) [illegible] ☐ Ada ☑ Tidak Ada : Jumlah Keterangan : ____
      (v) Besi Lainnya ☐ Ada ☑ Tidak Ada : Jumlah : ____ Keterangan : ____
   e. Bahan Aluminium
      (i) Kusen Pintu / Kusen Jendela dan lainnya : ☐ Ada ☑ Tidak Ada : Jumlah ____ Keterangan : ____
      (ii) [illegible] : ☐ Ada ☑ Tidak Ada : Jumlah ____ Keterangan : ____
      (iii) Daun Pintu / Jendela Aluminium : ☐ Ada ☑ Tidak Ada : Jumlah ____ Keterangan : ____
      (iv) Aluminium Lainnya : ☐ Ada ☑ Tidak Ada : Jumlah ____ Keterangan : ____
   f. Bahan Lainnya
      (i) Genteng Tanah Liat / [illegible] : ☐ Ada ☑ Tidak Ada : Jumlah Keterangan : ____
      (ii) [illegible] : ☐ Ada ☑ Tidak Ada : Jumlah Keterangan : ____
      (iii) Material Lainnya yang masih memiliki nilai ekonomis : ☐ Ada ☑ Tidak Ada : Jumlah ____ Keterangan : ____

3. Keterangan Tambahan
   a. Luas Bangunan : 155 m2
   b. Jenis Bangunan : Gedung [illegible]
   c. Kondisi : [illegible] dalam kondisi layak dan dapat dijual kembali.

Tanggal Pelaksanaan Survei : Selasa, 2 November 2021

Petugas Survei

[illegible]   [illegible]   [illegible]

	KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA **DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA** **KPKNL SAMARINDA** **KERTAS KERJA SURVEI LAPANGAN**	**FORM** **MATERIAL BONGKARAN BANGUNAN**

1. Data Barang Bongkaran Bangunan
   - a. Nama Bangunan : Bangunan Gedung [illegible]
   - b. Kode Barang : 4.01.01.03.001
   - c. NUP : 3
   - d. Lokasi : Jalan [illegible] Kel. [illegible] Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur

2. Material Bongkaran
   - a. Bahan Kayu
     - (i) Balok / Papan Kayu : ☑ Ada ☐ Tidak Ada : Jumlah : 1,38 m³ Keterangan : ______
     - (ii) Kusen Kayu : ☑ Ada ☐ Tidak Ada : Jumlah : 6,77 m³ Keterangan : ______
     - (iii) Daun Pintu / Jendela Kayu : ☐ Ada ☑ Tidak Ada : Jumlah : ______ Keterangan : ______
   - b. Bahan Baja
     - (i) Baja Profil : ☐ Ada ☑ Tidak Ada : Jumlah : ______ Keterangan : ______
   - c. Bahan Seng Gelombang
     - (i) Atap / Canopy/Rangka [illegible] : ☐ Ada ☑ Tidak Ada : Jumlah : ______ Keterangan : ______
   - d. Bahan Besi
     - (i) Tulangan Beton : ☑ Ada ☐ Tidak Ada : Jumlah : 442,75 kg Keterangan : ______
     - (ii) Kawat : ☐ Ada ☑ Tidak Ada : Jumlah : ______ Keterangan : ______
     - (iii) Pipa : ☐ Ada ☑ Tidak Ada : Jumlah : ______ Keterangan : ______
     - (iv) Teralis Besi : ☐ Ada ☑ Tidak Ada : Jumlah : ______ Keterangan : ______
     - (v) Besi Lainnya : ☐ Ada ☑ Tidak Ada : Jumlah : ______ Keterangan : ______
   - e. Bahan Aluminium
     - (i) Rangka Partisi, Rangka Plafond, dan lainnya : ☐ Ada ☑ Tidak Ada : Jumlah : ______ Keterangan : ______
     - (ii) Daun Jendela [illegible] : ☐ Ada ☑ Tidak Ada : Jumlah : ______ Keterangan : ______
     - (iii) Daun Pintu / Jendela Aluminium : ☐ Ada ☑ Tidak Ada : Jumlah : ______ Keterangan : ______
     - (iv) Aluminium Lainnya : ☐ Ada ☑ Tidak Ada : Jumlah : ______ Keterangan : ______
   - f. Bahan Lainnya
     - (i) Genteng Tanah Liat / Beton / Keramik / Kaca : ☐ Ada ☑ Tidak Ada : Jumlah : ______ Keterangan : ______
     - (ii) Barang Elektronik (AC, Lampu, [illegible]) : ☐ Ada ☑ Tidak Ada : Jumlah : ______ Keterangan : ______
     - (iii) Material Lainnya yang masih memiliki nilai ekonomis : ☐ Ada ☑ Tidak Ada : Jumlah : ______ Keterangan : ______

3. Keterangan Tambahan
   - a. Luas Bangunan : 180 m2
   - b. Peruntukan : Gedung Ruang Kelas
   - c. Kondisi : Rusak Berat/Objek pada saat survei [illegible] memiliki nilai ekonomis dalam kondisi layak dan dapat dimanfaatkan kembali

Tanggal Pelaksanaan Survei : [illegible] November 2023

Pengguna Barang

Agung [illegible] | [illegible] Augustiawan | [illegible] Achiya

	KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA **DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA** **KPKNL SAMARINDA** **KERTAS KERJA SURVEI LAPANGAN**	**FORM** **MATERIAL BONGKARAN BANGUNAN**

1. Identitas [illegible] Bangunan
   - a. [illegible] : Bangunan Rumah Sakit [illegible]
   - b. [illegible] : [illegible]
   - c. [illegible] : [illegible]
   - d. [illegible] : [illegible] Tenggarong, [illegible] Kalimantan Timur

2. [illegible]

a. [illegible]						
(i) [illegible]	☑ Ada	☐ Tidak Ada	Jumlah	1,[illegible] m³	Keterangan	
(ii) [illegible]	☑ Ada	☐ Tidak Ada	Jumlah	0,24 m³	Keterangan	
(iii) [illegible]	☐ Ada	☑ Tidak Ada	Jumlah		Keterangan	
b. [illegible]						
(i) [illegible]	☐ Ada	☑ Tidak Ada	Jumlah		Keterangan	
c. [illegible]						
(i) [illegible]	☐ Ada	☑ Tidak Ada	Jumlah		Keterangan	
d. [illegible]						
(i) Tulangan Beton	☑ Ada	☐ Tidak Ada	Jumlah	753,76 kg	Keterangan	
(ii) Teralis	☐ Ada	☑ Tidak Ada	Jumlah		Keterangan	
(iii) Pagar	☐ Ada	☑ Tidak Ada	Jumlah		Keterangan	
(iv) [illegible]	☐ Ada	☑ Tidak Ada	Jumlah		Keterangan	
(v) [illegible]	☐ Ada	☑ Tidak Ada	Jumlah		Keterangan	
e. [illegible]						
(i) [illegible]	☐ Ada	☑ Tidak Ada	Jumlah		Keterangan	
(ii) [illegible]	☐ Ada	☑ Tidak Ada	Jumlah		Keterangan	
(iii) [illegible]	☐ Ada	☑ Tidak Ada	Jumlah		Keterangan	
(iv) [illegible]	☐ Ada	☑ Tidak Ada	Jumlah		Keterangan	
f. [illegible]						
(i) [illegible]	☐ Ada	☑ Tidak Ada	Jumlah		Keterangan	
(ii) [illegible]	☐ Ada	☑ Tidak Ada	Jumlah		Keterangan	
(iii) [illegible]	☐ Ada	☑ Tidak Ada	Jumlah		Keterangan	

3. Keterangan Tambahan
   - a. [illegible] : [illegible]
   - b. [illegible] : [illegible]
   - c. [illegible] : [illegible]

[illegible] : [illegible] November [illegible]

Petugas Survei

Agung Widodo

[illegible] Sigarmarker

[illegible]

	KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA **DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA** **KPKNL SAMARINDA** **KERTAS KERJA SURVEI LAPANGAN**	**FORM** **MATERIAL BONGKARAN BANGUNAN**

1. Identitas Bangunan Bongkaran
   - a. Nama Bangunan : Bangunan Rumah Sakit Umum
   - b. Kode Barang : 4.01.01.01.001
   - c. NUP : 5
   - d. Lokasi : Jalan Imam Bonjol No. 37 RT 00, Kel. Melayu, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur

2. Material Bongkaran

a. Bahan Kayu					
1) Balok / Papan Kayu	☑ Ada	☐ Tidak Ada	Jumlah : 3,49 m³	Keterangan :	
2) Kusen Kayu	☑ Ada	☐ Tidak Ada	Jumlah : 1,92 m³	Keterangan :	
3) Daun Pintu / Jendela Kayu	☐ Ada	☑ Tidak Ada	Jumlah :	Keterangan :	
b. Bahan Baja					
(i) Baja Profil	☐ Ada	☑ Tidak Ada	Jumlah :	Keterangan :	
c. Bahan Baja Ringan					
(i) Atap / Canopy/Rangka Baja Ringan	☐ Ada	☑ Tidak Ada	Jumlah :	Keterangan :	
d. Bahan Besi					
(i) Tulangan Beton	☑ Ada	☐ Tidak Ada	Jumlah : 1.163,72 kg	Keterangan :	
(ii) Teralis	☐ Ada	☑ Tidak Ada	Jumlah :	Keterangan :	
(iii) Pagar	☐ Ada	☑ Tidak Ada	Jumlah :	Keterangan :	
(iv) Daun Pintu Besi	☐ Ada	☑ Tidak Ada	Jumlah :	Keterangan :	
(v) Besi Lainnya	☐ Ada	☑ Tidak Ada	Jumlah :	Keterangan :	
e. Bahan Aluminium					
(i) Rangka Plafon / Rangka Partisi Aluminium	☐ Ada	☑ Tidak Ada	Jumlah :	Keterangan :	
(ii) Kusen Aluminium	☐ Ada	☑ Tidak Ada	Jumlah :	Keterangan :	
(iii) Daun Pintu / Jendela Aluminium	☐ Ada	☑ Tidak Ada	Jumlah :	Keterangan :	
(iv) Aluminium lainnya	☐ Ada	☑ Tidak Ada	Jumlah :	Keterangan :	
f. Bahan Lainnya					
(i) Genteng Tanah Liat / Beton / Keramik / Metal	☐ Ada	☑ Tidak Ada	Jumlah :	Keterangan :	
(ii) Seng Gelombang / Atap Gelombang / Plastik	☐ Ada	☑ Tidak Ada	Jumlah :	Keterangan :	
(iii) Alat [illegible] lainnya yang mempunyai nilai ekonomis	☐ Ada	☑ Tidak Ada	Jumlah :	Keterangan :	

3. Keterangan Lainnya
   - a. Luas Bangunan : 275 m2
   - b. Tipe Bangunan : Gedung Ruang Medis
   - c. Catatan : Rusak Berat/Lapuk pada [illegible] bahan material bangunan [illegible] yang mempunyai nilai ekonomis adalah besi [illegible] dan dapat dijual [illegible]

Tanggal Pelaksanaan Survei : [illegible] 5 Maret 2024

Tim Survei

[illegible]　　　　[illegible] Kurniawan　　　　[illegible] Aditya

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KPKNL SAMARINDA
KERTAS KERJA SURVEI LAPANGAN

FORM

MATERIAL BONGKARAN BANGUNAN

1. [illegible]
   a. Nama Bangunan : Bangunan [illegible]
   b. Kode Barang : [illegible]
   c. NUP : 5
   d. Lokasi : Jalan [illegible] No [illegible] Kel [illegible], Kec Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara, Prov Kalimantan Timur

2. [illegible]
   a. Bahan Kayu
      (i) [illegible] : ☑ Ada ☐ Tidak Ada / Jumlah : 2,54 m^3 Keterangan :
      (ii) [illegible] : ☑ Ada ☐ Tidak Ada / Jumlah : 0,11 m^3 Keterangan :
      (iii) Daun Pintu / Jendela Kayu : ☐ Ada ☑ Tidak Ada / Jumlah : Keterangan :
   b. Bahan Besi
      (i) Pipa Besi : ☐ Ada ☑ Tidak Ada / Jumlah : Keterangan :
   c. Bahan Baja Ringan
      (i) [illegible] Baja Ringan : ☐ Ada ☑ Tidak Ada / Jumlah : Keterangan :
   d. Bahan Besi
      (i) Tulangan Beton : ☑ Ada ☐ Tidak Ada / Jumlah : 839,17 kg Keterangan :
      (ii) Teralis : ☐ Ada ☑ Tidak Ada / Jumlah : Keterangan :
      (iii) Pagar : ☐ Ada ☑ Tidak Ada / Jumlah : Keterangan :
      (iv) [illegible] Besi : ☐ Ada ☑ Tidak Ada / Jumlah : Keterangan :
      (v) Besi Lainnya : ☐ Ada ☑ Tidak Ada / Jumlah : Keterangan :
   e. Bahan Aluminium
      (i) Rangka Partisi / Rangka Plafond dan [illegible] : ☐ Ada ☑ Tidak Ada / Jumlah : Keterangan :
      (ii) Kusen Aluminium : ☐ Ada ☑ Tidak Ada / Jumlah : Keterangan :
      (iii) Daun Pintu / Jendela Aluminium : ☐ Ada ☑ Tidak Ada / Jumlah : Keterangan :
      (iv) Aluminium Lainnya : ☐ Ada ☑ Tidak Ada / Jumlah : Keterangan :
   f. Bahan Lainnya
      (i) [illegible] / Metal : ☐ Ada ☑ Tidak Ada / Jumlah : Keterangan :
      (ii) [illegible] Spandek : ☐ Ada ☑ Tidak Ada / Jumlah : Keterangan :
      (iii) Material Lain yang [illegible] : ☐ Ada ☑ Tidak Ada / Jumlah : Keterangan :

3. Keterangan Tambahan
   a. Luas Bangunan : 234 m2
   b. Tipe Bangunan : Gedung [illegible]
   c. Kondisi : [illegible]

Tanggal Pelaksanaan Survei 2 s.d. 3 November 2022

Petugas Survei

Agung Widodo

[illegible]

[illegible]

	KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA **DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEAGRA** **KPKNL SAMARINDA** **KERTAS KERJA SURVEI LAPANGAN**	**FORM** **MATERIAL BONGKARAN BANGUNAN**

1. [illegible] Barang [illegible]
   - a. Nama Bangunan : Bangunan Rumah Sakit Umum
   - b. Kode Barang : [illegible]
   - c. NUP : 7
   - d. Lokasi : Jalan [illegible] No. [illegible] Kel. [illegible] Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara Prov. Kalimantan Timur

2. Material Bongkaran
   - a. Bahan Kayu
     - (i) [illegible] : ☑ Ada ☐ Tidak Ada / Jumlah : 3,37 m³ Keterangan : ______
     - (ii) Kusen Kayu : ☑ Ada ☐ Tidak Ada / Jumlah : 0,11 m³ Keterangan : ______
     - (iii) [illegible] / [illegible] Kayu : ☐ Ada ☑ Tidak Ada / Jumlah : Keterangan : ______
   - b. Bahan Baja
     - (i) Baja Profil : ☐ Ada ☑ Tidak Ada / Jumlah : ______ Keterangan : ______
   - c. Bahan Baja Ringan
     - (i) [illegible] / Canopy Rangka Baja Ringan : ☐ Ada ☑ Tidak Ada / Jumlah : ______ Keterangan : ______
   - d. Bahan Besi
     - (i) Tulangan Beton : ☑ Ada ☐ Tidak Ada / Jumlah : ± 72,24 kg Keterangan : ______
     - (ii) Teralis : ☐ Ada ☑ Tidak Ada / Jumlah : ______ Keterangan : ______
     - (iii) Pagar : ☐ Ada ☑ Tidak Ada / Jumlah : ______ Keterangan : ______
     - (iv) Daun Pintu Besi : ☐ Ada ☑ Tidak Ada / Jumlah : ______ Keterangan : ______
     - (v) Besi Lainnya : ☐ Ada ☑ Tidak Ada / Jumlah : ______ Keterangan : ______
   - e. Bahan Aluminium
     - (i) Rangka Partisi / Rangka Plafond Aluminium : ☐ Ada ☑ Tidak Ada / Jumlah : ______ Keterangan : ______
     - (ii) Kusen Aluminium : ☐ Ada ☑ Tidak Ada / Jumlah : Keterangan : ______
     - (iii) Daun Pintu / Jendela Aluminium : ☐ Ada ☑ Tidak Ada / Jumlah : ______ Keterangan : ______
     - (iv) Aluminium Lainnya : ☐ Ada ☑ Tidak Ada / Jumlah : ______ Keterangan : ______
   - f. Bahan Lainnya
     - (i) [illegible] / Genteng Keramik / Metal : ☐ Ada ☑ Tidak Ada / Jumlah : Keterangan : ______
     - (ii) Seng Gelombang / [illegible] / Spandek : ☐ Ada ☑ Tidak Ada / Jumlah : Keterangan : ______
     - (iii) Material Lainnya yang mempunyai nilai ekonomis : ☐ Ada ☑ Tidak Ada / Jumlah : ______ Keterangan :

3. Keterangan Tambahan
   - a. Luas Bangunan : [illegible]
   - b. Tipe Bangunan : [illegible]
   - c. Kondisi : Rusak Berat [illegible]
     [illegible]

Tanggal Pelaksanaan Survei : [illegible] 2023

Tim Survei

Agung [illegible]

[illegible]

[illegible]

	KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA **DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA** **KPKNL SAMARINDA** **KERTAS KERJA SURVEI LAPANGAN**	**FORM** **MATERIAL BONGKARAN BANGUNAN**

1. [illegible] Bangunan
   - a. Nama Bangunan : Bangunan Rumah Sakit Umum
   - b. Kode Barang : 4.01.01.05.007
   - c. NUP : 5
   - d. Lokasi : Jalan Imam Bonjol No. 27 RT 20 Kel. Melayu Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara Prov. Kalimantan Timur

2. Material Bongkaran
   - a. Bahan Kayu
     - (1) Balok / Papan Kayu : ☑ Ada ☐ Tidak Ada / Jumlah 0,56 m³ Keterangan : ______
     - (2) Kusen Kayu : ☑ Ada ☐ Tidak Ada / Jumlah 6,3 m³ Keterangan : ______
     - (3) Daun Pintu / Jendela Kayu : ☐ Ada ☑ Tidak Ada / Jumlah ______ Keterangan : ______
   - b. Bahan Baja
     - (1) Baja Profil : ☐ Ada ☑ Tidak Ada / Jumlah Keterangan :
   - c. Bahan Baja Ringan
     - (1) Atap / Canopy Rangka Baja Ringan : ☐ Ada ☑ Tidak Ada / Jumlah Keterangan :
   - d. [illegible]
     - (i) [illegible] : ☑ Ada ☐ Tidak Ada / Jumlah : 180,32 kg Keterangan ____
     - (ii) Tralis : ☐ Ada ☑ Tidak Ada / Jumlah : Keterangan ____
     - (iii) Pagar : ☐ Ada ☑ Tidak Ada / Jumlah : Keterangan : ____
     - (iv) Daun Pintu Besi : ☐ Ada ☑ Tidak Ada / Jumlah : ____ Keterangan
     - (v) Besi Lainnya : ☐ Ada ☑ Tidak Ada / Jumlah : ____ Keterangan
   - e. Bahan Aluminium
     - (1) [illegible] : ☐ Ada ☑ Tidak Ada / Jumlah : ______ Keterangan :
     - (2) Kusen Aluminium : ☐ Ada ☑ Tidak Ada / Jumlah ______ Keterangan :
     - (3) Daun Pintu / Jendela Aluminium : ☐ Ada ☑ Tidak Ada / Jumlah ______ Keterangan :
     - (4) Aluminium lainnya : ☐ Ada ☑ Tidak Ada / Jumlah ____ Keterangan : ______
   - f. Bahan Lainnya
     - (1) [illegible] : ☐ Ada ☑ Tidak Ada / Jumlah : ______ Keterangan :
     - (2) [illegible] : ☑ Ada ☐ Tidak Ada / Jumlah : 1 kg Keterangan : ____
     - (3) Material Lainnya yang [illegible] : ☐ Ada ☑ Tidak Ada / Jumlah : ______ Keterangan :

3. Keterangan Tambahan
   - a. Luas Bangunan : 80 m2
   - b. [illegible] : [illegible]
   - c. [illegible] : [illegible]

Tanggal Pelaksanaan Survei : [illegible]

Petugas Survei

Agung Widodo

[illegible]

[illegible]

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KPKNL SAMARINDA

KERTAS KERJA SURVEI LAPANGAN

FORM
MATERIAL BONGKARAN BANGUNAN

1. Identitas Bangunan Bongkaran
   - a. Nama Bangunan : Bangunan Rumah Sakit Umum
   - b. Kode Barang : [illegible]
   - c. NUP : 9
   - d. Lokasi : Jalan Imam Bonjol No. 07 RT 20, Kel. Melayu, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur

2. Material Bongkaran

a. Bahan Kayu					
(i) Balok / Papan Kayu	☑ Ada	☐ Tidak Ada	/ Jumlah :	0,21 m³	Keterangan :
(ii) Kusen Kayu	☑ Ada	☐ Tidak Ada	/ Jumlah :	0,26 m³	Keterangan :
(iii) Daun Pintu / Jendela Kayu	☐ Ada	☑ Tidak Ada	/ Jumlah :		Keterangan :
b. Bahan Baja					
(i) Baja Profil	☐ Ada	☑ Tidak Ada	/ Jumlah :		Keterangan :
c. Bahan Baja Ringan					
(i) [illegible] Baja Ringan	☐ Ada	☑ Tidak Ada	/ Jumlah :		Keterangan :
d. Bahan Besi					
(i) Tulangan Beton	☑ Ada	☐ Tidak Ada	/ Jumlah :	68,01 kg	Keterangan :
(ii) Teralis	☐ Ada	☑ Tidak Ada	/ Jumlah :		Keterangan :
(iii) Pagar	☐ Ada	☑ Tidak Ada	/ Jumlah :		Keterangan :
(iv) Daun Pintu Besi	☐ Ada	☑ Tidak Ada	/ Jumlah :		Keterangan :
(v) Besi Lainnya	☐ Ada	☑ Tidak Ada	/ Jumlah :		Keterangan :
e. Bahan Aluminium					
(i) Rangka Plafon / [illegible]	☐ Ada	☑ Tidak Ada	/ Jumlah :		Keterangan :
(ii) Kusen Aluminium	☐ Ada	☑ Tidak Ada	/ Jumlah :		Keterangan :
(iii) Daun Pintu / Jendela Aluminium	☐ Ada	☑ Tidak Ada	/ Jumlah :		Keterangan :
(iv) Aluminium Lainnya	☐ Ada	☑ Tidak Ada	/ Jumlah :		Keterangan :
f. Bahan Lainnya					
(i) Genteng Tanah Liat / [illegible]	☐ Ada	☑ Tidak Ada	/ Jumlah :		Keterangan :
(ii) Seng Gelombang / Atap Gelombang / Spandek	☑ Ada	☐ Tidak Ada	/ Jumlah :	1 kg	Keterangan :
(iii) Material Lainnya yang masih bernilai ekonomis	☐ Ada	☑ Tidak Ada	/ Jumlah :		Keterangan :

3. Keterangan Tambahan
   - a. Tahun Dibangun : 2012
   - b. Tipe Bangunan : Bangunan Semi Permanen
   - c. Kondisi : Rusak Berat [illegible]

Tanggal Pelaksanaan Survei : [illegible]

Petugas Survei

Agung Wahyudi　　[illegible]　　[illegible]

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KPKNL SAMARINDA
KERTAS KERJA SURVEI LAPANGAN

FORM
MATERIAL BONGKARAN BANGUNAN

1. Identitas Bangunan Bangunan
   - a. Nama Bangunan : [illegible]
   - b. Kode Barang : [illegible]
   - c. NUP : [illegible]
   - d. Lokasi : [illegible] Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur

2. Material Bongkaran
   - a. Bahan Kayu
     - 1) Balok / Papan Kayu : ☑ Ada ☐ Tidak Ada ; Jumlah : 3,8 m³ Keterangan : ____
     - 2) Kusen Kayu : ☑ Ada ☐ Tidak Ada ; Jumlah : 3,3 m³ Keterangan : ____
     - 3) Daun Pintu / Jendela Kayu : ☐ Ada ☑ Tidak Ada ; Jumlah : Keterangan : ____
   - b. Bahan Baja
     - 1) Baja Profil : ☐ Ada ☑ Tidak Ada ; Jumlah : ____ Keterangan : ____
   - c. Bahan Baja Ringan
     - 1) Atap / Canopy Rangka Baja Ringan : ☐ Ada ☑ Tidak Ada ; Jumlah : ____ Keterangan : ____
   - d. Bahan Besi
     - 1) Tulangan Beton : ☑ Ada ☐ Tidak Ada ; Jumlah : ± 217,6 kg Keterangan : ____
     - 2) [illegible] : ☐ Ada ☑ Tidak Ada ; Jumlah : Keterangan : ____
     - 3) Pagar : ☐ Ada ☑ Tidak Ada ; Jumlah : ____ Keterangan : ____
     - 4) [illegible] Pintu Besi : ☐ Ada ☑ Tidak Ada ; Jumlah : ____ Keterangan : ____
     - 5) Besi Lainnya : ☐ Ada ☑ Tidak Ada ; Jumlah : ____ Keterangan : ____
   - e. Bahan Aluminium
     - 1) Rangka Partisi / Rangka Plafond, dan lain-lain : ☐ Ada ☑ Tidak Ada ; Jumlah : ____ Keterangan : ____
     - 2) Kusen Aluminium : ☐ Ada ☑ Tidak Ada ; Jumlah : ____ Keterangan : ____
     - 3) Daun Pintu / Jendela Aluminium : ☐ Ada ☑ Tidak Ada ; Jumlah : Keterangan : ____
     - 4) Aluminium Lainnya : ☐ Ada ☑ Tidak Ada ; Jumlah : ____ Keterangan : ____
   - f. Bahan Lainnya
     - 1) Genteng Tanah Liat / [illegible] : ☐ Ada ☑ Tidak Ada ; Jumlah : ____ Keterangan : ____
     - 2) Seng, Galvalum / Atap Gelombang / Spandek : ☑ Ada ☐ Tidak Ada ; Jumlah : 5 kg Keterangan : ____
     - 3) Material Lainnya yang memiliki nilai ekonomis : ☐ Ada ☑ Tidak Ada ; Jumlah : ____ Keterangan : ____

3. Keterangan Tambahan
   - a. Luas Bangunan : [illegible] m2
   - b. Tipe Bangunan : [illegible]
   - c. Kondisi : Rusak Berat. Objek penilaian berupa material bongkaran dari bangunan yang akan dibongkar yang [illegible] dalam kondisi layak dan dapat dimanfaatkan kembali.

Tanggal Pelaksanaan Survei : [illegible] November [illegible]

Petugas Survei

[illegible]

[illegible] Setiawan

[illegible]

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KPKNL SAMARINDA
KERTAS KERJA SURVEI LAPANGAN

FORM
MATERIAL BONGKARAN BANGUNAN

I. Identitas Bangunan / Bangunan
a. Nama Bangunan : Bangunan [illegible]
b. Kode Barang : 4.01.01.08.01[illegible]
c. NUP : 1
d. Lokasi : Jalan Imam Bonjol No. 37 RT 00 Kel. Melayu, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur

II. Material Bangunan

a. Bahan Kayu				
(i) Balok / Papan Kayu	☑ Ada	☐ Tidak Ada	Jumlah : 0,21 m³	Keterangan :
(ii) Kusen Kayu	☑ Ada	☐ Tidak Ada	Jumlah : 0,06 M³	Keterangan :
(iii) Daun Pintu / Jendela Kayu	☐ Ada	☑ Tidak Ada	Jumlah :	Keterangan :
b. Bahan Baja				
(i) Baja Profil	☐ Ada	☑ Tidak Ada	Jumlah :	Keterangan :
c. Bahan Baja Ringan				
(i) Atap / Canopy / Rangka Baja Ringan	☐ Ada	☑ Tidak Ada	Jumlah :	Keterangan :
d. Bahan Besi				
(i) Tulangan Beton	☑ Ada	☐ Tidak Ada	Jumlah : 67,62 kg	Keterangan :
(ii) Teralis	☐ Ada	☑ Tidak Ada	Jumlah :	Keterangan :
(iii) Pagar	☐ Ada	☑ Tidak Ada	Jumlah :	Keterangan :
(iv) Daun Pintu Besi	☐ Ada	☑ Tidak Ada	Jumlah :	Keterangan :
(v) Besi Lainnya	☐ Ada	☑ Tidak Ada	Jumlah :	Keterangan :
e. Bahan Aluminium				
(i) Rangka Partisi / Rangka Plafond, dan lainnya	☐ Ada	☑ Tidak Ada	Jumlah :	Keterangan :
(ii) Kusen Aluminium	☐ Ada	☑ Tidak Ada	Jumlah :	Keterangan :
(iii) Daun Pintu / Jendela Aluminium	☐ Ada	☑ Tidak Ada	Jumlah :	Keterangan :
(iv) Aluminium Lainnya	☐ Ada	☑ Tidak Ada	Jumlah :	Keterangan :
f. Bahan Lainnya				
(i) [illegible]	☐ Ada	☑ Tidak Ada	Jumlah :	Keterangan :
(ii) [illegible]	☐ Ada	☑ Tidak Ada	Jumlah :	Keterangan :
(iii) [illegible]	☐ Ada	☑ Tidak Ada	Jumlah :	Keterangan :

III. Keterangan Tambahan
a. Luas Bangunan : 21 m2
b. [illegible] : Ruang Tambahan [illegible]
c. Catatan : [illegible] yang akan dibongkar yang mempunyai nilai ekonomis, dalam kondisi layak dan dapat dimanfaatkan

Tanggal Pelaksanaan Survei : Selasa, 3 November 2020

Petugas Survei

Agung [illegible]　　[illegible]　　[illegible]

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KPKNL SAMARINDA

KERTAS KERJA SURVEI LAPANGAN

FORM

MATERIAL BONGKARAN BANGUNAN

1. [illegible] Bangunan
   a. Nama Bangunan : Bangunan Pagar [illegible]
   b. Kode Barang : 4.01.01.08.015
   c. NUP : 2
   d. Lokasi : Jalan [illegible] No. 87 RT 06, [illegible] Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur

2. Material Bongkaran
   a. Bahan Kayu
      (i) Balok / Papan Kayu : ☑ Ada ☐ Tidak Ada / Jumlah : 0,20 m³ Keterangan :
      (ii) Kusen Kayu : ☑ Ada ☐ Tidak Ada / Jumlah : 0,04 m³ Keterangan :
      (iii) Daun Pintu / Jendela Kayu : ☐ Ada ☑ Tidak Ada / Jumlah : Keterangan :
   b. Bahan Baja
      (i) Baja [illegible] : ☐ Ada ☑ Tidak Ada / Jumlah : Keterangan :
   c. [illegible]
      (i) [illegible] : ☐ Ada ☑ Tidak Ada / Jumlah : Keterangan :
   d. Bahan Besi
      (i) Tulangan Beton : ☑ Ada ☐ Tidak Ada / Jumlah : 16,13 kg Keterangan :
      (ii) Teralis : ☐ Ada ☑ Tidak Ada / Jumlah : Keterangan :
      (iii) Pagar : ☐ Ada ☑ Tidak Ada / Jumlah : Keterangan :
      (iv) Daun Pintu Besi : ☐ Ada ☑ Tidak Ada / Jumlah : Keterangan :
      (v) Besi Lainnya : ☐ Ada ☑ Tidak Ada / Jumlah : Keterangan :
   e. Bahan Aluminium
      (i) Rangka Partisi / Rangka Plafond, dan lain-lain : ☐ Ada ☑ Tidak Ada / Jumlah : Keterangan :
      (ii) Kusen Aluminium : ☐ Ada ☑ Tidak Ada / Jumlah : Keterangan :
      (iii) Daun Pintu / Jendela Aluminium : ☐ Ada ☑ Tidak Ada / Jumlah : Keterangan :
      (iv) Aluminium Lainnya [illegible] : ☐ Ada ☑ Tidak Ada / Jumlah : Keterangan :
      (v) [illegible] : ☐ Ada ☑ Tidak Ada / Jumlah : Keterangan :
      (vi) [illegible] : ☐ Ada ☑ Tidak Ada / Jumlah : Keterangan :
      (vii) Material Lainnya yang masih memiliki nilai ekonomis : ☐ Ada ☑ Tidak Ada / Jumlah : Keterangan :

3. Keterangan Tambahan
   a. Luas Bangunan : [illegible]
   b. [illegible] : [illegible]
   c. [illegible] : [illegible]

Tanggal Pelaksanaan Survei : [illegible] 2025

Tim Survei

Agung Widodo

[illegible]

[illegible]

	KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA **DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEAGRA** **KPKNL SAMARINDA** **KERTAS KERJA SURVEI LAPANGAN**	**FORM** **MATERIAL BONGKARAN BANGUNAN**

1. [illegible]
   - a. Nama Bangunan : Bangunan Gedung Tempat [illegible]
   - b. Kode Barang : 4 01 01 08 001
   - c. NUP : 1
   - d. Lokasi : Jalan [illegible] Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur

2. [illegible]
   - a. Bahan Kayu
     - (i) [illegible] Kayu : ☑ Ada ☐ Tidak Ada / Jumlah : 0,34 m³ Keterangan : ______
     - (ii) Kusen Kayu : ☑ Ada ☐ Tidak Ada / Jumlah : 0,19 m³ Keterangan : ______
     - (iii) Daun Pintu / Jendela Kayu : ☐ Ada ☑ Tidak Ada / Jumlah : ______ Keterangan : ______
   - b. Bahan Baja
     - (i) Baja Profil : ☐ Ada ☑ Tidak Ada / Jumlah : ______ Keterangan : ______
   - c. Bahan Baja Ringan
     - (i) Atap / [illegible] Baja Ringan : ☐ Ada ☑ Tidak Ada / Jumlah : ______ Keterangan : ______
   - d. Bahan Besi
     - (i) Tulangan Beton : ☑ Ada ☐ Tidak Ada / Jumlah : 115,81 kg Keterangan : ______
     - (ii) [illegible] : ☐ Ada ☑ Tidak Ada / Jumlah : ______ Keterangan : ______
     - (iii) [illegible] : ☐ Ada ☑ Tidak Ada / Jumlah : ______ Keterangan : ______
     - (iv) [illegible] : ☐ Ada ☑ Tidak Ada / Jumlah : ______ Keterangan : ______
     - (v) Besi Lainnya : ☐ Ada ☑ Tidak Ada / Jumlah : ______ Keterangan : ______
   - e. Bahan Aluminium
     - (i) [illegible] Rangka Plafond, dan lain-lain : ☐ Ada ☑ Tidak Ada / Jumlah : ______ Keterangan : ______
     - (ii) Kusen aluminium : ☐ Ada ☑ Tidak Ada / Jumlah : ______ Keterangan : ______
     - (iii) Daun Pintu / Jendela Aluminium : ☐ Ada ☑ Tidak Ada / Jumlah : ______ Keterangan : ______
     - (iv) Aluminium Lainnya : ☐ Ada ☑ Tidak Ada / Jumlah : ______ Keterangan : ______
   - f. Bahan Lainnya
     - (i) Genteng Tanah Liat / [illegible] : ☐ Ada ☑ Tidak Ada / Jumlah : ______ Keterangan : ______
     - (ii) [illegible] : ☐ Ada ☑ Tidak Ada / Jumlah : ______ Keterangan : ______
     - (iii) [illegible] : ☐ Ada ☑ Tidak Ada / Jumlah : ______ Keterangan : ______

3. [illegible]
   - a. Luas Bangunan : [illegible]
   - b. Tipe Bangunan : [illegible]
   - c. Kondisi : Rusak Berat [illegible]

Tanggal Pelaksanaan Survei : [illegible] Desember 2023

[illegible]

[illegible]   [illegible]   [illegible]

	KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KPKNL SAMARINDA **KERTAS KERJA SURVEI LAPANGAN**	FORM MATERIAL BONGKARAN BANGUNAN

1. Identifikasi Bangunan
   a. Nama Bangunan : Bangunan [illegible]
   b. Kode Barang : [illegible]
   c. NUP : [illegible]
   d. Lokasi : Jalan Imam Bonjol No. 37 RT 03 Kel. [illegible] Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara Prov. Kalimantan Timur

2. Bahan Bongkaran
   a. Bahan Kayu
      (1) Rangka Atap Kayu : ☐ Ada ☑ Tidak Ada / Jumlah ____ Keterangan : ____
      (2) Kusen Kayu : ☐ Ada ☑ Tidak Ada / Jumlah ____ Keterangan : ____
      (3) Daun Pintu / Jendela Kayu : ☐ Ada ☑ Tidak Ada / Jumlah ____ Keterangan : ____
   b. Bahan Baja
      (1) Baja Profil : ☐ Ada ☑ Tidak Ada / Jumlah ____ Keterangan : ____
   c. Bahan Baja Ringan
      (1) [illegible] Baja Ringan : ☐ Ada ☑ Tidak Ada / Jumlah ____ Keterangan : ____
   d. [illegible]
      (a) [illegible] : ☐ Ada ☑ Tidak Ada / Jumlah : ____ Keterangan : ____
      (b) Talang : ☐ Ada ☑ Tidak Ada / Jumlah : ____ Keterangan : ____
      (c) Pagar : ☐ Ada ☑ Tidak Ada / Jumlah : ____ Keterangan : ____
      (d) [illegible] : ☐ Ada ☑ Tidak Ada / Jumlah : ____ Keterangan : ____
      (e) [illegible] Lainnya : ☐ Ada ☑ Tidak Ada / Jumlah : ____ Keterangan : ____
   e. Bahan Aluminium
      (a) Rangka [illegible] / Rangka [illegible] : ☐ Ada ☑ Tidak Ada / Jumlah : ____ Keterangan : ____
      (b) Kusen Aluminium : ☐ Ada ☑ Tidak Ada / Jumlah : ____ Keterangan : ____
      (c) Daun Pintu / Jendela Aluminium : ☐ Ada ☑ Tidak Ada / Jumlah : ____ Keterangan : ____
      (d) Aluminium Lainnya : ☐ Ada ☑ Tidak Ada / Jumlah : ____ Keterangan : ____
   f. Bahan Lainnya
      (1) Genteng Beton / Tanah / Keramik / Metal : ☐ Ada ☑ Tidak Ada / Jumlah ____ Keterangan : ____
      (2) Seng Gelombang / Asbes Gelombang / Spandek : ☐ Ada ☑ Tidak Ada / Jumlah ____ Keterangan : ____
      (3) Material Lainnya yang masih bernilai ekonomis : ☐ Ada ☑ Tidak Ada / Jumlah ____ Keterangan : ____

3. Keterangan Tambahan
   a. Luas Bangunan : [illegible]
   b. Tipe Bangunan : [illegible]
   c. Kondisi : [illegible] pada bangunan yang akan dihapuskan [illegible] mempunyai [illegible]

Tanggal Pelaksanaan Survei : [illegible]

Petugas Survei

[illegible] [illegible] [illegible]

	KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA **DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA** **KPKNL SAMARINDA** **KERTAS KERJA SURVEI LAPANGAN**	**FORM** **MATERIAL BONGKARAN BANGUNAN**

1. [illegible] Bangunan
   a. Nama Bangunan : Taman Lainnya
   b. Kode Barang : [illegible]
   c. NUP : 1
   d. Lokasi : [illegible] Kec. Tenggarong [illegible] Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur

2. Material Bangunan
   a. Bahan Kayu
      (i) [illegible] Kayu : ☐ Ada ☑ Tidak Ada / Jumlah : ______ Keterangan : ______
      (ii) [illegible] Kayu : ☐ Ada ☑ Tidak Ada / Jumlah : ______ Keterangan : ______
      (iii) Daun Pintu / Jendela Kayu : ☐ Ada ☑ Tidak Ada / Jumlah : ______ Keterangan : ______
   b. Bahan Baja
      (i) Baja [illegible] : ☐ Ada ☑ Tidak Ada / Jumlah : ______ Keterangan : ______
   c. Bahan Baja Ringan
      (i) Atap / Canopy Rangka Baja Ringan : ☐ Ada ☑ Tidak Ada / Jumlah : ______ Keterangan : ______
   d. Bahan Besi
      (i) [illegible] : ☐ Ada ☑ Tidak Ada / Jumlah : Keterangan : ______
      (ii) Teralis : ☐ Ada ☑ Tidak Ada / Jumlah : ______ Keterangan :
      (iii) Pagar : ☐ Ada ☑ Tidak Ada / Jumlah : ______ Keterangan :
      (iv) Daun Pintu Besi : ☐ Ada ☑ Tidak Ada / Jumlah : Keterangan :
      (v) Besi Lainnya : ☐ Ada ☑ Tidak Ada / Jumlah : Keterangan :
   e. Bahan Aluminium
      (i) Rangka Partisi, Rangka Plafond, dan Jendela : ☐ Ada ☑ Tidak Ada / Jumlah : ______ Keterangan : ______
      (ii) Kusen Aluminium : ☐ Ada ☑ Tidak Ada / Jumlah : Keterangan : ______
      (iii) Daun Pintu / Jendela Aluminium : ☐ Ada ☑ Tidak Ada / Jumlah : ______ Keterangan : ______
      (iv) Aluminium Lainnya : ☐ Ada ☑ Tidak Ada / Jumlah : Keterangan : ______
   f. Bahan Lainnya
      (i) [illegible] : ☐ Ada ☑ Tidak Ada / Jumlah : Keterangan : ______
      (ii) Seng Gelombang / [illegible] : ☐ Ada ☑ Tidak Ada / Jumlah : ______ Keterangan : ______
      (iii) Material Lainnya yang mempunyai Nilai Ekonomis : ☐ Ada ☑ Tidak Ada / Jumlah : Keterangan : ______

3. [illegible]
   a. Luas Bangunan : [illegible]
   b. Tipe Bangunan : Pembatas Taman
   c. Kondisi : Rusak Berat (Objek [illegible])

Tanggal Pelaksanaan Survei : [illegible] November 2025

Petugas Survei

Agung Widodo [illegible] [illegible]

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KPKNL SAMARINDA

KERTAS KERJA SURVEI LAPANGAN

FORM

MATERIAL BONGKARAN BANGUNAN

1. Identitas Bangunan Bongkaran
   - a. Nama Bangunan : Tugu/Tanda Batas Lainnya
   - b. Kode Barang : 4.04.01.99.999
   - c. NUP :
   - d. Lokasi : Jalan [illegible] RT 00 [illegible] Kab. Kutai Kartanegara, Prov. Kalimantan Timur

2. Material Bongkaran
   - a. Bahan Kayu
     - (i) Balok / Papan Kayu : ☐ Ada ☑ Tidak Ada / Jumlah : ______ Keterangan : ______
     - (ii) Kusen Kayu : ☐ Ada ☑ Tidak Ada / Jumlah : ______ Keterangan : ______
     - (iii) Daun Pintu / Jendela Kayu : ☐ Ada ☑ Tidak Ada / Jumlah : ______ Keterangan : ______
   - b. Bahan Baja
     - (i) Baja Profil : ☐ Ada ☑ Tidak Ada / Jumlah : ______ Keterangan : ______
   - c. Bahan Baja Ringan
     - (i) Atap / Canopy Rangka Baja Ringan : ☐ Ada ☑ Tidak Ada / Jumlah : ______ Keterangan : ______
   - d. Bahan Besi
     - (i) Tulangan Beton : ☑ Ada ☐ Tidak Ada / Jumlah : 13,05 kg Keterangan : ______
     - (ii) [illegible] : ☐ Ada ☑ Tidak Ada / Jumlah : ______ Keterangan : ______
     - (iii) Pagar : ☐ Ada ☑ Tidak Ada / Jumlah : ______ Keterangan : ______
     - (iv) [illegible] : ☐ Ada ☑ Tidak Ada / Jumlah : ______ Keterangan : ______
     - (v) Besi Lainnya : ☐ Ada ☑ Tidak Ada / Jumlah : ______ Keterangan : ______
   - e. Bahan Aluminium
     - (i) Kusen Pintu / Kusen Jendela, dan lain-lain : ☐ Ada ☑ Tidak Ada / Jumlah : ______ Keterangan : ______
     - (ii) [illegible] : ☐ Ada ☑ Tidak Ada / Jumlah : ______ Keterangan : ______
     - (iii) Daun Pintu / Jendela Aluminium : ☐ Ada ☑ Tidak Ada / Jumlah : ______ Keterangan : ______
     - (iv) Aluminium lainnya : ☐ Ada ☑ Tidak Ada / Jumlah : ______ Keterangan : ______
   - f. Bahan Lainnya
     - (i) [illegible] : ☐ Ada ☑ Tidak Ada / Jumlah : ______ Keterangan : ______
     - (ii) [illegible] : ☐ Ada ☑ Tidak Ada / Jumlah : ______ Keterangan : ______
     - (iii) [illegible] : ☐ Ada ☑ Tidak Ada / Jumlah : Keterangan : ______

3. Keterangan Tambahan
   - a. Luas Bangunan : [illegible]
   - b. Jenis Bangunan : Tugu Tanda Batas Lain
   - c. Kondisi : [illegible]

Tanggal Pelaksanaan Survei : [illegible]

Petugas Survei

[illegible] [illegible] [illegible]

D

FOTO DAN DENAH LOKASI OBJEK PENILAIAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SAMARINDA

FOTO OBJEK PENILAIAN
Bangunan Yang Akan Dibongkar
Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong

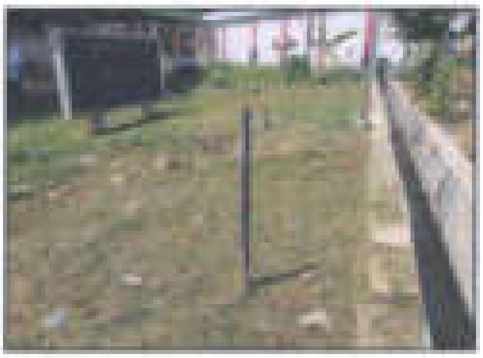

Bangunan Gedung Kantor Permanen (4.01.01.01.001-4)

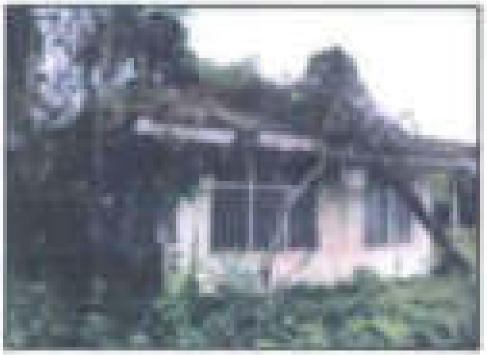

Bangunan Gedung Kantor Permanen (4.01.01.01.001-5)

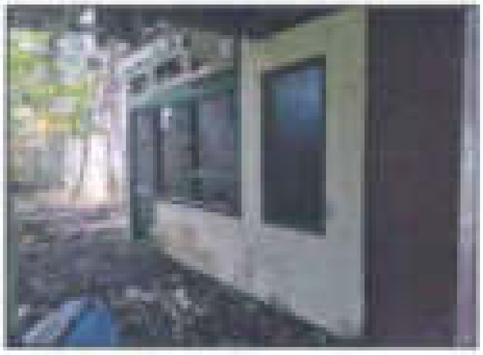

Bangunan Gedung Kantor Lainnya (4.01.01.01.999-1)

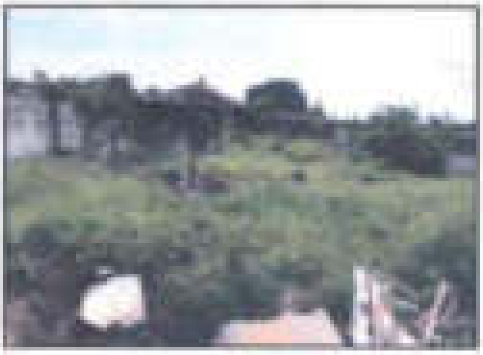

Bangunan Gedung Kantor Lainnya (4.01.01.01.999-2)

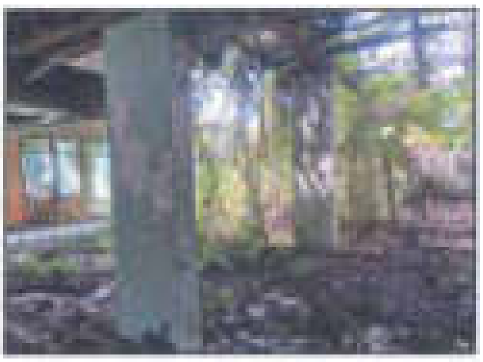

Bangunan Gedung Kantor Lainnya (4.01.01.01.999-3)

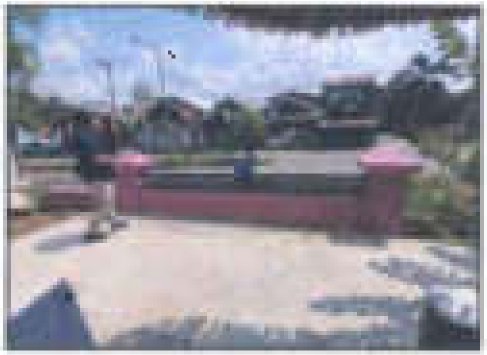

Bangunan Gedung Kantor Lainnya (4.01.01.01.999-4)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SAMARINDA

FOTO OBJEK PENILAIAN
Bangunan Yang Akan Dibongkar
Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong

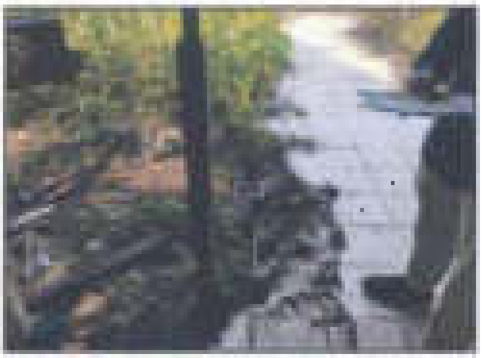

Bangunan Gedung Kantor Lainnya
(4.01.01.01.999-5)

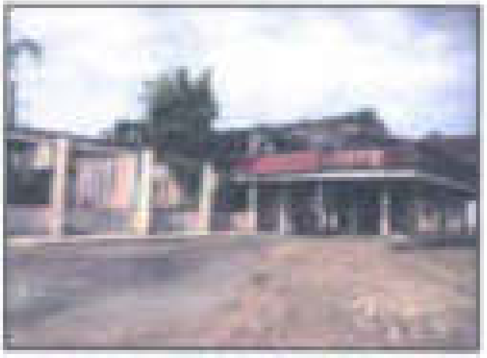

Bangunan Rumah Sakit Umum
(4.01.01.08.001-1)

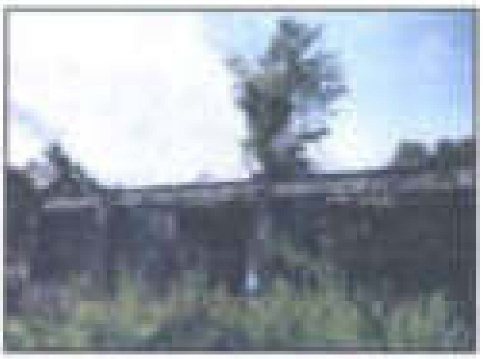

Bangunan Rumah Sakit Umum
(4.01.01.08.001-2)

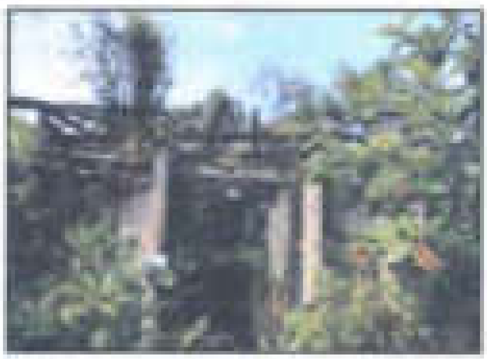

Bangunan Rumah Sakit Umum
(4.01.01.08.001-3)

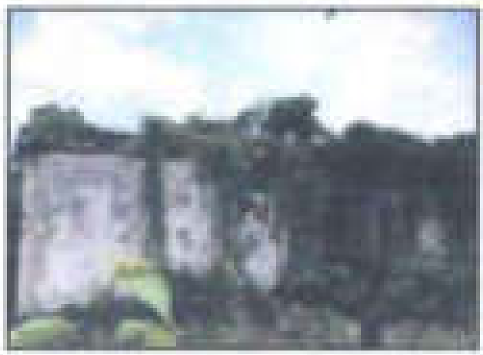

Bangunan Rumah Sakit Umum
(4.01.01.08.001-4)

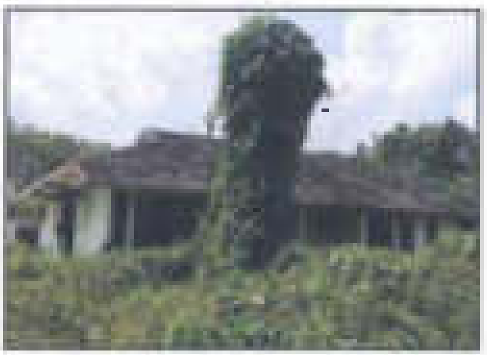

Bangunan Rumah Sakit Umum
(4.01.01.08.001-5)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SAMARINDA

FOTO OBJEK PENILAIAN
Bangunan Yang Akan Dibongkar
Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong

Bangunan Rumah Sakit Umum
(4.01.01.06.001-6)

Bangunan Rumah Sakit Umum
(4.01.01.06.001-7)

Bangunan Rumah Sakit Umum
(4.01.01.06.001-8)

Bangunan Rumah Sakit Umum
(4.01.01.06.001-9)

Bangunan Rumah Sakit Umum
(4.01.01.06.001-10)

Bangunan Posyandu
(4.01.01.06.015-1)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SAMARINDA

FOTO OBJEK PENILAIAN
Bangunan Yang Akan Dibongkar
Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong

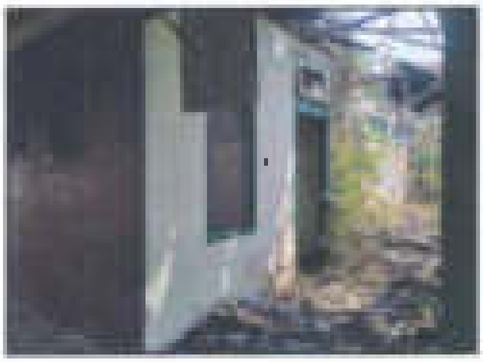

Bangunan Posyandu
(4.01.01.06.015-2)

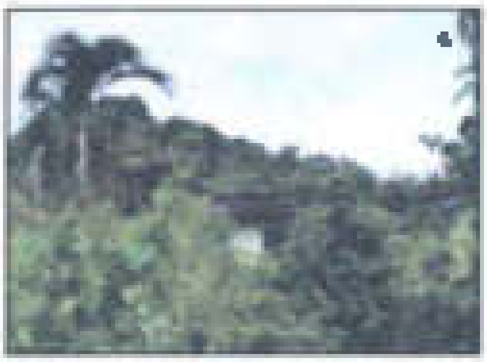

Bangunan Gedung Tempat Ibadah
Permanen (4.01.01.08.001-1)

Bangunan Rumah Genset
(4.01.01.20.000-1)

Taman Lainnya (4.01.01.34.999-1)

Tugu/Tanda Batas Lainnya
(4.04.01.99.999-1)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SAMARINDA

DENAH LOKASI OBJEK PENILAIAN

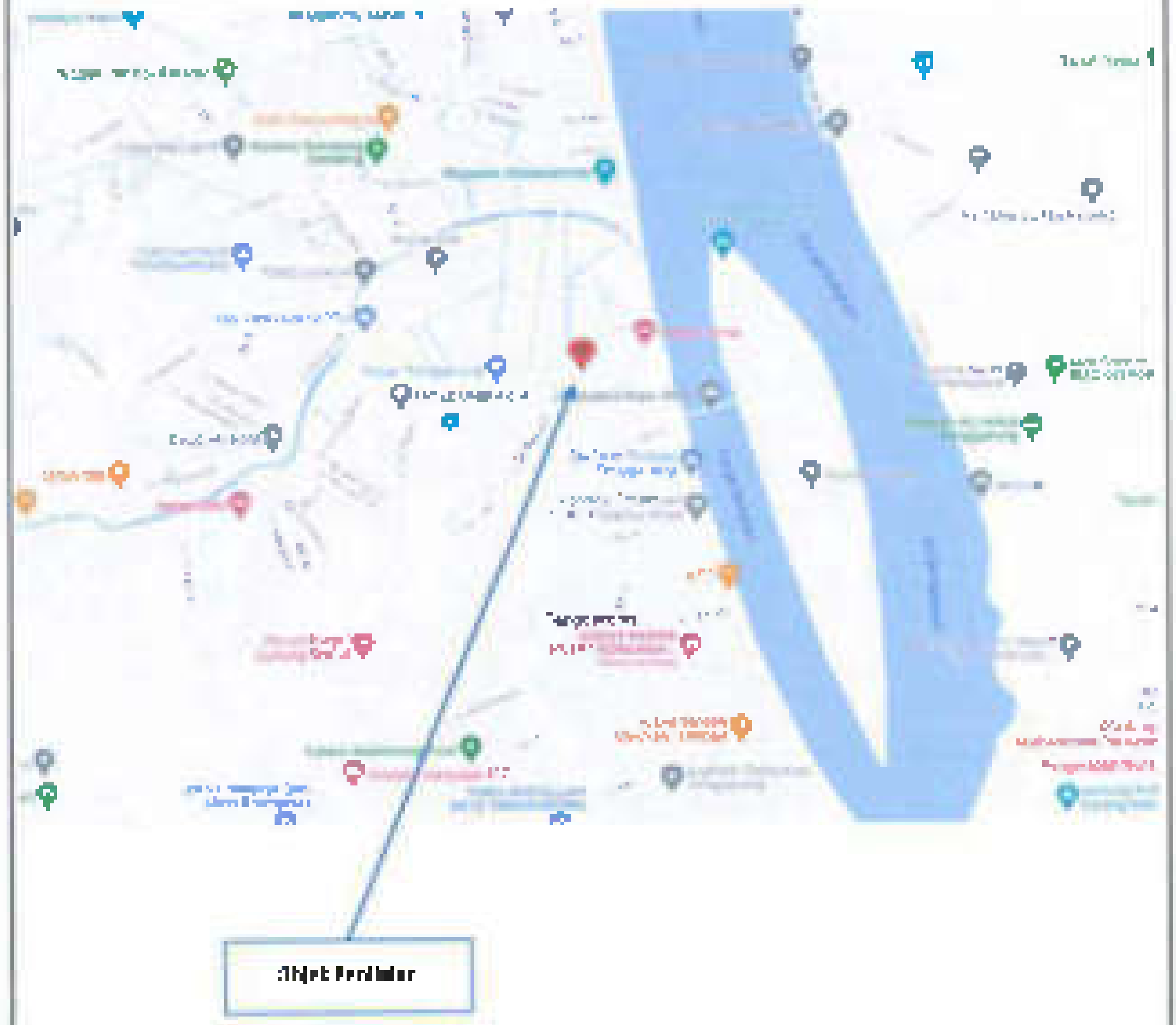

SURAT USUL PROMOSI JABATAN ADMINISTRAI

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jalan : Imam Bonjol No.37 Kelurahan Kampung Melayu, Tenggarong
Telp: 0541-6720100 Email: lpptgr@gmail.com

Nomor : W.18.PAS.PAS.7-KP.03.03- 0178 22 Januari 2024
Lampiran : 01 (satu) berkas
Hal : Usul Promosi Jabatan Administrasi
Pegawai Negeri Sipil Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong

Yth.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Kalimantan Timur
Di –
Samarinda

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas fungsi dan memasuki masa purna tugas di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong, setelah dilakukan pemetaan dan inventarisir Jabatan Administrasi, diperlukan mutasi/rotasi Jabatan Administrasi di lingkungan Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong. Berkenaan dengan hal tersebut, dengan hormat kami sampaikan Usulan Promosi Jabatan Administrasi sebagaimana daftar terlampir untuk optimalisasi pelaksanaan tugas.

Demikian untuk menjadikan periksa, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

KEPALA

Triana Agustin
NIP 198208282000122001

Tembusan :

1. Kepala Divisi Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur
   di- Samarinda

[illegible]

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jalan : Imam Bonjol No.37 Kelurahan Kampung Melayu, Tenggarong
Telp: 0541-6720100 Email: lpp.smd@gmail.com

LAMPIRAN USULAN PROMOSI JABATAN ADMINISTRASI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
NOMOR : W.18.PAS.PAS.7-KP.03.03-0178
TANGGAL : 22 JANUARI 2024

No	**Nama/NIP**	**Pangkat/ Go.Ruang**	**Jabatan**		**Grade**	
			Lama	**Baru**	**Lama**	**Baru**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1.	**Adhiyani Maulina, S.Sos, M.Adm.KP** NIP. 19801031 200501 2 001	Penata Tk.I/ III/d	Kepala Subseksi Pelaporan dan Tata Tertib Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong	Kepala Subbagian Tata Usaha Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong	8	9
2.	**Siti Rahmah, A.Md.Kep., S.K.M., M.M.** NIP. 19810716 200312 2 002	Penata / III/c	Kepala Subseksi Bimbingan Kemasyarakatan Dan Perawatan Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong	Kepala Subbagian Tata Usaha Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong	8	9
3.	**Nanang Budiyono, SH** NIP. 19821204 201012 1 002	Penata/ III/c	Kepala Urusan Kepegawaian dan Keuangan Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong	Kepala Subbagian Tata Usaha Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong	8	9

KEPALA

Triana Agustin
NIP 198208282000122001

[illegible]

SCREENSHOOT STATUS
DSE PEJABAT
ADMINISTRASI ESELON IV

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Alamat : Jl. Imam Bonjol No.37 Rt.08 Kelurahan Melayu, Tenggarong – Kutai Kartanegara
Telp. 0541-6720100   Email : lpp.smd@gmail.com

SCREENSHOOT STATUS DSE PEJABAT ADMINISTRASI ESELON IV
LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

KEPALA SEKSI ADMINISTRASI KEAMANAN DAN KETERTIBAN

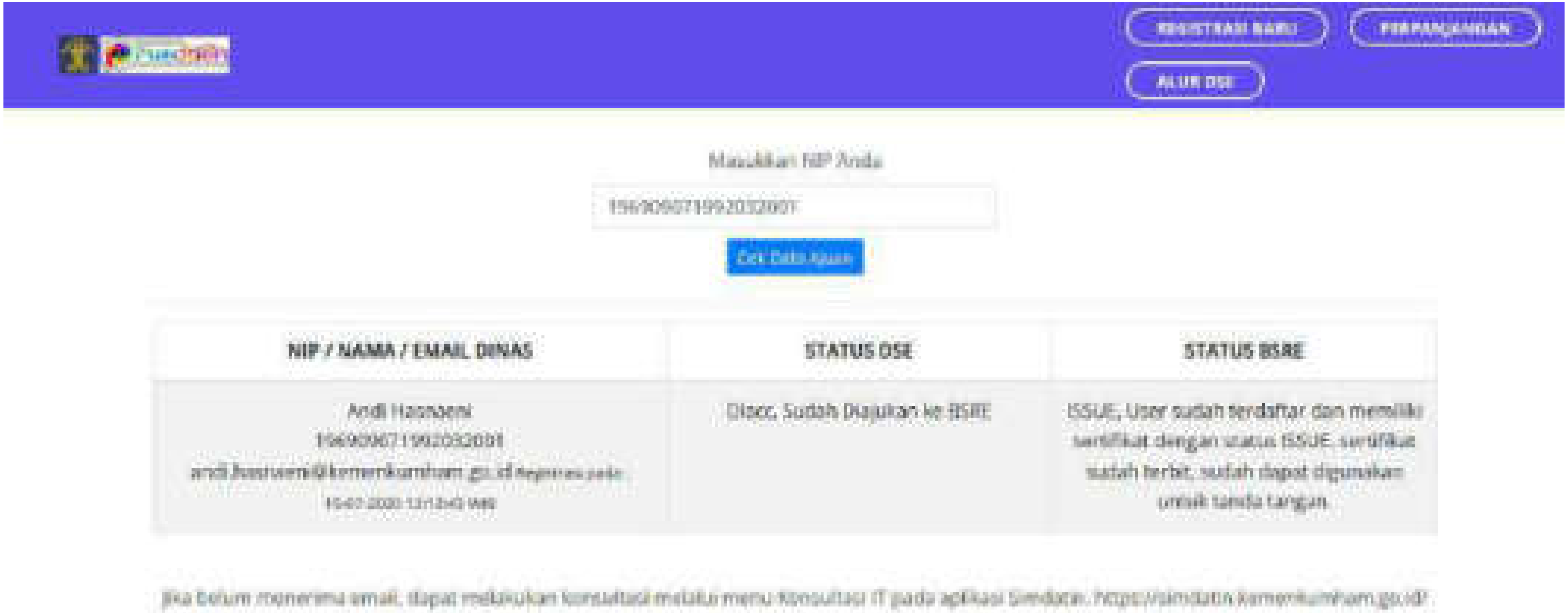

NIP / NAMA / EMAIL DINAS	STATUS DSE	STATUS BSRE
Andi Hasnaeni 196909071992032001 andi.hasnaeni@kemenkumham.go.id Registrasi pada 15-07-2020 12:12:43 WIB	Diacc, Sudah Diajukan ke BSRE	ISSUE, User sudah terdaftar dan memiliki sertifikat dengan status ISSUE. sertifikat sudah terbit, sudah dapat digunakan untuk tanda tangan.

Jika belum menerima email, dapat melakukan konsultasi melalui menu Konsultasi IT pada aplikasi Simdatin: https://simdatin.kemenkumham.go.id/

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Alamat : Jl. Imam Bonjol No.37 Rt.08 Kelurahan Melayu, Tenggarong – Kutai Kartanegara
Telp. 0541-6720100 Email : lpp.smd@gmail.com

SCREENSHOOT STATUS DSE PEJABAT ADMINISTRASI ESELON IV
LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

KEPALA SEKSI KEGIATAN KERJA

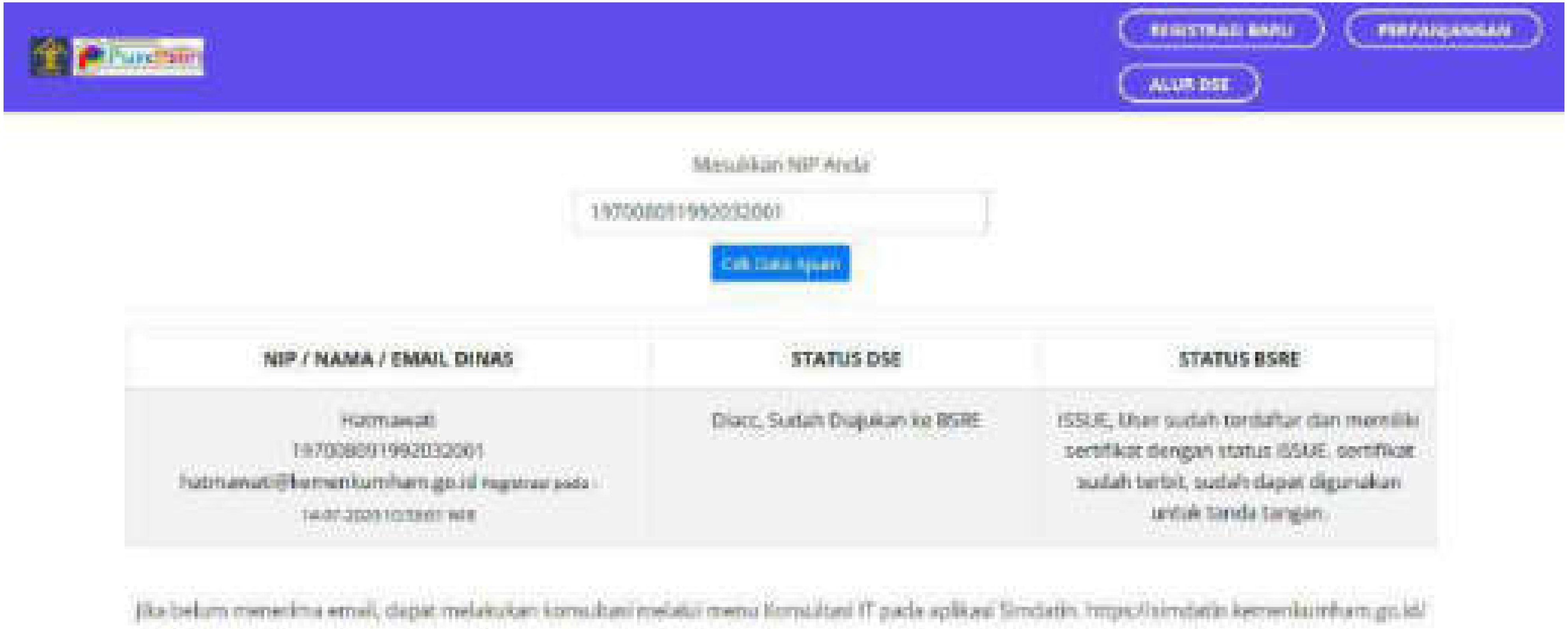

Masukkan NIP Anda

197008091992032001

NIP / NAMA / EMAIL DINAS	STATUS DSE	STATUS BSRE
Hatmawati 197008091992032001 hatmawati@kemenkumham.go.id registrasi pada : 14-07-2020 10:53:01 WIB	Diacc, Sudah Diajukan ke BSRE	ISSUE, User sudah terdaftar dan memiliki sertifikat dengan status ISSUE, sertifikat sudah terbit, sudah dapat digunakan untuk tanda tangan

Jika belum menerima email, dapat melakukan konsultasi melalui menu Konsultasi IT pada aplikasi Simdatin. https://simdatin.kemenkumham.go.id/

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Alamat : Jl. Imam Bonjol No.37 Rt.08 Kelurahan Melayu, Tenggarong – Kutai Kartanegara
Telp. 0541-6720100   Email : *lpp.smd@gmail.com*

SCREENSHOOT STATUS DSE PEJABAT ADMINISTRASI ESELON IV
LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

KEPALA SEKSI BIMBINGAN NARAPIDANA/ANAK DIDIK

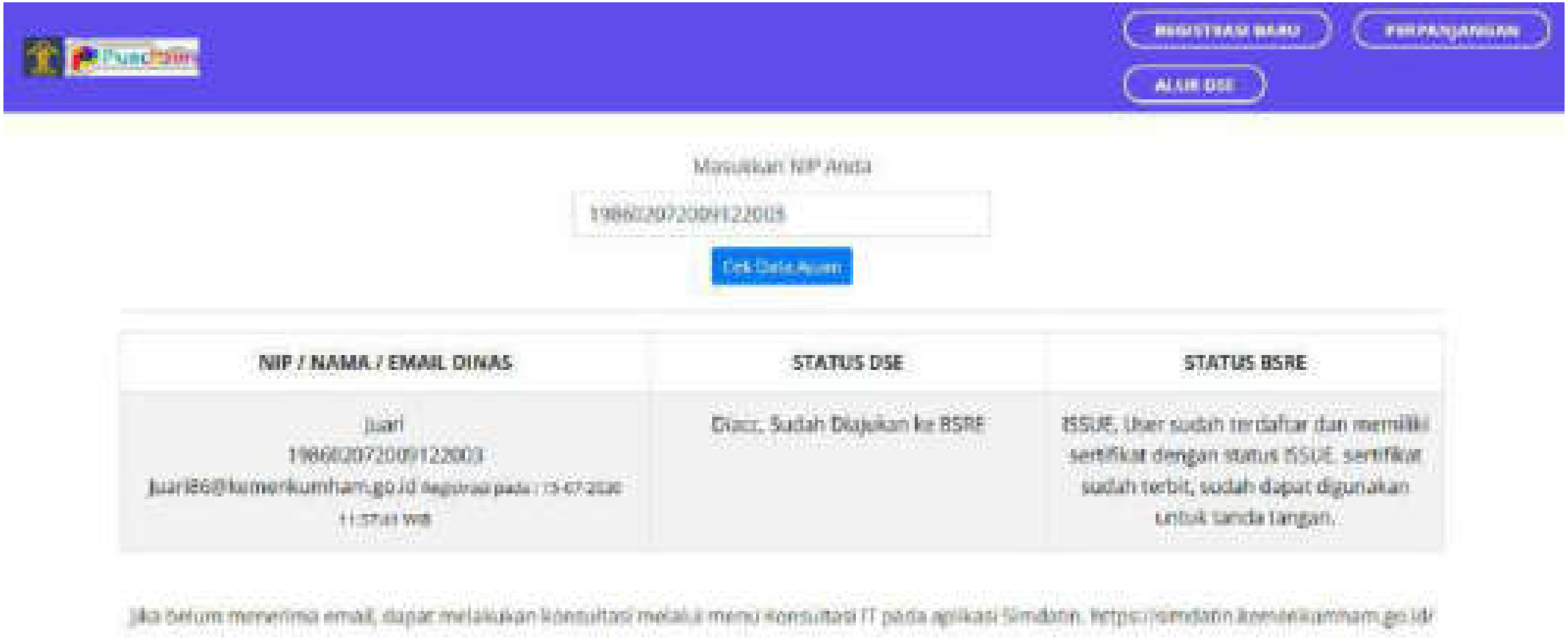

Masukkan NIP Anda

198602072009122003

NIP / NAMA / EMAIL DINAS	STATUS DSE	STATUS BSRE
Juari 198602072009122003 juari86@kemenkumham.go.id Registrasi pada : 13-07-2020 11:37:43 WIB	Diacc, Sudah Diajukan ke BSRE	ISSUE, User sudah terdaftar dan memiliki sertifikat dengan status ISSUE, sertifikat sudah terbit, sudah dapat digunakan untuk tanda tangan.

Jika belum menerima email, dapat melakukan konsultasi melalui menu konsultasi IT pada aplikasi Simdatin. https://simdatin.kemenkumham.go.id/

SURAT PERMINTAAN
KOREKSI DATA
SPM/SP2D

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II A TENGGARONG
Jl. Imam Bonjol No. 37, Kel Melayu – Tenggarong Kutai Kartanegara
Telp. 081155998333; Email : lpp.and@gmail.com

Nomor : W18.PAS.PAS7.01.01 -0679
Lampiran : 1 berkas
Hal : Permintaan Koreksi Data SPM/SP2D

Tenggarong, 18 Maret 2024

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Samarinda
Jalan M. Yamin No.2, Gn. Kelua
Samarinda - 75123

Bersama surat ini, kami menyampaikan permintaan koreksi data SPM/SP2D dengan perincian sebagai berikut :

Nomor SPM : **00008T/418333/2024**
Tanggal SPM : **26 Januari 2024**
Yang telah diterbitkan SP2D :
Nomor SP2D : **240401301000668**
Tanggal SP2D : **29 Januari 2024**
Dengan detail koreksi sebagaimana terlampir.

Koreksi dimaksud di atas dikarenakan hal-hal sebagai berikut :

1. Karena Kesalahan dalam penginputan Belanja Barang Pemenuhan Sarana Makan dan Minum pada akun Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (521811) detail **Penyediaan Peralatan Makan Minum** yang seharusnya pada Belanja Barang Pemenuhan Sarana Makan dan Minum pada akun Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (521811) detail **Penyediaan Peralatan Dapur**.

Demikian kami sampaikan, terima kasih.

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
Lembaga Pemasyarakatan Perempuan
[illegible]

[illegible]0012001

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II A TENGGARONG
Jl. Imam Bonjol No. 37, Kel Melayu – Tenggarong Kutai Kartanegara
Telp. 08115598333, Email : lpp.tmd@gmail.com

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nomor : W18.PAS.PAS7.01.01 - 0680

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Triana Agustin**
NIP : **198208282000122001**
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Perbaikan atas kesalahan SPM/SP2D dilakukan dalam rangka pertanggungjawaban Laporan Keuangan Satuan Kerja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong;

2. Segala hal yang terjadi akibat adanya perbaikan SPM/SP2D ini menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Tenggarong, [illegible] Maret 2024
Kepala [illegible] Tenggarong,

Triana Agustin
NIP. 198208282000122001

Lampiran Surat : W18.PAS.PAS7.01.01 - 0850
Tanggal : 18 Maret 2024

DETAIL PERMINTAAN KOREKSI

Bagan Akun Standar *)			
BAS Semula	**Nilai Semula**	**BAS Koreksi**	**Nilai Koreksi**
Kode Satker : 418333	Rp1.900.000,-	Kode Satker : 418333	Rp1.900.000,-
Kode KPPN : 046		Kode KPPN : 046	
Akun : 521811		Akun : 521811	
Program : BF		Program : BF	
Keg/Output : 5252.BDC.004.005.C		Keg/Output : 5252.BDC.004.005.C	
Sumber Dana : 01		Sumber Dana : 01	
Cara Tarik : 0		Cara Tarik : 0	
Register P/H : -		Register P/H : -	
Kewenangan : KD		Kewenangan : KD	
Lokasi : 1611		Lokasi : 1611	

Catatan:
Tidak ada penambahan atau pengurangan nilai Total Pengeluaran ataupun Total Penerimaan serta Jumlah Keseluruhan dan kami telah mempertimbangkan ketersediaan dana pada DIPA satker kami.

Uraian Deskripsi *)	
Semula	**Koreksi**
-	-

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
Lembaga Pemasyarakatan Perempuan
Kelas IIA Tenggarong

Truna Agustin
NIP. [illegible]

IKPA PENARIKAN HALAMAN III DIPA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Lapas Perempuan Kelas IIA Samarinda

DETAIL INDIKATOR HALAMAN 3 DIPA

No.	Kode Satker	Nama Satker	Kode KPPN	Periode	Rencana				Penyerapan				Deviasi				% Deviasi				% Proporsi Pagu				% Deviasi Tertimbang				% Deviasi Seluruh J.Bel	% Rata-Rata Deviasi Kumulatif	Nilai IKPA
					51	52	53	57	51	52	53	57	51	52	53	57	51	52	53	57	51	52	53	57	51	52	53	57			
1	418333	LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG	046	01	192,780,833	82,131,919	0	0	192,780,835	82,132,042	0	0	2	123	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	45.35	54.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2	418333	LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG	046	02	261,300,559	404,103,460	0	0	261,566,452	399,035,581	0	0	265,893	5,067,879	0	0	0.10	1.25	0.00	0.00	45.35	54.65	0.00	0.00	0.05	0.68	0.00	0.00	0.73	0.37	100.00
3	418333	LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG	046	03	243,033,463	435,241,903	0	0	451,897,092	371,395,224	0	0	208,863,629	63,846,679	0	0	85.94	14.67	0.00	0.00	45.35	54.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	100.00
4	418333	LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG	046	04	254,500,539	331,031,959	0	0	254,500,540	325,930,221	0	0	1	5,101,738	0	0	0.00	1.54	0.00	0.00	45.35	54.65	0.00	0.00	0.00	0.84	0.00	0.00	0.84	0.39	100.00
5	418333	LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG	046	05	249,431,929	413,919,672	0	0	249,454,913	257,648,009	0	0	22,984	156,271,663	0	0	0.01	37.75	0.00	0.00	45.35	54.65	0.00	0.00	0.00	20.63	0.00	0.00	20.63	4.44	100.00

SURAT PEMBERITAHUAN HABIS MASA PENAHANAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Alamat : Jl. Imam Bonjol No.37 RT.08 Kel. Melayu Tenggarong- Kutai Kartanegara
Telp. (0541) 6720100 Email : lpp.smd@gmail.com

Nomor : W.18.PAS.PAS.7-PK.01.01-1197 14 Mei 2024
Lampiran : -
Perihal : Surat Pemberitahuan Akan Habis Masa Penahanan an. **Rusma Sintiya Binti Jumadis, dkk.**

Yth.
Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong
di-
Tenggarong

Memperhatikan Surat Penetapan Penahanan dari Pengadilan Negeri Tenggarong yang akan berakhir, maka dengan ini kami informasikan nama-nama Tahanan yang akan habis masa penahanannya :

No.	No.Registrasi	Nama Tahanan	Tgl.Nomor Surat Penahanan	Perkara	Tgl. 3 Hari Akan Habis Masa Penahanan	Tgl. Habis Masa Penahanan
1	AIII.012.2024	Rusma Sintiya Binti Jumadis	28/02/2024 80/Pid.Sus/2024/PN Trg	Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009	14/05/2024	14/05/2024
2	AIII.005.2024	Alma Afrillia Binti Alfiansyah S.Sos	16/04/2024 285/Pen.Pid//2024/PT SMR	Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009	21/05/2024	22/05/2024
3	AIII.007.2024	Ami Binti Syahrin (Alm)	04/04/2024 260/Pen.Pid//2024/PT SMR	Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009	26/05/2024	27/05/2024

Selanjutnya mohon untuk diterbitkan surat perpanjangan penahanan bagi nama-nama tahanan tersebut diatas.

Demikian atas perhatian dan kerjasama diucapkan terima kasih.

KEPALA
Ditandatangani secara elektronik oleh
Triana Agustin
NIP. 198208282000122001

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur

PERMINTAAN LITMAS
USULAN
PEMBEBASAN
BERSYARAT

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jl. Imam Bonjol No. 37, Kelurahan Melayu, Tenggarong, Kutai Kartanegara
Telp 0541-6720100

Nomor : W.18.PAS.PAS.7-PK.04.01-1087 Tenggarong, 3 Mei 2024
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Permintaan Litmas Usulan
Pembebasan Bersyarat (PB) An. Juma Yanti Binti Baidin, dkk

Yth.
Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Samarinda
Di -
Samarinda

Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan pasal 10 (1) huruf f dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, dengan hormat kami mohon kiranya dapat dibuatkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) untuk Permintaan Litmas Usulan Pembebasan Bersyarat (PB) sebanyak 4 (empat) orang beserta hasil ISPN dan Laporan Hasil Assesment RRI Kriminogenik terhadap Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong (Data warga binaan terlampir).

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala,

Ditandatangani secara elektronik oleh

Triana Agustin
NIP. 198208282000122001

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI di Jakarta
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur di Samarinda

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jl. Imam Bonjol No. 37 Kampung Melayu Tenggarong, Kutai Kartanegara
Telepon 0541- 6720100, email : lpp.smd@gmail.com

DATA-DATA ADMINISTRATIF WARGA BINAAN DAN MASA PENTAHAPAN PEMBINAAN

No.	Nama WBP	No. Reg	Ekspirasi	Nama dan Alamat Penjamin	Tindak Pidana/Pasal/Lama Pidana	Tgl.SPP/Tgl.Vonis/Nomor Vonis	Tahapan Pembinaan			Ket.
							1/3	1/2	2/3	
1	Juma Yanti Binti Baidin	BI.027.2022	30/12/2026	Wahyu Sukma (Kakak Kandung) Jalan Gunung Polisi No. 56 RT. 57 Kel. Baru Ilir Kec. Balikpapan Barat. No. Telp. 081528654241	Narkotika/ Pasal 112 (2) UU RI No. 35 Tahun 2009/ 6 Tahun, Denda Rp 800.000.000, Sub. 6 Bulan	Tgl SPP 12/08/2021 /Tgl vonis 03/02/2022 / No. 483/Pid.Sus/2021/PN Bpp	25/12/2022	25/12/2023	25/12/2024	Pembebasan Bersyarat (PB)
2	Mida Ayu Setya Astutika Binti Suud Hendarko	BI.029.2022	30/12/2026	Supian Nur (Adik Ipar) Jalan Manunggal Gagng 9 RT. 13 Loa Bakung Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda. No. Telp. 085346120793/08125313668	Narkotika/ Pasal 112 (2) UU RI No. 35 Tahun 2009/ 6 Tahun, Denda Rp 800.000.000, Sub. 6 Bulan	Tgl SPP 12/08/2021 /Tgl vonis 03/02/2022 / No. 483/Pid.Sus/2021/PN Bpp	25/12/2022	25/12/2023	25/12/2024	Pembebasan Bersyarat (PB)
3	Diana Yunita Binti Baban Sobandi	BI.099.2023	07/05/2026	Ernawati (Ibu Mertua) Perum. Bumi SBT Asri Blok D5 RT. 26 Kel. Sambutan, Samarinda. No. Telp. 081255573909	Narkotika/ Pasal 114, 112 Jo 132 UU RI No. 35 Tahun 2009/ 5 Tahun, Denda Rp 800.000.000, Sub. 3 Bulan	Tgl SPP 03/11/2021 /Tgl vonis 13/04/2022 / No. 176/Pid.Sus/2022/PNSmr	03/01/2023	04/11/2023	30/08/2024	Pembebasan Bersyarat (PB)
4	Prisda Eka Arianda Binti Selamet	BI.035.2024	02/03/2025	Wiwik Hariati (Ibu Kandung) Jalan Anggur No. 7 RT. 56 Kel. Sidodadi, Samarinda. No. Telp. 081345434138	Narkotika/Pasal 112, 132 UU RI No. 35 Tahun 2009/2 Tahun, Denda Rp 800.000.000, Sub. 1 Bulan	Tgl SPP 01/04/2023 / Tgl Vonis 31/10/2023 / No. 671/Pid.Sus/2023/PN.SMR	28/10/2023	25/02/2024	30/06/2024	Pembebasan Bersyarat (PB)

Tenggarong, 3 Mei 2024
Kepala

Triana Agustin
NIP. 198208282000122001

LAPORAN PEMBINAAN KEPRIBADIAN DAN PEMBINAAN KEMANDIRIAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Alamat : Jl. Imam Bonjol No.37 Kampung Melayu Tenggarong, Kutai Kartanegara
Telp. 0541 – 6720100 Email : lpp.smd@gmail.com

LAPORAN
KEGIATAN PEMBINAAN KEPRAMUKAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG OLEH KWARTIR CABANG KUTAI KARTANEGARA

A. Pendahuluan

1. Umum

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan menegaskan bahwa sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas, serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Terlaksananya kegiatan Pembinaan Kepramukaan bagi warga binaan Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong bekerja sama dengan Kwartir Cabang Kutai Kartanegara.

b. Tujuan

Kegiatan Kepramukaan merupakan salah satu upaya dari Lapas Perempuan Kelas II A Tenggarong untuk menanamkan kedisiplinan, wawasan kebangsaan dan cinta tanah air dan bangsa Indonesia kepada para warga binaan Menyadarkan mereka agar dapat menjadi warga negara yang baik yang dapat berbakti bagi bangsa dan negaranya. Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan) merupakan usaha yang diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berfikir warga binaan pemasyarakatan semakin meningkat sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan.

3. Ruang Lingkup

Warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong

4. Dasar

1. Undang – undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 31 Tahun 1999 (31/1999) Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1999 Tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
5. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
6. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;

B. Kegiatan yang di Laksanakan

Kegiatan Pembinaan Kepramukaan bagi warga binaan Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong Bulan Mei 2024 dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal	: Sabtu, 11 Mei 2024
Pukul	: 09.00 WITA s/d 10.00 WITA
Tempat	: Aula Kantor Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong
Narasumber	: 2 orang Instruktur Kwartir Cabang Kutai Kartanegara
Peserta	: 29 orang WBP

Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah:

- Kegiatan diawali dengan berdoa bersama dan dilanjutkan dengan upacara dan pembacaan Dasa Dharma Pramuka dipimpin oleh Instruktur.
- Ice Breaking dilanjutkan dengan permainan bertemakan fungsi serta aplikasi dasar negara dan lambang pramuka. Tujuannya mempelajari dasar negara bahwa hal tersebut penting untuk membangun masyarakat yang berdasarkan pada prinsip-prinsip demokratis, keadilan, dan keberlanjutan. Dengan memahami dasar negara, individu dapat menjadi warga negara yang lebih sadar, terlibat, dan bertanggung jawab dalam membangun masa depan yang lebih baik bagi negara mereka. Mempelajari ambang pramuka untuk menambah pemahaman yang lebih dalam tentang nilai-nilai, identitas, sejarah, dan tanggung jawab yang melekat dalam gerakan Pramuka. Ini membantu anggota Pramuka untuk menjadi individu yang lebih baik, tangguh, dan bertanggung jawab dalam masyarakat.

C. Hasil yang Dicapai

- Warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong mendapatkan pemahaman tentang dasar negara dan lambang pramuka agar untuk membangun masyarakat yang berdasarkan pada prinsip-prinsip demokratis, keadilan, individu yang lebih baik, tangguh, dan bertanggung jawab dalam masyarakat.
- Pembinaan Kepramukaan bagi warga binaan pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong terlaksana secara tertib dan aman.

D. Kesimpulan Saran

1. Kesimpulan

   Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Tenggarong telah melaksanakan kegiatan pembinaan berbangsa dan bernegara berupa kepramukaan, yang dilaksanakan secara rutin bekerjasama dengan Kwartir Cabang Kutai Kartanegara

2. Saran

   Melaksanakan kegiatan kepramukaan secara rutin untuk menanamkan rasa kesadaran berbangsa dan bernegara kepada warga binaan.

E. Penutup

Demikian laporan ini disampaikan untuk menjadi periksa, terimakasih.

Tenggarong, 11 Mei 2024
Kepala

Siti Rahmah
NIP. 198107162003122002

DOKUMENTASI PEMBINAAN KEPRAMUKAAN BAGI WARGA BINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG OLEH KWARTIR CABANG KUTAI KARTANEGARA

SABTU, 11 MEI 2024

Kegiatan Pramuka oleh Kwartir Cabang Kutai Kartanegara
Pengenalan kiasan dan lambang-lambang dalam gerakan Pramuka
11 Mei 2024

LAPORAN KEGIATAN
PELAKSANAAN PEMBINAAN KEMANDIRIAN
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

BULAN : APRIL 2024

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Alamat : Jl. Imam Bonjol No.37 Kampung Melayu, Tenggarong,
Kutai Kartanegara Telp. (0541) 6720100

LAPORAN KEGIATAN
PELAKSANAAN PEMBINAAN KEMANDIRIAN
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

A. PENDAHULUAN

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan yang dibentuk sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-10.OT.01.01 Tahun 2016, tentang Pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru, Jakarta, Pontianak, Palangkaraya, Samarinda, Martapura, Denpasar, dst.

Lembaga Pemasyarakatan secara umum mempunyai fungsi yaitu Menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong yang saat ini dihuni oleh 323 (Tiga Ratus Dua Puluh Tiga) orang memberikan Pembinaan narapidana salah satunya berupa kegiatan kerja untuk mengasah bakat dan keterampilan narapidana agar dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

B. MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN

1. MAKSUD

   Pembinaan Kemandirian dilaksanakan dengan maksud untuk membentuk Sumber Daya Manusia yang berdaya guna dan Mandiri.

2. TUJUAN
   a. Umum

      Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Kemandirian dalam pada Lembaga Pemasyarakat Perempuan Kelas IIA Tenggarong pada Bidang Manufaktur, Bidang Agribisnis dan Bidang Jasa.

   b. Khusus
      1. Memberikan bekal bagi warga binaan supaya berdaya guna dan mandiri.
      2. Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan yang bermanfaat, berilmu, berakhlak dan berguna untuk diri sendiri, keluarga, bangsa dan negara.
      3. Mampu bekerja dimasyarakat sebagai manusia yang terampil dan mandiri sehingga diterima di lingkungan masyarakat.

C. KEGIATAN

1. Bidang Manufaktur

a. Waktu

Kegiatan Kemandirian Bidang Manufaktur yang dilaksananakan secara rutin dalam Bulan April Sebanyak 21 (Dua Puluh Satu) Kali Kegiatan, pada tanggal 1, 2, 3, 4 5, 6, 8, 9, 15, 16, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 29 dan 30 April 2024 Waktu Pelaksanaan kegiatan dimulai Pukul 09.00 Wita s.d Pukul 15.00 Wita.

Untuk kegiatan handycraft dan menjahit dilaksanakan pada Ruang Kegiatan Kerja Kantor Lapas Perempuan.

b. Pelaksanaan Kegiatan

1) Peserta

Kegiatan Manufaktur diikuti oleh 34 (Tiga Puluh Empat) orang Warga Binaan Pemasyarakatan, yang terdiri dari 27 (Dua Puluh Tujuh) orang WBP Kegiatan Handycraft dan 7 (Tujuh) orang WBP kegiatan Menjahit.

2) Instruktur

Instruktur Kegiatan Manufaktur adalah 4 (Empat) Orang WBP yang dinilai mempunyai kemampuan lebih dari peserta kegiatan yang lain sehingga dapat membantu mengajarkan keterampilan dalam bidang Manufaktur.

c. Kegiatan pembinaan kemandirian bidang manufaktur pada bulan April 2024 meliputi:

1) Kegiatan rutin menjahit dan Handycraft;
2) Penyerahan sertifikat pelatihan kepada WBP yang menjalankan reintegrasi PB
3) Kegiatan pelatihan bidang manufaktur Baking Class bekerjasama dengan Yayasan Bunga Pertiwi dan Mercy Ministry

d. Hasil kegiatan pembinaan kemandirian bidang manufaktur

1) Menjahit dan Handycraft
   a. Gantungan Nama (30), Peci (25), Tas (34), Sarung Bantal (7), Bantal (13), Seprai (1), Kulit Bantal (2), Jahitan (58), Aplikasi Tumpar (1)
   b. Hasil Penjualan Rp 7.452.000,-
   c. PNBP Rp 931.500,-

2. Bidang Agribisnis

a. Waktu dan Tempat

Kegiatan Kemandirian Bidang Agribisnis Pertanian yang dilaksananakan secara rutin dalam Bulan April Sebanyak 21 (Dua Puluh Satu) Kali Kegiatan, pada tanggal 1, 2, 3, 4 5, 6, 8, 9, 15, 16, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 29 dan 30 April 2024 Waktu pelaksanaan kegiatan dimulai dari Pukul 09.00 Wita s.d Pukul 11.00 Wita.

Untuk Kegiatan Kemandirian Bidang Agribisnis Pertanian dilaksanakan pada Area Beranggang Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

b. Pelaksanaan Kegiatan

1) Peserta

Kegiatan Pertanian diikuti oleh 6 (Enam) orang Warga Binaan Pemasyarakatan

2) Instruktur

Instruktur Kegiatan Pertanian adalah 2 (Dua) Orang WBP yang dinilai mempunyai kemampuan lebih dari peserta kegiatan yang lain sehingga dapat membantu mengajarkan keterampilan dalam bidang Agribisnis Pertanian.

c. Kegiatan Kemandirian Bidang Agribisnis Pertanian pada bulan April 2024 meliputi:

1) Kegiatan pembinaan kemandirian rutin bidang agribisnis (pertanian), meliputi perawatan dan kebersihan area lahan pertanian;
2) Kegiatan pemanenan dan pemasaran tanaman hasil pertanian;
3) Kegiatan Kunjungan Lapangan dari Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Kartanegara

d. Hasil kegiatan pembinaan kemandirian bidang agribisnis

1) Pertanian

   a. Buah Pepaya (542 pack), Tomat (8 ikat), Terong Pipit (3 ikat) dan Pisang (64 Buah)
   b. Hasil Penjualan Rp 4.308.000,-
   c. PNBP Rp 538.500,-

3. Bidang Jasa

a. Waktu dan Tempat

Kegiatan Pembinaan Kemandirian Bidang Jasa dalam bulan April Sebanyak 21 (Dua Puluh Satu) Kali Kegiatan, pada tanggal 1, 2, 3, 4 5, 6, 8, 9, 15, 16, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 29 dan 30 April 2024

Waktu Pelaksanaan kegiatan dimulai Pukul 09.00 Wita s.d Pukul 15.00 Wita.

Untuk kegiatan pembinaan kemandirian bidang jasa kecantikan secara rutin di laksanakan di Area Ruang Kerja Salon.

b. Pelaksanaan Kegiatan

1) Peserta

Kegiatan Salon Kecantikan diikuti oleh 6 (Enam) orang WBP untuk kegiatan Salon.

2) Instruktur

Instruktur Jasa Salon adalah 2 (dua) orang WBP yang dinilai mempunyai kemampuan lebih dari peserta kegiatan yang lain sehingga dapat membantu mengajarkan keterampilan dalam bidang jasa.

c. Kegiatan pembinaan kemandirian bidang jasa, bulan April 2024 meliputi:

1) Kegiatan rutin pembinaan kemandirian jasa (salon)
2) Kegiatan jasa salon dengan costumer sebanyak 72 (Tujuh Puluh Dua) orang.

d. Hasil kegiatan pembinaan kemandirian bidang jasa ;

1) Salon
   a. Smoothing (8), Potong Rambut (17), Cuci Rambut (8), Masker (9), Toning (19), Catok (2), Creambath (1), Warna (2) dan Jasa (6)
   b. Hasil Jasa Rp 4.325.000,-
   c. PNBP Rp 540.625,-

4. **Pelaksanaan**

a. WBP dilakukan Bon oleh Seksi Bimbingan Kerja
b. Pemeriksaan dan Penggeledahan dilakukan oleh Anggota Regu Pengamanan pada saat WBP Keluar Blok Hunian
c. Pemeriksaan Lalu Lintas WBP Oleh Petugas P2U didampingi Seksi Kegiatan Kerja
d. Pengawasan dan pencatatan penggunaan Sarana Kerja kegiatan oleh petugas Subsi Sarana Kerja
e. Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan oleh Petugas seksi kegiatan kerja
f. Pemeriksaan dan penggeledahan WBP setelah selesai melakukan kegiatan kerja oleh petugas seksi kegiatan kerja.

D. PENUTUP

Demikian Laporan Kegiatan Pembinaan Kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Bidang Manufaktur, Bidang Jasa dan Bidang Agribisnis di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong ini disampaikan, untuk menjadi periksa.

Tenggarong, 03 Mei 2024

Mengetahui
Kepala

Triang Agustin
NIP.1982082820[illegible]122001

Kasi Giatja

Hatmawati
NIP.198005272005122001

DOKUMENTASI KEGIATAN PEMBINAAN KEMANDIRIAN
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

---

1. WBP dilakukan Bon oleh Seksi Bimbingan Kerja

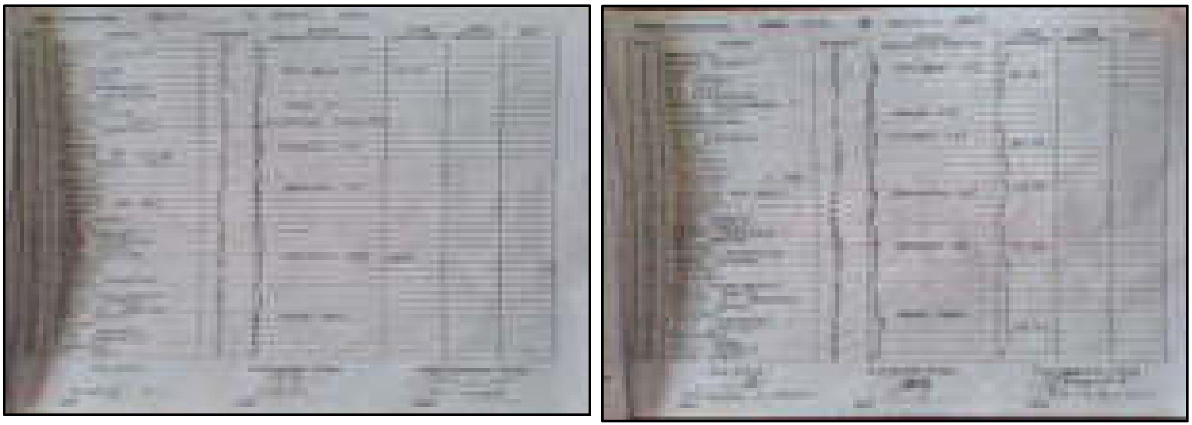

2. Pemeriksaan dan Penggeledahan dilakukan oleh Anggota Regu Pengamanan pada saat WBP Keluar Blok Hunian

3. Pemeriksaan Lalu Lintas WBP Oleh Petugas P2U didampingi Seksi Kegiatan Kerja

4. Pengawasan dan pencatatan penggunaan Sarana Kerja kegiatan oleh petugas Subsi Sarana Kerja

5. Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan oleh Petugas seksi kegiatan kerja

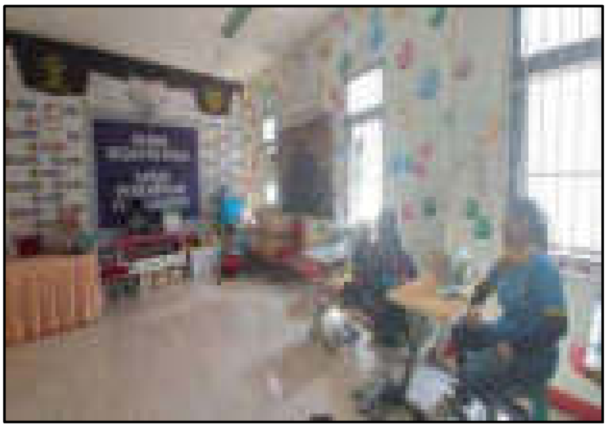

6. Pemeriksaan dan penggeledahan WBP setelah selesai melakukan kegiatan kerja oleh petugas seksi kegiatan kerja.

DOKUMENTASI KEGIATAN PEMBINAAN KEMANDIRIAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN BIDANG MANUFAKTUR DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

1. Kegiatan Pembinaan Rutin Bidang Manufaktur (Menjahit dan Handycraft)

2. Penyerahan sertifikat pelatihan kepada WBP yang bebas dan menjalani reintegrasi (PB)

3. Kegiatan pelatihan bidang manufaktur Baking Class bekerjasama dengan Yayasan Bunga Pertiwi dan Mercy Ministry

DOKUMENTASI KEGIATAN PEMBINAAN KEMANDIRIAN
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN BIDANG AGRIBISNIS
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

1) Kegiatan pembinaan kemandirian rutin bidang agribisnis (pertanian), meliputi perawatan dan kebersihan area lahan pertanian;

2) Kegiatan Kunjungan Lapangan dari Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Kartanegara

3) Kegiatan pemanenan dan pemasaran tanaman hasil pertanian;

DOKUMENTASI KEGIATAN PEMBINAAN KEMANDIRIAN
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN BIDANG JASA
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

1. Kegiatan rutin pembinaan kemandirian jasa (salon)

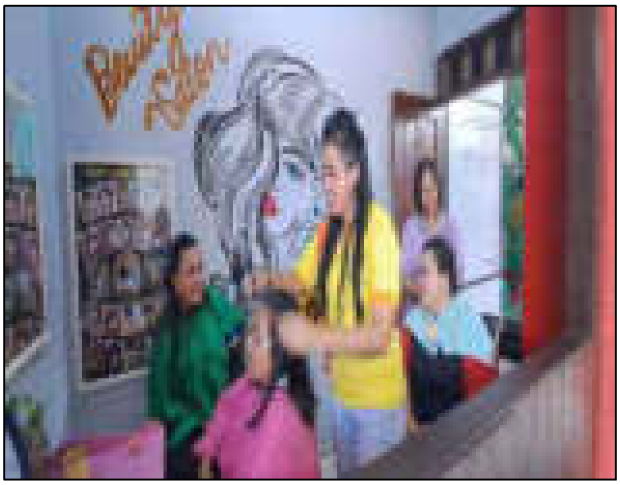

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jl.Imam Bonjol No 37, Kel Kampung Melayu, Tenggarong, Kutai Kartanegara
Telepon 08115598333, email: lpp.smd@gmail.com

ABSENSI WBP KEGIATAN KEMANDIRIAN BIDANG JASA
LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

Bulan : April 2024.

No	NAMA WBP	JENIS KEGIATAN	TANDA TANGAN						
			Senin 1-4-24	Selasa 2-4-24	Rabu 3-4-24	Kamis 4-4-24	Jum'at 5-4-24	Sabtu 6-4-24	[illegible] 8-4-24
1	Rina Suprisca	Salon							
2	Vera Wati	"							
3	Indri Yani	"							
4	Sorry	"							
5	Hasna	"							
6	Yarma Yunita	"							
7									
8									
9									
10									

Mengetahui
KASI GIATJA

Hatmawati
NIP 196701021991032014

KASUBSI BIMKER

Dini Fauziani
NIP198005272005012001

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jl.Imam Bonjol No 37, Kel Kampung Melayu, Tenggarong, Kutai Kartanegara
Telepon 08115598333, email. lpp.smd@gmail.com

ABSENSI WBP KEGIATAN KEMANDIRIAN BIDANG JASA
LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

Bulan : APRIL

No	NAMA WBP	JENIS KEGIATAN	TANDA TANGAN						
			Selasa 9-4-24	Rabu 10-4	Kamis 11-4	Jum'at 12-4	Sabtu 13-4	Senin 15-4-24	Selasa 16-4-24
1	Riina Suprihana	Salon							
2	Vera Wati	-"-							
3	Indri Yani	-"-							
4	Sonny	-"-							
5	Helda	-"-							
6	Norma Yunita	-"-							
7				Libur [illegible]					
8									
9									
10									

Mengetahui
KASI GIATJA

Hatmawati
NIP 196701021991032014

KASUBSI BIMKER

Dwi Fazriani
NIP198005272005012001

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jl.Imam Bonjol No 37, Kel Kampung Melayu, Tenggarong, Kutai Kartanegara
Telepon 08115598333, email. lpp.smd@gmail.com

ABSENSI WBP KEGIATAN KEMANDIRIAN BIDANG JASA
LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

Bulan :

No	NAMA WBP	JENIS KEGIATAN	TANDA TANGAN						
			Rabu 17-9-24	Kamis 18-9-24	Jumat 19-9-24	Sabtu 20-9-24	Senin 22-9-24	Selasa 23-9-24	Rabu 24-9-24
1	Rina Saprizko	Salon							
2	Vera Wati	-"-							
3	Indri Yani	-"-							
4	Sherly	-"-							
5	Helda	-"-							
6	Norma Yunita	-"-							
7									
8									
9									
10									

Mengetahui
KASI GIATJA

Hatmawati
NIP 196701021991032014

KASUBSI BIMKER

Deri Fazriani
NIP198005272005012001

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
[illegible] Kel. Kampung Melayu, Tenggarong, Kutai Kartanegara
Telepon [illegible] email [illegible]

ABSENSI WBP KEGIATAN KEMANDIRIAN BIDANG JASA
LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

Bulan

No	NAMA WBP	JENIS KEGIATAN	TANDA TANGAN						
			Kamis [illegible]	Senin [illegible]	Selasa [illegible]	Rabu [illegible]	Kamis [illegible]	Jumat [illegible]	[illegible]
1	[illegible]	Salon							
2	[illegible]	――							
3	[illegible]	――							
4	[illegible]	――							
5	[illegible]	――							
6									
7									
8									
9									
10									

Mengetahui
KASI GIATJA

Rahmawati
NIP 196701021991032014

KASUBSI BIMKER

[illegible]
NIP [illegible]

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jl Imam Bonjol No 37, Kel Kampung Melayu, Tenggarong, Kutai Kartanegara
Telepon 081155508333, email: lpp.smd@gmail.com

ABSENSI WBP KEGIATAN KEMANDIRIAN BIDANG MANUFAKTUR
LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

Bulan : APRIL 2024

No	NAMA WBP	JENIS KEGIATAN	TANDA TANGAN						
			01/04	02/04	03/04	04/04	05/04	06/04	07/04
1	Farida Almutiah	Menjahit - 7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Ifma Indriani	- 7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Syachrani	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Dapur
4	Rusnia	- 7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	Suriani	- 6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	P
6	Suriati	5	✓	✓	✓	P	✓	✓	P
7									
8	Fauziah	Handy Craft - 7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	Eka Wisda	7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	Ira Susanti	7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	Selly	7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	Sugiyanti	7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	Vina Randa	7	P	✓	✓	✓	✓	✓	P
14	Meni Anita	- 7	✓	P	✓	✓	S	✓	✓
15	Evi Tri	- 7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	Ifma Wati	- 7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	Selamia	- 5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	Yasmia	- 7	✓	P	✓	✓	✓	P	✓
19	Maria	- 7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	Marni Sari	- 7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	Sumiati	- 7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	Retty	- 7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
23	Mariam				-	-	-	-	-
24	Novi Marjan	- 3			✓	✓	P	P	✓
25	Lailul Aini	- 5			✓	✓	✓	✓	✓
26	Rohana	- 5			✓	✓	✓	✓	✓
27	Dina A	- 5			✓	✓	✓	✓	✓
28	Nopriani Mubir	- 4			✓	✓	✓	P	✓
29	Nanis		-	-					
30	Evi Veronica	- 2	✓	✓					
31	Sumarni	- 1	✓	S					
32	Lukiana	- 2	✓	✓					
33	Linda Wati	2	✓	✓					
34	Nelie A	- 1	P	✓					
35									

Mengetahui
KASI GIATJA

Halmawati
NIP 196701021991032014

KASUBSI BIMKER

Dini Fazriani
NIP198005272005012001

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jl.Imam Bonjol No 37, Kel Kampung Melayu, Tenggarong, Kutai Kartanegara
Telepon 08115598333, email: lpp.smd@gmail.com

ABSENSI WBP KEGIATAN KEMANDIRIAN BIDANG MANUFAKTUR
LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

Bulan : april 2019

No	NAMA WBP	JENIS KEGIATAN	TANDA TANGAN						
			09/04	15/04	16/04	17/04	18/04	19/04	20/04
1	Farida Almuslah	Menjahit ~ J	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Irma Maryani	~ J	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Syahrawani		S	E	S	A	J	M	
4	Rustina	~ 6		✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	Suriani	~ 6		✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	Samiati			P	✓	P	P	✓	✓
7									
8	Fadilah	Handy Craft ~ J	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	Ela Wida			✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	Ika Susanti		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	Selly			✓	✓	✓	✓	P	P
12	Sugianawati			✓	✓	✓	✓	P	✓
13	Yeni Farida	~ 5		P	✓	✓	✓	✓	✓
14	Yumi Afifa	~ 4		✓	S	✓	✓	✓	P
15	Evi D	~ 5		✓	✓	S	✓	✓	✓
16	Irma Wati			✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	Ismiana	~ 5		✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	Kartinia		✓	✓	FAFE	✓	✓	✓	✓
19	Maria	~ J	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	Murni Sari	~ 6		✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	Jumiah		✓	✓	✓	✓	✓	P	✓
22	Peppy	~ 6		✓	✓	✓	✓	✓	✓
23	Nadia Arabella	~ 4				✓	✓	✓	✓
24	Nova Aulia								
25	Wahyu Aini								
26	Rohima								
27	Rina A								
28	Supriani Indar								
29	Rasida Ramlan	7				✓	✓	✓	✓
30	Evi Yetolina	~ 6		✓	✓	✓	✓	✓	✓
31	Jumarti	~ 4		✓	✓	SAK	✓	✓	P
32	Udiana	~ 5		✓	PA	P	S	✓	✓
33	Linda Wati	~ 6		✓	✓	✓	✓	✓	✓
34	Maria A	~ 6		✓	✓	✓	✓	✓	✓
35									

Mengetahui
KASI GIATJA

Hatmawati
NIP 196701021991032014

KASUBSI BIMKER

Dini Fajriani
NIP198005272005012001

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jl Imam Bonjol No 37, Kel Kampung Melayu, Tenggarong, Kutai Kartanegara
Telepon 081155983333, email. lpp.smd@gmail.com

ABSENSI WBP KEGIATAN KEMANDIRIAN BIDANG MANUFAKTUR
LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

Bulan : April 2024

No	NAMA WBP	JENIS KEGIATAN	TANDA TANGAN						
			23/04						
1	Farida Azmilla	Menjahit							
2	Ima Indriani								
3	[illegible] ANUR AFNI								
4	Rusna								
5	Suryani								
6	Samah								
7									
8	Farsiah	Handy Craft							
9	Eva Mirda								
10	Ira Susanti								
11	Silly		P						
12	Sukiyawati								
13	Vera Renda								
14	Yuni Alisa								
15	Eva DJ								
16	Irma Wati								
17	Selamia								
18	Wilma								
19	Nina		P						
20	Hani Sirah								
21	Jumiati								
22	Poppy								
23	Wahida ABUJELIA								
24	Devi Aulia								
25	Wulan Aini								
26	Rosmina		P						
27	Sina A								
28	Sapriani Indah								
29	Novia Ramlah								
30	Evi Veronica								
31	Ismiarni								
32	Sedawa								
33	Linda Wati								
34	Meris A								
35	Dwi Elmila								

Mengetahui
KASI GIATJA

Hatmawati
NIP 196701021991032014

KASUBSI BIMKER

Dini Fazriani
NIP198005272005012001

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jl.Imam Bonjol No 37, Kel Kampung Melayu, Tenggarong, Kutai Kartanegara
Telepon 081155598333, email: lpp.smd@gmail.com

ABSENSI WBP KEGIATAN KEMANDIRIAN BIDANG MANUFAKTUR
LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

Bulan : April 2024

No	NAMA WBP	JENIS KEGIATAN	TANDA TANGAN						
			23/04	24/04	25/04	27/04	29/04	30/04	
1	Fauziah	Handycraft	✓	✓	✓	✓	✓	P	
2	Eva Mirda		S	P	✓	✓	✓	✓	
3	Ira Susanti		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	Sorry		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	Susilawati		P	✓	✓	✓	✓	✓	
6	Yeni Farida		P	✓	✓	✓	✓	✓	
7	Sumi Anita		✓	✓	✓	S	✓	✓	
8	Evi D		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9	Irma Wati		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10	Valemia		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11	Fatimah		✓	✓	P	✓	P	✓	
12	Nadia		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
13	Murni Santi		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
14	Jumiati		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
15	Yanty		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
16	Novi Alegia		P	✓	✓	✓	K		
17	Nurul Aini		✓	✓	✓	✓			
18	Rohima		✓	✓	✓	✓			
19	Dina A		✓	✓	✓	✓			
20	Sopiani Indah		✓	✓	S	✓			
21	Evi V						✓	✓	
22	Jumarni						✓	✓	
23	Lediana						P	✓	
24	Linda Wati						✓	✓	
25	Monik A						✓	✓	
26	Romika						✓	✓	
27	Dwi Findry		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

Mengetahui
KASI GIATJA

Hatmawati
NIP 196701021991032014

KASUBSI BIMKER

Dini Fazriani
NIP198005272005012001

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jl.Imam Bonjol No 37, Kel Kampung Melayu, Tenggarong, Kutai Kartanegara
Telepon 08115508333, email. lpp.smd@gmail.com

ABSENSI WBP KEGIATAN KEMANDIRIAN BIDANG MANUFAKTUR
LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

Bulan : APRIL 2024

No	NAMA WBP	JENIS KEGIATAN	TANDA TANGAN						
			23/04	24/04	25/04	27/04	29/04	30/04	
1	FARIDA ALIMUSLIAH	MENJAHIT -	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	HASNA MOBARAK	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	RUSMA	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	SUPRIANI	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	SAPARTI	-	P	✓	✓	P	✓	✓	
6	NUR AFNI	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7	ARMELIA	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									

Mengetahui
KASI GIATJA

Hatmawati
NIP 196701021991032014

KASUBSI BIMKER

Dwi Fazriani
NIP198005272005012001

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jl.Imam Bonjol No 37, Kel Kampung Melayu, Tenggarong, Kutai Kartanegara
Telepon 08115598333, email. lpp.smd@gmail.com

ABSENSI WBP KEGIATAN KEMANDIRIAN BIDANG AGRIBISNIS PERTANIAN
LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

Bulan : April 2024

No	NAMA WBP	JENIS KEGIATAN	TANDA TANGAN						
			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	Annisa Amalia (538)		Anisa	Anisa	Anisa	Anisa	Anisa	Anisa	Anisa
2	Ike Munjanah (162)		—	—	—	—	—	—	—
3	Geno Vevia (336)		Geno	Geno	Geno	—	Geno	Geno	Geno
4	Rafna Ummar (449)		Rafna	Rafna	Rafna	Rafna	—	Rafna	Rafna
5	Heni		—	—	—	—	—	—	—
6	Oktafira (837)		—	—	Okta	—	okta	okta	okta
7	Fitria (554)		Fitri	Fitri	Fitri	—	Fitri	Fitri	Fitri
8	Sulama (316)		Sulama	—	Sulama	Sulama	Sulama	Sulama	Sulama
9	Lina Candra (753)		—	—	Lina	Lina	Lina	Lina	Lina
10	Dewi Ayu (		—	—	—	—	—	—	—
11	Bidung Kirta (901)		—	—	—	—	—	—	—
12									
13									
14									
15									

Mengetahui
KASI GIATJA

Hatmawati
NIP 196701021991032014

KASUBSI BIMKER

Deni Farnani
NIP198005272005012001

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jl.Imam Bonjol No 37, Kel Kampung Melayu, Tenggarong, Kutai Kartanegara
Telepon 08115598333, email. lpp.smd@gmail.com

ABSENSI WBP KEGIATAN KEMANDIRIAN BIDANG AGRIBISNIS PERTANIAN
LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

Bulan : April 2024

No	NAMA WBP	JENIS KEGIATAN	TANDA TANGAN						
			[illegible]/04/24	[illegible]/04/24	[illegible]/04/24	[illegible]/04/24	[illegible]/04/24	[illegible]/04/24	[illegible]/04/24
1	Annisa Amelia	[illegible]	Annisa	Anni	Annisa	Annisa	Annisa	Annisa	Annisa
2	Ike Marjanah		—	—	—	Ike	Ike	Ike	Ike
3	Geno Vevia		Geno	Geno	Geno	Geno	—	Geno	—
4	Ratna Umar		Ratna	Ratna	Ratna	Ratna	Ratna	Ratna	Ratna
5	Heni		—	—	—	—	—	—	—
6	Oktafia		—	Okta	—	—	—	Okta	—
7	Fitri Kalandew		Fitri	Fitri	Fitri	Fitri	Fitri	Fitri	—
8	Sulfiana		Sulfiana	Sulfiana	Sulfiana	[illegible]	—	—	—
9	Lina Candra		—	—	—	—	—	—	—
10	Dian Ayu		—	—	—	Ayu	—	Ayu	Ayu
11	Endang Pertiwi		—	—	—	Endang	Endang	Endang	Endang
12									
13									
14									
15									

Mengetahui
KASI GIATJA

Hatmawati
NIP 196701021991032014

KASUBSI BIMKER

Dini Fazriani
NIP198005272005012001

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jl Imam Bonjol No. 17, Kel Kampung Melayu, Tenggarong, Kutai Kartanegara
Telepon [illegible], email: [illegible]

ABSENSI WBP KEGIATAN KEMANDIRIAN BIDANG AGRIBISNIS PERTANIAN
LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

Bulan : April 2024

No	NAMA WBP	JENIS KEGIATAN	TANDA TANGAN						
			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	Annisa [illegible]		Anisa	Anisa	Anisa	Anisa	Anisa	Anisa	Anisa
2	Ike nur jannah		Ike	Ike	Ike	—	Ike	Ike	Ike
3	Geno [illegible]		Geno	Geno	Geno	Geno	Geno	Geno	Geno
4	Rahma [illegible]		Rahma	—	Rahma	Rahma	Rahma	Rahma	Rahma
5			—	—	—	—	—	—	—
6	[illegible]		Ofha	Ofha	Ofha	Ofha	Ofha	Ofha	Ofha
7	Fitria [illegible]		Fitri	Fitri	Fitri	Fitri	Fitri	Fitri	Fitri
8	[illegible]		Endang	Endang	Endang	Endang	Endang	Endang	Endang
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									

Mengetahui
KASI GIATJA

Hatmawati
NIP 196701021991032014

KASUBSI BIMKER

Dini Fatmani
NIP 198005272005012001

DOKUMENTASI PENGARAHAN KEPADA WARGA BINAAN

Dokumentasi pelaksanaan pengarahan kepada Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong tentang pentingnya pendidikan sebagai upaya dalam **meningkatkan jumlah Narapidana yang memperoleh pendidikan.**

Hari/Tanggal : Jumat, 24 Mei 2024
Tempat : Blok Hunian
Pengarahan kepada WBP terkait kejar paket

Hari/Tanggal : Senin, 03 Juni 2024
Tempat : Blok Hunian
Pengarahan kepada WBP terkait pentingnya pendidikan

SK HUKDIS NARAPIDANA

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jl. Imam Bonjol No 37 Kampung Melayu Tenggarong, Kutai Kartanegara
Telepon 0541-6720100

FORMULIR KAMTIB 7D
LAPORAN PENINDAKAN GANGGUAN KAMTIB
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN WBP
BULAN : APRIL 2024

NO	JENIS GANGGUAN		IDENTITAS WBP	STATUS	TGL/HARI/JAM KEJADIAN	NO SK PENJATUHAN DISIPLIN	HUKUMAN DISIPLIN	TINDAK LANJUT	KETERANGAN/URAIAN KEJADIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1. Ringan	a. Tidak menjaga kebersihan diri dan lingkungan							
		b. Meninggalkan blok hunian tanpa izin kepada petugas blok							
		c. Tidak mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan							
		d. Tidak mengikuti apel pada waktu yang telah ditentukan							
		e. Mengenakan anting,kalung,cincin dan ikat							
		f. Melakukan perbuatan atau mengeluarkan perkataan yang tidak pantas dan melanggar norma kesopanan atau kesusilaan							
		g. Melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang tim pengamat pemasyarakatan termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan hukuman disiplin tingkat ringan							
	2. Sedang	a. Memasuki steril area tanpa izin petugas							
		f. Melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori yang mendapatkan hukuman disiplin tingkat ringan secara berulang lebih dari satu kali							
		g. Melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang tim pengamat pemasyarakatan termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang							
	3. Berat	a. Tidak mengikuti program pembinaan yang telah ditetapkan							
		b. Mengancam, melawan, atau melakukan penyerangan terhadap petugas							
		c. Membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya							
		d. Merusak fasilitas Lapas atau Rutan							
		e. Mengancam, memprovokasi, atau perbuatan lain yang menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban							
		f. Memiliki, membawa, atau menggunakan alat komunikasi atau alat elektronik							
		g. Membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol							
		h. Membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan atau mengkonsumsi narkotika dan obat terlarang serta zat adiktif lainnya							
		i. Melakukan upaya melarikan diri atau membantu narapidana atau tahanan lain untuk melarikan diri							
		k. Melakukan pemasangan atau menyuruh orang lain melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian							
		l. Melengkapi untuk kepentingan pribadi diluar ketentuan yang berlaku dengan alat pendingin, kipas angin, kompor, televisi, slot pintu, dan atau/ alat elektronik lainnya							
		m. Melakukan perbuatan asusila atau penyimpangan sexsual							
		n. Melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, penipuan							
		o. Menyebarkan ajaran sesat							
		p. Melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori yang mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang secara berulang lebih dari satu kali atau berdasarkan penilaian							
		q. Melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang TPP termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan hukuman disiplin tingkat berat							

Tenggarong, 02 Mei 2024
KEPALA

TRIANA AGUSTIN
NIP.198208282000122001

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jl. Imam Bonjol No.37 Kampung Melayu Tenggarong, Kutai Kartanegara
Telepon 0541-6720100

FORMULIR KAMTIB 7D
LAPORAN PENINDAKAN GANGGUAN KAMTIB
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN WBP
BULAN : MEI 2024

NO	JENIS GANGGUAN		IDENTITAS WBP	STATUS	TGL/HARI/JAM KEJADIAN	NO SK PENJATUHAN DISIPLIN	HUKUMAN DISIPLIN	TINDAK LANJUT	KETERANGAN/URAIAN KEJADIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1. Ringan	a. Tidak menjaga kebersihan diri dan lingkungan							
		b. Meninggalkan blok hunian tanpa izin kepada petugas blok							
		c. Tidak mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan							
		d. Tidak mengikuti apel pada waktu yang telah ditentukan							
		e. Mengenakan anting,kalung,cincin dan ikat							
		f. Melakukan perbuatan atau mengeluarkan perkataan yang tidak pantas dan melanggar norma kesopanan atau kesusilaan							
		g. Melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang tim pengamat pemasyarakatan termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan hukuman disiplin tingkat ringan							
	2. Sedang	a. Memasuki steril area tanpa izin petugas							
		f. Melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori yang mendapatkan hukuman disiplin tingkat ringan secara berulang lebih dari satu kali							
		g. Melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang tim pengamat pemasyarakatan termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang							
	3. Berat	a. Tidak mengikuti program pembinaan yang telah ditetapkan							
		b. Mengancam, melawan, atau melakukan penyerangan terhadap petugas							
		c. Membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya							
		d. Merusak fasilitas Lapas atau Rutan							
		e. Mengancam, memprovokasi, atau perbuatan lain yang menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban							
		f. Memiliki, membawa, atau menggunakan alat komunikasi atau alat elektronik							
		g. Membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol							
		h. Membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan atau mengkonsumsi narkotika dan obat terlarang serta zat adiktif lainnya							
		i. Melakukan upaya melarikan diri atau membantu narapidana atau tahanan lain untuk melarikan diri							
		k. Melakukan pemasangan atau menyuruh orang lain melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian							
		l. Melengkapi untuk kepentingan pribadi diluar ketentuan yang berlaku dengan alat pendingin, kipas angin, kompor, televisi, slot pintu, dan atau/ alat elektronik lainnya							
		m. Melakukan perbuatan asusila atau penyimpangan sexsual							
		n. Melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, penipuan							
		o. Menyebarkan ajaran sesat							
		p. Melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori yang mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang secara berulang lebih dari satu kali atau berdasarkan penilaian sidang							
		q. Melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang TPP termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan hukuman disiplin tingkat berat							

NIHIL

Tenggarong, 03 Juni 2024
Plh. KEPALA

ENDANG UTMIATI
NIP.19750514 200003 2 001

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Alamat : Jl. Imam Bonjol No.37 RT.08, Kel.Melayu, Tenggarong Kutai Kartanegara
Telp. 0541-6720100   Email : lpp.smd@gmail.com

17 September 2024

Yth,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Kalimantan Timur
di -
Samarinda

SURAT PENGANTAR

Nomor : W18.PAS.7. PW.01.01- 2202

NO	Naskah Dinas yang Dikirimkan	Banyaknya	Keterangan
1.	Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Triwulan III Tahun 2024 pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong	1 Berkas	Demikian untuk menjadi periksa

Plh.K E P A L A

Andi Hasnaeni
NIP 196909061992032001

Tembusan:
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI.

LAPORAN

SPIP

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

TRIWULAN III TAHUN 2024

Lapas
Perempuan
TENGGARONG

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jalan: Imam Bonjol NO.37 RT.08 Kelurahan Melayu. Tenggarong - Kutai Kartanegara
Laman : http://lppsamarinda.kemenkumham.go.id/
E-mail : lpp.smd@gmail

Nomor : W18.PAS.7.PW.01.01- 2201 17 September 2024
Lampiran : 1(satu) berkas
Hal : Laporan Penyelenggaraan SPIP
Triwulan III Tahun 2024

Yth : Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kalimantan Timur
di
Samarinda

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.HH-02.PW.02.03 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.HH-02.PW.02.03 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, dengan ini kami sampaikan laporan Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong Triwulan III Tahun 2024, dengan pokok-pokok sebagai berikut :

1. Kemajuan Penyelenggaraan SPIP

   Realisasi kemajuan penyelenggaraan SPIP sampai dengan Triwulan III mencapai 80 **%** dari target pada tahun 2024 Capaian ini disebabkan :

   a. Pencapaian Realisasi kemajuan penyelenggaraan SPIP didukung dengan :

      1. Telah dibentuknya Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melalui Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong Nomor: W.18.PAS.PAS.7-0339-PW.01.01 Tahun 2024 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong pada tanggal 15 Januari 2024;

2. Telah dibentuknya SK Pembentukan Satuan Tugas dan Sekretariat Penyelenggaraan Manajemen Risiko melalui Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong Nomor: W.18.PAS.PAS.7-0747-PW.01.01 Tahun 2024 tentang Pembentukan Satuan Tugas dan Sekretariat Penyelenggaraan Manajemen Risiko Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong pada tanggal 25 Maret 2024;
3. Telah dibentuknya SK Tim Assesor Penilaian Mandiri Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melalui Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong Nomor: W18.PAS.PAS.7-0442-PW.01.01 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Assesor Penilaian Mandiri Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong pada tanggal 21 Februari 2024;
4. Telah dibentuknya SK Unit Pemilik Risiko (UPR) melalui Keputusan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong Nomor: W.18.PAS.PAS.7-0454-PW.01.01 Tahun 2024 tentang Pembentukan Unit Pemilik Risiko (UPR) Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong pada tanggal 21 Februari 2024;
5. Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong, pada tanggal 10 Juli 2024;
6. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong, pada tanggal 26 Agustus 2024;

b. Adapun hambatan-hambatan yang ditemukan dalam proses penyelenggaraan SPIP di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong yaitu :
    1. Masih adanya beberapa pegawai yang belum memahami pelaksanaan SPIP dan Pembuatan Manajemen Risiko di Sub Bagian/Seksi di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

Rincian kemajuan penyelenggaraan SPIP dapat dilihat pada lampiran.

2. Rencana Tindaklanjut pada Triwulan selanjutnya

   Atas capaian tersebut, rencana tindaklanjut Triwulan IV adalah :

   a. Untuk mengatasi hambatan/kondisi yang tidak mendukung dalam pencapaian target dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :

      Memaksimalkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada dengan merangkap beberapa tugas dalam pelaksanaan penerapan SPIP di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong;

   b. Rencana tindaklanjut untuk Triwulan selanjutnya dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :

      1. Mengirim pegawai/pejabat untuk mengikuti BIMTEK baik yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur baik secara langsung maupun melalui zoom, untuk meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) Pegawai di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong;
      2. Melakukan monitoring secara berjenjang dan memberikan motivasi serta arahan kepada seluruh pegawai tentang penting dan perlunya koordinasi antara JFU, JFT serta pejabat Struktural agar dapat terlaksananya SPIP secara maksimal dan dapat terealisasikannya Rencana Aksi Penanganan Risiko berdasarkan Manajemen Risiko yang telah dibuat di masing-masing Seksi di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

Demikian kami sampaikan, untuk menjadi periksa.

Plh.KEPALA

Andi Hasnaeni
NIP 196909061992032001

Tembusan:
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM;
2. Inspektur Jenderal Kemeneterian Hukum dan HAM.

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jalan: Imam Bonjol NO.37 RT.08 Kelurahan Melayu. Tenggarong - Kutai Kartanegara
Laman : http://lpptenggarong.kemenkumham.go.id/
E-mail : lpptenggarong@gmail.com

LAPORAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) TRIWULAN III TAHUN 2024 LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2013 tentang Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH-02.PW.02.03 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia RI Nomor 05 Tahun 2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor:M.HH-02.PR.03.01 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pelaporan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI;
5. Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP;
6. Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-690/K/DH/2012 tentang Pedoman Pemantauan Perkembangan Penyelenggaraan SPIP.

B. Tujuan SPIP

Sebagai media akuntabilitas pelaporan dan bahan pemantauan dan evaluasi atas penyelenggaraan SPIP di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

C. Ruang lingkup

Laporan ini meliputi penyelenggaraan SPIP di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

BAB II KEMAJUAN PENYELENGGARAAN SPIP

A. Persiapan

Realisasi persiapan penyelenggaraan SPIP Tahun 2024 dengan rincian kegiatan dalam tahap persiapan sebagai berikut :

a. Pembentukan Satgas
   1. Telah dilaksanakan pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melalui Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong Nomor: W.18.PAS.PAS.7-0339-PW.01.01 Tahun 2024 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong pada tanggal 15 Januari 2024;
   2. Telah dilaksanakan pembentukan Satuan Tugas dan Sekretariat Penyelenggaraan Manajemen Risiko melalui Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong Nomor: W.18.PAS.PAS.7-0747-PW.01.01 Tahun 2024 tentang Pembentukan Satuan Tugas dan Sekretariat Penyelenggaraan Manajemen Risiko Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong pada tanggal 25 Maret 2024;
   3. Telah dilaksanakan Pembentukan Tim Assesor Penilaian Mandiri Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melalui Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong Nomor: W18.PAS.PAS.7-0442-PW.01.01 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Assesor Penilaian Mandiri Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong pada tanggal 21 Februari 2024;
   4. Telah dilaksanakan Pembentukan Unit Pemilik Risiko (UPR) melalui Keputusan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong Nomor: W.18.PAS.PAS.7-0454-PW.01.01 Tahun 2024 tentang Pembentukan Unit Pemilik Risiko (UPR) Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong pada tanggal 21 Februari 2024;

b. Pemahaman (*Knowledge*)

   Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong, pada tanggal 10 Juli 2024 (**dokumen kegiatan terlampir)**.

c. Pemetaan (*Maping*)

   Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong, pada tanggal 26 Agustus 2024 (**dokumen kegiatan terlampir**).

B. Pelaksanaan

a. Penilaian Resiko

   Penilaian risiko merupakan salah satu unsur penting dalam penerapan SPIP, karena dengan penilaian risiko akan diidentifikasi kendala/hambatan baik internal maupun eksternal yang akan mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran organisasi. Dengan penilaian risiko juga akan menentukan langkah antisipasi untuk diambil

cara terbaik agar apa yang menjadi rencana kegiatan dapat dilaksanakan dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam unsur penilaian risiko terdapat 2 (dua) sub unsur dan kegiatannya telah dibahas dalam forum rapat mitigasi risiko dengan hasil sebagai berikut:

I. Identifikasi Risiko (matrik terlampir dari masing-masing Seksi) terdiri dari :
   - Penetapan tujuan program/kegiatan;
   - Indentifikasi risiko.

II. Identifikasi Risiko (matrik terlampir dari masing-masing Seksi) terdiri dari :
   - Analisis Risiko;
   - Evaluasi Risiko;
   - Rencana Aksi Penanganan Risiko;
   - Pemantauan Risiko;
   - Pengendalian Kegiatan Risiko.

b. Pembangunan infrastruktur (*norming*)

   Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong telah dilakukan terkait dengan perbaikan *area of improvement* dan pengelolaan risiko melalui pembentukan Tim Satgas SPIP Tahun 2024 yang mengawal dan mengoordinasikan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

c. Internalisasi / implementasi (*forming*)

   Kegiatan yang telah dilakukan terkait Internalisasi/Implementasi SPIP di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong adalah: peningkatan pemahaman atas penyelenggaraan SPIP khususnya terkait dengan penguatan Maturitas SPIP (**dokumen terlampir**).

C. Pengembangan berkelanjutan (*Performing*)

   Realisasi pengembangan berkelanjutan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong sampai dengan 17 September 2024 sudah sangat baik, tapi ada beberapa kegiatan yang akan di rencanakan di Triwulan Selanjutnya agar penyelenggaraan SPIP di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong terlaksana dengan maksimal, diantaranya yaitu :

   Melakukan monitoring secara berjenjang dan memberikan motivasi serta arahan kepada seluruh pegawai tentang penting dan perlunya koordinasi antara JFU, JFT serta pejabat Struktural agar dapat terlaksananya SPIP secara maksimal dan dapat terealisasikannya Rencana Aksi Penanganan Risiko berdasarkan Manajemen Risiko yang telah dibuat di masing-masing Seksi di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

BAB III PENUTUP

A. Pelaksanaan rencana tindak lanjut

   Atas capaian kerangka Penyelenggaraan SPIP Triwulan III Tahun 2024 di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong, Rencana Tindak Lanjut di Triwulan IV adalah sebagai berikut :

   a. Melakukan sosiaisasi rutin kepada seluruh Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong agar dapat terlaksananya SPIP secara maksimal dan dapat terealisasikannya Rencana Aksi Penanganan Risiko berdasarkan Manajemen Risiko yang telah dibuat di masing-masing Seksi di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.
   b. Melakukan monitoring secara berjenjang dan memberikan motivasi serta arahan kepada seluruh pegawai tentang penting dan perlunya koordinasi antara JFU, JFT serta pejabat Struktural.

B. Hambatan, penyebab dan alternatif pemecahan

Adapun hambatan-hambatan yang ditemukan dalam proses penyelenggaraan SPIP di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong yaitu :

Masih adanya beberapa pegawai yang belum memahami pelaksanaan SPIP dan Pembuatan Manajemen Risiko di Sub Bidang/Bagian di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

Alternatif pemecahan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah :

   a. Memaksimalkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada dengan merangkap beberapa tugas dalam pelaksanaan penerapan SPIP dan pembuatan Manajemen Risiko di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong;
   b. Mengirim pegawai/pejabat untuk mengikuti BIMTEK yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur baik secara langsung maupun melalui zoom, untuk meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) Pegawai di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong;
   c. Melakukan monitoring secara berjenjang dan memberikan motivasi serta arahan kepada seluruh pegawai tentang penting dan perlunya koordinasi antara JFU, JFT serta pejabat Struktural agar dapat terlaksananya SPIP secara maksimal dan dapat terealisasikannya Rencana Aksi Penanganan Risiko berdasarkan Manajemen Risiko yang telah dibuat di masing-masing Seksi di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

C. Rencana aksi Triwulan berikutnya yaitu melaksanakan sosialisasi serta melaksanakan pendampingan penerapan Manajemen Risiko pada masing-masing seksi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

D. Tindak lanjut penyelenggaraan SPIP di Triwulan IV yaitu :
   a. Melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan implementasi SPIP di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong;
   b. Menyusun Laporan SPIP Triwulan IV sesuai dengan format Laporan SPIP berdasarkan arahan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur;

c. Melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan SPIP di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tanggarong.

Tenggarong, 17 September 2024

Plh.KEPALA

Andi Hasnaeni

NIP 196909061992032001

LAPORAN KEMAJUAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) TAHUN 2024
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

NO	TAHAPAN	INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	BUKTI DOKUMEN	VOLUME					% CAPAIAN
					RENCANA SATU TAHUN	REALISASI				
						TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	
A.	**PERSIAPAN**									
1.	Pemahaman	Jumlah laporan kegiatan sosialisasi/ FGD/ Diseminasi tentang SPIP	Jumlah Pegawai	Laporan kegiatan, daftar hadir, dan foto Sosialisasi tentang SPIP.	4	1	1	1	-	75 %
		Jumlah laporan kegiatan terkait SPIP	Laporan	Laporan kegiatan Sosialisasi SPIP, SK UPR, SK Tim Assesor, SK Satgas Sekretariat Penyelenggaraan Manajemen Risiko, dan SK Satgas SPIP	4	1	1	1	-	75 %
2.	Pemetaan	Jumlah Laporan Kegiatan SPIP di masing-masing Seksi pada LPP Tenggarong	Dokumen	Laporan Rencana Kegiatan pada tahun 2024 (RKT)	8	2	2	2		75 %
3.	Penyusunan Rencana Monitoring Kegiatan Penyelenggaraan	Jumlah dokumen rencana Monitoring	Dokumen	Laporan Monitoring dan Evaluasi SPIP	4	1	1	1	-	75 %
B.	**PELAKSANAAN**									
1.	Tingkat entitas (Eselon I, Kanwil/ Unit Pelaksana Teknis)	Jumlah dokumen penilaian risiko Level Entitas dan Aktifitas	Dokumen	Pernyataan Fakta Integritas	1	1	-	-	-	100 %
		Jumlah kebijakan/ prosedur/ pedoman dalam	Dokumen	Kebijakan/ SOP/ SK/ Nota dinas/ dokumen lainnya	4	4	-	-	-	100 %

		pembangunan / rehab infrastruktur								
2.	Tingkat Kegiatan (Kegiatan-kegiatan pada Eselon IV)	Jumlah dokumen penilaian risiko Level Entitas dan Aktifitas	Dokumen	Dokumen Profil Risiko Dan Peta Risiko	4	1	1	1	-	75 %
		Jumlah kebijakan/ prosedur/ pedoman dalam pembangunan / rehab infrastruktur	Dokumen	Kebijakan/ SOP/ SK/ Nota dinas/ dokumen lainnya	4	4	-	-	-	100 %
		Jumlah kegiatan internalisasi/ Implementasi	Kegiatan	Laporan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan SPIP	4	1	1	1	-	75 %
3.	Pengembangan Berkelanjutan	Jumlah rapat berkala	Kegiatan	Laporan dan daftar hadir	4	1	1	1	-	75 %
		Jumlah Laporan kemajuan penyelenggaraan SPIP	Dokumen	Dokumen SPIP triwulanan	4	1	1	1	-	75 %
		Presentase penyelesaian tindak lanjut	Dokumen	Laporan Tindak Lanjut Temuan BPK dan ITJEN tergabung dalam Kantor Wilayah	-	-	-	-	-	-
				JUMLAH	**45**	**18**	**9**	**9**	**-**	**80%**

LAMPIRAN

LAPORAN MONEV SPIP

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Alamat : Jl. Imam Bonjol No.37 RT.08 Kel. Melayu Tenggarong- Kutai Kartanegara
Telp. (0541) 6720100 Email : lpp.smd@gmail.com

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TRIWULAN III TAHUN 2024

A. PENDAHULUAN

1. Umum

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.PW.02.03 Tahun 2011 Tentang Penyelanggaran Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bahwa untuk mewujudkan tata kelola Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang baik, diperlukan penerapan pelaporan sistem pengendalian intern pemerintah untuk meningkatkan pemantauan dan evaluasi atas tercapainya tujuan organisasi melalui sistem pengendalian intern pemerintah.

Sistem Pengendalian Intern dalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien.

2. Maksud dan Tujuan

Meningkatkan pemantauan dan evaluasi atas tercapainya tujuan organisasi.

3. Ruang Lingkup

Seluruh kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilaksanakan di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

4. Dasar

a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

b. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2013 tentang Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH-02.PW.02.03 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;

c. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia RI Nomor 05 Tahun 2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
d. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor:M.HH-02.PR.03.01 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pelaporan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI;
e. Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP;
f. Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-690/K/DH/2012 tentang Pedoman Pemantauan Perkembangan Penyelenggaraan SPIP.

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Senin / 26 Agustus 2024
Pukul : 09.00 WITA – selesai
Tempat : Ruang Kalapas LPP Tenggarong

Adapun beberapa poin yang disampaikan oleh Plh.Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong, sebagai berikut:

- Pelaksanaan Pelaporan SPIP per minggu;
- Kendala dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
- Memaksimalkan pelayanan pemasyarakatan yang sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik melalui peningkatan pengawasan dan pengelolaan layanan di bidang pemasyarakatan;

C. HASIL YANG DICAPAI

Telah terlaksananya monitoring dan evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong telah melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

b. Saran

Dilakukan monitoring dan evaluasi secara rutin.

E. PENUTUP

Demikian kami sampaikan, atas perkenannya disampaikan terima kasih.

Tenggarong, 26 Agustus 2024
KEPALA

Triana Agustin
NIP 198208282000122001

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Alamat : Jl. Imam Bonjol No.37 RT.08 Kel. Melayu Tenggarong- Kutai Kartanegara
Telp. (0541) 6720100 Email : lpp.smd@gmail.com

DOKUMENTASI
MONITORING DAN EVALUASI SPIP TW III TAHUN 2024

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Alamat : Jl. Imam Bonjol No.37 Kelurahan Kampung Melayu,Tenggarong Kalimantan Timur
Telp. 0541-6720100 Email : *lpp.smd@gmail.com*

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan SPIP
Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong
Senin, 26 Agustus 2024

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Triana Agustin	Kepala	
2	Andi Hasnaeni	Kasi Adm Kamtib	
3	Hatmawati	Kasi Kegiatan Kerja	
4	Juari	Kasi Binadik	
5	Yhuni Rindawati	Ka.KPLP	
6	Mirani Eka Destiana	Kasubsi Registrasi	
7	Desi Ari Santi	Kasubsi Sarana Kerja	
8	Dewi Ratna Sari	Kasubsi Keamanan	

KEPALA

TRIANA AGUSTIN
NIP 198208282000122001

SOSIALISASI
SPIP

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Alamat : Jl. Imam Bonjol No.37 RT.08 Kel. Melayu Tenggarong- Kutai Kartanegara
Telp. (0541) 6720100 Email : lpp.smd@gmail.com

LAPORAN

SOSIALISASI APLIKASI E-INTEGRITY SERTA MEMPERKUAT SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)

A. PENDAHULUAN

1. Umum

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.PW.02.03 Tahun 2011 Tentang Penyelanggaran Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bahwa untuk mewujudkan tata kelola Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang baik, diperlukan penerapan pelaporan sistem pengendalian intern pemerintah untuk meningkatkan pemantauan dan evaluasi atas tercapainya tujuan organisasi melalui sistem pengendalian intern pemerintah.

Sistem Pengendalian Intern dalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien.

2. Maksud dan Tujuan

Meningkatkan pemahaman terkait Aplikasi E-Integrity serta memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur.

3. Ruang Lingkup

Kegiatan Sosialisasi Aplikasi E-Integrity serta memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia KaltimTara.

[illegible]

4. Dasar

a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
b. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2013 tentang Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH-02.PW.02.03 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
c. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia RI Nomor 05 Tahun 2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
d. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor:M.HH-02.PR.03.01 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pelaporan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI;
e. Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP;
f. Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-690/K/DH/2012 tentang Pedoman Pemantauan Perkembangan Penyelenggaraan SPIP.

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Kegiatan Sosialisasi Aplikasi E-Integrity serta memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu / 10 Juli 2024
Pukul : 08.30 WITA – 12.30 WITA
Tempat : Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM KaltimTara

Kegiatan Sosialisasi dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah Gun Gun Gunawan dengan dihadiri oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan Heri Azhari, Kepala Divisi Keimigrasian Said Noviansyah, Pejabat Struktural, Ka-UPT di wilayah Kota Samarinda dan Tenggarong beserta para Operator SPIP yang dari UPT Kota Samarinda, Balikpapan, Tenggarong dan Bontang. Selanjutnya UPT yang berada di Wilayah Kalimantan Utara mengikuti kegiatan secara virtual.

Dalam sambutannya Kakanwil mengucapkan terima kasih kepada Koordinator Pengawasan Bidang Instansi Pemerintah Pusat Perwakilan BPKP Kaltim beserta Tim, yang selalu setia mengawal kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Timur.,“Semoga sinergitas dan kolaborasi dengan Kanwil Kemenkumham Kaltim ini akan terus berjalan dan menjadi pendorong Kanwil

Kemenkumham Kaltim untuk bergerak lebih progresif lagi dalam mencapai kinerja yang lebih baik," Ucapnya.

Lebih lanjut Kakanwil juga menyampaikan bahwa Aplikasi E-Integrity merupakan Aplikasi digital yang dirancang untuk mempromosikan integritas dan transparansi dalam berbagai aspek kehidupan atau organisasi, agar dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih bersih dan transparan., Pungkasnya.

Diakhir sambutannya, Kakanwil berharap Sosialisasi aplikasi E-Integrity ini dapat terus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa aplikasi tersebut dapat berfungsi sesuai dengan tujuannya dalam membangun integritas dan transparansi di berbagai sektor dan organisasi.,"Mari kita bangun lingkungan Kerja yang Sehat berdasarkan nilai-nilai integritas sehingga menciptakan atmosfer yang lebih sehat dan produktif bagi semua pihak," Tutupnya.

Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh Narasumber dari Perwakilan BPKP Kaltim yang disampaikan oleh Korwas Bidang IPP BPKP Provinsi Kalimantan Timur Abdul Rofiek dengan di pandu oleh Moderator Kepala Bagian Program dan Humas.

Sosialisasi kiat menarik tatkala dilanjutkan ke sesi tanya jawab kepada seluruh peserta, dalam sesi tersebut peserta sangat antusias melayangkan beberapa pertanyaan dan diskusi bersama Narasumber, hal ini menunjukkan bahwasanya terjalinnya komunikasi dua arah yang berdampak positif dengan bertambahnya pengetahuan terkait penggunaan Aplikasi E-Integrity dilingkungan Kanwil Kemenkumham Kaltim.

C. HASIL YANG DICAPAI

Telah terlaksananya Sosialisasi Aplikasi E-Integrity serta memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong telah mengikuti Sosialisasi Aplikasi E-Integrity serta memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

b. Saran

Pelaksanaan Sosialisasi Aplikasi E-Integrity serta memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM KaltimTara secara rutin.

E. PENUTUP

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Tenggarong, 10 Juli 2024
Plh.KEPALA

Endang Utmiati
NIP 197505142000032001

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Alamat : Jl. Imam Bonjol No.37 RT.08 Kel. Melayu Tenggarong- Kutai Kartanegara
Telp. (0541) 6720100 Email : lpp.smd@gmail.com

DOKUMENTASI
SOSIALISASI APLIKASI E-INTEGRITY SERTA MEMPERKUAT SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan: https://tte.bssn.go.id/verifikasi

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Alamat : Jl. Imam Bonjol No.37 RT.08 Kel. Melayu Tenggarong- Kutai Kartanegara
Telp. (0541) 6720100 Email : lpp.smd@gmail.com

DOKUMENTASI
SOSIALISASI APLIKASI E-INTEGRITY SERTA MEMPERKUAT SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan: https://tte.bssn.go.id/verifikasi

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
Jalan: Letjend M.T. Haryono No. 38 Air Putih,Samarinda Ulu 75124
Laman : https://kaltim.kemenkumham.go.id/
E-mail : kanwilkaltim@kemenkumham.go.id

Nomor : W.18 - UM.01.01 - 5348 07 Juli 2024
Lampiran : 2(dua) lembar
Hal : Sosialisasi Aplikasi E-Integrity
.

Yth. 1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis Imigrasi
Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur/Utara

Di Samarinda

Untuk memberikan pemahaman terkait Aplikasi E-Integrity serta memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kanwil Kemenkumham Kaltimtara, akan dilaksanakan kegiatan tersebut yaitu pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 10 Juli 2024
Tempat : Aula Kantor Wilayah
Waktu : 08.30 WITA s.d Selesai
Pakaian : PDH III

Untuk kelancaran kegiatan tersebut, diminta kepada Saudara agar menugaskan 1 (satu) orang pejabat dan 1 (satu) orang operator SPIP dengan membawa laptop dan mengirimkan biodata pejabat dan pegawai yang ditugaskan dengan mengisi lembar konfirmasi (sebagaimana terlampir) melalui Email : humas.kanwilkaltim@gmail.com paling lambat tanggal 09 Juli 2024. Adapun biaya transportasi dan penginapan ditanggung DIPA masing-masing satuan kerja.

Perlu kami sampaikan bahwa untuk peserta yang berada di Wilayah Samarinda, Balikpapan, Tenggarong, Bontang dan Tanah Grogot hadir secara **Langsung**, sedangkan peserta yang berada di Wilayah Berau, Tarakan dan Nunukan hadir secara **Virtual** melalui Zoom Meeting.

ID Zoom : 831 6168 3528
Password : spipkt
Link : https://us06web.zoom.us/j/83161683528?pwd=s5xbf86mNOafKL0KGI6WxUzfu8t83w.1

Selanjutnya untuk memudahkan koordinasi dapat menghubungi narahubung Sdr. Riandi Tampubolon, HP : 0853-4884-8848 dan Sdr. Supriyadi, HP : 0821-1199-4356.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Wilayah,

Dr. Gun Gun Gunawan
NIP. 197304011997031001

Tembusan :
1. Kepala Divisi Keimigrasian;
2. Kepala Divisi Pemasyarakatan
Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur.

LEMBAR KONFIRMASI NARASUMBER
SOSIALISASI APLIKASI E-INTEGRITY DI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN TIMUR

Nama : ………………………………………………………………………

NIP : ………………………………………………………………………

Pangkat/Gol : ………………………………………………………………………

Jabatan : ………………………………………………………………………

NPWP : ………………………………………………………………………

No. Hp : ………………………………………………………………………

Email : ………………………………………………………………………

Samarinda, ………………… 2024
Kepala Perwakilan BPKP Kaltim

…………………………………………
NIP.

RUNDOWN ACARA
SOSIALISASI APLIKASI E-INTEGRITY
SAMARINDA, 10 JULI 2024

No.	Waktu	Kegiatan	Penanggung Jawab	Keterangan
Rabu, 10 Juli 2024				
1.	08.30 - 09.00	Registrasi Absensi Peserta	**Panitia**	**Seluruh Peserta**
2.	09.00 - 09.10	**Pembukaan :** - Pembacaan Doa - Menyanyikan Lagu Indonesia Raya - Menyanyikan Lagu Mars Kemenkumham - Sambutan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kaltim	**Protokol :**	**MC :** Resiana **Dirigen :** Astri Aprilianti **Pembaca Doa :** Fadilah Rahman **Protokol** : Oley Rocky **Humas** : Mahdi
3	09.40 - 09.50	**Istirahat**	**Protokol**	**Persiapan materi**
4.	09.50 - 10.50	Pemaparan Materi 1	**MC/ Protokol**	**Narasumber 1** : Perwakilan BPKP
5.	10.50 - 11.50	Pemaparan Materi 2	**MC / Protokol**	**Narasumber 2** : Perwakilan BPKP
6.	11.50 - 12.15	Diskusi dan Tanya Jawab	**Panitia**	**Seluruh Peserta**
7.	12.15 - 12.20	PENUTUPAN	**Panitia**	-

DOKUMEN
PENGHAPUSAN BMN

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : S-65/MK.6/KNL.1302/2024 7 Agustus 2024
Sifat : Segera
Lampiran : Satu set
Hal : Persetujuan Penghapusan Barang Milik Negara berupa Bangunan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Tindak Lanjut Penjualan Bongkaran Secara Lelang

Yth. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
u.p.
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan
Jakarta Selatan

Sehubungan Surat Saudara Nomor SEK-PB.05.05-505 tanggal 19 Juli 2024 hal Permohonan Persetujuan Penghapusan Barang Milik Negara berupa Bangunan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong, dengan ini diberitahukan bahwa permohonan penghapusan Barang Milik Negara berupa 23 (dua puluh tiga) unit bangunan dengan total nilai perolehan sebesar Rp8.493.766.260,00 (delapan miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh enam ribu dua ratus enam puluh rupiah) sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini, dikarenakan telah tersedia DIPA pengganti, pada prinsipnya dapat disetujui dengan ketentuan penjualan bongkaran dilaksanakan secara lelang.

Guna tertib administrasi pengelolaan BMN, pelaksanaan penjualan dengan tindak lanjut penghapusan tersebut agar berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Negara, dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Penjualan Barang Milik Negara tersebut tidak mengganggu tugas operasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2. Persetujuan ini segera ditindaklanjuti dengan penjualan bongkaran Barang Milik Negara secara lelang paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal persetujuan ini diterbitkan.
3. Penjualan secara lelang atas Barang Milik Negara agar dilakukan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dengan nilai limit terendah sebesar Rp14.545.000,00 (empat belas juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) sebagaimana Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong Nomor W.18.PAS.PAS.7-PB.05.01-266 tanggal 24 Januari 2024, dan hasil

penjualan .../Hlm.2

penjualan seluruhnya disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara sebagai penerimaan negara bukan pajak.

4. Persetujuan ini ditindaklanjuti dengan penghapusan Barang Milik Negara dari Daftar Barang Pengguna berdasarkan keputusan penghapusan yang ditetapkan oleh Pengguna Barang paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara ditandatangani.
5. Menyampaikan laporan pelaksanaan penjualan secara lelang dan pelaksanaan penghapusan Barang Milik Negara kepada Menteri Keuangan c.q. Kepala KPKNL paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal Keputusan Penghapusan BMN yang diterbitkan Pengguna Barang disertai dengan Risalah Lelang, Berita Acara Serah Terima, dan fotokopi bukti setor ke Rekening Kas Umum Negara.
6. Kebenaran materiil atas jenis, jumlah, nilai, dan tahun perolehan Barang Milik Negara yang dihapuskan menjadi tanggung jawab Kuasa Pengguna Barang.
7. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat persetujuan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Keuangan
Kepala Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara Dan Lelang
Samarinda

Ditandatangani secara elektronik
Bagus Kurniawan

Tembusan:
1. Menteri Keuangan
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
3. Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara
4. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur
6. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong
7. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Samarinda

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertfikat Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan pindai QR Code pada laman https://office.kemenkeu.go.id atau unggah dokumen pada laman https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
SURAT MENTERI KEUANGAN
NOMOR : S-65/MK.6/KNL.1302/2024
TANGGAL : 7 Agustus 2024

DAFTAR BMN PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA YANG DISETUJUI UNTUK DIHAPUSKAN DENGAN KETENTUAN BONGKARAN BMN DIJUAL SECARA LELANG

No.	Kode Barang	NUP	Nama Barang	Lokasi	Luas (m²)	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Limit (Rp)	Kondisi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	4010101001	4	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jl. Imam Bonjol No.37, Kel. Tenggarong, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur	20	2022	19.616.000	258.000	Rusak Berat	Material hasil bongkaran bangunan dijual melalui lelang
2	4010101001	5	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jl. Imam Bonjol No.37, Kel. Tenggarong, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur	50	2022	570.192.800	667.000	Rusak Berat	
3	4010101999	1	Bangunan Gedung Kantor Lainnya	Jl. Imam Bonjol No.37, Kel. Tenggarong, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur	31	2022	37.300.000	404.000	Rusak Berat	
4	4010101999	2	Bangunan Gedung Kantor Lainnya	Jl. Imam Bonjol No.37, Kel. Tenggarong, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur	280	2022	22.522.000	1.360.000	Rusak Berat	
5	4010101999	3	Bangunan Gedung Kantor Lainnya	Jl. Imam Bonjol No.37, Kel. Tenggarong, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur	17	2022	83.354.000	217.000	Rusak Berat	

6.../Hlm.2

No.	Kode Barang	NUP	Nama Barang	Lokasi	Luas (m²)	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Limit (Rp)	Kondisi	Keterangan
6	4010101999	4	Bangunan Gedung Kantor Lainnya	Jl. Imam Bonjol No.37, Kel. Tenggarong, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur	7	2022	65.987.000	107.000	Rusak Berat	Material hasil bongkaran bangunan dijual melalui lelang
7	4010101999	5	Bangunan Gedung Kantor Lainnya	Jl. Imam Bonjol No.37, Kel. Tenggarong, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur	36	2022	44.110.000	497.000	Rusak Berat	
8	4010106001	1	Bangunan Rumah Sakit Umum	Jl. Imam Bonjol No.37, Kel. Tenggarong, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur	752	2022	1.965.765.980	1.688.000	Rusak berat	
9	4010106001	2	Bangunan Rumah Sakit Umum	Jl. Imam Bonjol No.37, Kel. Tenggarong, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur	158	2022	500.000.000	998.000	Rusak berat	
10	4010106001	3	Bangunan Rumah Sakit Umum	Jl. Imam Bonjol No.37, Kel. Tenggarong, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur	138	2022	513.667.000	903.000	Rusak berat	
11	4010106001	4	Bangunan Rumah Sakit Umum	Jl. Imam Bonjol No.37, Kel. Tenggarong, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur	110	2022	500.000.000	535.000	Rusak berat	
12	4010106001	5	Bangunan Rumah Sakit Umum	Jl. Imam Bonjol No.37, Kel. Tenggarong, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur	343	2022	500.000.000	1.509.000	Rusak berat	

13.../Hlm.3

No.	Kode Barang	NUP	Nama Barang	Lokasi	Luas (m²)	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Limit (Rp)	Kondisi	Keterangan
13	4010106001	6	Bangunan Rumah Sakit Umum	Jl. Imam Bonjol No.37, Kel. Tenggarong, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur	254	2022	350.000.000	1.189.000	Rusak berat	Material hasil bongkaran bangunan dijual melalui lelang
14	4010106001	7	Bangunan Rumah Sakit Umum	Jl. Imam Bonjol No.37, Kel. Tenggarong, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur	333	2022	656.750.000	1.153.000	Rusak berat	
15	4010106001	8	Bangunan Rumah Sakit Umum	Jl. Imam Bonjol No.37, Kel. Tenggarong, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur	56	2022	199.958.000	748.000	Rusak berat	
16	4010106001	9	Bangunan Rumah Sakit Umum	Jl. Imam Bonjol No.37, Kel. Tenggarong, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur	21	2022	49.390.000	295.000	Rusak berat	
17	4010106001	10	Bangunan Rumah Sakit Umum	Jl. Imam Bonjol No.37, Kel. Tenggarong, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur	378	2022	1.509.291.980	953.000	Rusak berat	
18	4010106015	1	Bangunan Posyandu	Jl. Imam Bonjol No.37, Kel. Tenggarong, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur	21	2022	76.424.000	274.000	Rusak berat	
19	4010106015	2	Bangunan Posyandu	Jl. Imam Bonjol No.37, Kel. Tenggarong, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur	20	2022	172.566.100	266.000	Rusak berat	

20.../Hlm.4

No.	Kode Barang	NUP	Nama Barang	Lokasi	Luas (m^2)	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Limit (Rp)	Kondisi	Keterangan
20	4010108001	1	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	Jl. Imam Bonjol No.37, Kel. Tenggarong, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur	36	2022	40.000.000	472.000	Rusak berat	Material hasil bongkaran bangunan dijual melalui lelang
21	4010130005	1	Bangunan Rumah Genset	Jl. Imam Bonjol No.37, Kel. Tenggarong, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur	1.820	2022	470.681.400	0	Rusak berat	
22	4010134999	1	Taman lainnya	Jl. Imam Bonjol No.37, Kel. Tenggarong, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur	70	2022	48.990.000	0	Rusak Berat	
23	4040199999	1	Tugu/Tanda Batas Lainnya	Jl. Imam Bonjol No.37, Kel. Tenggarong, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur	4	2022	97.200.000	52.000	Rusak Berat	
JUMLAH							**8.493.766.260**	**14.545.000**		

a.n. Menteri Keuangan,
Kepala KPKNL Samarinda,

Ditandatangani secara elektronik
Bagus Kurniawan

SURAT
PERMOHONAN JFU

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jalan : Imam Bonjol No.37 Kelurahan Kampung Melayu, Tenggarong
Telp: 0541-6720100 Email: lpp.smd@gmail.com

Nomor : W.18.PAS.PAS.7-KP.04.01-1906 08 Agustus 2024
Lampiran : 2 (dua) berkas
Hal : Permohonan Penambahan JFU pada
Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong

Yth.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Kalimantan Timur
Di –
Samarinda

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong, setelah dilakukan pemetaan dan inventarisir Jabatan Fungsional Umum, dengan hormat Kami mengajukan permohonan untuk penambahan petugas sebanyak 5 (Lima) orang yang terdiri dari 3 (Tiga) orang Petugas Laki-Laki dan 2 (Dua) orang Petugas Wanita. Dengan adanya penambahan petugas ini diharapkan dapat membantu pelaksanaan tugas dan fungsi di Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

Berkenaan dengan hal tersebut kami lampirkan:
1. Hasil Rekapitulasi Penyusunan Kebutuhan Formasi Jabatan berdasarkan Aplikasi E-ABK
2. Peta Jabatan Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong

Demikian untuk menjadikan periksa, atas perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.

K E P A L A

Triana Agustin
NIP. 198208282000122001

[illegible]

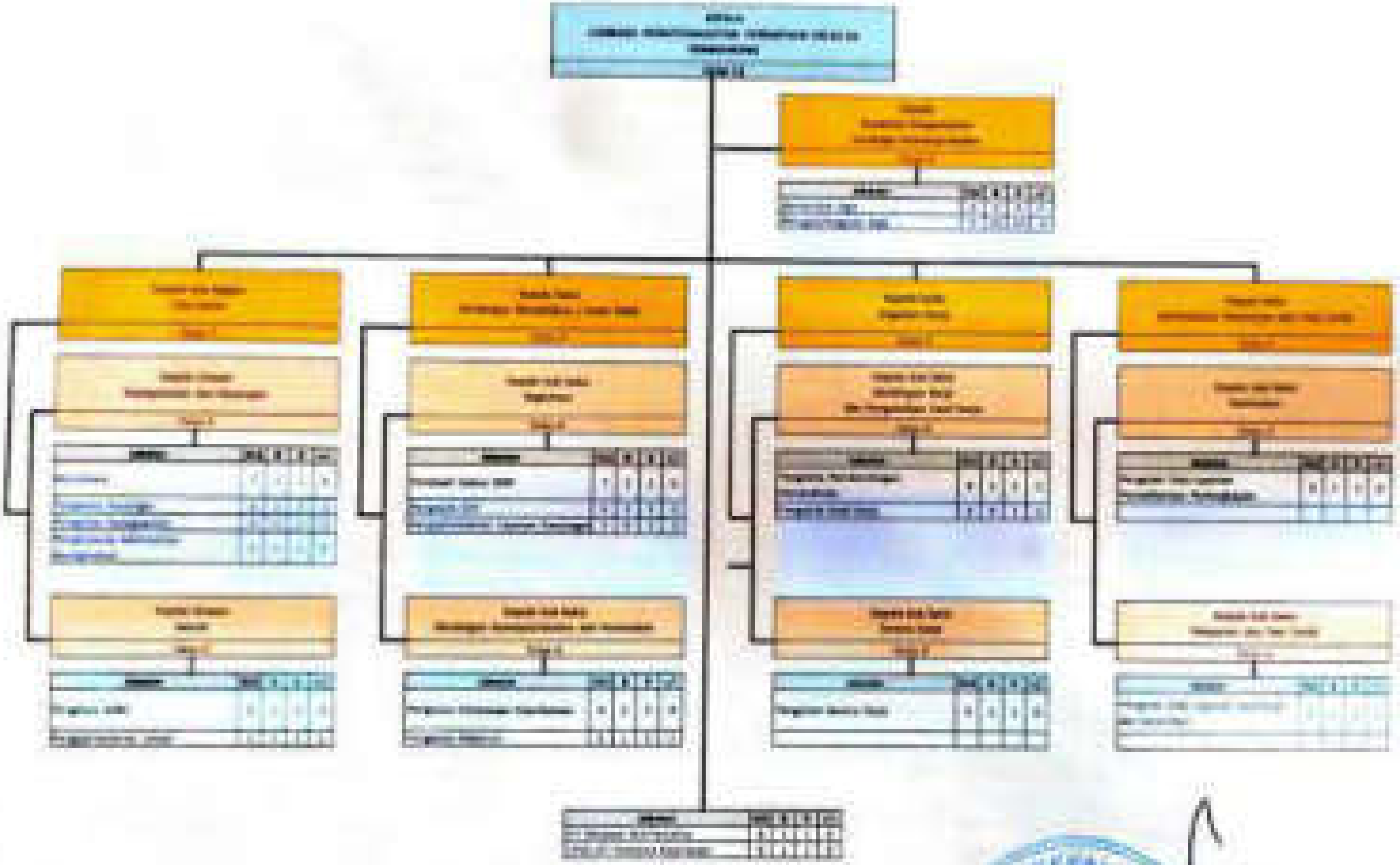

REKAPITULASI PENYUSUNAN KEBUTUHAN FORMASI JABATAN PELAKSANA
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG TAHUN 2023

No	NAMA JABATAN	HASIL ABK	BEZETTING	KEBUTUHAN FORMASI
1	BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA	1	1	0
2	PENELAAH STATUS WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN	1	1	0
3	KOMANDAN JAGA PEMASYARAKATAN [illegible]	4	1	-3
4	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	3	1	-2
5	PENGELOLA DATA KEPEGAWAIAN	2	1	-1
6	PENGELOLA KEUANGAN	2	1	-1
7	PENGELOLA PEMBIMBINGAN KEMANDIRIAN	3	1	-2
8	PENGELOLA PEMBINAAN KEPRIBADIAN	3	1	-2
9	PENGELOLA SARANA KERJA	[illegible]	1	[illegible]
10	PENGELOLA SISTEM DATABASE PEMASYARAKATAN	3	1	[illegible]
11	PENGOLAH DATA LAPORAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN	[illegible]	1	[illegible]
12	PENGADMINISTRASI UMUM	2	2	0
13	PENGELOLA DAN PENGOLAH MAKANAN	2	1	-1
14	[illegible] ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	1	1	0
15	PENGOLAH DATA LAPORAN PEMELIHARAAN PERLENGKAPAN	1	1	0
16	PETUGAS ANGGOTA JAGA	[illegible]	1	[illegible]
	TOTAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]

FORM 1

PENGUMPULAN DATA BEBAN KERJA

Nama Jabatan : PETUGAS/ANGGOTA JAGA

Satuan Kerja : KESATUAN PENGAMANAN LAPAS - LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA - LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

No	Uraian Tugas	Satuan Hasil	Waktu Penyelesaian	Waktu Kerja Efektif	Beban Kerja	Σ Beban Kerja	Kebutuhan Pegawai	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	menjaga pintu gerbang, memeriksa isi kendaraan keluar masuk, orang / barang keluar masuk, mengawasi kendaraan tahanan, mobil keluar masuk, petugas pintu gerbang yang telah ditentukan	Kegiatan	20	1250	260	5200	4.16	
2	melakukan pengawasan dan pemeriksaan awal terhadap pengunjung yang datang, termasuk barang bawaannya	Kegiatan	16	1250	260	4160	3.33	
3	menjaga pintu, memeriksa, menggeledah orang / barang masuk (pegawai, tahanan atau WBP baru atau keluarga tahanan yang berkunjung) dan memeriksa barang-barang bawaan serta memastikan pintu tetap terkunci	Kegiatan	16	1250	260	4160	3.33	
4	Melakukan pencatatan, pencocokan ID, memegang kunci, mengawasi aktivitas dalam area kunjungan	Kegiatan	4	1250	144	576	0.46	
5	menjaga pos di menara	Kegiatan	0	1250	0	0	0.00	
6	menjaga pintu staff dan melakukan pengawasan aktivitas pada area tersebut	Kegiatan	16	1250	260	4160	3.33	
7	Kontrol keliling Area Blok hunian	Kegiatan	16	1250	260	4160	3.33	
8	mengawasi kegiatan yang berlangsung di dapur	Kegiatan	9	1250	260	2340	1.87	
9	mengawasi kegiatan yang berlangsung di area bengkel kerja	Kegiatan	3	1250	260	780	0.62	

10	Mengawasi [illegible] tahanan/WBP di [illegible]	Kegiatan	3	1250	260	780	0.62	
11	Mengawasi kegiatan di dalam [illegible]	Kegiatan	6	1250	260	1560	1.25	
12	Mengawasi [illegible] kegiatan kerja [illegible] [illegible] kerja pada [illegible] yang [illegible] [illegible] pada WBP [illegible] membawa [illegible] yang digunakan saat melakukan kegiatan kerja ke dalam area steril dan [illegible]	Kegiatan	8	1250	260	2080	1.66	
13	Melakukan pengawasan secara keliling dan melakukan pengawasan kegiatan di luar / [illegible]	Kegiatan	6	1250	260	1560	1.25	
14	Menghitung Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan	Kegiatan	3	1250	260	780	0.62	
15	Memeriksa Badan dan Barang Pengunjung yang keluar masuk blok hunian WBP	Kegiatan	12	1250	260	3120	2.50	
16	Melakukan cek fisik [illegible]	Kegiatan	0	1250	0	0	0.00	
17	Melakukan kontrol keliling lingkungan dalam kantor	Kegiatan	1	1250	260	260	0.21	
18	Melakukan kontrol keliling lingkungan gudang	Kegiatan	0	1250	0	0	0.00	
19	Melakukan kontrol pelaksanaan keluar masuk Barang [illegible]	Kegiatan	0	1250	0	0	0.00	
20	Membuat [illegible] inventaris kantor dan sarana pengamanan	Kegiatan	1	1250	260	260	0.21	
21	Membuat laporan kegiatan pada buku [illegible] petugas [illegible] (P2U)	Laporan	1	1250	12	12	0.01	
22	Memeriksa lingkungan dan cek fisik bangunan kantor	Kegiatan	2	1250	260	520	0.42	
23	Melakukan pengawasan terhadap [illegible] yang [illegible]	Kegiatan	0	1250	0	0	0.00	
24	Melakukan pengawasan terhadap [illegible]	Kegiatan	0	1250	0	0	0.00	
25	Memeriksa pengunjung beserta barang bawaannya	Kegiatan	4	1250	144	576	0.46	
26	Memeriksa dan mencatat identitas tamu yang berkunjung	Kegiatan	4	1250	144	576	0.46	
27	Mengawasi lalu lintas orang dan kendaraan pada pintu gerbang	Kegiatan	0	1250	0	0	0.00	
28	Menjaga dan mengawasi lalu lintas orang pada pintu utama	Kegiatan	0	1250	0	0	0.00	

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR M.HH-30.KP.03.03 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DARI DAN DALAM JABATAN MANAJERIAL DAN NONMANAJERIAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi kinerja, perlu melakukan pemberhentian dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Manajerial dan Nonmanajerial di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Manajerial dan Nonmanajerial di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 6897);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2646);

5. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;

6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 32);

7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1441);

8. Peraturan . . .

8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Manajemen Karier Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 101);
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 900);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DARI DAN DALAM JABATAN MANAJERIAL DAN NONMANAJERIAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

KESATU : Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2, diberhentikan dari jabatan lamanya sebagaimana tersebut dalam lajur 4, diangkat dalam jabatan baru sebagaimana tersebut dalam lajur 5, dan diberikan tunjangan jabatan struktural sebagaimana tersebut dalam lajur 6 daftar lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Biaya perjalanan ke tempat tugas yang baru ditanggung oleh Negara, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal pelantikan.

KEEMPAT : Petikan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal: 16 Agustus 2024
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

YASONNA H. LAOLY

Tembusan:
1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara;
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
6. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
7. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
8. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia;
9. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
10. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
11. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bersangkutan;
12. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan.

1	2	3	4	5	6
354.	TAUFIK, SH NIP 197001141991031001	Penata Tingkat I (III/d)	KEPALA SEKSI BIMBINGAN NARAPIDANA/ANAK DIDIK DAN KEGIATAN KERJA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB MUARA ENIM	KEPALA SEKSI BIMBINGAN NARAPIDANA/ANAK DIDIK LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA MUARA BELITI	s.d.a.
355	ADRIANSYAH, S.Hut NIP 198209182007031001	Penata (III/c)	KEPALA SEKSI PEMBINAAN LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II BENGKULU	KEPALA SUBBIDANG PENGELOLAAN BENDA SITAAN, BARANG RAMPASAN DAN KEAMANAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BENGKULU	s.d.a.
356.	MURBANDINI, S.H., M.H. NIP 195806241991032001	Pembina (IV/a)	KEPALA SEKSI KEGIATAN KERJA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BOGOR	KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II BOGOR	s.d.a.
357.	MOCH. YUDHA TRIWANGGA, A.Md.IP., S.H., M.M. NIP 198608242005011001	Penata Tingkat I (III/d)	KEPALA SEKSI BIMBINGAN NARAPIDANA/ANAK DIDIK LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA CILEGON	KEPALA SEKSI KEGIATAN KERJA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BOGOR	s.d.a
358.	GILANG RIFLIANTO, A.Md.IP., S.H. NIP 199003072009011001	Penata (III/c)	KEPALA SEKSI PELAYANAN TAHANAN RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I TANGERANG	KEPALA SEKSI BIMBINGAN NARAPIDANA/ANAK DIDIK LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA CILEGON	s.d.a.
359.	ARIS YULIYANTA, SH NIP 198307012002121001	Penata Tingkat I (III/d)	KEPALA KESATUAN PENGAMANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PEKANBARU	KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II MAGELANG	s.d.a.
360.	ISMADI, A.Md.IP, S.Sos., M.M NIP 198206222001121002	Pembina (IV/a)	KEPALA SEKSI BIMBINGAN NARAPIDANA/ANAK DIDIK LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PEKANBARU	KEPALA KESATUAN PENGAMANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PEKANBARU	s.d.a.
361	YOPI FEBRIANDA, A.Md.P., S.H., M.H NIP 199102112009121002	Penata (III/c)	KEPALA KESATUAN PENGAMANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BAGAN SIAPIAPI	KEPALA SEKSI BIMBINGAN NARAPIDANA/ANAK DIDIK LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PEKANBARU	s.d.a.
362.	MARCOS SIHOMBING, S.A.P., M.H NIP 199008172009011001	Penata Muda Tingkat I (III/b)	KEPALA KESATUAN PENGAMANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB PASIR PANGARAYAN	KEPALA KESATUAN PENGAMANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BAGAN SIAPIAPI	s.d.a.
363.	SITI MAIMUNAH, SH NIP 197105131991032001	Penata Tingkat I (III/d)	KEPALA SEKSI REGISTRASI DAN KLASIFIKASI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II TENGGARONG	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG	s.d.a.

SCREENSHOOT STATUS DSE PEJABAT ADMINISTRASI ESELON IV

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Alamat : Jl. Imam Bonjol No.37 Rt.08 Kelurahan Melayu, Tenggarong – Kutai Kartanegara
Telp. 0541-6720100   Email : lpp.smd@gmail.com

SCREENSHOOT STATUS DSE PEJABAT ADMINISTRASI ESELON IV
LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

KEPALA SEKSI ADMINISTRASI KEAMANAN DAN KETERTIBAN

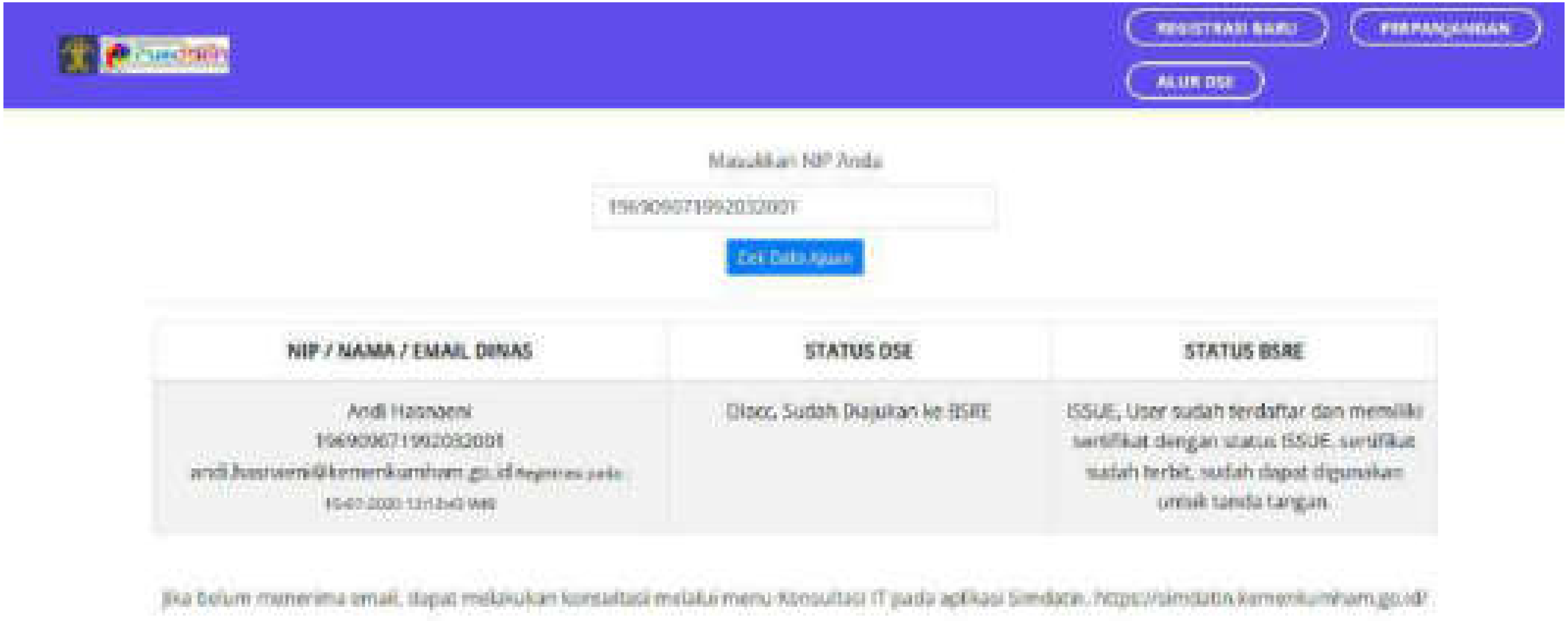

NIP / NAMA / EMAIL DINAS	STATUS DSE	STATUS BSRE
Andi Hasnaeni 196909071992032001 andi.hasnaeni@kemenkumham.go.id Registrasi pada 15-07-2020 13:13:40 WIB	Diacc, Sudah Diajukan ke BSRE	ISSUE, User sudah terdaftar dan memiliki sertifikat dengan status ISSUE. sertifikat sudah terbit, sudah dapat digunakan untuk tanda tangan

Jika belum menerima email, dapat melakukan konsultasi melalui menu Konsultasi IT pada aplikasi Simdatin. https://simdatin.kemenkumham.go.id/

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Alamat : Jl. Imam Bonjol No.37 Rt.08 Kelurahan Melayu, Tenggarong – Kutai Kartanegara
Telp. 0541-6720100 Email : lpp.smd@gmail.com

SCREENSHOOT STATUS DSE PEJABAT ADMINISTRASI ESELON IV
LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

KEPALA SEKSI KEGIATAN KERJA

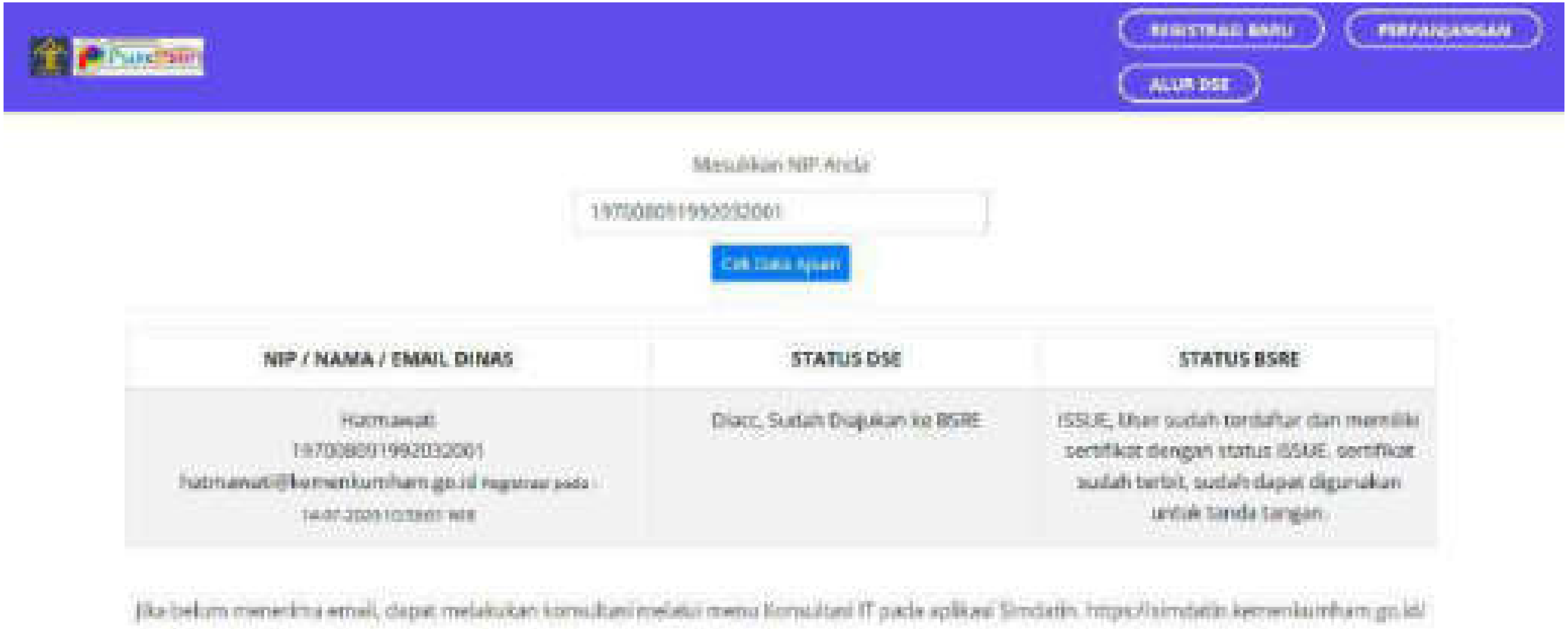

Masukkan NIP Anda

197008031992032001

NIP / NAMA / EMAIL DINAS	STATUS DSE	STATUS BSRE
Hatmawati 197008031992032001 hatmawati@kemenkumham.go.id Registrasi pada :	Diacc, Sudah Diajukan ke BSRE	ISSUE, User sudah terdaftar dan memiliki sertifikat dengan status ISSUE, sertifikat sudah terbit, sudah dapat digunakan untuk tanda tangan.

Jika belum menerima email, dapat melakukan konsultasi melalui menu Konsultasi IT pada aplikasi Simdatin. https://simdatin.kemenkumham.go.id/

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Alamat : Jl. Imam Bonjol No.37 Rt.08 Kelurahan Melayu, Tenggarong – Kutai Kartanegara
Telp. 0541-6720100 Email : lpp.smd@gmail.com

SCREENSHOOT STATUS DSE PEJABAT ADMINISTRASI ESELON IV
LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

KEPALA SEKSI BIMBINGAN NARAPIDANA/ANAK DIDIK

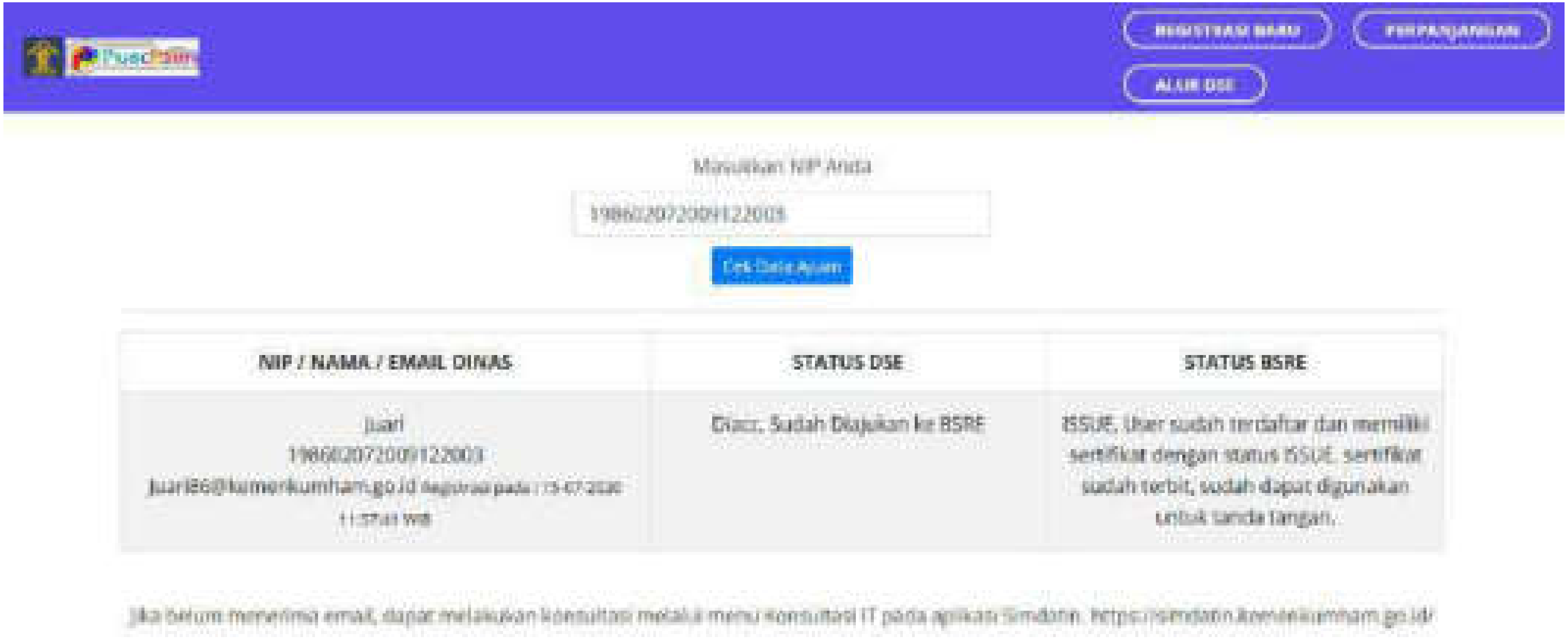

198602072009122003

NIP / NAMA / EMAIL DINAS	STATUS DSE	STATUS BSRE
Juari 198602072009122003 juari86@kemenkumham.go.id Registrasi pada : 13-07-2020 11:37:43 WIB	Diacc, Sudah Diajukan ke BSRE	ISSUE, User sudah terdaftar dan memiliki sertifikat dengan status ISSUE, sertifikat sudah terbit, sudah dapat digunakan untuk tanda tangan.

Jika belum menerima email, dapat melakukan konsultasi melalui menu konsultasi IT pada aplikasi Simdatin. https://simdatin.kemenkumham.go.id/

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Alamat : Jl. Imam Bonjol No.37 Rt.08 Kelurahan Melayu, Tenggarong – Kutai Kartanegara
Telp. 0541-6720100 Email : lpp.smd@gmail.com

SCREENSHOOT STATUS DSE PEJABAT ADMINISTRASI ESELON IV
LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA

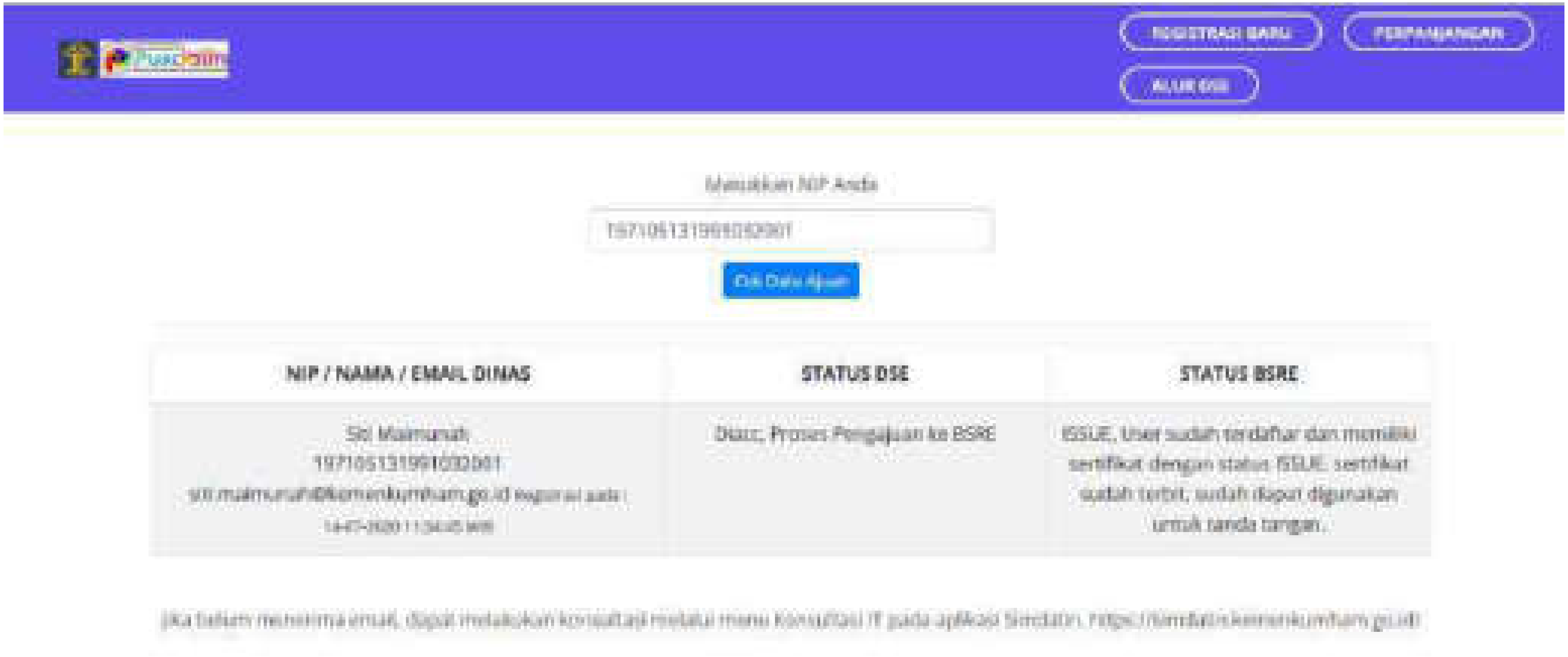

197105131991032001

NIP / NAMA / EMAIL DINAS	STATUS DSE	STATUS BSRE
Siti Maimunah 197105131991032001 siti.maimunah@kemenkumham.go.id expirasi pada : 14-07-2020 11:34:45 WIB	Diacc, Proses Pengajuan ke BSRE	ISSUE, User sudah terdaftar dan memiliki sertifikat dengan status ISSUE, sertifikat sudah terbit, sudah dapat digunakan untuk tanda tangan.

Jika belum menerima email, dapat melakukan konsultasi melalui menu Konsultasi IT pada aplikasi Simdatin. https://simdatin.kemenkumham.go.id

LAPORAN KEUANGAN PADA APLIKASI SAKTI

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Agustus 2024

Kementerian : **013** **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**
Unit Organisasi **05** **DITJEN PEMASYARAKATAN**
Satuan Kerja : **418333** **LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG**

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	**6,807,807,000**	**0**	**4,241,620,599**	**581,496,297**	**4,823,116,896**	**70.85 %**	**1,984,690,104**
BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	2,414,206,000	0	1,420,747,600	233,608,008	1,654,355,608	68.53 %	759,850,392
BF.5252 Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	2,414,206,000	0	1,420,747,600	233,608,008	1,654,355,608	68.53 %	759,850,392
BDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	2,382,206,000	0	1,405,016,600	231,208,008	1,636,224,608	68.69 %	745,981,392
BDC.002 Pembinaan Kepribadian Dan Layanan Integrasi Narapidana	80,201,000	0	43,944,000	10,710,000	54,654,000	68.15 %	25,547,000
051 Pembinaan Kepribadian	64,301,000	0	34,729,000	9,810,000	44,539,000	69.27 %	19,762,000
051.0A Konseling	8,520,000	0	2,500,000	0	2,500,000	29.34 %	6,020,000
521211 Belanja Bahan	2,520,000	0	0	0	0	0.00 %	2,520,000
000001. Kudapan	1,320,000	0	0	0	0	0.00 %	1,320,000
000002. Penggandaan, Penjilidan dan Pelaporan	1,200,000	0	0	0	0	0.00 %	1,200,000
522151 Belanja Jasa Profesi	6,000,000	0	2,500,000	0	2,500,000	41.67 %	3,500,000
000003. Honor Konselor/ Psikolog	6,000,000	0	2,500,000	0	2,500,000	41.67 %	3,500,000
051.0B Penyuluhan Hukum	2,100,000	0	175,000	100,000	275,000	13.10 %	1,825,000
521211 Belanja Bahan	2,100,000	0	175,000	100,000	275,000	13.10 %	1,825,000
000004. Penggandaan, Penjilidan dan Pelaporan	1,200,000	0	100,000	100,000	200,000	16.67 %	1,000,000
000005. Kudapan	900,000	0	75,000	0	75,000	8.33 %	825,000
051.0C Kegiatan Keagamaan	21,981,000	0	12,637,000	820,000	13,457,000	61.22 %	8,524,000
521211 Belanja Bahan	2,170,000	0	1,237,000	270,000	1,507,000	69.45 %	663,000
000006. Banner dan Spanduk	2,170,000	0	1,237,000	270,000	1,507,000	69.45 %	663,000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	3,311,000	0	400,000	0	400,000	12.08 %	2,911,000
000007. Perlengkapan Kegiatan Keagamaan	3,311,000	0	400,000	0	400,000	12.08 %	2,911,000
522151 Belanja Jasa Profesi	3,000,000	0	500,000	250,000	750,000	25.00 %	2,250,000
000008. Honor Pembina Keagamaan	3,000,000	0	500,000	250,000	750,000	25.00 %	2,250,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	13,500,000	0	10,500,000	300,000	10,800,000	80.00 %	2,700,000
000009. Transport Pembina Keagamaan	5,400,000	0	5,100,000	300,000	5,400,000	100.00	0

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**
***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Agustus 2024

Kementerian : **013** **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**
Unit Organisasi **05** **DITJEN PEMASYARAKATAN**
Satuan Kerja : **418333** **LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG**

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000010. Transport Imam Terawih	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000	100.00	0
000155. Transport Pengajar Ngaji	3,600,000	0	900,000	0	900,000	25.00 %	2,700,000
051.0D Kegiatan Pramuka Kesadaran Berbangsa dan Bernegara	14,600,000	0	12,200,000	1,300,000	13,500,000	92.47 %	1,100,000
521211 Belanja Bahan	1,200,000	0	300,000	100,000	400,000	33.33 %	800,000
000011. Penggandaan, Penjilidan dan Pelaporan	1,200,000	0	300,000	100,000	400,000	33.33 %	800,000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000	100.00	0
000012. Perlengkapan Kegiatan Kepramukaan	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5,400,000	0	3,900,000	1,200,000	5,100,000	94.44 %	300,000
000013. Transport Pembina Kesadaran Berbangsa dan Bernegara	5,400,000	0	3,900,000	1,200,000	5,100,000	94.44 %	300,000
051.0E Kegiatan Kesenian dan Olahraga	17,100,000	0	7,217,000	7,590,000	14,807,000	86.59 %	2,293,000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	9,000,000	0	1,367,000	5,340,000	6,707,000	74.52 %	2,293,000
000014. Perlengkapan Kegiatan Kesenian dan Olahraga	9,000,000	0	1,367,000	5,340,000	6,707,000	74.52 %	2,293,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8,100,000	0	5,850,000	2,250,000	8,100,000	100.00	0
000015. Transport Instruktur Kesenian dan Olahraga	8,100,000	0	5,850,000	2,250,000	8,100,000	100.00	0
052 Layanan Integrasi dan TPP	15,900,000	0	9,215,000	900,000	10,115,000	63.62 %	5,785,000
052.0A Pelaksanaan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan	10,200,000	0	5,015,000	400,000	5,415,000	53.09 %	4,785,000
521211 Belanja Bahan	8,400,000	0	3,665,000	100,000	3,765,000	44.82 %	4,635,000
000016. Kudapan	7,200,000	0	3,165,000	0	3,165,000	43.96 %	4,035,000
000017. Penggandaan, Penjilidan dan Pelaporan	1,200,000	0	500,000	100,000	600,000	50.00 %	600,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,800,000	0	1,350,000	300,000	1,650,000	91.67 %	150,000
000018. Transport Lokal	1,800,000	0	1,350,000	300,000	1,650,000	91.67 %	150,000
052.0B Pemberian Remisi, PB, CB, CMB, CMK	5,700,000	0	4,200,000	500,000	4,700,000	82.46 %	1,000,000
521211 Belanja Bahan	1,200,000	0	100,000	200,000	300,000	25.00 %	900,000
000019. Penggandaan, Penjilidan dan Pelaporan	1,200,000	0	100,000	200,000	300,000	25.00 %	900,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2,100,000	0	1,800,000	300,000	2,100,000	100.00	0
000020. Transport Antar Kabupaten (Tenggarong-	2,100,000	0	1,800,000	300,000	2,100,000	100.00	0

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**
***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Agustus 2024

Kementerian : **013** **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**
Unit Organisasi **05** **DITJEN PEMASYARAKATAN**
Satuan Kerja : **418333** **LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG**

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
Samarinda)	2,100,000	0	1,800,000	300,000			0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,400,000	0	2,300,000	0	2,300,000	95.83 %	100,000
000021. Transport Lokal Pemulangan	2,400,000	0	2,300,000	0	2,300,000	95.83 %	100,000
BDC.004 Kebutuhan Dasar dan Layanan Kesehatan	2,263,705,000	0	1,322,772,600	220,498,008	1,543,270,608	68.17 %	720,434,392
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	2,263,705,000	0	1,322,772,600	220,498,008	1,543,270,608	68.17 %	720,434,392
005.0A Pengadaan Bahan Makanan Warga Binaan Pemasyarakatan	1,993,799,000	0	1,130,631,700	194,387,008	1,325,018,708	66.46 %	668,780,292
521112 Belanja Pengadaan Bahan Makanan	1,993,799,000	0	1,130,631,700	194,387,008	1,325,018,708	66.46 %	668,780,292
000031. Pengadaan Bahan Makanan	1,993,799,000	0	1,130,631,700	194,387,008	1,325,018,708	66.46 %	668,780,292
005.0B Kebutuhan Sandang	57,330,000	0	56,916,000	0	56,916,000	99.28 %	414,000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	57,330,000	0	56,916,000	0	56,916,000	99.28 %	414,000
000032. Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sandang Khusus Pramuka	2,600,000	0	2,580,000	0	2,580,000	99.23 %	20,000
000033. Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sandang WBP	49,530,000	0	49,296,000	0	49,296,000	99.53 %	234,000
000034. Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sandang Khusus Pembinaan	5,200,000	0	5,040,000	0	5,040,000	96.92 %	160,000
005.0C Pemenuhan Sarana Makan Minum	39,342,000	0	26,252,900	0	26,252,900	66.73 %	13,089,100
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	25,330,000	0	12,352,900	0	12,352,900	48.77 %	12,977,100
000157. Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Dapur	25,330,000	0	12,352,900	0	12,352,900	48.77 %	12,977,100
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	14,012,000	0	13,900,000	0	13,900,000	99.20 %	112,000
000035. Penyediaan Peralatan Dapur	1,900,000	0	1,900,000	0	1,900,000	100.00	0
000036. Penyediaan Peralatan Makan Minum	12,112,000	0	12,000,000	0	12,000,000	99.08 %	112,000
005.0D Pemenuhan Perlengkapan Mandi	10,687,000	0	10,659,000	0	10,659,000	99.74 %	28,000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	10,687,000	0	10,659,000	0	10,659,000	99.74 %	28,000
000037. Kegiatan Pemenuhan Perlengkapan Mandi	10,687,000	0	10,659,000	0	10,659,000	99.74 %	28,000
005.0E Perlengkapan Khusus Kelompok Rentan	34,667,000	0	14,331,000	14,941,000	29,272,000	84.44 %	5,395,000
521211 Belanja Bahan	5,306,000	0	81,000	7,000	88,000	1.66 %	5,218,000
000038. Kegiatan Pemberian Extra Voeding WBP Khusus Ibu Hamil	5,180,000	0	60,000	0	60,000	1.16 %	5,120,000

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**
***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Agustus 2024

Kementerian : **013** **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**
Unit Organisasi **05** **DITJEN PEMASYARAKATAN**
Satuan Kerja : **418333** **LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG**

Uraian	**Pagu Revisi**	**Lock Pagu**	**Realisasi TA 2024**				**SISA ANGGARAN**
			Periode Lalu	**Periode Ini**	**s.d. Periode**	**%**	
000039. Kegiatan Pemberian Extra Voeding WBP Khusus Lansia	126,000	0	21,000	7,000	28,000	22.22 %	98,000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	29,361,000	0	14,250,000	14,934,000	29,184,000	99.40 %	177,000
000040. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Khusus Kelompok Rentan	29,361,000	0	14,250,000	14,934,000	29,184,000	99.40 %	177,000
005.0F Extra Fooding	46,430,000	0	46,430,000	0	46,430,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	46,430,000	0	46,430,000	0	46,430,000	100.00	0
000041. Kegiatan Pemberian Extra Voeding WBP Selama Bulan Puasa	46,430,000	0	46,430,000	0	46,430,000	100.00	0
005.0G Pemulasaran	1,650,000	0	0	0	0	0.00 %	1,650,000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1,650,000	0	0	0	0	0.00 %	1,650,000
000042. Kegiatan Pemulasaran bagi WBP	1,650,000	0	0	0	0	0.00 %	1,650,000
005.0H Perawatan Kesehatan Tahanan/ Narapidana/ Anak	28,500,000	0	9,172,000	1,585,000	10,757,000	37.74 %	17,743,000
521211 Belanja Bahan	2,400,000	0	1,150,000	0	1,150,000	47.92 %	1,250,000
000043. Penggandaan, Penjilidan dan Pelaporan	2,400,000	0	1,150,000	0	1,150,000	47.92 %	1,250,000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	9,000,000	0	80,000	0	80,000	0.89 %	8,920,000
000044. Perawatan WBP	9,000,000	0	80,000	0	80,000	0.89 %	8,920,000
522191 Belanja Jasa Lainnya	17,100,000	0	7,942,000	1,585,000	9,527,000	55.71 %	7,573,000
000045. Honorium Tenaga Medis	17,100,000	0	7,942,000	1,585,000	9,527,000	55.71 %	7,573,000
005.0I Perlengkapan Medis Poliklinik	51,300,000	0	28,380,000	9,585,000	37,965,000	74.01 %	13,335,000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	51,300,000	0	28,380,000	9,585,000	37,965,000	74.01 %	13,335,000
000046. Penyediaan Perlengkapan Medis Poliklinik	17,100,000	0	9,460,000	3,195,000	12,655,000	74.01 %	4,445,000
000047. Pengadaan Obat-Obatan bagi WBP	34,200,000	0	18,920,000	6,390,000	25,310,000	74.01 %	8,890,000
BDC.006 Pembinaan Kemandirian Narapidana	38,300,000	0	38,300,000	0	38,300,000	100.00	0
051 Perencanaan Pembinaan Kemandirian Narapidana	1,550,000	0	1,550,000	0	1,550,000	100.00	0
051.0A Perencanaan	1,550,000	0	1,550,000	0	1,550,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	1,550,000	0	1,550,000	0	1,550,000	100.00	0
000022. Penggandaan, Penjilidan dan Pelaporan	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	100.00	0

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**
***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Agustus 2024

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi 05 DITJEN PEMASYARAKATAN
Satuan Kerja : 418333 LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000023. Kudapan	165,000	0	165,000	0	165,000	100.00	0
000024. Makan	385,000	0	385,000	0	385,000	100.00	0
052 Pelaksanaan Pembinaan Kemandirian Narapidana	33,800,000	0	33,800,000	0	33,800,000	100.00	0
052.0A Pelaksanaan	33,800,000	0	33,800,000	0	33,800,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	26,600,000	0	26,600,000	0	26,600,000	100.00	0
000025. Kudapan Kegiatan	1,890,000	0	1,890,000	0	1,890,000	100.00	0
000026. Perlengkapan Kegiatan	24,710,000	0	24,710,000	0	24,710,000	100.00	0
522151 Belanja Jasa Profesi	7,200,000	0	7,200,000	0	7,200,000	100.00	0
000027. Honor Instruktur	7,200,000	0	7,200,000	0	7,200,000	100.00	0
053 Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembinaan Kemandirian Narapidana	2,950,000	0	2,950,000	0	2,950,000	100.00	0
053.0A Evaluasi dan Pelaporan	2,950,000	0	2,950,000	0	2,950,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	2,950,000	0	2,950,000	0	2,950,000	100.00	0
000028. Kudapan	165,000	0	165,000	0	165,000	100.00	0
000029. Makan	385,000	0	385,000	0	385,000	100.00	0
000030. Pencetakan Sartifikat, Penggandaan dan Penjilidan Laporan	2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000	100.00	0
BHB Operasi Bidang Keamanan	32,000,000	0	15,731,000	2,400,000	18,131,000	56.66 %	13,869,000
BHB.002 Layanan Keamanan dan Ketertiban	32,000,000	0	15,731,000	2,400,000	18,131,000	56.66 %	13,869,000
051 Penegakan Keamanan dan Ketertiban	12,000,000	0	7,931,000	0	7,931,000	66.09 %	4,069,000
051.0A Penegakan Keamanan dan Ketertiban	12,000,000	0	7,931,000	0	7,931,000	66.09 %	4,069,000
521211 Belanja Bahan	2,400,000	0	800,000	0	800,000	33.33 %	1,600,000
000048. Penggandaan, Penjilidan dan Pelaporan	2,400,000	0	800,000	0	800,000	33.33 %	1,600,000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	9,600,000	0	7,131,000	0	7,131,000	74.28 %	2,469,000
000049. Kebutuhan Razia, Penggeledahan dan Gangguan Kamtib	9,600,000	0	7,131,000	0	7,131,000	74.28 %	2,469,000
052 Pengawalan	20,000,000	0	7,800,000	2,400,000	10,200,000	51.00 %	9,800,000
052.0A Pengawalan Narapidana	14,400,000	0	7,800,000	2,400,000	10,200,000	70.83 %	4,200,000

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**
***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Agustus 2024

Kementerian : **013** **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**
Unit Organisasi **05** **DITJEN PEMASYARAKATAN**
Satuan Kerja : **418333** **LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG**

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	14,400,000	0	7,800,000	2,400,000	10,200,000	70.83 %	4,200,000
000050. Transport Pengawalan	1,800,000	0	300,000	0	300,000	16.67 %	1,500,000
000156. Uang Harian	12,600,000	0	7,500,000	2,400,000	9,900,000	78.57 %	2,700,000
052.0B Perpindahan (Mutasi) Narapidana	5,600,000	0	0	0	0	0.00 %	5,600,000
521211 Belanja Bahan	100,000	0	0	0	0	0.00 %	100,000
000051. Penggandaan, Penjilidan dan Pelaporan	100,000	0	0	0	0	0.00 %	100,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5,500,000	0	0	0	0	0.00 %	5,500,000
000052. Transport (Tenggarong-Bontang)	1,500,000	0	0	0	0	0.00 %	1,500,000
000053. Uang Harian	4,000,000	0	0	0	0	0.00 %	4,000,000
WA Program Dukungan Manajemen	4,393,601,000	0	2,820,872,999	347,888,289	3,168,761,288	72.12 %	1,224,839,712
WA.6231 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan	4,393,601,000	0	2,820,872,999	347,888,289	3,168,761,288	72.12 %	1,224,839,712
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	4,312,411,000	0	2,756,998,134	346,390,489	3,103,388,623	71.96 %	1,209,022,377
EBA.956 Layanan BMN	8,690,000	0	6,670,000	400,000	7,070,000	81.36 %	1,620,000
051 Penatausahaan dan Pengelolaan BMN	8,010,000	0	5,990,000	400,000	6,390,000	79.78 %	1,620,000
051.0A Penatausahaan dan Pengelolaan BMN	8,010,000	0	5,990,000	400,000	6,390,000	79.78 %	1,620,000
521211 Belanja Bahan	360,000	0	0	0	0	0.00 %	360,000
000054. Penggandaan, Penjilidan dan Pelaporan	360,000	0	0	0	0	0.00 %	360,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7,650,000	0	5,990,000	400,000	6,390,000	83.53 %	1,260,000
000055. Transport antar Kabupaten (Tenggarong-Samarinda)	1,200,000	0	400,000	400,000	800,000	66.67 %	400,000
000158. Uang Harian	6,450,000	0	5,590,000	0	5,590,000	86.67 %	860,000
052 Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	680,000	0	680,000	0	680,000	100.00	0
052.0A Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	680,000	0	680,000	0	680,000	100.00	0
521213 Belanja Honor Output Kegiatan	680,000	0	680,000	0	680,000	100.00	0
000057. Honor Pengadaan Barang dan Jasa	680,000	0	680,000	0	680,000	100.00	0
EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	7,700,000	0	4,564,000	0	4,564,000	59.27 %	3,136,000
051 Penyediaan Informasi Publik	500,000	0	364,000	0	364,000	72.80 %	136,000

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**
***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Agustus 2024

Kementerian : **013** **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**
Unit Organisasi **05** **DITJEN PEMASYARAKATAN**
Satuan Kerja : **418333** **LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG**

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
051.0A Penyediaan Informasi Publik	500,000	0	364,000	0	364,000	72.80 %	136,000
521211 Belanja Bahan	500,000	0	364,000	0	364,000	72.80 %	136,000
000130. Penggandaan, Penjilidan, Pelaporan dan Banner	500,000	0	364,000	0	364,000	72.80 %	136,000
052 Kerja Sama	7,200,000	0	4,200,000	0	4,200,000	58.33 %	3,000,000
052.0A Kerja Sama	7,200,000	0	4,200,000	0	4,200,000	58.33 %	3,000,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7,200,000	0	4,200,000	0	4,200,000	58.33 %	3,000,000
000131. Transport Lokal	7,200,000	0	4,200,000	0	4,200,000	58.33 %	3,000,000
EBA.962 Layanan Umum	37,420,000	0	18,283,600	4,158,000	22,441,600	59.97 %	14,978,400
051 Urusan Umum	37,420,000	0	18,283,600	4,158,000	22,441,600	59.97 %	14,978,400
051.0A Urusan Umum	37,420,000	0	18,283,600	4,158,000	22,441,600	59.97 %	14,978,400
521211 Belanja Bahan	23,100,000	0	14,723,600	2,438,000	17,161,600	74.29 %	5,938,400
000125. Penggandaan, Penjilidan dan Pelaporan	9,600,000	0	4,985,600	79,000	5,064,600	52.76 %	4,535,400
000126. Spanduk, Banner dan Leflet	13,500,000	0	9,738,000	2,359,000	12,097,000	89.61 %	1,403,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	12,520,000	0	3,010,000	1,720,000	4,730,000	37.78 %	7,790,000
000127. Uang Harian	10,320,000	0	3,010,000	1,720,000	4,730,000	45.83 %	5,590,000
000128. Penginapan	2,200,000	0	0	0	0	0.00 %	2,200,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,800,000	0	550,000	0	550,000	30.56 %	1,250,000
000129. Transport Lokal	1,800,000	0	550,000	0	550,000	30.56 %	1,250,000
EBA.994 Layanan Perkantoran	4,258,601,000	0	2,727,480,534	341,832,489	3,069,313,023	72.07 %	1,189,287,977
001 Gaji dan Tunjangan	3,209,665,000	0	2,131,391,895	264,065,728	2,395,457,623	74.63 %	814,207,377
001.0A Pembayaran gaji dan tunjangan	3,182,769,000	0	2,117,009,895	258,061,728	2,375,071,623	74.62 %	807,697,377
511111 Belanja Gaji Pokok PNS	1,916,872,000	0	1,513,859,415	171,723,135	1,685,582,550	87.93 %	231,289,450
000058. Belanja Gaji Pokok PNS	1,620,660,000	0	1,181,757,145	171,723,135	1,353,480,280	83.51 %	267,179,720
000059. Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)	148,106,000	0	166,051,135	0	166,051,135	112.12	-17,945,135
000060. Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14)	148,106,000	0	166,051,135	0	166,051,135	112.12	-17,945,135
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS	34,000	0	28,000	2,820	30,820	90.65 %	3,180

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**
***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Agustus 2024

Kementerian : **013** **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**
Unit Organisasi **05** **DITJEN PEMASYARAKATAN**
Satuan Kerja : **418333** **LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG**

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
	000061. Belanja Pembulatan Gaji PNS	28,000	0	21,178	2,820	23,998	85.71 %	4,002
	000062. Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)	3,000	0	3,389	0	3,389	112.97	-389
	000063. Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14)	3,000	0	3,433	0	3,433	114.43	-433
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	208,759,000	0	70,204,433	7,392,847	77,597,280	37.17 %	131,161,720
	000064. Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	179,137,000	0	54,783,319	7,392,847	62,176,166	34.71 %	116,960,834
	000065. Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13)	14,811,000	0	7,710,557	0	7,710,557	52.06 %	7,100,443
	000066. Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 14)	14,811,000	0	7,710,557	0	7,710,557	52.06 %	7,100,443
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	29,342,000	0	23,119,945	2,493,379	25,613,324	87.29 %	3,728,676
	000067. Belanja Tunj.Anak PNS	25,230,000	0	17,948,551	2,493,379	20,441,930	81.02 %	4,788,070
	000068. Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13)	2,056,000	0	2,634,899	0	2,634,899	128.16	-578,899
	000069. Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 14)	2,056,000	0	2,536,495	0	2,536,495	123.37	-480,495
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	89,820,000	0	57,780,000	6,300,000	64,080,000	71.34 %	25,740,000
	000070. Belanja Tunjangan Struktural PNS	77,220,000	0	45,180,000	6,300,000	51,480,000	66.67 %	25,740,000
	000071. Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 13)	6,300,000	0	6,300,000	0	6,300,000	100.00	0
	000072. Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 14)	6,300,000	0	6,300,000	0	6,300,000	100.00	0
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	141,180,000	0	97,740,000	10,860,000	108,600,000	76.92 %	32,580,000
	000073. Belanja Tunjangan Fungsional PNS	130,320,000	0	86,880,000	10,860,000	97,740,000	75.00 %	32,580,000
	000074. Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 13)	10,860,000	0	10,860,000	0	10,860,000	100.00	0
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	1,849,000	0	7,434,602	15,527	7,450,129	402.93	-5,601,129
	000075. Belanja Tunjangan PPh PNS	1,583,000	0	294,879	15,527	310,406	19.61 %	1,272,594
	000076. Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 13)	133,000	0	3,534,617	0	3,534,617	2,657.6	-3,401,617
	000077. Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 14)	133,000	0	3,605,106	0	3,605,106	2,710.6	-3,472,106
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	116,843,000	0	85,093,500	9,487,020	94,580,520	80.95 %	22,262,480
	000078. Belanja Tunj Beras PNS	116,843,000	0	85,093,500	9,487,020	94,580,520	80.95 %	22,262,480
511129	Belanja Uang Makan PNS	675,480,000	0	257,525,000	48,877,000	306,402,000	45.36 %	369,078,000
	000079. Belanja Uang Makan PNS	675,480,000	0	257,525,000	48,877,000	306,402,000	45.36 %	369,078,000

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**
***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Agustus 2024

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi 05 DITJEN PEMASYARAKATAN
Satuan Kerja : 418333 LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS	2,590,000	0	4,225,000	910,000	5,135,000	198.26	-2,545,000
000152. Belanja Tunjangan Umum PNS	2,220,000	0	3,485,000	910,000	4,395,000	197.97	-2,175,000
000153. Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)	185,000	0	370,000	0	370,000	200.00	-185,000
000154. Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14)	185,000	0	370,000	0	370,000	200.00	-185,000
001.0B Uang Lembur	26,896,000	0	14,382,000	6,004,000	20,386,000	75.80 %	6,510,000
512211 Belanja Uang Lembur	26,896,000	0	14,382,000	6,004,000	20,386,000	75.80 %	6,510,000
000080. Uang Lembur Pegawai Gol IV	864,000	0	684,000	0	684,000	79.17 %	180,000
000081. Uang Lembur Pegawai Gol III	3,960,000	0	5,730,000	1,980,000	7,710,000	194.70	-3,750,000
000082. Uang Lembur Pegawai Gol II	13,536,000	0	4,872,000	2,880,000	7,752,000	57.27 %	5,784,000
000083. Uang Makan Lembur Gol IV	328,000	0	123,000	0	123,000	37.50 %	205,000
000084. Uang Makan Lembur Gol III	1,628,000	0	1,258,000	444,000	1,702,000	104.55	-74,000
000085. Uang Makan Lembur Gol II	6,580,000	0	1,715,000	700,000	2,415,000	36.70 %	4,165,000
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1,048,936,000	0	596,088,639	77,766,761	673,855,400	64.24 %	375,080,600
002.0A Kesehatan Pegawai	6,373,000	0	3,000,335	3,000,000	6,000,335	94.15 %	372,665
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	6,373,000	0	3,000,335	3,000,000	6,000,335	94.15 %	372,665
000086. Pemenuhan Kebutuhan Obat-Obatan Pegawai	6,373,000	0	3,000,335	3,000,000	6,000,335	94.15 %	372,665
002.0B Pemeliharaan Gedung	228,645,000	0	165,573,400	10,594,400	176,167,800	77.05 %	52,477,200
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	210,645,000	0	163,058,400	9,734,400	172,792,800	82.03 %	37,852,200
000087. Pemeliharaan Gedung dan Kantor Bertingkat	81,700,000	0	67,103,542	874,000	67,977,542	83.20 %	13,722,458
000088. Pemeliharaan Gedung dan Kantor Tidak Bertingkat	128,945,000	0	95,954,858	8,860,400	104,815,258	81.29 %	24,129,742
523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	18,000,000	0	2,515,000	860,000	3,375,000	18.75 %	14,625,000
000089. Persediaan Lampu Gedung	18,000,000	0	2,515,000	860,000	3,375,000	18.75 %	14,625,000
002.0C Perbaikan Peralatan Perkantoran	60,620,000	0	9,882,400	1,465,000	11,347,400	18.72 %	49,272,600
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	60,620,000	0	9,882,400	1,465,000	11,347,400	18.72 %	49,272,600
000090. Sarana Kamtib	4,020,000	0	0	0	0	0.00 %	4,020,000
000091. CCTV	5,400,000	0	2,291,400	0	2,291,400	42.43 %	3,108,600

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**
***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Agustus 2024

Kementerian : **013** **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**
Unit Organisasi **05** **DITJEN PEMASYARAKATAN**
Satuan Kerja : **418333** **LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG**

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000092. Televisi	2,440,000	0	245,000	0	245,000	10.04 %	2,195,000
000093. Steamer/Rice cooker	6,000,000	0	510,000	0	510,000	8.50 %	5,490,000
000094. Bahan Bakar Genset (100 KVA)	6,380,000	0	0	400,000	400,000	6.27 %	5,980,000
000095. Genset (100 KVA)	8,150,000	0	615,000	600,000	1,215,000	14.91 %	6,935,000
000096. Laptop	4,380,000	0	500,000	0	500,000	11.42 %	3,880,000
000097. Printer	10,350,000	0	4,550,000	25,000	4,575,000	44.20 %	5,775,000
000098. UPS Single PC	1,500,000	0	0	0	0	0.00 %	1,500,000
000099. Peralatan Dapur	3,000,000	0	281,000	416,000	697,000	23.23 %	2,303,000
000100. Komputer	7,200,000	0	890,000	24,000	914,000	12.69 %	6,286,000
000162. Inventaris Kantor	1,800,000	0	0	0	0	0.00 %	1,800,000
002.0D Pemeliharaan Kendaraan	120,000,000	0	44,937,021	10,050,000	54,987,021	45.82 %	65,012,979
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	120,000,000	0	44,937,021	10,050,000	54,987,021	45.82 %	65,012,979
000101. Kendaraan Roda 4	120,000,000	0	44,937,021	10,050,000	54,987,021	45.82 %	65,012,979
002.0E Langganan Daya dan Jasa	164,400,000	0	96,429,321	17,284,229	113,713,550	69.17 %	50,686,450
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	18,000,000	0	8,704,111	2,751,700	11,455,811	63.64 %	6,544,189
000102. Internet	18,000,000	0	8,704,111	2,751,700	11,455,811	63.64 %	6,544,189
522111 Belanja Langganan Listrik	84,000,000	0	51,027,200	7,217,100	58,244,300	69.34 %	25,755,700
000103. Listrik	84,000,000	0	51,027,200	7,217,100	58,244,300	69.34 %	25,755,700
522112 Belanja Langganan Telepon	2,400,000	0	1,164,310	392,429	1,556,739	64.86 %	843,261
000104. Telepon	2,400,000	0	1,164,310	392,429	1,556,739	64.86 %	843,261
522113 Belanja Langganan Air	60,000,000	0	35,533,700	6,923,000	42,456,700	70.76 %	17,543,300
000105. Air	60,000,000	0	35,533,700	6,923,000	42,456,700	70.76 %	17,543,300
002.0F Jasa Pos	2,400,000	0	410,000	146,500	556,500	23.19 %	1,843,500
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2,400,000	0	410,000	146,500	556,500	23.19 %	1,843,500
000106. Pos Surat	2,400,000	0	410,000	146,500	556,500	23.19 %	1,843,500
002.0G Keperluan Perkantoran	98,820,000	0	62,896,012	5,080,832	67,976,844	68.79 %	30,843,156

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**
***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Agustus 2024

Kementerian : **013** **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**
Unit Organisasi **05** **DITJEN PEMASYARAKATAN**
Satuan Kerja : **418333** **LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG**

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	68,820,000	0	34,212,362	5,080,832	39,293,194	57.10 %	29,526,806
	000107. Keperluan Pokok Pegawai	62,520,000	0	32,112,362	4,555,832	36,668,194	58.65 %	25,851,806
	000108. Pengelolaan Limbah Kantor	6,300,000	0	2,100,000	525,000	2,625,000	41.67 %	3,675,000
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	30,000,000	0	28,683,650	0	28,683,650	95.61 %	1,316,350
	000109. Alat Tulis Kantor (ATK)	30,000,000	0	28,683,650	0	28,683,650	95.61 %	1,316,350
002.0H	Konsultasi dan Koordinasi	208,385,000	0	154,456,006	14,670,000	169,126,006	81.16 %	39,258,994
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	208,385,000	0	154,456,006	14,670,000	169,126,006	81.16 %	39,258,994
	000110. Transport Antar Kabupaten (Tenggarong-Samarinda)	9,600,000	0	5,289,670	4,100,000	9,389,670	97.81 %	210,330
	000111. Uang Harian (Samarinda)	30,960,000	0	7,480,000	5,590,000	13,070,000	42.22 %	17,890,000
	000112. Penginapan (Jakarta)	20,440,000	0	18,482,518	4,980,000	23,462,518	114.79	-3,022,518
	000113. Tiket Pesawat PP	53,158,000	0	35,675,658	0	35,675,658	67.11 %	17,482,342
	000114. Uang Harian (Jakarta)	22,260,000	0	15,570,000	0	15,570,000	69.95 %	6,690,000
	000159. Tiket Pesawat PP (Batam)	46,953,000	0	46,948,960	0	46,948,960	99.99 %	4,040
	000160. Uang Harian (Batam)	16,650,000	0	16,650,000	0	16,650,000	100.00	0
	000161. Penginapan (Batam)	8,364,000	0	8,359,200	0	8,359,200	99.94 %	4,800
002.0I	Jamuan Tamu	26,957,000	0	4,229,000	377,000	4,606,000	17.09 %	22,351,000
521211	Belanja Bahan	26,957,000	0	4,229,000	377,000	4,606,000	17.09 %	22,351,000
	000115. Jamuan Tamu	26,957,000	0	4,229,000	377,000	4,606,000	17.09 %	22,351,000
002.0J	Honor Operasional Satuan Kerja	62,796,000	0	29,568,000	6,312,800	35,880,800	57.14 %	26,915,200
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	62,796,000	0	29,568,000	6,312,800	35,880,800	57.14 %	26,915,200
	000116. KPA	18,648,000	0	9,324,000	1,320,900	10,644,900	57.08 %	8,003,100
	000117. PPK	12,096,000	0	6,048,000	957,600	7,005,600	57.92 %	5,090,400
	000118. Pejabat Penguji SPM	6,732,000	0	3,168,000	564,300	3,732,300	55.44 %	2,999,700
	000119. Bendahara	4,128,000	0	2,064,000	344,000	2,408,000	58.33 %	1,720,000
	000120. Bendahara Pengeluaran Pembantu	4,608,000	0	2,304,000	384,000	2,688,000	58.33 %	1,920,000
	000121. Staf Pengelola Keuangan	9,216,000	0	4,608,000	768,000	5,376,000	58.33 %	3,840,000

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**
***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Agustus 2024

Kementerian : **013** **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**
Unit Organisasi **05** **DITJEN PEMASYARAKATAN**
Satuan Kerja : **418333** **LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG**

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000122. PPABP	4,104,000	0	2,052,000	342,000	2,394,000	58.33 %	1,710,000
000163. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	3,264,000	0	0	1,632,000	1,632,000	50.00 %	1,632,000
002.0K Penambah Daya Tahan Tubuh	69,540,000	0	24,707,144	8,786,000	33,493,144	48.16 %	36,046,856
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	69,540,000	0	24,707,144	8,786,000	33,493,144	48.16 %	36,046,856
000124. Peyediaan makanan/minuman (extra voeding) petugas jaga malam	69,540,000	0	24,707,144	8,786,000	33,493,144	48.16 %	36,046,856
EBC Layanan Manajemen SDM Internal	42,160,000	0	42,151,000	0	42,151,000	99.98 %	9,000
EBC.954 Layanan Manajemen SDM	42,160,000	0	42,151,000	0	42,151,000	99.98 %	9,000
051 Pembinaan Kepegawaian	42,160,000	0	42,151,000	0	42,151,000	99.98 %	9,000
051.0A Pembinaan Fisik Mental dan Disiplin (FMD)	42,160,000	0	42,151,000	0	42,151,000	99.98 %	9,000
521211 Belanja Bahan	2,560,000	0	2,560,000	0	2,560,000	100.00	0
000132. Kudapan	960,000	0	960,000	0	960,000	100.00	0
000133. Makan	1,600,000	0	1,600,000	0	1,600,000	100.00	0
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	30,000,000	0	29,991,000	0	29,991,000	99.97 %	9,000
000134. Kegiatan Pembinaan FMD	30,000,000	0	29,991,000	0	29,991,000	99.97 %	9,000
522151 Belanja Jasa Profesi	9,600,000	0	9,600,000	0	9,600,000	100.00	0
000135. Honorium Narasumber	9,600,000	0	9,600,000	0	9,600,000	100.00	0
EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	39,030,000	0	21,723,865	1,497,800	23,221,665	59.50 %	15,808,335
EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	11,184,000	0	5,607,665	0	5,607,665	50.14 %	5,576,335
051 Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran	11,184,000	0	5,607,665	0	5,607,665	50.14 %	5,576,335
051.0A Penyusunan RKAKL	11,184,000	0	5,607,665	0	5,607,665	50.14 %	5,576,335
521211 Belanja Bahan	400,000	0	26,000	0	26,000	6.50 %	374,000
000136. Penggandaan, Penjilidan dan Pelaporan	400,000	0	26,000	0	26,000	6.50 %	374,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10,484,000	0	5,581,665	0	5,581,665	53.24 %	4,902,335
000137. Transport Antar Kabupaten (Tenggarong-Samarinda)	500,000	0	500,000	0	500,000	100.00	0
000138. Uang Harian	5,160,000	0	3,870,000	0	3,870,000	75.00 %	1,290,000

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**
***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Agustus 2024

Kementerian : **013** **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**
Unit Organisasi **05** **DITJEN PEMASYARAKATAN**
Satuan Kerja : **418333** **LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG**

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000139. Penginapan	4,824,000	0	1,211,665	0	1,211,665	25.12 %	3,612,335
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	300,000	0	0	0	0	0.00 %	300,000
000140. Transport Lokal	300,000	0	0	0	0	0.00 %	300,000
EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	5,520,000	0	2,136,600	792,800	2,929,400	53.07 %	2,590,600
051 Penyusunan Laporan Kinerja	5,520,000	0	2,136,600	792,800	2,929,400	53.07 %	2,590,600
051.0A Penyusunan Laporan Kinerja	5,520,000	0	2,136,600	792,800	2,929,400	53.07 %	2,590,600
521211 Belanja Bahan	2,000,000	0	416,600	792,800	1,209,400	60.47 %	790,600
000149. Penggandaan, Penjilidan dan Pelaporan	2,000,000	0	416,600	792,800	1,209,400	60.47 %	790,600
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1,720,000	0	1,720,000	0	1,720,000	100.00	0
000150. Uang Harian	1,720,000	0	1,720,000	0	1,720,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,800,000	0	0	0	0	0.00 %	1,800,000
000151. Transport Lokal	1,800,000	0	0	0	0	0.00 %	1,800,000
EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	7,520,000	0	2,580,000	0	2,580,000	34.31 %	4,940,000
051 Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan	7,520,000	0	2,580,000	0	2,580,000	34.31 %	4,940,000
051.0A Pengelola Sistem Akuntansi	7,520,000	0	2,580,000	0	2,580,000	34.31 %	4,940,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7,220,000	0	2,580,000	0	2,580,000	35.73 %	4,640,000
000146. Transport antar kabupaten (Tenggarong-Samarinda)	1,200,000	0	0	0	0	0.00 %	1,200,000
000147. Uang Harian	6,020,000	0	2,580,000	0	2,580,000	42.86 %	3,440,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	300,000	0	0	0	0	0.00 %	300,000
000148. Transport Lokal	300,000	0	0	0	0	0.00 %	300,000
EBD.961 Layanan Reformasi Kinerja	14,806,000	0	11,399,600	705,000	12,104,600	81.75 %	2,701,400
051 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM)	14,806,000	0	11,399,600	705,000	12,104,600	81.75 %	2,701,400
051.0A Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	14,806,000	0	11,399,600	705,000	12,104,600	81.75 %	2,701,400
521211 Belanja Bahan	4,174,000	0	1,670,000	705,000	2,375,000	56.90 %	1,799,000
000141. Penggandaan	4,174,000	0	1,670,000	705,000	2,375,000	56.90 %	1,799,000

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**
***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Agustus 2024

Kementerian : **013** **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**
Unit Organisasi **05** **DITJEN PEMASYARAKATAN**
Satuan Kerja : **418333** **LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG**

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10,632,000	0	9,729,600	0	9,729,600	91.51 %	902,400
	000142. Transport antar kabupaten	900,000	0	0	0	0	0.00 %	900,000
	000143. Uang Harian (Batam)	5,550,000	0	5,550,000	0	5,550,000	100.00	0
	000144. Penginapan (Batam)	4,182,000	0	4,179,600	0	4,179,600	99.94 %	2,400

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**
***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

IKPA PENARIKAN
HALAMAN III DIPA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Lapas Perempuan Kelas IIA Samarinda

DETAIL INDIKATOR HALAMAN 3 DIPA

No.	Kode Satker	Nama Satker	Kode KPPN	Periode	Rencana				Penyerapan				Deviasi				% Deviasi				% Proporsi Pagu				% Deviasi Tertimbang				% Deviasi Seluruh J.Bel	% Rata-Rata Deviasi Kumulatif	Nilai IKPA
					51	52	53	57	51	52	53	57	51	52	53	57	51	52	53	57	51	52	53	57	51	52	53	57			
1	418333	LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG	046	01	192,780,833	82,131,919	0	0	192,780,835	82,132,042	0	0	2	123	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	45.35	54.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2	418333	LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG	046	02	261,300,559	404,103,460	0	0	261,566,452	399,035,581	0	0	265,893	5,067,879	0	0	0.10	1.25	0.00	0.00	45.35	54.65	0.00	0.00	0.05	0.68	0.00	0.00	0.73	0.37	100.00
3	418333	LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG	046	03	243,033,463	435,241,903	0	0	451,897,092	371,395,224	0	0	208,863,629	63,846,679	0	0	85.94	14.67	0.00	0.00	45.35	54.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	100.00
4	418333	LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG	046	04	254,500,539	331,031,959	0	0	254,500,540	325,930,221	0	0	1	5,101,738	0	0	0.00	1.54	0.00	0.00	45.35	54.65	0.00	0.00	0.00	0.84	0.00	0.00	0.84	0.39	100.00
5	418333	LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG	046	05	249,431,929	413,919,672	0	0	249,454,913	423,272,375	0	0	22,984	9,352,703	0	0	0.01	2.26	0.00	0.00	45.35	54.65	0.00	0.00	0.00	1.24	0.00	0.00	1.24	0.56	100.00
6	418333	LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG	046	06	451,863,825	264,408,672	0	0	461,466,396	264,512,944	0	0	9,602,571	104,272	0	0	2.13	0.04	0.00	0.00	45.35	54.65	0.00	0.00	0.97	0.02	0.00	0.00	0.99	0.63	100.00
7	418333	LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG	046	07	259,551,583	244,489,047	0	0	259,725,667	243,950,317	0	0	174,084	538,730	0	0	0.07	0.22	0.00	0.00	45.35	54.65	0.00	0.00	0.03	0.12	0.00	0.00	0.15	0.56	100.00
8	418333	LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG	046	08	264,184,581	317,428,669	0	0	264,065,728	317,430,569	0	0	118,853	1,900	0	0	0.04	0.00	0.00	0.00	45.35	54.65	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.50	100.00

LAPORAN UPG
TRIWULAN III
TAHUN 2024

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Alamat : Jl. Imam Bonjol No.37 RT.08, Kel.Melayu, Tenggarong Kutai Kartanegara
Telp. 0541-6720100 Email : lpp.smd@gmail.com

05 September 2024

Yth,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Kalimantan Timur
di -
Samarinda

SURAT PENGANTAR

Nomor : W18.PAS.PAS.7. PR.04.02- 2135

NO	Naskah Dinas yang Dikirimkan	Banyaknya	Keterangan
1.	Laporan Unit Pengendalian Gratifikasi Triwulan III Tahun 2024 pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong	1 Berkas	Demikian untuk menjadi periksa

KEPALA

Triana Agustin
NIP 198208282000122001

Tembusan:
1. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;
2. Direktur Jenderal Pemasyarkatan Kementerian Hukum dan HAM RI;
3. Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur

LAPORAN
TRIWULAN III TAHUN 2024

TENTANG
PROGRAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN UNIT KERJA LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

A. Pendahuluan

1. Umum

Dalam rangka mendorong pemerintah agar membuka diri dan membuka ruang partisipasi warga negara demi terciptanya transparansi pemerintahan (***open goverment partnership***) di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia perlu adanya Pengendalian Gratifikasi sebagai perwujudan dari integritas pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Upaya strategi percepatan melalui Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi secara nasional dibangun secara berkesinambungan dalam jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana ***Grand Design*** yang dibangun dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 yang harus dilaksanakan masing-masing kementerian/lembaga sesuai tugas dan fungsinya agar tepat sasaran.

Pelaporan gratifikasi bukan untuk menghukum tetapi dalam rangka membangun kesadaran pegawai sekaligus untuk memberikan perlindungan bagi pegawai yang rawan potensi adanya gratifikasi dalam pelaksanaan tugas, agar supaya ketentuan dan pelaksanaan pengendalian Gratifikasi menjadi lebih implementatif.

Kementerian Hukum dan HAM bekerja sama dengan Deputi Bidang Pencegahan KPK terus membangun dan berusaha untuk mewujudkan aparatur yang berintegritas dan Berbudaya Anti Korupsi dengan direvisinya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2014 diganti menjadi 58 Tahun 2016 tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian HAM, di dalam Peraturan tersebut tercantum pada Pasal 7 tentang terbentuknya Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di seluruh satuan kerja baik di Unit Utama, Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis sebagai bentuk pengendalian pencegahan adanya korupsi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, demi terciptanya lingkungan kerja yang kondusif dan berintegritas dalam peningkatan pelayanan masyarakat yang bersih dari praktik gratifikasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM khususnya di Unit Kerja Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dilaksanakan Program Pengendalian Gratifkasi untuk membentuk karakter pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang berintegritas guna mewujudkan *good governance* dan *clean government.*

Laporan Pengendalian Gratifikasi ini bertujuan untuk :

a. Membangun pengendalian gratifikasi, yang ditandai dengan kesadaran setiap pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM untuk berkomitmen menghindari praktik-praktik gratifikasi;

b. Membangun komitmen dan integritas pada setiap pegawai yang pada akhirnya membangun integritas pegawai dalam pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan anti korupsi;

c. Mewujudkan kinerja Kementerian Hukum dan HAM sebagai Zona Integritas dan Wilayah Bebas dari Korupsi, serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani baik secara individu maupun organisasi.

3. Ruang Lingkup

Program Pengendalian Gratifikasi mencakup upaya-upaya pencegahan terhadap praktik gratifikasi pada seluruh unit satuan kerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

4. Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

b. Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

c. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);

d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

e. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

f. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

g. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

B. Kegiatan yang Dilaksanakan Dan Hasil yang Dicapai

No	Kegiatan	Hasil yang Dicapai	Data Dukung
1	Pejabat Administrasi Pelaksana Eselon IV melakukan sosialisasi kepada Warga Binaan tentang gratifikasi	Mencegah adanya gratifikasi yang dilakukan antara Petugas dan Warga Binaan	Dokumentasi kegiatan (terlampir)
2	Sosialisasi terkait pencegahan gratifikasi oleh Kalapas kepada seluruh Petugas Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong	Petugas memahami tentang pengendalian gratifikasi	
3	Diseminasi media sosial pesan anti gratifikasi		
4	Pemasangan Banner		

C. Simpulan & Saran

1. Simpulan

Kementerian Hukum dan HAM terus membangun dan berusaha dalam mewujudkan aparatur yang berintegritas dan Berbudaya Anti Korupsi dengan direvisinya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2014 diganti menjadi 58 Tahun 2016 tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan terbentuknya Unit Pengendalian Gratifikasi di seluruh satuan kerja sebagai bentuk pengendalian pencegahan adanya korupsi serta gratifikasi.

2. Saran

a. Diharapkan dengan telah direvisinya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dapat membangun kesadaran setiap pegawai untuk berkomitmen menghindari praktik-praktik gratifikasi;

b. Diharapkan dengan adanya Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di setiap satuan kerja dapat membangun komitmen dan integritas pada setiap pegawai yang pada akhirnya membangun integritas Kementerian Hukum dan HAM khususnya dalam pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan anti korupsi.

D. Penutup

Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong diharapkan mampu mewujudkan petugas yang berintegritas dan berbudaya anti korupsi dan wilayah bebas dari korupsi di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

Demikian Laporan ini dibuat sebagai bahan informasi dan evaluasi Program Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

MENGETAHUI
KEPALA LAPAS

TRIANA AGUSTIN
NIP. 198208282000122001

Tenggarong, 05 September 2024
KETUA UPG

SITI MAIMUNAH
NIP. 197105131991032001

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Alamat : Jl. Imam Bonjol No.37 RT.08, Kel.Melayu, Tenggarong Kutai Kartanegara
Telp. 0541-6720100 Email : lpp.smd@gmail.com

DOKUMEN PENDUKUNG
PROGAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

1. Data Penyampaian Pelaporan Gratifikasi Pada Triwulan III Tahun 2024

No	Nama Pelopor	Jabatan	Tanggal/Penerimaan Penolakan	Pemberi Gratifikasi	Jenis Laporan(Penerimaan/Penolakan	Objek Gratifikasi	Pemanfaatan Objek Gratifikasi	Keterangan
				NIHIL				

2. Diseminasi Media Sosial Anti Gratifikasi

No.	Jenis/Media Sosialisasi	Lokasi	Dokumentasi
1	Sosialisasi tentang Program Pengendalian Gratifikasi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong Tautan : https://www.instagram.com/p/CpRPnS-pEMZ/	Instagram LPP Tenggarong : @lpp_tenggarong	

3. Sosialisasi Gratifikasi Secara Mandiri

No.	Nama/Tema kegiatan	Uraian Kegiatan	Dokumentasi
1.	Kepala KPLP melakukan sosialisasi kepada Warga Binaan tentang gratifikasi	**Narasumber:** Ka.KPLP **Waktu Pelaksanaan:** 15 Agustus 2024 **Tempat:** Blok Hunian LPP Tenggarong **Peserta:** Warga Binaan	

2.	Penguatan terkait pencegahan gratifikasi oleh Kalapas kepada Pejabat Struktural Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong	**Narasumber:** Kalapas **Waktu Pelaksanaan:** 21 Agustus 2024 **Tempat:** Ruang Kepala LPP Tenggarong **Peserta:** Pejabat Struktural	

4. Keterlibatan Stakeholder dalam Implementasi Pengendalian Gratifikasi

No.	Nama/Tema kegiatan	Uraian Kegiatan	Dokumentasi
	Upaya pencegahan gratifikasi oleh Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Pusaka (LKBH Pusaka) kepada Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong	**Narasumber:** Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Pusaka (LKBH Pusaka) **Waktu Pelaksanaan:** 10 Agustus 2024 **Tempat:** Ruang Kepala LPP Tenggarong **Peserta:** Warga Binaan	

5. Banner Tolak Gratifikasi

No.	Unit Kerja/Ruang	Dokumentasi
1.	Ruang Layanan Publik	

2.	Halaman Kantor	
3.	Halaman parkir	

K E P A L A

[illegible]

Triana Agustin

NIP 198208282000122001

DRAFT

SURAT PEMBERITAHUAN
HABIS MASA
PENAHANAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Alamat : Jl. Imam Bonjol No.37 RT.08 Kel. Melayu Tenggarong- Kutai Kartanegara
Telp. (0541) 6720100 Email : lpp.smd@gmail.com

Nomor : W.18.PAS.PAS.7-PK.01.01-2140 30 Agustus 2024
Lampiran : -
Perihal : Surat Pemberitahuan Akan Habis Masa Penahanan an. **Lailatul Magfiroh Binti Moh. Solli, dkk.**

Yth.
Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara
di-
Tenggarong

Memperhatikan Surat Penetapan Penahanan dari Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara yang akan berakhir, maka dengan ini kami informasikan nama–nama Tahanan yang akan habis masa penahanannya :

No.	No.Registrasi	Nama Tahanan	Tgl.Nomor Surat Penahanan	Perkara	Tgl. 10 Hari Akan Habis Masa Penahanan	Tgl. Habis Masa Penahanan
1	AII.019.2024	Lailatul Magfiroh Binti Moh. Solli	21 Agustus 2024 PRINT-1779/O.4.12/Enz.2/08/2024	Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009	30/08/2024	09/09/2024
2	AII.020.2024	Farida Afriyani Binti H. Abdul	04 September 2024 PRINT-1898/O.4.12/Enz.2/09/2024	Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009	13/09/2024	23/09/2024

Selanjutnya mohon untuk diterbitkan surat perpanjangan penahanan bagi nama-nama tahanan tersebut diatas.

Demikian atas perhatian dan kerjasama diucapkan terima kasih.

KEPALA

Triana Agustin
NIP. 198208282000122001

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur;
2. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur.

[illegible]

PERMINTAAN LITMAS
USULAN
PEMBEBASAN
BERSYARAT

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jl. Imam Bonjol No. 37, Kelurahan Melayu, Tenggarong, Kutai Kartanegara
Telp 0541-6720100

Nomor : W.18.PAS.PAS.7-PK.04.01- 1873 Tenggarong, 06 Agustus 2024
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Permintaan Litmas Usulan
Pembebasan Bersyarat (PB) An. Ervina Binti Juan , dkk

Yth.
Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Samarinda
Di -
Samarinda

Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan pasal 10 (1) huruf f dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, dengan hormat kami mohon kiranya dapat dibuatkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) untuk Permintaan Litmas Usulan Pembebasan Bersyarat (PB) sebanyak 8 (delapan) orang beserta hasil ISPN dan Laporan Hasil Assesment RRI Kriminogenik terhadap Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong (Data warga binaan terlampir).

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala,

Triana Agustin
NIP. 198208282000122001

Tembusan :
1. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI di Jakarta
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur di Samarinda

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jl. Imam Bonjol No. 37 Kel. Melayu Tenggarong, Kutai Kartanegara
Telepon 0541- 6720100, Email : lpptenggarong@gmail.com

DATA-DATA ADMINISTRATIF WARGA BINAAN DAN MASA PENTAHAPAN PEMBINAAN

No.	Nama WBP	No. Reg	Ekspirasi	Nama dan Alamat Penjamin	Tindak Pidana/Pasal/Lama Pidana	Tgl.SPP/Tgl.Vonis/Nomor Vonis	Tahapan Pembinaan			Pendidikan	Agama	Ket.	Nama PPK
							1/3	1/2	2/3				
1	Hasnah Binti H. Kaco	BI.012.2023	17/12/2026	Suwardi (Suami) Jalan Kapitan Toko Lima RT. 005 Kel. Muara Badak Ilir, Kec. Muara Badak, Kab. Kutai Kartanegara. No. Telp. 081255171762	Narkotika/Pasal 112 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009/4 Tahun 8 Bulan, Denda Rp. 800.000.000, Sub. 6 Bulan	Tgl SPP 03-10-2022 /Tgl vonis 12-01-2023 No. 535/PID.SUS/2022/PN TRG	07/11/2023	13/08/2024	26/05/2025	SD	Islam	Pembebasan Bersyarat (PB)	Bunga Noviyanti
2	Nur Meli Binti Busran (Alm)	BI.088.2023	21/12/2026	Agus (Adik Kandung) Perum SIP Blok. H6 No.82 RT. 32 Kel. Sambutan Kec. Sambutan. No. Telp. 083153339470	Narkotika/Pasal 112 UU RI No.35 Tahun 2009/4 Tahun 6 Bulan, Denda Rp. 800.000.000 Sub. 1 Bulan	Tgl SPP 21-11-2022/Tgl Vonis 16-03-2023 No. 212/Pid.Sus/2023/PN.SMR	21/12/2023	16/09/2024	19/06/2025	SD	Islam	Pembebasan Bersyarat (PB)	Bunga Noviyanti
3	Wulan Ayu Lestari Binti Bagus S	BI.061.2023	06/02/2027	Sudirman Nuntji (Mertua) Jl. KH. Wahid Hasyim Gg. Pinang No. 34 RT. 14 Kel. Sempaja Selatan Kec. Samarinda Utara. No. Telp. 085250515911	Narkotika/Pasal 112 UU RI No. 35 Tahun 2009/5 Tahun, Denda Rp. 800.000.000, Sub. 2 Bulan	Tgl SPP 19-08-2022/ Tgl vonis 28-03-2023 No. 82/Pid.Sus/2023/PN.SMR	03/10/2023	29/07/2024	31/05/2025	SMK	Islam	Pembebasan Bersyarat (PB)	Randy Mamola
4	Meldhina Putri Larasati Binti Maryono (Alm)	BI.028.2022	22/01/2028	Emmy Sutrisnowati (Ibu Kandung) Jl. Serobong No. 09 RT. 23 Kel. Prapatan Kec. Balikpapan Kota. No. Telp. 081521916564	Narkotika/Pasal 114 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009/7 Tahun 10 Bulan, Denda Rp. 1.000.000.000, Sub. 2 Bulan	Tgl SPP 22-03-2021/Tgl vonis 06-09-2021 No. 260/Pid.Sus/2021/PN Bpp	28/10/2022	15/02/2024	10/06/2025	SMA	Islam	Pembebasan Bersyarat (PB)	Randy Mamola
5	Susanti Binti Usman (Alm)	BI.033.2021	02/02/2028	Robbi Yatul Adawiyah (Anak Kandung) Jl. Lombok RT.16 Kel. Petung Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara. No. Telp. 085820133193	Narkotika/Pasal 114 (2) UU RI No. 35 Tahun 2009/8 Tahun, Denda Rp. 1.000.000.000, Sub 3 Bulan	Tgl SPP 28-11-2020/Tgl Vonis 23-02-2021 No. 14/Pid.Sus/2021/PN.Pnj	25/09/2022	28/01/2024	28/05/2025	SD	Islam	Pembebasan Bersyarat (PB)	Evi Puspitasari
6	Nurjanah Binti Rahmadi	BI.139.2019	15/05/2029	Rahmadi (Ayah Kandung) Jl. Gerilya H.Hasan Baseri RT. 02 RW. 1 Desa Lunjuk Kec. Batang Alai Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan. No. Telp. 085787045463	Narkotika/Pasal 114 (2) UU RI NO 35 Tahun 2009/12 tahun, Denda Rp. 1.000.000.000, Sub 6 Bulan	Tgl SPP 21-11-2018 /Tgl vonis 10-04-2019 No. 75/PID.SUS/2019/PN TRG	05/05/2021	05/05/2023	05/05/2025	SD	Islam	Pembebasan Bersyarat (PB)	Fatimatuzuhra
7	Rahmawati Binti Johansyah (Alm)	BI.075.2023	16/12/2026	Rusmanto (Suami) Jl. MT. Haryono RT. 15 Kel. Damai Bahagia Kec. Balikpapan Selatan. No. Telp. 082298023747	Narkotika/ Pasal 112 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009/4 Tahun 6 Bulan, Denda Rp 800.000.000, Sub. 3 Bulan	Tgl SPP 16-11-2022 / Tgl vonis 15/03/2023 No. 38/Pid.Sus/2023/PN Bpp	16/12/2023	11/09/2024	14/06/2025	SMP	Islam	Pembebasan Bersyarat (PB)	Evi Puspitasari
8	Patimah Binti Mursani	BI.139.2023	21/02/2027	Selvia Agustina (Anak Kandung) Desa Songka RT. 001 Kec. Batu Sopang Kab. Paser. No. Telp. 082250803564	Narkotika/ Pasal 112 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009/4 Tahun 6 Bulan, Denda Rp 800.000.000, Sub. 6 Bulan	Tgl SPP 22/01/2023 / Tgl vonis 13/04/2023 No. 48/Pid.Sus/2023/PN Tgt	21/02/2024	17/11/2024	20/08/2025	Tidak sekolah	Islam	Pembebasan Bersyarat (PB)	Fatimatuzuhra

Tenggarong, 04 September 2024
Kepala

Triana Agustin
NIP. 1982082000122001

LAPORAN PEMBINAAN KEPRIBADIAN DAN PEMBINAAN KEMANDIRIAN

LAPORAN KEGIATAN
PEMBINAAN KEPRIBADIAN
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
BULAN JULI 2023

A. PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan menegaskan bahwa sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas, serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan ditekankan pada kegiatan pembinaan kepribadian dan kegiatan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan kepada pembinaan bakat dan keterampilan agar warga binaan pemasyarakatan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

B. MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN :

Menyadarkan mereka agar dapat menjadi warga negara yang baik yang dapat berbakti bagi bangsa dan negaranya. Pembinaan kepribadian bagi warga binaan pemasyarakatan, khususnya bidang kesenian merupakan salah satu bentuk kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan bakat seni para warga binaan pemasyarakatan.

C. RUANG LINGKUP

Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

D. DASAR

1. Undang – undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia(HAM);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 31 Tahun 1999 (31/1999) Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1999 Tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

5. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
6. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan TataCara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;

E. KEGIATAN

Pelaksaan kegiatan Pembinaan Kepribadian (Kesenian) dilaksanakan pada :

Hari / tanggal : Rabu, 31 Juli 2024
Pukul : 08.00 s.d 12.00 wita
Tempat : Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tenggarong
Peserta : 7 orang Warga Binaan Lapas Perempuan Tenggarog
Pengawal : 7 orang Petugas Lapas Perempuan Tenggarong
Pendamping : 2 orang Petugas Lapas Perempuan Tenggarong

F. PENUTUP

Demikian Laporan Kegiatan Pembinaan Kepribadian (Kesesnian) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tenggarong ini disampaikan, atas kerjasama dan partisipasi para pihak dengan terlaksananya kegiatan tersebut kami ucapkan terima kasih.

Tenggarong, 31 Juli 2024
Plh. Kepala

Endang Utmiati
NIP 197505142000032001

DOKUMENTASI KEGIATAN KEPRIBADIAN (KESENIAN) TAHUN 2024 DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

Dokumentasi pelaksanaan pengarahan kepada Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong tentang pentingnya pendidikan sebagai upaya dalam **meningkatkan jumlah Narapidana yang memperoleh pendidikan.**

Hari/Tanggal : Senin, 19 Agustus 2024
Tempat : Blok Hunian
Pengarahan kepada WBP terkait kejar paket

LAPORAN KEGIATAN
PELAKSANAAN PEMBINAAN KEMANDIRIAN
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
zLEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

A. PENDAHULUAN

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan yang dibentuk sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-10.OT.01.01 Tahun 2016, tentang Pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru, Jakarta, Pontianak, Palangkaraya, Samarinda, Martapura, Denpasar, dst.

Lembaga Pemasyarakatan secara umum mempunyai fungsi yaitu Menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong yang saat ini dihuni oleh 316 (Tiga Ratus Enam Belas) orang memberikan Pembinaan narapidana salah satunya berupa kegiatan kerja untuk mengasah bakat dan keterampilan narapidana agar dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

B. MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN

1. MAKSUD

   Pembinaan Kemandirian dilaksanakan dengan maksud untuk membentuk Sumber Daya Manusia yang berdaya guna dan Mandiri.

2. TUJUAN
   a. Umum

      Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Kemandirian dalam pada Lembaga Pemasyarakat Perempuan Kelas IIA Tenggarong pada Bidang Manufaktur, Bidang Agribisnis dan Bidang Jasa.

   b. Khusus
      1. Memberikan bekal bagi warga binaan supaya berdaya guna dan mandiri.
      2. Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan yang bermanfaat, berilmu, berakhlak dan berguna untuk diri sendiri, keluarga, bangsa dan negara.
      3. Mampu bekerja dimasyarakat sebagai manusia yang terampil dan mandiri sehingga diterima di lingkungan masyarakat.

C. KEGIATAN

1. Bidang Manufaktur

a. Waktu

Kegiatan Kemandirian Bidang Manufaktur yang dilaksananakan secara rutin dalam Bulan Juli Sebanyak 27 (Dua Puluh Tujuh) Kegiatan, pada tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30 dan 31 Juli 2024 Waktu Pelaksanaan kegiatan dimulai Pukul 09.00 Wita s.d Pukul 15.00 Wita. Untuk kegiatan handycraft dan menjahit dilaksanakan pada Ruang Kegiatan Kerja Kantor Lapas Perempuan.

b. Pelaksanaan Kegiatan

1) Peserta

Kegiatan Manufaktur diikuti oleh 27 (Dua Puluh Tujuh) orang Warga Binaan Pemasyarakatan, yang terdiri dari 19 (Sembilan Belas) orang WBP Kegiatan Handycraft dan 8 (Delapas) orang WBP kegiatan Menjahit.

2) Instruktur

Instruktur Kegiatan Manufaktur adalah 4 (Empat) Orang WBP yang dinilai mempunyai kemampuan lebih dari peserta kegiatan yang lain sehingga dapat membantu mengajarkan keterampilan dalam bidang Manufaktur.

c. Kegiatan pembinaan kemandirian bidang manufaktur pada bulan Juli 2024 meliputi:

1) Kegiatan rutin menjahit dan Handycraft;
2) Penyerahan sertifikat pelatihan kepada WBP yang menjalankan reintegrasi PB
3) Kegiatan Pelatihan Kemandirian Tataboga Pembuatan Jajanan Bumi bekerjasama dengan Laskar Bunga Pertiwi dan Mercy Ministry (08 Juli 2024)
4) Kegiatan Pameran Kaltim Expo dalam Rangka HUT RI dan EBIEF di Convention Hall Samarinda (26 Juli – 30 Juli 2024)

d. Hasil kegiatan pembinaan kemandirian bidang manufaktur

1) Menjahit dan Handycraft
   a. Peci (21), Tas (37), Sarung Bantal (8), Seprei (1), Bantal (10), Jahitan/ Permak (94), Gantungan Nama (39).
   b. Hasil Penjualan Rp 10.515.000,-
   c. PNBP Rp 1.314.375,-

2. Bidang Agribisnis

a. Waktu dan Tempat

Kegiatan Kemandirian Bidang Agribisnis Pertanian yang dilaksananakan secara rutin dalam Bulan Juli Sebanyak 27 (Dua Puluh Tujuh) Kegiatan, pada tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30 dan 31 Juli 2024 Waktu pelaksanaan kegiatan dimulai dari Pukul 09.00 Wita s.d Pukul 11.00 Wita.

Untuk Kegiatan Kemandirian Bidang Agribisnis Pertanian dilaksanakan pada Area Beranggang Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

b. Pelaksanaan Kegiatan

1) Peserta

Kegiatan Pertanian diikuti oleh 8 (Delapan) orang Warga Binaan Pemasyarakatan

2) Instruktur

Instruktur Kegiatan Pertanian adalah 2 (Dua) Orang WBP yang dinilai mempunyai kemampuan lebih dari peserta kegiatan yang lain sehingga dapat membantu mengajarkan keterampilan dalam bidang Agribisnis Pertanian.

c. Kegiatan Kemandirian Bidang Agribisnis Pertanian pada bulan Juli 2024 meliputi:

1) Kegiatan pembinaan kemandirian rutin bidang agribisnis (pertanian), meliputi perawatan dan kebersihan area lahan pertanian;
2) Kegiatan pemanenan dan pemasaran tanaman hasil pertanian;

d. Hasil kegiatan pembinaan kemandirian bidang agribisnis

1) Pertanian

a. Buah Pepaya (73 pack), Sawi (33), Pisang (11), Jamur (25,15 kg), Terong (1/2 kg)
b. Hasil Penjualan Rp 2.338.000,-
c. PNBP Rp 292.250,-

3. Bidang Jasa

a. Waktu dan Tempat

Kegiatan Pembinaan Kemandirian Bidang Jasa dalam bulan Juli Sebanyak 27 (Dua Puluh Tujuh) Kegiatan, pada tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30 dan 31 Juli 2024 Waktu Pelaksanaan kegiatan dimulai Pukul 09.00 Wita s.d Pukul 15.00 Wita.

Untuk kegiatan pembinaan kemandirian bidang jasa kecantikan secara rutin Pelaksanaan kegiatan Jasa salon berada di Area Ruang Kerja Salon. Sedangkan untuk kegiatan jasa laundry dilaksanakan di area beranggang (ruang kerja laundry)

b. Pelaksanaan Kegiatan

1) Peserta

Kegiatan Salon Kecantikan diikuti oleh 4 (Empat) orang WBP untuk kegiatan Salon, untuk kegiatan jasa Laundry diikuti oleh 15 (lima belas) orang WBP

2) Instruktur

Instruktur Kegiatan Jasa adalah 2 (dua) Orang WBP yang dinilai mempunyai kemampuan lebih dari peserta kegiatan yang lain sehingga dapat membantu mengajarkan keterampilan dalam bidang Jasa

c. Kegiatan pembinaan kemandirian bidang jasa, bulan Juli 2024 meliputi:

1) Kegiatan rutin pembinaan kemandirian jasa Salon dan Laundry
2) Kegiatan jasa salon dengan costumer sebanyak 46 (Empat Puluh Enam) orang.

d. Hasil kegiatan pembinaan kemandirian bidang jasa ;

1) Salon
   a. Smoothing (11), Potong Rambut (10), Masker (6), Toning (6), Catok (8), Warna (3) dan Jasa (2)
   b. Hasil Jasa Rp 4.695.000,-
   c. PNBP Rp 586.875,-

2) Laundry
   a. Cuci Komplit 262,2 Kg
   b. Hasil Jasa Rp 3.676.900,-
   c. PNBP Rp 459.612,-

4. **Pelaksanaan**
   a. WBP dilakukan Bon oleh Seksi Bimbingan Kerja
   b. Pemeriksaan dan Penggeledahan dilakukan oleh Anggota Regu Pengamanan pada saat WBP Keluar Blok Hunian
   c. Pemeriksaan Lalu Lintas WBP Oleh Petugas P2U didampingi Seksi Kegiatan Kerja
   d. Pengawasan dan pencatatan penggunaan Sarana Kerja kegiatan oleh petugas Subsi Sarana Kerja
   e. Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan oleh Petugas seksi kegiatan kerja
   f. Pemeriksaan dan penggeledahan WBP setelah selesai melakukan kegiatan kerja oleh petugas seksi kegiatan kerja.

D. PENUTUP

Demikian Laporan Kegiatan Pembinaan Kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Bidang Manufaktur, Bidang Jasa dan Bidang Agribisnis di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong ini disampaikan, untuk menjadi periksa.

Tenggarong, 01 Agustus 2024

Mengetahui
Plh Kepala

Endang Utmiati
NIP.197505142000032001

Kasi Giatja

Hatmawati
NIP.198005272005122001

DOKUMENTASI KEGIATAN PEMBINAAN KEMANDIRIAN
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

1. WBP dilakukan Bon oleh Seksi Bimbingan Kerja

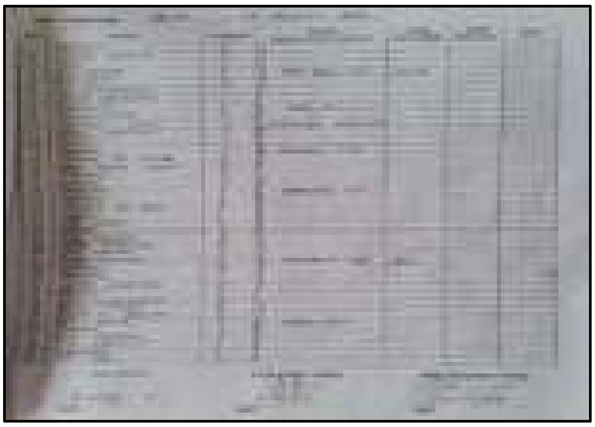

2. Pemeriksaan dan Penggeledahan dilakukan oleh Anggota Regu Pengamanan pada saat WBP Keluar Blok Hunian

3. Pemeriksaan Lalu Lintas WBP Oleh Petugas P2U didampingi Seksi Kegiatan Kerja

4. kegiatan oleh petugas Subsi Sarana Kerja

5. Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan oleh Petugas seksi kegiatan kerja

6. Pemeriksaan dan penggeledahan WBP setelah selesai melakukan kegiatan kerja oleh petugas seksi kegiatan kerja.

DOKUMENTASI KEGIATAN PEMBINAAN KEMANDIRIAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN BIDANG MANUFAKTUR DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

1. Kegiatan Pembinaan Rutin Bidang Manufaktur (Menjahit dan Handycraft)

2. Penyerahan sertifikat pelatihan kepada WBP yang bebas dan menjalani reintegrasi (PB)

3. Kegiatan Pelatihan Kemandirian Tataboga Pembuatan Jajanan Bumi bekerjasama dengan Laskar Bunga Pertiwi dan Mercy Ministry (08 Juli 2024)

4. Kegiatan Pameran Kaltim Expo dalam Rangka HUT RI dan EBIEF di Convention Hall Samarinda (26 Juli – 30 Juli 2024)

WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN BIDANG AGRIBISNIS
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

1) Kegiatan pembinaan kemandirian rutin bidang agribisnis (pertanian), meliputi perawatan dan kebersihan area lahan pertanian;

2) Kegiatan pemanenan dan pemasaran tanaman hasil pertanian;

DOKUMENTASI KEGIATAN PEMBINAAN KEMANDIRIAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN BIDANG JASA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

1. Kegiatan rutin pembinaan kemandirian jasa (salon)

2. Kegiatan rutin pembinaan kemandirian jasa (Laundry)

DOKUMENTASI PENGARAHAN KEPADA WARGA BINAAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Alamat : Jl. Imam Bonjol No.37 Rt.08 Kelurahan Melayu, Tenggarong – Kutai Kartanegara
Telp. 0541-6720100 Email : lpp.smd@gmail.com

Dokumentasi pelaksanaan pengarahan kepada Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong tentang pentingnya pendidikan sebagai upaya dalam **meningkatkan jumlah Narapidana yang memperoleh pendidikan.**

Hari/Tanggal : Senin, 19 Agustus 2024
Tempat : Blok Hunian
Pengarahan kepada WBP terkait kejar paket

FORM 7D
PENJATUHAN
HUKDIS

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jl. Imam Bonjol No 37 Kampung Melayu Tenggarong, Kutai Kartanegara
Telepon 0541-6720100

FORMULIR KAMTIB 7D
LAPORAN PENINDAKAN GANGGUAN KAMTIB
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN WBP
BULAN : JULI 2024

NO	JENIS GANGGUAN		IDENTITAS WBP	STATUS	TGL/HARI/JAM KEJADIAN	NO SK PENJATUHAN DISIPLIN	HUKUMAN DISIPLIN	TINDAK LANJUT	KETERANGAN/URAIAN KEJADIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1. Ringan	a. Tidak menjaga kebersihan diri dan lingkungan							
		b. Meninggalkan blok hunian tanpa izin kepada petugas blok							
		c. Tidak mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan							
		d. Tidak mengikuti apel pada waktu yang telah ditentukan							
		e. Mengenakan anting,kalung,cincin dan ikat							
		f. Melakukan perbuatan atau mengeluarkan perkataan yang tidak pantas dan melanggar norma kesopanan atau kesusilaan							
		g. Melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang tim pengamat pemasyarakatan termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan hukuman disiplin tingkat ringan							
	2. Sedang	a. Memasuki steril area tanpa izin petugas							
		f. Melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori yang mendapatkan hukuman disiplin tingkat ringan secara berulang lebih dari satu kali							
		g. Melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang tim pengamat pemasyarakatan termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang							
	3. Berat	a. Tidak mengikuti program pembinaan yang telah ditetapkan							
		b. Mengancam, melawan, atau melakukan penyerangan terhadap petugas							
		c. Membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya							
		d. Merusak fasilitas Lapas atau Rutan							
		e. Mengancam, memprovokasi, atau perbuatan lain yang menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban							
		f. Memiliki, membawa, atau menggunakan alat komunikasi atau alat elektronik							
		g. Membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol							
		h. Membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan atau mengkonsumsi narkotika dan obat terlarang serta zat adiktif lainnya							
		i. Melakukan upaya melarikan diri atau membantu narapidana atau tahanan lain untuk melarikan diri							
		k. Melakukan pemasangan atau menyuruh orang lain melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian							
		l. Melengkapi untuk kepentingan pribadi diluar ketentuan yang berlaku dengan alat pendingin, kipas angin, kompor, televisi, slot pintu, dan atau/ alat elektronik lainnya							
		m. Melakukan perbuatan asusila atau penyimpangan sexsual							
		n. Melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, penipuan							
		o. Menyebarkan ajaran sesat							
		p. Melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori yang mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang secara berulang lebih dari satu kali atau berdasarkan penilaian							
		q. Melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang TPP termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan hukuman disiplin tingkat berat							

NIHIL

Tenggarong, 01 Agustus 2024
Plh. KEPALA

ENDANG UTMIATI
NIP.19750514 200003 2 001

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jl. Imam Bonjol No 37 Kampung Melayu Tenggarong, Kutai Kartanegara
Telepon 0541-6720100

FORMULIR KAMTIB 7D
LAPORAN PENINDAKAN GANGGUAN KAMTIB
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN WBP
BULAN : AGUSTUS 2024

NO	JENIS GANGGUAN		IDENTITAS WBP	STATUS	TGL/HARI/JAM KEJADIAN	NO SK PENJATUHAN DISIPLIN	HUKUMAN DISIPLIN	TINDAK LANJUT	KETERANGAN/URAIAN KEJADIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1. Ringan	a. Tidak menjaga kebersihan diri dan lingkungan							
		b. Meninggalkan blok hunian tanpa izin kepada petugas blok							
		c. Tidak mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan							
		d. Tidak mengikuti apel pada waktu yang telah ditentukan							
		e. Mengenakan anting,kalung,cincin dan ikat							
		f. Melakukan perbuatan atau mengeluarkan perkataan yang tidak pantas dan melanggar norma kesopanan atau kesusilaan							
		g. Melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang tim pengamat pemasyarakatan termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan hukuman disiplin tingkat ringan							
	2. Sedang	a. Memasuki steril area tanpa izin petugas							
		f. Melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori yang mendapatkan hukuman disiplin tingkat ringan secara berulang lebih dari satu kali							
		g. Melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang tim pengamat pemasyarakatan termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang							
	3. Berat	a. Tidak mengikuti program pembinaan yang telah ditetapkan							
		b. Mengancam, melawan, atau melakukan penyerangan terhadap petugas							
		c. Membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya							
		d. Merusak fasilitas Lapas atau Rutan							
		e. Mengancam, memprovokasi, atau perbuatan lain yang menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban							
		f. Memiliki, membawa, atau menggunakan alat komunikasi atau alat elektronik							
		g. Membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol							
		h. Membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan atau mengkonsumsi narkotika dan obat terlarang serta zat adiktif lainnya							
		i. Melakukan upaya melarikan diri atau membantu narapidana atau tahanan lain untuk melarikan diri							
		k. Melakukan pemasangan atau menyuruh orang lain melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian							
		l. Melengkapi untuk kepentingan pribadi diluar ketentuan yang berlaku dengan alat pendingin, kipas angin, kompor, televisi, slot pintu, dan atau/ alat elektronik lainnya							
		m. Melakukan perbuatan asusila atau penyimpangan sexsual							
		n. Melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, penipuan							
		o. Menyebarkan ajaran sesat							
		p. Melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori yang mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang secara berulang lebih dari satu kali atau berdasarkan penilaian							
		q. Melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang TPP termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan hukuman disiplin tingkat berat							

NIHIL

Tenggarong, 02 September 2024
KEPALA

TRIANA AGUSTIN
NIP.19820828 200012 2 001

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Alamat : Jl. Imam Bonjol No.37 RT.08, Kel.Melayu, Tenggarong Kutai Kartanegara
Telp. 0541-6720100 Email : lpp.smd@gmail.com

10 Desember 2024

Yth,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Kalimantan Timur
di -
Samarinda

SURAT PENGANTAR

Nomor : W18.PAS.7. PW.01.01- 2989

NO	Naskah Dinas yang Dikirimkan	Banyaknya	Keterangan
1.	Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Triwulan IV Tahun 2024 pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong	1 Berkas	Demikian untuk menjadi periksa

KEPALA

Triana Agustin
NIP 198208282000122001

Tembusan:
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI.

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jalan: Imam Bonjol NO.37 RT.08 Kelurahan Melayu. Tenggarong - Kutai Kartanegara
Laman : http://lppsamarinda.kemenkumham.go.id/
E-mail : lpp.smd@gmail

Nomor : W18.PAS.7.PW.01.01- 2988 10 Desember 2024
Lampiran : 1(satu) berkas
Hal : Laporan Penyelenggaraan SPIP Triwulan IV Tahun 2024

Yth : Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kalimantan Timur
di
Samarinda

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.HH-02.PW.02.03 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.HH-02.PW.02.03 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, dengan ini kami sampaikan laporan Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong Triwulan IV Tahun 2024, dengan pokok-pokok sebagai berikut :

1. Kemajuan Penyelenggaraan SPIP

   Realisasi kemajuan penyelenggaraan SPIP sampai dengan Triwulan IV mencapai 100 % dari target pada tahun 2024 Capaian ini disebabkan :

   a. Pencapaian Realisasi kemajuan penyelenggaraan SPIP didukung dengan :

      1. Telah dibentuknya Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melalui Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong Nomor: W.18.PAS.PAS.7-0339-PW.01.01 Tahun 2024 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong pada tanggal 15 Januari 2024;

2. Telah dibentuknya SK Pembentukan Satuan Tugas dan Sekretariat Penyelenggaraan Manajemen Risiko melalui Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong Nomor: W.18.PAS.PAS.7-0747-PW.01.01 Tahun 2024 tentang Pembentukan Satuan Tugas dan Sekretariat Penyelenggaraan Manajemen Risiko Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong pada tanggal 25 Maret 2024;
3. Telah dibentuknya SK Tim Assesor Penilaian Mandiri Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melalui Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong Nomor: W18.PAS.PAS.7-0442-PW.01.01 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Assesor Penilaian Mandiri Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong pada tanggal 21 Februari 2024;
4. Telah dibentuknya SK Unit Pemilik Risiko (UPR) melalui Keputusan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong Nomor: W.18.PAS.PAS.7-0454-PW.01.01 Tahun 2024 tentang Pembentukan Unit Pemilik Risiko (UPR) Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong pada tanggal 21 Februari 2024;
5. Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong, pada tanggal 13 November 2024;
6. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong, pada tanggal 26 November 2024;

b. Adapun hambatan-hambatan yang ditemukan dalam proses penyelenggaraan SPIP di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong yaitu :
    1. Masih adanya beberapa pegawai yang belum memahami pelaksanaan SPIP dan Pembuatan Manajemen Risiko di Sub Bagian/Seksi di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

Rincian kemajuan penyelenggaraan SPIP dapat dilihat pada lampiran.

2. Rencana Tindaklanjut pada Triwulan selanjutnya

   Atas capaian tersebut, rencana tindaklanjut Triwulan I Tahun 2025 adalah :

   a. Untuk mengatasi hambatan/kondisi yang tidak mendukung dalam pencapaian target dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :

      Memaksimalkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada dengan merangkap beberapa tugas dalam pelaksanaan penerapan SPIP di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong;

   b. Rencana tindaklanjut untuk Triwulan selanjutnya dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :

      1. Mengirim pegawai/pejabat untuk mengikuti BIMTEK baik yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur baik secara langsung maupun melalui zoom, untuk meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) Pegawai di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong;
      2. Melakukan monitoring secara berjenjang dan memberikan motivasi serta arahan kepada seluruh pegawai tentang penting dan perlunya koordinasi antara JFU, JFT serta pejabat Struktural agar dapat terlaksananya SPIP secara maksimal dan dapat terealisasikannya Rencana Aksi Penanganan Risiko berdasarkan Manajemen Risiko yang telah dibuat di masing-masing Seksi di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

Demikian kami sampaikan, untuk menjadi periksa.

KEPALA

Triana Agustin
NIP 198208282000122001

Tembusan:
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM;
2. Inspektur Jenderal Kemeneterian Hukum dan HAM.

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jalan: Imam Bonjol NO.37 RT.08 Kelurahan Melayu. Tenggarong - Kutai Kartanegara
Laman : http://lpptenggarong.kemenkumham.go.id/
E-mail : lpptenggarong@gmail.com

LAPORAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) TRIWULAN IV TAHUN 2024 LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2013 tentang Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH-02.PW.02.03 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia RI Nomor 05 Tahun 2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor:M.HH-02.PR.03.01 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pelaporan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI;
5. Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP;
6. Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-690/K/DH/2012 tentang Pedoman Pemantauan Perkembangan Penyelenggaraan SPIP.

B. Tujuan SPIP

Sebagai media akuntabilitas pelaporan dan bahan pemantauan dan evaluasi atas penyelenggaraan SPIP di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

C. Ruang lingkup

Laporan ini meliputi penyelenggaraan SPIP di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

BAB II KEMAJUAN PENYELENGGARAAN SPIP

A. Persiapan

Realisasi persiapan penyelenggaraan SPIP Tahun 2024 dengan rincian kegiatan dalam tahap persiapan sebagai berikut :

a. Pembentukan Satgas
   1. Telah dilaksanakan pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melalui Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong Nomor: W.18.PAS.PAS.7-0339-PW.01.01 Tahun 2024 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong pada tanggal 15 Januari 2024;
   2. Telah dilaksanakan pembentukan Satuan Tugas dan Sekretariat Penyelenggaraan Manajemen Risiko melalui Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong Nomor: W.18.PAS.PAS.7-0747-PW.01.01 Tahun 2024 tentang Pembentukan Satuan Tugas dan Sekretariat Penyelenggaraan Manajemen Risiko Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong pada tanggal 25 Maret 2024;
   3. Telah dilaksanakan Pembentukan Tim Assesor Penilaian Mandiri Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melalui Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong Nomor: W18.PAS.PAS.7-0442-PW.01.01 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Assesor Penilaian Mandiri Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong pada tanggal 21 Februari 2024;
   4. Telah dilaksanakan Pembentukan Unit Pemilik Risiko (UPR) melalui Keputusan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong Nomor: W.18.PAS.PAS.7-0454-PW.01.01 Tahun 2024 tentang Pembentukan Unit Pemilik Risiko (UPR) Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong pada tanggal 21 Februari 2024;

b. Pemahaman (*Knowledge*)

   Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong, pada tanggal 13 November 2024 (**dokumen kegiatan terlampir)**.

c. Pemetaan (*Maping*)

   Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong, pada tanggal 26 November 2024 (**dokumen kegiatan terlampir**).

B. Pelaksanaan

a. Penilaian Resiko

   Penilaian risiko merupakan salah satu unsur penting dalam penerapan SPIP, karena dengan penilaian risiko akan diidentifikasi kendala/hambatan baik internal maupun eksternal yang akan mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran organisasi. Dengan penilaian risiko juga akan menentukan langkah antisipasi untuk diambil

cara terbaik agar apa yang menjadi rencana kegiatan dapat dilaksanakan dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam unsur penilaian risiko terdapat 2 (dua) sub unsur dan kegiatannya telah dibahas dalam forum rapat mitigasi risiko dengan hasil sebagai berikut:

I. Identifikasi Risiko (matrik terlampir dari masing-masing Seksi) terdiri dari :
    - Penetapan tujuan program/kegiatan;
    - Indentifikasi risiko.

II. Identifikasi Risiko (matrik terlampir dari masing-masing Seksi) terdiri dari :
    - Analisis Risiko;
    - Evaluasi Risiko;
    - Rencana Aksi Penanganan Risiko;
    - Pemantauan Risiko;
    - Pengendalian Kegiatan Risiko.

b. Pembangunan infrastruktur (*norming*)
Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong telah dilakukan terkait dengan perbaikan *area of improvement* dan pengelolaan risiko melalui pembentukan Tim Satgas SPIP Tahun 2024 yang mengawal dan mengoordinasikan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

c. Internalisasi / implementasi (*forming*)
Kegiatan yang telah dilakukan terkait Internalisasi/Implementasi SPIP di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong adalah: peningkatan pemahaman atas penyelenggaraan SPIP khususnya terkait dengan penguatan Maturitas SPIP (**dokumen terlampir**).

C. Pengembangan berkelanjutan (*Performing*)
Realisasi pengembangan berkelanjutan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong sampai dengan 10 Desember 2024 sudah sangat baik, tapi ada beberapa kegiatan yang akan di rencanakan di Triwulan Selanjutnya agar penyelenggaraan SPIP di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong terlaksana dengan maksimal, diantaranya yaitu :
Melakukan monitoring secara berjenjang dan memberikan motivasi serta arahan kepada seluruh pegawai tentang penting dan perlunya koordinasi antara JFU, JFT serta pejabat Struktural agar dapat terlaksananya SPIP secara maksimal dan dapat terealisasikannya Rencana Aksi Penanganan Risiko berdasarkan Manajemen Risiko yang telah dibuat di masing-masing Seksi di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

BAB III PENUTUP

A. Pelaksanaan rencana tindak lanjut
Atas capaian kerangka Penyelenggaraan SPIP Triwulan IV Tahun 2024 di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong, Rencana Tindak Lanjut di Triwulan I Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

a. Melakukan sosiaisasi rutin kepada seluruh Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong agar dapat terlaksananya SPIP secara maksimal dan dapat terealisasikannya Rencana Aksi Penanganan Risiko berdasarkan Manajemen Risiko yang telah dibuat di masing-masing Seksi di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.
b. Melakukan monitoring secara berjenjang dan memberikan motivasi serta arahan kepada seluruh pegawai tentang penting dan perlunya koordinasi antara JFU, JFT serta pejabat Struktural.

B. Hambatan, penyebab dan alternatif pemecahan

Adapun hambatan-hambatan yang ditemukan dalam proses penyelenggaraan SPIP di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong yaitu :

Masih adanya beberapa pegawai yang belum memahami pelaksanaan SPIP dan Pembuatan Manajemen Risiko di Sub Bidang/Bagian di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

Alternatif pemecahan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah :

a. Memaksimalkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada dengan merangkap beberapa tugas dalam pelaksanaan penerapan SPIP dan pembuatan Manajemen Risiko di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong;
b. Mengirim pegawai/pejabat untuk mengikuti BIMTEK yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur baik secara langsung maupun melalui zoom, untuk meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) Pegawai di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong;
c. Melakukan monitoring secara berjenjang dan memberikan motivasi serta arahan kepada seluruh pegawai tentang penting dan perlunya koordinasi antara JFU, JFT serta pejabat Struktural agar dapat terlaksananya SPIP secara maksimal dan dapat terealisasikannya Rencana Aksi Penanganan Risiko berdasarkan Manajemen Risiko yang telah dibuat di masing-masing Seksi di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

C. Rencana aksi Triwulan berikutnya yaitu melaksanakan sosialisasi serta melaksanakan pendampingan penerapan Manajemen Risiko pada masing-masing seksi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

D. Tindak lanjut penyelenggaraan SPIP di Triwulan I Tahun 2025 yaitu :

a. Melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan implementasi SPIP di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong;
b. Menyusun Laporan SPIP Triwulan I Tahun 2025 sesuai dengan format Laporan SPIP berdasarkan arahan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur;

c. Melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan SPIP di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tanggarong.

Tenggarong, 10 Desember 2024
KEPALA

Triana Agustin
NIP 198208282000122001

LAPORAN KEMAJUAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) TAHUN 2024
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

NO	TAHAPAN	INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	BUKTI DOKUMEN	VOLUME					% CAPAIAN
					RENCANA SATU TAHUN	REALISASI				
						TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	
A.	**PERSIAPAN**									
1.	Pemahaman	Jumlah laporan kegiatan sosialisasi/ FGD/ Diseminasi tentang SPIP	Jumlah Pegawai	Laporan kegiatan, daftar hadir, dan foto Sosialisasi tentang SPIP.	4	1	1	1	1	100 %
		Jumlah laporan kegiatan terkait SPIP	Laporan	Laporan kegiatan Sosialisasi SPIP, SK UPR, SK Tim Assesor, SK Satgas Sekretariat Penyelenggaraan Manajemen Risiko, dan SK Satgas SPIP	4	1	1	1	1	100 %
2.	Pemetaan	Jumlah Laporan Kegiatan SPIP di masing-masing Seksi pada LPP Tenggarong	Dokumen	Laporan Rencana Kegiatan pada tahun 2024 (RKT)	8	2	2	2	2	100 %
3.	Penyusunan Rencana Monitoring Kegiatan Penyelenggaraan	Jumlah dokumen rencana Monitoring	Dokumen	Laporan Monitoring dan Evaluasi SPIP	4	1	1	1	1	100 %
B.	**PELAKSANAAN**									
1.	Tingkat entitas (Eselon I, Kanwil/ Unit Pelaksana Teknis)	Jumlah dokumen penilaian risiko Level Entitas dan Aktifitas	Dokumen	Pernyataan Fakta Integritas	1	1	-	-	-	100 %
		Jumlah kebijakan/ prosedur/ pedoman dalam	Dokumen	Kebijakan/ SOP/ SK/ Nota dinas/ dokumen lainnya	4	4	-	-	-	100 %

		pembangunan / rehab infrastruktur								
2.	Tingkat Kegiatan (Kegiatan-kegiatan pada Eselon IV)	Jumlah dokumen penilaian risiko Level Entitas dan Aktifitas	Dokumen	Dokumen Profil Risiko Dan Peta Risiko	4	1	1	1	1	100 %
		Jumlah kebijakan/ prosedur/ pedoman dalam pembangunan / rehab infrastruktur	Dokumen	Kebijakan/ SOP/ SK/ Nota dinas/ dokumen lainnya	4	4	-	-	-	100 %
		Jumlah kegiatan internalisasi/ Implementasi	Kegiatan	Laporan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan SPIP	4	1	1	1	1	100 %
3.	Pengembangan Berkelanjutan	Jumlah rapat berkala	Kegiatan	Laporan dan daftar hadir	4	1	1	1	1	100 %
		Jumlah Laporan kemajuan penyelenggaraan SPIP	Dokumen	Dokumen SPIP triwulanan	4	1	1	1	1	100 %
		Presentase penyelesaian tindak lanjut	Dokumen	Laporan Tindak Lanjut Temuan BPK dan ITJEN tergabung dalam Kantor Wilayah	-	-	-	-	-	-
				JUMLAH	**45**	**18**	**9**	**9**	**9**	**100%**

PENETAPAN TUJUAN

Unit Pemilik Risiko : Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong
Periode Penerapan : Tahun 2024

No	Strategi/ Program/ Kegiatan	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Permasalahan
1	2	3	4	5
1	Pengelolaan Administratratif dan Fasilitatif Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	Belum dilakukan penghapusan BMN sebagai tindaklanjut pembangunan lanjutan Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong
2			Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	Kurangnya SDM baik Pejabat Struktural maupun JFU
3			Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	Pejabat Administrasi Eselon IV belum memiliki Tanda Tangan Elektronik
4			Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	Kesalahan penempatan dalam perekaman akun belanja
5			Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	Realisasi anggaran belum sesuai dengan rencana panarikan dana
6			Indeks kepuasan unit kerja di lingkungan Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong	Potensi terjadinya gratifikasi dan pungli
7	Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong	Terwujudnya pelayanan pemasyarakatan yang sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik, melalui peningkatan pengawasan dan pengelolaan layanan di bidang pemasyarakatan	Menurunnya tahanan yang overstaying	Masih terdapat Tahanan yang berstatus overstaying
8			Menurunnya persentase overkapasitas	Over kapasitas Warga Binaan Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong sebesar 150%
9			Menurunnya jumlah residivis	Masih terdapat Warga Binaan yang mengulangi tindak pidana
10			Meningkatnya jumlah Narapidana yang memperoleh pendidikan	Kurangnya minat program kejar paket bagi Warga Binaan
11	Pelaksanaan penegakan keamanan dan ketertiban	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban sesuai standar	Kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak Didik pelaku gangguan kamtib	Masih ada pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh Narapidana

Tenggarong, 10 Desember 2024
KEPALA

Triana Agustin
NIP 198208282000122001

IDENTIFIKASI RISIKO (DAFTAR RISIKO)

Unit Pemilik Risiko : Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong
Periode Penerapan : Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Permasalahan	Risiko		Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern yang Ada	Sisa Risiko
			Pernyataan	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang terkena		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	Belum dilakukan penghapusan BMN sebagai tindaklanjut pembangunan lanjutan Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong	Keterlambatan pembangunan lajutan Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong	Subbagian Tata Usaha	Belum ada tindaklanjut dari KPKNL	Eksternal	UC	Pengerjaan pembangunan lanjutan Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong tidak sesuai target	UPT	Melakukan usulan penghapusan BMN	Keterlambatan pembangunan lajutan Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong
2	Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	Kurangnya SDM baik Pejabat Struktural maupun JFU	Terjadi tumpang tindih beban tugas	Subbagian Tata Usaha	Purna Tugas Kepala Subbagian Tata Usaha dan kurangnya anggota regu pengamanan	Internal	C	Target kinerja tidak terpenuhi	UPT	Permintaan JFU	Terjadi tumpang tindih beban tugas
3	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	Pejabat Administrasi Eselon IV belum memiliki Tanda Tangan Elektronik	Terkendala dalam penggunaan aplikasi SRIKANDI	Subbagian Tata Usaha	Tidak ada tindaklanjut dari kendala pendaftaran tanda tangan elektronik	Internal	C	Pemenuhan target penggunaan aplikasi SRIKANDI tidak tercapai	UPT	Melakukan pendaftaran permohonan tanda tangan elektronik Pejabat Administrasi Eselon IV	Terkendala dalam penggunaan aplikasi SRIKANDI
4	Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	Kesalahan penempatan dalam perekaman akun belanja	Penatausahaan keuangan kurang optimal	Subbagian Tata Usaha	Keliru dalam memilih akun belanja	Internal	C	Penurunan nilai IKPA	UPT	Melakukan cross check setiap penginputan	Penatausahaan keuangan kurang optimal
5	Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	Realisasi anggaran belum sesuai dengan rencana panarikan dana	Penggunaan anggaran kurang optimal	Subbagian Tata Usaha	Kurangnya pengawasan berjenjang	Internal	C	Penurunan nilai IKPA	UPT	Rapat internal dengan pengguna anggaran	Penggunaan anggaran kurang optimal
6	Indeks kepuasan unit kerja di lingkungan Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong	Potensi terjadinya gratifikasi dan pungli	KKN mungkin saja terjadi	Subbagian Tata Usaha	Kurangnya penguatan integritas Pegawai	Internal	C	KKN semakin marak terjadi pada instansi lain	UPT	1. Melakukan internalisasi dan sosialisasi tentang gratifikasi dan pungli 2. Membentuk Tim Pengendali Gratifikasi dan Unit Pemberantas Pungli	KKN mungkin saja terjadi

7	Menurunnya tahanan yang overstaying	Masih terdapat Tahanan yang berstatus overstaying	Penyampaian vonis tidak tepat waktu	Seksi Binadik	Keterlambatan menerima putusan	Internal	C	Terlambat dalam perubahan status Tahanan	UPT	Melakukan permintaan vonis	Penyampaian vonis tidak tepat waktu
8	Menurunnya persentase overkapasitas	Over kapasitas Warga Binaan Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong sebesar 150%	Over kapasitas	Seksi Binadik	Masih banyak Warga Binaan yang tidak bisa integrasi	Internal	C	Mempersulit pengawasan, perawatan Lapas, dan pembinaan kurang maksimal	UPT	Optimalisasi dalam pelaksanaan program integrasi bagi Warga Binaan	Over kapasitas
9	Menurunnya jumlah residivis	Masih terdapat Warga Binaan yang mengulangi tindak pidana	Kurangnya kesadaran dan bakat Narapidana residivis	Seksi Binadik	Tidak ada efek jera dalam proses pidana	Internal	C	Overstaying	UPT	Optimalisasi dalam pembinaan kepribadian berupa kerohanian serta optimalisasi dalam pembinaan kemandirian sebagai bekal Narapidana	Kurangnya kesadaran dan bakat Narapidana residivis
10	Meningkatnya jumlah Narapidana yang memperoleh pendidikan	Kurangnya minat program kejar paket bagi Warga Binaan	Menurunnya persentase Narapidana yang memperoleh hak pendidikan	Seksi Binadik	Kurangnya kesadaran warga binaan perihal pentingnya pendidikan	Internal	C	Menurunnya kualitas pendidikan	UPT	Memberikan reward serta pengarahan rutin kepada warga binaan terkait pentingnya pendidikan	Menurunnya persentase Narapidana yang memperoleh hak pendidikan
11	Kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak Didik pelaku gangguan kamtib	Masih ada pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh Narapidana	Ketidakpatuhan warga binaan dalam menaati tata tertib	Seksi Adm Kamtib	Kurangnya kesadaran warga binaan	Internal	C	Kerusuhan	UPT	Memberikan punishment berupa isolasi dan Register F serta pengarahan kepada warga binaan	Ketidakpatuhan warga binaan dalam menaati tata tertib

Tenggarong, 10 Desember 2024
KEPALA

Triana Agustin
NIP 198208282000122001

ANALISIS RISIKO (PETA RISIKO)

Unit Pemilik Risiko : Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong
Periode Penerapan : Tahun 2024

No	Sisa Risiko	Kemungkinan		Dampak		Tingkat Risiko	Profil Risiko
		Uraian	Nilai	Uraian	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7 = 4 x 6	8
1	Keterlambatan pembangunan lajutan Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong	Moderat	3	Kementerian	5	15	Kuning
2	Terjadi tumpang tindih beban tugas	Pasti	5	Kantor Wilayah	3	15	Kuning
3	Terkendala dalam penggunaan aplikasi SRIKANDI	Hampir Pasti	4	Kantor Wilayah	3	12	Kuning
4	Penatausahaan keuangan kurang optimal	Kecil	2	UPT	2	4	Hijau
5	Penggunaan anggaran kurang optimal	Kecil	2	Kantor Wilayah	3	6	Biru
6	KKN mungkin saja terjadi	Kecil	2	UPT	3	6	Biru
7	Penyampaian vonis tidak tepat waktu	Sangat Kecil	1	UPT	2	2	Hijau
8	Over kapasitas	Pasti	5	UPT	2	10	Biru
9	Kurangnya kesadaran dan bakat Narapidana residivis	Kecil	2	UPT	2	4	Hijau
10	Menurunnya persentase Narapidana yang memperoleh hak pendidikan	Moderat	3	UPT	2	6	Biru
11	Ketidakpatuhan warga binaan dalam menaati tata tertib	Moderat	3	UPT	2	6	Biru

Tenggarong, 10 Desember 2024
KEPALA

Triana Agustin
NIP 198208282000122001

INDIKATOR RISIKO

Unit Pemilik Risiko : Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong
Periode Penerapan : Tahun 2024

No	Sisa Risiko	Tingkat Risiko	Prioritas Risiko	Toleransi Risiko	Indikator Risiko	
					Indikasi	Batas Aman
1	2	3	4	5	6	7
1	Keterlambatan pembangunan lajutan Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong	15	1	4	Belum ada tindaklanjut dari KPKNL	5
2	Terjadi tumpang tindih beban tugas	15	2	4	Purna Tugas Kepala Subbagian Tata Usaha dan kurangnya anggota regu pengamanan	5
3	Terkendala dalam penggunaan aplikasi SRIKANDI	12	3	3	Tidak ada tindaklanjut dari kendala pendaftaran tanda tangan elektronik	4
4	Penatausahaan keuangan kurang optimal	4	8	1	Keliru dalam memilih akun belanja	2
5	Penggunaan anggaran kurang optimal	6	5	1	Kurangnya pengawasan berjenjang	2
6	KKN mungkin saja terjadi	6	5	1	Kurangnya penguatan integritas Pegawai	2
7	Penyampaian vonis tidak tepat waktu	2	10	1	Keterlambatan menerima putusan	2
8	Over kapasitas	10	4	3	Masih banyak Warga Binaan yang tidak bisa integrasi	4
9	Kurangnya kesadaran dan bakat Narapidana residivis	4	9	1	Tidak ada efek jera dalam proses pidana	2
10	Menurunnya persentase Narapidana yang memperoleh hak pendidikan	6	7	1	Kurangnya kesadaran warga binaan perihal pentingnya pendidikan	2
11	Ketidakpatuhan warga binaan dalam menaati tata tertib	6	6	1	Kurangnya kesadaran warga binaan	2

Tenggarong, 10 Desember 2024
KEPALA

Triana Agustin
NIP 198208282000122001

RENCANA AKSI PENANGANAN RISIKO

Unit Pemilik Risiko : Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong
Periode Penerapan : Tahun 2024

No	Indikator Risiko		Opsi Penanganan	Kegiatan Pengendalian	Indikator Pengendalian		Jadwal	Penanggung Jawab	Cadangan Risiko (Rp)
	Indikasi	Batas Aman			Output	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Belum ada tindaklanjut dari KPKNL	5	Mengurangi Risiko	Melakukan usulan penghapusan BMN	Risalah Penghapusan	100%	Januari - Desember	Kasubbag TU	-
2	Purna Tugas Kepala Subbagian Tata Usaha dan kurangnya anggota regu pengamanan	5	Mengurangi Risiko	Permintaan JFU	1. Usulan Promosi Jabatan dan Permohonan SDM ke Kantor Wilayah 2. Sprint BKO	100%	Januari - Desember	Kasubbag TU	
3	Tidak ada tindaklanjut dari kendala pendaftaran tanda tangan elektronik	4	Mengurangi Risiko	Melakukan pendaftaran permohonan tanda tangan elektronik Pejabat Administrasi Eselon IV	User sudah terdaftar dan memiliki sertifikat dengan status ISSUE	100%	Januari - Desember	Kasubbag TU	
4	Keliru dalam memilih akun belanja	2	Mengurangi Risiko	Melakukan cross check setiap penginputan	Laporan keuangan pada aplikasi SAKTI	100%	Januari - Desember	Kasubbag TU	
5	Kurangnya pengawasan berjenjang	2	Mengurangi Risiko	Rapat internal dengan pengguna anggaran	Laporan keuangan berupa IKPA bagian penarikan halaman III DIPA	100%	Januari - Desember	Kasubbag TU	-
6	Kurangnya penguatan integritas Pegawai	2	Mengurangi Risiko	1. Melakukan internalisasi dan sosialisasi tentang gratifikasi dan pungli 2. Membentuk Tim Pengendali Gratifikasi dan Unit Pemberantas Pungli	Laporan Unit Pengendalian Gratifikasi	100%	Januari - Desember	Kasubbag TU	-
7	Keterlambatan menerima putusan	2	Mengurangi Risiko	Melakukan permintaan vonis	Pemberitahuan habis masa penahanan	100%	Januari - Desember	Kasi Binadik	-

8	Masih banyak Warga Binaan yang tidak bisa integrasi	4	Mengurangi Risiko	Optimalisasi dalam pelaksanaan program integrasi bagi Warga Binaan	Permintaan Litmas	100%	Januari - Desember	Kasi Binadik	-
9	Tidak ada efek jera dalam proses pidana	2	Mengurangi Risiko	Optimalisasi dalam pembinaan kepribadian berupa kerohanian serta optimalisasi dalam pembinaan kemandirian sebagai bekal Narapidana	Laporan Pembinaan Kepribadian dan Pembinaan Kemandirian	100%	Januari - Desember	Kasi Binadik	-
10	Kurangnya kesadaran warga binaan perihal pentingnya pendidikan	2	Mengurangi Risiko	Memberikan reward serta pengarahan rutin kepada warga binaan terkait pentingnya pendidikan	Dokumentasi pengarahan kepada Warga Binaan	100%	Januari - Desember	Kasi Binadik	-
11	Kurangnya kesadaran warga binaan	2	Mengurangi Risiko	Memberikan punishment berupa isolasi dan Register F serta pengarahan kepada warga binaan	Laporan pelanggaran disiplin	100%	Januari - Desember	Kasi Kamtib	-

Tenggarong, 10 Desember 2024
KEPALA

Triana Agustin
NIP 198208282000122001

PEMANTAUAN RISIKO

Unit Pemilik Risiko : Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong
Periode Penerapan : Tahun 2024

No	Kegiatan pengendalian	Indikator Pengendalian				Indikator Risiko				Risiko Residu	Keterangan
		Output	Target	Realisasi	%	Risiko	Batas Aman	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6=(5/4)x100	7	8	9	10=(9/8)x100	11	12
1	Melakukan usulan penghapusan BMN	Risalah Penghapusan	100%	100%	100,0	Belum ada tindaklanjut dari KPKNL	5,0	4,0	80,0	320,0	Menurunkan risiko
2	Permintaan JFU	1. Usulan Promosi Jabatan dan Permohonan SDM ke Kantor Wilayah 2. Sprint BKO	100%	100%	100,0	Purna Tugas Kepala Subbagian Tata Usaha dan kurangnya anggota regu pengamanan	5,0	4,0	80,0	320,0	Menurunkan risiko
3	Melakukan pendaftaran permohonan tanda tangan elektronik Pejabat Administrasi Eselon IV	User sudah terdaftar dan memiliki sertifikat dengan status ISSUE	100%	100%	100,0	Tidak ada tindaklanjut dari kendala pendaftaran tanda tangan elektronik	4,0	3,0	75,0	225,0	Menurunkan risiko
4	Melakukan cross check setiap penginputan	Laporan keuangan pada aplikasi SAKTI	100%	100%	100,0	Keliru dalam memilih akun belanja	2,0	1,0	50,0	50,0	Menurunkan risiko
5	Rapat internal dengan pengguna anggaran	Laporan keuangan berupa IKPA bagian penarikan halaman III DIPA	100%	100%	100,0	Kurangnya pengawasan berjenjang	2,0	1,0	50,0	50,0	Menurunkan risiko
6	1. Melakukan internalisasi dan sosialisasi tentang gratifikasi dan pungli 2. Membentuk Tim Pengendali Gratifikasi dan Unit Pemberantas Pungli	Laporan Unit Pengendalian Gratifikasi	100%	100%	100,0	Kurangnya penguatan integritas Pegawai	2,0	1,0	50,0	50,0	Menurunkan risiko

7	Melakukan permintaan vonis	Pemberitahuan habis masa penahanan	100%	100%	100,0	Keterlambatan menerima putusan	2,0	1,0	50,0	50,0	Menurunkan risiko
8	Optimalisasi dalam pelaksanaan program integrasi bagi Warga Binaan	Permintaan Litmas	100%	100%	100,0	Masih banyak Warga Binaan yang tidak bisa integrasi	4,0	3,0	75,0	225,0	Menurunkan risiko
9	Optimalisasi dalam pembinaan kepribadian berupa kerohanian serta optimalisasi dalam pembinaan kemandirian	Laporan Pembinaan Kepribadian dan Pembinaan Kemandirian	100%	100%	100,0	Tidak ada efek jera dalam proses pidana	2,0	1,0	50,0	50,0	Menurunkan risiko
10	Memberikan reward serta pengarahan rutin kepada warga binaan terkait pentingnya pendidikan	Dokumentasi pengarahan kepada Warga Binaan	100%	100%	100,0	Kurangnya kesadaran warga binaan perihal pentingnya pendidikan	2,0	1,0	50,0	50,0	Menurunkan risiko
11	Memberikan punishment berupa isolasi dan Register F serta pengarahan kepada warga binaan	Laporan pelanggaran disiplin	100%	100%	100,0	Kurangnya kesadaran warga binaan	2,0	1,0	50,0	50,0	Menurunkan risiko

Tenggarong, 10 Desember 2024
KEPALA

Triana Agustin
NIP 198208282000122001

LAMPIRAN

LAPORAN
MONEV SPIP

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Alamat : Jl. Imam Bonjol No.37 RT.08 Kel. Melayu Tenggarong- Kutai Kartanegara
Telp. (0541) 6720100 Email : lpp.smd@gmail.com

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TRIWULAN IV TAHUN 2024

A. PENDAHULUAN

1. Umum

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.PW.02.03 Tahun 2011 Tentang Penyelanggaran Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bahwa untuk mewujudkan tata kelola Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang baik, diperlukan penerapan pelaporan sistem pengendalian intern pemerintah untuk meningkatkan pemantauan dan evaluasi atas tercapainya tujuan organisasi melalui sistem pengendalian intern pemerintah.

Sistem Pengendalian Intern dalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien.

2. Maksud dan Tujuan

Meningkatkan pemantauan dan evaluasi atas tercapainya tujuan organisasi.

3. Ruang Lingkup

Seluruh kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilaksanakan di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

4. Dasar

a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
b. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2013 tentang Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH-02.PW.02.03 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;

c. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia RI Nomor 05 Tahun 2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
d. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor:M.HH-02.PR.03.01 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pelaporan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI;
e. Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP;
f. Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-690/K/DH/2012 tentang Pedoman Pemantauan Perkembangan Penyelenggaraan SPIP.

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa / 26 November 2024
Pukul : 08.30 WITA – selesai
Tempat : Ruang Kepala Lapas Perempuan Tenggarong

Adapun beberapa poin yang disampaikan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong, sebagai berikut:

- Pemetaan sisa risiko Tahun 2024;
- Pemetaan risiko Tahun 2024;
- Kendala dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
- Memaksimalkan pelayanan pemasyarakatan yang sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik melalui peningkatan pengawasan dan pengelolaan layanan di bidang pemasyarakatan;

C. HASIL YANG DICAPAI

Telah terlaksananya monitoring dan evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong telah melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

b. Saran

Dilakukan monitoring dan evaluasi secara rutin.

E. PENUTUP

Demikian kami sampaikan, atas perkenannya disampaikan terima kasih.

Tenggarong, 26 November 2024
KEPALA

Triana Agustin
NIP 198208282000122001

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Alamat : Jl. Imam Bonjol No.37 RT.08 Kel. Melayu Tenggarong- Kutai Kartanegara
Telp. (0541) 6720100 Email : lpp.smd@gmail.com

DOKUMENTASI
MONITORING DAN EVALUASI SPIP TW IV TAHUN 2024

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Alamat : Jl. Imam Bonjol No.37 Kelurahan Kampung Melayu,Tenggarong Kalimantan Timur
Telp. 0541-6720100 Email : *lpp.smd@gmail.com*

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan SPIP
Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong
Selasa, 26 November 2024

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Triana Agustin	Kepala	
2	Andi Hasnaeni	Kasi Binadik	
3	Hatmawati	Kasi Giatja	
4	Juari	Kasi Binadik	
5	Siti Maimunah	Kasubbag Tata Usaha	
6	Desi Ari Santi	Kasubsi Sarana Kerja	
7	Nanang Budiyono	Kaur Kepagawai Keuangan	
8	Dewi Ratna Sari	Kepala Subseksi Keamanan	
9	Mirani Eka Destiana	Kepala Subseksi Registrasi	
10	Adhiyani Maulina	Kepala Subseksi Pelaporan	
11	Siti Rahmah	Kepala Subseksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan	

KEPALA

TRIANA AGUSTIN
NIP 198208282000122001

SOSIALISASI
SPIP

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Alamat : Jl. Imam Bonjol No.37 RT.08 Kel. Melayu Tenggarong- Kutai Kartanegara
Telp. (0541) 6720100 Email : lpp.smd@gmail.com

LAPORAN
SOSIALISASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

A. PENDAHULUAN

1. Umum

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.PW.02.03 Tahun 2011 Tentang Penyelanggaran Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bahwa untuk mewujudkan tata kelola Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang baik, diperlukan penerapan pelaporan sistem pengendalian intern pemerintah untuk meningkatkan pemantauan dan evaluasi atas tercapainya tujuan organisasi melalui sistem pengendalian intern pemerintah.

Sistem Pengendalian Intern dalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien.

2. Maksud dan Tujuan

Meningkatkan pengetahuan tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sehingga mudah dalam pelaksanaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

3. Ruang Lingkup

Kegiatan Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilaksanakan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

4. Dasar

a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

b. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2013 tentang Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan

HAM Nomor: M.HH-02.PW.02.03 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;

c. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia RI Nomor 05 Tahun 2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
d. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor:M.HH-02.PR.03.01 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pelaporan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI;
e. Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP;
f. Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-690/K/DH/2012 tentang Pedoman Pemantauan Perkembangan Penyelenggaraan SPIP.

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Kegiatan Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu / 13 November 2024
Pukul : 10.00 WITA – selesai
Tempat : Ruang Kepala Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong

Sosialisasi serta penguatan diberikan kepada seluruh Pejabat Administrasi Eselon IV dan V serta JFU Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong. Adapun beberapa poin yang disampaikan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong, sebagai berikut:

- Implementasi pengendalian intern dalam manajemen risiko;
- Pengaruh inovasi dan sisa risiko.

C. HASIL YANG DICAPAI

Telah terlaksananya sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong telah melaksanakan sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

b. Saran

Pelaksanaan Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong secara rutin.

E. PENUTUP

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Tenggarong, 13 November 2024
KEPALA

Triana Agustin
NIP 198208282000122001

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Alamat : Jl. Imam Bonjol No.37 Kelurahan Kampung Melayu,Tenggarong Kalimantan Timur
Telp. 0541-6720100 Email : *lpp.smd@gmail.com*

Sosialisasi dan Penguatan SPIP
Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong
Rabu, 13 November 2024

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Triana Agustin	Kepala	
2	Siti Maimunah	Kasubbag TU	
3	Andi Hasnaeni	Kasi Binadik	
4	Hatmawati	Kasi Giatja	
5	Yhuni Rindawati	Ka.KPLP	
6	Nanang Budiyono	Kaur Kepagawai Keuangan	
7	Mirani Eka Destiana	Kepala Subseksi Registrasi	
8	Adhiyani Maulina	Kepala Subseksi Pelaporan	
9	Dewi Ratna Sari	Kepala Subseksi Keamanan	
10	Dini Fazriani	Kepala Subseksi Bimbingan Kerja dan Pengelola Hasil Kerja	

KEPALA

TRIANA AGUSTIN
NIP 198208282000122001

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Alamat : Jl. Imam Bonjol No.37 RT.08 Kel. Melayu Tenggarong- Kutai Kartanegara
Telp. (0541) 6720100 Email : lpp.smd@gmail.com

DOKUMENTASI
SOSIALISASI SERTA PENGUATAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

DOKUMEN RISALAH LELANG

SALINAN

RISALAH LELANG

NOMOR : 677/13.02/2024-01

TANGGAL : 08 OKTOBER 2024

PEJABAT LELANG : OXA LIGYAN TINTANI, S.H.

PENJUAL : LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II TENGGARONG

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
SAMARINDA

Dipindai dengan CamScanner

Lember Pertama
Pejabat Lelang

Ttd.

Oxa Ligyan Tintani, S.H.
NIP 19960830 201902 2 005

SALINAN
RISALAH LELANG
Nomor 677/13.02/2024-01

——Pada hari ini Selasa tanggal delapan bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh empat (08-10-2024), dimulai pukul tiga belas (13:00) Waktu Server aplikasi lelang melalui internet sesuai Waktu Indonesia Barat oleh saya: ——————

———— Oxa Ligyan Tintani, Sarjana Hukum, NIP 19960830 201902 2 005 ————

Pejabat Lelang Kelas I yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 125/KM.6/2023 tanggal 26 Juni 2023, berkedudukan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Samarinda berdasarkan Surat Tugas Nomor ST-1067/KNL.1302/2024 tanggal 26 September 2024 dilaksanakan Lelang Non Eksekusi Wajib Barang Milik Negara bertempat di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Samarinda, Jalan Ir. H. Juanda 6, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. ——

——Pelaksanaan lelang ini dilakukan atas permintaan Triana Agustin, NIP. 19820828 200012 2 001, Kepala Kantor Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Tenggarong, berkedudukan di Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, sesuai Surat Permohonan Lelang Nomor W.18.PAS.PAS.7-PB.05.01-1933 tanggal 12 Agustus 2024, yang telah ditetapkan jadwal lelangnya sesuai Surat Penetapan Lelang Nomor S-2014/KNL.1302/2024 tanggal 26 September 2024 guna melaksanakan Surat Keputusan Nomor S-65/MK.6/KNL.1302/2024 tanggal 7 Agustus 2024. ——————

——Dalam pelaksanaan lelang ini Saudara: ——————

Nanang Budiyono, Sarjana Hukum berdasarkan Surat Keputusan Pembentukan Panitia Penjualan Lelang/Surat Penunjukkan Pejabat Penjual Nomor W18.PAS.PAS.7-1932-PB.05.01 tanggal 12 Agustus 2024 melaksanakan penjualan lelang dengan perantaraan KPKNL Samarinda. ——————

——Barang bergerak yang dilelang berupa: ——————

1 (satu) Paket Material Bongkaran berupa Besi, Kayu, dan Seng Alumunium di Kabupaten Kutai Kartanegara ——————

Nilai Limit : Rp14.545.000,00 (empat belas juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) ——————

Barang bergerak tersebut saat ini berada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Tenggarong. ——————

dilelang apa adanya. ——————

——Pelelangan ini telah diumumkan oleh Penjual melalui Selebaran tanggal 30 September 2024. ——————

——Hasil bersih lelang ini disetorkan kepada Kas Negara. ——————

——Penjualan lelang ini dilakukan menurut Undang-Undang Lelang (Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblad 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1941:3) jo. Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara terkait Lelang. ————

——Barang tersebut akan ditawarkan dan disahkan penjualannya oleh saya Pejabat Lelang, berdasarkan Nilai Limit dari Penjual. ——————

——Peserta lelang dapat mengajukan penawaran dalam lelang ini setelah menunjukkan identitas diri dan menyetorkan uang jaminan penawaran

lelang/menyerahkan garansi.../Lembar Kedua

Dipindai dengan
CamScanner

Pejabat Lelang

Ttd.

Oka Ligyan Tintani, S.H.
NIP 19960830 201902 2 005

lelang/menyerahkan garansi bank jaminan penawaran lelang, sesuai Pengumuman Lelang, dengan ketentuan: ————————————

1. Dalam hal Jaminan Penawaran Lelang berupa uang, berlaku ketentuan sebagai berikut: ————————————
—a. uang jaminan dari peserta lelang yang disahkan sebagai Pembeli akan diperhitungkan dengan pelunasan kewajiban pembayaran lelang; ————
—b. uang jaminan dari peserta lelang yang tidak disahkan sebagai Pembeli akan dikembalikan seluruhnya tanpa potongan apapun, di luar mekanisme perbankan; ————————————
—c. uang jaminan akan disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Keuangan, jika Pembeli tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan. ————
2. Dalam hal Jaminan penawaran lelang berupa garansi bank, berlaku ketentuan sebagai berikut: ————————————
—a. garansi bank dikembalikan kepada peserta lelang yang tidak disahkan sebagai pembeli; ————————————
—b. garansi bank dikembalikan kepada Pembeli setelah yang bersangkutan melunasi kewajiban pembayaran lelang; ————————
—c. hasil klaim garansi bank disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Keuangan, jika Pembeli tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan. ————

—Penawaran lelang dilakukan secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet cara terbuka (open bidding) pada aplikasi lelang melalui internet. ——

—Dalam Hal penawaran lelang dilakukan dengan kehadiran peserta secara lisan, maka: ————————————

1. Penawaran harga dilakukan secara naik-naik/turun untuk mencapai harga tertinggi. ————————————
2. Besaran kelipatan ditentukan oleh Pejabat Lelang. ————————

—Dalam Hal penawaran lelang dilakukan dengan dan/atau tanpa kehadiran peserta secara tertulis dengan menggunakan formulir surat penawaran, maka: ——

1. Surat Penawaran harus ditulis dalam bahasa Indonesia dengan angka Arab dan huruf latin dan bermeterai cukup serta ditandatangani oleh penawar. ————
2. Surat penawaran diserahkan kepada Pejabat Lelang dalam amplop tertutup, dimasukan ke dalam kotak yang tersedia, atau dikirim melalui pos tercatat kepada alamat tromol pos yang telah ditentukan. ————————
3. Ketentuan dan syarat yang ditetapkan dalam surat penawaran mengikat bagi peserta lelang yang mengajukan penawaran. ————————

—Dalam Hal penawaran lelang dilakukan tanpa kehadiran melalui internet, maka: –

1. penawaran lelang dilakukan secara tertutup atau terbuka dengan menggunakan aplikasi lelang melalui internet. ————————————
2. Peserta lelang yang mengajukan penawaran, telah menyetujui Syarat dan Ketentuan Pelaksanaan Lelang Dengan Penawaran Melalui internet yang tercantum dalam aplikasi lelang melalui internet. ————————
3. Ketentuan dan syarat yang ditetapkan dalam penawaran lelang mengikat bagi peserta lelang yang mengajukan penawaran. ————————

—Dalam hal lelang secara inklusif, harga penawaran yang diajukan oleh peserta lelang sudah termasuk Bea Lelang. Dalam hal lelang secara eksklusif, harga

penawaran yang.../Lembar Ketiga

Dipindai dengan CamScanner

Pejabat Lelang

Ttd.

Oee Ligyan Tintani, S.H.
NIP 19960830 201902 2 005

penawaran yang diajukan oleh peserta lelang belum termasuk Bea Lelang. ————

——Dalam hal terdapat beberapa peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi secara lisan semakin meningkat, menurun, atau tertulis dengan nilai yang sama dan mencapai atau melampaui Nilai Limit, Pejabat Lelang berhak menentukan Pemenang Lelang dengan cara: ————————————

1. melakukan penawaran lanjutan hanya terhadap peserta lelang yang mengajukan penawaran sama, yang dilakukan secara lisan (naik-naik) atau tertulis berdasarkan persetujuan peserta lelang bersangkutan; atau. ——————
2. apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 tidak dapat dilaksanakan, melakukan penetapan salah satu di antara peserta lelang yang mengajukan penawaran sama dengan melakukan pengundian. ——————

——Dalam hal terdapat beberapa peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi dengan nilai yang sama melalui internet, melalui email, dan/atau melalui tromol pos, Pejabat Lelang mengesahkan Peserta Lelang yang penawarannya diterima lebih dulu sebagai Pembeli ——————————————

——Dalam hal dilakukan penawaran secara bersamaan, dan terdapat penawaran tertinggi dengan nilai yang sama antara Peserta Lelang yang mengajukan penawaran melalui internet cara tertutup (closed bidding), melalui email, dan/atau melalui tromol pos dengan Peserta Lelang yang mengajukan penawaran secara tertulis dengan kehadiran, Pejabat Lelang berhak mengesahkan Pembeli dengan cara melakukan pengundian di antara Peserta Lelang yang mengajukan penawar tertinggi yang sama tersebut. ——————————————

——Dalam hal terjadi gangguan teknis dalam pelaksanaan lelang tanpa kehadiran melalui internet cara tertutup (closed bidding) berlaku ketentuan sebagai berikut: ——

1. Apabila gangguan teknis terjadi sebelum lelang dimulai yang mengakibatkan aplikasi lelang melalui internet tidak dapat beroperasi hingga berakhir jam kerja pada hari pelaksanaan lelang, maka lelang dibatalkan oleh Pejabat Lelang. ———
2. Apabila gangguan teknis terjadi setelah lelang dimulai dan aplikasi lelang melalui internet beroperasi kembali sebelum jam kerja berakhir pada hari pelaksanaan lelang, maka penawaran tertinggi yang masuk ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Pejabat Lelang. ——————————————

——Dalam hal terjadi gangguan teknis dalam pelaksanaan lelang tanpa kehadiran melalui internet cara terbuka (open bidding) berlaku ketentuan sebagai berikut: ———

1. Apabila gangguan teknis terjadi sebelum lelang dimulai yang mengakibatkan aplikasi lelang melalui internet tidak dapat beroperasi hingga berakhir jam kerja pada hari pelaksanaan lelang, maka lelang dibatalkan oleh Pejabat Lelang. ———
2. Apabila gangguan teknis terjadi sebelum lelang dimulai namun aplikasi lelang melalui internet beroperasi kembali sebelum jam kerja berakhir pada hari pelaksanaan lelang, maka lelang dimulai oleh Pejabat Lelang dengan jangka waktu penawaran paling kurang 2 (dua) jam. ——————————

——Dalam hal terjadi gangguan teknis dalam pelaksanaan lelang yang dilakukan secara bersamaan antara lelang dengan kehadiran peserta dan lelang tanpa kehadiran peserta yang menyebabkan lelang tanpa kehadiran peserta tidak dapat dilakukan, lelang dengan kehadiran peserta tetap sah dan mengikat. ——————

——Peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi dan telah mencapai atau melampaui Nilai Limit yang ditetapkan oleh Penjual, disahkan sebagai Pembeli oleh saya Pejabat Lelang pada saat pelaksanaan lelang hari ini juga. ——————

——Bea Lelang.../Lembar Keempat

Dipindai dengan CamScanner

Pejabat Lelang

Ttd.

Oxa Ligyan Tintani, S.H.
NIP 19960830 201902 2 005

——Bea Lelang dalam pelaksanaan lelang ini dipungut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Keuangan. ————————————

——Dalam hal pelaksanaan lelang dengan kehadiran peserta lelang, peserta lelang atau kuasanya yang sah "hadir" pada waktu pelaksanaan lelang. ——————

——Dalam hal pelaksanaan lelang tanpa kehadiran peserta lelang, peserta lelang atau kuasanya yang sah "tidak perlu hadir" pada waktu pelaksanaan lelang. ————

——Pelunasan kewajiban pembayaran lelang oleh Pembeli dilakukan secara tunai paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. ——————————

——Pembayaran dengan cek/giro hanya dapat diterima dan dianggap sah sebagai pelunasan kewajiban pembayaran lelang oleh Pembeli, jika cek/giro tersebut dikeluarkan oleh bank anggota kliring, dananya mencukupi dan dapat diuangkan. ——

——Peserta lelang yang telah disahkan sebagai Pembeli bertanggung jawab sepenuhnya dalam pelunasan kewajiban pembayaran lelang dan biaya-biaya resmi lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan pada lelang ini walaupun dalam penawarannya itu ia bertindak selaku kuasa dari seseorang, perusahaan atau badan hukum. ————————————————————————

——Dengan mengajukan penawaran pada lelang ini, peserta lelang wajib mematuhi dan menundukkan diri pada syarat dan ketentuan lelang sebagaimana tertuang dalam risalah lelang ini, syarat dan ketentuan lelang yang ditempel pada papan pengumuman, syarat dan ketentuan pada pengumuman lelang, syarat dan ketentuan lelang yang ditayangkan pada aplikasi lelang melalui internet, dan syarat dan ketentuan yang tercantum pada formulir penawaran. ——————————

——Pembeli yang tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan (Pembeli Wanprestasi), maka pada hari kerja berikutnya pengesahannya sebagai Pembeli dibatalkan secara tertulis oleh Pejabat Lelang, tanpa mengindahkan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan dapat dituntut ganti rugi oleh Penjual. ————

——Pembeli tidak diperkenankan mengambil/menguasai Barang yang dibelinya sebelum memenuhi kewajiban pembayaran lelang. Apabila Pembeli melanggar ketentuan ini maka dianggap telah melakukan suatu tindak kejahatan yang dapat dituntut oleh penegak hukum. ——————————————————

——Barang yang telah terjual pada lelang ini menjadi hak dan tanggungan Pembeli dan harus dengan segera mengurus Barang tersebut. ——————————

——Biaya balik nama barang, tunggakan pajak berikut denda-dendanya serta biaya lainnya sesuai ketentuan, menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pembeli. ————

——Pembeli akan diberikan kutipan risalah lelang untuk kepentingan balik nama setelah menunjukkan kuitansi pelunasan pembayaran lelang. Apabila yang dilelang berupa tanah dan/atau bangunan harus disertai dengan menunjukkan asli Surat Setoran BPHTB. ——————————————————————

——Jika Pembeli tidak mendapatkan izin dari instansi pemberi izin untuk membeli barang yang dilelang sehingga jual beli ini menjadi batal, maka ia dengan ini oleh Penjual diberi kuasa penuh yang tidak dapat ditarik kembali dengan hak untuk memindahkan kuasa itu untuk mengalihkan barang itu kepada pihak lain atas nama Penjual dengan dibebaskan dari pertanggungjawaban sebagai kuasa dan jika ada menerima uang ganti kerugian yang menjadi hak sepenuhnya dari Pembeli. Adapun uang pembelian yang sudah diberikan kepada Penjual tersebut diatas tidak dapat

ditarik kembali.../Lembar Kelima

Dipindai dengan CamScanner

Pejabat Lelang

Ttd.

Oxa Ligyan Tintani, S.H.
NIP 19960830 201902 2 005

ditarik kembali oleh Pembeli. ——————————

——Pejabat Lelang Kelas II/KPKNL tidak menanggung kebenaran keterangan-keterangan yang diberikan secara lisan pada waktu penjualan tentang keadaan sesungguhnya dan keadaan hukum atas barang yang dilelang tersebut, seperti luasnya, batas-batasnya, perjanjian sewa-menyewa sepenuhnya menjadi risiko Pembeli. ——————————

——Penawar/Pembeli dianggap sungguh-sungguh telah mengetahui apa yang telah ditawar olehnya. Apabila terdapat kekurangan/kerusakan baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, maka Penawar/Pembeli tidak berhak untuk menolak atau menarik diri kembali setelah pembelian disahkan dan melepaskan segala hak untuk meminta kerugian atas sesuatu apapun juga. ——————————

——Untuk segala hal yang berhubungan dengan atau diakibatkan oleh pembelian dalam lelang ini, para Pembeli dianggap telah memilih tempat kedudukan umum yang tetap dan tidak dapat diubah pada KPKNL Samarinda. ——————————

——Khusus untuk pembelian dalam lelang ini sepanjang tidak ditentukan dalam Risalah Lelang ini, maka Penawar/Pembeli tunduk pada hukum perdata dan hukum dagang yang berlaku di Indonesia. ——————————

——Segala perselisihan yang timbul pada saat pelaksanaan lelang ini diselesaikan dan diputuskan pada hari ini juga oleh saya Pejabat Lelang. ——————————

——Semua dokumen yang disebutkan dalam Risalah Lelang ini dilampirkan dan dijilid/dijahit dalam minuta risalah lelang ini. ——————————

——Sesudah apa yang diuraikan di atas ini ditayangkan, maka penjualan lelang ini dimulai. ——————————

——Banyaknya penawaran lelang yang masuk dan sah dalam pelaksanaan lelang ini berjumlah satu penawaran, dan tercapai penawaran tertinggi. Oleh karena penawaran tertinggi untuk barang tersebut telah mencapai/melampaui Nilai Limit dan disetujui Penjual, maka penawar tertinggi disahkan sebagai Pembeli pada pelaksanaan lelang ini. ——————————

——Uraian barang, harga penawaran, dan nama serta alamat penawar tertinggi yang ditunjuk sebagai pembeli diuraikan berikut ini: ——————————

Barang yang laku/terjual: ——————————

1 (satu) Paket Material Bongkaran berupa Besi, Kayu, dan Seng Alumunium di Kabupaten Kutai Kartanegara ——————————

Harga Lelang ———— : Rp14.545.000,00 (empat belas juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) ——————————

Pembeli ———— : Davit Asmarendra, NIK 6472030112950003, Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Pangeran Suryanata Perum Puspita Bukit Pinang Blok HH Nomor 7 RT 06, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur ——————————

Banyaknya barang...Lembar Terakhir

Dipindai dengan CamScanner

Lembar terakhir dari Risalah Lelang Nomor : 677/13.02/2024-01 tanggal 8 Oktober 2024

Banyaknya barang yang dilelang: 1 (satu) --
Banyaknya barang yang laku/terjual: 1 (satu) --
Jumlah harga barang yang laku/telah terjual: Rp14.545.000,00 (empat belas juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) --
Jumlah harga barang yang tidak laku: Rp0,00 (nol rupiah) --
Jumlah harga barang yang ditahan: --
Banyaknya lampiran sebelum Risalah Lelang ditutup: 10 (sepuluh) --
Dibuat dengan tidak ada coretan, tidak ada tambahan, tidak ada perubahan. ----------

Penjual	Pejabat Lelang
Ttd.	Ttd.
Nanang Budiyono, S.H. 19821204 201012 1 002	Oxa Ligyan Tintani, S.H. NIP 19960830 201902 2 005

Diberikan: SALINAN sesuai dengan aslinya
Tanggal:
Plh. Kepala KPKNL Samarinda

Mohammad Khoiri
NIP 1975[illegible]09 199602 1 003

Dipindai dengan CamScanner

Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPONI)

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	:	820241014809196
Tanggal Billing	:	14-10-2024 07:24:31
Tanggal Kedaluwarsa	:	21-10-2024 07:24:31
Tanggal Bayar	:	**14-10-2024 08:24:17**
Bank/Pos/Fintech Bayar	:	**BANK RAKYAT INDONESIA**
Channel Bayar	:	Internet *Banking*
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	:	Bendahara Penerimaan KPKNL Samarinda
Kementerian/Lembaga	:	015 - KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Eselon I	:	08 - Ditjen Kekayaan Negara
Satuan Kerja	:	237941 - KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SAMARINDA
Total Disetor	:	290.900 (IDR)
Terbilang	:	Dua Ratus Sembilan *Puluh Ribu* Sembilan Ratus (IDR)
Status	:	Sudah Dibayar
NTB	:	**241014340127**
NTPN	:	[illegible]

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	:	IV. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA - B.Bea Lelang Penjual - 3.Lelang Noneksekusi Wajib Barang Milik Negara/Daerah - b.Barang Bergerak
Kode Akun	:	425792 - Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I
Jumlah Setoran	:	290.900 (IDR)
Keterangan	:	bea lelang RL 877

Dipindai dengan CamScanner

Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPONI)

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: [illegible]
Tanggal Billing	: 14-10-2024 07:23:23
Tanggal Kedaluwarsa	: 21-10-2024 07:23:23
Tanggal Bayar	: **14-10-2024 08:23:13**
Bank/Pos/Fintech Bayar	: **BANK RAKYAT INDONESIA**
Channel Bayar	: **Internet Banking**
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: Lapas Perempuan Kelas II A Tenggarong
Kementerian/Lembaga	: **013 - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**
Unit Eselon I	: **05 - Ditjen Pemasyarakatan**
Satuan Kerja	: **[illegible] - LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG**
Total Setor	: 14.545.000 **(IDR)**
Terbilang	: *Empat Belas Juta Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu (IDR)*
Status	: Sudah Dibayar
NTB	: **[illegible]**
NTPN	: **[illegible]**

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya
Kode Akun	: [illegible] - Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya
Jumlah Setoran	: 14.545.000 (IDR)
Keterangan	: [illegible]

Dipindai dengan CamScanner

BANK RAKYAT INDONESIA	**BUKTI PENERIMAAN NEGARA** PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	KEMENTERIAN KEUANGAN

Data Pembayaran:

Tanggal dan Jam Bayar	: 14/10/2024 08:23:13	NTB	: 241014540881
Tanggal Buku	: 14/10/2024	NTPN	: 48F5161QV4DEQ60A
Kode Cabang Bank	: 0374	STAN	: 673725

Data Setoran:

Kode Billing : 820241014065258
Nama Wajib Bayar : Lapas Perempuan Kelas II A Tenggarong
Kementerian/Lembaga : 013
Unit Eselon I : 05
Satuan Kerja : 418533
Jumlah Setoran : Rp. 14.545.000,00 Mata Uang : IDR
Terbilang : EMPAT BELAS JUTA LIMA RATUS EMPAT PULUH LIMA RIBU RUPIAH

This is a computer generated message and requires no signature
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

Validasi Bank.

Lapas Perempuan Kelas II A Tenggarong 0000 14545000.00 14102024 14102024
48F5161QV4DEQ60A 241014540001 673725 139

Dipindai dengan
CamScanner

BANK RAKYAT INDONESIA	BUKTI PENERIMAAN NEGARA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	KEMENTERIAN KEUANGAN

Data Pembayaran:

Tanggal dan Jam Bayar	: 14/10/2024 08:24:17	NTB	: 241014540127
Tanggal Buku	: 14/10/2024	NTPN	: C71DE1JMPVHGP61G
Kode Cabang Bank	: 0374	STAN	: 873909

Data Setoran:

Kode Billing : 820241014069298
Nama Wajib Bayar : Bendahara Penerimaan KPKNL Samarinda
Kementerian/Lembaga : 015
Unit Eselon I : 09
Satuan Kerja : 537941
Jumlah Setoran : Rp. 290,900.00 Mata Uang : IDR
Terbilang : DUA RATUS SEMBILAN PULUH RIBU SEMBILAN RATUS RUPIAH

This is a computer generated message and requires no signature
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

Validasi Bank

Bendahara Penerimaan KPKNL Samarinda 0000 290900.00 14102024 14102024
C71DE1JMPVHGP61G 241014540127 873809 139

Dipindai dengan
CamScanner

SURAT
PERMOHONAN JFU

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jalan : Imam Bonjol No.37 Kelurahan Kampung Melayu, Tenggarong
Telp: 0541-6720100 Email: lpp.smd@gmail.com

Nomor : W.18.PAS.PAS.7-KP.04.01-1906 08 Agustus 2024
Lampiran : 2 (dua) berkas
Hal : Permohonan Penambahan JFU pada
Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong

Yth.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Kalimantan Timur
Di –
Samarinda

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong, setelah dilakukan pemetaan dan inventarisir Jabatan Fungsional Umum, dengan hormat Kami mengajukan permohonan untuk penambahan petugas sebanyak 5 (Lima) orang yang terdiri dari 3 (Tiga) orang Petugas Laki-Laki dan 2 (Dua) orang Petugas Wanita. Dengan adanya penambahan petugas ini diharapkan dapat membantu pelaksanaan tugas dan fungsi di Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

Berkenaan dengan hal tersebut kami lampirkan:

1. Hasil Rekapitulasi Penyusunan Kebutuhan Formasi Jabatan berdasarkan Aplikasi E-ABK
2. Peta Jabatan Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong

Demikian untuk menjadikan periksa, atas perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.

K E P A L A

Triana Agustin
NIP. 198208282000122001

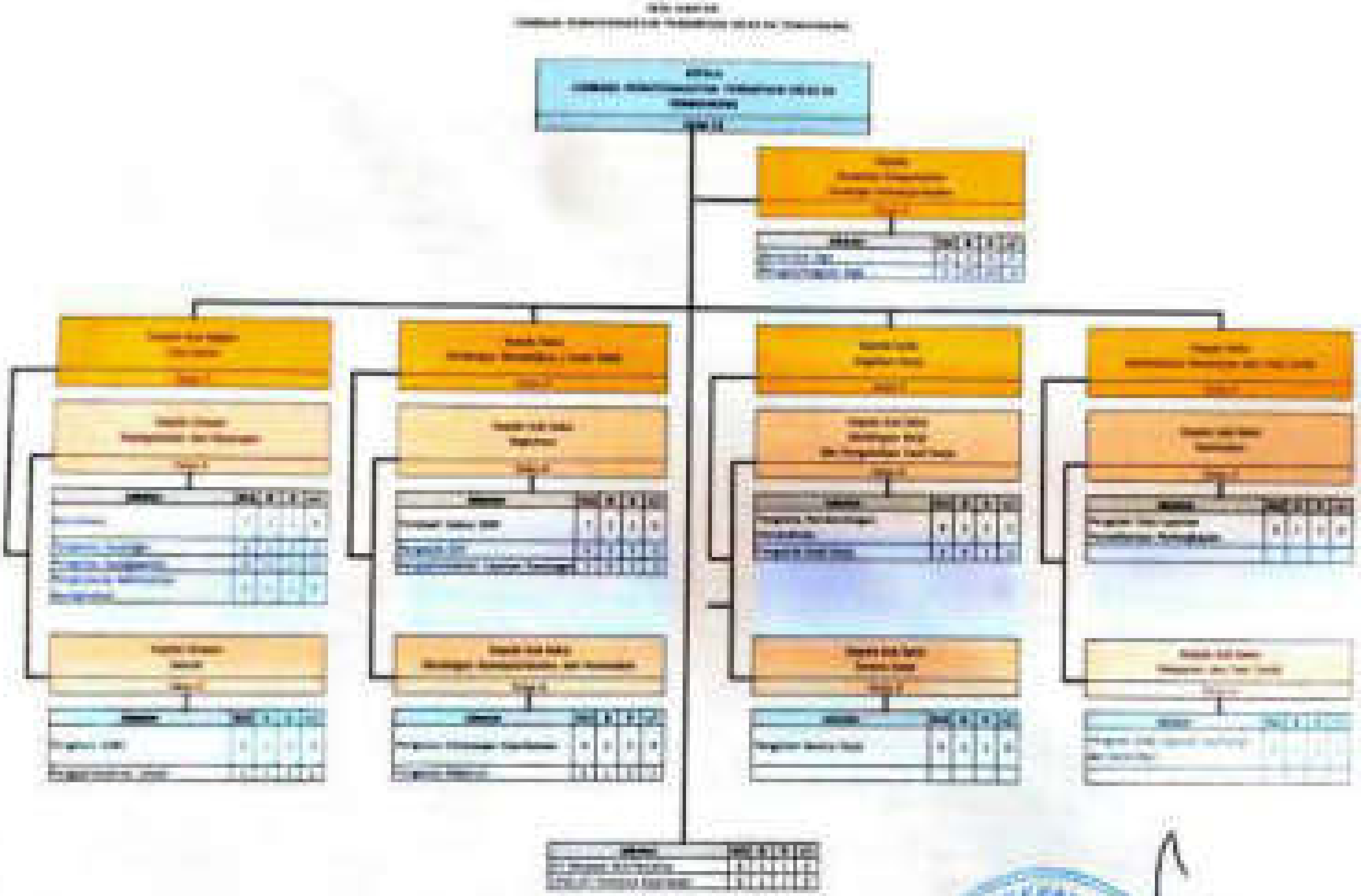

REKAPITULASI PENYUSUNAN KEBUTUHAN FORMASI JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG TAHUN 2023

No	NAMA JABATAN	HASIL ABK	BEZETTING	KEBUTUHAN FORMASI
1	BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA	1	1	0
2	PENELAAH STATUS WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN	1	1	0
3	KOMANDAN JAGA PEMASYARAKATAN/PENGAMANAN	4	1	-3
4	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	3	1	-2
5	PENGELOLA DATA KEPEGAWAIAN	2	1	-1
6	PENGELOLA KEUANGAN	2	1	-1
7	PENGELOLA PEMBIMBINGAN KEMASYARAKATAN	2	1	-1
8	PENGELOLA PEMBINAAN KEPRIBADIAN	3	2	-1
9	PENGELOLA SARANA KERJA	1	1	0
10	PENGELOLA SISTEM DATABASE PEMASYARAKATAN	3	1	-2
11	PENGOLAH DATA LAPORAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN	1	1	0
12	PENGADMINISTRASI UMUM	2	2	0
12	PENGELOLA DAN PENGOLAH MAKANAN	2	1	-1
13	PENGHUBUNG ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	1	1	0
15	PENGOLAH DATA LAPORAN PEMELIHARAAN PERLENGKAPAN	1	1	0
16	PETUGAS ANGGOTA JAGA	16	1	-15
	TOTAL	48	19	-40

FORM 5

PENGUMPULAN DATA BEBAN KERJA

Nama Jabatan : PETUGAS/ANGGOTA JAGA
Satuan Kerja : KESATUAN PENGAMANAN LAPAS - LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA - LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TANGERANG

No	Uraian Tugas	Satuan Hasil	Waktu Penyelesaian	Waktu Kerja Efektif	Beban Kerja	Σ Beban Kerja	Kebutuhan Pegawai	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	menjaga pintu gerbang, memeriksa isi kendaraan keluar masuk, orang / barang keluar masuk, mencatatkan kendaraan tahanan, mobil bahan makanan, ; aktivitas pabrik ditemukan yang tidak diizinkan	Kegiatan	20	1250	260	5200	4.16	
2	melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas terhadap pengunjung yang datang, termasuk barang bawaannya	Kegiatan	16	1250	260	4160	3.33	
3	menjaga pintu, memeriksa, menggeledah orang / barang masuk (pegawai, tahanan atau WBP baru atau keluarga tahanan yang berkunjung) dan memeriksa barang-barang bawaan serta memastikan petunjuk tidak dilanggar	Kegiatan	16	1250	260	4160	3.33	
4	Melakukan pencatatan, pencocokan ID, mengawasi tamu, mengawasi aktivitas dalam area kunjungan	Kegiatan	4	1250	144	576	0.46	
5	menjaga pos di menara	Kegiatan	0	1250	0	0	0.00	
6	menjaga pintu utama dan melakukan pengawasan aktivitas pada area tersebut	Kegiatan	16	1250	260	4160	3.33	
7	Kontrol Keliling Area Blok hunian	Kegiatan	16	1250	260	4160	3.33	
8	mengawasi kegiatan yang berlangsung di dapur	Kegiatan	9	1250	260	2340	1.87	
9	mengawasi kegiatan yang berlangsung di area tempat ibadah	Kegiatan	3	1250	260	780	0.62	

10	[illegible]	Kegiatan	3	1250	250	750	0.60	
11	[illegible]	Kegiatan	6	1250	250	1500	1.20	
12	[illegible]	Kegiatan	8	1250	250	2000	1.60	
13	[illegible]	Kegiatan	6	1250	250	1500	1.20	
14	[illegible]	Kegiatan	3	1250	250	750	0.60	
15	[illegible]	Kegiatan	12	1250	250	3000	2.40	
16	[illegible]	Kegiatan	0	1250	0	0	0.00	
17	[illegible]	Kegiatan	1	1250	260	260	0.21	
18	[illegible]	Kegiatan	0	1250	0	0	0.00	
19	[illegible]	Kegiatan	0	1250	0	0	0.00	
20	[illegible]	Kegiatan	1	1250	260	260	0.21	
21	[illegible]	Laporan	1	1250	12	12	0.01	
22	[illegible]	Kegiatan	2	1250	260	520	0.42	
23	[illegible]	Kegiatan	0	1250	0	0	0.00	
24	[illegible]	Kegiatan	0	1250	0	0	0.00	
25	[illegible]	Kegiatan	4	1250	144	576	0.46	
26	[illegible]	Kegiatan	4	1250	144	576	0.46	
27	[illegible]	Kegiatan	0	1250	0	0	0.00	
28	[illegible]	Kegiatan	0	1250	0	0	0.00	

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
Jalan Letjend MT. Haryono No. 38 Air Putih, Samarinda Ulu 75124
Laman : https://kaltim.kemenkumham.go.id Pos-el : kanwilkaltim@kemenkumham.go.id

Nomor : W.18-KP.04.01-7064 26 Agustus 2024
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Surat Perintah Kepala Kantor Wilayah
Di Lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham Kaltim

Yth.
1. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda
2. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Samarinda
3. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tenggarong
4. Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Samarinda
5. Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Balikpapan
6. Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tenggarong

di Tempat

Sehubungan dengan Surat Perintah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur Nomor W.18-7063.KP.04.01 Tahun 2024 tanggal 26 Agustus 2024 tentang Surat Perintah (terlampir), bersama ini diminta kepada Saudara segera menghadapkan pegawai yang tersebut namanya dalam surat perintah dimaksud untuk melaksanakan tugas sementara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Balikpapan, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanjung Redeb serta Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Wilayah,

Dr. Gun Gun Gunawan
NIP 197304011997031001

Tembusan :

1. Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur;
2. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Balikpapan;
3. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong;
4. Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanjung Redeb.

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
Jalan: Letjend M.T. Haryono No. 38 Air Putih, Samarinda 75124
Laman : https://kaltim.kemenkumham.go.id/ Pos-el : kanwilkaltim@kemenkumham.go.id

SURAT PERINTAH
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : W.18-7063.KP.04.01 TAHUN 2024

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur nomor W.18-KP.04.01-6982 tanggal 19 Agustus 2024 hal Permintaan Data Pegawai Bantuan dan Nota Dinas Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur nomor W.18-KP.04.01-6969 tanggal 21 Agustus 2024 hal Penerbitan Surat Perintah Perbantuan Pegawai ditugaskan Sementara;
b. bahwa untuk kepentingan dinas dan efektivitas pelaksanaan tugas perlu dilaksanakan pemindahan sementara Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Surat Perintah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur.

Dasar :

1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur nomor W.18-KP.04.01-6982 tanggal 19 Agustus 2024 hal Permintaan Data Pegawai Bantuan;
3. Nota Dinas Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur nomor W.18-KP.04.01-6969 tanggal 21 Agustus 2024 hal Penerbitan Surat Perintah Perbantuan Pegawai ditugaskan Sementara.

MEMERINTAHKAN

Kepada : Pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran surat perintah ini.

Untuk :

1. Melaksanakan tugas sementara pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam lampiran surat perintah ini terhitung mulai tanggal 03 September 2024 s.d. 03 Desember 2024;
2. Melaksanakan surat perintah ini dengan penuh rasa tanggung jawab.

Samarinda, 26 Agustus 2024
Kepala Kantor Wilayah,

Dr. Gun Gun Gunawan
NIP 197304011997031001

Tembusan:
1. Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur;
2. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda;
3. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Samarinda;
4. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tenggarong;
5. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong;
6. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Balikpapan;
7. Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Samarinda;
8. Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Balikpapan;
9. Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanjung Redeb;
10. Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tenggarong;
11. Pegawai yang bersangkutan.

Lampiran Surat Perintah
Nomor : W.18-7063.KP.04.01 Tahun 2024
Tanggal : 26 Agustus 2024

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN	KETERANGAN
1	DENI SAPUTRO NIP. 199412222017121002	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	Petugas/Anggota Jaga pada Rutan Kelas IIA Samarinda	Diperbantukan sementara pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Balikpapan
2	FEBRIAN FITRA RAHMANANDA NIP. 199902092017121003	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	Petugas/Anggota Jaga pada Rutan Kelas IIA Samarinda	
3	MUHAMAD MIFTAHUL MUTTAQIN NIP. 199411212017121001	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	Petugas/Anggota Jaga pada Rutan Kelas IIA Samarinda	
4	ALNUR WAHSYUB NIP. 199406132017121001	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	Petugas/Anggota Jaga pada Rutan Kelas IIB Balikpapan	
5	MUHAMMAD RIZAN LUQMAN NIP. 199607202017121002	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	Petugas/Anggota Jaga pada Lapas Kelas IIA Tenggarong	
6	ANDRE APRILIANTARA NIP. 199804072017121003	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	Petugas/Anggota Jaga pada Lapas Narkotika Kelas IIA Samarinda	
7	MUHAMMAD BAY`AT NIP. 199311042017121003	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	Penjaga Pintu Utama Pemasyarakatan pada Lapas Narkotika Kelas IIA Samarinda	
8	BAYO NAMORA HARAHAP NIP. 199710182020121001	Pengatur Muda (II/a)	Petugas/Anggota Jaga pada Lapas Kelas IIA Samarinda	
9	ARGADINATA GUNAWAN NIP. 199407162017121003	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	Satuan Pengaman Tahanan/Narapidana pada Lapas Narkotika Kelas IIA Samarinda	Diperbantukan sementara pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanjung Redeb
10	ANNUR FITRIANSYAH RAMADHAN NIP. 199702072020121001	Pengatur Muda (II/a)	Petugas/Anggota Jaga pada Lapas Kelas IIA Tenggarong	
11	BAYU TRI PRAYOGO NIP. 199706062017121004	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	Petugas/Anggota Jaga pada LPKA Kelas II Tenggarong	Diperbantukan sementara pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong

Kepala Kantor Wilayah,

Dr. Gun Gun Gunawan
NIP 197304011997031001

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
Jalan: Letjend M.T. Haryono No. 38 Air Putih, Samarinda 75124
Laman : https://kaltim.kemenkumham.go.id/ Pos-el : kanwilkaltim@kemenkumham.go.id

SURAT PERINTAH
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : W.18-10047.KP.04.01 TAHUN 2024

Menimbang :
a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur nomor W.18-KP.04.01-9604 tanggal 18 November 2024 hal Permintaan Data Pegawai Bantuan dan Nota Dinas Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur nomor W.18-KP.04.01-9706 tanggal 20 November 2024 hal Penerbitan Surat Perintah Perbantuan Pegawai ditugaskan Sementara;
b. bahwa untuk kepentingan dinas dan efektivitas pelaksanaan tugas perlu dilaksanakan pemindahan sementara Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Surat Perintah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur.

Dasar :
1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur nomor W.18-KP.04.01-9604 tanggal 18 November 2024 hal Permintaan Data Pegawai Bantuan;
3. Nota Dinas Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur nomor W.18-KP.04.01-9706 tanggal 20 November 2024 hal Penerbitan Surat Perintah Perbantuan Pegawai ditugaskan Sementara.

MEMERINTAHKAN

Kepada : Pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran surat perintah ini.

Untuk :
1. Melaksanakan tugas sementara pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam lampiran surat perintah ini terhitung mulai tanggal 03 Desember 2024 s.d. 31 Desember 2024 pada Lapas Kelas IIA Balikpapan serta terhitung mulai tanggal 03 Desember 2024 s.d. 3 Maret 2025 pada Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong dan Rutan Kelas IIB Tanjung Redeb;
2. Melaksanakan surat perintah ini dengan penuh rasa tanggung jawab.

Samarinda, 2 Desember 2024
An.Kepala Kantor Wilayah
Kepala Divisi Pemasyarakatan

Endang Lintang Hardiman
NIP 196706201993031001

Tembusan:
1. Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur;
2. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda;
3. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Samarinda;
4. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tenggarong;
5. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong;
6. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Balikpapan;
7. Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Samarinda;
8. Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Balikpapan;
9. Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanjung Redeb;
10. Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tenggarong;
11. Pegawai yang bersangkutan.

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran Surat Perintah
Nomor : W.18-10047.KP.04.01 Tahun 2024
Tanggal : 2 Desember 2024

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN	KETERANGAN
1	AWANG BAGUS PRATAMA NIP. 1199801142017121004	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	Petugas/Anggota Jaga pada Rutan Kelas IIA Samarinda	Diperbantukan sementara pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Balikpapan terhitung mulai tanggal 3 Desember s.d. 31 Desember 2024
2	ADI KUNCORO KISTIANTO NIP. 199809112017121006	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	Petugas/Anggota Jaga pada Rutan Kelas IIA Samarinda	
3	ALI AKBAR FATURRAHMAN NIP. 199510242017121002	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	Petugas/Anggota Jaga pada Rutan Kelas IIA Samarinda	
4	ALNUR WAHSYUB NIP. 199406132017121001	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	Petugas/Anggota Jaga pada Rutan Kelas IIB Balikpapan	
5	BAYO NAMORA HARAHAP NIP. 199710182020121001	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	Petugas/Anggota Jaga pada Lapas Kelas IIA Samarinda	
6	SUPRANTA ZAKI MAFAZA NIP.199511142017121003	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	Petugas/Anggota Jaga pada Lapas Kelas IIA Tenggarong	
7	DASTIN SATYA HADI NUGRAHA DUMAIS NIP. 199609232017121004	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	Petugas/Anggota Jaga pada Lapas Narkotika Kelas IIA Samarinda	
8	MERI IRAWAN NIP. 199405092017121001	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	Petugas/Anggota Jaga pada Lapas Narkotika Kelas IIA Samarinda	
9	ANWAR RACHMAN NIP. 199703182017121001	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	Petugas Anggota Jaga pada Lapas Kelas IIA Tenggarong	Diperbantukan sementara pada Rutan Kelas IIB Tanjung Redeb terhitung mulai tanggal 3 Desember 2024 s.d. 3 Maret 2025
10	BAYU TRI PRAYOGO NIP. 199706062017121004	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	Petugas Anggota Jaga pada LPKA Kelas II Tenggarong	Diperbantukan sementara pada Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong terhitung mulai tanggal 3 Desember 2024 s.d. 3 Maret 2025

An.Kepala Kantor Wilayah
Kepala Divisi Pemasyarakatan

Endang Lintang Hardiman
NIP 196706201993031001

Dipindai dengan CamScanner

SCREENSHOOT STATUS DSE PEJABAT ADMINISTRASI ESELON IV

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Alamat : Jl. Imam Bonjol No.37 Rt.08 Kelurahan Melayu, Tenggarong – Kutai Kartanegara
Telp. 0541-6720100   Email : lpp.smd@gmail.com

SCREENSHOOT STATUS DSE PEJABAT ADMINISTRASI ESELON IV
LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

KEPALA SEKSI ADMINISTRASI KEAMANAN DAN KETERTIBAN

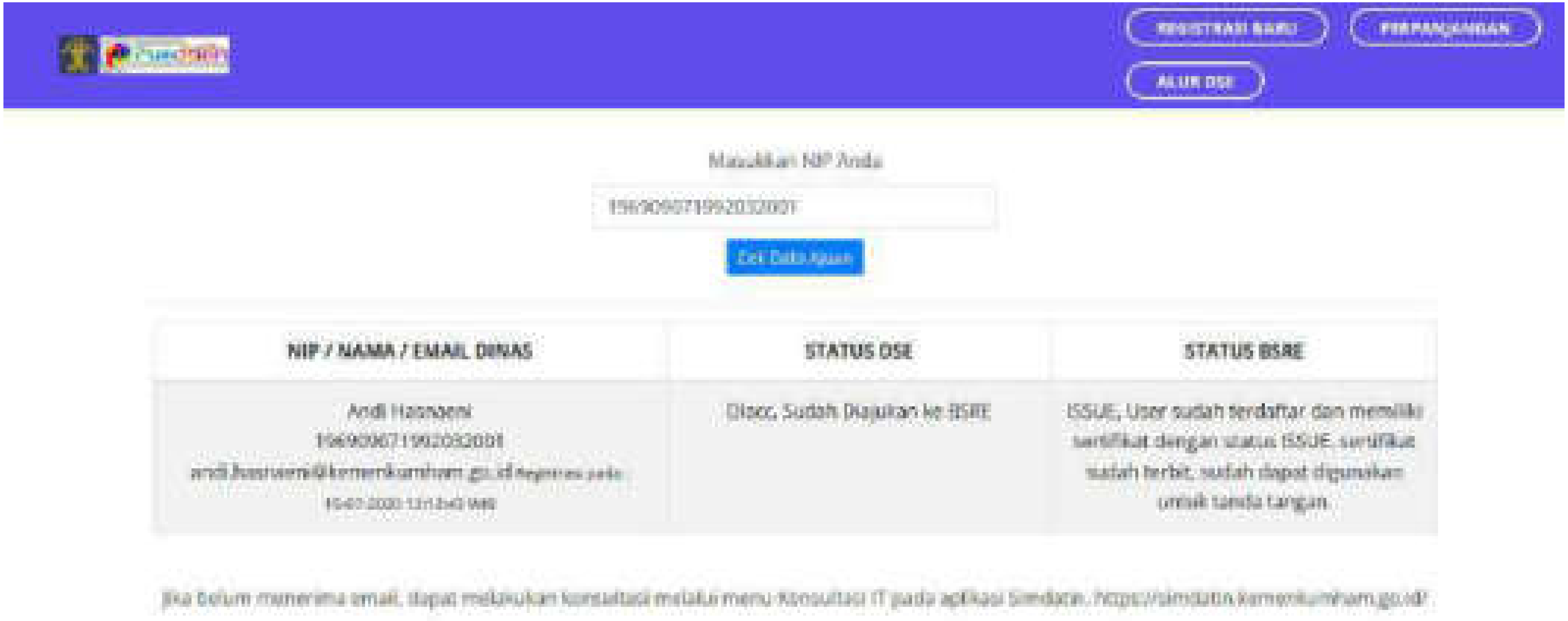

Masukkan NIP Anda

196909071992032001

NIP / NAMA / EMAIL DINAS	STATUS DSE	STATUS BSRE
Andi Hasnaeni 196909071992032001 andi.hasnaeni@kemenkumham.go.id Registrasi pada 15-07-2020 [illegible] WIB	Diacc, Sudah Diajukan ke BSRE	ISSUE, User sudah terdaftar dan memiliki sertifikat dengan status ISSUE. sertifikat sudah terbit, sudah dapat digunakan untuk tanda tangan

Jika belum menerima email, dapat melakukan konsultasi melalui menu Konsultasi IT pada aplikasi Simdatin. https://simdatin.kemenkumham.go.id/

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Alamat : Jl. Imam Bonjol No.37 Rt.08 Kelurahan Melayu, Tenggarong – Kutai Kartanegara
Telp. 0541-6720100 Email : lpp.smd@gmail.com

SCREENSHOOT STATUS DSE PEJABAT ADMINISTRASI ESELON IV
LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

KEPALA SEKSI KEGIATAN KERJA

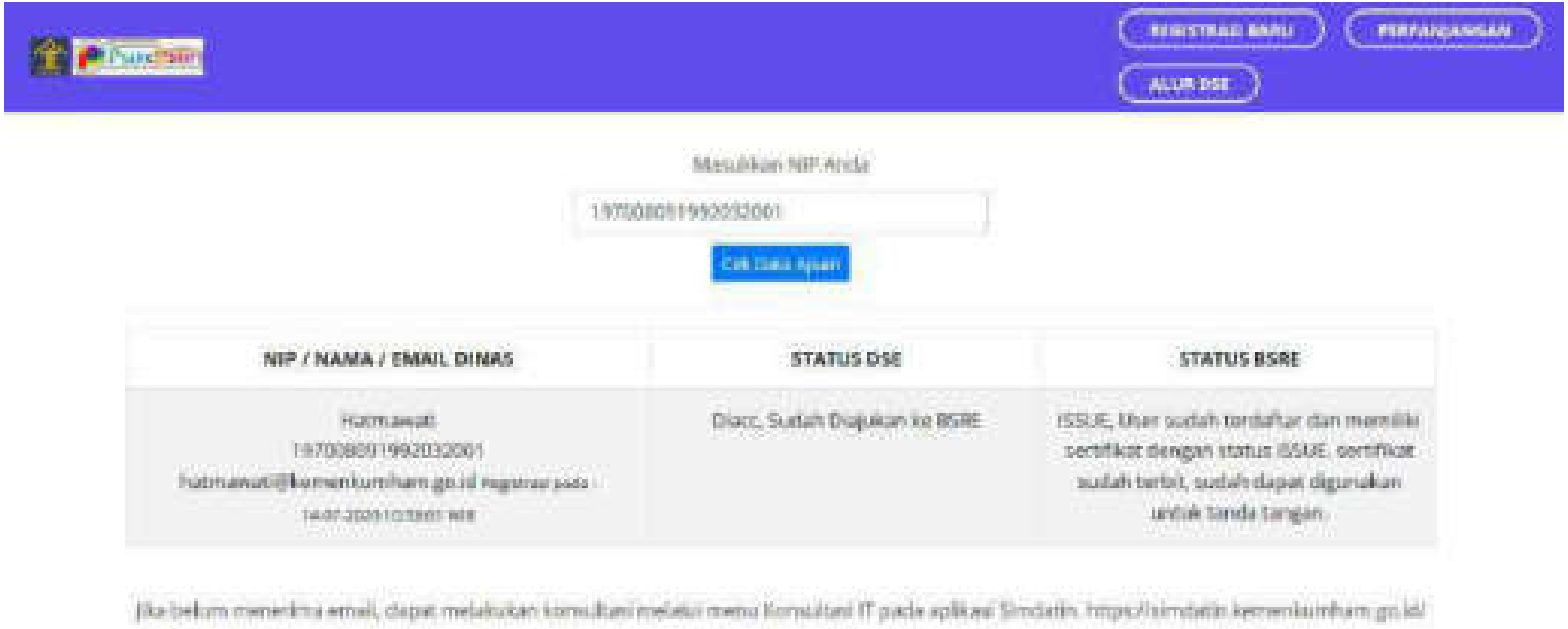

Masukkan NIP Anda

197008031992032001

NIP / NAMA / EMAIL DINAS	STATUS DSE	STATUS BSRE
Hatmawati 197008031992032001 hatmawati@kemenkumham.go.id Registrasi pada : 14-07-2020 10:38:01 WIB	Diacc, Sudah Diajukan ke BSRE	ISSUE, User sudah terdaftar dan memiliki sertifikat dengan status ISSUE, sertifikat sudah terbit, sudah dapat digunakan untuk tanda tangan

Jika belum menerima email, dapat melakukan konsultasi melalui menu Konsultasi IT pada aplikasi Simdatin. https://simdatin.kemenkumham.go.id/

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Alamat : Jl. Imam Bonjol No.37 Rt.08 Kelurahan Melayu, Tenggarong – Kutai Kartanegara
Telp. 0541-6720100 Email : lpp.smd@gmail.com

SCREENSHOOT STATUS DSE PEJABAT ADMINISTRASI ESELON IV
LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

KEPALA SEKSI BIMBINGAN NARAPIDANA/ANAK DIDIK

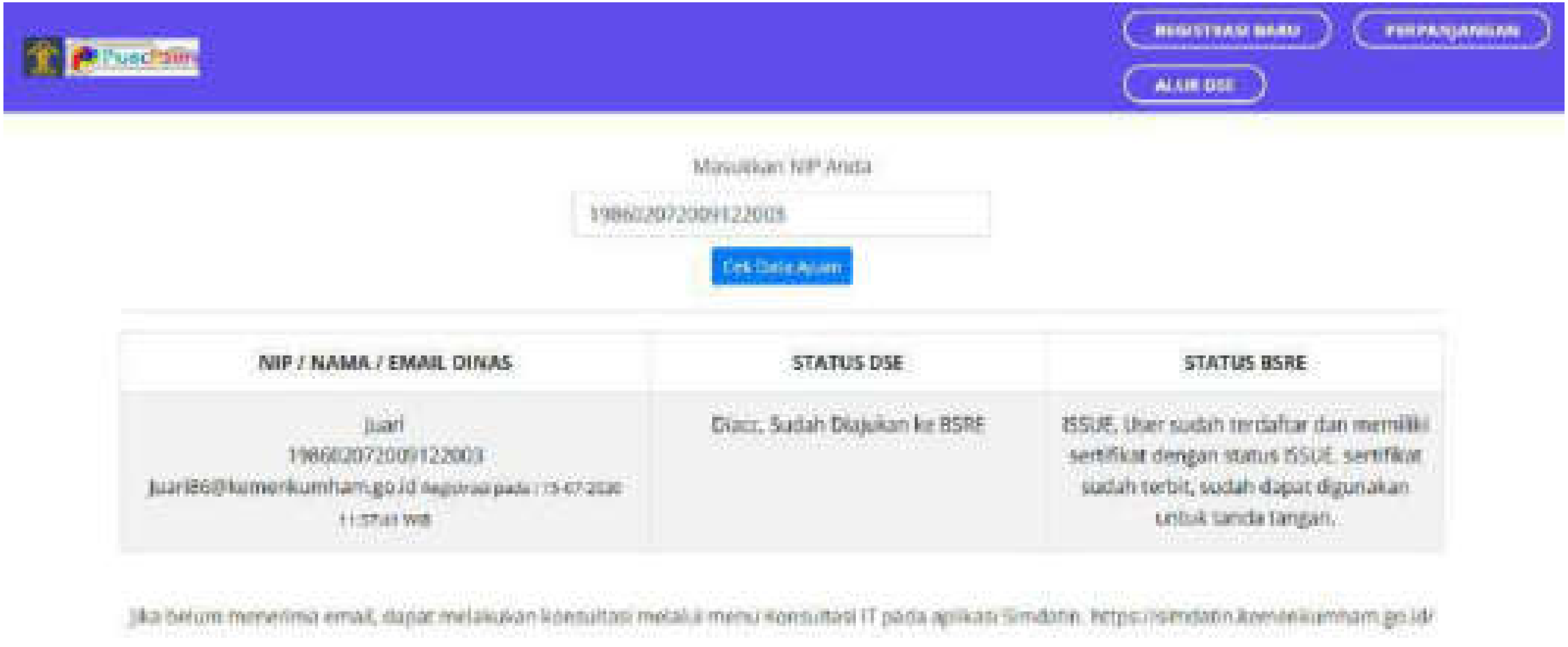

NIP / NAMA / EMAIL DINAS	STATUS DSE	STATUS BSRE
Juari 198602072009122003 juari86@kemenkumham.go.id Registrasi pada : [illegible] WIB	Diacc, Sudah Diajukan ke BSRE	ISSUE, User sudah terdaftar dan memiliki sertifikat dengan status ISSUE, sertifikat sudah terbit, sudah dapat digunakan untuk tanda tangan.

Jika belum menerima email, dapat melakukan konsultasi melalui menu konsultasi IT pada aplikasi Simdatin. https://simdatin.kemenkumham.go.id/

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Alamat : Jl. Imam Bonjol No.37 Rt.08 Kelurahan Melayu, Tenggarong – Kutai Kartanegara
Telp. 0541-6720100   Email : lpp.smd@gmail.com

SCREENSHOOT STATUS DSE PEJABAT ADMINISTRASI ESELON IV
LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA

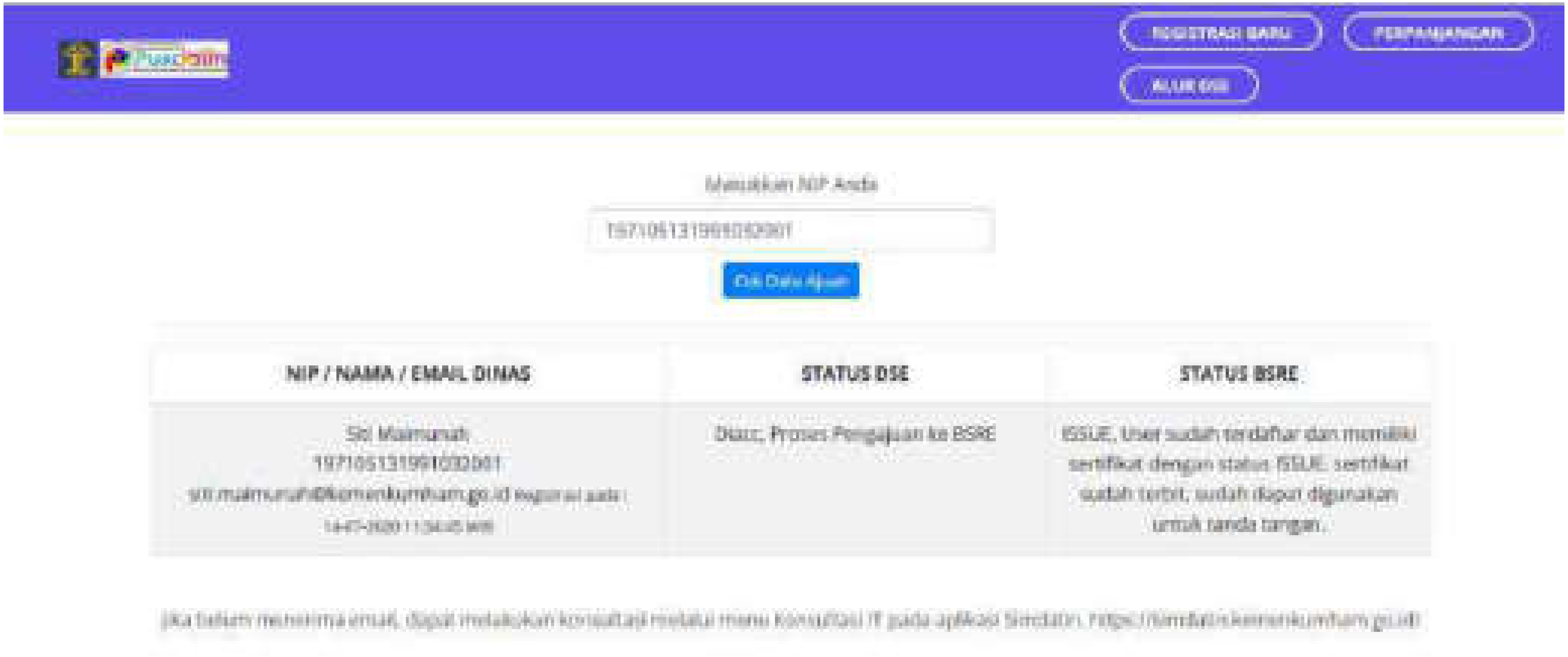

Masukkan NIP Anda

197105131991032001

NIP / NAMA / EMAIL DINAS	STATUS DSE	STATUS BSRE
Siti Maimunah 197105131991032001 siti.maimunah@kemenkumham.go.id expirasi pada : 14-07-2020 [illegible]	Diacc, Proses Pengajuan ke BSRE	ISSUE, User sudah terdaftar dan memiliki sertifikat dengan status ISSUE, sertifikat sudah terbit, sudah dapat digunakan untuk tanda tangan.

Jika belum menerima email, dapat melakukan konsultasi melalui menu Konsultasi IT pada aplikasi Simdatin. https://simdatin.kemenkumham.go.id

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Alamat : Jl. Imam Bonjol No.37 Rt.08 Kelurahan Melayu, Tenggarong – Kutai Kartanegara
Telp. 0541-6720100 Email : lpp.smd@gmail.com

SCREENSHOOT STATUS DSE PEJABAT ADMINISTRASI ESELON IV LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

KEPALA KESATUAN PENGAMANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN

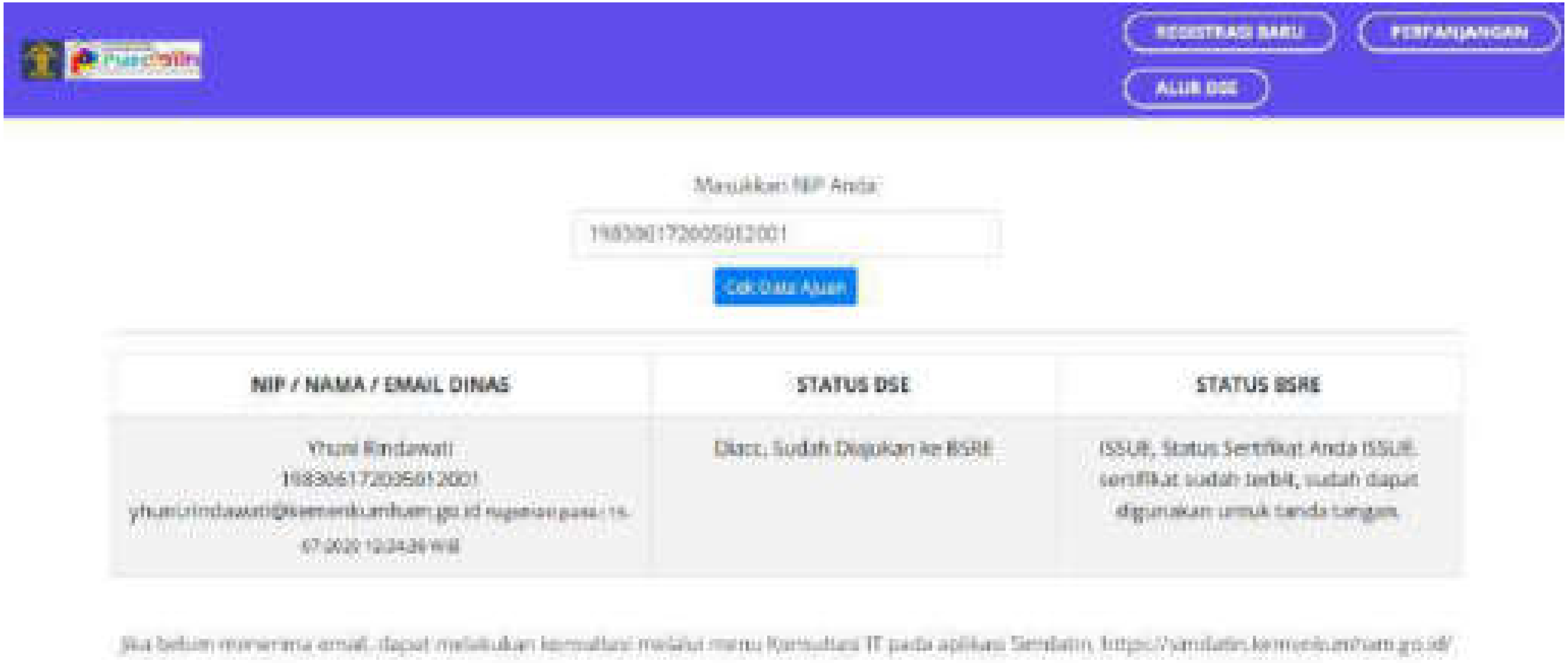

NIP / NAMA / EMAIL DINAS	STATUS DSE	STATUS BSRE
Yhuni Rindawati	Diacc, Sudah Diajukan ke BSRE	ISSUE, Status Sertifikat Anda ISSUE, sertifikat sudah terbit, sudah dapat digunakan untuk tanda tangan.

Jika belum menerima email, dapat melakukan konsultasi melalui menu Konsultasi IT pada aplikasi Simlatin, https://simlatin.kemenkumham.go.id/

LAPORAN KEUANGAN PADA APLIKASI SAKTI

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

Kementerian : **013** **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**
Unit Organisasi **05** **DITJEN PEMASYARAKATAN**
Satuan Kerja : **418333** **LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG**

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	**7,189,789,000**	**0**	**6,516,076,930**	**409,249,309**	**6,925,326,239**	**96.32 %**	**264,462,761**
BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	2,510,488,000	0	2,348,472,753	149,654,725	2,498,127,478	99.51 %	12,360,522
BF.5252 Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	2,510,488,000	0	2,348,472,753	149,654,725	2,498,127,478	99.51 %	12,360,522
BDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	2,478,200,000	0	2,320,684,753	146,354,725	2,467,039,478	99.55 %	11,160,522
BDC.002 Pembinaan Kepribadian Dan Layanan Integrasi Narapidana	107,150,000	0	76,051,000	21,741,000	97,792,000	91.27 %	9,358,000
051 Pembinaan Kepribadian	91,550,000	0	63,886,000	21,441,000	85,327,000	93.20 %	6,223,000
051.0A Konseling	12,555,000	0	4,575,000	7,500,000	12,075,000	96.18 %	480,000
521211 Belanja Bahan	555,000	0	75,000	0	75,000	13.51 %	480,000
000001. Kudapan	405,000	0	75,000	0	75,000	18.52 %	330,000
000002. Penggandaan, Penjilidan dan Pelaporan	150,000	0	0	0	0	0.00 %	150,000
522151 Belanja Jasa Profesi	12,000,000	0	4,500,000	7,500,000	12,000,000	100.00	0
000003. Honor Konselor/ Psikolog	12,000,000	0	4,500,000	7,500,000	12,000,000	100.00	0
051.0B Penyuluhan Hukum	525,000	0	425,000	100,000	525,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	525,000	0	425,000	100,000	525,000	100.00	0
000004. Penggandaan, Penjilidan dan Pelaporan	300,000	0	200,000	100,000	300,000	100.00	0
000005. Kudapan	225,000	0	225,000	0	225,000	100.00	0
051.0C Kegiatan Keagamaan	27,270,000	0	20,027,000	3,800,000	23,827,000	87.37 %	3,443,000
521211 Belanja Bahan	2,170,000	0	1,777,000	0	1,777,000	81.89 %	393,000
000006. Banner dan Spanduk	2,170,000	0	1,777,000	0	1,777,000	81.89 %	393,000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	3,200,000	0	400,000	0	400,000	12.50 %	2,800,000
000007. Perlengkapan Kegiatan Keagamaan	3,200,000	0	400,000	0	400,000	12.50 %	2,800,000
522151 Belanja Jasa Profesi	3,000,000	0	2,250,000	500,000	2,750,000	91.67 %	250,000
000008. Honor Pembina Keagamaan	3,000,000	0	2,250,000	500,000	2,750,000	91.67 %	250,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	18,900,000	0	15,600,000	3,300,000	18,900,000	100.00	0
000009. Transport Pembina Keagamaan	10,800,000	0	9,000,000	1,800,000	10,800,000	100.00	0

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**
***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

Kementerian : **013** **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**
Unit Organisasi **05** **DITJEN PEMASYARAKATAN**
Satuan Kerja : **418333** **LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG**

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000010. Transport Imam Terawih	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000	100.00	0
000155. Transport Pengajar Ngaji	3,600,000	0	2,100,000	1,500,000	3,600,000	100.00	0
051.0D Kegiatan Pramuka Kesadaran Berbangsa dan Bernegara	20,000,000	0	16,650,000	2,850,000	19,500,000	97.50 %	500,000
521211 Belanja Bahan	1,200,000	0	400,000	300,000	700,000	58.33 %	500,000
000011. Penggandaan, Penjilidan dan Pelaporan	1,200,000	0	400,000	300,000	700,000	58.33 %	500,000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000	100.00	0
000012. Perlengkapan Kegiatan Kepramukaan	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10,800,000	0	8,250,000	2,550,000	10,800,000	100.00	0
000013. Transport Pembina Kesadaran Berbangsa dan Bernegara	10,800,000	0	8,250,000	2,550,000	10,800,000	100.00	0
051.0E Kegiatan Kesenian dan Olahraga	31,200,000	0	22,209,000	7,191,000	29,400,000	94.23 %	1,800,000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	15,000,000	0	7,809,000	7,191,000	15,000,000	100.00	0
000014. Perlengkapan Kegiatan Kesenian dan Olahraga	15,000,000	0	7,809,000	7,191,000	15,000,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	16,200,000	0	14,400,000	0	14,400,000	88.89 %	1,800,000
000015. Transport Instruktur Kesenian dan Olahraga	16,200,000	0	14,400,000	0	14,400,000	88.89 %	1,800,000
052 Layanan Integrasi dan TPP	15,600,000	0	12,165,000	300,000	12,465,000	79.90 %	3,135,000
052.0A Pelaksanaan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan	10,200,000	0	7,365,000	300,000	7,665,000	75.15 %	2,535,000
521211 Belanja Bahan	8,400,000	0	5,565,000	300,000	5,865,000	69.82 %	2,535,000
000016. Kudapan	7,200,000	0	4,965,000	0	4,965,000	68.96 %	2,235,000
000017. Penggandaan, Penjilidan dan Pelaporan	1,200,000	0	600,000	300,000	900,000	75.00 %	300,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000	100.00	0
000018. Transport Lokal	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000	100.00	0
052.0B Pemberian Remisi, PB, CB, CMB, CMK	5,400,000	0	4,800,000	0	4,800,000	88.89 %	600,000
521211 Belanja Bahan	900,000	0	300,000	0	300,000	33.33 %	600,000
000019. Penggandaan, Penjilidan dan Pelaporan	900,000	0	300,000	0	300,000	33.33 %	600,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2,100,000	0	2,100,000	0	2,100,000	100.00	0
000020. Transport Antar Kabupaten (Tenggarong-	2,100,000	0	2,100,000	0	2,100,000	100.00	0

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**

***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

Kementerian : **013** **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**
Unit Organisasi **05** **DITJEN PEMASYARAKATAN**
Satuan Kerja : **418333** **LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG**

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
Samarinda)	2,100,000	0	2,100,000	0			0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000	100.00	0
000021. Transport Lokal Pemulangan	2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000	100.00	0
BDC.004 Kebutuhan Dasar dan Layanan Kesehatan	2,332,750,000	0	2,206,333,753	124,613,725	2,330,947,478	99.92 %	1,802,522
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	2,332,750,000	0	2,206,333,753	124,613,725	2,330,947,478	99.92 %	1,802,522
005.0A Pengadaan Bahan Makanan Warga Binaan Pemasyarakatan	2,017,799,000	0	1,898,242,351	119,473,445	2,017,715,796	100.00	83,204
521112 Belanja Pengadaan Bahan Makanan	2,017,799,000	0	1,898,242,351	119,473,445	2,017,715,796	100.00	83,204
000031. Pengadaan Bahan Makanan	2,017,799,000	0	1,898,242,351	119,473,445	2,017,715,796	100.00	83,204
005.0B Kebutuhan Sandang	81,155,000	0	81,154,470	0	81,154,470	100.00	530
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	81,155,000	0	81,154,470	0	81,154,470	100.00	530
000032. Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sandang Khusus Pramuka	2,580,000	0	2,580,000	0	2,580,000	100.00	0
000033. Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sandang WBP	73,535,000	0	73,534,470	0	73,534,470	100.00	530
000034. Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sandang Khusus Pembinaan	5,040,000	0	5,040,000	0	5,040,000	100.00	0
005.0C Pemenuhan Sarana Makan Minum	59,370,000	0	59,369,900	0	59,369,900	100.00	100
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	33,357,000	0	33,356,900	0	33,356,900	100.00	100
000157. Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Dapur	33,357,000	0	33,356,900	0	33,356,900	100.00	100
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	26,013,000	0	26,013,000	0	26,013,000	100.00	0
000035. Penyediaan Peralatan Dapur	1,900,000	0	1,900,000	0	1,900,000	100.00	0
000036. Penyediaan Peralatan Makan Minum	24,113,000	0	24,113,000	0	24,113,000	100.00	0
005.0D Pemenuhan Perlengkapan Mandi	21,375,000	0	21,375,000	0	21,375,000	100.00	0
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	21,375,000	0	21,375,000	0	21,375,000	100.00	0
000037. Kegiatan Pemenuhan Perlengkapan Mandi	21,375,000	0	21,375,000	0	21,375,000	100.00	0
005.0E Perlengkapan Khusus Kelompok Rentan	29,314,000	0	29,293,000	14,000	29,307,000	99.98 %	7,000
521211 Belanja Bahan	130,000	0	109,000	14,000	123,000	94.62 %	7,000
000038. Kegiatan Pemberian Extra Voeding WBP Khusus Ibu Hamil	60,000	0	60,000	0	60,000	100.00	0

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**
***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

Kementerian : **013** **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**
Unit Organisasi **05** **DITJEN PEMASYARAKATAN**
Satuan Kerja : **418333** **LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG**

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000039. Kegiatan Pemberian Extra Voeding WBP Khusus Lansia	70,000	0	49,000	14,000	63,000	90.00 %	7,000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	29,184,000	0	29,184,000	0	29,184,000	100.00	0
000040. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Khusus Kelompok Rentan	29,184,000	0	29,184,000	0	29,184,000	100.00	0
005.0F Extra Fooding	46,430,000	0	46,430,000	0	46,430,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	46,430,000	0	46,430,000	0	46,430,000	100.00	0
000041. Kegiatan Pemberian Extra Voeding WBP Selama Bulan Puasa	46,430,000	0	46,430,000	0	46,430,000	100.00	0
005.0H Perawatan Kesehatan Tahanan/ Narapidana/ Anak	26,007,000	0	19,169,032	5,126,280	24,295,312	93.42 %	1,711,688
521211 Belanja Bahan	2,400,000	0	1,950,000	450,000	2,400,000	100.00	0
000043. Penggandaan, Penjilidan dan Pelaporan	2,400,000	0	1,950,000	450,000	2,400,000	100.00	0
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	4,429,000	0	2,992,032	1,436,280	4,428,312	99.98 %	688
000044. Perawatan WBP	4,429,000	0	2,992,032	1,436,280	4,428,312	99.98 %	688
522191 Belanja Jasa Lainnya	19,178,000	0	14,227,000	3,240,000	17,467,000	91.08 %	1,711,000
000045. Honorium Tenaga Medis	19,178,000	0	14,227,000	3,240,000	17,467,000	91.08 %	1,711,000
005.0I Perlengkapan Medis Poliklinik	51,300,000	0	51,300,000	0	51,300,000	100.00	0
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	51,300,000	0	51,300,000	0	51,300,000	100.00	0
000046. Penyediaan Perlengkapan Medis Poliklinik	17,100,000	0	17,100,000	0	17,100,000	100.00	0
000047. Pengadaan Obat-Obatan bagi WBP	34,200,000	0	34,200,000	0	34,200,000	100.00	0
BDC.006 Pembinaan Kemandirian Narapidana	38,300,000	0	38,300,000	0	38,300,000	100.00	0
051 Perencanaan Pembinaan Kemandirian Narapidana	1,550,000	0	1,550,000	0	1,550,000	100.00	0
051.0A Perencanaan	1,550,000	0	1,550,000	0	1,550,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	1,550,000	0	1,550,000	0	1,550,000	100.00	0
000022. Penggandaan, Penjilidan dan Pelaporan	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	100.00	0
000023. Kudapan	165,000	0	165,000	0	165,000	100.00	0
000024. Makan	385,000	0	385,000	0	385,000	100.00	0
052 Pelaksanaan Pembinaan Kemandirian Narapidana	33,800,000	0	33,800,000	0	33,800,000	100.00	0

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**
***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

Kementerian : **013** **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**
Unit Organisasi **05** **DITJEN PEMASYARAKATAN**
Satuan Kerja : **418333** **LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG**

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
052.0A Pelaksanaan	33,800,000	0	33,800,000	0	33,800,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	26,600,000	0	26,600,000	0	26,600,000	100.00	0
000025. Kudapan Kegiatan	1,890,000	0	1,890,000	0	1,890,000	100.00	0
000026. Perlengkapan Kegiatan	24,710,000	0	24,710,000	0	24,710,000	100.00	0
522151 Belanja Jasa Profesi	7,200,000	0	7,200,000	0	7,200,000	100.00	0
000027. Honor Instruktur	7,200,000	0	7,200,000	0	7,200,000	100.00	0
053 Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembinaan Kemandirian Narapidana	2,950,000	0	2,950,000	0	2,950,000	100.00	0
053.0A Evaluasi dan Pelaporan	2,950,000	0	2,950,000	0	2,950,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	2,950,000	0	2,950,000	0	2,950,000	100.00	0
000028. Kudapan	165,000	0	165,000	0	165,000	100.00	0
000029. Makan	385,000	0	385,000	0	385,000	100.00	0
000030. Pencetakan Sartifikat, Penggandaan dan Penjilidan Laporan	2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000	100.00	0
BHB Operasi Bidang Keamanan	32,288,000	0	27,788,000	3,300,000	31,088,000	96.28 %	1,200,000
BHB.002 Layanan Keamanan dan Ketertiban	32,288,000	0	27,788,000	3,300,000	31,088,000	96.28 %	1,200,000
051 Penegakan Keamanan dan Ketertiban	13,088,000	0	13,088,000	0	13,088,000	100.00	0
051.0A Penegakan Keamanan dan Ketertiban	13,088,000	0	13,088,000	0	13,088,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000	100.00	0
000048. Penggandaan, Penjilidan dan Pelaporan	1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000	100.00	0
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	11,988,000	0	11,988,000	0	11,988,000	100.00	0
000049. Kebutuhan Razia, Penggeledahan dan Gangguan Kamtib	11,988,000	0	11,988,000	0	11,988,000	100.00	0
052 Pengawalan	19,200,000	0	14,700,000	3,300,000	18,000,000	93.75 %	1,200,000
052.0A Pengawalan Narapidana	19,200,000	0	14,700,000	3,300,000	18,000,000	93.75 %	1,200,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	19,200,000	0	14,700,000	3,300,000	18,000,000	93.75 %	1,200,000
000050. Transport Pengawalan	300,000	0	300,000	0	300,000	100.00	0
000156. Uang Harian	18,900,000	0	14,400,000	3,300,000	17,700,000	93.65 %	1,200,000

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**
***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

Kementerian : **013** **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**
Unit Organisasi **05** **DITJEN PEMASYARAKATAN**
Satuan Kerja : **418333** **LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG**

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
WA Program Dukungan Manajemen	4,679,301,000	0	4,167,604,177	259,594,584	4,427,198,761	94.61 %	252,102,239
WA.6231 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan	4,679,301,000	0	4,167,604,177	259,594,584	4,427,198,761	94.61 %	252,102,239
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	4,600,267,000	0	4,090,301,512	257,880,084	4,348,181,596	94.52 %	252,085,404
EBA.956 Layanan BMN	8,330,000	0	7,070,000	1,260,000	8,330,000	100.00	0
051 Penatausahaan dan Pengelolaan BMN	7,650,000	0	6,390,000	1,260,000	7,650,000	100.00	0
051.0A Penatausahaan dan Pengelolaan BMN	7,650,000	0	6,390,000	1,260,000	7,650,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7,650,000	0	6,390,000	1,260,000	7,650,000	100.00	0
000055. Transport antar Kabupaten (Tenggarong-Samarinda)	1,200,000	0	800,000	400,000	1,200,000	100.00	0
000158. Uang Harian	6,450,000	0	5,590,000	860,000	6,450,000	100.00	0
052 Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	680,000	0	680,000	0	680,000	100.00	0
052.0A Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	680,000	0	680,000	0	680,000	100.00	0
521213 Belanja Honor Output Kegiatan	680,000	0	680,000	0	680,000	100.00	0
000057. Honor Pengadaan Barang dan Jasa	680,000	0	680,000	0	680,000	100.00	0
EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	4,564,000	0	4,564,000	0	4,564,000	100.00	0
051 Penyediaan Informasi Publik	364,000	0	364,000	0	364,000	100.00	0
051.0A Penyediaan Informasi Publik	364,000	0	364,000	0	364,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	364,000	0	364,000	0	364,000	100.00	0
000130. Penggandaan, Penjilidan, Pelaporan dan Banner	364,000	0	364,000	0	364,000	100.00	0
052 Kerja Sama	4,200,000	0	4,200,000	0	4,200,000	100.00	0
052.0A Kerja Sama	4,200,000	0	4,200,000	0	4,200,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4,200,000	0	4,200,000	0	4,200,000	100.00	0
000131. Transport Lokal	4,200,000	0	4,200,000	0	4,200,000	100.00	0
EBA.962 Layanan Umum	40,447,000	0	31,354,800	5,781,000	37,135,800	91.81 %	3,311,200
051 Urusan Umum	40,447,000	0	31,354,800	5,781,000	37,135,800	91.81 %	3,311,200
051.0A Urusan Umum	40,447,000	0	31,354,800	5,781,000	37,135,800	91.81 %	3,311,200
521211 Belanja Bahan	26,197,000	0	22,204,800	1,891,000	24,095,800	91.98 %	2,101,200

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**
***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

Kementerian : **013** **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**
Unit Organisasi **05** **DITJEN PEMASYARAKATAN**
Satuan Kerja : **418333** **LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG**

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000125. Penggandaan, Penjilidan dan Pelaporan	9,836,000	0	7,714,800	1,701,000	9,415,800	95.73 %	420,200
000126. Spanduk, Banner dan Leflet	16,361,000	0	14,490,000	190,000	14,680,000	89.73 %	1,681,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	12,900,000	0	8,600,000	3,440,000	12,040,000	93.33 %	860,000
000127. Uang Harian	12,900,000	0	8,600,000	3,440,000	12,040,000	93.33 %	860,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,350,000	0	550,000	450,000	1,000,000	74.07 %	350,000
000129. Transport Lokal	1,350,000	0	550,000	450,000	1,000,000	74.07 %	350,000
EBA.994 Layanan Perkantoran	4,546,926,000	0	4,047,312,712	250,839,084	4,298,151,796	94.53 %	248,774,204
001 Gaji dan Tunjangan	3,496,665,000	0	3,188,487,749	218,211,346	3,406,699,095	97.43 %	89,965,905
001.0A Pembayaran gaji dan tunjangan	3,468,325,000	0	3,163,889,749	218,211,346	3,382,101,095	97.51 %	86,223,905
511111 Belanja Gaji Pokok PNS	2,386,886,000	0	2,210,786,155	179,830,535	2,390,616,690	100.16	-3,730,690
000058. Belanja Gaji Pokok PNS	2,054,782,000	0	1,878,683,885	179,830,535	2,058,514,420	100.18	-3,732,420
000059. Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)	166,052,000	0	166,051,135	0	166,051,135	100.00	865
000060. Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14)	166,052,000	0	166,051,135	0	166,051,135	100.00	865
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS	42,000	0	39,372	2,578	41,950	99.88 %	50
000061. Belanja Pembulatan Gaji PNS	34,000	0	32,550	2,578	35,128	103.32	-1,128
000062. Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)	4,000	0	3,389	0	3,389	84.72 %	611
000063. Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14)	4,000	0	3,433	0	3,433	85.82 %	567
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	101,185,000	0	99,529,811	7,539,127	107,068,938	105.82	-5,883,938
000064. Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	85,763,000	0	84,108,697	7,539,127	91,647,824	106.86	-5,884,824
000065. Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13)	7,711,000	0	7,710,557	0	7,710,557	99.99 %	443
000066. Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 14)	7,711,000	0	7,710,557	0	7,710,557	99.99 %	443
511122 Belanja Tunj. Anak PNS	35,193,000	0	33,105,293	2,543,249	35,648,542	101.29	-455,542
000067. Belanja Tunj.Anak PNS	29,921,000	0	27,933,899	2,543,249	30,477,148	101.86	-556,148
000068. Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13)	2,635,000	0	2,634,899	0	2,634,899	100.00	101
000069. Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 14)	2,637,000	0	2,536,495	0	2,536,495	96.19 %	100,505
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS	89,280,000	0	84,060,000	6,840,000	90,900,000	101.81	-1,620,000

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**
***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi 05 DITJEN PEMASYARAKATAN
Satuan Kerja : 418333 LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000070. Belanja Tunjangan Struktural PNS	76,680,000	0	71,460,000	6,840,000	78,300,000	102.11	-1,620,000
000071. Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 13)	6,300,000	0	6,300,000	0	6,300,000	100.00	0
000072. Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 14)	6,300,000	0	6,300,000	0	6,300,000	100.00	0
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS	141,180,000	0	141,180,000	10,860,000	152,040,000	107.69	-10,860,000
000073. Belanja Tunjangan Fungsional PNS	130,320,000	0	130,320,000	10,860,000	141,180,000	108.33	-10,860,000
000074. Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 13)	10,860,000	0	10,860,000	0	10,860,000	100.00	0
511125 Belanja Tunj. PPh PNS	7,328,000	0	7,524,118	126,417	7,650,535	104.40	-322,535
000075. Belanja Tunjangan PPh PNS	187,000	0	384,395	126,417	510,812	273.16	-323,812
000076. Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 13)	3,535,000	0	3,534,617	0	3,534,617	99.99 %	383
000077. Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 14)	3,606,000	0	3,605,106	0	3,605,106	99.98 %	894
511126 Belanja Tunj. Beras PNS	112,976,000	0	123,114,000	9,559,440	132,673,440	117.44	-19,697,440
000078. Belanja Tunj Beras PNS	112,976,000	0	123,114,000	9,559,440	132,673,440	117.44	-19,697,440
511129 Belanja Uang Makan PNS	585,480,000	0	456,686,000	0	456,686,000	78.00 %	128,794,000
000079. Belanja Uang Makan PNS	585,480,000	0	456,686,000	0	456,686,000	78.00 %	128,794,000
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS	8,775,000	0	7,865,000	910,000	8,775,000	100.00	0
000152. Belanja Tunjangan Umum PNS	8,035,000	0	7,125,000	910,000	8,035,000	100.00	0
000153. Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)	370,000	0	370,000	0	370,000	100.00	0
000154. Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14)	370,000	0	370,000	0	370,000	100.00	0
001.0B Uang Lembur	28,340,000	0	24,598,000	0	24,598,000	86.80 %	3,742,000
512211 Belanja Uang Lembur	28,340,000	0	24,598,000	0	24,598,000	86.80 %	3,742,000
000080. Uang Lembur Pegawai Gol IV	1,080,000	0	936,000	0	936,000	86.67 %	144,000
000081. Uang Lembur Pegawai Gol III	9,840,000	0	9,000,000	0	9,000,000	91.46 %	840,000
000082. Uang Lembur Pegawai Gol II	10,224,000	0	8,976,000	0	8,976,000	87.79 %	1,248,000
000083. Uang Makan Lembur Gol IV	287,000	0	205,000	0	205,000	71.43 %	82,000
000084. Uang Makan Lembur Gol III	2,849,000	0	2,331,000	0	2,331,000	81.82 %	518,000
000085. Uang Makan Lembur Gol II	4,060,000	0	3,150,000	0	3,150,000	77.59 %	910,000

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**
***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi 05 DITJEN PEMASYARAKATAN
Satuan Kerja : 418333 LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1,050,261,000	0	858,824,963	32,627,738	891,452,701	84.88 %	158,808,299
002.0A Kesehatan Pegawai	25,102,000	0	6,000,335	0	6,000,335	23.90 %	19,101,665
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	25,102,000	0	6,000,335	0	6,000,335	23.90 %	19,101,665
000086. Pemenuhan Kebutuhan Obat-Obatan Pegawai	25,102,000	0	6,000,335	0	6,000,335	23.90 %	19,101,665
002.0B Pemeliharaan Gedung	192,398,000	0	183,483,700	2,618,800	186,102,500	96.73 %	6,295,500
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	186,398,000	0	178,768,700	2,118,800	180,887,500	97.04 %	5,510,500
000087. Pemeliharaan Gedung dan Kantor Bertingkat	72,200,000	0	69,173,542	774,000	69,947,542	96.88 %	2,252,458
000088. Pemeliharaan Gedung dan Kantor Tidak Bertingkat	111,520,000	0	109,595,158	444,800	110,039,958	98.67 %	1,480,042
000164. Pemeliharaan Halaman Gedung/Bangunan Kantor (Kalimantan Timur)	2,678,000	0	0	900,000	900,000	33.61 %	1,778,000
523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	6,000,000	0	4,715,000	500,000	5,215,000	86.92 %	785,000
000089. Persediaan Lampu Gedung	6,000,000	0	4,715,000	500,000	5,215,000	86.92 %	785,000
002.0C Perbaikan Peralatan Perkantoran	34,155,000	0	25,431,416	3,060,000	28,491,416	83.42 %	5,663,584
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	34,155,000	0	25,431,416	3,060,000	28,491,416	83.42 %	5,663,584
000091. CCTV	3,600,000	0	2,291,400	375,000	2,666,400	74.07 %	933,600
000092. Televisi	1,500,000	0	245,000	0	245,000	16.33 %	1,255,000
000093. Steamer/Rice cooker	6,000,000	0	4,564,000	1,435,000	5,999,000	99.98 %	1,000
000094. Bahan Bakar Genset (100 KVA)	5,380,000	0	3,333,016	1,250,000	4,583,016	85.19 %	796,984
000095. Genset (100 KVA)	1,215,000	0	1,215,000	0	1,215,000	100.00	0
000096. Laptop	750,000	0	750,000	0	750,000	100.00	0
000097. Printer	9,750,000	0	7,075,000	0	7,075,000	72.56 %	2,675,000
000099. Peralatan Dapur	1,554,000	0	1,554,000	0	1,554,000	100.00	0
000100. Komputer	2,916,000	0	2,914,000	0	2,914,000	99.93 %	2,000
000162. Inventaris Kantor	1,490,000	0	1,490,000	0	1,490,000	100.00	0
002.0D Pemeliharaan Kendaraan	90,000,000	0	78,310,132	1,980,000	80,290,132	89.21 %	9,709,868
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	90,000,000	0	78,310,132	1,980,000	80,290,132	89.21 %	9,709,868

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**
***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi 05 DITJEN PEMASYARAKATAN
Satuan Kerja : 418333 LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000101. Kendaraan Roda 4	90,000,000	0	78,310,132	1,980,000	80,290,132	89.21 %	9,709,868
002.0E Langganan Daya dan Jasa	181,960,000	0	162,534,010	172,830	162,706,840	89.42 %	19,253,160
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	17,160,000	0	15,595,561	0	15,595,561	90.88 %	1,564,439
000102. Internet	17,160,000	0	15,595,561	0	15,595,561	90.88 %	1,564,439
522111 Belanja Langganan Listrik	89,200,000	0	81,110,800	0	81,110,800	90.93 %	8,089,200
000103. Listrik	89,200,000	0	81,110,800	0	81,110,800	90.93 %	8,089,200
522112 Belanja Langganan Telepon	2,400,000	0	1,773,749	172,830	1,946,579	81.11 %	453,421
000104. Telepon	2,400,000	0	1,773,749	172,830	1,946,579	81.11 %	453,421
522113 Belanja Langganan Air	73,200,000	0	64,053,900	0	64,053,900	87.51 %	9,146,100
000105. Air	73,200,000	0	64,053,900	0	64,053,900	87.51 %	9,146,100
002.0F Jasa Pos	1,200,000	0	588,500	0	588,500	49.04 %	611,500
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,200,000	0	588,500	0	588,500	49.04 %	611,500
000106. Pos Surat	1,200,000	0	588,500	0	588,500	49.04 %	611,500
002.0G Keperluan Perkantoran	112,540,000	0	95,934,381	1,997,300	97,931,681	87.02 %	14,608,319
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	80,540,000	0	67,250,731	1,997,300	69,248,031	85.98 %	11,291,969
000107. Keperluan Pokok Pegawai	74,240,000	0	63,575,731	947,300	64,523,031	86.91 %	9,716,969
000108. Pengelolaan Limbah Kantor	6,300,000	0	3,675,000	1,050,000	4,725,000	75.00 %	1,575,000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	32,000,000	0	28,683,650	0	28,683,650	89.64 %	3,316,350
000109. Alat Tulis Kantor (ATK)	32,000,000	0	28,683,650	0	28,683,650	89.64 %	3,316,350
002.0H Konsultasi dan Koordinasi	280,984,000	0	195,190,706	17,804,808	212,995,514	75.80 %	67,988,486
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	280,984,000	0	195,190,706	17,804,808	212,995,514	75.80 %	67,988,486
000110. Transport Antar Kabupaten (Tenggarong-Samarinda)	16,000,000	0	13,220,170	0	13,220,170	82.63 %	2,779,830
000111. Uang Harian	30,960,000	0	17,370,000	5,160,000	22,530,000	72.77 %	8,430,000
000112. Penginapan	37,800,000	0	26,262,518	2,720,000	28,982,518	76.67 %	8,817,482
000113. Tiket Pesawat PP	79,737,000	0	46,039,858	6,744,808	52,784,666	66.20 %	26,952,334
000114. Uang Harian (Jakarta)	44,520,000	0	20,340,000	3,180,000	23,520,000	52.83 %	21,000,000

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**
***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

Kementerian : **013** **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**
Unit Organisasi **05** **DITJEN PEMASYARAKATAN**
Satuan Kerja : **418333** **LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG**

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000159. Tiket Pesawat PP (Batam)	46,953,000	0	46,948,960	0	46,948,960	99.99 %	4,040
000160. Uang Harian (Batam)	16,650,000	0	16,650,000	0	16,650,000	100.00	0
000161. Penginapan (Batam)	8,364,000	0	8,359,200	0	8,359,200	99.94 %	4,800
002.0I Jamuan Tamu	17,526,000	0	14,025,600	0	14,025,600	80.03 %	3,500,400
521211 Belanja Bahan	17,526,000	0	14,025,600	0	14,025,600	80.03 %	3,500,400
000115. Jamuan Tamu	17,526,000	0	14,025,600	0	14,025,600	80.03 %	3,500,400
002.0J Honor Operasional Satuan Kerja	62,796,000	0	51,176,000	4,994,000	56,170,000	89.45 %	6,626,000
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	62,796,000	0	51,176,000	4,994,000	56,170,000	89.45 %	6,626,000
000116. KPA	18,648,000	0	15,540,000	1,554,000	17,094,000	91.67 %	1,554,000
000117. PPK	12,096,000	0	10,080,000	1,008,000	11,088,000	91.67 %	1,008,000
000118. Pejabat Penguji SPM	6,732,000	0	5,544,000	594,000	6,138,000	91.18 %	594,000
000119. Bendahara	4,128,000	0	3,440,000	344,000	3,784,000	91.67 %	344,000
000120. Bendahara Pengeluaran Pembantu	4,608,000	0	3,840,000	384,000	4,224,000	91.67 %	384,000
000121. Staf Pengelola Keuangan	9,216,000	0	7,680,000	768,000	8,448,000	91.67 %	768,000
000122. PPABP	4,104,000	0	3,420,000	342,000	3,762,000	91.67 %	342,000
000163. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	3,264,000	0	1,632,000	0	1,632,000	50.00 %	1,632,000
002.0K Penambah Daya Tahan Tubuh	51,600,000	0	46,150,183	0	46,150,183	89.44 %	5,449,817
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	51,600,000	0	46,150,183	0	46,150,183	89.44 %	5,449,817
000124. Peyediaan makanan/minuman (extra voeding) petugas jaga malam	51,600,000	0	46,150,183	0	46,150,183	89.44 %	5,449,817
EBC Layanan Manajemen SDM Internal	43,510,000	0	43,501,000	0	43,501,000	99.98 %	9,000
EBC.954 Layanan Manajemen SDM	43,510,000	0	43,501,000	0	43,501,000	99.98 %	9,000
051 Pembinaan Kepegawaian	43,510,000	0	43,501,000	0	43,501,000	99.98 %	9,000
051.0A Pembinaan Fisik Mental dan Disiplin (FMD)	43,510,000	0	43,501,000	0	43,501,000	99.98 %	9,000
521211 Belanja Bahan	2,560,000	0	2,560,000	0	2,560,000	100.00	0
000132. Kudapan	960,000	0	960,000	0	960,000	100.00	0
000133. Makan	1,600,000	0	1,600,000	0	1,600,000	100.00	0

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**
***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

Kementerian : **013** **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**
Unit Organisasi **05** **DITJEN PEMASYARAKATAN**
Satuan Kerja : **418333** **LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG**

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	31,350,000	0	31,341,000	0	31,341,000	99.97 %	9,000
000134. Kegiatan Pembinaan FMD	31,350,000	0	31,341,000	0	31,341,000	99.97 %	9,000
522151 Belanja Jasa Profesi	9,600,000	0	9,600,000	0	9,600,000	100.00	0
000135. Honorium Narasumber	9,600,000	0	9,600,000	0	9,600,000	100.00	0
EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	35,524,000	0	33,801,665	1,714,500	35,516,165	99.98 %	7,835
EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	12,170,000	0	12,165,665	0	12,165,665	99.96 %	4,335
051 Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran	12,170,000	0	12,165,665	0	12,165,665	99.96 %	4,335
051.0A Penyusunan RKAKL	12,170,000	0	12,165,665	0	12,165,665	99.96 %	4,335
521211 Belanja Bahan	110,000	0	110,000	0	110,000	100.00	0
000136. Penggandaan, Penjilidan dan Pelaporan	110,000	0	110,000	0	110,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	12,060,000	0	12,055,665	0	12,055,665	99.96 %	4,335
000137. Transport Antar Kabupaten (Tenggarong-Samarinda)	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	100.00	0
000138. Uang Harian	7,310,000	0	7,310,000	0	7,310,000	100.00	0
000139. Penginapan	3,750,000	0	3,745,665	0	3,745,665	99.88 %	4,335
EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	2,930,000	0	2,929,400	0	2,929,400	99.98 %	600
051 Penyusunan Laporan Kinerja	2,930,000	0	2,929,400	0	2,929,400	99.98 %	600
051.0A Penyusunan Laporan Kinerja	2,930,000	0	2,929,400	0	2,929,400	99.98 %	600
521211 Belanja Bahan	1,210,000	0	1,209,400	0	1,209,400	99.95 %	600
000149. Penggandaan, Penjilidan dan Pelaporan	1,210,000	0	1,209,400	0	1,209,400	99.95 %	600
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1,720,000	0	1,720,000	0	1,720,000	100.00	0
000150. Uang Harian	1,720,000	0	1,720,000	0	1,720,000	100.00	0
EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	7,220,000	0	6,320,000	900,000	7,220,000	100.00	0
051 Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan	7,220,000	0	6,320,000	900,000	7,220,000	100.00	0
051.0A Pengelola Sistem Akuntansi	7,220,000	0	6,320,000	900,000	7,220,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7,220,000	0	6,320,000	900,000	7,220,000	100.00	0
000146. Transport antar kabupaten (Tenggarong-	1,200,000	0	300,000	900,000	1,200,000	100.00	0

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**
***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2024

Kementerian : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi 05 DITJEN PEMASYARAKATAN
Satuan Kerja : 418333 LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
Samarinda)	1,200,000	0	300,000	900,000			0
000147. Uang Harian	6,020,000	0	6,020,000	0	6,020,000	100.00	0
EBD.961 Layanan Reformasi Kinerja	13,204,000	0	12,386,600	814,500	13,201,100	99.98 %	2,900
051 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM)	13,204,000	0	12,386,600	814,500	13,201,100	99.98 %	2,900
051.0A Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	13,204,000	0	12,386,600	814,500	13,201,100	99.98 %	2,900
521211 Belanja Bahan	3,472,000	0	2,657,000	814,500	3,471,500	99.99 %	500
000141. Penggandaan	3,472,000	0	2,657,000	814,500	3,471,500	99.99 %	500
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9,732,000	0	9,729,600	0	9,729,600	99.98 %	2,400
000143. Uang Harian (Batam)	5,550,000	0	5,550,000	0	5,550,000	100.00	0
000144. Penginapan (Batam)	4,182,000	0	4,179,600	0	4,179,600	99.94 %	2,400

***Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.**
***SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir**

IKPA PENARIKAN HALAMAN III DIPA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Lapas Perempuan Kelas IIA Samarinda

DETAIL INDIKATOR HALAMAN 3 DIPA

No.	Kode Satker	Nama Satker	Kode KPPN	Periode	Rencana				Penyerapan				Deviasi				% Deviasi				% Proporsi Pagu				% Deviasi Tertimbang				% Deviasi Seluruh J.Bel	% Rata-Rata Deviasi Kumulatif	Nilai IKPA
					51	52	53	57	51	52	53	57	51	52	53	57	51	52	53	57	51	52	53	57	51	52	53	57			
1	418333	LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG	046	01	192,780,833	82,131,919	0	0	192,780,835	82,132,042	0	0	2	123	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	45.35	54.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2	418333	LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG	046	02	261,300,559	404,103,460	0	0	261,566,452	399,035,581	0	0	265,893	5,067,879	0	0	0.10	1.25	0.00	0.00	45.35	54.65	0.00	0.00	0.05	0.68	0.00	0.00	0.73	0.37	100.00
3	418333	LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG	046	03	243,033,463	435,241,903	0	0	451,897,092	371,395,224	0	0	208,863,629	63,846,679	0	0	85.94	14.67	0.00	0.00	45.35	54.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	100.00
4	418333	LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG	046	04	254,500,539	331,031,959	0	0	254,500,540	325,930,221	0	0	1	5,101,738	0	0	0.00	1.54	0.00	0.00	45.35	54.65	0.00	0.00	0.00	0.84	0.00	0.00	0.84	0.39	100.00
5	418333	LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG	046	05	249,431,929	413,919,672	0	0	249,454,913	423,272,375	0	0	22,984	9,352,703	0	0	0.01	2.26	0.00	0.00	45.35	54.65	0.00	0.00	0.00	1.24	0.00	0.00	1.24	0.56	100.00
6	418333	LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG	046	06	451,863,825	264,408,672	0	0	461,466,396	264,512,944	0	0	9,602,571	104,272	0	0	2.13	0.04	0.00	0.00	45.35	54.65	0.00	0.00	0.97	0.02	0.00	0.00	0.99	0.63	100.00
7	418333	LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG	046	07	259,551,583	244,489,047	0	0	259,725,667	243,950,317	0	0	174,084	538,730	0	0	0.07	0.22	0.00	0.00	45.35	54.65	0.00	0.00	0.03	0.12	0.00	0.00	0.15	0.56	100.00
8	418333	LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG	046	08	264,184,581	317,428,669	0	0	264,065,728	317,430,569	0	0	118,853	1,900	0	0	0.04	0.00	0.00	0.00	45.35	54.65	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.50	100.00
9	418333	LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG	046	09	259,184,580	317,429,103	0	0	260,785,304	271,811,743	0	0	1,600,724	45,617,360	0	0	0.62	14.37	0.00	0.00	45.35	54.65	0.00	0.00	0.28	7.85	0.00	0.00	8.13	1.34	100.00
10	418333	LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG	046	10	264,680,068	310,879,728	0	0	266,302,068	311,254,000	0	0	1,622,000	374,272	0	0	0.61	0.12	0.00	0.00	46.65	53.35	0.00	0.00	0.28	0.06	0.00	0.00	0.34	1.24	100.00
11	418333	LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG	046	11	269,680,068	319,710,108	0	0	265,942,754	316,864,165	0	0	3,737,314	2,845,943	0	0	1.39	0.89	0.00	0.00	46.65	53.35	0.00	0.00	0.65	0.47	0.00	0.00	1.12	1.23	100.00

12	418333	LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG	046	12	269,680,068	319,710,108	0	0	265,942,754	316,864,165	0	0	3,737,314	2,845,943	0	0	1.39	0.89	0.00	0.00	46.65	53.35	0.00	0.00	0.65	0.47	0.00	0.00	1.12	1.23	100.00

LAPORAN UPG
TRIWULAN IV
TAHUN 2024

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Alamat : Jl. Imam Bonjol No.37 RT.08, Kel.Melayu, Tenggarong Kutai Kartanegara
Telp. 0541-6720100 Email : lpp.smd@gmail.com

25 November 2024

Yth,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Kalimantan Timur
di -
Samarinda

SURAT PENGANTAR

Nomor : W18.PAS.PAS.7. PR.04.02- 2875

NO	Naskah Dinas yang Dikirimkan	Banyaknya	Keterangan
1.	Laporan Unit Pengendalian Gratifikasi Triwulan IV Tahun 2024 pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong	1 Berkas	Demikian untuk menjadi periksa

KEPALA

Ditandatangani secara elektronik oleh

Triana Agustin
NIP 198208282000122001

Tembusan:
1. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;
2. Direktur Jenderal Pemasyarkatan Kementerian Hukum dan HAM RI;
3. Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur

LAPORAN
TRIWULAN IV TAHUN 2024

TENTANG
PROGRAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN UNIT KERJA LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

A. Pendahuluan

1. Umum

Dalam rangka mendorong pemerintah agar membuka diri dan membuka ruang partisipasi warga negara demi terciptanya transparansi pemerintahan (***open goverment partnership***) di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia perlu adanya Pengendalian Gratifikasi sebagai perwujudan dari integritas pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Upaya strategi percepatan melalui Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi secara nasional dibangun secara berkesinambungan dalam jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana ***Grand Design*** yang dibangun dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 yang harus dilaksanakan masing-masing kementerian/lembaga sesuai tugas dan fungsinya agar tepat sasaran.

Pelaporan gratifikasi bukan untuk menghukum tetapi dalam rangka membangun kesadaran pegawai sekaligus untuk memberikan perlindungan bagi pegawai yang rawan potensi adanya gratifikasi dalam pelaksanaan tugas, agar supaya ketentuan dan pelaksanaan pengendalian Gratifikasi menjadi lebih implementatif.

Kementerian Hukum dan HAM bekerja sama dengan Deputi Bidang Pencegahan KPK terus membangun dan berusaha untuk mewujudkan aparatur yang berintegritas dan Berbudaya Anti Korupsi dengan direvisinya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2014 diganti menjadi 58 Tahun 2016 tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian HAM, di dalam Peraturan tersebut tercantum pada Pasal 7 tentang terbentuknya Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di seluruh satuan kerja baik di Unit Utama, Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis sebagai bentuk pengendalian pencegahan adanya korupsi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, demi terciptanya lingkungan kerja yang kondusif dan berintegritas dalam peningkatan pelayanan masyarakat yang bersih dari praktik gratifikasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM khususnya di Unit Kerja Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dilaksanakan Program Pengendalian Gratifkasi untuk membentuk karakter pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang berintegritas guna mewujudkan *good governance* dan *clean government.*

Laporan Pengendalian Gratifikasi ini bertujuan untuk :

a. Membangun pengendalian gratifikasi, yang ditandai dengan kesadaran setiap pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM untuk berkomitmen menghindari praktik-praktik gratifikasi;

b. Membangun komitmen dan integritas pada setiap pegawai yang pada akhirnya membangun integritas pegawai dalam pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan anti korupsi;

c. Mewujudkan kinerja Kementerian Hukum dan HAM sebagai Zona Integritas dan Wilayah Bebas dari Korupsi, serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani baik secara individu maupun organisasi.

3. Ruang Lingkup

Program Pengendalian Gratifikasi mencakup upaya-upaya pencegahan terhadap praktik gratifikasi pada seluruh unit satuan kerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

4. Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

b. Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

c. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);

d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

e. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

f. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

g. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

B. Kegiatan yang Dilaksanakan Dan Hasil yang Dicapai

No	Kegiatan	Hasil yang Dicapai	Data Dukung
1	Kalapas melakukan sosialisasi kepada Warga Binaan tentang gratifikasi dan pungli	Mencegah adanya gratifikasi yang dilakukan antara Petugas dan Warga Binaan	Dokumentasi kegiatan (terlampir)
2	Sosialisasi terkait pencegahan gratifikasi oleh Kalapas kepada seluruh Petugas Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong	Petugas memahami tentang pengendalian gratifikasi	
3	Diseminasi media sosial pesan anti gratifikasi		
4	Keterlibatan Stakeholder dalam Implementasi Pengendalian Gratifikasi		
5	Pemasangan Banner		

C. Simpulan & Saran

1. Simpulan

Kementerian Hukum dan HAM terus membangun dan berusaha dalam mewujudkan aparatur yang berintegritas dan Berbudaya Anti Korupsi dengan direvisinya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2014 diganti menjadi 58 Tahun 2016 tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan terbentuknya Unit Pengendalian Gratifikasi di seluruh satuan kerja sebagai bentuk pengendalian pencegahan adanya korupsi serta gratifikasi.

2. Saran

a. Diharapkan dengan telah direvisinya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dapat membangun kesadaran setiap pegawai untuk berkomitmen menghindari praktik-praktik gratifikasi;

b. Diharapkan dengan adanya Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di setiap satuan kerja dapat membangun komitmen dan integritas pada setiap pegawai yang pada akhirnya membangun integritas Kementerian Hukum dan HAM khususnya dalam pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan anti korupsi.

D. Penutup

Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong diharapkan mampu mewujudkan petugas yang berintegritas dan berbudaya anti korupsi dan wilayah bebas dari korupsi di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

Demikian Laporan ini dibuat sebagai bahan informasi dan evaluasi Program Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

MENGETAHUI
KEPALA LAPAS

TRIANA AGUSTIN
NIP. 198208282000122001

Tenggarong, 25 November 2024
KETUA UPG

SITI MAIMUNAH
NIP. 197105131991032001

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Alamat : Jl. Imam Bonjol No.37 RT.08, Kel.Melayu, Tenggarong Kutai Kartanegara
Telp. 0541-6720100 Email : lpp.smd@gmail.com

DOKUMEN PENDUKUNG
PROGAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

1. Data Penyampaian Pelaporan Gratifikasi Pada Triwulan IV Tahun 2024

No	Nama Pelopor	Jabatan	Tanggal/Penerimaan Penolakan	Pemberi Gratifikasi	Jenis Laporan(Penerimaan/Penolakan	Objek Gratifikasi	Pemanfaatan Objek Gratifikasi	Keterangan
				NIHIL				

2. Diseminasi Media Sosial Anti Gratifikasi

No.	Jenis/Media Sosialisasi	Lokasi	Dokumentasi
1	Sosialisasi tentang Program Pengendalian Gratifikasi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong Tautan : https://www.instagram.com/p/CpRPnS-pEMZ/	Instagram LPP Tenggarong : @lpp_tenggarong	

3. Sosialisasi Gratifikasi Secara Mandiri

No.	Nama/Tema kegiatan	Uraian Kegiatan	Dokumentasi
1.	Kalapas melakukan sosialisasi kepada Warga Binaan tentang gratifikasi dan pungli	**Narasumber:** Kalapas **Waktu Pelaksanaan:** 20 November 2024 **Tempat:** Kamar Hunian LPP Tenggarong **Peserta:** Warga Binaan	

2.	Penguatan terkait pencegahan gratifikasi oleh Kalapas kepada seluruh Petugas Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong	**Narasumber:** Kalapas **Waktu Pelaksanaan:** 24 Oktober 2024 **Tempat:** Aula LPP Tenggarong **Peserta:** Seluruh Petugas	

4. Keterlibatan Stakeholder dalam Implementasi Pengendalian Gratifikasi

No.	Nama/Tema kegiatan	Uraian Kegiatan	Dokumentasi
	Upaya pencegahan gratifikasi oleh Dr. Aqua Dwipayana kepada Seluruh Petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong	**Narasumber:** Dr. Aqua Dwipayana (Ahli Komunikasi Nasional) **Waktu Pelaksanaan:** 3 Oktober 2024 **Tempat:** Aula LPP Tenggarong **Peserta:** Seluruh Petugas	

5. Banner Tolak Gratifikasi

No.	Unit Kerja/Ruang	Dokumentasi
1.	Ruang Layanan Publik	

2.	Halaman Kantor	
3.	Halaman parkir	

KEPALA

Ditandatangani secara elektronik oleh

Triana Agustin
NIP 198208282000122001

DRAFT

SURAT PEMBERITAHUAN HABIS MASA PENAHANAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Alamat : Jl. Imam Bonjol No.37 RT.08 Kel. Melayu Tenggarong- Kutai Kartanegara
Telp. (0541) 6720100 Email : lpptenggarong@gmail.com

Nomor : W.18.PAS.PAS.7-PK.01.01-2823 22 November 2024
Lampiran : -
Perihal : Surat Pemberitahuan Akan Habis Masa Penahanan an. **Vatmah Binti Dulrahman.**

Yth.
Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara
di-
Tenggarong

Memperhatikan Surat Penetapan Penahanan dari Kejaksaan Negeri Tenggarong yang akan berakhir, maka dengan ini kami informasikan nama Tahanan yang akan habis masa penahanannya :

No.	No.Registrasi	Nama Tahanan	Tgl.Nomor Surat Penahanan	Perkara	Akan Habis Masa Penahanan			Tgl. Habis Masa Penahanan
					10 Hari	**3 Hari**	**1 Hari**	
1	AII.024.2024	Vatmah Binti Dulrahman	13/11/2024 PRINT-2467/O.4.12/ENZ.2/11/2024	Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009	22/11/2024	29/11/2024	01/12/2024	02/12/2024

Selanjutnya mohon untuk diterbitkan surat perpanjangan penahanan bagi nama tahanan tersebut diatas.

Demikian atas perhatian dan kerjasama diucapkan terima kasih.

KEPALA

Triana Agustin
NIP. 198208282000122001

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur

PERMINTAAN LITMAS USULAN PEMBEBASAN BERSYARAT

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jl. Imam Bonjol No. 37, Kelurahan Melayu, Tenggarong, Kutai Kartanegara
Telp 0541-6720100 Email : lpptenggarong@gmail.com

Nomor : W.18.PAS.PAS.7-PK.04.01-2750 Tenggarong, 11 November 2024
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Permintaan Litmas Usulan
Pembebasan Bersyarat (PB) an. **Nur Hidah Binti Gani**, dkk.

Yth.
Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Samarinda
Di -
Samarinda

Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan pasal 10 (1) huruf f dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, dengan hormat kami mohon kiranya dapat dibuatkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) untuk Permintaan Litmas Usulan Pembebasan Bersyarat (PB) sebanyak 9 (sembilan) orang beserta hasil ISPN dan Laporan Hasil Assesment RRI Kriminogenik terhadap Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong (Data warga binaan terlampir).

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

KEPALA

Triana Agustin
NIP. 198208282000122001

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI di Jakarta
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur di Samarinda

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jl. Imam Bonjol No. 37 Kel. Melayu Tenggarong, Kutai Kartanegara
Telepon 0541- 6720100, Email : lpptenggarong@gmail.com

DATA-DATA ADMINISTRATIF WARGA BINAAN DAN MASA PENTAHAPAN PEMBINAAN

No.	Nama WBP	No. Reg	Ekspirasi	Nama dan Alamat Penjamin	Tindak Pidana/Lama Pidana	Tgl.SPP/Tgl.Vonis/Nomor Vonis	Tahapan Pembinaan			Pendidikan	Agama	Ket.	Nama PPK
							1/3	1/2	2/3				
1	Nur Hidah Binti Gani	BI.043.2023	11/02/2027	Sugiraharjo (Anak Kandung). Jalan Negara RT. 008 Desa Hajak Kec. Teweh Baru Kab. Barito Utara Kalimantan Tengah. No. Telp. 085754223431/081258705797	Narkotika/Pasal 114 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009/5 Tahun 6 Bulan, Denda Rp 1.000.000.000, Sub. 3 Bulan	Tgl SPP 13/03/2022 /Tgl vonis 26/07/2022 No. 79/Pid.Sus/2022/PN Pnj	11/06/2023	12/05/2024	12/04/2025	Tidak Lulus SD	Islam	Pembebasan Bersyarat (PB)	Bunga Noviyanti
2	Marjenah Binti Marlian (Alm)	BI.051.2023	09/07/2027	Feny Al Fiah (Anak Kandung). Jalan Bangun Mulyo RT. 05 Waru, Penajam Paser Utara. No. Telp. 085845530896	Narkotika/Pasal 114 (1) jo 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009/5 Tahun 6 Bulan, Denda Rp 1.000.000.000, Sub. 3 Bulan	Tgl SPP 24/07/2022 /Tgl vonis 31/10/2022 No. 133/Pid.Sus/2022/PN Pnj	06/11/2023	07/10/2024	07/09/2025	SD	Islam	Pembebasan Bersyarat (PB)	Ni Made Peggi Gita Safitri
3	Susanti Als Santi Binti Supri (Alm)	BI.005.2024	09/02/2027	Endah Saputri Ardiyanti (Anak Kandung). Jalan Raudah RT. 20, No. 21 Kel. Teluk Lerong Ilir Kec. Samarinda Ulu. No. Telp. 083116784328	Narkotika/Pasal 112 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009/4 Tahun, Denda Rp 800.000.000, Sub. 1 Bulan	Tgl SPP 25/04/2023/ Tgl vonis 18/10/2023 No. 718/PID.SUS/2023/PN SMR	09/06/2024	04/02/2025	07/10/2025	SMP	Islam	Pembebasan Bersyarat (PB)	Randy Mamola
4	Elsa Nurbati Binti Ade Darman	BI.109.2023	30/10/2027	Muhammad Yunus (Suami). Jalan Gotong Royong RT. 02 Kel. Sangatta Selatan Kec. Sangatta Selatan. No. Telp. 085247679991	Narkotika/Pasal 114 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009/4 Tahun 10 Bulan, Denda Rp 800.000.000, Sub. 6 Bulan	Tgl SPP 03/04/2023 / Tgl vonis 17/10/2023 No. 317/PID.SUS/2023/PN SGT	11/08/2024	02/06/2025	19/03/2026	SMK	Islam	Pembebasan Bersyarat (PB)	Evi Puspitasari
5	Masruni Binti La Hasyim	BI.108.2018	10/08/2030	Nurhayati (Adik Kandung). Jalan KH. Agus Salim II RT. 27 No. 14 Kel. Klandasan Ulu, Kec. Balikpapan Kota. No. Telp. 085246219791	Narkotika/Pasal 114 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009/14 Tahun, Denda Rp 1.000.000.000, Sub. 1 Bulan	Tgl SPP 15/02/2018 / Tgl 16/07/2018 No. 437/PID.SUS/2018/Pn.BPP	01/04/2021	30/07/2023	27/11/2025	SMP	Islam	Pembebasan Bersyarat (PB)	Fattimatuzuhra
6	Ina Rosiana Binti Anto (Alm)	BI.047.2021	12/06/2028	Rusdiana (Sepupu). Jalan Sultan Hasanuddin RT. 45 No. 160 Balikpapan Barat. No. Telp. 081345986702	Narkotika/Pasal 114 (2) UU RI NO. 35 Tahun 2009/9 Tahun, Denda Rp 1.000.000.000, Sub. 2 Bulan	Tgl SPP 04/11/2020 /Tgl vonis 13/04/2021 No. 34/Pid.Sus/2021/PN Bpp	02/06/2022	04/12/2023	02/06/2025	SMA	Islam	Pembebasan Bersyarat (PB)	Bunga Noviyanti
7	Selvi Marhamah Wayan Binti Gede Anom	BI.048.2023	04/11/2027	Siti Tautha Fauziah (Anak Kandung). Jalan Kusuma Bangsa Desa Tepian Batang RT. 002 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser. No. Telp. 083822045318/085757136838	Narkotika/Pasal 114 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009/5 Tahun 6 Bulan, Denda Rp 1.000.000.000, Sub. 6 Bulan	Tgl SPP 20/10/2022 / Tgl Vonis 11/01/2023 No. 225/Pid.Sus/2022/PN Tgt	03/03/2024	02/02/2025	03/01/2026	SMP	Islam	Pembebasan Bersyarat (PB)	Ni Made Peggi Gita Safitri
8	Mailina Als Maya Binti Burhan (Alm)	BI.013.2021	12/02/2029	Chandra Kirana (Anak Kandung). Jalan Biawan Gg. 4 No. 53 RT. 13 Samarinda. No. Telp. 081251011352	Narkotika/Pasal 114 (2) UU RI NO. 35 Tahun 2009/10 Tahun, Denda Rp 1.000.000.000, Sub. 6 Bulan	Tgl SPP 06/08/2020 / Tgl vonis 10/12/2020 No. 815/PID.SUS/2020/PN.SMR	02/06/2022	02/02/2024	05/10/2025	SMA	Islam	Pembebasan Bersyarat (PB)	Randy Mamola
9	Suci Nur Istiqomah Binti Samsuddin	BI.043.2020	21/07/2028	Suci Lestari (Kakak Kandung). Jalan Mangkuraja No. 59 Rt. 70 Tenggarong. No. Telp. 081350992922	Perlindungan Anak/ UU RI No. 35 Tahun 2014/ 11 Tahun, Denda Rp 60.000.000, Sub. 4 Bulan	Tgl SPP 26/07/2019 / Tgl vonis 22/01/2020 No. 835/Pid.Sus/2019/PN.Bpp	08/03/2021	07/01/2023	08/11/2024	STM	Islam	Pembebasan Bersyarat (PB)	Evi Puspitasari

Tenggarong, 11 Oktober 2024
KEPALA

Triana Agustin
NIP. 198208282000122001

LAPORAN PEMBINAAN KEPRIBADIAN DAN PEMBINAAN KEMANDIRIAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
JL. IMAM BONJOL, NO. 37, KELURAHAN KAMPUNG MELAYU, TENGGARONG
KUTAI KARTANEGARA, Telp 0541-6720100

Nomor : W.18.PAS.PAS.7-PK.05.01 – 2426 08 Oktober 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Laporan Kegiatan Penampilan Kesenian (Tari)

Yth.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Kalimantan Timur
Di -
SAMARINDA

Dalam rangka pelaksanaan program pembinaan kepribadian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong telah melaksanakan kegiatan pembinaan di luar Lapas dalam rangka menindaklanjuti undangan dari Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : B-51/EKRAF/500.13/10/2024 tanggal 03 Oktober 2024 perihal Permohonan Partisipasi Penampilan Seni pada Kegiatan Simpang Odah Etam Tahun 2024.

Selanjutnya kami sampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Pembinaan sebagai berikut. Demikian Laporan disampaikan untuk menjadikan periksa.

KEPALA,

Triana Agustin
NIP. 198208282000122001

LAPORAN KEGIATAN PEMBINAAN KEPRIBADIAN
PENAMPILAN KESENIAN (TARI)
PADA KEGIATAN SIMPANG ODAH ETAM TAHUN 2024

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI

KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR

LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

JL. IMAM BONJOL, NO. 37, KELURAHAN MELAYU, TENGGARONG,

KUTAI KARTANEGARA, Telp 0541-6720100

LAPORAN KEGIATAN PEMBINAAN KEPRIBADIAN
PENAMPILAN KESENIAN (TARI)
PADA KEGIATAN SIMPANG ODAH ETAM TAHUN 2024

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan menegaskan bahwa sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas, serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar , memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan ditekankan pada kegiatan pembinaan kepribadian dan kegiatan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan kepada pembinaan bakat dan keterampilan agar warga binaan pemasyarakatan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

B. MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN :

Memberikan motivasi dan kesadaran diri agar dapat menjadi warga negara yang baik yang dapat berbakti bagi bangsa dan negaranya. Pembinaan kepribadian bagi warga binaan pemasyarakatan, khususnya bidang kesenian merupakan salah satu bentuk kegiatan yang bertujuan untuk mengasah kreatifitas dan mengembangkan potensi diri Warga Binaan Pemasyarakatan.

C. RUANG LINGKUP

Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

D. DASAR

1. Undang – undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia(HAM);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 31 Tahun 1999 (31/1999) Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1999 Tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
5. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;

6. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;

E. KEGIATAN

Penampilan tari pada pembukaan kegiatan Simpang Odah Etam Tahun 2024 dilaksanakan pada :

Hari / tanggal : Sabtu, 05 Oktober 2024
Pukul : 19.30 s.d 21.00 wita
Tempat : Simpang Odah Etam Kutai Kartanegara
Peserta : 6 orang Warga Binaan Lapas Perempuan Tenggarog
Pengawal : 12 orang Petugas Lapas Perempuan Tenggarong

F. PENUTUP

Demikian laporan kegiatan pembinaan kepribadian penampilan kesenian (tari) pada kegiatan Simpang Odah Etam Tahun 2024 ini disampaikan, atas kerjasama dan partisipasi para pihak dengan terlaksananya kegiatan tersebut kami ucapkan terima kasih.

Tenggarong, 08 Oktober 2024
KEPALA

Triana Agustin
NIP 198208282000122001

DOKUMENTASI KEGIATAN KEPRIBADIAN (KESENIAN) TAHUN 2024 DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

KEGIATAN KEPRIBADIAN (KESENIAN) TAHUN 2024
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PARIWISATA
Komplek Perkantoran Bupati Kutai Kartanegara Gedung D Lantai 3
Jalan Wolter Monginsidi Kelurahan Timbau Tenggarong Kode Pos.75511
Website : https://dispar.kukarkab.go.id/ - visitingkutaikartanegara.com

Tenggarong, 3 Oktober 2024

Kepada
Yth. Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Perempuan Kelas IIA Tenggarong
Di -
Tempat

Nomor : B-51/EKRAF/500.13/10/2024
Sifat : BIASA
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Partisapasi Penampilan Seni pada Kegiatan Simpang Odah Etam**

Dalam rangka menjalankan program dedikasi Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu program Dedikasi Kukar Kreatif Idaman, Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara akan melaksanakan kegiatan Simpang Odah Etam, sehubungan hal tersebut bersama ini kami sampaikan undangan kepada Sanggar Tari Danastri Nawasena agar dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud pada :

Hari : Sabtu
Tanggal : 05 Oktober 2024
Pukul : 19 : 30 Wita - Selesai
Tempat : Jl. Mayjen Sutoyo (Jl. Kartanegara) Kabupaten Kutai Kartanegara
Acara : Kegiatan Simpang Odah Etam

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Plt. Kepala Dinas Pariwisata

SUGIARTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)

BerAKHLAK bangga melayani bangsa

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Alamat : Jl. Imam Bonjol No.37 RT.08 Kel. Melayu, Tenggarong - Kutai Kartanegara
Telp. (0541) 6720100 Email : lpptenggarong@gmail.com

Nomor : W18.PAS.PAS.7-PK.05.01- 2400
Lampiran : 1 Lembar
Perihal : Permohonan Ijin Kegiatan Pembinaan.

03 Oktober 2024

Yth.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kalimantan Timur
di -
Samarinda

Menindaklanjuti undangan dari Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : B-51/EKRAF/500.13/10/2024 tanggal 03 Oktober 2024 perihal “Permohonan Partisipasi Penampilan Seni Pada Kegiatan Simpang Odah Etam Tahun 2024” dimana Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong diminta untuk berpartisipasi menampilkan tari warga binaan, mohon perkenan Bapak untuk dapat memberikan izin bagi WBP kami untuk mengikuti kegiatan yang dimaksud pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2024 pukul 19.30-21.00 WITA, dengan daftar nama sebagai berikut :

No.	Nama WBP	No. Registrasi	Perkara	Putusan PN/No.Putusan/Lama Pidana	Ekspirasi	Usulan
1	Sephia Pramesti Binti Muhammad Fitri	BI.076.2023	Narkotika	Tgl 07/09/2022 / No. 323/Pid.Sus/2022/PN Bpp / 7 Tahun, Denda Rp 1.000.000.000, Sub. 6 Bulan	04/11/2028	Ijin keluar Lapas untuk berpartisipasi penampilan seni (tari) pada kegiatan simpang odah etam.
2	Evi Veronika Binti Oktevianus	BI.008.2023	Narkotika	Tgl 30/08/2022 / No. 346/Pid.Sus/2022/PN Bpp / 6 Tahun, Denda Rp 1.000.000.000, Sub. 4 Bulan	26/08/2027	
3	Lediana Binti Senam	BI.032.2023	Narkotika	Tgl 13/04/2023 / No. 53/PID.SUS/2023/PN TRG / 5 Tahun, Denda Rp 800.000.000, Sub. 6 Bulan	04/06/2027	
4	Asrinda Sari Binti Ahmadi (Alm)	BI.108.2023	Narkotika	Tgl 14/06/2023 / No. 112/PID.SUS/2023/PN SDW / 7 Tahun 6 Bulan, Denda Rp 1.000.000.000, Sub. 6 Bulan	29/01/2030	
5	Asrianti Binti Arsa	BI.107.2023	Narkotika	Tgl 14/06/2023 / No. 111/PID.SUS/2023/PN SDW / 7 Tahun 6 Bulan, Denda Rp 1.000.000.000, Sub. 6 Bulan	29/01/2030	
6	Anisa Amelia Binti Hariyanto	BI.108.2020	Narkotika	Tgl 01/07/2020 / No. 287/Pid.Sus/2020/PN.Bpp / 6 Tahun 6 Bulan, Denda Rp 1.000.000.000, Sub. 2 Bulan	17/08/2025	

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, kami lampirkan :

1. Undangan dari Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara dan *rundown* kegiatan.
2. Rekomendasi Hasil TPP Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perkenaan bapak kami ucapkan terimakasih.

KEPALA,

Triana Agustin
NIP. 198208282000122001

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Alamat : Jl. Imam Bonjol No.37 Kampung Melayu Tenggarong, Kutai Kartanegara
Telp. 0541-6720100 Email : lpptenggarong@gmail.com

SURAT PERINTAH PENGAWALAN

Nomor : W18.PAS.PAS.7.UM.05.01 - 2398

Dasar : a. Sehubungan dengan Surat Permohonan Partisapasi Penampilan Seni pada Kegiatan Simpang Odah Etam Nomor : B-51/EKRAF/500.13/10/2024 pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2024 di Jl. Mayjen Sutoyo (Jl. Kartanegara) Kabupaten Kutai Kartanegara dan Rekomendasi Sidang TPP Nomor : 49/10/2024 tanggal 04 Oktober 2024, diperlukan petugas pendamping dan pengawalan WBP untuk mengisi acara tersebut.

b. Bahwa nama petugas yang ditunjuk dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut, diperlukan surat perintah.

Mengingat : 1. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH-11.OT.01.02 tahun 2020, tanggal 07 Desember 2020 Tentang Perubahan Nomenklatur Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Samarinda menjadi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

2. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 8 Tahun 2024, tanggal 07 Februari 2024 tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Pada Satuan Kerja Pemasyarakatan.

Memerintahkan :

Kepada : Petugas atas nama :

1. Nama : **Andi Hasnaeni**
NIP : 19690907 199203 2 001
Pangkat : Penata Tk. I (III/d)
Jabatan : Kasi Adminstrasi Kamtib (Selaku Pengawal)

2. Nama : **Yhuni Rindawati**
NIP : 198306172005012001
Pangkat : Penata Tk.I (III/d)
Jabatan : Ka. KPLP

3. Nama : **Adhiyani Maulina**
NIP : 19801031 200501 2 001
Pangkat : Penata Tk.I (III/d)
Jabatan : Kasubsi Pelaporan dan Tata Tertib (Selaku Pengawal)

4. Nama : **Siti Rahmah**
NIP : 19810716 200312 2 002
Pangkat : Penata Muda Tk.I (III/d)
Jabatan : Kasubsi Bimaswat

5. Nama : **Nanang Budiyono**
NIP : 19821204 201012 1 002
Pangkat : Penata (III/c)
Jabatan : Kaur Kepegawaian dan Keuangan (Selaku Pengawal)

6. Nama : **Bunga Noviyanti**
NIP : 19931105 201712 2 003
Pangkat : Pengatur Muda Tk.I (II/b)
Jabatan : JFU Pengelola Pembinaan Kepribadian (Selaku Pengawal)

7. Nama : **Randy Mamola**
NIP : 19940101 201712 1 004
Pangkat : Pengatur Muda Tk.I (II/b)
Jabatan : JFU Penelaah Status WBP (Selaku Pengawal)

8. Nama : **Febry Carolina Siahaya**
NIP : 199502262017122002
Pangkat : Pengatur Muda Tk.I (II/b)
Jabatan : JFU Pengelola Sarana Kerja

9. Nama : **Yulinda Nur Rahmah**
NIP : 19950708 201712 2 001
Pangkat : Pengatur Muda Tk.I (II/b)
Jabatan : JFU Pengolah Data Laporan Pemeliharaan (Selaku Pengawal)

10. Nama : **Fatimatuzzuhra**
NIP : 19970618 201712 2 002
Pangkat : Pengatur Muda Tk.I (II/b)
Jabatan : JFU Pengelola Data Kesehatan (Selaku Pengawal)

11. Nama : **Nurul Huda Fauziah**
NIP : 19970621 201712 2 001
Pangkat : Pengatur Muda Tk.I (II/b)
Jabatan : JFU Pengelola SDP (Selaku Pengawal)

12. Nama : **Ni Made Peggi Gita Safitri**
NIP : 19990512 201712 2 002
Pangkat : Pengatur Muda Tk.I (II/b)
Jabatan : JFU Pengelola Makanan (Selaku Pengawal)

Untuk : 1. Untuk Melakukan pendampingan dan pengawalan 6 (enam) orang WBP dengan daftar terlampir.
2. Melaporkan pelaksanaan tugas pengawalan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tenggarong.

Tenggarong, 04 Oktober 2024
KEPALA

TRIANA AGUSTIN
NIP 198208282008122001

KEPALA LPP TENGGARONG	
Kasi. Kamtib (Cs. V)	
Kasubsi. Keamanan (V)	
Kasubsi. Lap. Tatib (V)	

Tembusan
1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur
2. Petugas Yang Bersangkutan

LAMPIRAN SURAT PERINTAH PENGAWALAN
Nomor : W18.PAS.PAS.7.UM.05.01 - 2398

NO	NAMA WARGA BINAAN	FOTO WBP	Petugas Pengawal
1.	Sephia Pramesti Binti Muhammad Fitri No register: BI.076.2023	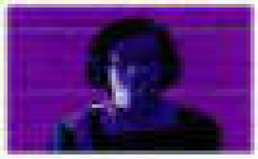	Andi Hasnaeni
			Bunga Noviyanti
2.	Evi Veronika Binti Oktevianus No register: BI.008.2023	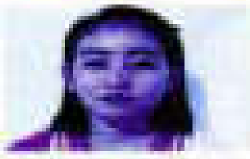	Yhuni Rindawati
			Randy Mamola
3.	Lediana Binti Senam No register: BI.032.2023		Adhiyani Maulina
			Nurul Huda F
4.	Asrianti Binti Arsa No register: BI.107.2023	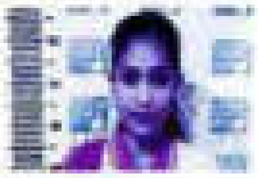	Siti Rahmah
			Fatimatazzuhra
5.	Anisa Amelia Binti Hariyanto No register: BI.108.2020	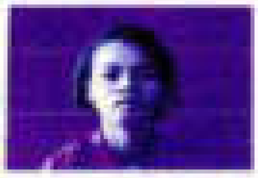	Nanang Budiyono
			Ni Made Peggi
6.	Aarinda Sari Binti Ahmad (Alm) No register: BI.108.2023		Yulinda Nur R
			Febry C.S

Catatan :

1. Bagi Seluruh Petugas Mengenakan Pakaian [redacted] dan [redacted]

DOKUMENTASI PENGARAHAN KEPADA WARGA BINAAN

Dokumentasi pelaksanaan pengarahan kepada Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong tentang pentingnya pendidikan sebagai upaya dalam **meningkatkan jumlah Narapidana yang memperoleh pendidikan.**

Hari/Tanggal : Selasa, 19 November 2024
Tempat : Blok Hunian
Pengarahan kepada WBP terkait kejar paket

FORM 7D
PENJATUHAN
HUKDIS

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jl. Imam Bonjol No.37 Kampung Melayu Tenggarong, Kutai Kartanegara
Telepon 0541-6720100

FORMULIR KAMTIB 7D
LAPORAN PENINDAKAN GANGGUAN KAMTIB
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN WBP
BULAN : NOVEMBER 2024

NO	JENIS GANGGUAN		IDENTITAS WBP	STATUS	TGL/HARI/JAM KEJADIAN	NO SK PENJATUHAN DISIPLIN	HUKUMAN DISIPLIN	TINDAK LANJUT	KETERANGAN/URAIAN KEJADIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1. Ringan	a. Tidak menjaga kebersihan diri dan lingkungan							
		b. Meninggalkan blok hunian tanpa izin kepada petugas blok							
		c. Tidak mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan							
		d. Tidak mengikuti apel pada waktu yang telah ditentukan							
		e. Mengenakan anting,kalung,cincin dan ikat							
		f. Melakukan perbuatan atau mengeluarkan perkataan yang tidak pantas dan melanggar norma kesopanan atau kesusilaan							
		g. Melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang tim pengamat pemasyarakatan termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan hukuman disiplin tingkat ringan							
	2. Sedang	a. Memasuki steril area tanpa izin petugas							
		f. Melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori yang mendapatkan hukuman disiplin tingkat ringan secara berulang lebih dari satu kali							
		g. Melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang tim pengamat pemasyarakatan termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang							
	3. Berat	a. Tidak mengikuti program pembinaan yang telah ditetapkan							
		b. Mengancam, melawan, atau melakukan penyerangan terhadap petugas							
		c. Membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya							
		d. Merusak fasilitas Lapas atau Rutan							
		e. Mengancam, memprovokasi, atau perbuatan lain yang menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban							
		f. Memiliki, membawa, atau menggunakan alat komunikasi atau alat elektronik							
		g. Membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol							
		h. Membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan atau mengkonsumsi narkotika dan obat terlarang serta zat adiktif lainnya							
		i. Melakukan upaya melarikan diri atau membantu narapidana atau tahanan lain untuk melarikan diri							
		k. Melakukan pemasangan atau menyuruh orang lain melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian							
		l. Melengkapi untuk kepentingan pribadi diluar ketentuan yang berlaku dengan alat pendingin, kipas angin, kompor, televisi, slot pintu, dan atau/ alat elektronik lainnya							
		m. Melakukan perbuatan asusila atau penyimpangan sexsual							
		n. Melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, penipuan							
		o. Menyebarkan ajaran sesat							
		p. Melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori yang mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang secara berulang lebih dari satu kali atau berdasarkan penilaian sidang							
		q. Melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang TPP termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan hukuman disiplin tingkat berat	FUTHIA JIHADI A'LA BINTI SUDARMADJI No. Register : BI.051.2024	Narapidana	28 Oktober 2024	W18.PAS.PAS.7-UM.05.03- 2619	1) memasukan dalam kamar isolasi selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari dan dicatat dalam register H 2) tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register F	1) Kepala Lapas, Ka. KPLP, Kasi Adm. Kamtib langsung melakukan pemeriksaan terhadap WBP yang bersangkutan 2) Kepala Lapas beserta Jajaran Pejabat Struktural melakukan pengarahan kepada seluruh WBP mengenai tata tertib lapas dan kembali menegaskan TIDAK ADANYA PUNGLI DI SEMUA JENIS LAYANAN LPP TENGGARONG 3) Melakukan pengawasan kontrol blok hunian secara berkala utamanya ketika kegiatan WBP menelepon di wartelsuspas 4) Melakukan Sidang TPP terkait pelanggaran tata tertib tersebut	

Tenggarong, 02 Desember 2024
Plh. K E P A L A

YHUNI RINDAWATI
NIP.19830617 200501 2 001